



**BUPATI KONAWE UTARA  
PROVINSI SULAWESI TENGGARA**

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN KONAWE UTARA  
NOMOR 11 TAHUN 2021**

**TENTANG**

**RENCANA PEMBANGUNAN  
JANGKA MENENGAH DAERAH  
KABUPATEN KONAWE UTARA  
TAHUN 2021 - 2026**





BUPATI KONAWE UTARA  
PROVINSI SULAWESI TENGGARA

PERATURAN DAERAH KABUPATEN KONAWE UTARA  
NOMOR 11 TAHUN 2021

TENTANG

RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH KABUPATEN  
KONAWE UTARA TAHUN 2021 - 2026

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KONAWE UTARA,

- Menimbang:
- a. bahwa dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan, pengelolaan pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat, untuk periode 2021-2026 telah terpilih Bupati dan Wakil Bupati Konawe Utara, maka perlu disusun Rencana pembangunan Jangka Menengah Daerah untuk kurun waktu 5 (lima) tahun sebagai penjabaran visi, misi dan program Bupati dan Wakil Bupati terpilih;
  - b. Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 264 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Konawe Utara Tahun 2021-2026;

- Mengingat:
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
  2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
  3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
  4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4438);
  5. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2007 tentang pembentukan Kabupaten Konawe Utara Provinsi Sulawesi Tenggara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 15, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4689);
  6. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
  7. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);

8. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4868);
9. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
10. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
11. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6373);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 6042);

13. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6633);
18. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2020-2024. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;

20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2018 tentang Pembuatan dan Pelaksanaan Kajian Lingkungan Hidup Strategis Dalam Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 459)
22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 100 Tahun 2018 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1540)
23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
24. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
25. Peraturan Daerah Kabupaten Konawe Utara Nomor 20 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah

- (RTRW) Kabupaten Konawe Utara Tahun 2012 - 2032;
26. Peraturan Daerah Kabupaten Konawe Utara Nomor 2 Tahun 2014 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Konawe Utara 2012 - 2032;
  27. Peraturan Daerah Kabupaten Konawe Utara Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Konawe Utara sebagaimana telah diubah melalui Peraturan Daerah Kabupaten Konawe Utara Nomor 1 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Konawe Utara Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Konawe Utara;

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN KONAWE UTARA  
dan  
BUPATI KONAWE UTARA

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH TENTANG RENCANA  
PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH  
KABUPATEN KONAWE UTARA TAHUN 2021 - 2026.**

## BAB II KETENTUAN UMUM

### Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah Kabupaten adalah Daerah Kabupaten Kabupaten Konawe Utara.
2. Pemerintah Daerah Kabupaten adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom
3. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
4. Bupati adalah Bupati Konawe Utara.
5. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Konawe Utara.
6. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah yang selanjutnya disingkat BAPPEDA adalah Perangkat Daerah yang melaksanakan tugas dan mengkoordinasikan penyusunan, pengendalian dan evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan Daerah.
7. Perangkat Daerah Kabupaten adalah unsur pembantu Bupati dan DPRD dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah Kabupaten.
8. Pembangunan Daerah adalah usaha yang sistematis untuk pemanfaatan sumber daya yang dimiliki Daerah Kabupaten untuk peningkatan dan pemerataan pendapatan masyarakat, kesempatan kerja, lapangan berusaha, meningkatkan akses dan kualitas pelayanan publik dan daya saing Daerah Kabupaten sesuai dengan urusan pemerintahan sesuai kewenangannya.
9. Perencanaan Pembangunan Daerah adalah suatu proses untuk menentukan kebijakan masa depan melalui urutan pilihan yang melibatkan berbagai unsur pemangku kepentingan, guna pemanfaatan dan pengalokasian sumber daya yang ada dalam jangka waktu tertentu di Daerah.

10. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah yang selanjutnya disingkat RPJPD adalah dokumen perencanaan pembangunan Daerah Kabupaten untuk periode 20 (dua puluh) tahun.
11. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, yang selanjutnya disingkat RPJMD adalah dokumen perencanaan pembangunan Daerah Kabupaten untuk periode 5 (lima) tahun terhitung sejak dilantik sampai dengan berakhirnya masa jabatan Bupati.
12. Rencana Pembangunan Tahunan Daerah, yang selanjutnya disebut Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat RKPD adalah dokumen perencanaan Daerah Kabupaten untuk periode 1 (satu) tahun.
13. Masyarakat adalah orang perseorangan, kelompok orang termasuk masyarakat hukum adat atau badan hukum yang berkepentingan dengan kegiatan dan hasil pembangunan, baik sebagai penanggung biaya, pelaku, penerima manfaat maupun penanggung resiko.
14. Dunia Usaha adalah usaha mikro, usaha kecil, usaha menengah, dan usaha besar yang melakukan kegiatan ekonomi di Kabupaten Konawe Utara.
15. Perencanaan adalah proses untuk menentukan tindakan masa depan yang tepat, melalui urutan pilihan, dengan memperhitungkan sumber daya yang ada.
16. Perencanaan Pembangunan Tahunan Daerah adalah proses penyusunan rencana pembangunan Daerah yang dilaksanakan untuk menghasilkan dokumen perencanaan selama periode 1 (satu) tahun.
17. Rencana Strategis Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut Renstra Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 5 (lima) tahun.
18. Rencana Kerja Perangkat Daerah, yang selanjutnya disebut Renja Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.

19. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa, selanjutnya disingkat RPJM Desa, adalah Rencana Kegiatan Pembangunan Desa untuk jangka waktu 6 (enam) tahun.
20. Visi adalah rumusan umum mengenai keadaan yang diinginkan pada akhir periode perencanaan.
21. Misi adalah rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan visi.
22. Tujuan adalah suatu kondisi yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 5 (lima) tahun.
23. Sasaran adalah rumusan kondisi yang menggambarkan tercapainya tujuan, berupa hasil pembangunan Daerah Kabupaten/Perangkat Daerah Kabupaten yang diperoleh dari pencapaian hasil (outcome) program Perangkat Daerah.
24. Strategi adalah langkah berisikan program-program sebagai prioritas pembangunan Daerah Kabupaten/Perangkat Daerah Kabupaten untuk mencapai sasaran.
25. Program adalah penjabaran kebijakan dalam bentuk upaya yang berisi 1 (satu) atau lebih kegiatan dengan menggunakan sumberdaya yang disediakan, untuk mencapai hasil yang terukur sesuai dengan misi.
26. Kegiatan adalah bagian dari program yang dilaksanakan oleh 1 (satu) atau lebih Unit Kerja pada Perangkat Daerah sebagai bagian dari pencapaian sasaran terukur pada suatu program dan terdiri dari sekumpulan tindakan pengerahan sumberdaya, baik berupa personal, barang modal termasuk peralatan dan teknologi, dana, atau kombinasi dari beberapa atau semua jenis sumberdaya, sebagai masukan (input) untuk menghasilkan keluaran (output) dalam bentuk barang atau jasa.
27. Rencana Tata Ruang Wilayah yang selanjutnya disebut RTRW adalah rencana tata ruang yang bersifat umum dari wilayah Daerah Kabupaten, yang mengacu pada Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional, rencana tata ruang pulau/kepulauan dan Rencana Tata Ruang Kawasan Strategis Nasional.

28. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Daerah dan DPRD dan ditetapkan dengan peraturan daerah.

## BAB II RUANG LINGKUP RPJMD

### Pasal 2

- (1) RPJMD merupakan penjabaran visi, misi dan program Bupati dan Wakil Bupati yang memuat tujuan, sasaran, strategi, arah kebijakan, pembangunan daerah dan keuangan daerah, serta program Perangkat Daerah dan lintas Perangkat Daerah yang disertai dengan kerangka pendanaan bersifat indikatif untuk jangka waktu (lima) tahun yang disusun dengan berpedoman pada RPJPD dan RPJMN.
- (2) RPJMD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi pedoman dalam penyusunan RKPD, Rencana Strategis, Rencana Kerja Perangkat Daerah, dan RPJM Desa.

## BAB III TATA CARA PERENCANAAN

### Pasal 3

RPJMD berorientasi pada proses, dengan menggunakan pendekatan:

- a. teknokratik;
- b. partisipatif;
- c. politis;
- d. atas bawah (*top down*); dan
- e. bawah atas (*bottom up*)

#### Pasal 4

RPJMD berorientasi pada substansi, dengan menggunakan pendekatan:

- a. holistik-tematik;
- b. integratif; dan
- c. spasial

### BAB IV SISTEMATIKA

#### Pasal 5

Sistematika RPJMD Kabupaten Konawe Utara 2021-2026 terdiri dari :

Bab I : PENDAHULUAN

Memuat latar belakang, maksud dan tujuan, landasan hukum, hubungan RPJMD dengan dokumen perencanaan lainnya, proses penyusunan RPJMD dan sistematika penyusunan

Bab II : GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH

Memuat gambaran secara logis dasar-dasar analisis dan gambaran umum kondisi Daerah, yang meliputi aspek geografi dan demografi secara indikator kinerja penyelenggaraan Pemerintah Daerah Kabupaten.

Bab III : GAMBARAN KEUANGAN DAERAH

Memuat gambaran hasil pengolahan data dan analisis terhadap pengelolaan keuangan daerah sebagaimana telah dilakukan pada perumusan ke dalam sub bab.

Bab IV : PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS DAERAH

Memuat permasalahan dan isu strategis yang akan menentukan kinerja pembangunan dalam 5 (lima) tahun mendatang. Penyajian isu-isu strategis meliputi permasalahan pembangunan daerah dan isu strategis.

Bab V : VISI, MISI, TUJUAN, DAN SASARAN

Menjelaskan visi dan misi Pemerintah Daerah untuk kurun waktu 5 (lima) tahun ke depan, tujuan dan sasaran serta indikator kinerja setiap misi pembangunan.

Bab VI : STRATEGI, ARAH KEBIJAKAN DAN PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH

Memuat dan menjelaskan strategi yang dipilih dalam mencapai tujuan dan sasaran serta arah kebijakan dari setiap strategi terpilih.

Bab VII : KERANGKA PENDANAAN PEMBANGUNAN DAN PROGRAM PERANGKAT DAERAH

Memuat program prioritas dalam pencapaian visi dan misi serta seluruh program yang dirumuskan dalam Renstra Perangkat Daerah beserta indikator kinerja, pagu indikatif target, perangkat daerah penanggung jawab berdasarkan bidang urusan.

Bab VIII : KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH

Memuat gambaran tentang ukuran keberhasilan pencapaian visi dan misi Bupati dan Wakil Bupati yang ditetapkan menjadi Indikator Kinerja Utama (IKU) daerah dan indikator kinerja penyelenggaraan pemerintah daerah yang ditetapkan menjadi Indikator Kinerja Kunci (IKK) pada akhir periode masa jabatan.

BAB IX : PENUTUP

Memuat pedoman transisi serta kaidah pelaksanaannya.

Pasal 6

Isi beserta uraian RPJMD Kabupaten Konawe Utara sebagaimana dimaksud dalam pasal 5, tercantum dalam Lampiran sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

## BAB V PELAKSANAAN RPJMD

### Pasal 7

- (1) RPJMD sebagai pedoman dalam penyusunan RKPD, Rencana Strategis Perangkat Daerah, Renja Perangkat daerah serta dokumen perencanaan pembangunan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang - undangan.
- (2) RKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), merupakan dokumen perencanaan pembangunan daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
- (3) Renstra Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), merupakan dokumen perencanaan pembangunan jangka menengah perangkat daerah untuk periode 5 (lima) tahun terhitung sejak tahun 2022 sampai dengan tahun 2026.
- (4) Renja Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), merupakan dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
- (5) RPJMD menjadi acuan Pemerintah Desa menyusun perencanaan Pembangunan Desa sesuai dengan kewenangannya.

## BAB VI PENGENDALIAN DAN EVALUASI

### Pasal 8

- (1) Pemerintah Kabupaten melakukan pengendalian dan evaluasi terhadap pelaksanaan RPJMD.
- (2) Pengendalian dan evaluasi terhadap pelaksanaan RPJMD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mencakup pelaksanaan Renstra Perangkat Daerah dan RPJMD.

- (3) Kepala Perangkat Daerah melakukan Pengendalian dan Evaluasi terhadap pelaksanaan Renstra Perangkat daerah.
- (4) Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten melaksanakan pengendalian dan evaluasi terhadap pelaksanaan RPJMD.
- (5) Mekanisme dan tata cara pengendalian dan evaluasi pelaksanaan RPJMD mengacu pada peraturan perundang-undangan.

## BAB VII PERUBAHAN RPJMD

### Pasal 9

- (1) Perubahan RPJMD dapat dilakukan apabila :
  - a. hasil pengendalian dan evaluasi menunjukkan bahwa proses perumusan, tidak sesuai dengan tahapan dan tata cara penyusunan rencana pembangunan daerah sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan;
  - b. hasil pengendalian dan evaluasi menunjukkan bahwa substansi yang dirumuskan, tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
  - c. terjadi perubahan yang mendasar, mencakup antara lain terjadinya bencana alam, guncangan politik, krisis ekonomi, konflik sosial budaya, gangguan keamanan, pemekaran Daerah, atau perubahan kebijakan nasional.
- (2) Dalam rangka efektivitas, perubahan RPJMD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan c tidak dapat dilakukan apabila sisa masa berlaku RPJMD kurang dari 3 (tiga) tahun.
- (3) Perubahan RPJMD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi pedoman RKPD dan Perubahan Renstra Perangkat Daerah.

## BAB VIII KETENTUAN PERALIHAN

### Pasal 10

- (1) Dalam rangka menjaga kesinambungan pembangunan Bupati dan Wakil Bupati wajib menyusun RKPD pada tahun terakhir pemerintahannya.
- (2) Penyusunan RKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), merupakan dokumen perencanaan untuk tahun pertama periode pemerintahan tahun berikutnya dengan memperhatikan target kinerja RPJMD 2021-2026 yang belum tercapai, sebelum RPJMD periode berikutnya ditetapkan.
- (3) RKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), menjadi pedoman dalam penyusunan APBD tahun pertama periode pemerintahan Bupati dan Wakil Bupati terpilih berikutnya.
- (4) RPJMD dijadikan dasar Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Bupati Tahun 2022 sampai dengan Tahun 2026.

## BAB IX PENUTUP

### Pasal 11

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku :

Peraturan Daerah Kabupaten Konawe Utara Nomor 6 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Konawe Utara Tahun 2016-2021 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Konawe Utara Tahun 2016-2021;

Dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 12

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Konawe Utara.

Ditetapkan di Wanggudu  
pada tanggal 25 Oktober 2021

BUPATI KONAWE UTARA,

ttd

RUKSAMIN

Diundangkan di Wanggudu  
pada tanggal 25 Oktober 2021

SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN KONAWE UTARA,

ttd

KASIM PAGALA

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KONAWE UTARA TAHUN 2021  
NOMOR 125

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN KONAWE UTARA PROVINSI  
SULAWESI TENGGARA : (11/118/2021)

Salinan Sesuai Aslinya

Kepala Bagian Hukum  
Setda Kabupaten Konawe Utara



**RAM ASYUR SUPU, SH**  
Pembina Tk. I, Gol. IV/b  
Nip. 19670420 200312 1 005

PENJELASAN  
ATAS  
PERATURAN DAERAH KABUPATEN KONAWE UTARA  
NOMOR 11 TAHUN 2021  
TENTANG  
RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH  
KABUPATEN KONAWE UTARA TAHUN 2021- 2026

I. UMUM

Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah, pasal 264 ayat (4) yang menyatakan bahwa Peraturan Daerah tentang RPJMD ditetapkan paling lama 6 (enam) bulan setelah Kepala daerah terpilih dilantik. Berdasarkan ketentuan Pasal 263 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah menyebutkan bahwa RPJMD merupakan penjabaran visi, misi dan program kepala daerah yang memuat tujuan, sasaran, strategi, arah kebijakan, pembangunan daerah dan keuangan daerah, serta program perangkat daerah dan lintas perangkat daerah yang disertai dengan kerangka pendanaan bersifat indikatif untuk jangka waktu 5 (lima) tahun yang disusun dengan berpedoman pada RPJPD dan RPJMN.

RPJMD dijabarkan kedalam siklus rencana tahunan sebagai RKPD yang memuat prioritas pembangunan daerah, rancangan kerangka ekonomi makro, serta program perangkat daerah, lintas perangkat daerah dan program kewilayahan beserta rencana-rencana kerja dalam kerangka regulasi dan kerangka pendanaan yang bersifat indikatif.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, mengamanatkan bahwa perencanaan daerah dirumuskan secara transparan, responsif, efisien, efektif, akuntabel, partisipatif, terukur, berkeadilan dan berwawasan lingkungan.

Keberhasilan dalam pelaksanaan RPJMD sangat tergantung dari kesepakatan, kesepahaman serta komitmen bersama antara semua pemangku kepentingan di Kabupaten Konawe Utara,

## II. PASAL DEMI PASAL

### Pasal 1

Cukup Jelas

### Pasal 2

Cukup Jelas

### Pasal 3

#### Huruf a

Yang dimaksud dengan “pendekatan teknokratik” adalah dilaksanakan dengan menggunakan metode dan kerangka berpikir ilmiah untuk mencapai tujuan dan sasaran pembangunan Daerah.

#### Huruf b

Yang dimaksud dengan “pendekatan partisipatif” adalah dilaksanakan dengan melibatkan berbagai pemangku kepentingan.

Huruf c

Yang dimaksud dengan “pendekatan politis” adalah dilaksanakan dengan menerjemahkan visi dan misi Kepala daerah terpilih kedalam dokumen perencanaan pembangunan jangka menengah yang dibahas bersama dengan DPRD.

Huruf d

Yang dimaksud dengan “pendekatan atas-bawah (top down) dan bawah-atas (bottom up)” adalah hasil perencanaan yang diselaraskan dalam musyawarah pembangunan.

Pasal 4

Huruf a

Yang dimaksud dengan “pendekatan holistik-tematik” adalah dilaksanakan dengan mempertimbangkan keseluruhan unsur/bagian/kegiatan pembangunan sebagai satu kesatuan faktor potensial, tantangan, hambatan dan/atau permasalahan yang saling berkaitan satu dengan lainnya.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “pendekatan integratif” adalah dilaksanakan dengan menyatukan beberapa kewenangan ke dalam satu proses terpadu dan fokus yang jelas dalam upaya pencapaian tujuan pembangunan daerah.

Huruf c

Yang dimaksud dengan “pendekatan spasial” adalah dilaksanakan dengan mempertimbangkan dimensi keruangan dalam perencanaan.

Pasal 5

Cukup Jelas

Pasal 6

Cukup Jelas

Pasal 7

Cukup Jelas

Pasal 8

Cukup Jelas

Pasal 9

Cukup Jelas

Pasal 10

Cukup Jelas

Pasal 11

Cukup Jelas

Pasal 12

Cukup Jelas



BUPATI KONAWE UTARA  
PROVINSI SULAWESI TENGGARA

LAMPIRAN  
PERATURAN DAERAH KABUPATEN KONAWE UTARA  
NOMOR 11 TAHUN 2021

TENTANG

**RENCANA PEMBANGUNAN  
JANGKA MENENGAH DAERAH  
KABUPATEN KONAWE UTARA  
TAHUN 2021 - 2026**



**Narasi**



**Pemerintah Kabupaten Konawe Utara  
Badan Perencanaan Pembangunan Daerah / BAPPEDA  
Tahun 2021**

Jl. Lintas Timur Sulawesi (Trans Sulawesi), Komp. Perkantoran Pemda Kab. Konawe Utara  
Kel. Wanggudu - Kec. Asera 93353  
[konaweutarakab.go.id](http://konaweutarakab.go.id) - [bappedakabkonut@gmail.com](mailto:bappedakabkonut@gmail.com)

# PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan kehadirat Allah Subhanahu Wata'ala, Tuhan Yang Maha Esa yang telah memberikan taufik, rahmat, dan hidayah-Nya, sehingga penyusunan Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Konawe Utara Tahun 2021-2026 dapat diselesaikan sesuai dengan target yang telah ditetapkan.

Penyusunan RPJMD diamanatkan oleh Undang-Undang Nomor 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, serta Peraturan Menteri Dalam negeri Nomor 86 Tahun 2017. Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2021 tentang RPJMD Kabupaten Konawe Utara Tahun 2021-2026 merupakan penyempurnaan Rancangan Akhir setelah mendapatkan masukan dari proses Musrenbang, pembahasan bersama Badan Legislasi DPRD Kabupaten Konawe Utara, serta masukan berdasarkan hasil evaluasi dengan Gubernur Provinsi Sulawesi Tenggara melalui Bappeda Provinsi Sulawesi Tenggara.

Harapan Kami semoga dokumen ini dapat bermanfaat dan menjadi dasar bagi pelaksanaan perencanaan pembangunan di Kabupaten Konawe Utara untuk lima tahun ke depan guna menjawab berbagai permasalahan daerah untuk mewujudkan Visi Konawe Utara Lebih Sejahtera dan Berdaya Saing.

Wanggudu, Oktober 2021

Bupati Konawe Utara,



**Dr. Ir. H. RUKSAMIN, ST, M.Si, IPU, ASEAN.Eng**

# DAFTAR ISI

|  |              |
|--|--------------|
| <b>KATA PENGANTAR .....</b>  | <b>ii</b>    |
| <b>DAFTAR ISI .....</b>  | <b>iii</b>   |
| <b>DAFTAR TABEL .....</b>  | <b>x</b>     |
| <b>DAFTAR GAMBAR .....</b>   | <b>xviii</b> |
| <b>BAB I      PENDAHULUAN .....</b>                                | <b>I -1</b>  |
| 1.1. Latar Belakang .....  | I-2          |
| 1.2. Dasar Hukum Penyusunan .....                                  | I-6          |
| 1.3. Hubungan Antar Dokumen .....                                  | I-12         |
| 1.3.1. RPJMN Tahun 2020 - 2024 .....                               | I-13         |
| 1.3.2. RPJPD Kabupaten Konawe Utara.....                           | I-15         |
| 1.3.3. Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS)<br>RPJMD .....     | I-18         |
| 1.3.4. RTRWN.....  | I-18         |
| 1.3.5. RPJMD Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun<br>2018 – 2023 ..... | I-40         |
| 1.3.6. RTRW Kabupaten Konawe Utara Tahun<br>2012 - 2032.....       | I-40         |
| 1.3.7. RPJMD Daerah Sekitar .....                                  | I-41         |
| 1.3.8. Dokumen Perencanaan Multi Sektor .....                      | I-42         |
| 1.3.9. Rencana Strategis Perangkat Daerah.....                     | I-42         |
| 1.3.10. Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD).....                | I-42         |
| 1.4. Maksud dan Tujuan .....                                       | I-42         |
| 1.5. Sistematika Penulisan .....                                   | I-43         |
| <b>BAB II      GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH.....</b>               | <b>II-1</b>  |
| 2.1. Aspek Gegografi dan Demografi .....                           | II-2         |
| 2.1.1. Karakteristik Lokasi dan Wilayah.....                       | II-2         |
| 2.1.1.1. Kondisi Topografi .....                                   | II-4         |
| 2.1.1.2. Kondisi Geologi .....                                     | II-4         |

|          |  |       |
|----------|--|-------|
| 2.1.1.3. | Hidrologi dan Hidrogeologi .....   | II-5  |
| 2.1.1.4. | Kondisi Klimatologi .....  | II-6  |
| 2.1.1.5. | Penggunaan Lahan .....   | II-7  |
| 2.1.2.   | Potensi Pengembangan Wilayah .....                                       | II-8  |
| 2.1.3.   | Wilayah Rawan Bencana .....  | II-9  |
| 2.1.4.   | Kondisi Demografi .....  | II-11 |
| 2.2.     | Aspek Kesejahteraan Masyarakat .....                                     | II-15 |
| 2.2.1.   | Fokus Kesejahteraan dan Pemerataan Ekonomi.                              | II-16 |
| 2.2.1.1. | Indeks Pembangunan Manusia<br>(IPM) .....                                | II-16 |
| 2.2.1.2. | Pertumbuhan Produk Domestik<br>Regional Bruto (PDRB) .....               | II-18 |
| 2.2.1.3. | Struktur Ekonomi .....   | II-24 |
| 2.2.1.4. | PDRB Perkapita .....   | II-25 |
| 2.2.1.5. | Laju Inflasi .....   | II-26 |
| 2.2.1.6. | Koefesien Gini (Ketimpangan) .....                                       | II-27 |
| 2.2.1.7. | Tingkat Kemiskinan .....   | II-28 |
| 2.2.2.   | Fokus Kesejahteraan Sosial.....  | II-29 |
| 2.2.2.1. | Angka Harapan Lama Sekolah .....   | II-29 |
| 2.2.2.2. | Angka Rata-Rata Lama Sekolah .....                                       | II-30 |
| 2.2.2.3. | Angka Kematian Bayi .....  | II-31 |
| 2.2.2.4. | Angka Kematian Ibu .....   | II-32 |
| 2.2.2.5. | Angka Harapan Hidup .....  | II-33 |
| 2.2.3.   | Fokus Seni Budaya dan Olahraga .....                                     | II-34 |
| 2.3.     | Aspek Pelayanan Umum .....   | II-35 |
| 2.3.1    | Urusan Pemerintahan Wajib yang Berkaitan<br>dengan Pelayanan Dasar ..... | II-35 |
| 2.3.1.1. | Pendidikan .....   | II-35 |
| 2.3.1.2. | Kesehatan .....  | II-40 |
| 2.3.1.3. | Pekerjaan Umum dan<br>Penataan Ruang .....                               | II-50 |

|           |   |       |
|-----------|---|-------|
| 2.3.1.4.  | Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman .....                               | II-56 |
| 2.3.1.5.  | Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat .....             | II-61 |
| 2.3.1.6.  | Sosial .....  | II-62 |
| 2.3.2     | Urusan Pemerintahan Wajib yang Tidak Berkaitan dengan Pelayanan Dasar ..... | II-63 |
| 2.3.2.1.  | Tenaga Kerja .....  | II-63 |
| 2.3.2.2.  | Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak .....                          | II-64 |
| 2.3.2.3.  | Pangan .....  | II-66 |
| 2.3.2.4.  | Pertanahan .....  | II-67 |
| 2.3.2.5.  | Lingkungan Hidup .....  | II-68 |
| 2.3.2.6.  | Administrasi Kependudukan dan Catatan Sipil .....                           | II-69 |
| 2.3.2.7.  | Pemberdayaan Masyarakat dan Desa ..   | II-70 |
| 2.3.2.8.  | Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana .....                          | II-71 |
| 2.3.2.9.  | Perhubungan .....   | II-73 |
| 2.3.2.10. | Komunikasi dan Informatika .....  | II-77 |
| 2.3.2.11. | Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah .....                                    | II-78 |
| 2.3.2.12. | Penanaman Modal .....   | II-80 |
| 2.3.2.13. | Kepemudaan dan Olahraga .....   | II-81 |
| 2.3.2.14. | Statistik .....   | II-81 |
| 2.3.2.15. | Persandian .....  | II-82 |
| 2.3.2.16. | Kebudayaan .....  | II-82 |
| 2.3.2.17. | Perpustakaan .....  | II-83 |
| 2.3.2.18. | Kearsipan .....   | II-83 |
| 2.3.3     | Fokus Layanan Urusan Pilihan .....  | II-84 |

|          |  |        |
|----------|--|--------|
| 2.3.3.1. | Kelautan dan Perikanan .....                         | II-84  |
| 2.3.3.2. | Pariwisata .....                                     | II-85  |
| 2.3.3.3. | Pertanian .....                                      | II-86  |
| 2.3.3.4. | Perkebunan .....                                     | II-87  |
| 2.3.3.5. | Kehutanan .....                                      | II-88  |
| 2.3.3.6. | Energi dan Sumber Daya Mineral .....                 | II-88  |
| 2.3.3.7. | Perdagangan .....                                    | II-89  |
| 2.3.3.8. | Perindustrian .....                                  | II-90  |
| 2.3.3.9. | Transmigrasi .....                                   | II-91  |
| 2.3.4    | Unsur Pendukung .....                                | II-92  |
| 2.3.4.1. | Sekretariat Daerah .....                             | II-92  |
| 2.3.4.2. | Sekretariat DPRD .....                               | II-93  |
| 2.3.5.   | Unsur Penunjang .....                                | II-94  |
| 2.3.5.1. | Perencanaan .....                                    | II-94  |
| 2.3.5.2. | Keuangan .....                                       | II-96  |
| 2.3.5.3. | Kepegawaian, Pendidikan dan<br>Pelatihan .....       | II-99  |
| 2.3.6    | Unsur Pengawasan.....                                | II-101 |
| 2.3.6.1  | Pengawasan (Inspektorat Daerah) .....                | II-101 |
| 2.3.7    | Unsur Kewilayahan .....                              | II-103 |
| 2.4.     | Aspek Daya Saing Daerah .....                        | II-104 |
| 2.4.1    | Fokus Kemampuan Ekonomi Daerah .....                 | II-104 |
| 2.4.1.1  | Kemampuan Ekonomi Daerah .....                       | II-104 |
| 2.4.1.2  | Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga<br>Perkapita ..... | II-104 |
| 2.4.2    | Fokus Fasilitas Wilayah/Infrastruktur .....          | II-105 |
| 2.4.2.1  | Wilayah Produktif .....                              | II-105 |
| 2.4.2.2  | Penyediaan Air Minum .....                           | II-106 |

|                |  |   |              |
|----------------|--|---|--------------|
|                | 2.4.2.3  | Penyediaan Energi Listrik .....                         | II-107       |
|                | 2.4.2.4  | Penyediaan Jaringan Telekomunikasi ....                 | II-108       |
|                | 2.4.3  | Fokus Iklim Berinvestasi .....                          | II-109       |
|                | 2.4.3.1  | Angka Kriminalitas .....                                | II-109       |
|                | 2.4.3.2  | Jumlah Demonstrasi .....                                | II-110       |
|                | 2.4.3.3  | Kemudahan Perizinan .....                               | II-110       |
|                | 2.4.3.4  | Peraturan Daerah Yang Mendukung<br>Iklim Usaha .....    | II-116       |
|                | 2.4.3.5  | Perkembangan Pembangunan Desa .....                     | II-116       |
|                | 2.4.4  | Fokus Sumber Daya Manusia .....                         | II-123       |
|                | 2.4.4.1  | Rasio Ketergantungan .....                              | II-124       |
|                | 2.5  | Capaian Kinerja RPJMD 2016-2021 .....                   | II-125       |
| <b>BAB III</b> | <b>GAMBARAN KEUANGAN DAERAH .....</b>              |   | <b>III-1</b> |
|                | 3.1.   | Kinerja Keuangan Masa Lalu .....                        | III-3        |
|                | 3.1.1.   | Kinerja pelaksanaan APBD .....                          | III-4        |
|                | 3.1.2.   | Neraca Daerah .....                                     | III-17       |
|                | 3.2.   | Kebijakan Pengelolaan Keuangan Tahun Masa Lalu .....    | III-23       |
|                | 3.2.1.   | Kinerja Belanja Daerah .....                            | III-23       |
|                | 3.2.2.   | Proporsi Penggunaan Anggaran .....                      | III-27       |
|                | 3.2.3.   | Analisis Pembiayaan .....                               | III-28       |
|                | 3.3.   | Kerangka Pendanaan .....                                | III-34       |
|                | 3.3.1.   | Proyeksi Keuangan Daerah .....                          | III-34       |
|                | 3.3.2.   | Perhitungan Kerangka Pendanaan .....                    | III-39       |
| <b>BAB IV</b>  | <b>PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS DAERAH .....</b> |   | <b>IV-1</b>  |
|                | 4.1.   | Permasalahan Pembangunan .....                          | IV-2         |
|                | 4.2.   | Isu Strategis .....                                     | IV-24        |
|                | 4.2.1.   | Isu Global/ Internasional .....                         | IV-25        |
|                | 4.2.1.1  | Komitmen Pencapaian Tujuan<br>Pembangunan Berkelanjutan |              |

|                |  |              |
|----------------|--|--------------|
|                | (TPB)/Sustainable Development Goals                    |              |
|                | (SDGs .....  | IV-25        |
|                | 4.2.1.2 Kesadaran Aksi Global Terkait Climate          |              |
|                | Action (Aksi Iklim).....                               | IV-30        |
|                | 4.2.1.3 Dampak Pandemi Covid-19.....                   | IV-31        |
|                | 4.2.1.4 Perkembangan Teknologi Informasi               |              |
|                | (Revolusi Industri 4.0).....                           | IV-37        |
|                | 4.2.2. Isu Nasional yang Tercantum dalam RPJMN         |              |
|                | 2020 - 2024.....                                       | IV-38        |
|                | 4.2.3. Isu Strategis Provinsi Sulawesi Tenggara        |              |
|                | 2018 - 2023 .....                                      | IV-40        |
|                | 4.2.4. Isu Strategis Yang Dihasilkan Dari Kajian       |              |
|                | Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) RPJMD                |              |
|                | Kabupaten Konawe Utara Tahun 2021-2026 .....           | IV-41        |
|                | 4.2.5. Rumusan Isu - Isu Strategis Kabupaten           |              |
|                | Konawe Utara .....                                     | IV-42        |
| <b>BAB V</b>   | <b>VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN PEMBANGUNAN.....</b> | <b>V-1</b>   |
|                | 5.1 Visi .....   | V-2          |
|                | 5.2 Misi.....  | V-3          |
|                | 5.3 Tujuan dan Sasaran Pembangunan .....               | V-12         |
| <b>BAB VI</b>  | <b>STRATEGI, ARAH KEBIJAKAN, DAN PROGRAM</b>           |              |
|                | <b>PEMBANGUNAN.....</b>                                | <b>VI-1</b>  |
|                | 6.1 Strategi.....                                      | VI-2         |
|                | 6.2 Arah Kebijakan Pembangunan Daerah.....             | VI-7         |
|                | 6.3 Arah Kebijakan Pembangunan Kewilayahan.....        | VI-19        |
|                | 6.4 Program Pembangunan Daerah .....                   | VI-22        |
| <b>BAB VII</b> | <b>KERANGKA PENDANAAN DAN PROGRAM PERANGKAT</b>        |              |
|                | <b>DAERAH .....</b>                                    | <b>VII-1</b> |
|                | 7.1 Kerangka Pendanaan Pembangunan.....                | VII-2        |
|                | 7.2 Program Perangkat Daerah .....                     | VII-2        |
|                | 7.2.1 Urusan Wajib Yang Berkaitan Dengan               |              |
|                | Pelayanan Dasar .....                                  | VII-3        |

|                 |   |               |
|-----------------|---|---------------|
| 7.2.2           | Urusan Wajin Yang Tidak Berkaitan Dengan<br>Pelayanan Dasar ..... | VII-5         |
| 7.2.3           | Urusan Pilihan.....   | VII-8         |
| 7.2.4           | Unsur Pendukung Urusan Pemerintahan.....                          | VII-10        |
| 7.2.5           | Unsur Penunjang Urusan Pemerintahan .....                         | VII-10        |
| 7.2.6           | Unsur Kewilayahan.....  | VII-11        |
| 7.2.7           | Unsur Pemerintahan Umum .....                                     | VII-11        |
| <b>BAB VIII</b> | <b>KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN</b>                       |               |
|                 | <b>DAERAH .....</b>   | <b>VIII-1</b> |
| <b>BAB IX</b>   | <b>PENUTUP .....</b>  | <b>IX-1</b>   |
| 9.1             | Pedoman Transisi .....  | IX-2          |
| 9.2             | Kaidah Pelaksanaan .....  | IX-2          |

# DAFTAR TABEL

|            |  |       |
|------------|--|-------|
| Tabel 1.1  | Integrasi Hasil KLHS RPJMD ke dalam Dokumen RPJMD Kabupaten Konawe Utara Tahun 2021-2026 ..... | I-19  |
| Tabel 1.1  | Integrasi Hasil KLHS RPJMD ke dalam Dokumen RPJMD Kabupaten Konawe Utara Tahun 2021-2026.....  | I-19  |
| Tabel 2.1  | Luas Wilayah Kecamatan di Kabupaten Konawe Utara .....   | II-3  |
| Tabel 2.2  | Luas Wilayah dan Jenis Tanah di Kabupaten Konawe Utara .....                                   | II-5  |
| Tabel 2.3  | Keadaan Curah Hujan Kabupaten Konawe Utara Tahun 2020 .....                                    | II-6  |
| Tabel 2.4  | Luas Penggunaan Lahan di Kabupaten Konawe Utara Tahun 2020.....                                | II-7  |
| Tabel 2.5  | Jumlah Penduduk Menurut Jenis Kelamin di Kabupaten Konawe Utara .....                          | II-12 |
| Tabel 2.6  | Jumlah Penduduk Menurut Kecamatan di Kabupaten Konawe Utara .....                              | II-13 |
| Tabel 2.7  | Jumlah dan Kepadatan Penduduk di Kabupaten Konawe Utara .....                                  | II-13 |
| Tabel 2.8  | Komposisi Penduduk Menurut Kelompok Umur Kabupaten Konawe Utara Tahun 2020 .....               | II-14 |
| Tabel 2.9  | Perkembangan IPM Kabupaten Konawe Utara .....  | II-17 |
| Tabel 2.10 | Laju Pertumbuhan Ekonomi di Kabupaten Konawe Utara ....  | II-19 |
| Tabel 2.11 | Persentase PDRB Atas Dasar Harga Berlaku di Kabupaten Konawe Utara .....                       | II-21 |
| Tabel 2.12 | Persentase PDRB Atas Dasar Harga Konstan (2010) di Kabupaten Konawe Utara .....                | II-22 |
| Tabel 2.13 | Perkembangan Persentase PDRB Atas Dasar Harga Berlaku di Kabupaten Konawe Utara .....          | II-23 |

|            |   |       |
|------------|---|-------|
| Tabel 2.14 | Perkembangan PDRB Perkapita di Kabupaten Konawe Utara .....                                     | II-25 |
| Tabel 2.15 | Tingkat Kemiskinan di Kabupaten Konawe Utara .....  | II-28 |
| Tabel 2.16 | Perkembangan Seni, Budaya dan Olahraga Kabupaten Konawe Utara .....                             | II-34 |
| Tabel 2.17 | Kondisi PAUD di Kabupaten Konawe Utara .....  | II-35 |
| Tabel 2.18 | Kondisi Pendidikan Dasar di Kabupaten Konawe Utara Tahun 2020 .....                             | II-36 |
| Tabel 2.19 | Perkembangan Angka Partisipasi Sekolah (APS) di Kabupaten Konawe Utara .....                    | II-37 |
| Tabel 2.20 | Angka Partisipasi Murni (APM) dan Angka Partisipasi Kasar (APK) di Kabupaten Konawe Utara ..... | II-38 |
| Tabel 2.21 | Sekolah Terakreditasi Kabupaten Konawe Utara .....  | II-39 |
| Tabel 2.22 | Pelaksanaan Standar Pelayanan Minimal Bidang Pendidikan Kabupaten Konawe Utara.....             | II-39 |
| Tabel 2.23 | Rasio Posyandu per 1000 Balita di Kabupaten Konawe Utara .....                                  | II-40 |
| Tabel 2.24 | Jumlah Fasilitas Pelayanan Kesehatan di Kabupaten Konawe Utara .....                            | II-41 |
| Tabel 2.25 | Penilaian Akreditasi Puskesmas di Kabupaten Konawe Utara .....                                  | II-41 |
| Tabel 2.26 | Rasio Jumlah Puskesmas, Pustu, Poskesdes, Polindes di Kabupaten Konawe Utara .....              | II-42 |
| Tabel 2.27 | Jumlah Tenaga Kesehatan di Kabupaten Konawe Utara .....   | II-43 |
| Tabel 2.28 | Rasio Jumlah Dokter Per Jumlah 1000 Penduduk di Kabupaten Konawe Utara .....                    | II-44 |
| Tabel 2.29 | Rasio Tenaga Medis Per Jumlah 1000 Penduduk di Kabupaten Konawe Utara .....                     | II-44 |
| Tabel 2.30 | Data Kepersertaan Jaminan Kesehatan di Kabupaten Konawe Utara .....                             | II-45 |

|            |  |       |
|------------|--|-------|
| Tabel 2.31 | Jumlah Balita Gizi Buruk di Kabupaten Konawe Utara .....                       | II-46 |
| Tabel 2.32 | Jumlah Balita Pendek (Stunting) di Kabupaten Konawe Utara .....                | II-46 |
| Tabel 2.33 | Angka Kesakitan di Kabupaten Konawe Utara .....                                | II-47 |
| Tabel 2.34 | Persentase PHBS di Kabupaten Konawe Utara .....                                | II-48 |
| Tabel 2.35 | Pelaksanaan SPM Kesehatan Kabupaten Konawe Utara.....                          | II-49 |
| Tabel 2.36 | Panjang Jalan di Kabupaten Konawe Utara .....                                  | II-51 |
| Tabel 2.37 | Kondisi Jalan di Kabupaten Konawe Utara .....                                  | II-51 |
| Tabel 2.38 | Kondisi Jaringan Irigasi di Kabupaten Konawe Utara .....                       | II-52 |
| Tabel 2.39 | Daerah Irigasi Yang Teraliri Dengan Baik di Kabupaten Konawe Utara .....       | II-53 |
| Tabel 2.40 | Tingkat Ketaatan Terhadap Rencana Tata Ruang di Kabupaten Konawe Utara.....    | II-54 |
| Tabel 2.41 | Ketersediaan Prasarana Perumahan Kabupaten Konawe Utara .....                  | II-56 |
| Tabel 2.42 | Proyek Kebutuhan Rumah setiap Kecamatan di Kabupaten Konawe Utara.....         | II-57 |
| Tabel 2.43 | Ketersediaan Prasarana Perumahan Kabupaten Konawe Utara.....                   | II-58 |
| Tabel 2.44 | Luas Kawasan Pemukiman Kumuh Kabupaten Konawe Utara.....                       | II-59 |
| Tabel 2.45 | Jumlah Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni di Kabupaten Konawe Utara .....        | II-61 |
| Tabel 2.46 | Tingkat Partisipasi Masyarakat Dalam Pemilu di Kabupaten Konawe Utara .....    | II-61 |
| Tabel 2.47 | Jumlah Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial di Kabupaten Konawe Utara ..... | II-62 |
| Tabel 2.48 | Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) di Kabupaten Konawe Utara .....      | II-63 |

|            |   |       |
|------------|---|-------|
| Tabel 2.49 | Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) di Kabupaten Konawe Utara .....  | II-64 |
| Tabel 2.50 | Kinerja Pemberdayaan Perempuan dan PA di Kabupaten Konawe Utara .....   | II-65 |
| Tabel 2.51 | Jumlah Kasus Kejahatan dan Kasus yang telah diselesaikan ..   | II-65 |
| Tabel 2.52 | Partisipasi Perempuan dalam berpolitik.....   | II-66 |
| Tabel 2.53 | Kinerja Urusan Pangan di Kabupaten Konawe Utara .....   | II-67 |
| Tabel 2.54 | Perkembangan Status Hak Tanah di Kabupaten Konawe Utara .....   | II-68 |
| Tabel 2.55 | Kinerja Pengelolaan Lingkungan di Kabupaten Konawe Utara .....  | II-68 |
| Tabel 2.56 | Cakupan Penerbitan KTP di Kabupaten Konawe Utara .....  | II-69 |
| Tabel 2.57 | Cakupan Penerbitan Akta Kelahiran di Kabupaten Konawe Utara .....   | II-70 |
| Tabel 2.58 | Kinerja Pemberdayaan Masyarakat dan Desa di Kabupaten Konawe Utara .....  | II-71 |
| Tabel 2.59 | Kepersertaan Keluarga Berencana di Kabupaten Konawe Utara .....   | II-72 |
| Tabel 2.60 | Jumlah Kasus Pernikahan dan Perceraian yang tercatat.....   | II-72 |
| Tabel 2.61 | Jumlah Kampung KB di Kabupaten Konawe Utara.....  | II-72 |
| Tabel 2.62 | Sarana dan Prasarana Perhubungan di Kabupaten Konawe Utara.....   | II-73 |
| Tabel 2.63 | Prasarana Terminal Khusus/Terminal Untuk Kepentingan Sendiri Di Kabupaten Konawe Utara Tahun 2008 - 2021 .....                                | II-74 |
| Tabel 2.64 | Jumlah Sarana Transportasi Darat, Laut, Sungai dan Danau Di Kabupaten Konawe Utara .....  | II-76 |
| Tabel 2.65 | Kinerja Bidang Komunikasi dan Informatika di Kabupaten Konawe Utara .....   | II-77 |
| Tabel 2.66 | Alamat Subdomain Website Pemerintah Kabupaten Konawe Utara dan Penerapan Sistem Informasi/ Aplikasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah ..... | II-78 |

|            |   |       |
|------------|---|-------|
| Tabel 2.67 | Persentase Koperasi Aktif di Kabupaten Konawe Utara .....                           | II-78 |
| Tabel 2.68 | Perkembangan Modal dan aset Koperasi di Kabupaten Konawe Utara .....                | II-79 |
| Tabel 2.69 | Pertumbuhan Jumlah UMKM di Kabupaten Konawe Utara ....                              | II-79 |
| Tabel 2.70 | Penyerapan Tenaga Kerja Pada UMKM di Kabupaten Konawe Utara .....                   | II-80 |
| Tabel 2.71 | Jumlah dan Nilai Investasi PMDN/PMA di Kabupaten Konawe Utara .....                 | II-80 |
| Tabel 2.72 | Perkembangan Olahraga di Kabupaten Konawe Utara .....                               | II-81 |
| Tabel 2.73 | Kinerja Urusan Kebudayaan di Kabupaten Konawe Utara ....                            | II-82 |
| Tabel 2.74 | Kinerja Urusan Perpustakaan di Kabupaten Konawe Utara .....                         | II-83 |
| Tabel 2.75 | Kondisi Pengelolaan Sub Sektor Perikanan di Kabupaten Konawe Utara .....            | II-84 |
| Tabel 2.76 | Kondisi Pengelolaan Pariwisata Kabupaten Konawe Utara ..                            | II-85 |
| Tabel 2.77 | Perkembangan Kinerja Sektor Pertanian di Kabupaten Konawe Utara .....               | II-86 |
| Tabel 2.78 | Perkembangan Produktivitas Sub Sektor Perkebunan di Kabupaten Konawe Utara .....    | II-87 |
| Tabel 2.79 | Data Kondisi Pasar Tradisional/Rakyat di Kabupaten Konawe Utara .....               | II-89 |
| Tabel 2.80 | Jumlah Industri Kecil Menengah di Kabupaten Konawe Utara .....                      | II-90 |
| Tabel 2.81 | Jenis Industri dan Jumlah Tenaga Kerja di Kabupaten Konawe Utara .....              | II-91 |
| Tabel 2.82 | Penempatan Transmigrasi di Kabupaten Konawe Utara .....                             | II-91 |
| Tabel 2.83 | Kinerja Fungsi Pendukung Urusan Pemerintahan di Kabupaten Konawe Utara .....        | II-92 |
| Tabel 2.84 | Kinerja Fungsi Penunjang Perencanaan dan Kelitbangan di Kabupaten Konawe Utara..... | II-95 |

|             |   |        |
|-------------|---|--------|
| Tabel 2.85  | Kinerja Fungsi Penunjang Keuangan .....   | II-98  |
| Tabel 2.86  | Kondisi Jumlah Aparatur Sipil Negara (ASN) di Kabupaten Konawe Utara .....  | II-99  |
| Tabel 2.87  | Jumlah ASN Berdasarkan Jabatan di Kabupaten Konawe Utara .....  | II-100 |
| Tabel 2.88  | Kinerja Fungsi Penunjang Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan di Kabupaten Konawe Utara .....                    | II-100 |
| Tabel 2.89  | Target dan Realisasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan (TLHP) Internal dan Eksternal di Kabupaten Konawe Utara..... | II-102 |
| Tabel 2.90  | Kondisi Jumlah Aparatur Pengawasan dan Status Leveling APIP di Kabupaten Konawe Utara .....                       | II-103 |
| Tabel 2.91  | Kondisi Makro Ekonomi Kabupaten Konawe Utara .....  | II-104 |
| Tabel 2.92  | Persentase Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga di Kabupaten Konawe Utara .....                                      | II-105 |
| Tabel 2.93  | Persentase Luas Wilayah Produktif Kabupaten Konawe Utara .....  | II-106 |
| Tabel 2.94  | Persentase Rumah Tangga Yang Menggunakan Air Minum Menurut Sumbernya di Kabupaten Konawe Utara .....              | II-107 |
| Tabel 2.95  | Persentase Rumah Tangga Yang Menggunakan Listrik di Kabupaten Konawe Utara .....                                  | II-107 |
| Tabel 2.96  | Aplikasi Sistem Informasi di Kabupaten Konawe Utara .....   | II-108 |
| Tabel 2.97  | Angka Kriminalitas di Kabupaten Konawe Utara .....  | II-109 |
| Tabel 2.98  | Jumlah Demonstrasi/Unjuk Rasa di Kabupaten Konawe Utara .....   | II-110 |
| Tabel 2.99  | Jenis Pelayanan Perizinan di Kabupaten Konawe Utara .....   | II-111 |
| Tabel 2.100 | Lama Proses Perizinan di Kabupaten Konawe Utara .....   | II-115 |
| Tabel 2.101 | Rekapitulasi Perizinan di Kabupaten Konawe Utara .....  | II-115 |
| Tabel 2.102 | Status Desa di Kabupaten Konawe Utara Menurut Indeks Desa Membangun (IDM) Tahun 2019 .....                        | II-117 |

|             |  |        |
|-------------|--|--------|
| Tabel 2.103 | Tingkat Pendidikan Tenaga Kerja di Kabupaten Konawe Utara .....                                  | II-123 |
| Tabel 2.104 | Rasio Ketergantungan (Beban Tanggungan) di Kabupaten Konawe Utara .....                          | II-124 |
| Tabel 2.105 | Perbandingan Capaian Kinerja Sasaran S.d Tahun 2020 Terhadap Target Akhir RPJMD .....            | II-125 |
| Tabel 3.1   | Rata-rata Pertumbuhan Realisasi Pendapatan Daerah Kabupaten Konawe Utara Tahun 2016 – 2020 ..... | III-6  |
| Tabel 3.2   | Perkembangan Pendapatan Daerah Kabupaten Konawe Utara Tahun 2016-2020 (Rupiah) .....             | III-12 |
| Tabel 3.3   | Indeks Kapasitas Fiskal Kabupaten Konawe Utara Tahun 2015-2020 .....                             | III-14 |
| Tabel 3.4   | Fiskal Kabupaten Konawe Utara Tahun 2021 .....   | III-15 |
| Tabel 3.5   | Tabel Uraian Belanja dan Pendapatan Kabupaten Konawe Utara Tahun 2021 .....                      | III-16 |
| Tabel 3.6   | Neraca Keuangan Daerah Kabupaten Konawe Utara Tahun 2016-2020 .....                              | III-18 |
| Tabel 3.7   | Analisis Rasio Keuangan Kabupaten Konawe Utara Tahun 2016-2019 .....                             | III-21 |
| Tabel 3.8   | Rasio Solvabilitas Kabupaten Konawe Utara Tahun 2016-2019 .....                                  | III-22 |
| Tabel 3.9   | Perkembangan Belanja Daerah Kabupaten Konawe Utara Tahun 2016-2020 (Rupiah).....                 | III-25 |
| Tabel 3.10  | Analisis Proporsi Belanja Pegawai .....  | III-27 |
| Tabel 3.11  | Perkembangan Pembiayaan Daerah Kabupaten Konawe Utara Tahun 2016-2020 (Rupiah) .....             | III-29 |
| Tabel 3.12  | Penutup Defisit Riil Anggaran Kabupaten Konawe Utara Tahun 2016-2020 .....                       | III-31 |
| Tabel 3.13  | Komposisi Penutup Defisit Riil Anggaran Kabupaten Konawe Utara Tahun 2016-2020.....              | III-31 |

|            |  |        |
|------------|--|--------|
| Tabel 3.14 | Realisasi Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Kabupaten Konawe Utara Tahun 2016-2020.....  | III-33 |
| Tabel 3.15 | Proyeksi Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan Daerah Kabupaten Konawe Utara Tahun 2021-2026.....   | III-36 |
| Tabel 3.16 | Kapasitas Riil Kemampuan Keuangan Daerah untuk Mendanai Pembangunan Daerah Kabupaten Konawe Utara Tahun 2021-2026 .....  | III-40 |
| Tabel 3.17 | Rencana Penggunaan Kapasitas Riil Kemampuan Keuangan Daerah Kabupaten Konawe Utara Tahun 2021-2026 .....   | III-41 |
| Tabel 4.1  | Keterkaitan Masalah Daerah dan Permasalahan Perangkat Daerah .....   | IV-4   |
| Tabel 4.2  | Rumusan Permasalahan Pembangunan Daerah.....   | IV-22  |
| Tabel 4.3  | Pencapaian Target Pembangunan Berkelanjutan di Kabupaten Konawe Utara.....   | IV-29  |
| Tabel 4.4  | Pencapaian Target Pembangunan Berkelanjutan di Kabupaten Konawe Utara.....   | IV-30  |
| Tabel 4.5  | Keterkaitan Isu Strategis Kabupaten Konawe Utara, Isu Internasional, Isu Nasional, Isu Provinsi Sulawesi Tenggara, dan Isu Strategis KLHS RPJMD.....   | IV-43  |
| Tabel 5.1  | Keterkaitan Misi RPJMD Kabupaten Konawe Utara Tahun 2021-2026 dengan Sasaran Pokok RPJPD Kabupaten Konawe Utara Tahun 2011-2032, Misi dan 7 Agenda Pembangunan RPJMN Tahun 2020-2024, dan RPJMD Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun 2018-2023 ..... | V-8    |
| Tabel 5.2  | Tujuan dan Sasaran RPJMD Kabupaten Konawe Utara Tahun 2021-2026 .....  | V-13   |
| Tabel 5.3  | Keterkaitan Indikator Kinerja Utama (IKU) Kepala daerah dan Perangkat Daerah Kabupaten Konawe Utara Tahun 2021-2026 .....  | V-19   |
| Tabel 6.1  | Strategi Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Konawe Utara Tahun 2021-2026.....  | VI-2   |
| Tabel 6.2  | Arah Kebijakan Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Konawe Utara Tahun 2021-2026.....  | VI-8   |

|           |  |         |
|-----------|--|---------|
| Tabel 6.3 | Program Pembangunan Daerah Dalam Rangka Pencapaian Visi Misi Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Konawe Tahun 2021-2026 .....                  | VI-23   |
| Tabel 7.1 | Kerangka Pendanaan Pembangunan Daerah Tahun 2021-2026 .....  | VII-2   |
| Tabel 7.2 | Indikasi Rencana Program Perangkat Daerah Yang Disertai Kebutuhan Pendanaan Tahun 2021-2026 .....  | VII-12  |
| Tabel 8.1 | Penetapan Indikator Kinerja Utama Kabupaten Konawe Utara Tahun 2021-2026 .....   | VIII-3  |
| Tabel 8.2 | Penetapan Indikator Kinerja Daerah Terhadap Capaian Kinerja Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Kabupaten Konawe Utara Tahun 2021-2026 ..... | VIII-10 |
| Tabel 8.3 | Penyelarasan Target Indikator Makro Kabupaten Konawe Utara,Provinsi Sulawesi Tenggara dan Nasional.....                                      | VIII-27 |
| Tabel 8.4 | Penyelarasan Dukungan Program Prioritas Pembangunan Kabupaten Konawe Utara Terhadap Program Prioritas Nasional.....                          | VIII-28 |

# DAFTAR GAMBAR

|            |   |       |
|------------|---|-------|
| Gambar 1.1 | Hubungan Antar Dokumen Perencanaan.....   | I-12  |
| Gambar 1.2 | Keterkaitan RPJMD Kabupaten Konawe Utara Dengan Dokumen Perencanaan Lainnya.....                    | I-13  |
| Gambar 1.3 | Visi, Misi, Arahkan dan Tujuh Agenda Pembangunan dalam RPJMN Tahun 2020-2024 .....                  | I-14  |
| Gambar 1.4 | Keselarasan RPJMD Kabupaten Konawe Utara dan RPJMN.....   | I-14  |
| Gambar 1.5 | Keselarasan RPJMD Kabupaten Konawe Utara dan RPJPD .....  | I-17  |
| Gambar 1.6 | Keselarasan RPJMD Kabupaten Konawe Utara Dan RPJMD Provinsi Sulawesi Tenggara.....                  | I-40  |
| Gambar 2.1 | Peta Wilayah Administrasi Kabupaten Konawe Utara.....   | II-3  |
| Gambar 2.2 | Peta Resiko Bencana Banjir di Kabupaten Konawe Utara ...  | II-10 |
| Gambar 2.3 | Peta Resiko Bencana Tanah Longsor di Kabupaten Konawe Utara.....                                    | II-10 |
| Gambar 2.4 | Harapan Lama Sekolah dan Rata-Rata Lama Sekolah Kabupaten Konawe Utara Tahun 2015-202 .....         | II-16 |
| Gambar 2.5 | Perbandingan Laju Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Konawe Utara, Sulawesi Tenggara, dan Nasional ..... | II-18 |
| Gambar 2.6 | Kontribusi PDRB ADHB Menurut Lapangan Usaha Kabupaten Konawe Utara Tahun 2020 .....                 | II-20 |
| Gambar 2.7 | Struktur Ekonomi Kabupaten Konawe Utara Tahun 2016 - 2020 .....                                     | II-24 |
| Gambar 2.8 | Perkembangan Laju Inflasi Kabupaten Konawe Utara Tahun 2016 - 2020.....                             | II-26 |
| Gambar 2.9 | Distribusi Pendapatan (Gini Ratio) Kabupaten Konawe Utara Tahun 2016 - 2020 .....                   | II-27 |

|             |  |        |
|-------------|--|--------|
| Gambar 2.10 | Angka Harapan Lama Sekolah<br>di Kabupaten Konawe Utara .....  | II-30  |
| Gambar 2.11 | Angka Rata - Rata Lama Sekolah<br>di Kabupaten Konawe Utara .....  | II-31  |
| Gambar 2.12 | Angka Kematian Bayi di Kabupaten Konawe Utara .....  | II-31  |
| Gambar 2.13 | Angka Kematian Ibu di Kabupaten Konawe Utara .....   | II-32  |
| Gambar 2.14 | Usia Harapan Hidup di Kabupaten Konawe Utara .....   | II-33  |
| Gambar 3.1  | Gambaran Umum Realisasi APBD Kabupaten Konawe<br>Utara Tahun 2016-2020 (Milyar Rupiah) .....                                   | III-5  |
| Gambar 3.2  | Perkembangan Pendapatan Daerah Kabupaten Konawe<br>Utara Tahun 2016-2020 (Milyar Rupiah) .....                                 | III-6  |
| Gambar 3.3  | Proporsi Unsur Pendapatan Daerah terhadap Total<br>Pendapatan Daerah Kabupaten Konawe Utara Tahun<br>2016- 2020 (Persen) ..... | III-9  |
| Gambar 3.4  | Perkembangan Pendapatan Asli Daerah Kabupaten<br>Konawe Utara Tahun 2016-2020 (Milyar Rupiah) .....                            | III-10 |
| Gambar 3.5  | Perkembangan Pendapatan Dana Tranfer Kabupaten<br>Konawe Utara Tahun 2016-2020 (Milyar Rupiah) .....                           | III-11 |
| Gambar 3.6  | Perkembangan Lain-Lain Pendapatan yang Sah<br>Kabupaten Konawe Utara Tahun 2016-2020 (Milyar<br>Rupiah) .....                  | III-11 |
| Gambar 3.7  | Perkembangan Belanja Daerah Kabupaten Konawe<br>Utara Tahun 2016-2020 (Milyar Rupiah) .....                                    | III-23 |
| Gambar 3.8  | Proporsi Unsur Belanja Daerah terhadap Total Belanja<br>Daerah Kabupaten Konawe Utara Tahun 2016-2020<br>(Milyar Rupiah) ..... | III-24 |
| Gambar 3.9  | Perkembangan Penerimaan Pembiayaan Kabupaten<br>Konawe Utara Tahun 2016-2020 (Milyar Rupiah) .....                             | III-30 |
| Gambar 3.10 | Perkembangan Pengeluaran Pembiayaan Kabupaten<br>Konawe Utara Tahun 2016-2020 (Milyar Rupiah) .....                            | III-30 |
| Gambar 3.11 | Perkembangan SILPA tahun Berjalan Kabupaten<br>Konawe Utara Tahun 2016-2020 (Milyar Rupiah) .....                              | III-32 |

|            |   |       |
|------------|---|-------|
| Gambar 4.1 | Hubungan Permasalahan Daerah dan Perangkat Daerah .....                     | IV-3  |
| Gambar 4.2 | Pencapaian Target Pembangunan Berkelanjutan di Kabupaten Konawe Utara ..... | IV-29 |

# BAB I PENDAHULUAN



## 1.1. LATAR BELAKANG

Penyelenggaraan pemerintahan daerah diarahkan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan, pemberdayaan, dan peran serta masyarakat, serta peningkatan daya saing daerah. Sejak menjadi Daerah Otonomi Baru berdasarkan Undang - Undang Nomor 13 Tahun 2007 tanggal 2 Januari Tahun 2007, perkembangan pembangunan di Kabupaten Konawe Utara telah dirasakan manfaatnya bagi masyarakat. Namun seiring dengan tantangan pada masa mendatang, diperlukan keberlanjutan dan perubahan kearah yang lebih baik dari aktivitas pembangunan sehingga dapat mewujudkan visi pembangunan jangka panjang “Konawe Utara Yang Mandiri, Maju, Adil, dan Sejahtera”.

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang selanjutnya disingkat RPJMD adalah dokumen perencanaan daerah untuk periode 5 (lima) tahun terhitung sejak dilantik Dr. Ir. H. Ruksamin, ST, M.Si, IPU, ASEAN.Eng sebagai Bupati Konawe Utara dan H. Abuhaera, S.Sos, M.Si sebagai Wakil Bupati Konawe Utara tanggal 26 April 2021 dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 131.74-265 Tahun 2021 Tanggal 12 April 2021. Untuk itu, berdasarkan ketentuan Pasal 264 Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, bahwa Peraturan Daerah tentang RPJMD ditetapkan paling lama 6 (enam) bulan setelah Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah dilantik.

RPJMD merupakan penjabaran dari visi, misi, dan program kepala daerah yang memuat tujuan, sasaran, strategi, arah kebijakan, pembangunan daerah dan keuangan daerah, serta program Perangkat Daerah dan lintas Perangkat Daerah yang disertai dengan kerangka pendanaan bersifat indikatif untuk jangka waktu 5 (lima) tahun yang disusun dengan berpedoman pada RPJPD dan RPJMN. Hal ini telah ditegaskan dalam Pasal 12 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.

Penyusunan RPJMD Kabupaten Konawe Utara Tahun 2021-2026 dilakukan menggunakan beberapa pendekatan perencanaan pembangunan, baik pendekatan penganggaran berbasis program, pendekatan berorientasi proses, maupun pendekatan berorientasi substansi. Pendekatan penganggaran berbasis program didahului dengan perencanaan berbasis kinerja. Pendekatan tersebut merupakan suatu pendekatan dalam sistem penganggaran yang memperhatikan keterkaitan antara pendanaan dan kinerja yang diharapkan, serta efisiensi dalam pencapaian kinerja tersebut.

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Konawe Utara disusun melalui pendekatan yang berorientasi pada proses antara lain:

1. Pendekatan Teknokratik, yaitu pendekatan perencanaan yang menggunakan metode dan kerangka berpikir ilmiah untuk mencapai tujuan dan sasaran pembangunan Daerah. Hal ini ditunjukkan oleh proses penyusunan RPJMD dengan melibatkan tenaga ahli yang berkompeten.
2. Pendekatan Politik, yaitu pendekatan perencanaan yang mengakomodasi kepentingan-kepentingan politik dalam pelaksanaan pembangunan, yang ditunjukkan dengan diakomodasinya saran dan masukan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Konawe Utara.
3. Pendekatan Partisipatif, yaitu pendekatan perencanaan yang mengakomodasi kebutuhan-kebutuhan masyarakat yang disampaikan melalui konsultasi publik dan musrenbang RPJMD.
4. Pendekatan *Top-down* dan *Bottom-Up*, yaitu pendekatan yang memperhatikan kebijakan dan program-program prioritas pemerintah pusat dan provinsi. Hal ini ditunjukkan oleh konsistensi Penyusunan RPJMD yang mengacu pada RPJMN tahun 2020-2024 dan RPJMD Provinsi Sulawesi Tenggara tahun 2018-2023. Komitmen ini dilaksanakan melalui telaah kebijakan, konsultasi dan evaluasi Ranperda RPJMD dengan Pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara. Selain itu penyusunan kebijakan dan program RPJMD juga mengakomodir kebutuhan masyarakat Kabupaten Konawe Utara.

Pendekatan berorientasi pada substansi yang digunakan dalam Penyusunan RPJMD Kabupaten Konawe Utara meliputi pendekatan Holistik-Tematik, pendekatan integratif dan pendekatan spasial. Pendekatan tersebut merupakan penjabaran tema Prioritas Pembangunan ke dalam perencanaan yang menyeluruh mulai dari hulu

hingga hilir suatu rangkaian kegiatan yang dilaksanakan dalam keterpaduan pemangku kepentingan dan pendanaan, serta dalam satu kesatuan wilayah dan keterkaitan antar wilayah.

1. Pendekatan Holistik-Tematik, dilaksanakan dengan mempertimbangkan keseluruhan unsur/bagian/kegiatan pembangunan sebagai satu kesatuan faktor potensi, tantangan, hambatan dan/atau permasalahan yang saling berkaitan satu dengan lainnya.
2. Pendekatan Integratif, dilaksanakan dengan menyatukan beberapa kewenangan daerah kedalam satu proses terpadu dan fokus yang jelas dalam upaya pencapaian tujuan pembangunan Daerah.
3. Pendekatan Spasial, dilaksanakan dengan mempertimbangkan dimensi keruangan dalam perencanaan. Dalam hal ini penyusunan RPJMD sudah memperhatikan lokasi dan kesesuaiannya dengan rencana tata ruang wilayah.

Selain itu sesuai Permendagri Nomor 7 Tahun 2018 tentang Pembuatan dan Pelaksanaan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) dalam Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, maka Rancangan Awal RPJMD Kabupaten Konawe Utara 2021 - 2026 akan diintegrasikan dengan hasil - hasil KLHS RPJMD yang saat ini sedang dilaksanakan. Semua ini dilakukan agar komitmen pencapaian Tujuan pembangunan Berkelanjutan (TPB) menjadi dasar dalam perumusan kebijakan, rencana, dan program pembangunan daerah.

Karakteristik yang lain dari RPJMD Tahun 2021-2026 ini menyangkut waktu pemberlakuan RPJMD, dimana RPJMD Tahun 2021-2026 ini secara normal akan mulai berlaku pada bulan Oktober 2021 (Penetapan RPJMD paling lambat 6 bulan sejak dilantiknya Kepala Daerah terpilih). Sementara itu, sesuai dengan Pasal 355 ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017, Penetapan Peraturan Kepala Daerah tentang Perubahan RKPD paling lambat minggu ketiga bulan Juli. Namun dengan mempertimbangkan masa kepemimpinan Bupati dan Wakil Bupati terpilih yang sudah dimulai sejak tanggal 26 April 2021, maka implementasi program dan kegiatan yang dituntut oleh masyarakat akan mewarnai sejak awal masa kepemimpinan kepala daerah dan wakil kepala daerah. Kondisi ini menempatkan perencanaan dan penganggaran tahun 2021 sebagai tahun transisi, yaitu sebagian masih mengacu pada perencanaan jangka menengah sebelumnya

(Tahun 2016-2021) dan sebagian lagi sudah mengacu pada perencanaan jangka menengah sesudahnya, yaitu tahun 2021-2026.

RPJMD Kabupaten Konawe Utara Tahun 2021-2026 disusun pada era pandemi Covid-19 belum berakhir. Dampak pandemi ini tidak hanya menyangkut permasalahan di bidang kesehatan, namun juga berpengaruh buruk terhadap sektor-sektor lain, mulai dari pendidikan, ekonomi dan keuangan, infrastruktur, budaya, agama, pariwisata, dan lain-lain. Salah satu indikator yang dapat dilihat adalah pertumbuhan ekonomi Kabupaten Konawe Utara yang tertekan hingga mencapai angka -0,72 pada tahun 2020 dan Provinsi Sulawesi Tenggara sebesar -0,65. Angka ini menggambarkan begitu parahnya dampak pandemi ke hampir semua lapangan usaha. Oleh karena itu, RPJMD ini mendapatkan tantangan yang cukup besar untuk dapat membuat skenario-skenario pembangunan yang dapat secara bertahap membangkitkan kembali perekonomian di Kabupaten Konawe Utara. Gambaran-gambaran visioner atas kondisi di akhir periode RPJMD atau di tahun 2026 nanti (sebagaimana dapat dilihat pada Bab V) menjadi salah satu pemacu agar upaya yang akan dilakukan dari segenap komponen pemerintah dan masyarakat Kabupaten Konawe Utara dapat terarah dan sejalan dengan pencapaian visi tersebut.

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Konawe Utara ini memiliki kedudukan strategis sebagai pedoman dalam penyusunan RKPD yang merupakan dokumen perencanaan tahunan daerah untuk selanjutnya menjadi dasar penyusunan APBD tahun 2022 hingga tahun 2026. Dokumen RPJMD juga merupakan acuan dalam menyusun dokumen Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah yang merupakan dokumen perencanaan lima tahun pada tingkat Perangkat Daerah, serta dokumen RPJMD juga akan menjadi acuan bagi DPRD dan masyarakat luas untuk melakukan pengawasan dan evaluasi kinerja pemerintah daerah dalam pelaksanaan pembangunan daerah.

## 1.2. DASAR HUKUM PENYUSUNAN

Dasar hukum dalam penyusunan RPJMD Kabupaten Konawe Utara Tahun 2021-2026 adalah sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 47 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4286);
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 104 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4421);
4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
5. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Konawe Utara di Provinsi Sulawesi Tenggara;
6. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 33 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4700);
7. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4725) sebagaimana telah diubah dengan Undang- Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
8. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4868);
9. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
10. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);

11. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
12. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2009 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 149, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5068);
13. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembar Negara Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
14. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 244 Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang- Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomomr 6573);
15. Menambahkan Dasar Hukum Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6573);
16. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
17. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576)sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 110, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5155);

18. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Tahun 2006 Nomor 25 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4614);
19. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2008 tentang Dekonsentrasi Dan Tugas Pembantuan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4816);
20. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 26, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6042);
21. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 Tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
22. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 46 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 228, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5941);
23. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2017 tentang Sinkronisasi Proses Perencanaan Dan Penganggaran Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 105; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6056);
24. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Tahun 2018 Nomor 2; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);

25. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2019 Nomor 42; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
26. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
27. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6042);
28. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Program Pemulihan Ekonomi Nasional Dalam Rangka Mendukung Kebijakan Keuangan Negara Untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) dan/atau Menghadapi Ancaman Yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan Serta Penyelamatan Ekonomi Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 131, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6514) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2020 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 186, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6542);
29. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6633);
30. Menambahkan Dasar Hukum Peraturan Presiden Nomor 166 Tahun 2014 tentang Program Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 341)
31. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 95 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2010 tentang Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 199);

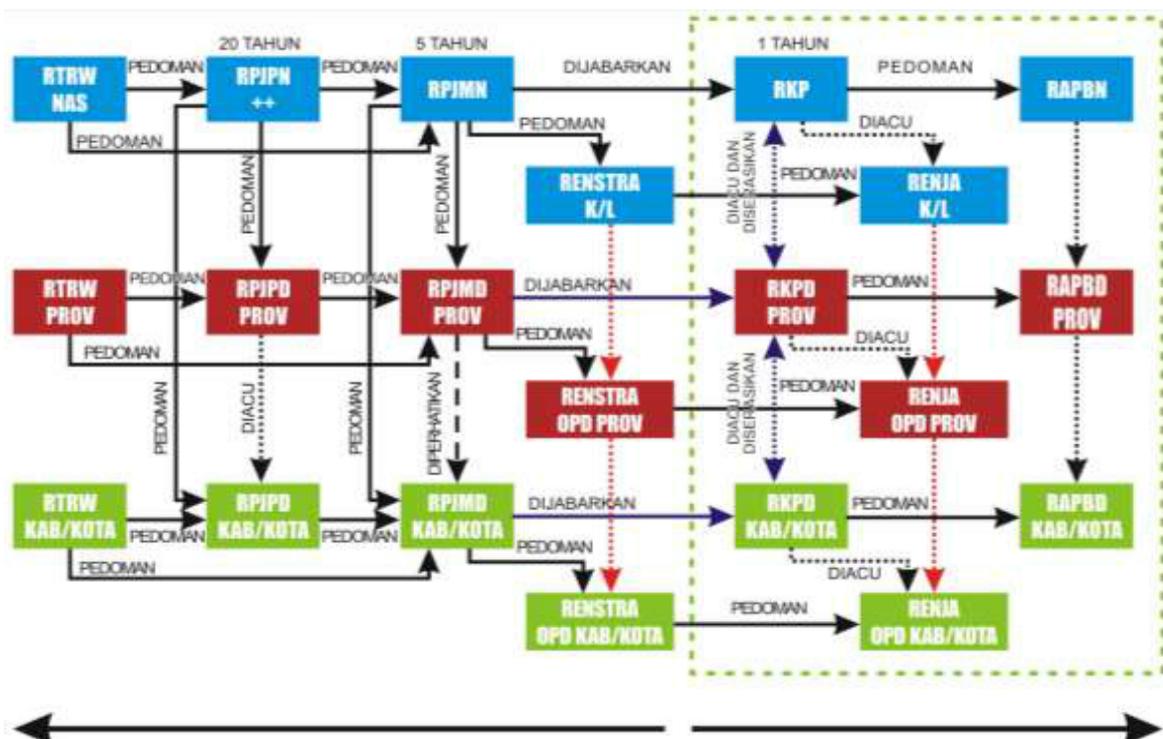
32. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 36);
33. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 95 Tahun 2018 Tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 182);
34. Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 112);
35. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2020-2024. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);
36. Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian, dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
37. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2018 tentang Pembuatan dan Pelaksanaan Kajian Lingkungan Hidup Strategis Dalam Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 459);
38. Menambahkan Dasar Hukum Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 100 Tahun 2018 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1540);
39. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 70 Tahun 2019 Tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah. (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
40. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 90 Tahun 2019 Tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah. (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);

41. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan Dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 288);
42. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara Nomor 2 Tahun 2014 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun 2014 - 2034 (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun 2014 Nomor 2);
43. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara Nomor 2 Tahun 2014 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun 2014 - 2034;
44. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara Nomor 9 Tahun 2018 tentang Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun 2018-2038 (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun 2018 Nomor 9, Tambahan Lembaran daerah Provinsi Sulawesi Tenggara Nomor 9);
45. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara Nomor 9 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun 2018 - 2023 (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun 2019 Nomor 9, Tambahan Lembaran daerah Provinsi Sulawesi Tenggara Nomor 9);
46. Peraturan Daerah Kabupaten Konawe Utara Nomor 20 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Konawe Utara Tahun 2012 - 2032;
47. Peraturan Daerah Kabupaten Konawe Utara Nomor 2 Tahun 2014 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Konawe Utara 2012 - 2032.
48. Peraturan Daerah Kabupaten Konawe Utara Nomor 6 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Konawe Utara Tahun 2016-2021 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Konawe Utara Tahun 2016-2021;

49. Peraturan Daerah Kabupaten Konawe Utara Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Konawe Utara sebagaimana Telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Konawe Utara Nomor 1 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Konawe Utara Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Konawe Utara.

### 1.3. HUBUNGAN ANTAR DOKUMEN

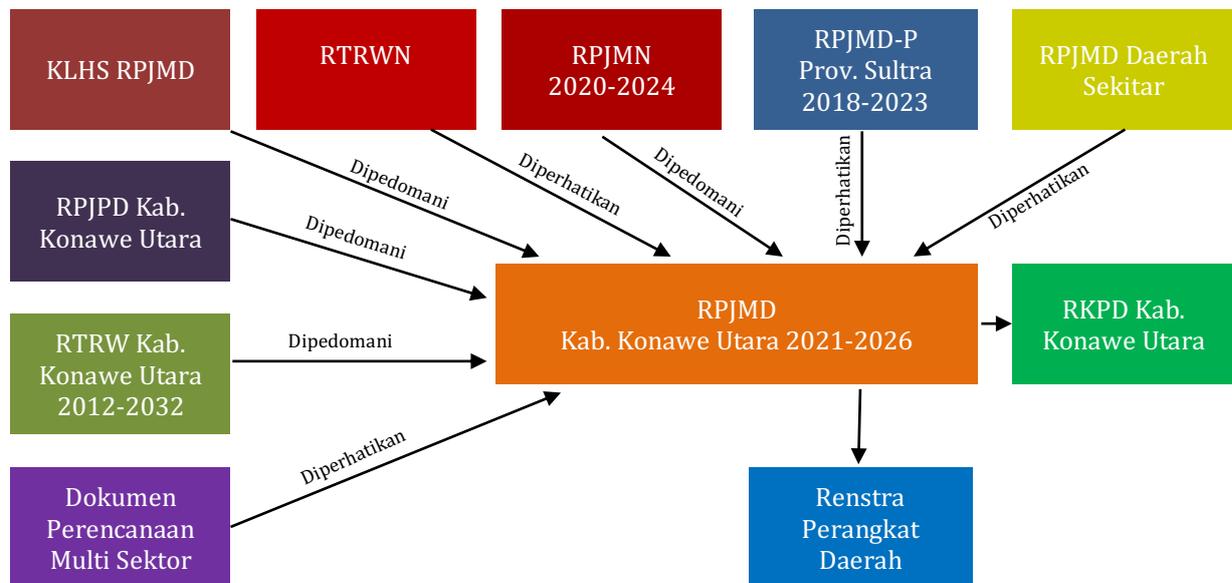
Untuk mewujudkan suatu dokumen perencanaan pembangunan sebagai satu kesatuan yang utuh dengan sistem perencanaan pembangunan nasional dan pembangunan daerah Provinsi Sulawesi Tenggara, maka RPJMD Kabupaten Konawe Utara Tahun 2021-2026 disesuaikan dan berpedoman pada RPJPD Kabupaten Konawe Utara Tahun 2012-2032, Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Konawe Utara Tahun 2012-2032 dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2020-2024, serta memperhatikan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun 2018-2023, serta dokumen-dokumen perencanaan lainnya.



**Gambar 1.1 Hubungan Antar Dokumen Perencanaan**

Sumber : UU Nomor 25/2004 Tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional

Keterkaitan antara RPJMD Kabupaten Konawe Utara dengan dokumen perencanaan lainnya tercantum pada Gambar 1.2.



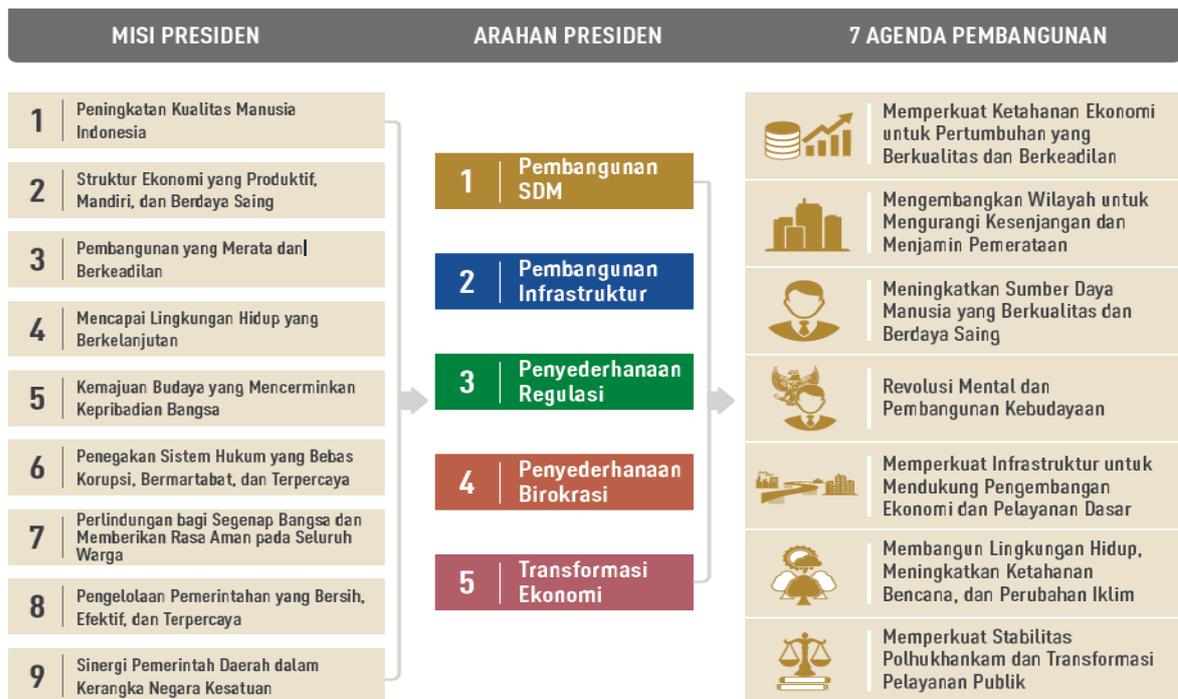
**Gambar 1.2 Keterkaitan RPJMD Kabupaten Konawe Utara Dengan Dokumen Perencanaan Lainnya**

### 1.3.1 Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024

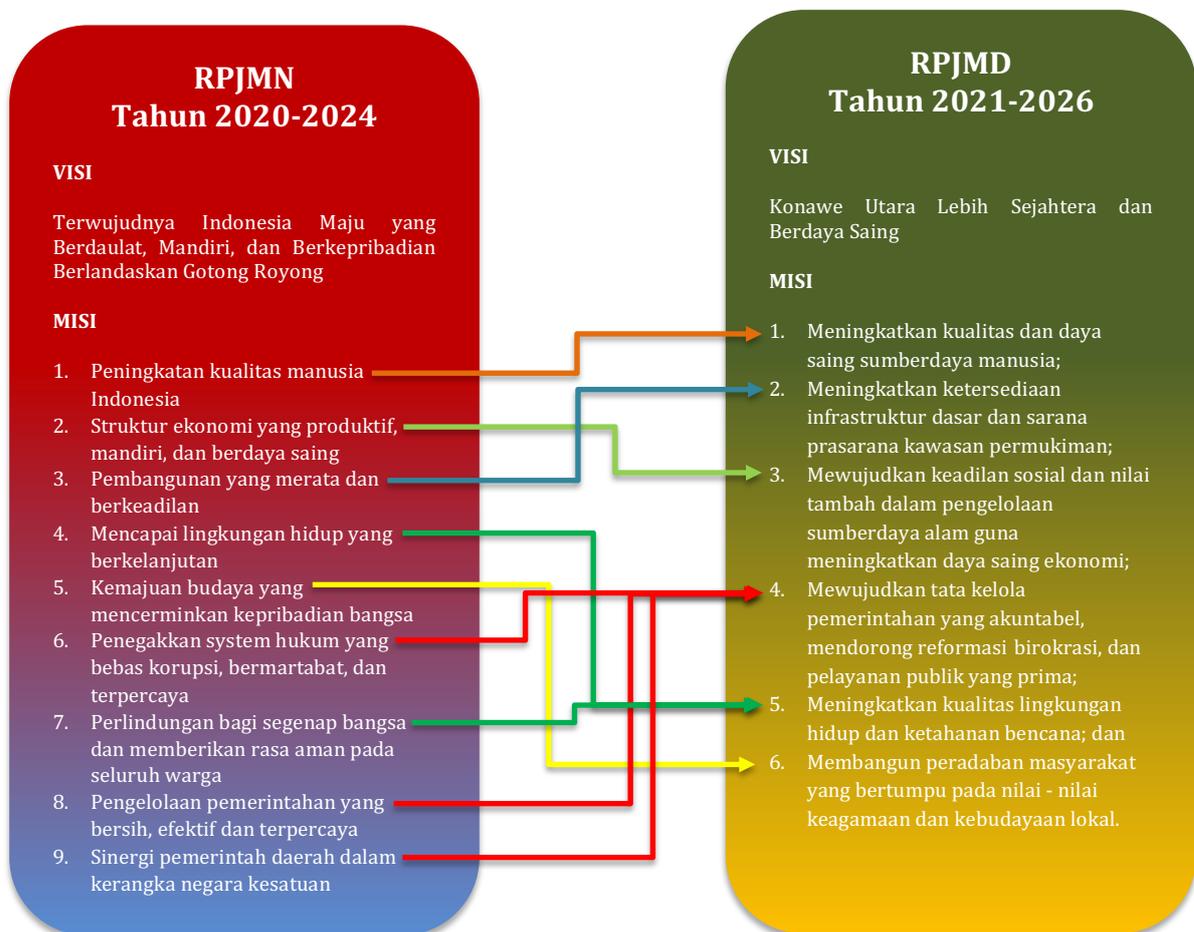
Penyusunan RPJMD Kabupaten Konawe Utara memperhatikan Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024. Terutama terkait isu strategis, 5 (lima) arahan Presiden, 7 (tujuh) sasaran pokok agenda pembangunan, kebijakan pengembangan wilayah dan indikator kinerja yang tercantum dokumen RPJMN tahun 2020-2024.

#### **Visi Presiden :**

“Terwujudnya Indonesia Maju yang Berdaulat, Mandiri, dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong Royong”



**Gambar 1.3. Visi, Misi, Arahan dan Tujuh Agenda Pembangunan dalam RPJMN Tahun 2020-2024** (Sumber : Lampiran 1 Perpres 18 Tahun 2020, hal. -1.12-)



**Gambar 1.4. Keselarasan RPJMD Kabupaten Konawe Utara dan RPJMN**

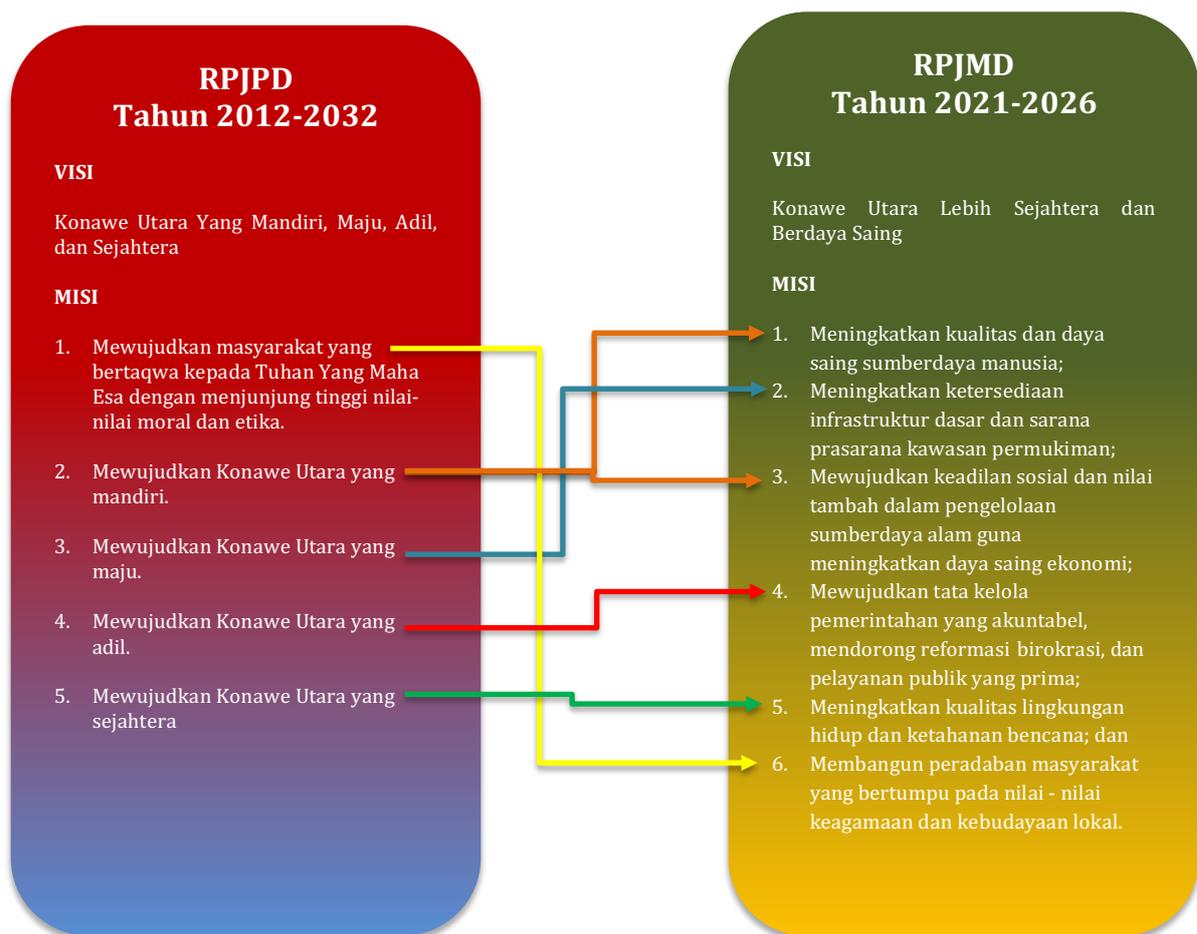
### **1.3.2 Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Konawe Utara**

Penyusunan RPJMD Kabupaten Konawe Utara berpedoman pada dokumen RPJPD Kabupaten Konawe Utara, terutama terkait dengan isu strategis, sasaran pokok dan arah kebijakan pembangunan pada RPJMD tahap ke-3 dalam dokumen RPJPD yang ditujukan untuk lebih memantapkan pelaksanaan pembangunan di berbagai bidang pada tahap-tahap sebelumnya. Selain itu pada RPJMD Tahap III ini akan diarahkan pula pada prioritas sebagai berikut:

1. Peningkatan kualitas pendidikan, aksesibilitas, dan partisipasi masyarakat dalam pendidikan, serta pemerataan pendidikan dan kesempatan memperoleh pendidikan yang bermutu.
2. Peningkatan kualitas dan kuantitas pelayanan kesehatan, aksesibilitas, dan partisipasi masyarakat dalam Kesehatan.
3. Peningkatan perluasan kesempatan kerja, kualitas tenaga kerja, perlindungan tenaga kerja, dan transmigrasi.
4. Pencapaian pertumbuhan ekonomi yang berkualitas dan berkesinambungan sehingga pendapatan perkapita pada akhir periode pembangunan jangka panjang mencapai tingkat kesejahteraan setara dengan kabupaten maju di Indonesia.
5. Peningkatan inovasi produk dan perluasan jangkauan pemasaran baik dalam negeri maupun luar negeri; penerapan sistem industri, dalam lingkup mikro, kecil dan menengah, serta koperasi yang ramah lingkungan dan berbasis keluarga dan teknologi; fasilitasi kawasan pengembangan industri kreatif yang memadai; peningkatan produktivitas pertanian, perikanan dan kelautan serta kehutanan diarahkan untuk menghasilkan produk- produk yang bertumpu pada sistem agribisnis dan agroindustri, guna menjamin ketersediaan pangan dan nilai tambah dalam rangka mengurangi kemiskinan dan pengangguran; pengembangan kepariwisataan memanfaatkan keberagaman pesona keindahan alam, budaya dan potensi daerah lainnya; penguatan kelembagaan ekonomi guna menciptakan regulasi dan perizinan yang efisien dan efektif; dan optimalisasi fungsi pasar tradisional untuk meningkatkan pendapatan pedagang melalui pemberian modal yang mudah dan murah.

6. Peningkatan jaringan infrastruktur yang andal guna meningkatkan aksesibilitas serta mendukung kegiatan produksi pada kawasan-kawasan pertumbuhan baru/ kawasan strategis
7. Perencanaan, Pemanfaatan dan pengendalian ruang dalam suatu sistem wilayah pembangunan yang berkelanjutan, melalui: penataan ruang sesuai Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW).
8. Pengelolaan sumber daya alam yang berorientasi pada pelestarian lingkungan hidup yang tercermin oleh tetap terjaganya fungsi, daya dukung, dan kemampuan pemulihannya dalam mendukung kualitas kehidupan industri dan ekonomi secara serasi dan seimbang. Pengurangan risiko bencana melalui penataan pemukiman dan merelokasi penduduk dari wilayah rawan bencana, melalui: pembuatan rencana penataan permukiman berbasis mitigasi bencana; sosialisasi dan peningkatan kewaspadaan masyarakat siaga bencana; dan peningkatan kelembagaan dan kapasitas masyarakat.
9. Pengurangan penyandang masalah kesejahteraan sosial, tercapainya pertumbuhan penduduk tumbuh seimbang, serta peningkatan peran perempuan dalam pembangunan.
10. Peningkatan prestasi olahraga dan kualitas generasi muda, melalui: peningkatan sarana dan prasarana penunjang olah raga; membudayakan olah raga dalam kehidupan sehari-hari bagi masyarakat; dan peningkatan kualitas dan partisipasi pemuda dalam pembangunan dan pemberdayaan pemuda sebagai subyek pembangunan, melalui pengembangan lembaga kepemudaan yang berwawasan kebangsaan.
11. Peningkatan karakter masyarakat yang berbudaya, tangguh, kompetitif, berakhlak mulia, berkeperibadian Indonesia, berdasarkan falsafah Pancasila yang dicirikan dengan watak dan perilaku yang beriman dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berbudi luhur, bertoleransi, bergotong royong, berjiwa patriotik, berkembang dan dinamis.
12. Peningkatan kapabilitas perangkat daerah dan kemampuan pengelolaan keuangan daerah secara efisien, efektif, transparan, partisipatif dan akuntabel, melalui: peningkatan kinerja, kapasitas dan profesionalisme aparatur pemerintah dan lembaga pemerintah dalam rangka mendukung keberhasilan pembangunan.

13. Peningkatan kualitas pelayanan kepada masyarakat, melalui: peningkatan teknologi informasi dalam pelayanan publik; peningkatan kualitas pelayanan publik sesuai dengan Standar Pelayanan Minimal (SPM) dan *Standart Operating Procedure* (SOP) yang berorientasi pada terciptanya kepuasan masyarakat; peningkatan sarana dan prasarana publik; dan peningkatan daya respon terhadap keinginan dan kebutuhan masyarakat.
14. Menciptakan ketertiban masyarakat, melalui: terciptanya kepastian hukum, ketertiban, dan perlindungan masyarakat.



**Gambar 1.5. Keselarasan RPJMD Kabupaten Konawe Utara dan RPJPD**

### 1.3.3 Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) RPJMD

Penyusunan RPJMD Kabupaten Konawe Utara mempedomani dokumen dan hasil dari proses KLHS RPJMD Kabupaten Konawe Utara, terutama memperhatikan daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup dan memastikan indikator Tujuan Pembangunan Berkelanjutan yang telah ditetapkan Nasional telah terakomodir dalam target RPJMD. Secara ringkas pengintegrasian KLHS ke dalam RPJMD Kabupaten Konawe Utara Tahun 2021- 2026 dapat dilihat pada Tabel 1.1.

### 1.3.4 Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional

Hasil telaah terhadap Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (RTRWN), mengatur secara umum tentang pengembangan wilayah nasional dan daerah, namun tidak secara khusus menyampaikan tentang arah pengembangan Kawasan Sulawesi Tenggara pada umumnya maupun Konawe Utara khususnya. Namun demikian, terdapat beberapa hal yang penting untuk dijadikan dasar kebijakan bagi pengembangan Kawasan Konawe Utara, yaitu;

1. Pada Pasal 7 ayat 2 huruf b4, menyatakan bahwa kebijakan yang berlaku untuk daerah-daerah di Pulau Sulawesi diharapkan dapat mengembangkan Kawasan lindung dengan luas paling sedikit 40% (empat puluh persen) dari luas daerah tersebut sesuai dengan kondisi, karakter, dan fungsi ekosistemnya serta tersebar secara proporsional;
2. Pasal 14 ayat 2, pengembangan Kawasan Wilayah (PKW) sebagaimana dimaksud ditetapkan dengan kriteria:
  - a. kawasan perkotaan yang berfungsi atau berpotensi sebagai simpul kedua kegiatan ekspor-impor yang mendukung PKN;
  - b. kawasan perkotaan yang berfungsi atau berpotensi sebagai pusat kegiatan industri dan jasa yang melayani skala provinsi atau beberapa kabupaten;
  - c. kawasan perkotaan yang berfungsi atau berpotensi sebagai simpul transportasi yang melayani skala provinsi atau beberapa kabupaten; dan/atau
  - d. kawasan perkotaan yang berada di pesisir yang berfungsi atau berpotensi mendukung ekonomi kelautan nasional.

Kebijakan dalam RTRWN di atas diharapkan dapat dijadikan sebagai acuan pengembangan Kabupaten Konawe Utara.

**Tabel 1.1**  
**Integrasi Hasil KLHS RPJMD ke dalam Dokumen RPJMD Kabupaten Konawe Utara Tahun 2021-2026**

| No. Indikator   | Indikator   | Target Nasional          | Indikator Daerah                               | Status (Tahun 2020) | Proyeksi | Status (Tahun 2026) | Keterkaitan D3TLH  | Keterangan D3TLH  | Rekomendasi KLHS  | Gambaran Umum Kondisi Daerah (Bab 2)                 | Permasalahan dan Isu Strategis (Bab 4)              | Visi dan Misi (Bab 5)  | Strategi Arah Kebijakan dan Program Pembangunan (Bab 6)  |                                     |
|---|---|--------------------------|--|---------------------|----------|---------------------|--|---|---|--|---|--|--|-------------------------------------|
|   |   |                          |  |                     |          |                     |  |   |   |  |   |  | Strategi dan Arah Kebijakan  | Program Pembangunan                 |
| <b>Tujuan 1 : Mengakhiri Kemiskinan Dalam Segala Bentuk dimanapun</b> |   |                          |  |                     |          |                     |  |   |   |  |   |  |  |                                     |
| 5.7.2   | Jumlah rumah tangga yang mendapatkan bantuan tunai bersyarat/Program Keluarga Harapan | Menurun menjadi 2,8 juta | Persentase PPKS yang memperoleh bantuan sosial | SB                  | 48,06    | SB                  | Jasa Ekosistem Penyediaan Pangan   | <ol style="list-style-type: none"> <li>Jasa ekosistem penyediaan pangan di Kabupaten Konawe Utara secara menyeluruh berada pada kondisi indikasi sedang, dengan total persentase luas 298.718,96 Ha (71,66%),</li> <li>Penyebaran jasa ekosistem penyediaan pangan dengan indikasi sangat tinggi berada di Kecamatan Andowia (3.354 Ha), menyusul Landawe (3.116,62 Ha) dan Molawe (2.863,71 Ha)</li> <li>Jenis penyediaan pangan di Kabupaten Konawe Utara berasal dari hasil perkebunan dan hortikultura, hasil pertanian tanaman pangan dan peternakan, hasil perikanan laut dan air tawar, hasil hutan dan lain-lain</li> </ol> | <p>Jangka Pendek:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>Pemberian Bantuan Sosial;</li> <li>Pemberian modal usaha;</li> <li>Pemberian pelatihan kewirausahaan;</li> <li>Penyusunan Database kemiskinan</li> </ol> <p>Jangka Menengah:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>Bersinergi dengan Pengusaha untuk membuka lapangan kerja baru</li> <li>Mengikuti program-program hibah pengentasan kemiskinan.</li> </ol> <p>Jangka Panjang:</p> <p>Bersinergi dengan pengusaha untuk memberikan CSR pengentasan kemiskinan;</p> | Aspek Kesejahteraan Masyarakat (Tingkat Kemiskinan)  | Kualitas dan daya saing sumber daya manusia         | <p>Misi Meningkatkan kualitas dan daya saing sumber daya manusia</p> <p>Tujuan Meningkatkan kualitas sumber daya manusia</p> <p>Sasaran Meningkatnya penanganan masalah kesejahteraan sosial</p> | Penurunan angka kemiskinan melalui program-program penanggulangan kemiskinan bagi warga miskin   | Program Perlindungan jaminan sosial |
| 5.29.2  | Jumlah lokasi Penguatan pengurangan risiko bencana daerah                             | Meningkat (2018: 1)      | Jumlah desa tangguh bencana                    | SB                  | 47       | SB                  | <ol style="list-style-type: none"> <li>Jasa ekosistem Pengaturan Iklim</li> <li>Jasa Ekosistem Pengaturan Pencegahan dan Perlindungan terhadap bencana Alam</li> </ol> | <ol style="list-style-type: none"> <li>Jasa Pengaturan Iklim di Kabupaten Konawe Utara berada dalam kondisi sangat tinggi dengan luas wilayah 304.246,89 Ha</li> <li>Kondisi pengaturan iklim sangat tinggi berada di wilayah Kec. Asera (131.609,63 Ha), kemudian menyusul Kec. Wiwirano (70.169,62Ha) dan Kec. Oheo (30.104,30 Ha)</li> <li>Jasa ekosistem pengaturan pencegahan dan perlindungan terhadap bencana alam di Kab. Konawe Utara berada dalam kondisi tinggi, dengan persentase luas wilayah sebesar 316.643,53 Ha (75,96Ha)</li> </ol>   |   | Aspek Geografi dan Demografi (Wilayah Rawan Bencana) | Kualitas Lingkungan Hidup dan Mitigasi Bencana Alam | <p>Misi Meningkatkan kualitas lingkungan hidup dan ketahanan bencana</p> <p>Tujuan Meningkatkan kualitas lingkungan hidup</p> <p>Sasaran Terwujudnya tata kelola dan manajemen bencana</p>       | Meningkatkan ketahanan daerah dalam menghadapi bencana melalui pengurangan risiko bencana untuk ketangguhan (mitigasi, kesiapsiagaan, pra bencana), manajemen kedaruratan, dan manajemen pemulihan | Program Penanggulangan Bencana      |

| No. Indikator   | Indikator                                       | Target Nasional       | Indikator Daerah   | Status (Tahun 2020) | Proyeksi | Status (Tahun 2026) | Keterkaitan D3TLH                | Keterangan D3TLH  | Rekomendasi KLHS  | Gambaran Umum Kondisi Daerah (Bab 2) | Permasalahan dan Isu Strategis (Bab 4)      | Visi dan Misi (Bab 5)   | Strategi Arah Kebijakan dan Program Pembangunan (Bab 6)  |   |
|---|---|-----------------------|--|---------------------|----------|---------------------|----------------------------------|---|---|--------------------------------------|---|---|--|---|
|   |   |                       |  |                     |          |                     |                                  |   |   |                                      |   |   | Strategi dan Arah Kebijakan  | Program Pembangunan   |
| 5.7.3   | Pemenuhan kebutuhan dasar korban bencana sosial | Meningkat (2018:100%) | Persentase Korban Bencana Yang Menerima Bantuan Sosial Selama Masa Tanggap Darurat | TT                  | 100      | SB                  | Jasa Ekosistem Penyediaan Pangan | <ol style="list-style-type: none"> <li>Jasa ekosistem penyediaan pangan di Kabupaten Konawe Utara secara menyeluruh berada pada kondisi indikasi sedang, dengan total persentase luas 298.718,96 Ha (71,66%),</li> <li>Penyebaran jasa ekosistem penyediaan pangan dengan indikasi sangat tinggi berada di Kecamatan Andowia (3.354 Ha), menyusul Landawe (3.116,62 Ha) dan Molawe (2.863,71 Ha)</li> <li>Jenis penyediaan pangan di Kabupaten Konawe Utara berasal dari hasil perkebunan dan holtikultura, hasil pertanian tanaman pangan dan peternakan, hasil perikanan laut dan air tawar, hasil hutan dan lain-lain</li> </ol> |   | Aspek Pelayanan Umum (Sosial)        | Kualitas dan daya saing sumber daya manusia | <p>Misi Meningkatkan kualitas dan daya saing sumber daya manusia</p> <p>Tujuan Meningkatkan kualitas sumber daya manusia</p> <p>Sasaran Meningkatkannya penanganan masalah kesejahteraan sosial</p> | Penurunan angka kemiskinan melalui program-program penanggulangan kemiskinan bagi warga miskin   | Program Perlindungan jaminan sosial   |
| <b>Tujuan 2 : Menghilangkan kelaparan, mencapai ketahanan pangan dan gizi yang baik, serta meningkatkan pertanian berkelanjutan</b> |   |                       |  |                     |          |                     |                                  |   |   |                                      |   |   |  |   |
| 5.5.4   | Kekurangan gizi (underweight) pada anak balita  | Menurun menjadi 17%   | Prevalensi balita gizi buruk   | SB                  |          | SB                  | Jasa Ekosistem Penyediaan Pangan | <ol style="list-style-type: none"> <li>Jasa ekosistem penyediaan pangan di Kabupaten Konawe Utara secara menyeluruh berada pada kondisi indikasi sedang, dengan total persentase luas 298.718,96 Ha (71,66%),</li> <li>Penyebaran jasa ekosistem penyediaan pangan dengan indikasi sangat tinggi berada di Kecamatan Andowia (3.354 Ha), menyusul Landawe (3.116,62 Ha) dan Molawe (2.863,71 Ha)</li> <li>Jenis penyediaan pangan di Kabupaten Konawe Utara berasal dari hasil perkebunan dan holtikultura, hasil pertanian tanaman pangan dan peternakan, hasil perikanan laut dan air tawar, hasil hutan dan lain-lain</li> </ol> | <p>Jangka Pendek:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>Internalisasi indikator kedalam RPJMD Konut 2021 -2026;</li> <li>Sosialisasi Konsumsi Pangan 4 Sehat 5 Sempurna;</li> </ol> <p>Jangka Menengah:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>Penyusunan Database Kualitas Pangan daerah;</li> <li>Peningkatan pertanian pangan daerah.</li> <li>Penggunaan pupuk organik dalam pertanian pangan;</li> </ol> <p>Jangka Panjang:<br/>Program Konsumsi Pangan Sehat Daerah.</p> | Aspek Pelayanan Umum (Kesehatan)     | Kualitas dan Daya Saing Sumberdaya manusia  | <p>Misi Meningkatkan kualitas dan daya saing sumberdaya manusia</p> <p>Tujuan Meningkatkan kualitas sumberdaya manusia</p> <p>SasaranMeningkatnya derajat kesehatan masyarakat</p>                  | Peningkatan pelayanan kesehatan (promotif, preventif, kuratif, rehabilitatif), penerapan hidup bersih dan sehat, pengendalian penyakit dan perbaikan status gizi masyarakat, serta perluasan jaminan kesehatan | Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat |

| No. Indikator | Indikator  | Target Nasional      | Indikator Daerah                         | Status (Tahun 2020) | Proyeksi | Status (Tahun 2026) | Keterkaitan D3TLH  | Keterangan D3TLH  | Rekomendasi KLHS  | Gambaran Umum Kondisi Daerah (Bab 2) | Permasalahan dan Isu Strategis (Bab 4)     | Visi dan Misi (Bab 5)  | Strategi Arah Kebijakan dan Program Pembangunan (Bab 6)   |   |
|---------------|--|----------------------|--|---------------------|----------|---------------------|--|---|---|--------------------------------------|--|--|---|---|
|               |  |                      |  |                     |          |                     |  |   |   |                                      |  |  | Strategi dan Arah Kebijakan   | Program Pembangunan   |
| 5.20.3        | Proporsi penduduk dengan asupan kalori minimum di bawah 1400 kkal/kapita/hari      | Menurun menjadi 8,5% | Ketersediaan Energi dan Proten Perkapita | NA                  | 3.126    | SB                  | 1.Jasa Ekosistem Penyediaan Pangan<br>2.Jasa Ekosistem Penyediaan Air Bersih | 1. Jasa ekosistem penyediaan pangan di Kabupaten Konawe Utara berada pada kondisi sedang dengan total luas 298.718,96 Ha (71,66%)<br>2. Jasa ekosistem penyediaan air bersih di Kabupaten Konawe Utara berada dalam kondisi sedang dengan total luas 297.269,24 (71,31%)<br>3. Penyebaran jasa ekosistem penyediaan pangan dengan indikasi sangat tinggi berada di Kecamatan Andowia (3.354 Ha), menyusul Landawe (3.116,62 Ha) dan Molawe (2.863,71 Ha)<br>4. Jasa ekosistem penyediaan air bersih dengan kondisi sangat tinggi berada di Kec. Andowia (3.354,38 Ha, Kec. Molawe (2.863,71 Ha), dan Kec. Landawe (2.845,93 Ha) |   | Aspek Pelayanan Umum (Pangan)        | Kualitas dan Daya Saing Sumberdaya manusia | Misi Meningkatkan kualitas dan daya saing sumberdaya manusia<br><br>Tujuan Meningkatkan kualitas sumberdaya manusia<br><br>Sasaran Meningkatnya ketahanan pangan             | Penyediaan pangan yang baik dengan harga yang terjangkau dalam rangka meningkatkan kualitas konsumsi pangan   | 1. Program Pengawasan Keamanan Pangan<br>2. Program Peningkatan Diversifikasi Dan Ketahanan Pangan Masyarakat<br>3. Program Penanganan Kerawanan Pangan |
| 5.5.5         | Prevalensi stunting (pendek dan sangat pendek) pada anak di bawah dua tahun/baduta | Menurun menjadi 28%  | Prevalensi kasus stunting                | NA                  | 10       | SB                  | Jasa Ekosistem Penyediaan Pangan   | 1. Jasa ekosistem penyediaan pangan di Kabupaten Konawe Utara secara menyeluruh berada pada kondisi indikasi sedang, dengan total persentase luas 298.718,96 Ha (71,66%),<br>2. Penyebaran jasa ekosistem penyediaan pangan dengan indikasi sangat tinggi berada di Kecamatan Andowia (3.354 Ha), menyusul Landawe (3.116,62 Ha) dan Molawe (2.863,71 Ha)<br>3. Jenis penyediaan pangan di Kabupaten Konawe Utara berasal dari hasil perkebunan dan holtikultura, hasil pertanian tanaman pangan dan peternakan, hasil perikanan laut dan air tawar, hasil hutan dan lain-lain  | Jangka Pendek:<br>1. Sosialisasi bahaya stunting kepada masyarakat;<br>2. Penyuluhan PHBS dalam segala aktivitas.<br><br>Jangka Menengah:<br>1. Penyusunan database stunting daerah;<br>2. Program Imunisasi Bagi Bayi dan Balita.<br><br>Jangka Panjang :<br>Implementasi program Kabupaten Kota Sehat | Aspek Pelayanan Umum (Kesehatan)     | Kualitas dan Daya Saing Sumberdaya manusia | Misi Meningkatkan kualitas dan daya saing sumberdaya manusia<br><br>Tujuan Meningkatkan kualitas sumberdaya manusia<br><br>Sasaran Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat | Peningkatan pelayanan kesehatan (promotif, kuratif, rehabilitatif), penerapan hidup bersih dan sehat, pengendalian penyakit dan perbaikan status gizi masyarakat, serta perluasan jaminan kesehatan | Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat   |

| No. Indikator  | Indikator                                       | Target Nasional     | Indikator Daerah                              | Status (Tahun 2020) | Proyeksi | Status (Tahun 2026) | Keterkaitan D3TLH                | Keterangan D3TLH   | Rekomendasi KLHS   | Gambaran Umum Kondisi Daerah (Bab 2)     | Permasalahan dan Isu Strategis (Bab 4)     | Visi dan Misi (Bab 5)  | Strategi Arah Kebijakan dan Program Pembangunan (Bab 6)  |   |
|--|---|---------------------|---|---------------------|----------|---------------------|----------------------------------|--|--|--|--|--|--|---|
|  |   |                     |   |                     |          |                     |                                  |  |  |  |  |  | Strategi dan Arah Kebijakan  | Program Pembangunan   |
| 5.5.18   | Insiden Tuberkulosis (ITB) per 100.000 penduduk | Menurun menjadi 245 | Prevalensi Tuberkulosis (TB)/100.000 penduduk | SB                  | 125      | SB                  |                                  |  | Optimalisasi peran Penyuluh Kesehatan dalam mensosialisasikan Gerakan Masyarakat Hidup Sehat (GERMAS)  | Aspek Pelayanan Umum (Kesehatan)         | Kualitas dan Daya Saing Sumberdaya manusia | Misi Meningkatkan kualitas dan daya saing sumberdaya manusia Meningkatkan kualitas sumberdaya manusia Sasaran Meningkatkan derajat kesehatan masyarakat                      | Peningkatan pelayanan kesehatan (promotif, preventif, kuratif, rehabilitatif), penerapan hidup bersih dan sehat, pengendalian penyakit dan perbaikan status gizi masyarakat, serta perluasan jaminan kesehatan | Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat |
| <b>Tujuan 3 : Menjamin kehidupan yang sehat dan meningkatkan Kesejahteraan Seluruh Penduduk Semua Usia</b> |   |                     |   |                     |          |                     |                                  |  |  |  |  |  |  |   |
| 5.5.10   | Angka Kematian Ibu (AKI)                        | Menurun menjadi 306 | Angka Kematian Ibu/100.000 kelahiran hidup    | SB                  | 127      | SB                  | Jasa Ekosistem Penyediaan Pangan | <p>1. Jasa ekosistem penyediaan pangan di Kabupaten Konawe Utara secara menyeluruh berada pada kondisi indikasi sedang, dengan total persentase luas 298.718,96 Ha (71,66%)</p> <p>2. Penyebaran jasa ekosistem penyediaan pangan dengan indikasi sangat tinggi berada di Kecamatan Andowia (3.354 Ha), menyusul Landawe (3.116,62 Ha) dan Molawe (2.863,71 Ha)</p> <p>3. Jenis penyediaan pangan di Kabupaten Konawe Utara berasal dari hasil perkebunan dan holtikultura, hasil pertanian tanaman pangan dan peternakan, hasil perikanan laut dan air tawar, hasil hutan dan lain-lain</p> | <p>Jangka Pendek:</p> <p>1. Sosialisasi terkait pentingnya berobat di fasilitas kesehatan;</p> <p>2. Peningkatan kualitas Tenaga Kesehatan khususnya Bidan Desa.</p> <p>Jangka Menengah:</p> <p>1. Peningkatan sarana dan prasarana faskes baik Puskesmas dan Poskesdes;</p> <p>2. Peningkatan kuantitas Bidan Desa, 1 Desa 1 Bidan.</p> <p>Jangka Panjang : Upgrade keilmuan Bidan Desa</p> | Aspek Kesejahteraan (Angka Kematian Ibu) | Kualitas dan Daya Saing Sumberdaya manusia | Misi Meningkatkan kualitas dan daya saing sumberdaya manusia<br><br>Tujuan Meningkatkan kualitas sumberdaya manusia<br><br>Sasaran Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat | Peningkatan pelayanan kesehatan (promotif, kuratif, rehabilitatif), penerapan hidup bersih dan sehat, pengendalian penyakit dan perbaikan status gizi masyarakat, serta perluasan jaminan kesehatan            | Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat |

| No. Indikator | Indikator   | Target Nasional       | Indikator Daerah                            | Status (Tahun 2020) | Proyeksi | Status (Tahun 2026) | Keterkaitan D3TLH                | Keterangan D3TLH  | Rekomendasi KLHS   | Gambaran Umum Kondisi Daerah (Bab 2)                       | Permasalahan dan Isu Strategis (Bab 4)     | Visi dan Misi (Bab 5)  | Strategi Arah Kebijakan dan Program Pembangunan (Bab 6)  |   |
|---------------|---|-----------------------|---|---------------------|----------|---------------------|----------------------------------|---|--|--|--|--|--|---|
|               |   |                       |   |                     |          |                     |                                  |   |  |  |  |  | Strategi dan Arah Kebijakan  | Program Pembangunan   |
| 5.5.13        | Angka Kematian Balita (AKBa) per 1000 kelahiran hidup   | Menurun               | Angka Kematian Bayi/100.000 kelahiran hidup | SB                  | 0,72     | SB                  | Jasa Ekosistem Penyediaan Pangan | <p>1. Jasa ekosistem penyediaan pangan di Kabupaten Konawe Utara secara menyeluruh berada pada kondisi indikasi sedang, dengan total persentase luas 298.718,96 Ha (71,66%),</p> <p>2. Penyebaran jasa ekosistem penyediaan pangan dengan indikasi sangat tinggi berada di Kecamatan Andowia (3.354 Ha), menyusul Landawe (3.116,62 Ha) dan Molawe (2.863,71 Ha)</p> <p>3. Jenis penyediaan pangan di Kabupaten Konawe Utara berasal dari hasil perkebunan dan hortikultura, hasil pertanian tanaman pangan dan peternakan, hasil perikanan laut dan air tawar, hasil hutan dan lain-lain</p> | <p>Jangka Pendek: Sosialisasi PHBS bagi Ibu dan Bayi.</p> <p>Jangka Menengah: Wajib Imunisasi dasar lengkap bagi bayi;</p> <p>Jangka Panjang: Peningkatan Program Bayi Sehat.</p>            | Aspek Kesejahteraan Masyarakat (Angka Kematian Bayi)       | Kualitas dan Daya Saing Sumberdaya manusia | <p>Misi Meningkatkan kualitas dan daya saing sumberdaya manusia</p> <p>Tujuan Meningkatkan kualitas sumberdaya manusia</p> <p>Sasaran Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat</p>                          | Peningkatan pelayanan kesehatan (promotif, kuratif, rehabilitatif), penerapan hidup bersih dan sehat, pengendalian penyakit dan perbaikan status gizi masyarakat, serta perluasan jaminan kesehatan                              | Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat |
| 5.12.2        | Proporsi perempuan usia reproduksi (15-49 tahun) atau pasangannya yang memiliki kebutuhan keluarga berencana dan menggunakan alat kontrasepsi metode modern | Meningkat menjadi 66% | Jumlah peserta KB aktif                     | SB                  | 12.051   | SB                  |                                  |   | <p>Jangka Pendek: Sosialisasi terkait penggunaan kontrasepsi</p> <p>Jangka Menengah: Penambahan Penyuluh KB di tiap Desa 1 Penyuluh KB.</p> <p>Jangka Panjang: Upgrade ilmu penyuluh KB.</p> | Aspek Pelayanan Umum (Pengendalian dan Keluarga Berencana) | Kualitas dan Daya Saing Sumberdaya manusia | <p>Misi Meningkatkan kualitas dan daya saing sumberdaya manusia</p> <p>Tujuan Meningkatkan kualitas sumberdaya manusia</p> <p>Sasaran Meningkatkan kualitas hidup perempuan dan pengarusutamaan hak anak</p> | Peningkatan kualitas hidup melalui pemberdayaan perempuan, pengarusutamaan gender dalam pembangunan, perlindungan perempuan, pengarusutamaan hak anak, serta meningkatkan pengendalian penduduk melalui intensifikasi program KB | Program Pembinaan Keluarga Berencana  |

| No. Indikator   | Indikator  | Target Nasional          | Indikator Daerah   | Status (Tahun 2020) | Proyeksi | Status (Tahun 2026) | Keterkaitan D3TLH | Keterangan D3TLH | Rekomendasi KLHS  | Gambaran Umum Kondisi Daerah (Bab 2)                                | Permasalahan dan Isu Strategis (Bab 4)      | Visi dan Misi (Bab 5)   | Strategi Arah Kebijakan dan Program Pembangunan (Bab 6)  |   |
|---|--|--------------------------|--|---------------------|----------|---------------------|-------------------|------------------|---|---|---|---|--|---|
|   |  |                          |  |                     |          |                     |                   |                  |   |   |   |   | Strategi dan Arah Kebijakan  | Program Pembangunan   |
| 5.12.6  | Unmet need pelayanan Kesehatan   | Menurun menjadi 9,9%     | Cakupan PUS Unmeetneed   | SB                  | 0,01     | SB                  |                   |                  |   | Aspek Pelayanan Umum (Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana) | Kualitas dan Daya Saing Sumberdaya manusia  | Misi Meningkatkan kualitas dan daya saing sumberdaya manusia<br><br>Tujuan Meningkatkan kualitas sumberdaya manusia<br><br>Sasaran Meningkatnya kualitas hidup perempuan dan pengarusutamaan hak anak | Peningkatan kualitas hidup melalui pemberdayaan perempuan, pengarusutamaan gender dalam pembangunan, perlindungan perempuan, pengarusutamaan hak anak, serta meningkatkan pengendalian penduduk melalui intensifikasi program KB   | Program Pemberdayaan dan Peningkatan Keluarga Sejahtera   |
| <b>Tujuan 4 : Menjamin kualitas pendidikan yang inklusif dan merata serta meningkatkan kesempatan belajar sepanjang hayat untuk semua</b> |  |                          |  |                     |          |                     |                   |                  |   |   |   |   |  |   |
| 5.4.10  | Rasio Angka Partisipasi Murni (APM) perempuan/laki-laki di (1) SD/MI/ sederajat ; (2) SMP/MTs/ sederajat; (3) SMA/SMK/MA/ sederajat; dan Rasio Angka Partisipasi Kasar (APK) perempuan/laki-laki di (4) Perguruan Tinggi | Meningkat menjadi 94,78% | Angka Partisipasi Murni (APM) : (1) SD/MI (2) SLTP/Mts dan Angka Partisipasi Kasar (APK) : (1) PAUD (2) SD/MI (3) SLTP/MTs | TT                  | 92.14    | SB                  |                   |                  | Jangka Pendek:<br>1. Sosialisasi wajib belajar 12 Tahun;<br>2. Sekolah gratis 9 Tahun;<br>3. Pemanfaatan sistem DAPODIK lebih efektif dan efisien;<br><br>Jangka Menengah:<br>1. Pemberian Beasiswa Konasara bagi pelajar kurang mampu dan berprestasi hingga 9 Tahun;<br>2. Bersinergi dengan Perumda Konasara untuk pemberian beasiswa dari sumberdana CSR dari perusahaan swasta<br><br>Jangka Panjang:<br>1. Perbaikan seluruh Bangunan Sekolah yang rusak;<br>2. Program 1 Sekolah per 3 Desa. | Aspek Pelayanan Umum (Pendidikan)                                   | Kualitas dan daya saing sumber daya manusia | Misi Meningkatkan kualitas dan daya saing sumberdaya manusia<br><br>Tujuan Meningkatkan kualitas sumberdaya manusia<br><br>Sasaran Meningkatnya akses pendidikan                                      | Peningkatan partisipasi pendidikan dan peningkatan kualitas pengelolaan pendidikan melalui pendidikan karakter, peningkatan motivasi belajar, pemberian bantuan beasiswa bagi peserta didik, beasiswa Konasara bagi perguruan tinggi, peningkatan sarana prasarana sekolah serta bahan ajar, peningkatan kualitas dan pemerataan tenaga pengajar sesuai dengan kebutuhan wilayah | 1. Program Pengelolaan Pendidikan<br>2. Program Pengembangan Kurikulum Pendidik dan Tenaga Kependidikan<br>3. Program Pendidikan dan Kependidikan |

| No. Indikator | Indikator  | Target Nasional         | Indikator Daerah  | Status (Tahun 2020) | Proyeksi | Status (Tahun 2026) | Keterkaitan D3TLH                | Keterangan D3TLH  | Rekomendasi KLHS   | Gambaran Umum Kondisi Daerah (Bab 2) | Permasalahan dan Isu Strategis (Bab 4)      | Visi dan Misi (Bab 5)  | Strategi Arah Kebijakan dan Program Pembangunan (Bab 6)  |  |
|---------------|--|-------------------------|---|---------------------|----------|---------------------|----------------------------------|---|--|--------------------------------------|---|--|--|--|
|               |  |                         |   |                     |          |                     |                                  |   |  |                                      |   |  | Strategi dan Arah Kebijakan  | Program Pembangunan  |
| 5.4.11        | Persentase melek aksara penduduk umur ≥15 tahun                        | Meningkat menjadi 96,1% | Penduduk yang berusia >15 tahun melek huruf (tidak buta aksara) | SB                  | 98,21    | SB                  | Jasa Ekosistem Penyediaan Pangan | <p>1. Jasa ekosistem penyediaan pangan di Kabupaten Konawe Utara secara menyeluruh berada pada kondisi indikasi sedang, dengan total persentase luas 298.718,96 Ha (71,66%),</p> <p>2. Penyebaran jasa ekosistem penyediaan pangan dengan indikasi sangat tinggi berada di Kecamatan Andowia (3.354 Ha), menyusul Landawe (3.116,62 Ha) dan Molawe (2.863,71 Ha)</p> <p>3. Jenis penyediaan pangan di Kabupaten Konawe Utara berasal dari hasil perkebunan dan holtikultura, hasil pertanian tanaman pangan dan peternakan, hasil perikanan laut dan air tawar, hasil hutan dan lain-lain</p> | Optimalisasi peran perpustakaan daerah dalam menjamin kecukupan literasi bagi masyarakat | Aspek Pelayanan Umum (Pendidikan)    | Kualitas dan daya saing sumber daya manusia | Misi Meningkatkan kualitas dan daya saing sumberdaya manusia<br>Meningkatkan kualitas sumberdaya manusia<br>SasaranMeningkatnya akses pendidikan         | Peningkatan partisipasi pendidikan dan peningkatan kualitas pengelolaan pendidikan melalui pendidikan karakter, peningkatan motivasi belajar, pemberian bantuan beasiswa bagi peserta didik, beasiswa Konasara bagi perguruan tinggi, peningkatan sarana prasarana sekolah serta bahan ajar, peningkatan kualitas dan pemerataan tenaga pengajar sesuai dengan kebutuhan wilayah | <p>1. Program Pengelolaan Pendidikan</p> <p>2. Program Pengembangan Kurikulum</p> <p>3. Program Pendidik dan Tenaga Kependidikan</p> |
| 5.4.12        | Persentase melek aksara penduduk umur 15-24 tahun dan umur 15-59 tahun | Meningkat               | Angka Melek Huruf   | SB                  | 99,07    | SB                  | Jasa Ekosistem Penyediaan Pangan | <p>1. Jasa ekosistem penyediaan pangan di Kabupaten Konawe Utara secara menyeluruh berada pada kondisi indikasi sedang, dengan total persentase luas 298.718,96 Ha (71,66%),</p> <p>2. Penyebaran jasa ekosistem penyediaan pangan dengan indikasi sangat tinggi berada di Kecamatan Andowia (3.354 Ha), menyusul Landawe (3.116,62 Ha) dan Molawe (2.863,71 Ha)</p> <p>3. Jenis penyediaan pangan di Kabupaten Konawe Utara berasal dari hasil perkebunan dan holtikultura, hasil pertanian tanaman pangan dan peternakan, hasil perikanan laut dan air tawar, hasil hutan dan lain-lain</p> |  | Aspek Pelayanan Umum (Pendidikan)    | Kualitas dan daya saing sumber daya manusia | Misi Meningkatkan kualitas dan daya saing sumberdaya manusia<br>Tujuan Meningkatkan kualitas sumberdaya manusia<br>Sasaran Meningkatnya akses pendidikan | Peningkatan partisipasi pendidikan dan peningkatan kualitas pengelolaan pendidikan melalui pendidikan karakter, peningkatan motivasi belajar, pemberian bantuan beasiswa bagi peserta didik, beasiswa Konasara bagi perguruan tinggi, peningkatan sarana prasarana sekolah serta bahan ajar, peningkatan kualitas dan pemerataan tenaga  | <p>1. Program Pengelolaan Pendidikan</p> <p>2. Program Pengembangan Kurikulum</p> <p>3. Program Pendidik dan Tenaga Kependidikan</p> |

| No. Indikator   | Indikator  | Target Nasional       | Indikator Daerah                                       | Status (Tahun 2020) | Proyeksi | Status (Tahun 2026) | Keterkaitan D3TLH | Keterangan D3TLH | Rekomendasi KLHS   | Gambaran Umum Kondisi Daerah (Bab 2)                                | Permasalahan dan Isu Strategis (Bab 4)      | Visi dan Misi (Bab 5)  | Strategi Arah Kebijakan dan Program Pembangunan (Bab 6)  |   |
|---|--|-----------------------|--|---------------------|----------|---------------------|-------------------|------------------|--|---|---|--|--|---|
|   |  |                       |  |                     |          |                     |                   |                  |  |   |   |  | Strategi dan Arah Kebijakan  | Program Pembangunan   |
|   |  |                       |  |                     |          |                     |                   |                  |  |   |   |  | pengajar sesuai dengan kebutuhan wilayah   |   |
| 5.4.14  | Persentase guru TK, SD, SMP, SMA, SMK, dan PLB yang bersertifikat pendidik   | Meningkat             | Jumlah Guru yang bersertifikat (1) SD/MI (2) SLTP/Mts  | SB                  | 32,74    | SB                  |                   |                  | Peningkatan syarat perekrutan guru bersertifikat pendidik, pemberian pendidikan dan pelatihan berkala bagi guru  | Aspek Pelayanan Umum (Pendidikan)                                   | Kualitas dan daya saing sumber daya manusia | Misi Meningkatkan kualitas dan daya saing sumberdaya manusia<br><br>Tujuan Meningkatkan kualitas sumberdaya manusia<br><br>Sasaran Meningkatkan akses pendidikan                                     | Peningkatan partisipasi pendidikan dan peningkatan kualitas pengelolaan pendidikan melalui pendidikan karakter, peningkatan motivasi belajar, pemberian bantuan beasiswa bagi peserta didik, beasiswa Konasara bagi perguruan tinggi, peningkatan sarana prasarana sekolah serta bahan ajar, peningkatan kualitas dan pemerataan tenaga pengajar sesuai dengan kebutuhan wilayah | 1. Program Pengelolaan Pendidikan<br>2. Program Pengembangan Kurikulum<br>3. Program Pendidik dan Tenaga Kependidikan |
| <b>Tujuan 5 : Mencapai kesetaraan gender dan memberdayakan kaum perempuan</b> |  |                       |  |                     |          |                     |                   |                  |  |   |   |  |  |   |
| 5.13.4  | Proporsi perempuan dewasa dan anak perempuan (umur 15-64 tahun) mengalami kekerasan (fisik, seksual, atau emosional) oleh pasangan atau mantan pasangandalam 12 bulan terakhir | Menurun (2018: 0,25%) | Jumlah Korban Kekerasan Perempuan yang ditindaklanjuti | SB                  | 1        | SB                  |                   |                  | Jangka Pendek:<br>Sosialisasi anti diskriminasi<br><br>Jangka Menengah:<br>1. Perekrutan ASN dan TKS yang tidak diskriminatif terhadap Perempuan dan disabilitas;<br>2. Bersinergi dengan Perumda Konasara untuk pembukaan lapangan pekerjaan bagi perempuan dan disabilitas;<br>3. Pembuatan Perda tentang Perlindungan Perempuan, Anak, dan Disabilitas di ruang publik. | Aspek Pelayanan Umum (Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak) | Kualitas dan Daya Saing Sumberdaya manusia  | Misi Meningkatkan kualitas dan daya saing sumberdaya manusia<br><br>Tujuan Meningkatkan kualitas sumberdaya manusia<br><br>SasaranMeningkatnya kualitas hidup perempuan dan pengarusutamaan hak anak | Peningkatan kualitas hidup melalui pemberdayaan perempuan, pengarusutamaan gender dalam pembangunan, perlindungan perempuan, pengarusutamaan hak anak, serta meningkatkan pengendalian penduduk melalui intensifikasi program KB   | Program Perlindungan Perempuan  |

| No. Indikator | Indikator  | Target Nasional        | Indikator Daerah                                   | Status (Tahun 2020) | Proyeksi | Status (Tahun 2026) | Keterkaitan D3TLH | Keterangan D3TLH | Rekomendasi KLHS  | Gambaran Umum Kondisi Daerah (Bab 2)                                | Permasalahan dan Isu Strategis (Bab 4)     | Visi dan Misi (Bab 5)   | Strategi Arah Kebijakan dan Program Pembangunan (Bab 6)  |   |
|---------------|--|------------------------|--|---------------------|----------|---------------------|-------------------|------------------|---|---|--|---|--|---|
|               |  |                        |  |                     |          |                     |                   |                  |   |   |  |   | Strategi dan Arah Kebijakan  | Program Pembangunan                                       |
|               |  |                        |  |                     |          |                     |                   |                  | Jangka Panjang: Pelibatan perempuan dan disabilitas dalam pengambilan kebijakan |   |  |   |  |   |
| 5.13.3        | Prevalensi kekerasan terhadap anak perempuan   | Menurun menjadi 20,48% | Jumlah Korban Kekerasan anak yang ditindaklanjuti  | SB                  | 1        | SB                  |                   |                  |   | Aspek Pelayanan Umum (Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak) | Kualitas dan Daya Saing Sumberdaya manusia | Misi Meningkatkan kualitas dan daya saing sumberdaya manusia<br><br>Tujuan Meningkatkan kualitas sumberdaya manusia<br><br>Sasaran Meningkatnya kualitas hidup perempuan dan pengarusutamaan hak anak | Peningkatan kualitas hidup melalui pemberdayaan perempuan, pengarusutamaan gender dalam pembangunan, perlindungan perempuan, pengarusutamaan hak anak, serta meningkatkan pengendalian penduduk melalui intensifikasi program KB | Program Perlindungan Khusus Anak                          |
| 5.1.1         | Proporsi kursi yang diduduki perempuan diparlemen tingkat pusat, parlemen daerah dan pemerintah daerah | Meningkat              | Persentase Perempuan yang menduduki jabatan publik | SB                  | 8,23     | SB                  |                   |                  | Optimalisasi peran perempuan dalam penentuan kebijakan pembangunan              | Aspek Pelayanan Umum (Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak) | Kualitas dan Daya Saing Sumberdaya manusia | Misi Meningkatkan kualitas dan daya saing sumberdaya manusia<br><br>Tujuan Meningkatkan kualitas sumberdaya manusia<br><br>Sasaran Meningkatnya kualitas hidup perempuan dan pengarusutamaan hak anak | Peningkatan kualitas hidup melalui pemberdayaan perempuan, pengarusutamaan gender dalam pembangunan, perlindungan perempuan, pengarusutamaan hak anak, serta meningkatkan pengendalian penduduk melalui intensifikasi program KB | Program Pengarusutamaan Gender dan Pemberdayaan Perempuan |

| No. Indikator  | Indikator                                 | Target Nasional             | Indikator Daerah                      | Status (Tahun 2020) | Proyeksi | Status (Tahun 2026) | Keterkaitan D3TLH                         | Keterangan D3TLH   | Rekomendasi KLHS  | Gambaran Umum Kondisi Daerah (Bab 2)                           | Permasalahan dan Isu Strategis (Bab 4)                        | Visi dan Misi (Bab 5)   | Strategi Arah Kebijakan dan Program Pembangunan (Bab 6)  |  |
|--|---|-----------------------------|---------------------------------------|---------------------|----------|---------------------|---|--|---|--|---|---|--|--|
|  |   |                             |                                       |                     |          |                     |   |  |   |  |   |   | Strategi dan Arah Kebijakan  | Program Pembangunan  |
| <b>Tujuan 6 : Menjamin ketersediaan serta pengelolaan air bersih dan sanitasi yang berkelanjutan</b>   |   |                             |                                       |                     |          |                     |   |  |   |  |   |   |  |  |
| 5.5.44   | Persentase Rumah Tangga bersanitasi layak | Meningkat                   | Penduduk Berakses Sanitasi Yang Layak | NA                  | 63%      | SB                  | Jasa Ekosistem pengaturan tata aliran air | <ol style="list-style-type: none"> <li>Jasa ekosistem pengaturan tata aliran air di Kabupaten Konawe Utara pada kondisi tinggi, dengan luas wilayah 277.116,11 Ha (66,48 Ha)</li> <li>Wilayah pada kondisi tinggi berada di Kec. Asera (117.328,84 Ha), menyusul Kec. Wiwirano (58.751,78Ha) dan Kec. Oheo (27.676,28 Ha)</li> </ol>             | <p><b>Jangka Pendek:</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>Sosialisasi PHBS dalam pembangunan;</li> <li>Penyusunan database sanitasi.</li> </ol> <p><b>Jangka Menengah:</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>Mengikuti program hibah</li> <li>Sanitasi baik APBN maupun Bantuan Luar Negeri Sanimas, dsb).</li> </ol> <p><b>Jangka Panjang:</b> Peningkatan akses Sanitasi perkotaan dan pedesaan</p>  | Aspek Pelayanan Umum (Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman) | Infrastruktur wilayah dan sarana prasarana kawasan permukiman | Misi Meningkatkan ketersediaan infrastruktur dasar dan sarana prasarana kawasan permukiman Tujuan Meningkatkan kualitas infrastruktur wilayah SasaranTerpenuhi sarana prasarana kawasan permukiman  | Penurunan luas kawasan kumuh melalui peningkatan kualitas rumah layak huni dan jalan lingkungan permukiman, serta pembangunan dan rehabilitasi rumah korban bencana  | Program peningkatan prasarana, sarana dan utilitas umum (PSU)  |
| <b>Tujuan 7 : Menjamin akses energy yang terjangkau, andal, berkelanjutan dan modern untuk semua</b>   |   |                             |                                       |                     |          |                     |   |  |   |  |   |   |  |  |
| <b>Tujuan 8 : Meningkatkan pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan, kesempatan kerja yang produktif dan menyeluruh, serta pekerjaan yang layak untuk semua</b> |   |                             |                                       |                     |          |                     |   |  |   |  |   |   |  |  |
| 5.26.5   | PDB per kapita                            | Meningkat (2018:22,86 Juta) | PDRB per kapita berlaku               | SB                  | 62.831   | SB                  | Jasa Ekosistem penyediaan air bersih      | <ol style="list-style-type: none"> <li>Jasa ekosistem penyediaan air bersih di Kabupaten Konawe Utara berada dalam kondisi sedang</li> <li>Persentase luas wilayah dengan kondisi sedang yakni 297.269,24 Ha (71,31), berada di wilayah Kec. Andowia (3.354,38 Ha), menyusul Kec. Molawe (2.863,71 Ha) dan Kec. Landawe (2.845,93 Ha)</li> </ol> | <p><b>Jangka Pendek:</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>Menjaga stabilitas harga dan laju inflasi daerah;</li> <li>Pembangunan sarana dan prasarana pariwisata guna peningkatan pemasukan daerah.</li> </ol> <p><b>Jangka Menengah:</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>Membuka kerjasama dan investasi dengan pihak luar;</li> <li>Mempersingkat birokrasi perizinan usaha.</li> </ol> <p><b>Jangka Panjang:</b> Peningkatan Pendapatan Asli Daerah</p> | Aspek Kesejahteraan Masyarakat (PDRB Per Kapita)               | Daya saing ekonomi daerah                                     | Misi Mewujudkan keadilan sosial dan nilai tambah dalam pengelolaan sumberdaya alam guna meningkatkan daya saing ekonomi Tujuan Meningkatkan pertumbuhan dan daya saing ekonomi Sasaran Meningkatnya pertumbuhan sektor - sektor unggulan daerah | <ol style="list-style-type: none"> <li>Peningkatan produksi dan produktivitas pertanian melalui penyediaan bibit, sarana dan prasarana pertanian, kapasitas petani/keompok tani, dan bantuan permodalan</li> <li>Pengembangan perternakan melalui penyediaan sarana prasarana, pemanfaatan teknologi, dan peningkatan</li> </ol> | <ol style="list-style-type: none"> <li>Program Pengelolaan Perikanan Tangkap</li> <li>Program Pengelolaan Perikanan Budidaya</li> <li>Program Penyediaan dan Pengembangan Prasarana Pertanian</li> <li>Program Pengembangan dan Pengembangan Sarana Pertanian</li> <li>Program Pemberdayaan Dan Perlindungan Koperasi</li> </ol> |

| No. Indikator | Indikator | Target Nasional | Indikator Daerah | Status (Tahun 2020) | Proyeksi | Status (Tahun 2026) | Keterkaitan D3TLH | Keterangan D3TLH | Rekomendasi KLHS | Gambaran Umum Kondisi Daerah (Bab 2) | Permasalahan dan Isu Strategis (Bab 4) | Visi dan Misi (Bab 5) | Strategi Arah Kebijakan dan Program Pembangunan (Bab 6)   |  |
|---------------|-----------|-----------------|------------------|---------------------|----------|---------------------|-------------------|------------------|------------------|--------------------------------------|--|-----------------------|---|--|
|               |           |                 |                  |                     |          |                     |                   |                  |                  |                                      |  |                       | Strategi dan Arah Kebijakan   | Program Pembangunan  |
|               |           |                 |                  |                     |          |                     |                   |                  |                  |                                      |  |                       | <p>kesehatan hewan</p> <p>3. Meningkatkan produktivitas perikanan melalui pembinaan nelayan tangkap dan budidaya, penyediaan sarana prasarana, dan pengembangan pola kemitraan</p> <p>4. Meningkatkan kinerja ekspor dan perdagangan dalam negeri melalui peningkatan kualitas pasar, pengawasan, promosi dan pemasaran produk-produk unggulan</p> <p>5. Pengembangan kapasitas kopersidan UMKM</p> <p>6. Mendorong pengembangan industri dan kawasan industri sesuai dengan potensi daerah</p> | <p>6. Program Peningkatan Sarana Distribusi Perdagangan</p> <p>7. Program Pengendalian Usaha Industri Kabupaten/Kota</p> |

| No. Indikator | Indikator  | Target Nasional      | Indikator Daerah                   | Status (Tahun 2020) | Proyeksi | Status (Tahun 2026) | Keterkaitan D3TLH               | Keterangan D3TLH   | Rekomendasi KLHS  | Gambaran Umum Kondisi Daerah (Bab 2) | Permasalahan dan Isu Strategis (Bab 4)     | Visi dan Misi (Bab 5)   | Strategi Arah Kebijakan dan Program Pembangunan (Bab 6)   |  |
|---------------|--|----------------------|------------------------------------|---------------------|----------|---------------------|---------------------------------|--|---|--------------------------------------|--|---|---|--|
|               |  |                      |                                    |                     |          |                     |                                 |  |   |                                      |  |   | Strategi dan Arah Kebijakan   | Program Pembangunan  |
| 5.19.9        | Tingkat pengangguran terbuka berdasarkan jenis kelamin dan kelompok umur | Menurun (2018:4,11%) | Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) | SB                  | 3,53     | SB                  |                                 |  |   | Aspek Pelayanan Umum (Tenaga Kerja)  | Kualitas dan Daya Saing Sumberdaya manusia | Misi Mewujudkan kualitas dan daya saing sumberdaya manusia<br><br>Tujuan Meningkatkan kualitas sumberdaya manusia<br><br>Sasaran Meningkatnya sumberdaya manusia yang kompeten dan produktif  | Memperluas kesempatan kerja, pelatihan tenaga kerja, penyediaan lapangan kerja, perlindungan dan pengawasan ketenagakerjaan | 1. Program Perencanaan Tenaga Kerja<br>2. Program Penempatan Tenaga Kerja<br>3. Program Pelatihan kerja dan produktivitas tenaga kerja |
| 5.22.2        | Jumlah wisatawan mancanegara   | Meningkat (2018:10)  | Jumlah Kunjungan wisata            | SB                  | 13.569   | SB                  | Jasa Ekosistem Pengaturan Iklim | 1. Kondisi Jasa Ekosistem Pengaturan Iklim di Kabupaten Konawe Utara yaitu kondisi sangat tinggi, dengan luas wilayah 304.246,89 Ha (72,99%)<br>2. Wilayah terluas pada kondisi sangat tinggi berada di Kec. Asera (131.609,63 Ha), kemudian Kec. Wiwirano (70.169,62 Ha) dan Kec. Oheo (30.104,30 Ha)<br>3. Kondisi sangat rendah berada di wilayah Kec. Asera (3.607,79 Ha), Kec. Molawe (2.398,69 Ha) dan Kec. Wiwirano (2.279,48 Ha) | Jangka Pendek:<br>1. Internalisasi indikator kedalam RPJMD Konut 2021 - 2026;<br>2. Membangun sarana dan prasarana penunjang pariwisata.<br><br>Jangka Menengah:<br>1. Pengembangan tempat-tempat wisata baru dengan konsep kekinian;<br>2. Optimalisasi event-event rutin di tempat-tempat wisata<br><br>Jangka Panjang: Bekerjasama dengan Pemprov Sultra dan Kementerian Pariwisata untuk pengadaan event nasional dan internasional di Konawe Utara | Aspek Pelayanan Umum (Pariwisata)    | Daya saing ekonomi daerah                  | Misi Mewujudkan keadilan sosial dan nilai tambah dalam pengelolaan sumberdaya alam guna meningkatkan daya saing ekonomi<br><br>Tujuan Meningkatkan pertumbuhan dan daya saing ekonomi<br><br>Sasaran Meningkatnya pertumbuhan sektor - sektor unggulan daerah | Peningkatan kunjungan wisata melalui pengembangan atraksi serta peningkatan destinasi wisata baru                           | 1. Program peningkatan daya tarik pariwisata<br>2. Program Pemasaran Pariwisata  |

| No. Indikator  | Indikator                            | Target Nasional         | Indikator Daerah        | Status (Tahun 2020) | Proyeksi | Status (Tahun 2026) | Keterkaitan D3TLH               | Keterangan D3TLH  | Rekomendasi KLHS | Gambaran Umum Kondisi Daerah (Bab 2) | Permasalahan dan Isu Strategis (Bab 4) | Visi dan Misi (Bab 5)  | Strategi Arah Kebijakan dan Program Pembangunan (Bab 6)   |   |
|--|--------------------------------------|-------------------------|-------------------------|---------------------|----------|---------------------|---------------------------------|---|------------------|--------------------------------------|--|--|---|---|
|  |                                      |                         |                         |                     |          |                     |                                 |   |                  |                                      |  |  | Strategi dan Arah Kebijakan   | Program Pembangunan   |
| 5.22.3   | Jumlah kunjungan wisatawan nusantara | Meningkat (2018:35.010) | Jumlah Kunjungan wisata | SB                  | 13.569   | SB                  | Jasa Ekosistem Pengaturan Iklim | <ol style="list-style-type: none"> <li>Kondisi Jasa Ekosistem Pengaturan Iklim di Kabupaten Konawe Utara yaitu kondisi sangat tinggi, dengan luas wilayah 304.246,89 Ha (72,99%)</li> <li>Wilayah terluas pada kondisi sangat tinggi berada di Kec. Asera (131.609,63 Ha), kemudian Kec. Wiwirano (70.169,62 Ha) dan Kec. Oheo (30.104,30 Ha)</li> <li>Kondisi sangat rendah berada di wilayah Kec. Asera (3.607,79 Ha), Kec. Molawe (2.398,69 Ha) dan Kec. Wiwirano (2.279,48 Ha)</li> </ol> |                  | Aspek Pelayanan Umum (Pariwisata)    | Daya saing ekonomi daerah              | <p>Misi Mewujudkan keadilan sosial dan nilai tambah dalam pengelolaan sumberdaya alam guna meningkatkan daya saing ekonomi</p> <p>Tujuan Meningkatkan pertumbuhan dan daya saing ekonomi</p> <p>Sasaran Meningkatnya pertumbuhan sektor - sektor unggulan daerah</p> | Peningkatan kunjungan wisata melalui pengembangan atraksi serta peningkatan destinasi wisata baru | <ol style="list-style-type: none"> <li>Program peningkatan daya tarik destinasi pariwisata</li> <li>Program Pemasaran Pariwisata</li> </ol> |
| Tujuan 9 : Membangun infrastruktur yang tangguh, meningkatkan industri inklusif dan berkelanjutan, serta mendorong inovasi |                                      |                         |                         |                     |          |                     |                                 |   |                  |                                      |  |  |   |   |

| No. Indikator   | Indikator                                | Target Nasional        | Indikator Daerah                            | Status (Tahun 2020) | Proyeksi | Status (Tahun 2026) | Keterkaitan D3TLH   | Keterangan D3TLH   | Rekomendasi KLHS   | Gambaran Umum Kondisi Daerah (Bab 2)            | Permasalahan dan Isu Strategis (Bab 4)     | Visi dan Misi (Bab 5)   | Strategi Arah Kebijakan dan Program Pembangunan (Bab 6)   |  |
|---|--|------------------------|---|---------------------|----------|---------------------|---|--|--|---|--|---|---|--|
|   |  |                        |   |                     |          |                     |   |  |  |   |  |   | Strategi dan Arah Kebijakan   | Program Pembangunan  |
| 5.17.2  | Laju pertumbuhan PDB industri manufaktur | Meningkat (2018:7,66%) | Pertumbuhan PDRB Sektor Industri Pengolahan | TT                  | 1,18     | SB                  | 1.Jasa Ekosistem Penyediaan Pangan<br>2.Jasa ekosistem penyediaan air bersih<br>3.Jasa ekosistem penyediaan serat, bahan bakar dan mineral lain | 1. Jasa ekosistem penyediaan pangan di Kabupaten Konawe Utara berada pada kondisi sedang dengan total luas 298.718,96 Ha (71,66%)<br>2. Jasa ekosistem penyediaan air bersih di Kabupaten Konawe Utara berada dalam kondisi sedang dengan total luas 297.269,24 (71,31%)<br>3. Jasa Ekosistem penyediaan serat, bahan bakar dan mineral lain di Kabupaten Konawe Utara berada dalam kondisi sangat tinggi<br>4. Penyebaran jasa ekosistem penyediaan pangan dengan indikasi sangat tinggi berada di Kecamatan Andowia (3.354 Ha), menyusul Landawe (3.116,62 Ha) dan Molawe (2.863,71 Ha)<br>5. Penyebaran jasa ekosistem penyediaan air bersih dengan kondisi sangat tinggi berada di Kec. Andowia (3.354,38 Ha, Kec. Molawe (2.863,71 Ha), dan Kec. Landawe (2.845,93 Ha).<br>6. Wilayah terluas penyediaan serat di Kec. Asera (126.358,53 Ha), kemudian Kec. Wiwirano (67.051,59 Ha) dan Kec. Oheo (30.104, 30 Ha) | Jangka Pendek:<br>1. Menjaga stabilitas harga dan laju inflasi daerah;<br>2. Pembangunan sarana dan prasarana pariwisata guna peningkatan pemasukan daerah;<br><br>Jangka Menengah:<br>1. Membuka kerjasama dan investasi dengan pihak luar;<br>2. Mempersingkat birokrasi perizinan usaha<br><br>Jangka Panjang:<br>Peningkatan Pendapatan Asli Daerah  | Aspek Kesejahteraan Masyarakat (PDRB)           | Daya saing ekonomi daerah                  | Misi Mewujudkan keadilan sosial dan nilai tambah dalam pengelolaan sumberdaya alam guna meningkatkan daya saing ekonomi<br><br>Tujuan Meningkatkan pertumbuhan dan daya saing ekonomi<br><br>Sasaran Meningkatnya pertumbuhan sektor - sektor unggulan daerah | Mendorong pengembangan industri dan kawasan industri sesuai dengan potensi daerah   | Program Perencanaan Dan Pembangunan Industri   |
| <b>Tujuan 10 : Mengurangi kesenjangan intra- dan antarnegara</b>                            |  |                        |   |                     |          |                     |   |  |  |   |  |   |   |  |
| 5.26.7  | Koefisien Gini                           | Menurun Menjadi 0,36%  | Indeks Gini                                 | SB                  | 0,364    | SB                  | Jasa Ekosistem Penyediaan Pangan  | 1. Jasa ekosistem penyediaan pangan di Kabupaten Konawe Utara secara menyeluruh berada pada kondisi indikasi sedang, dengan total persentase luas 298.718,96 Ha (71,66%),<br>2. Penyebaran jasa ekosistem penyediaan pangan dengan indikasi sangat tinggi berada di Kecamatan Andowia (3.354 Ha), menyusul Landawe (3.116,62 Ha) dan Molawe (2.863,71 Ha)<br>3. Jenis penyediaan pangan di Kabupaten Konawe Utara berasal dari hasil perkebunan dan hortikultura, hasil pertanian tanaman pangan dan peternakan, hasil perikanan laut dan air tawar, hasil hutan dan lain-lain   | Jangka Pendek:<br>1. Pemberian Bantuan Sosial;<br>2. Pemberian modal usaha;<br>3. Pemberian pelatihan kewirausahaan;<br>4. Penyusunan Database kemiskinan<br><br>Jangka Menengah:<br>1. Bersinergi dengan Pengusaha untuk membuka lapangan kerja baru;<br>2. Mengikuti program-program hibah pengentasan kemiskinan.<br><br>Jangka Panjang:<br>Bersinergi dengan pengusaha untuk memberikan CSR pengentasan kemiskinan | Aspek Kesejahteraan Masyarakat (Koefisien Gini) | Kualitas dan Daya Saing Sumberdaya manusia | Misi Mewujudkan kualitas dan daya saing sumberdaya manusia<br><br>Tujuan Meningkatkan kualitas sumberdaya manusia<br><br>Sasaran Meningkatnya sumberdaya manusia yang kompeten dan produktif  | Memperluas kesempatan kerja, pelatihan tenaga kerja, penyediaan lapangan kerja, perlindungan dan pengawasan ketenagakerjaan | 1. Program Perencanaan Tenaga Kerja<br>2. Program Penempatan Tenaga Kerja<br>3. Program Hubungan Industrial<br>4. Program Pelatihan kerja dan produktivitas tenaga kerja |
| <b>Tujuan 11 : Menjadikan kota dan permukiman inklusif, aman, tangguh dan berkelanjutan</b> |  |                        |   |                     |          |                     |   |  |  |   |  |   |   |  |

| No. Indikator | Indikator   | Target Nasional          | Indikator Daerah        | Status (Tahun 2020) | Proyeksi | Status (Tahun 2026) | Keterkaitan D3TLH                        | Keterangan D3TLH   | Rekomendasi KLHS   | Gambaran Umum Kondisi Daerah (Bab 2)                           | Permasalahan dan Isu Strategis (Bab 4)                        | Visi dan Misi (Bab 5)  | Strategi Arah Kebijakan dan Program Pembangunan (Bab 6)   |                            |
|---------------|---|--------------------------|-------------------------|---------------------|----------|---------------------|--|--|--|--|---|--|---|----------------------------|
|               |   |                          |                         |                     |          |                     |  |  |  |  |   |  | Strategi dan Arah Kebijakan   | Program Pembangunan        |
| 5.8.8         | Proporsi rumah tangga yang memiliki akses terhadap hunian yang layak dan terjangkau | Meningkat (2018:65, 75%) | Jumlah rumah layak huni | NA                  | 18.909   | SB                  | Jasa Ekosistem pengaturan kualitas udara | <p>1. Indikasi kondisi Jasa ekosistem pengaturan kualitas udara di Kabupaten Konawe Utara berada dalam kondisi sangat tinggi</p> <p>2. Luas Wilayah jasa ekosistem pengaturan kualitas udara yaitu 265.439,25 Ha (63,68%) dengan wilayah terluas di Kec. Asera (82.252, 99 Ha), Kec. Wiwirano (67.051,59 Ha) dan Kec. Oheo (30.104, 30 Ha)</p> <p>3. Kondisi sangat rendah pada jasa pengatuan kualitas udara berada di wilayah Kec. Langgikima (3.371,18 Ha), Kec. Asera (3.085,64 Ha) dan Kec. Wiwirano (2.891, 21 Ha)</p> | <p>Jangka Panjang:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>Membentuk kawasan permukiman yang modern dan ramah lingkungan;</li> <li>Mengembangkan TPA sebagai penampungan residu dari TPST serta mengembangkan teknologi PLTSa dan teknologi lain yang dapat mereduksi sampah di TPA</li> </ol> <p>Jangka Menengah:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>Pengentasan kawasan kumuh;</li> <li>Penerapan wajib RTH 30% disetiap pembangunan kawasan;</li> <li>Mereduksi sampah di tingkat sumber dengan menerapkan bank sampah dan TPS 3R</li> </ol> | Aspek Pelayanan Umum (Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman) | Infrastruktur wilayah dan sarana prasarana kawasan permukiman | <p>Misi Meningkatkan ketersediaan infratruktur dasar dan sarana prasarana kawasan permukiman</p> <p>Tujuan Meningkatkan kualitas infrastruktur wilayah</p> <p>Sasaran Terpenuhinya sarana prasarana kawasan permukiman</p> | Penurunan luas kawasan kumuh melalui peningkatan kualitas rumah layak huni dan jalan lingkungan permukiman, serta pembangunan dan rehabilitasi rumah korban bencana | Program Kawasan Permukiman |
|               |   |                          |                         |                     |          |                     |  | <p>Jangka Pendek:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>Penataan kawasan kumuh;</li> <li>Menyusun kebijakan wajib RTH disetiap Izin Mendirikan Bangunan;</li> <li>Membangun kesadaran masyarakat dalam pelestarian lingkungan;</li> <li>Pengurangan RTLH secara berkesinambunga</li> <li>Mengembangkan TPST dalam skala beberapa kecamatan dengan konsep pengelolaan 3R dengan ditambah landfill.</li> </ol>  |  |  |   |  |   |                            |

| No. Indikator | Indikator  | Target Nasional | Indikator Daerah      | Status (Tahun 2020) | Proyeksi | Status (Tahun 2026) | Keterkaitan D3TLH  | Keterangan D3TLH   | Rekomendasi KLHS   | Gambaran Umum Kondisi Daerah (Bab 2)                 | Permasalahan dan Isu Strategis (Bab 4)              | Visi dan Misi (Bab 5)  | Strategi Arah Kebijakan dan Program Pembangunan (Bab 6)  |  |
|---------------|--|-----------------|-----------------------|---------------------|----------|---------------------|--|--|--|--|---|--|--|--|
|               |  |                 |                       |                     |          |                     |  |  |  |  |   |  | Strategi dan Arah Kebijakan  | Program Pembangunan  |
| 5.29.12       | Dokumen strategi pengurangan risiko bencana (PRB) tingkat daerah | Ada             | Indeks resiko bencana | NA                  | 162,26   | SB                  | 1. Jasa ekosistem Pengaturan Iklim<br>2. Jasa Ekosistem Pengaturan Pencegahan dan Perlindungan terhadap bencana Alam<br>3. Jasa ekosistem pengaturan tata aliran air | 1. Jasa Pengaturan Iklim di Kabupaten Konawe Utara berada dalam kondisi sangat tinggi dengan luas wilayah 304.246,89 Ha<br>2. Kondisi pengaturan iklim sangat tinggi berada di wilayah Kec. Asera (131.609,63 Ha), kemudian menyusul Kec. Wiwirano (70.169,62Ha) dan Kec. Oheo (30.104,30 Ha)<br>3. Jasa ekosistem pengaturan pencegahan dan perlindungan terhadap bencana alam di Kab. Konawe Utara berada dalam kondisi tinggi, dengan persentase luas wilayah sebesar 316.643,53 Ha (75,96Ha)<br>4. Jasa ekosistem pengaturan tata aliran air di Kabupaten Konawe Utara pada kondisi tinggi, dengan luas wilayah 277.116,11Ha | Jangka Pendek:<br>1. Internalisasi Penyusunan Indeks Resiko bencana ke dalam RPJMD Konut 2021 - 2026;<br>2. Sosialisasi daerah rawan bencana;<br>3. Sosialisasi resiko bencana;<br>4. Penyusunan database kebencanaan.<br><br>Jangka Menengah:<br>1. Penyusunan indeks resiko bencana;<br>2. Update Peta Rawan Bencana;<br><br>Jangka Panjang: Pembuatan Sistem Kebencanaan Daerah | Aspek Geografi dan Demografi (Wilayah Rawan Bencana) | Kualitas Lingkungan Hidup dan Mitigasi Bencana Alam | Misi Meningkatkan kualitas lingkungan hidup dan ketahanan bencanaTujuan Meningkatkan kualitas lingkungan hidupSasaranTerwujudnya tata kelola dan manajemen bencana | Meningkatkan ketahanan daerah dalam menghadapi bencana melalui pengurangan resiko bencana untuk ketangguhan (mitigasi, kesiapsiagaan, pra bencana), manajemen kedaruratan, dan manajemen pemulihan | 1. Program Penanggulangan Bencana<br>2. Program Penanganan Bencana |

Tujuan 12 : Menjamin pola produksi dan konsumsi yang berkelanjutan

Tujuan 13 : Mengambil segala tindakan cepat untuk mengatasi perubahan iklim dan dampaknya

Tujuan 14 : Melestarikan dan memanfaatkan secara berkelanjutan sumber daya kelautan dan samudera untuk pembangunan berkelanjutan

Tujuan 15 : Melindungi, merestorasi dan meningkatkan pemanfaatan berkelanjutan ekosistem daratan, mengelola hutan secara lestari, menghentikan penggurunan, memulihkan degradasi lahan, serta menghentikan kehilangan keanekaragaman hayati

Tujuan 16 : Memperkuat masyarakat yang inklusif dan damai untuk pembangunan berkelanjutan, menyediakan akses keadilan untuk semua, dan membangun kelembagaan efektif, akuntabel dan inklusif di semua tingkatan

| No. Indikator | Indikator  | Target Nasional     | Indikator Daerah   | Status (Tahun 2020) | Proyeksi | Status (Tahun 2026) | Keterkaitan D3TLH                | Keterangan D3TLH  | Rekomendasi KLHS  | Gambaran Umum Kondisi Daerah (Bab 2)         | Permasalahan dan Isu Strategis (Bab 4)        | Visi dan Misi (Bab 5)  | Strategi Arah Kebijakan dan Program Pembangunan (Bab 6)               |  |
|---------------|--|---------------------|--------------------|---------------------|----------|---------------------|----------------------------------|---|---|--|---|--|---|--|
|               |  |                     |                    |                     |          |                     |                                  |   |   |  |   |  | Strategi dan Arah Kebijakan   | Program Pembangunan                                  |
| 5.28.4        | Proporsi penduduk yang menjadi korban kejahatan kekerasan dalam \12 bulan terakhir | Menurun (2018:0,04) | Angka Kriminalitas | NA                  | 17       | SB                  | Jasa Ekosistem Penyediaan Pangan | <p>1. Jasa ekosistem penyediaan pangan di Kabupaten Konawe Utara secara menyeluruh berada pada kondisi indikasi sedang, dengan total persentase luas 298.718,96 Ha (71,66%),</p> <p>2. Penyebaran jasa ekosistem penyediaan pangan dengan indikasi sangat tinggi berada di Kecamatan Andowia (3.354 Ha), menyusul Landawe (3.116,62 Ha) dan Molawe (2.863,71 Ha)</p> <p>3. Jenis penyediaan pangan di Kabupaten Konawe Utara berasal dari hasil perkebunan dan holtikultura, hasil pertanian tanaman pangan dan peternakan, hasil perikanan laut dan air tawar, hasil hutan dan lain-lain</p> | <p>Jangka Pendek:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Internalisasi indikator ke dalam RPJMD Konut 2021 - 2026</li> <li>2. Sosialisasi anti diskriminatif;</li> </ol> <p>Jangka Menengah:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Perekrutan ASN dan TKS yang tidak diskriminatif terhadap Perempuan dan Disabilitas;</li> <li>2. Bersinergi dengan Perumda Konasara untuk pembukaan lapangan pekerjaan bagi perempuan.</li> <li>3. Pembuatan Perda Konut tentang Perlindungan Perempuan, Anak, dan Disabilitas di ruang publik.</li> </ol> | Aspek Daya Saing Daerah (angka kriminalitas) | Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik | <p>Misi Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang akuntabel, mendorong reformasi birokrasi, dan pelayanan publik yang prima</p> <p>Tujuan Meningkatkan kualitas tata kelola pemerintahan yang efektif dan efisien</p> <p>Sasaran Terwujudnya birokrasi yang kapabel, optimalnya Implementasi SPBE, serta pelayanan publik yang terpercaya</p> | Meningkatkan kondusivitas daerah, penegakan Perda dan peningkatan SDM | Program Peningkatan Ketenteraman dan Ketertiban Umum |

| No. Indikator | Indikator   | Target Nasional       | Indikator Daerah                                   | Status (Tahun 2020) | Proyeksi  | Status (Tahun 2026) | Keterkaitan D3TLH | Keterangan D3TLH | Rekomendasi KLHS  | Gambaran Umum Kondisi Daerah (Bab 2)      | Permasalahan dan Isu Strategis (Bab 4)        | Visi dan Misi (Bab 5)  | Strategi Arah Kebijakan dan Program Pembangunan (Bab 6)  |  |
|---------------|---|-----------------------|--|---------------------|-----------|---------------------|-------------------|------------------|---|---|---|--|--|--|
|               |   |                       |  |                     |           |                     |                   |                  |   |   |   |  | Strategi dan Arah Kebijakan  | Program Pembangunan  |
| 5.2.4.4       | Persentase peningkatan Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) atas Laporan Keuangan Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah (Provinsi/Kabupaten/Kota) | Meningkat menjadi 60% | Opini BPK  | SB                  | Meningkat | SB                  |                   |                  | Jangka Pendek:<br>Sosialisasi Bahaya Laten Korupsi;<br><br>Jangka Menengah:<br>1. Penyusunan Kajian dan Peraturan Anti Korupsi;<br>2. Pembuatan sistem pelaporan kinerja Pemerintah daerah;<br><br>Jangka Panjang:<br>Pembuatan sistem pelaporan keuangan yang transparan | Aspek Pelayanan Umum (Keuangan)           | Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik | Misi Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang akuntabel, mendorong reformasi birokrasi, dan pelayanan publik yang prima<br><br>Tujuan Meningkatkan kualitas tata kelola pemerintahan yang efektif dan efisien<br><br>Sasaran Meningkatkan akuntabilitas kinerja pemerintahan dan pengelolaan keuangan daerah | Peningkatan kualitas pengelolaan keuangan daerah dan aset melalui peningkatan kapasitas SDM, pengendalian belanja dan dana transfer, sinkronisasi perencanaan dan penganggaran, pengelolaan pembiayaan, pemanfaatan dan inventarisasi aset       | 1. Program Pengelolaan Keuangan Daerah<br>2. Program Pengelolaan Barang Milik Daerah<br>3. Program Pengelolaan Pendapatan Daerah |
| 5.2.1         | Persentase peningkatan Sistem Akuntabilitas Kinerja Pemerintah (SAKIP) Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah (Provinsi/Kabupaten/Kota)            | Meningkat menjadi B   | Nilai dan status kinerja pemerintah daerah (EKPPD) | SB                  | Meningkat | SB                  |                   |                  |   | Aspek Pelayanan Umum (Sekretariat Daerah) | Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik | Misi Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang akuntabel, mendorong reformasi birokrasi, dan pelayanan publik yang prima<br><br>Tujuan Meningkatkan kualitas tata kelola pemerintahan yang efektif dan efisien<br><br>Sasaran Meningkatkan akuntabilitas kinerja  | 1. Implementasi reformasi birokrasi dan pelayanan publik melalui optimalisasi pencapaian target pada 8 (delapan) area perubahan<br>2. Peningkatan kualitas kebijakan daerah di bidang pemerintahan, kesejahteraan rakyat, hukum, pembangunan dan | 1. Program Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat<br>2. Program Perekonomian dan Pembangunan                                      |

| No. Indikator | Indikator  | Target Nasional       | Indikator Daerah  | Status (Tahun 2020) | Proyeksi | Status (Tahun 2026) | Keterkaitan D3TLH | Keterangan D3TLH | Rekomendasi KLHS | Gambaran Umum Kondisi Daerah (Bab 2) | Permasalahan dan Isu Strategis (Bab 4)        | Visi dan Misi (Bab 5)  | Strategi Arah Kebijakan dan Program Pembangunan (Bab 6)  |   |
|---------------|--|-----------------------|---|---------------------|----------|---------------------|-------------------|------------------|------------------|--------------------------------------|---|--|--|---|
|               |  |                       |   |                     |          |                     |                   |                  |                  |                                      |   |  | Strategi dan Arah Kebijakan  | Program Pembangunan   |
|               |  |                       |   |                     |          |                     |                   |                  |                  |                                      |   | pemerintahan dan pengelolaan keuangan daerah   | administrasi umum, melalui koordinasi, pemantauan dan evaluasi serta perumusan rekomendasi kebijakan kepala daerah   |   |
| 5.2.2         | Persentase penggunaan E-procurement terhadap belanja pengadaan | Meningkat menjadi 80% | Persentase penyerapan anggaran pembangunan dan realisasinya | NA                  | 96       | SB                  |                   |                  |                  | Aspek Pelayanan Umum (Keuangan)      | Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik | Misi Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang akuntabel, mendorong reformasi birokrasi, dan pelayanan publik yang prima<br><br>Tujuan Meningkatkan kualitas tata kelola pemerintahan yang efektif dan efisien<br><br>Sasaran Meningkatnya akuntabilitas kinerja pemerintahan dan pengelolaan keuangan daerah | 1. Implementasi reformasi birokrasi dan pelayanan publik melalui optimalisasi pencapaian target pada 8(delapan) area perubahan<br>2. Peningkatan kualitas kebijakan daerah di bidang pemerintahan, kesejahteraan rakyat, hukum, pembangunan dan penyelenggaraan administrasi umum, melalui koordinasi, pemantauan dan evaluasi serta perumusan rekomendasi kebijakan kepala daerah | 1. Program Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat<br>2. Program Perekonomian dan Pembangunan |

Tujuan 17 : Menguatkan sarana pelaksanaan dan merevitalisasi kemitraan global untuk pembangunan berkelanjutan

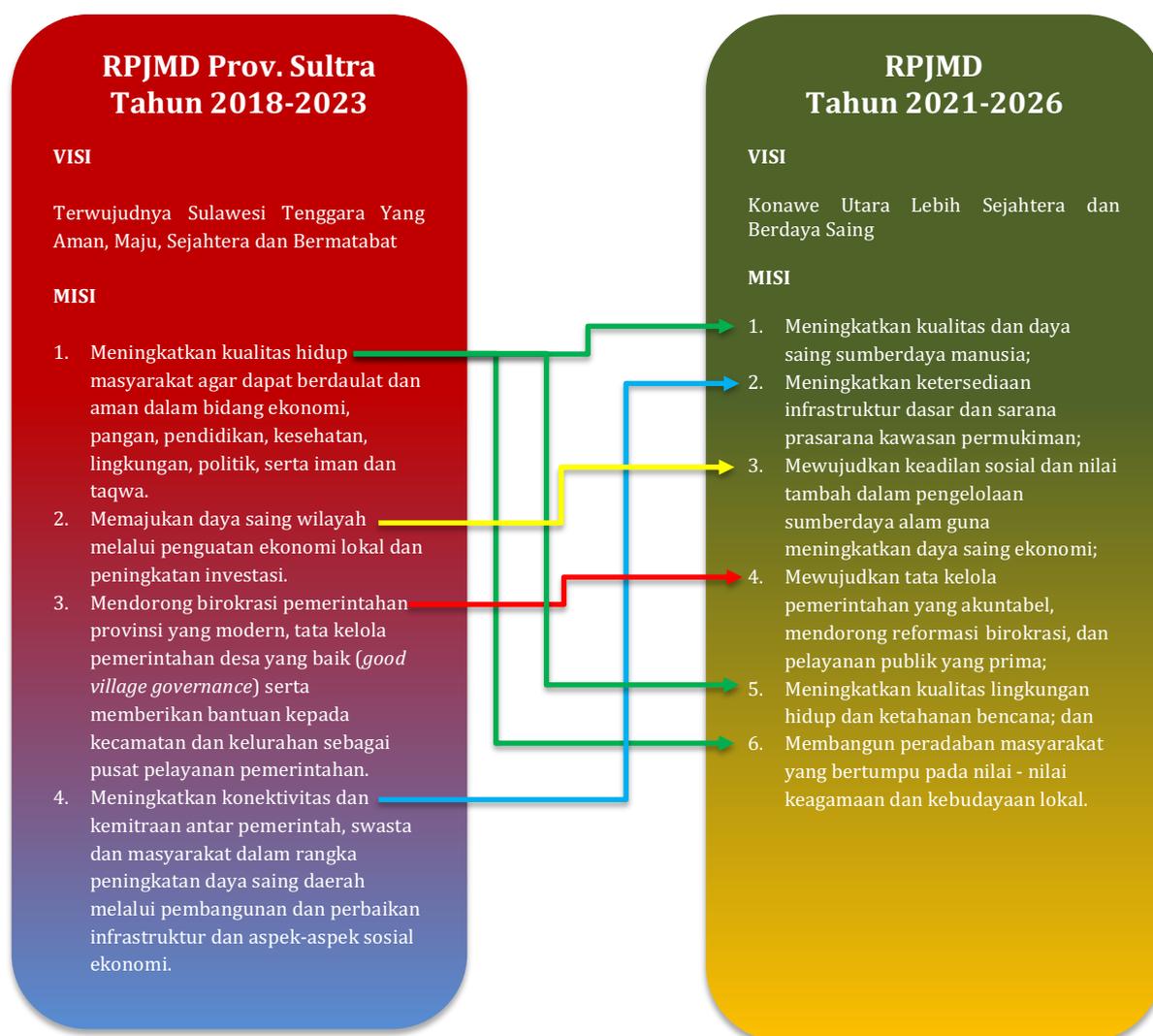
| No. Indikator | Indikator   | Target Nasional         | Indikator Daerah                      | Status (Tahun 2020) | Proyeksi | Status (Tahun 2026) | Keterkaitan D3TLH                        | Keterangan D3TLH   | Rekomendasi KLHS   | Gambaran Umum Kondisi Daerah (Bab 2)              | Permasalahan dan Isu Strategis (Bab 4)        | Visi dan Misi (Bab 5)   | Strategi Arah Kebijakan dan Program Pembangunan (Bab 6)  |   |
|---------------|---|-------------------------|---------------------------------------|---------------------|----------|---------------------|--|--|--|---|---|---|--|---|
|               |   |                         |                                       |                     |          |                     |  |  |  |   |   |   | Strategi dan Arah Kebijakan  | Program Pembangunan   |
| 5.25.5        | Proporsi anggaran domestik yang didanai oleh pajak domestik | Meningkat (2018:1,31)   | Persentase kenaikan pendapatan daerah | SB                  | 40       | SB                  |  |  | <p><b>Jangka Pendek:</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>Menjaga stabilitas harga dan laju inflasi daerah;</li> <li>Pembangunan sarana dan prasarana pariwisata guna peningkatan pemasukan daerah</li> </ol> <p><b>Jangka Menengah:</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>Membuka kerjasama dan investasi dengan pihak luar;</li> <li>Mempersingkat birokrasi perizinan usaha</li> </ol> <p><b>Jangka Panjang:</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>Peningkatan Pendapatan Asli Daerah</li> </ol>                      | Aspek Pelayanan Umum (Keuangan)                   | Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik | Misi Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang akuntabel, mendorong reformasi birokrasi, dan pelayanan publik yang prima<br><br>Tujuan Meningkatkan kualitas tata kelola pemerintahan yang efektif dan efisien   | Peningkatan pelayanan, pendaftaran, dan penagihan sumber PAD   | <ol style="list-style-type: none"> <li>Program Pengelolaan Keuangan Daerah</li> <li>Program Pengelolaan Barang Milik Daerah</li> <li>Program Pengelolaan Pendapatan Daerah</li> </ol> |
| 5.15.4        | Proporsi individu yang menggunakan internet                 | Meningkat (2018:20,29%) | Jumlah Penerapan SPBE                 | NA                  | 7        | SB                  | Jasa Ekosistem pengaturan kualitas udara | <ol style="list-style-type: none"> <li>Indikasi kondisi Jasa ekosistem pengaturan kualitas udara di Kabupaten Konawe Utara berada dalam kondisi sangat tinggi</li> <li>Luas Wilayah jasa ekosistem pengaturan kualitas udara yaitu 265.439,25 Ha (63,68%) dengan wilayah terluas di Kec. Asera (82.252, 99 Ha), Kec. Wiwirano (67.051,59 Ha) dan Kec. Oheo (30.104, 30 Ha)</li> <li>Kondisi sangat rendah pada jasa pengatuan kualitas udara berada di wilayah Kec. Langgikima (3.371,18 Ha), Kec. Asera (3.085,64 Ha) dan Kec. Wiwirano (2.891, 21 Ha)</li> </ol> | <p><b>Jangka Pendek:</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>Internalisasi indikator kedalam RPJMD Konut 2021 - 2026;</li> <li>Sosialisasi penggunaan TI;</li> <li>Penyusunan database TI kabupaten.</li> </ol> <p><b>Jangka Menengah:</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>Pembuatan peraturan daerah terkait pelaporan barang-barang/peralatan TI;</li> <li>Peningkatan akses internet ditempat umum dan kapasitas</li> <li>internet daerah.</li> </ol> <p><b>Jangka Panjang:</b></p> Pengendalian dan Peningkatan akses internet | Aspek Pelayanan Umum (Komunikasi dan Informatika) | Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik | Misi Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang akuntabel, mendorong reformasi birokrasi, dan pelayanan publik yang prima<br><br>Tujuan Meningkatkan kualitas tata kelola pemerintahan yang efektif dan efisien<br><br>Sasaran Terwujudnya birokrasi yang kapabel, optimalnya Implementasi SPBE, serta pelayanan publik yang terpercaya | Pengembangan sarana prasarana egovernment untuk menunjang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik dan pelayanan publik | <ol style="list-style-type: none"> <li>Program Informasi dan Komunikasi Publik</li> <li>Program Pengelolaan aplikasi informatika</li> </ol>   |

| No. Indikator | Indikator  | Target Nasional | Indikator Daerah  | Status (Tahun 2020) | Proyeksi | Status (Tahun 2026) | Keterkaitan D3TLH | Keterangan D3TLH | Rekomendasi KLHS                 | Gambaran Umum Kondisi Daerah (Bab 2)                                  | Permasalahan dan Isu Strategis (Bab 4)        | Visi dan Misi (Bab 5)   | Strategi Arah Kebijakan dan Program Pembangunan (Bab 6)  |  |
|---------------|--|-----------------|---|---------------------|----------|---------------------|-------------------|------------------|----------------------------------|---|---|---|--|--|
|               |  |                 |   |                     |          |                     |                   |                  |                                  |   |   |   | Strategi dan Arah Kebijakan  | Program Pembangunan  |
|               | Tersedianya data registrasi terkait kelahiran dan kematian (Vital Statistics Register) | Ada             | Persentase Kepemilikan dokumen Pencatatan Sipil Berbasis Elektronik | SB                  | 100      | SB                  |                   |                  | Peningkatan pencatatan Kelahiran | Aspek Pelayanan Umum (Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil) | Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik | Misi Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang akuntabel, mendorong reformasi birokrasi, dan pelayanan publik yang prima<br><br>Tujuan Meningkatkan kualitas tata kelola pemerintahan yang efektif dan efisien<br><br>Sasaran Terwujudnya birokrasi yang kapabel, optimalnya Implementasi SPBE, serta pelayanan publik yang terpercaya | Meningkatkan kepemilikan dokumen administrasi kependudukan dan catatan sipil melalui peningkatan kesadaran masyarakat dan perbaikan kualitas layanan administrasi kependudukan | 1. Program Pendaftaran Penduduk<br>2. Program Pencatatan Sipil |

Sumber : KLHS RPJMD Kab. Konawe Utara, diolah

### 1.3.5 Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun 2018-2023

Penyusunan RPJMD Kabupaten Konawe Utara memperhatikan dokumen RPJMD Provinsi Sulawesi Tenggara tahun 2018-2023 terutama terkait permasalahan, tujuan dan sasaran, misi, misi, dan arah kebijakan pembangunan kewilayahan yang tercantum dalam RPJMD Provinsi Sulawesi Tenggara.



**Gambar 1.6. Keselarasan RPJMD Kabupaten Konawe Utara Dan RPJMD Provinsi Sulawesi Tenggara**

### 1.3.6 Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Konawe Utara Tahun 2012-2032

Perencanaan pembangunan daerah pada prinsipnya bertujuan mengintegrasikan rencana tata ruang wilayah dengan rencana pembangunan daerah.

Dalam kaitan itu, penyusunan RPJMD Kabupaten Konawe Utara berpedoman pada RTRW Kabupaten Konawe Utara Tahun 2012-2032 serta memperhatikan draft revisi RTRW yang pada tahun 2021 ini sedang berjalan.

Rencana struktur ruang wilayah Kabupaten adalah rencana yang mencakup sistem pusat permukiman yang berkaitan dengan kawasan perkotaan dan perdesaan dalam wilayah pelayanannya dan jaringan prasarana wilayah. Adapun sistem pusat perkotaan di Kabupaten Konawe Utara antara lain : Pusat Kegiatan Wilayah (PKW) di kecamatan Lasolo; Pusat Kegiatan Lingkungan (PKL) di Wanggudu; Pusat Pelayanan Kawasan (PPK) di Kecamatan Sawa, Molawe, Langgikima, Wiwirano, Andowia, Motui, Lembo, dan Oheo; dan Pusat Pelayanan Lokal (PPL) di Kecamatan Landawe, Boenaga, dan Wawolesea. Selanjutnya pusat-pusat kegiatan tersebut dihubungkan dengan sistem jaringan transportasi darat, sistem transportasi laut, sistem transportasi udara, sistem jaringan energi, sistem jaringan telekomunikasi, sistem jaringan sumberdaya air, dan sistem jaringan prasarana lainnya (air minum, persampahan, air limbah, drainase, jalu dan ruang evakuasi bencana).

Rencana pola ruang wilayah Kabupaten adalah rencana distribusi peruntukan ruang wilayah Kabupaten yang meliputi peruntukan ruang untuk fungsi lindung dan budidaya yang dituju sampai dengan akhir masa berlakunya RTRW Kabupaten yang memberikan gambaran pemanfaatan ruang wilayah Kabupaten hingga 20 (dua puluh) tahun mendatang yang harus diperhatikan dalam pembangunan dan pemanfaatan ruang tahun 2021-2026, yaitu : Kawasan Hutan Lindung, Kawasan Yang Memberikan Perlindungan Terhadap Kawasan Dibawahnya, Kawasan Perlindungan Setempat, Kawasan Suaka Alam, Pelestarian Alam dan Cagar Budaya, Kawasan Rawan Bencana Alam, Kawasan Lindung Geologi, Kawasan Hutan, Kawasan Pertanian, Kawasan Perikanan, Kawasan Pertambangan, Kawasan Peruntukan Industri, Kawasan Pariwisata, Kawasan Permukiman, dan Kawasan Peruntukan Lainnya

### **1.3.7 RPJMD Daerah Sekitar**

Penyusunan RPJMD Kabupaten Konawe Utara memperhatikan dokumen RPJMD daerah sekitar (Kabupaten Konawe, Kabupaten Kolaka Utara di Provinsi Sulawesi Tenggara, dan Kabupaten Morowali di Provinsi Sulawesi Tengah) khususnya terkait dengan kebijakan pembangunan di wilayah perbatasan dengan

Kabupaten Konawe Utara yang kemungkinan berpengaruh pada wilayah Kabupaten Konawe Utara seperti Kawasan Industri Konawe dan Kawasan Industri Morowali.

### **1.3.8 Dokumen Perencanaan Multi Sektor**

Penyusunan RPJMD Kabupaten Konawe Utara memperhatikan dokumen perencanaan multi sektor yang telah tersusun, antara lain Rencana Pengelolaan dan Perlindungan Lingkungan Hidup (RPPLH), Rencana Pembangunan dan Pengembangan Perumahan dan Permukiman Daerah (RP4D), Rencana Pengembangan Pariwisata Daerah (RIPARDA), Rencana Induk SPAM (RISPAM) dan lain sebagainya. RPJMD juga akan menjadi acuan dalam perencanaan pembangunan multi sektor yang penyusunannya dilakukan setelah RPJMD ditetapkan.

### **1.3.9 Rencana Strategis Perangkat Daerah (Renstra PD)**

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Konawe Utara Tahun 2021-2026 menjadi acuan bagi perangkat daerah dalam menyusun dokumen Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah yang merupakan dokumen perencanaan lima tahun pada tingkat perangkat daerah.

### **1.3.10 Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)**

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Konawe Utara tahun 2021-2026 setelah ditetapkan akan menjadi pedoman dalam penyusunan RKPD Kabupaten Konawe Utara tahun 2022 hingga tahun 2026 yang merupakan dokumen perencanaan tahunan daerah.

## **1.4. MAKSUD DAN TUJUAN**

Penyusunan RPJMD Kabupaten Konawe Utara Tahun 2021-2026 dimaksudkan untuk menyediakan rencana pembangunan daerah kurun waktu lima tahun sebagai penjabaran dari visi, misi dan program Bupati dan Wakil Bupati Konawe Utara agar terarah, terpadu dan berkesinambungan. Sedangkan tujuan penyusunan RPJMD Kabupaten Konawe Utara Tahun 2021-2026 adalah sebagai berikut :

1. Memberikan gambaran tentang kondisi daerah, permasalahan dan isu strategis, tujuan dan sasaran, strategi dan arah kebijakan serta program pembangunan untuk mencapai visi dan melaksanakan misi kepala daerah;

2. Merumuskan arah kebijakan dan prioritas pembangunan tahunan daerah sebagai acuan resmi dalam penyusunan RKPD yang merupakan dokumen perencanaan daerah tahunan, dan Renstra Perangkat Daerah yang merupakan dokumen perencanaan lima tahun perangkat daerah;
3. Memberikan tolok ukur dan instrumen bagi pemerintah daerah, DPRD dan masyarakat dalam melakukan evaluasi kinerja pemerintah daerah dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah.

### 1.5. SISTEMATIKA PENULISAN

RPJMD Kabupaten Konawe Utara Tahun 2021-2026 disusun dengan sistematika sebagai berikut :

**Bab I Pendahuluan**, memuat latar belakang, dasar hukum penyusunan, maksud dan tujuan, hubungan antar dokumen, serta sistematika penulisan.

**Bab II Gambaran Umum Kondisi Daerah**, memuat gambaran umum kondisi daerah yang meliputi aspek geografi dan demografi serta indikator kinerja penyelenggaraan pemerintah daerah yang meliputi aspek kesejahteraan masyarakat, aspek pelayanan umum, dan aspek daya saing daerah.

**Bab III Gambaran Keuangan Daerah**, memuat gambaran hasil pengolahan data dan analisis terhadap pengelolaan keuangan daerah.

**Bab IV Permasalahan dan Isu-Isu Strategis Daerah**, memuat analisis permasalahan pembangunan dan isu- isu strategis pembangunan daerah tahun 2016-2021.

**Bab V Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran**, memuat visi, misi, tujuan dan sasaran pembangunan jangka menengah.

**Bab VI Kebijakan Umum dan Program Pembangunan Daerah**, memuat strategi, arah kebijakan pembangunan serta program pembangunan prioritas berdasarkan strategi yang dipilih dengan target capaian indikator kinerja

**Bab VII Kerangka Pendanaan Pembangunan dan Program Perangkat Daerah**, memuat program prioritas dalam pencapaian visi dan misi serta seluruh program yang dirumuskan dalam Rencana Strategis Perangkat Daerah beserta indikator kinerja, pagu indikatif target, Perangkat Daerah penanggung jawab berdasarkan bidang urusan.

**Bab VIII Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah**, memuat penetapan indikator kinerja daerah yang bertujuan untuk memberikan gambaran tentang ukuran keberhasilan pencapaian visi dan misi kepala daerah dan wakil kepala daerah yang ditetapkan menjadi Indikator Kinerja Utama (IKU) daerah dan indikator kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah yang ditetapkan menjadi Indikator Kinerja Kunci (IKK) pada akhir periode masa jabatan.

**Bab IX Penutup**, memuat pedoman transisi dan kaidah pelaksanaan untuk menyusun dokumen perencanaan pembangunan setelah periode RPJMD berakhir.

## BAB II GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH



## 2.1 ASPEK GEOGRAFI DAN DEMOGRAFI

Analisis pada aspek geografi perlu dilakukan untuk memperoleh gambaran mengenai karakteristik lokasi dan wilayah, potensi pengembangan wilayah, dan kerentanan wilayah terhadap bencana. Sedangkan gambaran kondisi demografi, antara lain mencakup perubahan penduduk, komposisi dan populasi masyarakat secara keseluruhan atau kelompok dalam waktu tertentu.

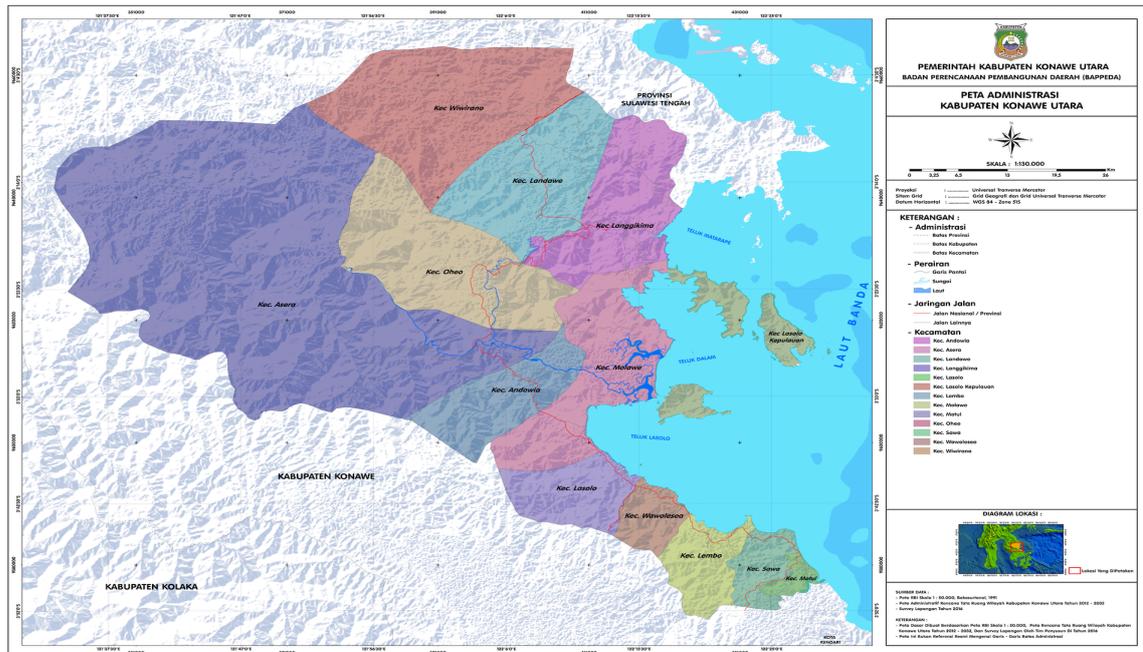
### 2.1.1 Karakteristik Lokasi dan Wilayah

Secara geografis Kabupaten Konawe Utara terletak di bagian selatan Khatulistiwa, melintang dari Utara ke Selatan antara 02°97' dan 03°86' LS, membujur dari Barat ke Timur antara 121°49' dan 122°49' BT. Kabupaten Konawe Utara memiliki luas wilayah sebesar 500.339 Ha atau sekitar 13,38 persen dari luas wilayah Provinsi Sulawesi Tenggara. Sedangkan luas wilayah perairan laut (termasuk perairan Kabupaten Konawe dan Kabupaten Konawe Selatan) ±11.960Km<sup>2</sup> atau 10,87 persen dari luas perairan Sulawesi Tenggara. Secara administrasi Kabupaten Konawe Utara berbatasan dengan:

- Sebelah Utara berbatasan dengan Kabupaten Morowali (Provinsi Sulawesi Tengah) dan Kecamatan Routa (Kabupaten Konawe).
- Sebelah Timur berbatasan dengan Kabupaten Morowali (Provinsi Sulawesi Tengah) dan Laut Banda.
- Sebelah Selatan berbatasan dengan Kecamatan Bondoala, Kecamatan Amonggedo, Kecamatan Meluhu, Kecamatan Anggaberri, Kecamatan Tongauna dan Kecamatan Abuki (Kabupaten Konawe).
- Sebelah Barat berbatasan dengan Kecamatan Latoma Kabupaten Konawe dan Kabupaten Kolaka Utara.

Secara administratif Kabupaten Konawe Utara terdiri dari 13 kecamatan. Kecamatan Wiwirano adalah kecamatan yang mempunyai wilayah paling luas yaitu 968,06 km<sup>2</sup> atau 19,34 persen dari seluruh wilayah Kabupaten Konawe Utara. Sedangkan kecamatan dengan luas wilayah yang paling sempit adalah Kecamatan Motui dengan luas 61,30 km<sup>2</sup> atau hanya 1,22 persen dari luas Kabupaten Konawe Utara.

**Gambar 2.1.**  
**Peta Wilayah Administrasi Kabupaten Konawe Utara**



Selain itu, wilayah Kabupaten Konawe Utara juga terbagi atas 159 desa dan 11 kelurahan, dengan jumlah desa yang terbanyak terletak di Kecamatan Asera dan Oheo, yaitu masing - masing 17 desa. Sementara kecamatan dengan jumlah desa paling sedikit adalah Kecamatan Lasolo Kepulauan, yaitu 6 desa. Secara rinci klasifikasi wilayah desa di Kabupaten Konawe Utara dapat dilihat pada Tabel 2.1.

**Tabel 2.1.**  
**Luas Wilayah Kecamatan di Kabupaten Konawe Utara**

| No. | Kecamatan        | Ibukota    | Luas Wilayah (Km <sup>2</sup> ) | Jumlah |      |     |
|-----|------------------|------------|---------------------------------|--------|------|-----|
|     |                  |            |                                 | Desa   | Kel. | UPT |
| 1.  | Sawa             | Sawa       | 93,76                           | 13     | 1    | -   |
| 2.  | Motui            | Bende      | 61,30                           | 14     | 1    | 1   |
| 3.  | Lembo            | Lembo      | 78,12                           | 11     | 1    | -   |
| 4.  | Wawolesea        | Wawolesea  | 149,40                          | 9      | -    | -   |
| 5.  | Lasolo           | Tinobu     | 139,40                          | 13     | 1    | -   |
| 6.  | Lasolo Kepulauan | Boenaga    | 62,42                           | 6      | -    | -   |
| 7.  | Molawe           | Molawe     | 365,06                          | 8      | 1    | -   |
| 8.  | Andowia          | Andowia    | 595,90                          | 14     | 1    | -   |
| 9.  | Asera            | Asera      | 863,32                          | 17     | 2    | 1   |
| 10. | Oheo             | Linomoiyo  | 738,50                          | 17     | 1    | 1   |
| 11. | Langgikima       | Langgikima | 476,75                          | 11     | 1    | -   |

| No.          | Kecamatan | Ibukota | Luas Wilayah<br>(Km <sup>2</sup> ) | Jumlah     |           |          |
|--------------|-----------|---------|------------------------------------|------------|-----------|----------|
|              |           |         |                                    | Desa       | Kel.      | UPT      |
| 12.          | Landawe   | Hialu   | 603,53                             | 10         | -         | -        |
| 13.          | Wiwirano  | Lamonae | 968,06                             | 15         | 1         | 1        |
| <b>Total</b> |           |         | <b>5.003,39</b>                    | <b>159</b> | <b>11</b> | <b>4</b> |

Sumber : BPS, Kabupaten Konawe Utara Dalam Angka Tahun 2021

### 2.1.1.1 Kondisi Topografi

Wilayah Konawe Utara berada pada ketinggian 0 - >2000 mdpl dengan kemiringan lereng antara 0 - >40%. Kemiringan antara 25% sampai dengan >40% berada pada hulu Sungai Lasolo yang merupakan wilayah Pegunungan Matarombeo. Wilayah dengan kemiringan lereng 0-8% umumnya berada pada kaki bukit, lembah antar sungai, dan wilayah di muara-muara sungai. Wilayah dengan ketinggian >2000 meter dan kemiringan lebih dari 40% berada pada sekitar hulu Sungai Konawehea, yaitu Pegunungan Mekongga mengarah ke utara sampai Pegunungan Matarombeo umumnya berbukit hingga bergunung.

Seperti halnya dengan kondisi topografi Kabupaten lainnya di Sulawesi Tenggara, Kabupaten Konawe Utara memiliki topografi permukaan tanah yang pada umumnya bergunung, bergelombang dan berbukit yang mengelilingi dataran rendah yang sangat potensial untuk perkembangan sektor pertanian.

### 2.1.1.2 Kondisi Geologi

Berdasarkan himpunan batuan dan pencirinya, geologi Lembar Lasusua-Kendari dapat dibedakan dalam dua lajur, yaitu Lajur Tinodo dan Lajur Hialu. Lajur Tinodo dicirikan oleh batuan endapan paparan benua dan Lajur Hialu oleh endapan kerak samudra/ofiolit, secara garis besar kedua mendala ini dibatasi oleh Sesar Lasolo.

Struktur geologi yang dijumpai di wilayah Kabupaten Konawe Utara adalah sesar, lipatan dan kekar. Sesar dan kelurusan umumnya berarah barat laut-tenggara searah dengan sesar geser lurus mengiri Lasolo. Sesar Lasolo bahkan masih aktif hingga saat ini. Sesar tersebut diduga ada kaitannya dengan Sesar Sorong yang aktif kembali pada Kala Oligosen (Simandjuntak, dkk., 1983). Sesar naik ditemukan di daerah Wawo sebelah barat Tampakura dan di Tanjung Labuandala di selatan Lasolo,

yaitu beranjaknya Batuan Ofiolit ke atas Batuan Malihan Mekonga, Formasi Meluhu, dan Formasi Matano.

Adapun jenis tanah di Kabupaten Konawe Utara meliputi Latosol 116.829 Ha atau 23,35%, Podzolik 140.845 Ha atau 28,15%, Organosol 23.566 Ha atau 4,71%, Mediteran 16.961 Ha atau 3,39%, Aluvial 24.067 Ha atau 4,80% dan tanah campuran 178.071 Ha atau 35,59%.

**Tabel 2.2.**  
**Luas Wilayah dan Jenis Tanah**  
**di Kabupaten Konawe Utara**

| No.           | Jenis Tanah    | Luas (km <sup>2</sup> ) | Persentase (%) |
|---------------|----------------|-------------------------|----------------|
| 1.            | Latosol        | 1.168,29                | 23,35          |
| 2.            | Podzolik       | 1.408,45                | 28,15          |
| 3.            | Organosol      | 235,66                  | 4,71           |
| 4.            | Mediteran      | 169,61                  | 3,39           |
| 5.            | Aluvial        | 240,16                  | 4,80           |
| 6.            | Tanah Campuran | 1.780,71                | 35,39          |
| <b>Jumlah</b> |                | <b>5.003,39</b>         | <b>100,00</b>  |

Sumber : RTRW Kabupaten Konawe Utara Tahun 2012-2032

### 2.1.1.3 Hidrologi dan Hidrogeologi

Sungai adalah sistem pengaliran air mulai dari mata air sampai muara dengan dibatasi pada kanan dan kirinya serta sepanjang pengalirannya oleh garis sempadan. Daerah Pengaliran Sungai adalah suatu kesatuan wilayah tata air yang terbentuk secara alamiah, dimana air meresap dan/atau mengalir melalui sungai dan anak-anak sungai yang bersangkutan.

Daerah Aliran Sungai yang melalui Kabupaten Konawe Utara adalah wilayah Sungai Lasolo Sampara dengan sub wilayah sungai terdiri dari SWS Sungai Lasolo, SWA Lalindu, SWS Tinobu, SWS Sampara, dan SWS S. Lambuti. SWS Lasolo-Sampara mempunyai 63 DPS dengan jumlah total luas DPS 14.979,6 km<sup>2</sup> dan total panjang sungainya 847,2 km.

Adanya Daerah Aliran Sungai (DAS) perlu dicermati sebagai potensi bagi sumber daya air untuk keperluan irigasi pertanian, energi listrik, sarana. Hal lain yang harus dicermati terkait dengan keberadaan daerah aliran sungai yakni kerentanan terhadap bencana banjir seperti halnya yang terjadi pada titik muara

sungai pertemuan Sungai Lasolo dan Sungai Landawe di perbatasan kecamatan Molawe-Asera adalah yang telah menjadi daerah banjir tahunan.

#### 2.1.1.4 Kondisi Klimatologi

Kondisi iklim di Kabupaten Konawe Utara tidak jauh berbeda dengan kondisi iklim di daratan Provinsi Sulawesi Tenggara, keduanya memiliki dua musim dalam setahun (musim hujan dan musim panas). Pada musim hujan, angin banyak mengandung uap air yang berasal dari Benua Asia dan Samudra Pasifik. Rata-rata suhu udara maksimum 32°C. Tekanan udara rata-rata 1.010,6 milibar dengan kelembaban udara rata-rata 78 persen, kecepatan angin pada umumnya berjalan normal yaitu sekitar 3,75 m/sec.

Pada tahun 2020, Bulan Maret merupakan bulan dengan jumlah hari hujan terbanyak yakni sebanyak 23 hari hujan dengan total curah hujan terbesar yakni sebesar 534 mm. Dalam kurun waktu kalender tahun 2020, total 141 hari diantaranya terjadi hujan dengan curah hujan rintik 2 mm sampai hujan deras dengan intensitas 110 mm yang merupakan hujan terderas yang terjadi di bulan Agustus. Berdasarkan pada klasifikasi iklim Schmidt dan Ferguson, wilayah Kabupaten Konawe Utara dibedakan dalam dua klasifikasi yaitu Tipe Iklim B yakni tipe iklim dengan kelembaban 14,3-33,3 % pada daerah Wiwirano hingga Molawe, dan Tipe Iklim C yaitu dengan kelembaban 33,3-60 % pada wilayah Lasolo hingga Motui.

**Tabel 2.3.**  
**Keadaan Curah Hujan Kabupaten Konawe Utara Tahun 2020**

| No. | Bulan     | Hari Hujan (HH) | Curah Hujan (mm) |
|-----|-----------|-----------------|------------------|
| 1.  | Januari   | 13              | 219              |
| 2.  | Februari  | 15              | 314              |
| 3.  | Maret     | 15              | 273              |
| 4.  | April     | 15              | 355              |
| 5.  | Mei       | 14              | 309              |
| 6.  | Juni      | 16              | 484              |
| 7.  | Juli      | 9               | 139              |
| 8.  | Agustus   | 2               | 11               |
| 9.  | September | 1               | 10               |
| 10. | Oktober   | 1               | 8                |

| No. | Bulan    | Hari Hujan (HH) | Curah Hujan (mm) |
|-----|----------|-----------------|------------------|
| 11. | November | 2               | 11               |
| 12. | Desember | 3               | 267              |

Sumber : Konawe Utara Dalam Angka, Tahun 2021

#### 2.1.1.5 Penggunaan Lahan

Kabupaten Konawe Utara memiliki luas wilayah sebesar 500.339 Ha. Penggunaan lahan terbesar adalah hutan negara seluas 350.962 Ha dan perkebunan seluas 143.086 Ha. Sebesar 0,39 persen atau sekitar 1.963 Ha dimanfaatkan sebagai lahan sawah yang luasnya mengalami penambahan dalam kurun waktu tiga tahun terakhir. Data selengkapnya penggunaan lahan di Kabupaten Konawe Utara disajikan pada Tabel 2.4.

**Tabel 2.4.**  
**Luas Penggunaan Lahan di Kabupaten Konawe Utara Tahun 2020**

| No.           | Penggunaan Lahan  | Luas Lahan (Ha) | Persentase (%) |
|---------------|---|-----------------|----------------|
| I.            | a. Diusahakan   | 1.963           | 0,39           |
|               | b. Tidak Diusahakan   | 862             | 0,17           |
| II.           | Lahan Pertanian Bukan Sawah   |                 |                |
|               | a. Tegal/kebun  | 32.084          | 6,41           |
|               | b. Ladang/huma  | 84.278          | 16,84          |
|               | c. Perkebunan   | 143.086         | 28,60          |
|               | d. Ditanami pohon/hutan rakyat                                      | 21.095          | 4,22           |
|               | e. Padang penggembalaan/padang rumput                               | 8.617           | 1,72           |
|               | f. Hutan negara   |                 |                |
|               | g. Sementara tidak diusahakan                                       | 21.534          | 4,30           |
|               | h. Lainnya (tambak,kolam, hutan negara, dll)                        | 63.908          | 12,77          |
| III.          | Lahan Bukan Pertanian (Jalan, Permukiman, Perkantoran, Sungai, dll) | 122.912         | 24,57          |
| <b>Jumlah</b> |   | <b>500.339</b>  | <b>500.339</b> |

Sumber : BPS, Kabupaten Konawe Utara dalam Angka, Tahun 2021

### 2.1.2 Potensi Pengembangan Wilayah

Kabupaten Konawe Utara memiliki potensi pengembangan wilayah cukup prospektif. Potensi ini dituangkan dalam kebijakan penataan ruang wilayah Kabupaten Konawe Utara (Pasal 3, Peraturan Daerah Kabupaten Konawe Utara Nomor 20 tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Kabupaten Konawe Utara Tahun 2012 - 2032). Arah pengembangan wilayah Kabupaten Konawe Utara adalah sebagai berikut:

- a. Pengembangan dan peningkatan pusat-pusat pelayanan yang dapat mendorong pertumbuhan yang merata sesuai dengan hirarki dan skala pelayanannya;
- b. Pengembangan dan peningkatan kualitas dan jangkauan jaringan transportasi, energi listrik, telekomunikasi, dan sumber daya air, pelayanan sarana dan prasarana air minum, persampahan, air limbah, dan drainase untuk meningkatkan pertumbuhan wilayah;
- c. Pengembangan kegiatan industri pertambangan yang ramah lingkungan dalam rangka memberi nilai tambah dalam perekonomian wilayah;
- d. Pengembangan kegiatan unggulan pertanian, perkebunan, perikanan, dan pertambangan secara bijak dengan memperhatikan daya dukung lingkungan;
- e. Pelestarian lingkungan hidup dalam upaya mempertahankan dan meningkatkan daya dukung lingkungan demi kelangsungan di masa mendatang; dan
- f. peningkatan fungsi kawasan untuk pertahanan dan keamanan negara.

Berdasarkan penelaahan RTRW dan deskripsi wilayah di Kabupaten Konawe Utara, dapat diidentifikasi wilayah yang memiliki potensi untuk dikembangkan sebagai kawasan budidaya seperti perikanan, pertanian, pariwisata, industri, pertambangan dan lain - lain, adalah sebagai berikut :

1. Pengembangan kawasan industri pertambangan di Kecamatan Motui dan Langgikima;
2. Pengembangan kawasan agropolitan secara terpadu di Kecamatan Lembo dan Kecamatan Lasolo;
3. Pengembangan kawasan perikanan yang terintegrasi di Kecamatan Molawe, Kecamatan Lasolo dan Kecamatan Lembo;
4. Pengembangan kegiatan unggulan sub sektor perikanan tambak di Kecamatan Motui dan Sawa;
5. Pengembangan kawasan wisata Pantai Taipa di Kecamatan Lembo, pengembangan

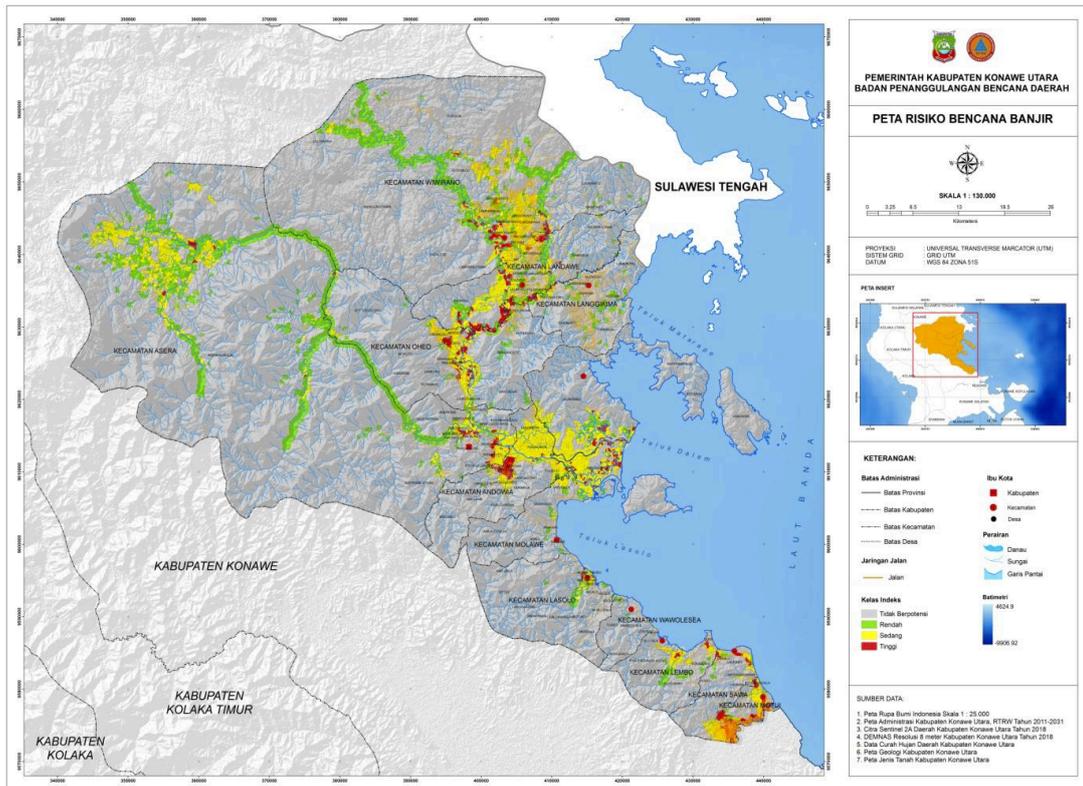
kawasan wisata bahari Pulau Labengki di Kecamatan Lasolo Kepulauan, pengembangan kawasan wisata Air Panas Wawolesea di Kecamatan Wawolesea, pengembangan kawasan wisata alam dan sejarah di Kecamatan Oheo dan Kecamatan Asera, dan pengembangan kawasan wisata alam minat khusus di Kecamatan Wiwirano;

6. Pengembangan kegiatan sub sektor tanaman pangan, sub sektor perkebunan dan hortikultura, sub sektor peternakan, sub sektor kehutanan serta sub sektor perikanan air tawar di Kecamatan Andowia, Asera, dan Oheo; dan
7. Pengembangan kegiatan perkebunan kelapa sawit serta industri pengolahannya di Kecamatan Wiwirano dan Langgikima.

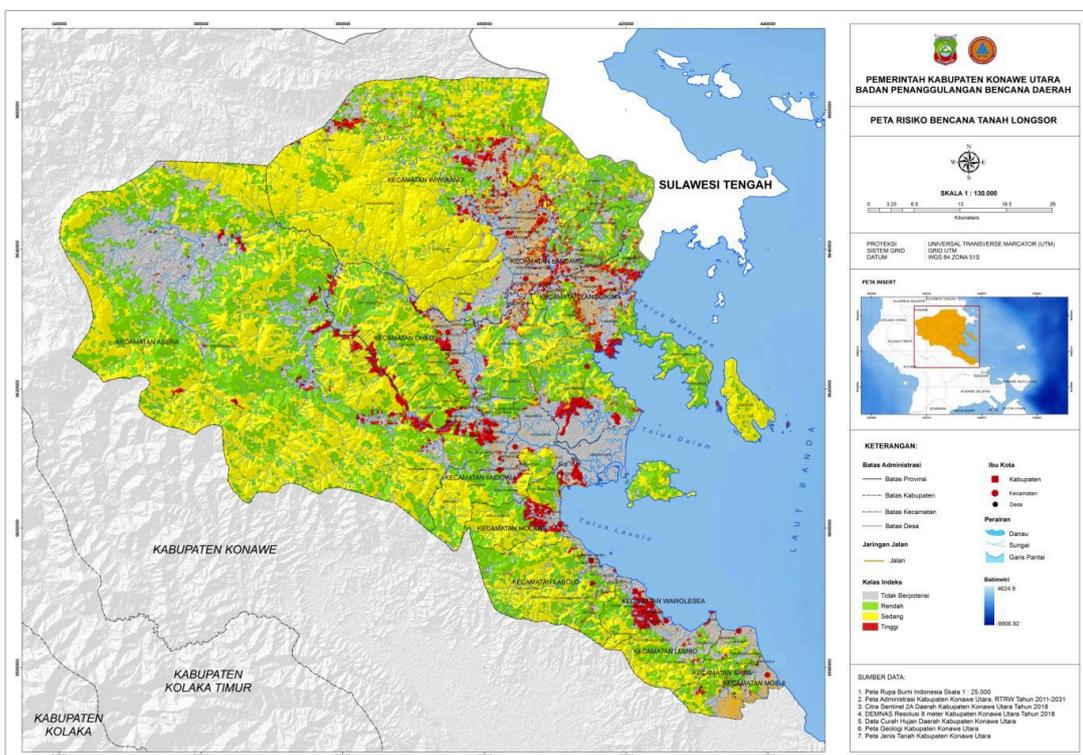
### **2.1.3 Wilayah Rawan Bencana**

Wilayah Kabupaten Konawe Utara merupakan salah satu bagian wilayah yang rawan bencana khususnya bencana banjir. Bencana banjir besar yang terjadi pada Bulan Juli tahun 2019 merupakan pelajaran berharga bagi proses pembangunan kedepan. Kejadian bencana banjir terjadi di DAS Lasolo dengan luas Daerah Tangkapan Air titik banjir 600.191 Ha dan menerjang di 7 Kecamatan, 47 Desa, 4 Kelurahan. Penyebab banjir adalah curah hujan yang tinggi, sistem drainase yang buruk, pendangkalan sungai, dan aktivitas di kawasan hutan. Berdasarkan konfigurasi topografinya, lokasi area banjir tersebut merupakan dataran banjir (flood plain) yang dikelilingi perbukitan terjal, sehingga berfungsi sebagai tampungan depresi. Termasuk dalam kategori Banjir Limpasan yang didominasi akibat overlandflow, bukan hanya luapan dari Badan Sungai Lasolo, Lalindu, Landawe, dan sungai-sungai kecil lainnya. Kejadian bencana alam tersebut telah meluluhlantahkan sebagian besar wilayah Kabupaten Konawe Utara dan menyebabkan 9.609 jiwa atau 2.502 KK mengungsi, dengan total korban terdampak sebanyak 18.765 jiwa. Resiko bencana di Kabupaten Kabupaten Konawe Utara selengkapnya sebagaimana disajikan pada gambar berikut :

**Gambar 2.2**  
**Peta Resiko Bencana Banjir di Kabupaten Konawe Utara**



**Gambar 2.3**  
**Peta Resiko Bencana Tanah Longsor di Kabupaten Konawe Utara**



Selain 2 (dua) jenis bencana tersebut, Kabupaten Konawe Utara juga berpotensi terhadap beberapa bencana lain, seperti gempa bumi, gelombang pasang dan tsunami. Secara lebih rinci wilayah rawan bencana di Kabupaten Konawe Utara adalah sebagai berikut:

1. Wilayah rawan bencana tanah longsor meliputi seluruh kecamatan
2. Wilayah rawan bencana gelombang pasang dan tsunami meliputi: Kecamatan Motui, Kecamatan Sawa, Kecamatan Lembo, Kecamatan Molawe, Kecamatan Lasolo, Kecamatan Lasolo Kepulauan.
3. Wilayah rawan bencana banjir meliputi: Kecamatan Motui, Kecamatan Sawa, Kecamatan Lembo, Kecamatan Lasolo, Kecamatan Molawe, Kecamatan Andowia, Kecamatan Asera, Kecamatan Oheo, Kecamatan Wiwirano.
4. Wilayah rawan bencana gempa bumi mencakup seluruh wilayah Kabupaten Konawe Utara mengingat terdapat sesar lasolo.

Dengan demikian pengarusutamaan kerentanan bencana di Kabupaten Konawe Utara sebagai faktor penting dalam pembangunan dengan menitikberatkan pada upaya penanganan dan pengurangan kerentanan bencana khususnya bencana banjir dan tanah longsor serta peningkatan ketahanan terhadap risiko perubahan iklim.

#### **2.1.4 Kondisi Demografi**

Keberadaan penduduk sangat penting di dalam proses pembangunan, oleh karena itu penduduk akan menjadi beban bagi daerah apabila tidak dikelola dengan baik dan sebaliknya akan menjadi modal potensial apabila mampu dikelola dengan baik. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik, jumlah penduduk Kabupaten Konawe Utara Tahun 2020 sebanyak 67.871 jiwa yang terdiri dari 35.112 jiwa laki-laki dan 32.759 jiwa perempuan, dengan angka sex rasio jenis kelamin sebesar 107,18. Rata - rata laju pertumbuhan penduduk per tahun di Kabupaten Konawe Utara sebesar 2,7 persen.

**Tabel 2.5.**  
**Jumlah Penduduk Menurut Jenis Kelamin di Kabupaten Konawe Utara**

| Tahun | Jenis Kelamin |           | Jumlah Penduduk | Jumlah KK | Rasio Jenis Kelamin |
|-------|---------------|-----------|-----------------|-----------|---------------------|
|       | Laki-Laki     | Perempuan |                 |           |                     |
| 2010  | 24.346        | 23.579    | 47.925          | 10.892    | 103,25              |
| 2011  | 27.519        | 25.042    | 52.561          | 11.318    | 109,89              |
| 2012  | 28.088        | 25.569    | 53.657          | 11.779    | 109,85              |
| 2013  | 28.665        | 26.087    | 54.752          | 12.167    | 109,88              |
| 2014  | 29.902        | 27.175    | 57.077          | 12.384    | 110,03              |
| 2015  | 30.499        | 27.902    | 58.401          | 12.580    | 109,31              |
| 2016  | 31.186        | 28.487    | 59.673          | 12.584    | 109,47              |
| 2017  | 31.884        | 29.000    | 60.884          | 13.115    | 109,94              |
| 2018  | 32.720        | 29.683    | 62.403          | 13.442    | 110,23              |
| 2019  | 33.390        | 30.424    | 63.815          | 18.867    | 109,75              |
| 2020  | 35.112        | 32.759    | 67.871          | 19.218    | 107,18              |

Sumber : Dirangkum dari BPS, Konawe Utara dalam Angka, Tahun 2017 s.d 2021

Jumlah penduduk terbanyak berada di Kecamatan Lasolo, Molawe, Andowia, dan Asera. Hal ini terjadi karena keempat kecamatan tersebut merupakan konsentrasi penduduk setelah Kabupaten Konawe Utara terbentuk menjadi daerah otonomi baru, selain itu kecamatan tersebut merupakan daerah percepatan pengembangan wilayah dan pusat-pusat perekonomian sehingga secara umum menjadi daya tarik bagi penduduk untuk tinggal dilokasi tersebut.

Komposisi penduduk menurut jenis kelamin diperlukan guna menentukan kebijakan yang berprespektif gender. Data pada tabel 2.6 menunjukkan jumlah penduduk perempuan semakin meningkat dan lebih banyak dari penduduk laki-laki, oleh sebab itu dalam menentukan suatu kebijakan perlu mempertimbangkan kesetaraan gender. Salah satunya mungkin dapat memberikan peluang lebih besar bagi perempuan untuk dapat turut berperan aktif dalam pemerintahan.

**Tabel 2.6.**  
**Jumlah Penduduk Menurut Kecamatan**  
**di Kabupaten Konawe Utara**

| No. | Kecamatan    | Jenis Kelamin |               |               | Jumlah KK     |
|-----|--------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
|     |              | Laki - Laki   | Perempuan     | Jumlah        |               |
| 1.  | Sawa         | 2.379         | 2.137         | 4.516         | 1.482         |
| 2.  | Motui        | 2.358         | 2.347         | 4.705         | 1.568         |
| 3.  | Lembo        | 2.792         | 2.630         | 5.422         | 1.588         |
| 4.  | Lasolo       | 4.168         | 3.961         | 8.129         | 1.740         |
| 5.  | Wawolesea    | 1.757         | 1.739         | 3.496         | 1.026         |
| 6.  | Lasolo Kep.  | 1.195         | 1.029         | 2.224         | 917           |
| 7.  | Molawe       | 3.399         | 3.209         | 6.608         | 1.568         |
| 8.  | Asera        | 3.882         | 3.722         | 7.604         | 1.830         |
| 9.  | Andowia      | 3.574         | 3.470         | 7.044         | 1.520         |
| 10. | Oheo         | 2.389         | 2.225         | 4.614         | 1.691         |
| 11. | Langgikima   | 2.833         | 2.371         | 5.204         | 1.213         |
| 12. | Wiwirano     | 2.937         | 2.624         | 5.561         | 1.711         |
| 13. | Landawe      | 1.449         | 1.295         | 2.744         | 1.364         |
|     | <b>TOTAL</b> | <b>35.112</b> | <b>32.759</b> | <b>67.871</b> | <b>19.218</b> |

Sumber : BPS, Kabupaten Konawe Utara dalam Angka, Tahun 2021

Ditilik dari kepadatan penduduk kecamatan, penyebaran penduduk belum merata. Kecamatan dengan luas wilayah yang lebih kecil mempunyai jumlah penduduk lebih banyak dibandingkan dengan kecamatan yang memiliki luas wilayah lebih besar, sebagaimana disajikan pada Tabel 2.7.

**Tabel 2.7.**  
**Jumlah dan Kepadatan Penduduk**  
**di Kabupaten Konawe Utara**

| No | Kecamatan | Luas Wilayah (km <sup>2</sup> ) | Tahun 2020 |           |        | Kepadatan (jiwa/km <sup>2</sup> ) |
|----|-----------|---------------------------------|------------|-----------|--------|-----------------------------------|
|    |           |                                 | Laki-laki  | Perempuan | Jumlah |                                   |
| 1. | Sawa      | 93,76                           | 2.410      | 2.207     | 4.573  | 49                                |
| 2. | Motui     | 61,3                            | 2.305      | 2.268     | 4.617  | 75                                |
| 3. | Lembo     | 78,12                           | 2.829      | 2.651     | 5.480  | 70                                |
| 4. | Wawolesea | 149,4                           | 4.261      | 4.027     | 8.288  | 55                                |
| 5. | Lasolo    | 139,4                           | 1.748      | 1.728     | 3.476  | 25                                |

| No                  | Kecamatan   | Luas Wilayah (km <sup>2</sup> ) | Tahun 2020    |               |               | Kepadatan (jiwa/km <sup>2</sup> ) |
|---------------------|-------------|---------------------------------|---------------|---------------|---------------|-----------------------------------|
|                     |             |                                 | Laki-laki     | Perempuan     | Jumlah        |                                   |
| 6.                  | Lasolo Kep. | 62,42                           | 1.094         | 1.087         | 2.181         | 35                                |
| 7.                  | Molawe      | 365,06                          | 3.284         | 3.146         | 6.430         | 18                                |
| 8.                  | Asera       | 863,32                          | 3.760         | 3.620         | 7.905         | 9                                 |
| 9.                  | Andowia     | 595,9                           | 4.048         | 3.857         | 7.380         | 12                                |
| 10.                 | Oheo        | 738,5                           | 2.427         | 2.301         | 4.728         | 6                                 |
| 11.                 | Langgikima  | 476,75                          | 2.678         | 2.360         | 5.038         | 11                                |
| 12.                 | Wiwirano    | 968,06                          | 2.884         | 2.596         | 5.480         | 6                                 |
| 13.                 | Landawe     | 603,53                          | 1.535         | 1.404         | 2.939         | 5                                 |
| <b>Konawe Utara</b> |             | <b>5.003,39</b>                 | <b>35.263</b> | <b>33.252</b> | <b>68.515</b> | <b>14</b>                         |

Sumber : BPS, Kabupaten Konawe Utara Dalam Angka, tahun 2021, dianalisis

Statistik penduduk menurut kelompok umur akan menggambarkan jumlah usia produktif atau non produktif di Kabupaten Konawe Utara. Pada tahun 2020 tercatat kelompok umur di bawah 20 tahun berjumlah 26.971 jiwa yang merupakan penduduk usia sekolah, kelompok umur 20-65 tahun sebanyak 38.576 jiwa adalah penduduk usia produktif atau angkatan kerja, sedangkan lanjut usia atau kelompok umur 65+ berjumlah 2.324 jiwa.

Berdasarkan komposisi penduduk, menggambarkan bahwa jumlah penduduk produktif atau tenaga kerja di Kabupaten Konawe Utara lebih besar dari penduduk yang tidak produktif (usia sekolah dan lanjut usia). Bonus demografi ini menjadi potensi dalam proses pembangunan dalam kaitannya dengan kemampuan sumber daya manusia dalam mengelola sumber-sumber daerah.

**Tabel 2.8.**  
**Komposisi Penduduk Menurut Kelompok Umur**  
**Kabupaten Konawe Utara Tahun 2020**

| Tingkat Umur | Jumlah Penduduk |           | Total |
|--------------|-----------------|-----------|-------|
|              | Laki - Laki     | Perempuan |       |
| 0 - 4        | 3.784           | 3.698     | 7.482 |
| 5 - 9        | 3.377           | 3.415     | 6.792 |
| 10 - 14      | 3.252           | 3.039     | 6.291 |
| 15 - 19      | 3.218           | 3.188     | 6.406 |
| 20 - 24      | 3.106           | 2.808     | 5.914 |

| Tingkat Umur  | Jumlah Penduduk |               | Total         |
|---------------|-----------------|---------------|---------------|
|               | Laki - Laki     | Perempuan     |               |
| 25 - 29       | 3.169           | 3.057         | 6.226         |
| 30 - 34       | 3.062           | 2.737         | 5.799         |
| 35 - 39       | 2.751           | 2.503         | 5.254         |
| 40 - 44       | 2.488           | 2.247         | 4.735         |
| 45 - 49       | 2.052           | 1.751         | 3.803         |
| 50 - 54       | 1.598           | 1.383         | 2.981         |
| 55 - 59       | 1.167           | 1030          | 2.197         |
| 60 - 64       | 853             | 814           | 1.667         |
| 65 +          | 1.235           | 1.089         | 2.324         |
| <b>Jumlah</b> | <b>35.112</b>   | <b>32.759</b> | <b>67.871</b> |

Sumber : BPS, Kabupaten Konawe Utara Dalam Angka, Tahun 2021

Berdasarkan tabel diatas, dapat diketahui bahwa struktur penduduk Kabupaten Konawe Utara didominasi oleh penduduk usia sekolah dan usia produktif, sehingga diperlukan adanya kebijakan Pemerintah Kabupaten Konawe Utara terkait pendidikan dan ketenagakerjaan.

Proporsi penduduk Kabupaten Konawe Utara pada tahun 2020 didominasi kelompok umur produktif (15-64 tahun) sebesar 66,28%, sementara itu penduduk kelompok usia muda (0-14 tahun) sebesar 30,30%, dan kelompok usia lanjut (di atas 65 tahun) sebesar 3,42%. Penduduk usia muda dan penduduk usia lanjut disebut juga penduduk non produktif. Berdasarkan komposisi tersebut, rasio beban ketergantungan penduduk usia non produktif terhadap penduduk usia produktif sebesar 50,88%, yang menunjukkan bahwa 100 orang penduduk usia produktif menanggung sekitar 51 orang penduduk yang belum/tidak produktif.

## 2.2 ASPEK KESEJAHTERAAN MASYARAKAT

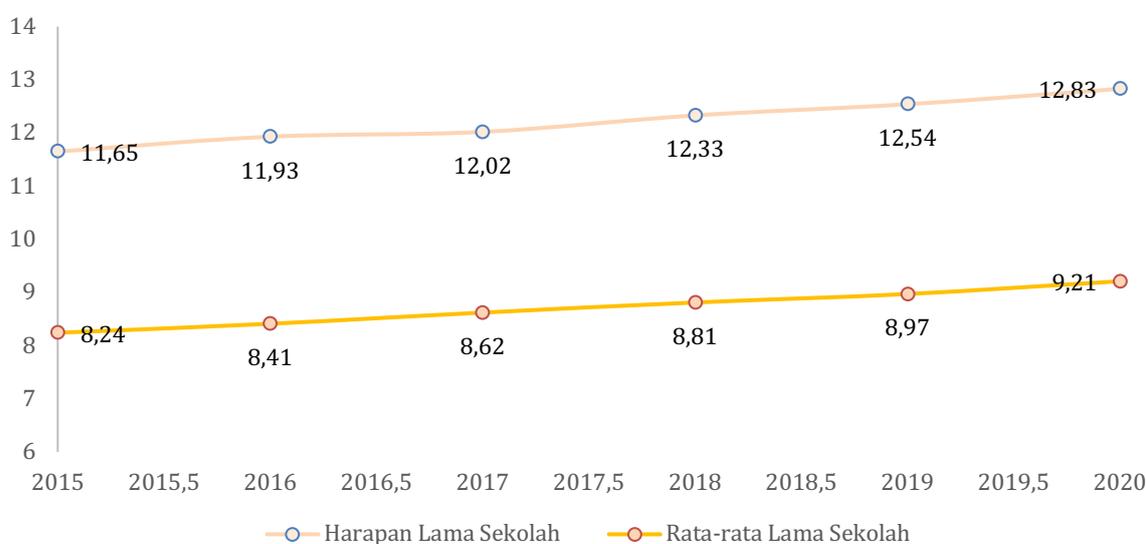
Aspek kesejahteraan masyarakat terdiri dari kesejahteraan dan pemerataan ekonomi, kesejahteraan sosial, serta seni budaya dan olahraga. Untuk menganalisis aspek kesejahteraan masyarakat, terlebih dahulu disusun tabel capaian indikator setiap variabel yang akan dianalisis untuk penyusunan RPJMD Kabupaten Konawe Utara. Indikator variabel aspek kesejahteraan masyarakat dimaksud terdiri dari:

## 2.2.1 Fokus Kesejahteraan dan Pemerataan Ekonomi

### 2.2.1.1 Indeks Pembangunan Manusia (IPM)

Indeks Pembangunan Manusia (IPM) merupakan suatu indeks komposit yang menggambarkan tingkat pembangunan manusia. IPM mengukur capaian pembangunan manusia berbasis sejumlah komponen dasar kualitas hidup, dengan melalui pendekatan tiga dimensi yaitu kesehatan, pengetahuan dan dimensi hidup layak. Dimensi kesehatan diukur melalui angka harapan hidup, dimensi pengetahuan diukur melalui harapan lama sekolah dan rata-rata lama sekolah dan dimensi hidup layak diukur melalui kemampuan daya beli masyarakat terhadap sejumlah kebutuhan pokok yang dilihat dari rata-rata besarnya pengeluaran perkapita.

Penghitungan IPM untuk dimensi pengetahuan menggunakan indikator Rata-rata Lama Sekolah (RLS), dan Harapan Lama Sekolah (HLS). Dimensi standar hidup layak menggunakan indikator Produk Nasional Bruto (PNB) perkapita, sedangkan untuk menghitung dimensi kesehatan menggunakan indikator Usia Harapan Hidup saat lahir (UHH). Metode agregasinya disempurnakan menjadi rata-rata geometrik. Ketidakterediaan data PNB ditingkat provinsi dan kabupaten/kota, digunakan proksi pengeluaran perkapita yang disesuaikan, dari data hasil Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas). Metode ini mulai diterapkan di Indonesia pada penghitungan IPM tahun 2014.



**Gambar 2.4. Harapan Lama Sekolah dan Rata-Rata Lama Sekolah Kabupaten Konawe Utara Tahun 2015 - 2020**

**Tabel 2.9.**  
**Perkembangan IPM Kabupaten Konawe Utara**

| Tahun | IPM Konawe Utara | IPM Sulawesi Tenggara | IPM Nasional |
|-------|------------------|-----------------------|--------------|
| 2014  | 66,03            | 67,55                 | 68,90        |
| 2015  | 66,44            | 68,75                 | 69,55        |
| 2016  | 67,20            | 69,31                 | 70,18        |
| 2017  | 67,71            | 69,86                 | 70,81        |
| 2018  | 68,50            | 70,61                 | 71,39        |
| 2019  | 69,22            | 71,20                 | 71,92        |
| 2020  | 69,86            | 71,45                 | 71,94        |

Sumber : BPS Sulawesi Tenggara, 2021

Berdasarkan hasil penghitungan IPM, dapat dilihat bahwa selama lima tahun terakhir nilai IPM Kabupaten Konawe Utara menunjukkan perkembangan yang positif, namun masih dibawah angka rata-rata provinsi dan nasional. Nilai IPM terus mengalami peningkatan mulai dari 66,44 pada tahun 2015 hingga mencapai 69,86 pada tahun 2020, termasuk dalam kategori sedang (IPM 60 - 70). Meskipun capaiannya terus meningkat, tetapi nilai IPM Kabupaten Konawe Utara selama lima tahun terakhir belum mampu meningkatkan level capaiannya menjadi tinggi (IPM > 70) sampai dengan sangat tinggi (70 < IPM < 80).

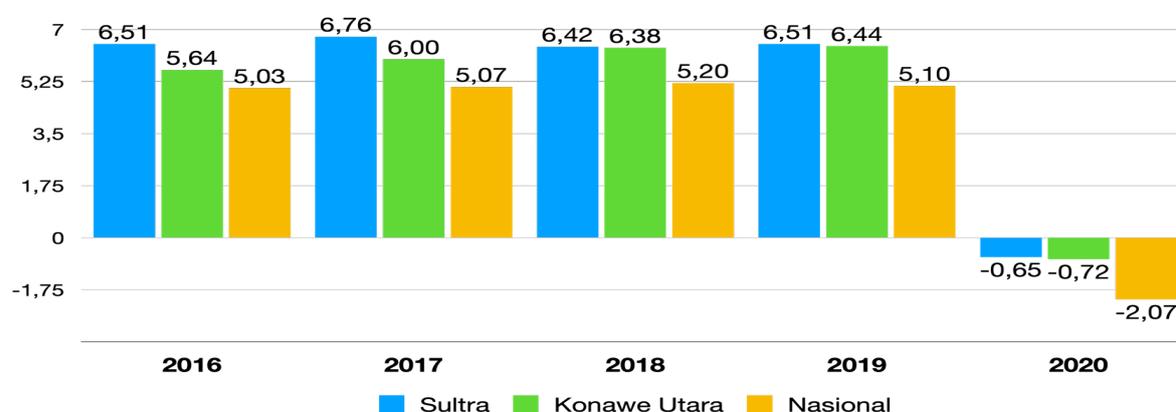
Harapannya, pembangunan yang dilaksanakan di Kabupaten Konawe Utara pada tahun-tahun mendatang mampu memberikan dampak positif terutama yang berkaitan dengan peningkatan kesejahteraan dan kualitas penduduk Kabupaten Konawe Utara. Belum mampunya IPM Kabupaten Konawe Utara menembus kategori sangat tinggi bisa disebabkan peningkatan komponen-komponennya yang belum optimal.

IPM Kabupaten Konawe Utara masih dapat ditingkatkan antara lain dengan peningkatan laju pertumbuhan indeks kesehatan yaitu lebih mengutamakan perbaikan derajat kesehatan masyarakat melalui peningkatan kemudahan akses sarana kesehatan yang tersedia, penggunaan air bersih, keberadaan fasilitas MCK penduduk dan kualitas kesehatan lingkungan tempat tinggal penduduk; peningkatan laju pertumbuhan indeks pengetahuan yaitu dengan meningkatkan partisipasi sekolah penduduk melalui upaya semua anak usia sekolah (SD-SLTP) bisa bersekolah

dan tidak putus sekolah; peningkatan laju pertumbuhan indeks pengeluaran dengan meningkatkan daya beli penduduk melalui peningkatan pertumbuhan ekonomi dan pendapatan perkapita, membuka lapangan usaha baru, dan adanya program bantuan sosial pemerintah seperti Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT), Program Keluarga Harapan (PKH), dll.

### 2.2.1.2 Pertumbuhan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB)

Salah satu indikator yang dapat digunakan untuk mengidentifikasi tingkat kemajuan perekonomian Kabupaten Konawe Utara yaitu pertumbuhan PDRB. PDRB menggambarkan kemampuan daerah dalam mengelola dan menggunakan sumber daya yang dimiliki untuk menghasilkan barang dan jasa. Dari PDRB dapat diketahui nilai tambah dari kegiatan ekonomi dalam suatu wilayah, pertumbuhan ekonomi dan struktur ekonomi daerah. Oleh karena itu dapat dijadikan bahan evaluasi terhadap kebijaksanaan pembangunan daerah khususnya pembangunan ekonomi guna penyusunan atau menggariskan kebijakan lebih lanjut. Pada Tahun 2019 perekonomian Kabupaten Konawe Utara mampu tumbuh sebesar 6,44 persen, dan mengalami penurunan pada tahun 2020 menjadi -0,72 persen. Pertumbuhan ini berada di bawah pertumbuhan ekonomi Provinsi Sulawesi Tenggara sebesar -0,65 persen, namun sudah di atas nasional sebesar -2,07 persen. Sebagaimana ditampilkan pada gambar berikut.



**Gambar 2.5 Perbandingan Laju Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Konawe Utara, Sulawesi Tenggara, dan Nasional**

*Sumber : BPS Kabupaten Konawe Utara, 2021*

Perekonomian Kabupaten Konawe Utara dari tahun 2017 sampai dengan Tahun 2019 menunjukkan tren peningkatan. Pada tahun 2016, ekonomi Kabupaten Konawe Utara tumbuh 5,64 persen, meningkat menjadi 6,41 pada tahun 2019. Namun pada tahun 2020, perekonomian Kabupaten Konawe Utara melambat menjadi -1,20. Hal ini disebabkan karena laju pertumbuhan melambat pada beberapa sektor. Sektor yang paling mengalami perlambatan pertumbuhan antara lain sektor pertambangan dan penggalian, sektor perdagangan besar dan eceran, reparasi mobil dan sepeda motor, serta sektor jasa lainnya. Laju pertumbuhan ekonomi Kabupaten Konawe Utara disajikan pada tabel 2.10 berikut ini:

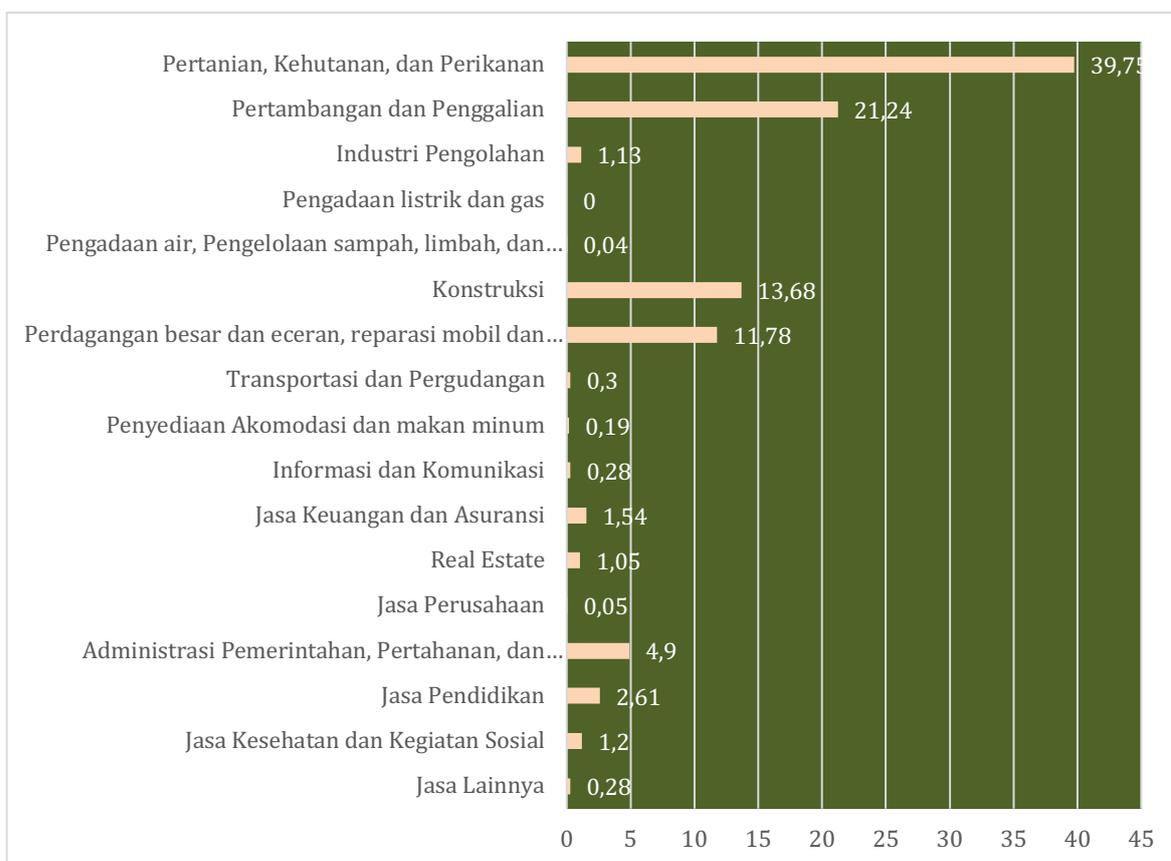
**Tabel 2.10.**  
**Laju Pertumbuhan Ekonomi di Kabupaten Konawe Utara**

| Lapangan Usaha          |   | 2016        | 2017        | 2018        | 2019        | 2020          |
|-------------------------|---|-------------|-------------|-------------|-------------|---------------|
| A                       | Pertanian, Kehutanan dan Perikanan                            | 6,34        | 6,14        | 6,63        | 5,21        | (1,20)        |
| B                       | Pertambangan dan Penggalian                                   | 1,71        | 10,49       | 7,81        | 9,61        | (2,49)        |
| C                       | Industri Pengolahan   | 7,97        | 4,07        | 0,74        | 2,79        | (1,26)        |
| D                       | Pengadaan listrik dan gas                                     | 8,19        | 6,63        | 1,66        | 4,32        | 5,57          |
| E                       | Pengadaan air. Pengelolaan sampah. limbah & Daur ulang        | 5,84        | 1,17        | 1,05        | 1,11        | 4,24          |
| F                       | Konstruksi  | 4,53        | 3,08        | 6,11        | 6,05        | (0,03)        |
| G                       | Perdagangan besar dan eceran, reparasi mobil dan sepeda motor | 12,71       | 6,06        | 6,88        | 7,72        | (1,38)        |
| H                       | Transportasi dan Pergudangan                                  | 8,23        | 4,63        | 5,48        | 3,86        | (1,53)        |
| I                       | Penyediaan Akomodasi & makan minum                            | 7,11        | 4,67        | 6,85        | 7,48        | (0,22)        |
| J                       | Informasi dan Komunikasi                                      | 6,88        | 9,68        | 7,84        | 8,13        | 11,08         |
| K                       | Jasa Keuangan dan Asuransi                                    | 10,45       | 4,77        | 1,48        | 5,57        | 6,61          |
| L                       | Real Estate   | 0,54        | 0,69        | 0,76        | 0,66        | 0,22          |
| M.N                     | Jasa Perusahaan   | 9,20        | 5,44        | 5,19        | 6,26        | (1,57)        |
| O                       | Administrasi Pemerintahan. Pertahanan & Jaminan sosial        | 2,70        | 0,17        | 2,31        | 5,77        | 1,50          |
| P                       | Jasa Pendidikan   | 6,26        | 3,09        | 6,73        | 3,69        | 6,82          |
| Q                       | Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial                            | 6,78        | 3,39        | 6,22        | 3,33        | 9,88          |
| R.S.T.U                 | Jasa Lainnya  | 7,12        | 2,56        | 5,26        | 5,73        | (3,22)        |
| <b>Pertumbuhan PDRB</b> |   | <b>5,64</b> | <b>6,00</b> | <b>6,38</b> | <b>6,41</b> | <b>(0,72)</b> |

Sumber : BPS, Kabupaten Konawe Utara Dalam Angka, Tahun 2021

Sumber utama pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Konawe Utara terutama didukung oleh kinerja pada sektor : (1) Pertanian, Kehutanan dan Perikanan, (2) Pertambangan dan Penggalian, (3) Konstruksi, (4) Perdagangan Besar dan eceran, reparasi mobil dan sepeda motor. Sumber-sumber tersebut yang mengalami laju pertumbuhan negatif dibandingkan tahun 2019.

Ditilik dari kontribusi sektoral, perekonomian Kabupaten Konawe Utara pada tahun 2020 dibandingkan tahun 2019 belum mengalami perubahan dan masih didominasi oleh lima sektor ekonomi, yaitu: (1) sektor Pertanian, Kehutanan dan Perikanan sebesar 39,75 persen, menurun dibanding tahun 2019 sebesar 39,93 persen; (2) sektor Pertambangan dan Penggalian sebesar 21,24 persen menurun dibanding tahun 2019 sebesar 21,49 persen, (3) sektor Konstruksi sebesar 13,68 sama dengan tahun 2019; dan (4) sektor Perdagangan Besar dan eceran, reparasi mobil dan sepeda motor sebesar 11,78 persen menurun dibanding tahun 2019 sebesar 11,89 persen.



Sumber : BPS Kabupaten Konawe Utara, 2021

**Gambar 2.6 Kontribusi PDRB ADHB Menurut Lapangan Usaha Kabupaten Konawe Utara Tahun 2020**

**Tabel 2.11**  
**Persentase PDRB Atas Dasar Harga Berlaku di Kabupaten Konawe Utara**

| Lapangan Usaha | PDRB  | 2016 (%)            | PDRB         | 2017 (%)            | PDRB          | 2018 (%)            | PDRB          | 2019* (%)           | PDRB          | 2020** (%)          |               |
|----------------|---|---------------------|--------------|---------------------|---------------|---------------------|---------------|---------------------|---------------|---------------------|---------------|
|                | (Juta Rp.)  |                     | (Juta Rp.)   |                     | (Juta Rp.)    |                     | (Juta Rp.)    |                     | (Juta Rp.)    |                     |               |
| A              | Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan                           | 1.214.892,17        | 41,05        | 1.334.559,94        | 40,89         | 1.452.563,09        | 40,44         | 1.567.801,91        | 39,93         | 1.576.457,56        | 39,75         |
| B              | Pertambangan dan Penggalan                                    | 568.226,73          | 19,2         | 660.701,98          | 20,25         | 746.907,95          | 20,79         | 843.652,27          | 21,49         | 842.442,58          | 21,24         |
| C              | Industri Pengolahan   | 37.699,80           | 1,27         | 40.705,49           | 1,25          | 42.118,38           | 1,17          | 44.234,56           | 1,13          | 44.635,88           | 1,13          |
| D              | Pengadaan listrik dan gas                                     | 77,8                | 0            | 93,56               | 0,00          | 96,29               | 0,00          | 101,87              | 0,00          | 110,33              | 0,00          |
| E              | Pengadaan air, Pengelolaan sampah, limbah & Daur ulang        | 1.276,46            | 0,04         | 1.307,93            | 0,04          | 1.324,47            | 0,04          | 1.325,93            | 0,03          | 1.394,45            | 0,04          |
| F              | Konstruksi  | 419.351,29          | 14,17        | 448.520,56          | 13,74         | 497.246,10          | 13,84         | 537.157,45          | 13,68         | 542.419,96          | 13,68         |
| G              | Perdagangan besar dan eceran, reparasi mobil dan sepeda motor | 331.135,45          | 11,19        | 372.032,74          | 11,40         | 417.307,92          | 11,62         | 466.857,55          | 11,89         | 467.321,43          | 11,78         |
| H              | Transportasi dan Pergudangan                                  | 9.602,98            | 0,32         | 10.309,40           | 0,32          | 11.167,43           | 0,31          | 11.922,20           | 0,30          | 11.923,82           | 0,30          |
| I              | Penyediaan Akomodasi & makan minum                            | 5.512,77            | 0,19         | 5.963,10            | 0,18          | 6.586,22            | 0,18          | 7.265,41            | 0,19          | 7.429,31            | 0,19          |
| J              | Informasi dan Komunikasi                                      | 7.581,12            | 0,26         | 8.489,47            | 0,26          | 9.256,67            | 0,26          | 9.964,42            | 0,25          | 10.943,74           | 0,28          |
| K              | Jasa Keuangan dan Asuransi                                    | 45.955,48           | 1,55         | 49.900,66           | 1,53          | 52.345,97           | 1,46          | 57.395,20           | 1,46          | 60.927,62           | 1,54          |
| L              | Real Estate   | 38.502,59           | 1,3          | 39.679,31           | 1,22          | 40.932,02           | 1,14          | 41.399,75           | 1,05          | 41.590,90           | 1,05          |
| M,N            | Jasa Perusahaan   | 1.425,52            | 0,05         | 1.542,23            | 0,05          | 1.671,43            | 0,05          | 1.832,80            | 0,05          | 1.856,95            | 0,05          |
| O              | Administrasi Pemerintahan, Pertahanan & Jaminan sosial        | 158.458,05          | 5,35         | 162.060,70          | 4,97          | 173.563,95          | 4,83          | 186.515,85          | 4,75          | 194.492,16          | 4,90          |
| P              | Jasa Pendidikan   | 76.141,22           | 2,57         | 81.497,20           | 2,50          | 88.634,61           | 2,47          | 95.340,42           | 2,43          | 103.533,23          | 2,61          |
| Q              | Jasa Kesehatan  | 34.172,42           | 1,15         | 36.255,32           | 1,11          | 39.577,14           | 1,10          | 42.103,90           | 1,07          | 47.596,16           | 1,20          |
| R,S,T,U        | Jasa Lainnya  | 9.414,47            | 0,32         | 9.875,20            | 0,30          | 10.496,04           | 0,29          | 11.237,91           | 0,29          | 11.151,22           | 0,28          |
| <b>PDRB</b>    |   | <b>2.959.426,32</b> | <b>99,98</b> | <b>3.263.494,79</b> | <b>100,00</b> | <b>3.591.795,68</b> | <b>100,00</b> | <b>3.926.109,40</b> | <b>100,00</b> | <b>3.966.227,30</b> | <b>100,00</b> |

Sumber : BPS, Kabupaten Konawe Utara Dalam Angka, Tahun 2021

**Tabel 2.12**  
**Persentase PDRB Atas Dasar Harga Konstan (2010) di Kabupaten Konawe Utara**

| Lapangan Usaha | PDRB  | 2016 (%)            | PDRB         | 2017 (%)            | PDRB          | 2018 (%)            | PDRB          | 2019* (%)           | PDRB          | 2020** (%)          |               |
|----------------|---|---------------------|--------------|---------------------|---------------|---------------------|---------------|---------------------|---------------|---------------------|---------------|
|                | (Juta Rp.)  |                     | (Juta Rp.)   |                     | (Juta Rp.)    |                     | (Juta Rp.)    |                     | (Juta Rp.)    |                     |               |
| A              | Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan                           | 968.856,48          | 40,81        | 1.028.370,78        | 40,86         | 1.096.508,56        | 40,96         | 1.153.598,76        | 40,50         | 1.139.739,54        | 40,30         |
| B              | Pertambangan dan Penggalian                                   | 465.843,30          | 19,62        | 514.710,58          | 20,45         | 554.909,37          | 20,73         | 608.224,39          | 21,35         | 593.108,86          | 20,97         |
| C              | Industri Pengolahan   | 31.374,31           | 1,32         | 32.652,28           | 1,3           | 32.894,25           | 1,23          | 33.813,48           | 1,19          | 33.388,63           | 1,18          |
| D              | Pengadaan listrik dan gas                                     | 76,66               | 0            | 81,74               | 0             | 83,09               | 0,00          | 86,69               | 0,00          | 91,51               | 0,00          |
| E              | Pengadaan air, Pengelolaan sampah, limbah & Daur ulang        | 1.056,09            | 0,04         | 1.068,44            | 0,04          | 1.079,69            | 0,04          | 1.091,69            | 0,04          | 1.137,98            | 0,04          |
| F              | Konstruksi  | 321.081,37          | 13,52        | 330.970,67          | 13,15         | 351.201,98          | 13,12         | 372.444,90          | 13,07         | 372.322,26          | 13,17         |
| G              | Perdagangan besar dan eceran, reparasi mobil dan sepeda motor | 269.453,54          | 11,35        | 285.771,97          | 11,36         | 305.423,36          | 11,41         | 329.006,02          | 11,55         | 324.452,84          | 11,47         |
| H              | Transportasi dan Pergudangan                                  | 8.756,77            | 0,37         | 9.162,62            | 0,36          | 9.664,87            | 0,36          | 10.038,06           | 0,35          | 9.884,79            | 0,35          |
| I              | Penyediaan Akomodasi & makan minum                            | 4.292,15            | 0,18         | 4.492,66            | 0,18          | 4.800,30            | 0,18          | 5.159,24            | 0,18          | 5.147,81            | 0,18          |
| J              | Informasi dan Komunikasi                                      | 7.692,63            | 0,32         | 8.437,28            | 0,34          | 9.098,76            | 0,34          | 9.838,80            | 0,35          | 10.929,06           | 0,39          |
| K              | Jasa Keuangan dan Asuransi                                    | 34.040,32           | 1,43         | 35.664,22           | 1,42          | 36.191,36           | 1,35          | 38.209,03           | 1,34          | 40.734,41           | 1,44          |
| L              | Real Estate   | 33.489,60           | 1,41         | 33.720,68           | 1,34          | 33.976,62           | 1,27          | 34.202,07           | 1,20          | 34.277,72           | 1,21          |
| M,N            | Jasa Perusahaan   | 1.203,21            | 0,05         | 1.268,61            | 0,05          | 1.334,45            | 0,05          | 1.418,05            | 0,05          | 1.395,84            | 0,05          |
| O              | Administrasi Pemerintahan, Pertahanan & Jaminan sosial        | 125.377,16          | 5,28         | 125.590,30          | 4,99          | 128.491,44          | 4,80          | 135.905,39          | 4,77          | 137.939,95          | 4,88          |
| P              | Jasa Pendidikan   | 64.869,72           | 2,73         | 66.875,29           | 2,66          | 71.376,00           | 2,67          | 74.009,77           | 2,60          | 79.056,24           | 2,80          |
| Q              | Jasa Kesehatan  | 28.512,53           | 1,2          | 29.479,10           | 1,17          | 31.312,70           | 1,17          | 32.356,46           | 1,14          | 35.553,28           | 1,26          |
| R,S,T,U        | Jasa Lainnya  | 8.032,83            | 0,34         | 8.238,52            | 0,33          | 8.671,48            | 0,32          | 9.168,73            | 0,32          | 8.873,50            | 0,31          |
| <b>PDRB</b>    |   | <b>2.374.008,67</b> | <b>99,97</b> | <b>2.516.555,74</b> | <b>100,00</b> | <b>2.677.018,28</b> | <b>100,00</b> | <b>2.848.571,53</b> | <b>100,00</b> | <b>2.828.034,22</b> | <b>100,00</b> |

Sumber : BPS, Kabupaten Konawe Utara Dalam Angka, Tahun 2021

Dari Tabel 2.11 dapat dilihat bahwa empat kategori lapangan usaha yang memiliki kontribusi terbesar adalah lapangan usaha pertanian, kehutanan, dan perikanan; lapangan usaha pertambangan dan penggalian; lapangan usaha konstruksi; lapangan usaha perdagangan besar dan eceran, reparasi mobil dan sepeda motor. Oleh sebab itu untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi daerah, maka program kegiatan dapat diarahkan pada sektor tersebut.

**Tabel 2.13.**  
**Perkembangan Persentase PDRB Atas Dasar Harga Berlaku**  
**di Kabupaten Konawe Utara**

| Lapangan Usaha               |   | 2016          | 2017          | 2018          | 2019          | 2020          |
|------------------------------|---|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| A                            | Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan                           | 41,05         | 40,89         | 40,44         | 39,93         | 39,75         |
| B                            | Pertambangan dan Penggalian                                   | 19,2          | 20,25         | 20,79         | 21,49         | 21,24         |
| C                            | Industri Pengolahan   | 1,27          | 1,25          | 1,17          | 1,12          | 1,13          |
| D                            | Pengadaan listrik dan gas                                     | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          |
| E                            | Pengadaan air, Pengelolaan sampah, limbah, dan Daur ulang     | 0,04          | 0,04          | 0,04          | 0,03          | 0,04          |
| F                            | Konstruksi  | 14,17         | 13,74         | 13,84         | 13,68         | 13,68         |
| G                            | Perdagangan besar dan eceran, reparasi mobil dan sepeda motor | 11,19         | 11,4          | 11,62         | 11,89         | 11,78         |
| H                            | Transportasi dan Pergudangan                                  | 0,32          | 0,32          | 0,31          | 0,3           | 0,3           |
| I                            | Penyediaan Akomodasi dan makan minum                          | 0,19          | 0,18          | 0,18          | 0,19          | 0,19          |
| J                            | Informasi dan Komunikasi                                      | 0,26          | 0,26          | 0,26          | 0,25          | 0,28          |
| K                            | Jasa Keuangan dan Asuransi                                    | 1,55          | 1,53          | 1,46          | 1,46          | 1,54          |
| L                            | Real Estate   | 1,3           | 1,22          | 1,14          | 1,05          | 1,05          |
| M,N                          | Jasa Perusahaan   | 0,05          | 0,05          | 0,05          | 0,05          | 0,05          |
| O                            | Administrasi Pemerintahan, Pertahanan, dan Jaminan sosial     | 5,35          | 4,97          | 4,83          | 4,75          | 4,9           |
| P                            | Jasa Pendidikan   | 2,57          | 2,5           | 2,47          | 2,43          | 2,61          |
| Q                            | Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial                            | 1,15          | 1,11          | 1,1           | 1,07          | 1,2           |
| R,S,T,U                      | Jasa Lainnya  | 0,32          | 0,3           | 0,29          | 0,29          | 0,28          |
| <b>TOTAL PERSENTASE PDRB</b> |   | <b>100,00</b> | <b>100,00</b> | <b>100,00</b> | <b>100,00</b> | <b>100,00</b> |

Sumber : BPS, Kabupaten Konawe Utara Dalam Angka, Tahun 2021

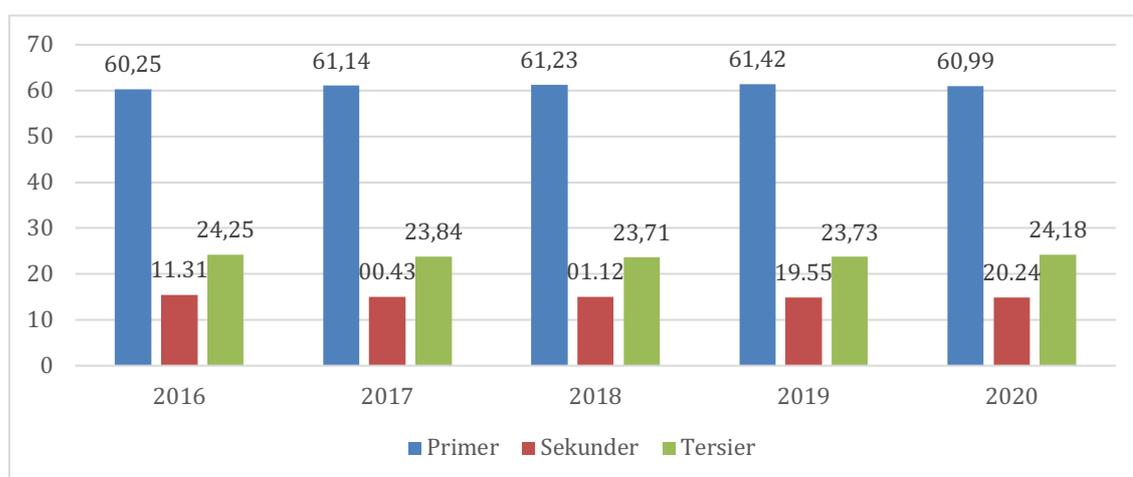
Dalam jangka waktu lima tahun terakhir kontribusi sektor pertanian sebagai penyumbang terbesar terhadap perekonomian Kabupaten Konawe Utara menunjukkan *trend* perlambatan. Namun sektor pertambangan dan penggalian menunjukkan pertumbuhan dan kontribusi yang sangat signifikan. Perlambatan yang

terjadi pada lapangan usaha pertanian sebagai salah satu sektor primer, menunjukkan bahwa sektor sekunder dan tersier semakin mempengaruhi aktivitas perekonomian Kabupaten Konawe Utara.

### 2.2.1.3 Struktur Ekonomi

Kondisi perekonomian Kabupaten Konawe Utara pada tahun 2020 dari sisi transformasi struktural yaitu pergeseran struktur ekonomi yang ditandai dengan pergeseran peranan lapangan usaha pada tiga sektor nampaknya tidak mengalami perubahan dibandingkan tahun sebelumnya. Ketiga sektor tersebut adalah :

1. Sektor primer (60,99%) yang terdiri dari lapangan usaha (1) Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan; dan (2) Pertambangan dan Penggalian;
2. Sektor sekunder (20,24%) yang terdiri dari lapangan usaha (1) Industri Pengolahan; (2) Pengadaan Listrik dan Gas; (3) Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang dan (4) Konstruksi.;
3. Sektor tersier (24,18%) yang terdiri dari lapangan usaha (1) Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi dan Perawatan Mobil dan Sepeda Motor; (2) Transportasi dan Pergudangan; (3) Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum; (4) Informasi dan Komunikasi; (5) Jasa Keuangan; (6) Real Estate; (7) Jasa Perusahaan; (8) Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib; (9) Jasa Pendidikan ; (10) Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial dan (11) Jasa lainnya.



Sumber : BPS Kabupaten Konawe Utara, 2021

**Gambar 2.7 Struktur Ekonomi Kabupaten Konawe Utara  
Tahun 2016 - 2020**

#### 2.2.1.4 PDRB Perkapita

Salah satu indikator tingkat kemakmuran penduduk di suatu daerah/wilayah dapat dilihat dari nilai PDRB perkapita, yang merupakan hasil bagi antara nilai tambah yang dihasilkan oleh seluruh kegiatan ekonomi dengan jumlah penduduk. Oleh karena itu, besar kecilnya jumlah penduduk akan mempengaruhi nilai PDRB per kapita, sedangkan besar kecilnya nilai PDRB sangat tergantung pada potensi sumber daya alam dan faktor-faktor produksi yang terdapat di daerah tersebut.

Nilai PDRB perkapita Kabupaten Konawe Utara sejak tahun 2016-2019 senantiasa mengalami kenaikan, namun mengalami penurunan di tahun 2020. Pada Tahun 2020, PDRP perkapita Kabupaten Konawe Utara mengalami penurunan sebesar 1,10 persen dibanding tahun 2019, dari 61.523.002 menjadi 60.847.572. Pandemi covid-19 yang melanda dunia termasuk Kabupaten Konawe Utara mengakibatkan berbagai proses perekonomian tidak berjalan sebagaimana mestinya. Menurunnya aktivitas perekonomian ini mengakibatkan turunnya PDRB Perkapita Kabupaten Konawe Utara. Meskipun demikian, jika dilihat dari dua tahun terakhir, yaitu dari tahun 2018 sampai tahun 2020, PDRB per kapita mengalami peningkatan sebesar 5,72 persen, dari 57.558.060 pada tahun 2018 menjadi 60.847.572 pada tahun 2020.

**Tabel 2.14.**  
**Perkembangan PDRB Perkapita di Kabupaten Konawe Utara**

| Tahun     | Harga Berlaku |                 | Harga Konstan (2010) |                 |        |
|-----------|---------------|-----------------|----------------------|-----------------|--------|
|           | Nilai (Rp.)   | Pertumbuhan (%) | Nilai (Rp.)          | Pertumbuhan (%) |        |
| 1         | 2016          | 49.594.059,62   | 7,14                 | 39.783.631,63   | 3,39   |
| 2         | 2017          | 53.601.845,97   | 8,08                 | 41.333.613,59   | 3,90   |
| 3         | 2018          | 57.558.060,83   | 7,40                 | 42.898.871,53   | 3,82   |
| 4         | 2019          | 61.523.002,95   | 6,89                 | 44.638.661,11   | 4,05   |
| 5         | 2020          | 60.847.572,37   | (1,10)               | 43.386.070,14   | (2,81) |
| Rata-rata |               | 56.624.908,35   | 5,68                 | 42.408.169,60   | 2,47   |

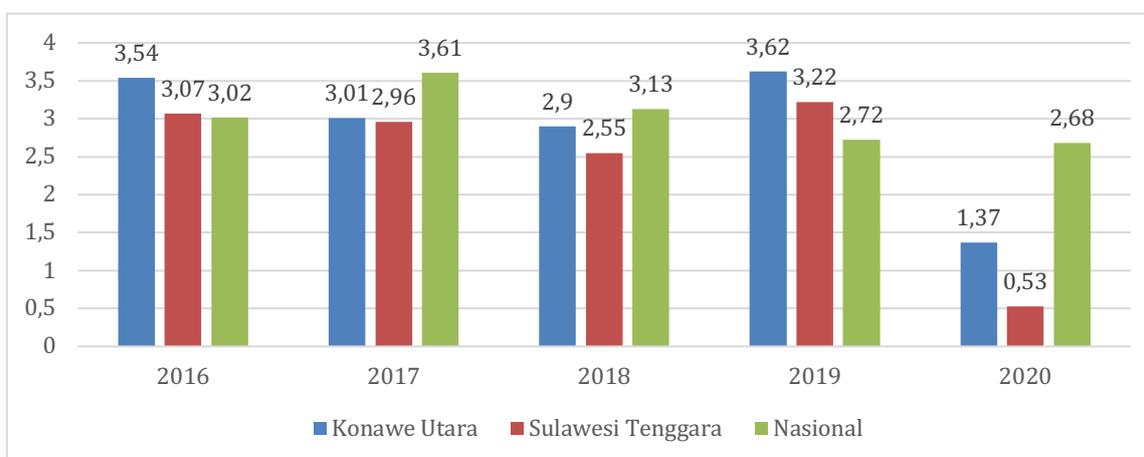
Sumber : PDRB Kab. Konawe Utara Menurut Pengeluaran Tahun 2016-2020

PDRB perkapita Kabupaten Konawe Utara menunjukkan peningkatan dari tahun 2016 sampai dengan tahun 2019 baik secara nominal maupun laju pertumbuhannya yang selalu bernilai positif. Meskipun tahun 2020 mengalami penurunan, jika dilihat dari lima tahun terakhir mengalami peningkatan sebesar

22,69 persen, pada tahun 2016 hanya sebesar 49.594.059 meningkat menjadi 60.847.572 pada tahun 2020. Peningkatan ini jauh lebih besar daripada peningkatan jumlah penduduk sebesar 9,23 persen. Indikator ini menunjukkan bahwa secara ekonomi setiap penduduk Kabupaten Konawe Utara rata-rata mampu menciptakan PDRB atau nilai tambah sebesar nilai per kapita di masing-masing tahun tersebut.

### 2.2.1.5 Laju Inflasi

Inflasi menggambarkan kenaikan/penurunan harga dari sekelompok barang dan jasa yang berpengaruh terhadap kemampuan daya beli masyarakat. Laju inflasi Kabupaten Konawe Utara mengalami penurunan dari 3,62 persen pada tahun 2019 menjadi 1,37 persen pada tahun 2020. Angka tersebut relatif lebih tinggi apabila dibandingkan dengan laju inflasi Provinsi Sulawesi Tenggara yaitu 0,53 persen, namun relatif lebih rendah jika dibandingkan dengan inflasi nasional sebesar 2,68%.



Sumber : BPS Kabupaten Konawe Utara, 2021

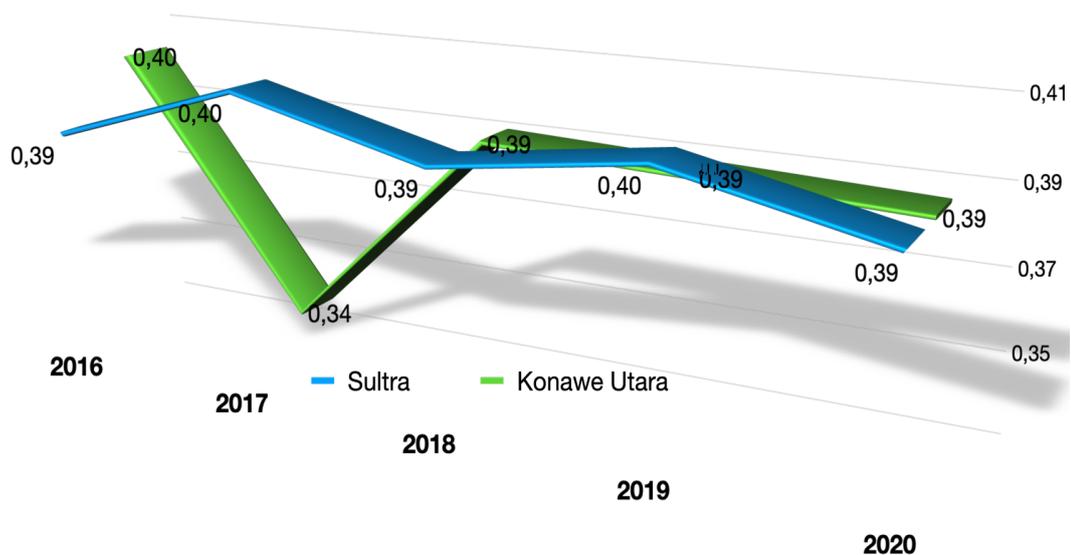
**Gambar 2.8 Perkembangan Laju Inflasi Kabupaten Konawe Utara Tahun 2016 - 2020**

Inflasi di bawah 10% per tahun termasuk ke dalam kriteria inflasi ringan, yang mempunyai dampak positif dalam arti dapat mendorong perekonomian lebih baik (meningkatkan pendapatan dan investasi). Keberhasilan ini dipengaruhi oleh strategi efektif yang dilakukan oleh Tim Pemantau dan Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) Kabupaten Konawe Utara melalui; 1). Upaya menjaga keterjangkauan harga; 2). Menjaga ketersediaan pasokan bahan kebutuhan pokok, cadangan pangan pemerintah daerah dan kelembagaan; 3). Mendorong kelancaran distribusi melalui kerja sama perdagangan antar daerah dan meningkatkan infrastruktur perdagangan;

serta 4). Melakukan komunikasi efektif dengan perbaikan kualitas dan validitas data.

### 2.2.1.6 Koefisien Gini

Koefisien Gini merupakan salah satu indikator untuk mengetahui distribusi dan ketimpangan pendapatan penduduk. Tingkat ketimpangan pendapatan dapat dilihat melalui koefisien gini yang berkisar antara 0 dan 1. Semakin mendekati 0 artinya distribusi pendapatan semakin merata. Sebaliknya, semakin mendekati 1 artinya distribusi pendapatan semakin timpang. Gambaran Perkembangan Koefisien Gini Kabupaten Konawe Utara tahun 2016-2020 dibandingkan dengan Provinsi Sulawesi Tenggara disajikan pada grafik berikut:



Sumber : BPS Kabupaten Konawe Utara, 2021

**Gambar 2.9 Distribusi Pendapatan Kabupaten Konawe Utara Tahun 2016-2020**

Berdasarkan data yang dihimpun oleh BPS Kabupaten Konawe Utara, Indeks Gini Kabupaten Konawe Utara dari tahun 2016-2020 mengalami perubahan yang fluktuatif. Dimana Indeks Gini pada tahun 2020 lebih rendah dari tahun 2018 dan 2019. Indeks Gini di Kabupaten Konawe Utara tahun 2020 diharapkan bisa diturunkan dengan mendorong empat kategori lapangan usaha yang memiliki kontribusi terbesar di Kabupaten Konawe Utara, yaitu lapangan usaha pertanian, kehutanan, dan perikanan; lapangan usaha pertambangan dan penggalian; lapangan usaha penyediaan konstruksi; dan lapangan usaha perdagangan besar dan eceran.

### 2.2.1.7 Tingkat Kemiskinan

Kemiskinan adalah ketidakmampuan dari sisi ekonomi untuk memenuhi kebutuhan dasar makanan dan non makanan (diukur dari sisi pengeluaran). Kebutuhan dasar makanan merupakan pengeluaran untuk memenuhi konsumsi 2.100 kkal perkapita perhari (52 jenis komoditi), sedang kebutuhan dasar non makanan merupakan kebutuhan minimum perumahan, sandang, pendidikan, kesehatan dan lainnya (51 jenis komoditi non makanan di perkotaan dan 47 jenis komoditi non makanan di pedesaan).

**Tabel 2.15.**  
**Tingkat Kemiskinan di Kabupaten Konawe Utara**

| Tahun | Jumlah Penduduk (jiwa) | Jumlah Penduduk Miskin (jiwa) | Persentase Penduduk Miskin/Po (%) | Garis Kemiskinan/GK (Rp/Kap/Bln) |
|-------|------------------------|-------------------------------|-----------------------------------|----------------------------------|
| 2012  | 53.657                 | 6.400                         | 11,78                             | 206.472                          |
| 2013  | 54.752                 | 5.900                         | 10,62                             | 207.521                          |
| 2014  | 57.077                 | 5.828                         | 10,15                             | 208.232                          |
| 2015  | 58.401                 | 5.810                         | 9,97                              | 216.578                          |
| 2016  | 59.673                 | 5.790                         | 9,75                              | 232.307                          |
| 2017  | 60.884                 | 8.440                         | 13,93                             | 244.391                          |
| 2018  | 62.017                 | 8.818                         | 14,22                             | 260.861                          |
| 2019  | 63.814                 | 8.670                         | 13,59                             | 273.544                          |
| 2020  | 67.871                 | 8.780                         | 13,53                             | 305.100                          |

Sumber : BPS, Kabupaten Konawe Utara Dalam Angka, Tahun 2021

Dari tahun 2011 sampai dengan 2017 tingkat kemiskinan menunjukkan kecenderungan menurun, kemudian mengalami peningkatan kembali di tahun 2018 menjadi 14,22%. Pada tahun 2019 sampai tahun 2020 tingkat kemiskinan di Kabupaten Konawe Utara kembali menurun menjadi 13,53%, apabila dilihat dari garis kemiskinan dari tahun ke tahun terjadi peningkatan pengukuran dengan angka terakhir sebesar Rp. 305.100. Hal ini menunjukkan pengeluaran penduduk miskin dan kesenjangan antara penduduk miskin belum mengalami perbaikan kualitas.

Upaya Pemerintah Daerah dalam meningkatkan perekonomian penduduk berpendapatan menengah ke bawah akan mengurangi kesenjangan ekonomi. Namun peningkatan pemerataan pendapatan tidak hanya bisa dilakukan oleh pemerintah dengan mengalokasikan bantuan untuk masyarakat menengah ke bawah, tetapi

dukungan dari masyarakat bergolongan ekonomi tinggi sangat diperlukan. Beberapa program yang tengah digalakkan oleh pemerintah dalam menanggulangi kemiskinan antara lain:

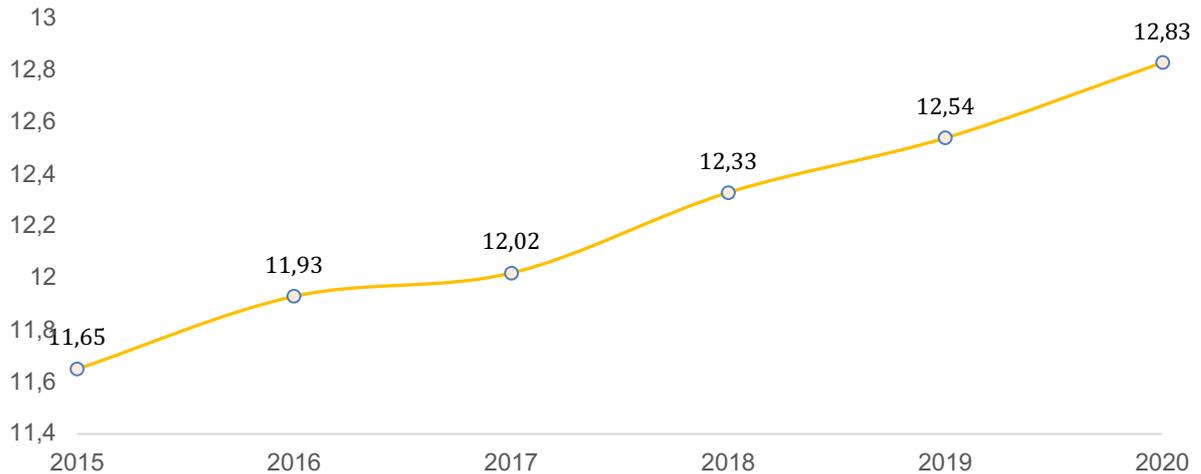
- a. Membuka peluang pertumbuhan kegiatan - kegiatan ekonomi baru yang berbasis masyarakat seperti pengembangan obyek wisata yang berbasis alam dan pengembangan usaha-usaha kuliner baru
- b. Menjaga stabilitas harga bahan kebutuhan pokok, hal ini bertujuan menjamin daya beli masyarakat miskin/keluarga miskin untuk memenuhi kebutuhan pokok terutama beras dan kebutuhan pokok utama selain beras;
- c. Mendorong pertumbuhan yang berpihak pada rakyat miskin dengan pemberian bantuan untuk kegiatan produktif skala usaha mikro;
- d. Memperluas cakupan program pembangunan berbasis masyarakat serta pendampingan program yang berkelanjutan;
- e. Meningkatkan akses masyarakat miskin kepada pelayanan dasar; dan
- f. Membangun serta menyempurnakan sistem perlindungan sosial bagi masyarakat miskin, seperti pemberian beras untuk warga miskin lansia.

Namun demikian program penanggulangan kemiskinan tersebut belum optimal karena keterbatasan jangkauan pelaksanaan program yang belum bisa menyeluruh. Jadi meskipun realisasi kinerja program dan keuangan telah tercapai 100% tetapi belum bisa secara signifikan mencapai target.

## **2.2.2 Fokus Kesejahteraan Sosial**

### **2.2.2.1 Angka Harapan Lama Sekolah**

Angka Harapan Lama Sekolah merupakan indikator kinerja daerah dalam bidang pendidikan. Angka Harapan Lama Sekolah digunakan untuk mengetahui kondisi pembangunan bidang pendidikan di berbagai jenjang yang ditunjukkan dalam bentuk lamanya pendidikan (dalam tahun) yang diharapkan dapat dicapai oleh setiap anak.

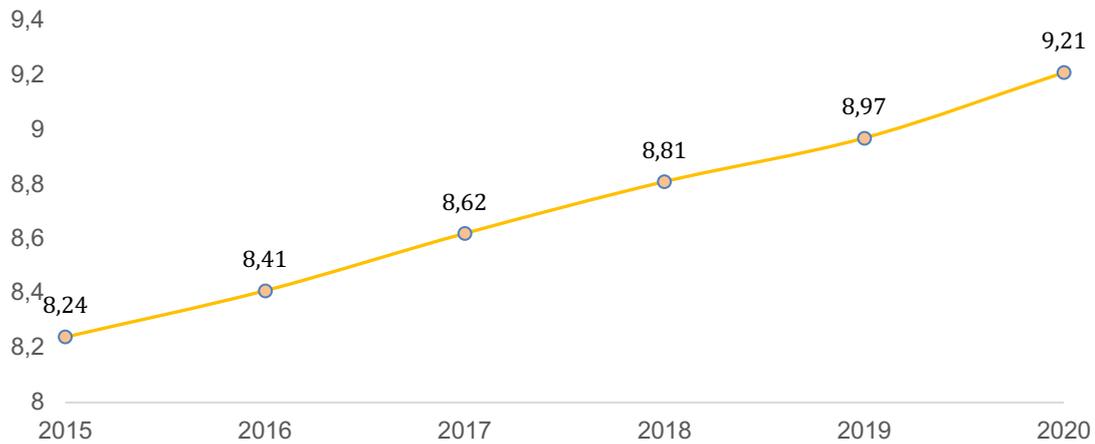


**Gambar 2.10**  
**Angka Harapan Lama Sekolah di Kabupaten Konawe Utara**

Gambar 2.9 diatas menunjukkan perkembangan Angka Harapan Lama Sekolah Kabupaten Konawe Utara dari tahun 2015 sampai dengan 2020 selalu meningkat. Angka Harapan Lama Sekolah Kabupaten Konawe Utara pada tahun 2020 sebesar 12,83 tahun meningkat dibanding tahun 2019. Hal ini berarti lamanya sekolah yang diharapkan akan dirasakan oleh anak pada umur tertentu (tujuh tahun ke atas) di masa mendatang adalah selama 12,83 tahun atau setara dengan mengenyam pendidikan sampai perguruan tinggi jenjang Diploma I. Peningkatan Angka Harapan Lama Sekolah ini tidak lepas dari upaya pemerintah untuk mengutamakan program pembangunan di bidang pendidikan.

#### **2.2.2.2 Angka Rata - Rata Lama Sekolah**

Angka rata-rata lama sekolah adalah rata-rata jumlah tahun yang dihabiskan oleh penduduk usia 15 tahun ke atas untuk menempuh semua jenis pendidikan formal yang pernah dijalani. Angka rata-rata lama sekolah di Kabupaten Konawe Utara terus mengalami peningkatan, dari 8,24 tahun pada tahun 2015 menjadi 9,21 pada tahun 2020. Hal ini menunjukkan minat penduduk usia 15 tahun ke atas untuk menempuh jenjang pendidikan yang lebih tinggi semakin meningkat, meskipun angka ini menunjukkan bahwa rata-rata penduduk di Kabupaten Konawe Utara bersekolah hanya setingkat SLTP.

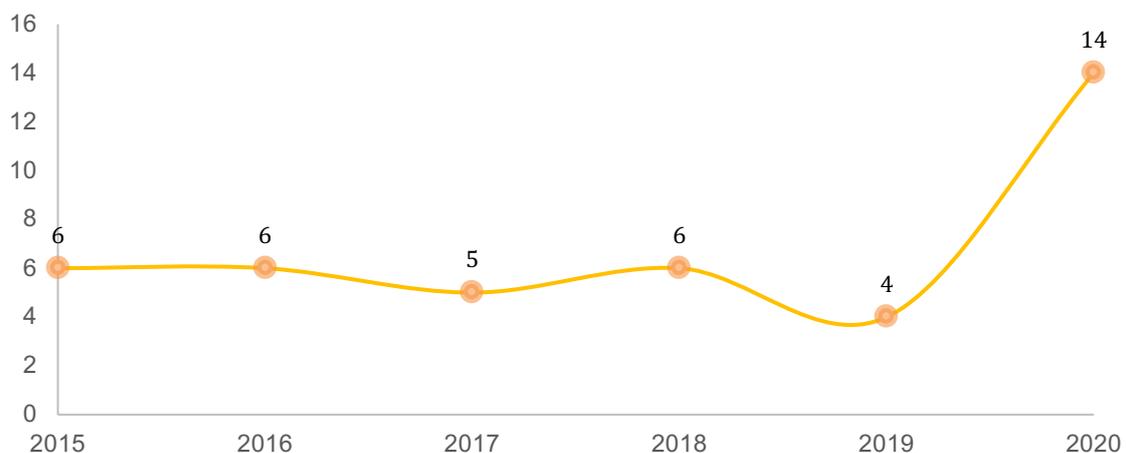


**Gambar 2.11**  
**Angka Rata - Rata Lama Sekolah di Kabupaten Konawe Utara**

Peningkatan rata-rata lama sekolah di Kabupaten Konawe Utara tidak lepas dari upaya pemerintah dalam menekan angka putus sekolah melalui kebijakan Beasiswa dan Bantuan Operasional Sekolah.

### 2.2.2.3 Angka Kematian Bayi

Angka kematian bayi dihitung dengan jumlah kematian bayi usia dibawah satu tahun dalam kurun waktu setahun per 1000 kelahiran hidup pada tahun yang sama. Pada tahun 2020 jumlah absolut kematian bayi sebanyak 12 kasus meningkat dibanding tahun 2019 sebesar 4 kasus. Capaian indikator Angka Kematian Bayi (AKB) pada tahun 2019 sebesar 0,004 terjadi penurunan dibanding tahun 2018 sebesar 0,006 per 1.000 kelahiran hidup

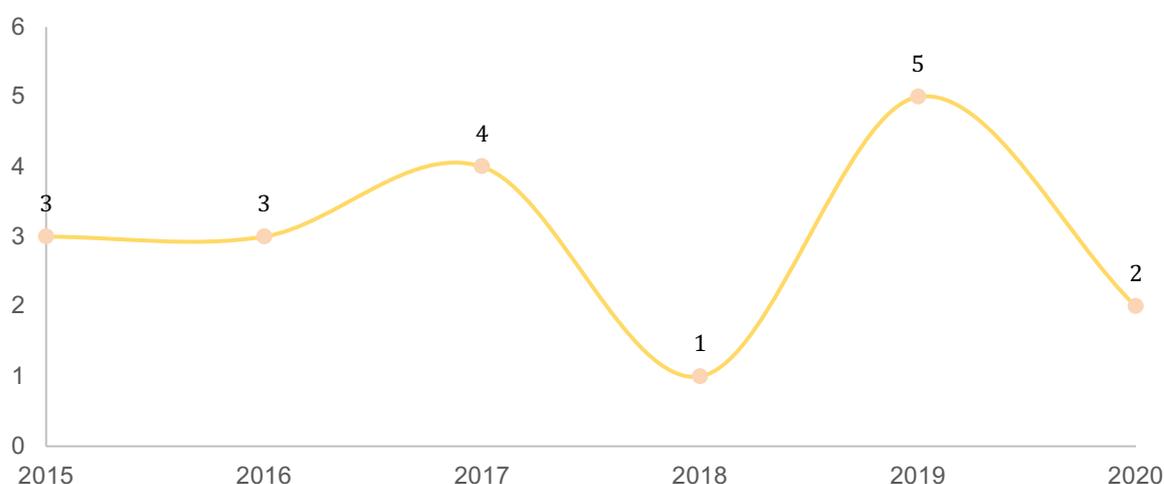


**Gambar 2.12**  
**Angka Kematian Bayi di Kabupaten Konawe Utara**

Penyebab kematian bayi pada tahun 2020 terbanyak disebabkan penyakit seperti aspirasi, diare, pendarahan, intrakranial dan penyakit lainnya. Upaya yang dapat dilakukan untuk menurunkan AKB antara lain meningkatkan peran serta masyarakat melalui keterpaduan lintas program yaitu program pencegahan penyakit melalui imunisasi pada bayi dan program perbaikan gizi masyarakat serta dengan meningkatkan kuantitas dan kualitas sumberdaya di fasilitas pelayanan kesehatan ibu dan anak.

#### 2.2.2.4 Angka Kematian Ibu

Angka Kematian Ibu (AKI) dihitung dari jumlah kematian ibu maternal (hamil, melahirkan, dan nifas), bukan karena sebab kecelakaan ataupun penyakit lainnya. Capaian angka kematian ibu pada tahun 2020 sebesar 0,002 per 100.000 kelahiran hidup (2 kasus kematian ibu) turun dibandingkan tahun 2019 sebesar 0,005 per 100.000 kelahiran hidup (5 kasus kematian ibu).



**Gambar 2.13**  
**Angka Kematian Ibu di Kabupaten Konawe Utara**

Penyebab kematian ibu antara lain adanya perdarahan dan Pre Eklampsia, serta penyebab lain-lain. Upaya mempercepat penurunan kematian ibu memerlukan keterpaduan lintas program, yaitu program perbaikan gizi masyarakat, khususnya pada ibu hamil melalui Pemberian Makanan Tambahan (PMT) pemulihan bagi ibu hamil Kurang Energi Kronis (KEK) ibu hamil, program pencegahan penyakit, program promosi kesehatan dan pemberdayaan masyarakat melalui penyiapan masyarakat dalam desa siaga, ambulan desa, dan donor darah, partisipasi masyarakat melalui pemberdayaan kader kesehatan untuk pendampingan ibu hamil resiko tinggi dan

pengenalan deteksi dini resiko ibu hamil resiko tinggi, peningkatan kualitas sarana dan prasarana kesehatan serta sumber daya manusia, dan peningkatan Puskesmas mampu Penanganan Obstetri Neonatal Emergency Dasar (PONED) serta pelaksanaan Jaminan Persalinan (Jampersal).

### 2.2.2.5 Angka Harapan Hidup

Derajat kesehatan masyarakat di Kabupaten Konawe Utara di wujudkan dalam IKU Bupati yaitu Angka Harapan Hidup (AHH). Angka Harapan Hidup Kabupaten Konawe Utara dari tahun ke tahun mengalami peningkatan.



**Gambar 2.14**  
**Angka Harapan Hidup di Kabupaten Konawe Utara**

Gambar diatas menunjukkan AHH Kabupaten Konawe Utara pada tahun 2020 yaitu 68,98 tahun. Peningkatan AHH ini dipengaruhi oleh multifaktor, antara lain faktor kesehatan yang menjadi salah satu faktor yang berperan penting di dalamnya. Secara berjenjang indikator AHH di dukung oleh Indikator Kinerja Dinas Kesehatan Kabupaten Konawe Utara yaitu Angka Kematian Ibu, Angka Kematian Bayi, Prevalensi Balita Gizi Buruk, Prevalensi HIV /AIDS, dan Angka Kesakitan (Incidence Rate/ IR) DBD.

Penyakit tidak menular (PTM) juga mempengaruhi pencapaian indikator AHH. Kelompok Penyakit Tidak Menular (PTM), seperti stroke, diabetes mellitus, kanker, hipertensi merupakan kelompok penyakit penyebab kematian terbanyak di Indonesia, dengan kecenderungan meningkat. Peningkatan PTM jelas berdampak negatif pada produktivitas masyarakat. Di sisi lain, penyakit menular masih

merupakan masalah kesehatan. Kondisi morbiditas dan mortalitas PTM makin meningkat disertai dengan masih banyaknya penyakit menular di masyarakat, akan menjadikan beban ganda dalam pelayanan kesehatan sekaligus tantangan yang harus dihadapi dalam pembangunan bidang kesehatan di Indonesia. Untuk itu penanganan penyakit menular dan tidak menular harus dilakukan secara komprehensif dan sistematis.

### 2.2.3 Fokus Seni Budaya dan Olahraga

Analisis kinerja atas seni budaya dan olahraga dilakukan terhadap indikator - indikator jumlah grup kesenian, jumlah klub olahraga dan jumlah sarana olahraga.

**Tabel 2.16.**  
**Perkembangan Seni, Budaya dan Olahraga**  
**Kabupaten Konawe Utara**

| No. | Capaian Pembangunan    | Tahun |      |      |      |      |
|-----|------------------------|-------|------|------|------|------|
|     |                        | 2016  | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
| 1.  | Jumlah grup kesenian   | 1     | 2    | 2    | 2    | 2    |
| 2.  | Jumlah gedung kesenian | 1     | 1    | 1    | 1    | 1    |
| 3.  | Jumlah klub olahraga   | 17    | 20   | 20   | 69   | 21   |
| 4.  | Jumlah sarana olahraga | 247   | 267  | 294  | 294  | 282  |

Sumber : *Dispora Konawe Utara, Tahun 2021*

Pembangunan di bidang pemuda dan olahraga di Kabupaten Konawe Utara dapat dilihat dari semakin banyak jumlah organisasi dan prestasi olahraga yang dicapai oleh Kabupaten Konawe Utara baik tingkat provinsi maupun nasional meskipun jumlah klub dan gedung olahraga yang ada masih terbatas. Pada Pekan olahraga tingkat Provinsi Sulawesi Tenggara tahun 2010 Kabupaten Konawe Utara menduduki peringkat 14, pada tahun 2014 peringkat 11, dan pada tahun 2018 peringkat 6 dari 17 kabupaten/kota. Melihat kelompok/organisasi olahraga yang semakin berkembang dan munculnya jenis olahraga baru yang dipertandingkan perlu upaya pemerintah dalam mengembangkan potensi sumberdaya manusia olahraga yaitu pelatih, wasit, pembina, klub olahraga dan atlet. Selain itu juga perlu melengkapi sarana dan prasarana olahraga yang dapat dimanfaatkan untuk latihan maupun pertandingan

## 2.3 ASPEK LAYANAN UMUM

### 2.3.1. Urusan Pemerintahan Wajib yang Berkaitan dengan Pelayanan Dasar

#### 2.3.1.1 Pendidikan

##### 1) Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)

Pendidikan anak usia dini adalah suatu upaya pembinaan yang ditujukan kepada anak sejak lahir sampai dengan usia enam tahun yang dilakukan melalui pemberian rangsangan pendidikan untuk membantu pertumbuhan dan perkembangan jasmani dan rohani agar anak memiliki kesiapan dalam memasuki pendidikan lebih lanjut. Pendidikan anak usia dini diselenggarakan sebelum jenjang pendidikan dasar, melalui jalur pendidikan formal, non formal, dan/atau informal. Pendidikan anak usia dini jalur pendidikan formal meliputi TK dan RA, sedangkan jalur pendidikan non formal meliputi Kelompok Bermain (KB), TPA, dan satuan PAUD sejenis.

**Tabel 2.17.**  
**Kondisi PAUD di Kabupaten Konawe Utara**

| No. | Nama Lembaga | Jumlah |        | Jumlah Peserta Didik | Jumlah Guru |
|-----|--------------|--------|--------|----------------------|-------------|
|     |              | Negeri | Swasta |                      |             |
| 1.  | TK           | 12     | 76     | 3.099                | 245         |
| 2.  | KB           | -      | -      | -                    | -           |
| 3.  | TPA          | -      | -      | -                    | -           |

Sumber : Dinas P & K Kab. Konawe Utara, Tahun 2021

Tabel 2.17 menunjukkan bahwa Lembaga PAUD yang dikelola swasta di Kabupaten Konawe Utara cukup banyak sehingga dapat membantu dalam peningkatan Pendidikan PAUD di Kabupaten Konawe Utara. Pada tahun 2020 pemerintah Kabupaten Konawe Utara telah memberikan insentif pada 245 pendidik PAUD non formal untuk meningkatkan kesejahteraan tenaga pendidik.

##### 2) Wajib Belajar Pendidikan Dasar

Wajib belajar sembilan tahun yang merupakan kewenangan pemerintah Kabupaten adalah pendidikan dasar jenjang SD dan SMP.

### a. Kondisi Pendidikan Dasar

Gambaran kondisi yang mendukung keberhasilan wajib belajar sembilan tahun disajikan pada Tabel 2.18 yang menunjukkan bahwa lembaga pendidikan dan tenaga pendidikan di Kabupaten Konawe Utara dalam rangka penuntasan wajib belajar sembilan tahun secara kuantitas telah cukup memadai. Jumlah guru SD yang telah bersertifikat pendidik profesional adalah 269 orang atau 30,64% dari total guru (PNS, guru tetap yayasan, dan GTT SD). Sementara itu, guru SMP yang telah bersertifikat pendidik profesional sejumlah 138 orang atau 30,20% dari total guru PNS, GTY, dan GTT. Angka tersebut menunjukkan bahwa diperlukan peningkatan sertifikasi guru guna mewujudkan profesionalitas kinerja pendidik di Kabupaten Konawe Utara. Selanjutnya disaat bersamaan diperlukan pula perhatian terhadap peningkatan kesejahteraan bagi guru GTT dan PTT.

**Tabel 2.18.**  
**Kondisi Pendidikan Dasar di Kabupaten Konawe Utara**  
**Tahun 2020**

| Lembaga Pendidikan | Sekolah    |          | Jumlah Siswa  | Rasio Guru/Murid | Guru         |             |       | Rasio Guru/Sekolah |
|--------------------|------------|----------|---------------|------------------|--------------|-------------|-------|--------------------|
|                    | Negeri     | Swasta   |               |                  | Jumlah       | Sertifikasi | %     |                    |
| 1. SD              | 104        | -        | 8.239         | 10,66            | 878          | 269         | 30,64 | 8,44               |
| 2. MI              | -          | -        | -             | -                | -            | -           | -     | -                  |
| 3. SMP             | 35         | 1        | 3.730         | 12,25            | 457          | 138         | 30,20 | 12,69              |
| 4. MTs             | 4          | -        | 521           | 11,71            | 61           | -           | -     | -                  |
| 5. SMA             | 11         | -        | 3.125         | 6,34             | 198          | -           | -     | -                  |
| 6. SMK             | 3          | 2        | 327           | 14,68            | 48           | -           | -     | -                  |
| 7. MA              | -          | 2        | 229           | 12,23            | 28           | -           | -     | -                  |
| <b>Jumlah</b>      | <b>157</b> | <b>5</b> | <b>16.171</b> | <b>10,33</b>     | <b>1.670</b> | <b>407</b>  |       |                    |

Sumber : Dinas P & K Kab. Konawe Utara, Tahun 2021

### b. Tingkat Kelulusan SD dan SMP

Tingkat kelulusan jenjang SD/MI dan SMP/MTs pada lima tahun terakhir hingga tahun 2020 mencapai 100%, sesuai dengan target yang dicanangkan pada tahun 2020. Dalam kaitannya dengan angka putus sekolah, segala upaya telah dilakukan untuk meniadakan anak putus sekolah. Angka putus sekolah pada tahun 2020 untuk jenjang SD/MI sebesar 0,01% dan jenjang SMP/MTs tahun 2020 sebesar 0,02%.

### c. Biaya Operasional Pendidikan (BOP)

BOP Kabupaten Konawe Utara diberikan untuk tiap siswa SD/MI sebesar Rp.350.000,- per siswa per tahun sedangkan untuk tiap siswa SMP Negeri sebesar Rp.500.000,- per siswa per tahun dan siswa SMP Swasta diberikan Rp.450.000,- per siswa per tahun. Selain itu untuk siswa miskin SD/MI diberikan dana bantuan sebesar Rp.450.000,- per siswa per tahun dan siswa miskin SMP sebesar Rp.750.000,- per siswa per tahun.

### d. Angka Partisipasi Sekolah (APS)

Pada tabel berikut ini diuraikan Angka Partisipasi Sekolah (APS) dari tahun 2016 sampai dengan tahun 2020, dimana pada tabel tersebut digambarkan bahwa ada kecenderungan menurunnya partisipasi sekolah pada jenjang yang lebih tinggi. Peningkatan APS dapat ditunjang dengan pembangunan infrastruktur pendidikan seperti pembangunan gedung sekolah yang dilengkapi dengan laboratorium dan perpustakaan serta penambahan tenaga pengajar.

**Tabel 2.19.**  
**Perkembangan Angka Partisipasi Sekolah (APS)**  
**di Kabupaten Konawe Utara**

| No. | Jenjang Pendidikan           | 2016  | 2017  | 2018  | 2019  | 2020  |
|-----|------------------------------|-------|-------|-------|-------|-------|
| 1.  | APS Penduduk Usia 7 - 12 th  | 97,11 | 99,19 | 99,21 | 99,21 | 99,28 |
| 2.  | APS Penduduk Usia 13 - 15 th | 78,86 | 79,90 | 80,38 | 93,43 | 94,24 |
| 3.  | APS Penduduk Usia 15 - 18 th | 53,83 | 53,91 | 54,91 | 74,92 | 73,47 |

Sumber : BPS, Kab. Konawe Utara Dalam Angka, 2017 s.d 2021

### e. Angka Partisipasi Murni (APM) dan Angka Partisipasi Kasar (APK)

Angka Partisipasi Murni (APM) adalah persentase jumlah anak pada kelompok usia sekolah tertentu yang sedang bersekolah pada jenjang pendidikan yang sesuai dengan usianya terhadap jumlah seluruh anak pada kelompok usia sekolah yang bersangkutan. APM menunjukkan seberapa banyak penduduk usia sekolah yang sudah dapat memanfaatkan fasilitas pendidikan sesuai pada jenjang pendidikannya. Bila seluruh anak usia sekolah dapat bersekolah tepat waktu, maka APM akan mencapai 100 persen. Secara umum, APM akan selalu lebih rendah dari APK karena

APK memperhitungkan jumlah penduduk di luar usia sekolah pada jenjang pendidikan yang bersangkutan. Angka Partisipasi Kasar (APK) merupakan persentase jumlah penduduk yang sedang bersekolah pada suatu jenjang pendidikan (berapapun usianya) terhadap jumlah penduduk usia sekolah yang sesuai dengan jenjang pendidikan tersebut. Pada Tahun 2020, APM SD/MI Kabupaten Konawe Utara sebesar 97,70 meningkat dari tahun 2019 sebesar 97,53. Data ini menunjukkan bahwa 98 dari 100 anak usia 7-12 tahun di Kabupaten Konawe Utara bersekolah tepat waktu di jenjang SD/ sederajat.

**Tabel 2.20.**  
**Angka Partisipasi Murni (APM) dan Angka Partisipasi Kasar (APK)**  
**Kabupaten Konawe Utara Tahun 2019 - 2020.**

| No. | Jenjang Pendidikan | Angka Partisipasi Murni |       | Angka Partisipasi Kasar |        |
|-----|--------------------|-------------------------|-------|-------------------------|--------|
|     |                    | 2019                    | 2020  | 2019                    | 2020   |
| 1.  | SD/MI              | 97,53                   | 97,70 | 109,25                  | 107,97 |
| 2.  | SMP/MTs            | 76,95                   | 77,64 | 85,34                   | 87,10  |
| 3.  | SMA/SMK/MA         | 62,92                   | 63,41 | 86,81                   | 87,74  |

Sumber : BPS, Kab. Konawe Utara Dalam Angka, 2017 s.d 2021

#### f. Akreditasi sekolah

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Sisdiknas) secara eksplisit disebutkan pada pasal 60 Ayat 2, bahwa Akreditasi terhadap program dan satuan pendidikan dilakukan oleh Pemerintah dan/atau lembaga mandiri yang berwenang sebagai bentuk akuntabilitas publik. Sebagai tindak lanjut amanah konstitusi tersebut pemerintah menetapkan kebijakan mutu yang tertuang dalam PP Nomor 13 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas PP Nomor 19 Tahun 2005 Standar Nasional Pendidikan (SNP) yang dijadikan dasar penetapan variabel, indikator, dan butir penilaian dalam instrumen penilaian akreditasi.

Pada Tahun 2020, jumlah Sekolah Dasar yang terakreditasi A sebanyak 1 sekolah dan terakreditasi B sebanyak 17 Sekolah. Untuk Sekolah Menengah Pertama, jumlah sekolah terakreditasi A sebanyak 4 sekolah dan terakreditasi B sebanyak 11

Sekolah. Persentase sekolah terakreditasi minimal B dapat dilihat pada Tabel 2.21 berikut.

**Tabel 2.21.**  
**Sekolah Terakreditasi**  
**Kabupaten Konawe Utara**

| No. | Jenjang Pendidikan | Akreditasi |    |    |                     | Total | Persentase Terakreditasi Minimal B |
|-----|--------------------|------------|----|----|---------------------|-------|------------------------------------|
|     |                    | A          | B  | C  | Belum Terakreditasi |       |                                    |
| 1.  | SD/MI              | 1          | 17 | 32 | 54                  | 104   | 17,31                              |
| 2.  | SMP/MTs            | 4          | 11 | 12 | 9                   | 36    | 41,67                              |

Sumber : BPS, Kab. Konawe Utara Dalam Angka, 2017 s.d 2021

### 3) Penerapan Standar Pelayanan Minimal (SPM) Bidang Pendidikan

Standar Pelayanan Minimal atau disingkat dengan SPM merupakan ketentuan mengenai Jenis dan Mutu Pelayanan Dasar yang merupakan Urusan Pemerintahan Wajib yang berhak diperoleh setiap Warga Negara secara minimal. Pelaksanaan SPM bidang Pendidikan di Kabupaten Konawe Utara telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang sudah ditetapkan dalam mengukur capaian SPM.

**Tabel 2.22.**  
**Pelaksanaan Standar Pelayanan Minimal Bidang Pendidikan**  
**Kabupaten Konawe Utara**

| NO | Kelompok Usia | Jumlah Anak | Sedang Bersekolah |                 |                   |            |        | ATS | Capaian SPM (%) |
|----|---------------|-------------|-------------------|-----------------|-------------------|------------|--------|-----|-----------------|
|    |               |             | TK/RA/Sederajat   | SD/MI/Sederajat | SMP/MTs/Sederajat | Kesetaraan | Jumlah |     |                 |
| 1  | 5-6 tahun     | 2.898       | 1.831             | 1               | -                 | 1          | 1.833  | -   | 63,25%          |
| 2  | 7-12 tahun    | 8.836       | 51                | 7.576           | 32                | 6          | 7.665  | 21  | 86,75%          |
| 3  | 13-15 Tahun   | 4.927       | -                 | 669             | 3.072             | 29         | 3.770  | 25  | 76,52%          |

Dari tabel 2.22, dapat dilihat pelaksanaan capaian SPM bidang Pendidikan sudah dilaksanakan dengan baik pada 2 kelompok usia yaitu usia 7-12 tahun dan 13-15 tahun sedangkan pada Kelompok usia 5-6 tahun pelaksanaan masih belum maksimal, sehingga Pemerintah Kabupaten Konawe Utara melaksanakan berbagai

upaya dalam meningkatkan pelaksanaan Standar Pelayanan Minimal bidang Pendidikan.

### 2.3.1.2 Kesehatan

#### 1) Pelayanan Kesehatan

##### a. Rasio Pos Pelayanan Terpadu (Posyandu) per Satuan Balita

Posyandu merupakan wadah peran serta masyarakat untuk memberikan dan memperoleh pelayanan kesehatan dasar, maka strategi operasional pemeliharaan dan perawatan kesejahteraan ibu dan anak secara dini dapat dilakukan di setiap posyandu. Idealnya satu Posyandu melayani 100 Balita. Keberadaan posyandu berperan untuk mendukung penurunan Angka Kematian Bayi (AKB), Angka Kematian Ibu (ibu Hamil, melahirkan dan nifas), pembudayaan NKKBS, peningkatan peran serta dan kemampuan masyarakat untuk mengembangkan kegiatan kesehatan dan KB, dan sebagai wahana gerakan reproduksi keluarga sejahtera.

**Tabel 2.23.**  
**Rasio Posyandu per 1000 Balita**  
**Di Kabupaten Konawe Utara**

| No. | Uraian          | Tahun  |       |       |       |       |
|-----|-----------------|--------|-------|-------|-------|-------|
|     |                 | 2015   | 2016  | 2017  | 2018  | 2019  |
| 1.  | Jumlah Posyandu | 147    | 164   | 170   | 155   | 158   |
| 2.  | Jumlah Balita   | 1.355  | 7.368 | 7.517 | 7.575 | 7.482 |
| 3.  | Rasio           | 108,49 | 22,26 | 22,62 | 20,46 | 21,12 |

Sumber : Dinas Kesehatan Kabupaten Konawe Utara, 2021

Dari Tabel 2.23 dapat diketahui bahwa pada tahun 2020 rasio Posyandu per 1000 Balita sebesar 21,12 berarti dalam 1000 Balita terdapat 21 Posyandu.

##### b. Ketersediaan Fasilitas Kesehatan

Keberhasilan program pengembangan fasilitas pelayanan kesehatan dapat diketahui dengan semakin meningkatnya kuantitas dan kualitas fasilitas pelayanan kesehatan oleh pemerintah dan swasta, dengan demikian diharapkan lebih banyak kemudahan akses masyarakat untuk mendapat pelayanan kesehatan.

Setiap 240.000 penduduk harus tersedia satu unit RS sebagaimana diatur dalam Kepmen Permukiman dan Prasarana Wilayah nomor 534/KPTS/M/2001. Jumlah penduduk

Kabupaten Konawe Utara Tahun 2020 sebanyak 67.871 jiwa, hal ini menunjukkan ketersediaan rumah sakit di Kabupaten Konawe Utara telah mencukupi.

**Tabel 2.24.**  
**Jumlah Fasilitas Pelayanan Kesehatan**  
**di Kabupaten Konawe Utara**

| No. | Uraian             | Tahun |      |      |      |      |
|-----|--------------------|-------|------|------|------|------|
|     |                    | 2016  | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
| 1.  | Rumah Sakit        | 1     | 1    | 1    | 1    | 1    |
| 2.  | Puskesmas          | 15    | 22   | 22   | 22   | 22   |
| 3.  | Puskesmas Pembantu | 22    | 10   | 10   | 40   | 36   |
| 4.  | Poskedes           | 10    | 5    | 5    | 5    | 5    |
| 5.  | Polindes           | 7     | 7    | 7    | 7    | 7    |
| 6.  | Posyandu           | 147   | 164  | 170  | 155  | 158  |
| 7.  | Praktek Dokter     | 1     | 1    | 1    | 1    | 1    |
| 8.  | Praktek Bidan      | 1     | 1    | 1    | 1    | 1    |
| 9.  | Apotek             | 3     | 3    | 3    | 3    | 7    |

Sumber : Dinas Kesehatan Kabupaten Konawe Utara, 2021

Akreditasi puskesmas di Kabupaten Konawe Utara mulai dijalankan tahun 2017. Dari 22 puskesmas, saat ini sudah 16 puskesmas telah terakreditasi, 4 puskesmas diantaranya yaitu puskesmas Tetewatu, Lasolo, Matandahi, Motui telah berstatus akreditasi utama.

**Tabel 2.25.**  
**Penilaian Akreditasi Puskesmas**  
**di Kabupaten Konawe Utara**

| No. | Nama Puskesmas     | Jenis Puskesmas | 2017 | 2018 | 2019 | Status |
|-----|--------------------|-----------------|------|------|------|--------|
| 1.  | Andeo              | Non Rawat Inap  | √    |      |      | Madya  |
| 2.  | Andowia            | Non Rawat Inap  | -    | -    | -    |        |
| 3.  | Asera              | Non Rawat Inap  |      | √    |      | Madya  |
| 4.  | Lamparinga         | Non Rawat Inap  |      |      | √    | Madya  |
| 5.  | Landawe            | Non Rawat Inap  |      | √    |      | Madya  |
| 6.  | Langgikima         | Non Rawat Inap  |      | √    |      | Madya  |
| 7.  | Langgikima Pesisir | Non Rawat Inap  |      |      |      |        |
| 8.  | Laronanga Pantai   | Non Rawat Inap  |      |      |      |        |
| 9.  | Lasolo             | Rawat Inap      | √    |      |      | Utama  |
| 10. | Lasolo Kepulauan   | Non Rawat Inap  |      |      |      |        |
| 11. | Lembo              | Non Rawat Inap  |      | √    |      |        |

| No. | Nama Puskesmas | Jenis Puskesmas | 2017 | 2018 | 2019 | Status |
|-----|----------------|-----------------|------|------|------|--------|
| 12. | Matandahi      | Rawat Inap      | √    |      |      | Utama  |
| 13. | Molawe         | Non Rawat Inap  |      | √    |      |        |
| 14. | Motui          | Rawat Inap      |      | √    |      | Utama  |
| 15. | Oheo           | Non Rawat Inap  |      |      |      |        |
| 16. | Paka Indah     | Non Rawat Inap  |      |      | √    | Madya  |
| 17. | Sawa           | Non Rawat Inap  |      | √    |      | Madya  |
| 18. | Tapungaya      | Non Rawat Inap  |      | √    |      | Madya  |
| 19. | Tetewatu       | Non Rawat Inap  |      |      | √    | Utama  |
| 20. | Wanggudu Raya  | Non Rawat Inap  |      |      |      |        |
| 21. | Wawolesea      | Non Rawat Inap  |      | √    |      | Madya  |
| 22. | Hialu          | Non Rawat Inap  |      |      | √    | Madya  |

Sumber : Dinas Kesehatan Kabupaten Konawe Utara, 2021

Akreditasi puskesmas bertujuan meningkatkan mutu pelayanan kesehatan masyarakat, sarana dan prasarana puskesmas sampai dengan kinerja para tim medis sesuai standar prosedur. Manfaatnya dirasakan langsung oleh masyarakat yang mendapat pelayanan di tempat tersebut. Pemerintah daerah berkomitmen untuk meningkatkan status akreditasi seluruh puskesmas di Kabupaten Konawe Utara menjadi akreditasi paripurna. Untuk itu peningkatan fasilitas sarana dan parasana, serta tenaga kesehatan akan terus ditingkatkan.

### c. Rasio Puskesmas, Pustu, Poskesdes, Polindes

Angka rasio jumlah puskesmas, poliklinik dan puskesmas pembantu (pustu) per jumlah penduduk mengalami perubahan seiring dengan jumlah penduduk yang bertambah dari tahun 2016 - 2020. Angkanya berkisar antara 0,07 (tahun 2016) sampai 0,10 (tahun 2020).

**Tabel 2.26.**  
**Rasio Jumlah Puskesmas, Pustu, Poskesdes, Polindes**  
**di Kabupaten Konawe Utara**

| No. | Uraian                                       | Tahun  |        |        |        |        |
|-----|--|--------|--------|--------|--------|--------|
|     |  | 2016   | 2017   | 2018   | 2019   | 2020   |
| 1.  | Jumlah Puskesmas, Pustu, Poskesdes, Polindes | 44     | 45     | 45     | 45     | 70     |
| 2.  | Jumlah Penduduk                              | 59.673 | 60.884 | 62.017 | 63.814 | 67.871 |

| No. | Uraian | Tahun |      |      |      |      |
|-----|--------|-------|------|------|------|------|
|     |        | 2016  | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
| 3.  | Rasio  | 0,07  | 0,04 | 0,07 | 0,07 | 0,10 |

Sumber : Dinas Kesehatan Kab. Konawe Utara Dalam, 2021

#### d. Tenaga Kesehatan

Ketersediaan tenaga kesehatan yang disertai dengan peningkatan ketersediaan fasilitas kesehatan tentunya akan meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat.

**Tabel 2.27.**  
**Jumlah Tenaga Kesehatan**  
**di Kabupaten Konawe Utara**

| No. | Uraian           | Tahun |      |      |      |      |
|-----|------------------|-------|------|------|------|------|
|     |                  | 2016  | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
| 1.  | Dokter Spesialis | 6     | 1    | -    | -    | -    |
| 2.  | Dokter Umum      | 28    | 11   | 33   | 14   | 9    |
| 3.  | Dokter Gigi      | 4     | 7    | 5    | 5    | 5    |
| 4.  | Bidan            | 152   | 187  | 192  | 192  | 143  |
| 5.  | Perawat          | 236   | 76   | 69   | 69   | 68   |
| 6.  | Apoteker         | 27    | 2    | 18   | 18   | 15   |

Sumber : Dinas Kesehatan Kab. Konawe Utara, 2021

Secara khusus, ketersediaan tenaga kesehatan erat kaitannya dengan rasio dokter per jumlah penduduk. Rasio dokter per jumlah penduduk menunjukkan tingkat pelayanan yang dapat diberikan oleh dokter dibandingkan jumlah penduduk yang ada. Menurut standar sistem pelayanan kesehatan terpadu, idealnya satu dokter melayani 2.500 penduduk.

**Tabel 2.28.**  
**Rasio Jumlah Dokter Per Jumlah 1000 Penduduk**  
**di Kabupaten Konawe Utara**

| No. | Uraian  | Tahun  |        |        |        |        |
|-----|---|--------|--------|--------|--------|--------|
|     |   | 2016   | 2017   | 2018   | 2019   | 2020   |
| 1.  | Jumlah Dokter Umum, Dokter Spesialis, Dokter Gigi | 38     | 19     | 38     | 19     | 14     |
| 2.  | Jumlah Penduduk                                   | 58.401 | 60.884 | 62.012 | 63.814 | 67.871 |
| 3.  | Rasio   | 0,6    | 0,3    | 0,6    | 0,2    | 0,2    |

Sumber : Dinas Kesehatan Kab. Konawe Utara, 2021

Pada Tahun 2020 rasio dokter per jumlah penduduk mencapai 0,20 per 1000 penduduk atau satu dokter melayani 2.000 penduduk. Hal ini menunjukkan masih kurangnya dokter di Kabupaten Konawe Utara. Upaya pemenuhan kebutuhan dokter dengan cara melakukan kontrak tenaga dokter.

**Tabel 2.29.**  
**Rasio Tenaga Medis Per Jumlah 1000 Penduduk**  
**di Kabupaten Konawe Utara**

| No. | Uraian   | Tahun  |        |        |        |        |
|-----|--|--------|--------|--------|--------|--------|
|     |  | 2016   | 2017   | 2018   | 2019   | 2020   |
| 1.  | Jumlah Tenaga Medis (Bidan, Perawat, dan Apoteker) | 415    | 284    | 279    | 279    | 226    |
| 2.  | Jumlah Penduduk                                    | 58.401 | 60.884 | 62.012 | 63.814 | 67.871 |
| 3.  | Rasio  | 0,7    | 0,4    | 0,4    | 0,4    | 0,3    |

Sumber : Dinas Kesehatan Kab. Konawe Utara, 2021

#### e. Jaminan Kesehatan

Pembiayaan pelayanan kesehatan penduduk Konawe Utara melalui kepesertaan JKN pada tahun 2020 telah terdaftar sebesar 67.627 jiwa atau 99,64%, Data kepesertaan JKN Kabupaten Konawe Utara disajikan pada Tabel 2.30.

**Tabel 2.30.**  
**Data Kepesertaan Jaminan Kesehatan**  
**di Kabupaten Konawe Utara**

| No.                                      | Jenis Kepesertaan Jaminan Kesehatan Nasional | 2017           |       | 2018           |       | 2019           |       | 2020           |       |
|--|--|----------------|-------|----------------|-------|----------------|-------|----------------|-------|
|  |  | Peserta (jiwa) | %     |
| 1.                                       | PBI APBN                                     | 27.086         | 41,75 | 27.084         | 41,66 | 27.086         | 42,45 | 27.084         | 41,66 |
| 2.                                       | PBI APBD Kab.                                | 26.827         | 41,35 | 25.675         | 39,49 | 24.707         | 38,72 | 25.675         | 39,49 |
| 3.                                       | PBI APBD Prov.                               | 2.189          | 3,37  | 2.110          | 3,25  | 2.189          | 3,43  | 2.110          | 3,25  |
| 4.                                       | Pekerja Penerima Upah (PPU)                  | 6.677          | 10,29 | 7.564          | 11,63 | 6.677          | 10,46 | 7.564          | 11,63 |
| 5.                                       | Peserta Bukan Penerima Upah (PBPU)           | 1.239          | 1,91  | 1.672          | 2,57  | 1.239          | 1,94  | 1.672          | 2,57  |
| 6.                                       | Bukan Pekerja                                | 193            | 0,3   | 348            | 0,54  | 193            | 0,30  | 348            | 0,54  |
| Jumlah Penduduk Yang Terdaftar JKN       |  | 64.211         | 98,96 | 64.453         | 99,13 | 62.091         | 97,30 | 67.627         | 99,64 |
| Jumlah Penduduk Yang Belum Terdaftar JKN |  | 673            | 1,04  | 564            | 0,87  | 1.723          | 2,70  | 244            | 0,36  |
| Total Penduduk Kab. Konawe Utara         |  | 64.884         | 100   | 65.017         | 100   | 63.814         | 100   | 87.871         | 100   |

Sumber : BPJS Kesehatan Kab. Konawe Utara, 2020, diolah

Jumlah Penduduk yang belum terdaftar kepesertaan JKN sebesar 244 jiwa atau 0,36%, hal ini dapat tercapai karena pemerintah Kabupaten Konawe Utara adalah telah berkoordinasi secara intensif dengan stakeholder dan pemutakhiran data setiap bulan. Beberapa penduduk yang belum terdaftar JKN merupakan tugas pemerintah untuk mengupayakan agar semua penduduk terdaftar dalam JKN.

## 2) Balita Gizi Buruk

Status gizi Balita dapat diketahui dari berat badan menurut umur, yaitu membandingkan antara berat badan menurut umur ataupun panjang badannya dengan rujukan (standar) yang telah ditetapkan.

**Tabel 2.31.**  
**Jumlah Balita Gizi Buruk**  
**di Kabupaten Konawe Utara**

| No. | Uraian                       | Tahun |       |       |       |       |
|-----|------------------------------|-------|-------|-------|-------|-------|
|     |                              | 2016  | 2017  | 2018  | 2019  | 2020  |
| 1.  | Jumlah Balita Yang Diukur    | 949   | 5.158 | 3.725 | 3.847 | 7.482 |
| 2.  | Jumlah Balita Gizi Buruk     | 1     | 10    | 9     | 8     | 0     |
| 3.  | Prevalensi Balita Gizi Buruk | 100   | 100   | 100   | 100   | 100   |

Sumber : Dinas Kesehatan Kab. Konawe Utara, 2021

**Tabel 2.32.**  
**Jumlah Balita Pendek (stunting)**  
**di Kabupaten Konawe Utara**

| No. | Uraian                                 | Tahun |       |       |
|-----|--|-------|-------|-------|
|     |  | 2018  | 2019  | 2020  |
| 1.  | Jumlah Balita Yang Diukur Tinggi Badan | 5.462 | 5.195 | 5.058 |
| 2.  | Jumlah Balita Pendek (TB/U)            | 1.442 | 312   | 585   |
| 3.  | Prevalensi Stunting                    | 26,40 | 6,01  | 11,6  |

Sumber : Dinas Kesehatan Kab. Konawe Utara, 2021

Gizi buruk dapat mengarah pada stunting. Stunting adalah kondisi tubuh anak mengalami gangguan pertumbuhan sehingga menyebabkan ukuran tubuh yang lebih pendek daripada teman-teman seusianya. Kondisi stunting tidak bisa dikembalikan seperti semula. Kondisi stunting dapat dicegah, dengan memenuhi kebutuhan nutrisi sejak hamil hingga anak berusia dua tahun (periode 1000 hari pertama kehidupan).

Prevalensi stunting di Kabupaten Konawe Utara cenderung menurun, dari sebesar 26,40 pada Tahun 2018 menjadi 11,6 pada Tahun 2020. Kondisi ini masih jauh di bawah angka rata-rata prevalensi stunting nasional sebesar 27% dan akan terus terus ditekan dan dicegah secara optimal. Pemerintah Kabupaten Konawe Utara telah mendorong percepatan penurunan dan pencegahan stunting yang tertuang dalam Peraturan Bupati Konawe Utara No.17 Tahun 2020 Tentang Pencegahan Stunting Di Kabupaten Konawe Utara. Hal ini sejalan dengan prioritas nasional dibidang penanggulangan dan pencegahan stunting di Indonesia sesuai dengan Keputusan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 10/M.PPN/HK/02/2021 tentang Penetapan Perluasan Kabupaten/Kota Lokasi Fokus Intervensi Penurunan Stunting Terintegrasi Tahun 2022.

### 3) Pencegahan dan Pengendalian Penyakit

Data kesakitan terdiri dari dua sumber, yaitu bersumber dari masyarakat (community based data) dan bersumber dari sarana pelayanan kesehatan (facility based data) melalui sistem pencatatan dan pelaporan. Data kesakitan merupakan salah satu indikator yang digunakan untuk mengetahui derajat kesehatan masyarakat.

Penyakit tidak menular (PTM) juga mempengaruhi pencapaian indikator Angka Harapan Hidup (AHH). Kelompok Penyakit Tidak Menular (PTM), seperti stroke, Diabetes Mellitus, kanker, hipertensi merupakan kelompok penyakit penyebab kematian terbanyak di Indonesia, dengan kecenderungan meningkat. Peningkatan PTM jelas berdampak negatif pada produktivitas masyarakat. Di sisi lain, penyakit menular masih merupakan masalah kesehatan terutama wabah Covid-19. Kondisi morbiditas dan mortalitas PTM makin meningkat disertai dengan masih banyaknya penyakit menular di masyarakat, akan menjadikan beban ganda dalam pelayanan kesehatan sekaligus tantangan yang harus dihadapi dalam pembangunan bidang kesehatan di Indonesia. Untuk itu penanganan penyakit menular dan tidak menular harus dilakukan secara komprehensif dan sistematis.

**Tabel 2.33.**  
**Angka Kesakitan**  
**di Kabupaten Konawe Utara**

| No.           | Uraian                | Kasus        |              |            |            |            |
|---------------|-----------------------|--------------|--------------|------------|------------|------------|
|               |                       | 2016         | 2017         | 2018       | 2019       | 2020       |
| 1.            | Malaria               | 372          | 469          | 381        | 62         | -          |
| 2.            | Tuberkulosis (TB) BTA | 119          | 120          | 126        | 107        | 77         |
| 3.            | Pneumonia Balita      | 2            | 3            | 2          | 2          | -          |
| 4.            | Kusta                 | 7            | 7            | 6          | 3          | -          |
| 5.            | Tetanus               | 81           | 52           | 74         | 62         | 61         |
| 6.            | Campak                | 125          | 96           | 101        | 107        | 105        |
| 7.            | Diare                 | 82           | 65           | 71         | 64         | 58         |
| 8.            | DBD                   | 31           | 32           | 55         | 26         | -          |
| 9.            | Hipertensi            | 74           | 63           | 51         | 42         | 39         |
| 10.           | ISPA                  | 194          | 172          | 120        | 191        | 154        |
| <b>Jumlah</b> |                       | <b>1.087</b> | <b>1.079</b> | <b>987</b> | <b>666</b> | <b>494</b> |

Sumber : Dinas Kesehatan Kab. Konawe Utara, 2021

#### 4) Promosi Kesehatan

Pendataan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS) dilakukan melalui pemberdayaan masyarakat untuk berperilaku hidup bersih dan sehat di tatanan rumah tangga, institusi tempat kerja, institusi pendidikan, fasilitas pelayanan kesehatan, dan tempat-tempat umum. Data capaian PHBS tahun 2020 di Kabupaten Konawe Utara pada semua tatanan disajikan pada Tabel 2.34.

**Tabel 2.34.**  
**Persentase PHBS**  
**di Kabupaten Konawe Utara**

| No. | Uraian                        | Persentase (%) |       |       |       |       |
|-----|-------------------------------|----------------|-------|-------|-------|-------|
|     |                               | 2016           | 2017  | 2018  | 2019  | 2020  |
| 1.  | Rumah Tangga                  | 41,21          | 47,14 | 50,27 | 53,00 | 57,53 |
| 2.  | Fasilitas Pelayanan Kesehatan | 82,72          | 83,82 | 88,31 | 91,67 | 94,46 |
| 3.  | Institusi Pendidikan          | 54,77          | 58,42 | 59,89 | 61,00 | 63,56 |
| 4.  | Tempat Kerja                  | 39,15          | 40,42 | 41,21 | 42,72 | 43,75 |
| 5.  | Tempat - Tempat Umum          | 51,52          | 52,42 | 54,65 | 55,18 | 56,74 |

Sumber : Dinas Kesehatan Kab. Konawe Utara, 2021

#### 5) Penerapan Standar Pelayanan Minimal (SPM) Bidang Kesehatan

Standar Pelayanan Minimal atau disingkat dengan SPM merupakan ketentuan mengenai Jenis dan Mutu Pelayanan Dasar yang merupakan Urusan Pemerintahan Wajib yang berhak diperoleh setiap Warga Negara secara minimal. Pelayanan dasar dimaksud adalah pelayanan publik untuk memenuhi kebutuhan dasar warga negara. Pemberlakuan Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal yang ditindaklanjuti dengan terbitnya Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 100 Tahun 2018 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal yang mengatur tahapan yang harus dilakukan pemerintah daerah dalam rangka mencapai target layanan yang ditetapkan 100 persen.

Penerapan SPM bidang kesehatan di Kabupaten Konawe Utara telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan, seperti disajikan pada tabel 2.35 dengan total 12 indikator SPM yang dilaksanakan terdapat 2 indikator yang masih rendah yaitu Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus dan Pelayanan Kesehatan Orang Dengan Gangguan Jiwa Berat.

**Tabel 2.35.**  
**Pelaksanaan SPM Kesehatan Kabupaten Konawe Utara**

| NO  | Uraian   | Keterangan  | Capaian 2020 | Target 2020 | Capaian SPM |
|-----|--|---|--------------|-------------|-------------|
| 1.  | Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil                          | Jumlah ibu hamil yang mendapatkan pelayanan antenatal sesuai standar  | 1714         | 1752        | 97,83       |
| 2.  | Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin                       | Jumlah ibu bersalin yang mendapatkan pelayanan persalinan sesuai standar di fasilitas pelayanan kesehatan   | 1416         | 1672        | 84,69       |
| 3.  | Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir                    | Jumlah bayi baru lahir usia 0-28 hari yang mendapatkan pelayanan kesehatan bayi baru lahir sesuai dengan standar  | 1394         | 1424        | 97,89       |
| 4.  | Pelayanan Kesehatan Balita                             | Jumlah Balita usia 12-23 bulan yang mendapat Pelayanan Kesehatan sesuai Standar + Jumlah Balita usia 24-35 bulan mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar + Balita usia 36-59 bulan | 2170         | 2180        | 99,54       |
| 5.  | Pelayanan Kesehatan Pada Usia Pendidikan Dasar         | Jumlah anak usia pendidikan dasar yang mendapat pelayanan kesehatan sesuai standar  | 1615         | 1651        | 97,82       |
| 6.  | Pelayanan Kesehatan Pada Usia Produktif                | Jumlah orang usia 15–59 tahun di kab/kota yang mendapat pelayanan skrining kesehatan sesuai standar   | 41508        | 43315       | 95,83       |
| 7.  | Pelayanan Kesehatan Pada Usia Lanjut                   | Jumlah warga negara berusia 60 tahun atau lebih yang mendapat skrining kesehatan sesuai standar minimal 1 kali  | 3521         | 3521        | 98,44       |
| 8.  | Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi               | Jumlah penderita hipertensi usia $\geq 15$ tahun di dalam wilayah kerjanya yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar  | 957          | 1297        | 73,79       |
| 9.  | Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus         | Jumlah penderita diabetes mellitus usia $\geq 15$ tahun di dalam wilayah kerjanya yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar   | 198          | 361         | 54,85       |
| 10. | Pelayanan Kesehatan Orang Dengan Gangguan Jiwa Berat   | Jumlah ODGJ berat yang mendapatkan pelayanan kesehatan jiwa sesuai standar  | 3            | 28          | 28,57       |
| 11. | Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberculosis         | Jumlah orang terduga TBC yang dilakukan pemeriksaan penunjang   | 97           | 127         | 76,38       |
| 12. | Pelayanan Kesehatan orang Dengan Risiko Terinfeksi HIV | Jumlah orang dengan risiko terinfeksi HIV yang mendapatkan pelayanan sesuai standar   | 561          | 573         | 97,91       |

Sumber : Dinas Kesehatan Kabupaten Konawe Utara Tahun 2020

## **6) Upaya Promotif dan Preventif dalam Menghadapi Pandemi Covid-19**

Peran tenaga kesehatan sangat penting dalam penanganan Covid-19 pada setiap level intervensi. Utamanya pada level masyarakat untuk melakukan komunikasi risiko dan edukasi masyarakat terkait protokol kesehatan untuk melawan Covid-19. Kemudian untuk melakukan contact tracing & tracking (penyelidikan kasus dan investigasi wabah), serta fasilitasi dan pemberdayaan masyarakat.

Upaya pemerintah daerah dalam menghadapi Pandemi Covid-19 sejak tahun 2020 sampai dengan saat ini tidak terlepas dari empat pilar Kesehatan yakni : Preventif, Promotif, Kuratif dan rehabilitatif. Pelaksanaan promotif dan preventif dalam pencegahan Covid-19 di Kabupaten Konawe Utara terus diupayakan di berbagai lini termasuk di desa-desa agar masyarakat dapat berperilaku bersih dan sehat di era pandemi ini. Saat ini masyarakat juga mulai menyadari akan pentingnya berperilaku hidup bersih dan sehat untuk mencegah penularan Covid 19.

Pilar preventif dan promotif dalam upaya pencegahan dan pengendalian serta kesiapsiagaan Pandemi Covid-19 di Kabupaten telah memberikan hasil yang cukup optimal, hal ini di dukung pula dengan diterbitkannya berbagai surat edaran, peraturan bupati, bahkan peraturan daerah, diantaranya yakni : Peraturan Kabupaten Konawe Utara Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penerapan Disiplin dan Penegakan Hukum Protokol Kesehatan Sebagai Upaya Pencegahan dan Pengendalian Covid-19 di Kabupaten Konawe Utara; serta Pembentukan Unit Reaksi Cepat PPKM Kabupaten Konawe Utara.

### **2.3.1.3 Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang**

#### **1) Persentase Panjang Jalan Dalam Kondisi Mantap**

Jalan sebagai bagian prasarana transportasi mempunyai peran penting dalam bidang ekonomi, budaya, lingkungan hidup, politik, pertahanan dan keamanan. Jalan sebagai prasarana distribusi barang dan jasa merupakan urat nadi kehidupan masyarakat, bangsa, dan negara. Oleh sebab itu jalan harus dalam kondisi mantap untuk memperlancar transportasi. Panjang jalan nasional di Kabupaten Konawe Utara sepanjang, 118 km, jalan provinsi 38,10 km, dan jalan kabupaten 699,94 km.

**Tabel 2.36.**  
**Panjang Jalan di Kabupaten Konawe Utara**

| No.           | Jenis Permukaan | Jalan Kabupaten (km) |               |               |               |               |
|---------------|-----------------|----------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
|               |                 | 2016                 | 2017          | 2018          | 2019          | 2020          |
| 1.            | Aspal           | 114,76               | 119,59        | 128,52        | 136,40        | 136,40        |
| 2.            | Pengerasan      | 0,45                 | 1,30          | 0,80          | 0,15          | 0,15          |
| 3.            | Kerikil         | 436,01               | 446,12        | 445,76        | 444,96        | 447,66        |
| 4.            | Tanah           | 148,72               | 132,93        | 124,86        | 118,19        | 115,73        |
| <b>Jumlah</b> |                 | <b>699,94</b>        | <b>699,94</b> | <b>699,94</b> | <b>699,94</b> | <b>699,94</b> |

Sumber : Dinas PU Kab. Konawe Utara, 2020

Secara keseluruhan persentase kualitas jalan kabupaten dalam kondisi mantap di Kabupaten Konawe Utara sebesar 83,41%, sisanya belum mantap 16,59%.

**Tabel 2.37.**  
**Kondisi Jalan di Kabupaten Konawe Utara**

| No. | Tahun | Panjang (km) | Kondisi Mantap |       | Kondisi Belum Mantap |       |
|-----|-------|--------------|----------------|-------|----------------------|-------|
|     |       |              | Panjang (km)   | %     | Panjang (km)         | %     |
| 1.  | 2016  | 699,94       | 488,56         | 69,80 | 211,38               | 30,20 |
| 2.  | 2017  | 699,94       | 509,13         | 72,74 | 190,81               | 27,26 |
| 3.  | 2018  | 699,94       | 547,14         | 78,17 | 152,80               | 21,83 |
| 4.  | 2019  | 699,94       | 581,72         | 83,11 | 118,22               | 16,89 |
| 5.  | 2020  | 699,94       | 588,16         | 84,03 | 111,78               | 15,97 |

Sumber : Dinas PU Kab. Konawe Utara, 2021

Jalan kondisi mantap yaitu jalan aspal kondisi baik, sedang, pengerasan, dan kerikil sebaliknya kondisi belum mantap yaitu kondisi jalan rusak, rusak berat dan jalan tanah. Pada Tahun 2020 jalan kabupaten dalam kondisi mantap sepanjang 588,16 km (84,03%) naik dari tahun sebelumnya sepanjang 581,72 km (83,11%) pada Tahun 2019. Sebagian besar pemeliharaan jalan kabupaten tahun 2020 pada ruas dengan kondisi jalan sedang, dan sebagian pada kondisi jalan belum mantap (rusak dan rusak berat). Disamping itu, terdapat perubahan kondisi jalan dari mantap menjadi tidak mantap yang belum termasuk penanganan tahun 2020. Perencanaan

kedepan, pemeliharaan jalan akan diprioritaskan untuk jalan dengan kondisi tidak mantap.

## 2) Jaringan Irigasi Dalam Kondisi Baik

Jaringan irigasi adalah saluran, bangunan dan bangunan pelengkap yang merupakan satu kesatuan yang diperlukan untuk penyediaan, pembagian, pemberian, penggunaan dan pembuangan air irigasi. Secara operasional, jaringan irigasi dibedakan ke dalam tiga kategori, yaitu jaringan irigasi primer, sekunder, dan tersier. Rasio jaringan irigasi adalah perbandingan panjang jaringan irigasi terhadap luas lahan pertanian. Panjang jaringan irigasi meliputi jaringan primer, sekunder dan tersier.

Dalam pengelolaan jaringan irigasi, tolok ukur keberhasilan pengelolaan adalah efisiensi dan efektifitas. Tolok ukur efisiensi dapat diwakili dengan cakupan daerah irigasi (DI) yang terlayani air irigasi sementara tolok ukur efektifitas diwakili oleh capaian saluran irigasi dalam kondisi baik.

Sampai dengan Tahun 2020, di wilayah Kabupaten Konawe Utara terdapat 22 Daerah Irigasi (DI) dengan total luas 3.941 Ha. Kondisi jaringan irigasi primer dalam kondisi baik tahun 2020 adalah 66,79% (7.698,26 m), sedangkan irigasi sekunder sebesar 69,65% (1.453,39 m). Data capaian saluran irigasi dalam kondisi baik selama lima tahun terakhir dari tahun 2016-2020 dapat dilihat pada tabel dibawah.

**Tabel 2.38.**  
**Kondisi Jaringan Irigasi di Kabupaten Konawe Utara**

| Tahun | Total Irigasi Primer (m) | Kondisi  |       |           |       | Total Irigasi Sekunder (m) | Kondisi  |       |           |       |
|-------|--------------------------|----------|-------|-----------|-------|----------------------------|----------|-------|-----------|-------|
|       |                          | Baik (m) | %     | Rusak (m) | %     |                            | Baik (m) | %     | Rusak (m) | %     |
| 2016  | 11.287,13                | 5.669,52 | 50,23 | 5.617,60  | 49,77 | 2.103,53                   | 1.056,60 | 50,23 | 1.046,92  | 49,77 |
| 2017  | 11.346,75                | 5.868,70 | 51,72 | 5.478,05  | 48,28 | 2.099,35                   | 1.261,77 | 60,10 | 837,58    | 39,90 |
| 2018  | 11.406,38                | 6.946,16 | 60,90 | 4.460,21  | 39,10 | 2.095,18                   | 1.121,01 | 53,50 | 974,16    | 46,50 |
| 2019  | 11.466,00                | 7.059,94 | 61,57 | 4.406,06  | 38,43 | 2.091,00                   | 1.319,64 | 63,10 | 771,36    | 36,89 |
| 2020  | 11.525,63                | 7.698,26 | 66,79 | 3.827,37  | 33,21 | 2.086,83                   | 1.453,39 | 69,65 | 633,43    | 30,35 |

Sumber : Dinas PU Kab. Konawe Utara, 2021

**Tabel 2.39.**  
**Daerah Irigasi Yang Teraliri Dengan Baik**  
**di Kabupaten Konawe Utara**

| No. | Tahun | Luas DI Kewenangan Kabupaten Yang Teraliri Dengan Baik (Ha) | %     |
|-----|-------|---|-------|
| 1.  | 2016  | 1.949   | 50,23 |
| 2.  | 2017  | 2.058   | 53,03 |
| 3.  | 2018  | 2.587   | 59,75 |
| 4.  | 2019  | 2.852   | 61,81 |
| 5.  | 2020  | 2.650   | 67,23 |

Sumber : Dinas PU Kab. Konawe Utara, 2020

### 3) Perencanaan Tata Ruang

Perencanaan tata ruang adalah suatu proses untuk menentukan struktur ruang dan pola ruang yang meliputi penyusunan dan penetapan rencana tata ruang. Produk perencanaan tata ruang yang telah dimiliki Kabupaten Konawe Utara adalah Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Konawe Utara. Dokumen yang disusun telah mendapat persetujuan substansi dari Menteri Pekerjaan Umum R.I dan ditetapkan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Konawe Utara Nomor 20 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Konawe Utara Tahun 2012 - 2032.

Peninjauan Kembali (PK) Peraturan Daerah Nomor 20 Tahun 2012 Kabupaten Konawe Utara tentang RTRW Kabupaten Konawe Utara Tahun 2012-2032 telah dilaksanakan pada tahun 2017 dan telah disesuaikan dengan Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang Nomor 11 tahun 2021 tentang Tata Cara Penyusunan, Peninjauan Kembali, Revisi, dan Penerbitan Persetujuan Substansi Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi, Kabupaten, Kota, dan Rencana Detail Tata Ruang. Hasil rekomendasi PK RTRW yaitu dilakukan review RTRW. Namun sampai dengan tahun 2020 karena keterbatasan anggaran dan panjangnya proses penyusunan hingga penetapan, untuk itu perlu dilakukan upaya dan langkah percepatan dalam penyelesaian revisi RTRW Kabupaten Kabupaten Konawe Utara 2012-2032 pada tahun 2021, mengingat periode dokumen RPJMD Kabupaten Konawe Utara berakhir tahun 2021 dan penyusunan RPJMD harus berpedoman pada RTRW.

Pengendalian dan pengawasan pemanfaatan ruang di Kabupaten Konawe Utara menunjukkan adanya ketidaksesuaian pemanfaatan ruang dengan keperuntukkannya, seperti terdapat pada tabel berikut:

**Tabel 2.40.**  
**Tingkat Ketaatan Terhadap Rencana Tata Ruang**  
**di Kabupaten Konawe Utara**

| No.      | Fungsi Kawasan   | Tingkat Kesesuaian (Ha) |              |              | Jumlah (Ha) | Keterangan Ketidaksesuaian                        |
|----------|--|-------------------------|--------------|--------------|-------------|---|
|          |  | Sesuai                  | Belum Sesuai | Tidak Sesuai |             |   |
| <b>A</b> | <b>KAWASAN LINDUNG</b>   |                         |              |              |             |   |
| 1.       | Kawasan Hutan Lindung  | 213.254,16              | -            | -            | 213.254,16  |   |
| 2.       | Kawasan Resapan Air  | -                       | -            | -            | -           |   |
| 3.       | Sempadan Pantai  | -                       | -            | -            | -           |   |
| 4.       | Sempadan Sungai  | -                       | -            | -            | -           |   |
| 5.       | Kawasan Cagar Budaya   | -                       | -            | -            | -           |   |
|          | <b>Jumlah (Ha)</b>   | 213.254,16              | -            | -            | 213.254,16  |   |
|          | <b>% Terhadap Kawasan Lindung</b>                              | 100,00                  | -            | -            | 100,00      |   |
|          | <b>% Terhadap Kawasan Kabupaten Konawe Utara</b>               | 42,62                   | -            | -            | 42,62       |   |
|          |  |                         |              |              | -           |   |
| <b>B</b> | <b>KAWASAN BUDIDAYA</b>  |                         |              |              | -           |   |
| 1.       | Kawasan peruntukan Hutan Produksi Terbatas (HPT)               | 85.986,04               | 34.542,56    | 9.782,71     | 130.311,31  | Terjadinya penurunan status fungsi kawasan hutan  |
| 2.       | Kawasan peruntukan Hutan Produksi (HP)                         | 39.701,09               | 20.242,33    | 5.354,42     | 65.297,84   | Terjadinya penurunan status fungsi kawasan hutan  |
| 3.       | Kawasan peruntukan Hutan Produksi Yang Dapat Dikonversi (HPK)  | 21.553,72               | 6.975,48     | 3.526,08     | 32.055,28   | Terjadinya penurunan status fungsi kawasan hutan  |
| 4.       | Kawasan peruntukan pertanian tanaman pangan                    | 953,72                  | 455,02       | 248,60       | 1.657,34    | Terjadinya alih fungsi menjadi kawasan permukiman |
| 5.       | Kawasan peruntukan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LP2B) | 1.500,00                | -            | -            | 1.500,00    | Menunggu Pentapan RP2                             |
| 6.       | Kawasan peruntukan pertanian basah                             | 2.137,39                | 240,88       | 1.019,26     | 3.397,53    | Perubahan kawasan menjadi perkebunan              |
| 7.       | Kawasan peruntukan Perkebunan Kelapa Sawit                     | 13.336,55               | 1.161,44     | 904,01       | 15.402,00   | Menjadi Kawasan Pertambangan                      |

| No. | Fungsi Kawasan                                   | Tingkat Kesesuaian (Ha) |              |              | Jumlah (Ha) | Keterangan Ketidak sesuaian   |
|-----|--|-------------------------|--------------|--------------|-------------|---|
|     |  | Sesuai                  | Belum Sesuai | Tidak Sesuai |             |   |
| 8.  | Kawasan peruntukan perkebunan tanaman rakyat     | 17,65                   | 1,95         | 4,73         | 24,33       | Alih fungsi menjadi kawasan perkebunan sawit  |
| 9.  | Kawasan peruntukan pertambangan                  | 14.995,18               | 7.172,46     | 5.661,36     | 27.829,00   | Menggunakan kawasan hutan   |
| 10. | Kawasan peruntukan permukiman                    | 6.574,89                | 1.389,31     | 1.331,98     | 9.296,18    | Kurangnya anggaran dalam program pengembangan permukiman yang sudah diatur dalam indikasi program |
| 11. | Kawasan peruntukan perikanan budidaya            | 72,89                   | -            | 13,85        | 86,74       | Alih fungsi lahan   |
| 12. | Kawasan peruntukan peternakan                    | 98,38                   | 22,42        | 3,74         | 124,54      | Belum maksimalnya program pengembangan peternakan   |
| 13. | Kawasan peruntukan lainnya                       | 89,55                   | 8,22         | 4,99         | 102,76      | Belum maksimalnya pengadaan tanah untuk pembangunan lainnya                                       |
|     | <b>Jumlah (Ha)</b>                               | 187.017,05              | 72.212,07    | 27.855,73    | 287.084,85  |   |
|     | <b>% Terhadap kawasan budidaya</b>               | 60,32                   | 28,01        | 11,68        | 100,01      |   |
|     | <b>% Terhadap Kawasan Kabupaten Konawe Utara</b> | 34,61                   | 16,07        | 6,70         | 57,38       |   |
|     |  |                         |              |              | -           |   |
|     | <b>Total (Ha)</b>                                | 400.271,21              | 72.212,07    | 27.855,73    | 500.339,01  |   |
|     | <b>% Terhadap Kawasan Kabupaten Konawe Utara</b> | 80,00                   | 14,43        | 5,57         | 100,00      |   |
|     | <b>Kategori</b>                                  | Tinggi                  | Sedang       | Rendah       |             |   |

Sumber : Bappeda, 2021

Tabel diatas menunjukkan sebagian besar ruang yang ada masih sesuai dengan keperuntukkannya yaitu 80,00%, masuk dalam kategori tinggi, namun masih

ada ketidaksesuaian sebesar 5,57%, masuk dalam kategori rendah. Hal ini dikarenakan sebagian besar pemanfaatannya belum mentaati rencana pola ruang. Upaya yang dilakukan pemda antara lain melalui kegiatan sosialisasi dan konsolidasi tanah, konsultansi serta audit pemanfaatan tanah.

### 2.3.1.4 Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman

#### 1) Jumlah Rumah dan Kekurangan Rumah serta RTLH

Rumah atau hunian tempat tinggal merupakan kebutuhan dasar manusia yang mutlak harus terpenuhi. Secara umum, kondisi rumah layak huni di Kabupaten Konawe Utara telah mencapai 74 %, sedangkan kondisi rumah tidak layak huni sebesar 26%, hal ini dapat dilihat dari tabel 2.41.

**Tabel 2.41.**  
**Ketersediaan Sarana Perumahan**  
**Kabupaten Konawe Utara**

| No.                      | Kecamatan        | Jumlah Rumah 2019 (unit) | RTLH 2019 (unit) | RLH 2019 (unit) | % RTLH     | % RLH      |
|--------------------------|------------------|--------------------------|------------------|-----------------|------------|------------|
| 1                        | Sawa             | 1.294                    | 114              | 1.180           | 9%         | 91%        |
| 2                        | Motui            | 1.246                    | 580              | 666             | 47%        | 53%        |
| 3                        | Lembo            | 1.298                    | 215              | 1.083           | 17%        | 83%        |
| 4                        | Lasolo           | 1.815                    | 471              | 1.344           | 26%        | 74%        |
| 5                        | Wawolesea        | 1.018                    | 273              | 745             | 27%        | 73%        |
| 6                        | Lasolo Kepulauan | 553                      | 210              | 343             | 38%        | 62%        |
| 7                        | Molawe           | 1.367                    | 287              | 1.080           | 21%        | 79%        |
| 8                        | Asera            | 2.142                    | 598              | 1.544           | 28%        | 72%        |
| 9                        | Andowia          | 1.320                    | 530              | 790             | 40%        | 60%        |
| 10                       | Oheo             | 1.311                    | 122              | 1.189           | 9%         | 91%        |
| 11                       | Langgikima       | 1.415                    | 258              | 1.157           | 18%        | 82%        |
| 12                       | Wiwirano         | 1.540                    | 366              | 1.174           | 24%        | 76%        |
| 13                       | Landawe          | 828                      | 357              | 471             | 43%        | 57%        |
| <b>Kab. Konawe Utara</b> |                  | <b>17.147</b>            | <b>4.381</b>     | <b>12.766</b>   | <b>26%</b> | <b>74%</b> |

Sumber : RP3KP Kabupaten Konawe Utara Tahun 2020

#### 2) Jumlah Kebutuhan Rumah (*Backlog*)

Setelah diketahui kebutuhan rumah akibat pertumbuhan penduduk, maka dapat dihitung kebutuhan rumah total di Kabupaten Konawe Utara pada tahun proyeksi. Kebutuhan rumah total didapat dari penjumlahan *backlog eksisting* dengan

kebutuhan rumah karena pertumbuhan penduduk. Kebutuhan rumah tambahan dari tahun awal rencana. Untuk lebih jelasnya lihat Tabel 2.42.

**Tabel 2.42.**  
**Proyek Kebutuhan Rumah setiap Kecamatan di Kabupaten Konawe Utara**

| No                       | Kecamatan        | Jumlah KK Tahun 2019 | Jumlah Rumah 2019 (unit) | Backlog Rumah 2019 | Jumlah KK Proyeksi 2040 | Kebutuhan Rumah KK | Total Kebutuhan Rumah | Kebutuhan Rumah/ Tahun |
|--------------------------|------------------|----------------------|--------------------------|--------------------|-------------------------|--------------------|-----------------------|------------------------|
| <i>a</i>                 | <i>b</i>         | <i>c</i>             | <i>d</i>                 | <i>e = c - d</i>   | <i>f</i>                | <i>g = f - c</i>   | <i>h = (g+e)</i>      | <i>i = h/20</i>        |
| 1                        | Sawa             | 1.294                | 1.294                    | -                  | 3.221                   | 1.927              | 1.927                 | 96                     |
| 2                        | Motui            | 1.246                | 1.246                    | -                  | 2.651                   | 1.405              | 1.405                 | 70                     |
| 3                        | Lembo            | 1.575                | 1.298                    | 277                | 3.661                   | 2.086              | 2.363                 | 118                    |
| 4                        | Lasolo           | 2.272                | 1.815                    | 457                | 5.361                   | 3.089              | 3.546                 | 177                    |
| 5                        | Wawolesea        | 1.015                | 1.018                    | - 3                | 1.989                   | 974                | 971                   | 49                     |
| 6                        | Lasolo Kepulauan | 567                  | 553                      | 14                 | 6.726                   | 6.159              | 6.173                 | 309                    |
| 7                        | Molawe           | 1.728                | 1.367                    | 361                | 4.501                   | 2.773              | 3.134                 | 157                    |
| 8                        | Asera            | 2.142                | 2.142                    | -                  | 4.482                   | 2.340              | 2.340                 | 117                    |
| 9                        | Andowia          | 1.981                | 1.320                    | 661                | 4.358                   | 2.377              | 3.038                 | 152                    |
| 10                       | Oheo             | 1.311                | 1.311                    | -                  | 5.177                   | 3.866              | 3.866                 | 193                    |
| 11                       | Langgikima       | 1.415                | 1.415                    | -                  | 2.747                   | 1.332              | 1.332                 | 67                     |
| 12                       | Wiwirano         | 1.493                | 1.540                    | -47                | 3.585                   | 2.092              | 2.045                 | 102                    |
| 13                       | Landawe          | 828                  | 828                      | -                  | 1.458                   | 630                | 630                   | 31                     |
| <b>Kab. Konawe Utara</b> |                  | <b>18.867</b>        | <b>17.147</b>            | <b>1.720</b>       | <b>49.917</b>           | <b>31.050</b>      | <b>32.770</b>         | <b>1.638</b>           |

Sumber : RP3KP Kabupaten Konawe Utara Tahun 2020

### 3) Sarana Prasarana Kawasan Permukiman

Analisis pelayanan umum bagian perumahan dapat dilihat dari beberapa aspek diantaranya rumah tangga pengguna air bersih dan jumlah seluruh rumah tangga dan jumlah rumah tangga pengguna listrik dengan jumlah seluruh rumah tangga di Kabupaten Konawe Utara. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel berikut:

**Tabel 2.43.**  
**Ketersediaan Prasarana Perumahan**  
**Kabupaten Konawe Utara**

| No. | Uraian                                | Tahun  |        |        |        |        |
|-----|---------------------------------------|--------|--------|--------|--------|--------|
|     |                                       | 2016   | 2017   | 2018   | 2019   | 2020   |
| 1.  | Rumah Tangga Pengguna Air minum layak | 4.024  | 4.266  | 4.904  | 7.730  | 9.288  |
|     | Jumlah Rumah Tangga                   | 12.584 | 13.115 | 13.442 | 18.867 | 19.218 |
|     | Persentase (%)                        | 31,98  | 32,53  | 36,48  | 40,97  | 48,33  |
| 2.  | Rumah Tangga Pengguna Listrik         | 9.238  | 10.377 | 13.169 | 18.741 | 19.218 |
|     | Jumlah Rumah Tangga                   | 12.584 | 13.115 | 13.442 | 18.867 | 19.218 |
|     | Persentase (%)                        | 73,41  | 79,12  | 97,97  | 99,33  | 100,00 |
| 3.  | Rumah Tangga Bersanitasi layak        | 3.727  | 3.885  | 4.228  | 6.851  | 6.978  |
|     | Jumlah Rumah Tangga                   | 12.584 | 13.115 | 13.442 | 18.867 | 19.218 |
|     | Persentase (%)                        | 29,62  | 29,62  | 31,45  | 36,31  | 36,31  |

Sumber : Konawe Utara Dalam Angka, 2021

#### 4) Kawasan Permukiman Kumuh

Berdasarkan digitasi citra satelit dalam revisi Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Konawe Utara, luas kawasan permukiman di Kabupaten Konawe Utara sebesar 2.450,45 Ha. Permukiman kumuh di Kabupaten Konawe Utara di berdasarkan SK Bupati Konawe Utara No. 397/2019 tentang Penetapan Lokasi Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh Kab. Konawe Utara seluas 112.669 Ha dengan Kawasan yang tersebar di 44 titik kawasan kumuh. Selanjutnya, hasil verifikasi luas kawasan pemukiman kumuh pada kegiatan Rencana Pencegahan dan Peningkatan Kualitas Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh (RP2KPKPK) Tahun 2021 diketahui bahwa luasan kawasan permukiman kumuh di Kabupaten Konawe Utara seluas 528,13 Ha. Dengan demikian, dalam penanganan kawasan pemukiman kumuh di Kabupaten Konawe Utara mengacu pada data tersebut. Nama kawasan serta luas kawasan permukiman kumuh sesuai SK Kumuh Kabupaten Konawe Utara Tahun 2019 dan hasil verifikasi luasan Tahun 2021 dapat dilihat pada Tabel 2.44.

**Tabel 2.44.**  
**Luas Kawasan Pemukiman Kumuh**  
**Kabupaten Konawe Utara**

| No | Nama Kawasan    | Luas Kawasan Kumuh                         |                                      |
|----|-----------------|--|--------------------------------------|
|    |                 | Luasan SK Tahun 2019<br>(Km <sup>2</sup> ) | Luasan Verifikasi<br>Tahun 2021 (Ha) |
| 1  | Wawonsangi      | 49,73                                      | 14,55                                |
| 2  | Tambakua        | 162,97                                     | 5,30                                 |
| 3  | Alenggo         | 16,00                                      | 39,10                                |
| 4  | Molore Pantai   | 11,46                                      | 8,68                                 |
| 5  | Sarimukti       | 35,66                                      | 29,00                                |
| 6  | Morombo Pantai  | 5,00                                       | 13,00                                |
| 7  | Morombo         | 10,30                                      | 9,00                                 |
| 8  | Waturambaha     | 18,98                                      | 6,50                                 |
| 9  | Boedingi        | 1,60                                       | 2,00                                 |
| 10 | Tapunopaka      | 1,46                                       | 9,30                                 |
| 11 | Sambandete      | 91,69                                      | 14,40                                |
| 12 | Tinondo         | 84,72                                      | 9,50                                 |
| 13 | Laumoso         | 25,22                                      | 28,00                                |
| 14 | Puusuli         | 69,12                                      | 18,05                                |
| 15 | Tapuemea        | 1,27                                       | 7,00                                 |
| 16 | Labungga        | 24,50                                      | 16,00                                |
| 17 | Puuwanggudu     | 45,00                                      | 1,70                                 |
| 18 | Wanggudu Raya   | 24,45                                      | 11,00                                |
| 19 | Amorome Utama   | 33,72                                      | 53,16                                |
| 20 | Kelurahan Asera | 6,89                                       | 16,30                                |
| 21 | Longeo Utama    | 30,30                                      | 9,00                                 |
| 22 | Amorome         | 53,35                                      | 15,30                                |
| 23 | Wawolibue       | 3,61                                       | 9,30                                 |
| 24 | Walalindu       | 5,61                                       | 1,60                                 |
| 25 | Tapuwatu        | 25,00                                      | 3,30                                 |

| No            | Nama Kawasan       | Luas Kawasan Kumuh                      |                                   |
|---------------|--------------------|---|-----------------------------------|
|               |                    | Luasan SK Tahun 2019 (Km <sup>2</sup> ) | Luasan Verifikasi Tahun 2021 (Ha) |
| 26            | Alaa Wanggudu      | 7,76                                    | 4,70                              |
| 27            | Muara Tinobu       | 0,87                                    | 4,70                              |
| 28            | Otipulu            | 8,35                                    | 5,70                              |
| 29            | Tetelupai          | 3,60                                    | 3,00                              |
| 30            | Tanjung Bunga      | 1,58                                    | 10,50                             |
| 31            | Watuwula           | 3,96                                    | 5,30                              |
| 32            | Puusiambu          | 4,26                                    | 12,60                             |
| 33            | Tudungano          | 1,70                                    | 9,30                              |
| 34            | Punggulahi         | 3,90                                    | 11,00                             |
| 35            | Sambasule          | 2,00                                    | 5,30                              |
| 36            | Poni Poniki        | 3,50                                    | 4,70                              |
| 37            | Tobimeita          | 5,20                                    | 5,70                              |
| 38            | Sama Subur         | 2,00                                    | 15,00                             |
| 39            | Kelurahan Wanggudu | 111,78                                  | 28,74                             |
| 40            | Wunduhaka          | 5,88                                    | 8,50                              |
| 41            | Banggina           | 2,00                                    | 0,00                              |
| 42            | Tanjung Laimea     | 2,10                                    | 2,60                              |
| 43            | Tapungaya          | 7,50                                    | 15,00                             |
| 44            | Paka Indah         | 89,90                                   | 25,75                             |
| <b>Jumlah</b> |                    | <b>1.105,45</b>                         | <b>528,13</b>                     |

Sumber : SK Bupati Konawe Utara No. 397/2019 tentang Penetapan Lokasi Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh Kab. Konawe Utara, Hasil verifikasi kegiatan RP2KPKPK Tahun 2021

### 1) Rumah Tidak Layah Huni (RTLH)

Pada tahun 2020, RTLH dapat tertangani 80 unit dari dana Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) dan RUTILAHU dengan rincian data sebagai berikut :

**Tabel 2.45.**  
**Jumlah Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni  
di Kabupaten Konawe Utara**

| No. | Tahun | Jumlah RTLH (Unit) |
|-----|-------|--------------------|
| 1.  | 2017  | 250                |
| 2.  | 2018  | 271                |
| 3.  | 2019  | 200                |
| 4.  | 2020  | 80                 |

*Sumber : Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman, 2021*

### 2.3.1.5 Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat

Pembinaan politik daerah di Kabupaten Konawe Utara juga dilaksanakan oleh Dinas Kesatuan Bangsa dan Politik. Kegiatan ini perlu dilaksanakan mengingat pentingnya pendidikan politik dan berorganisasi bagi masyarakat agar masyarakat sadar dan ikut berpartisipasi dalam kegiatan politik di Kabupaten Konawe Utara. Tujuan dari kegiatan ini adalah meningkatkan kualitas kehidupan sosial politik dan meningkatnya partisipasi politik serta partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan pemilihan umum.

**Tabel 2.46.**  
**Tingkat Partisipasi Masyarakat Dalam Pemilu  
di Kabupaten Konawe Utara**

| No. | Jumlah DPT                | Pileg 2019   | Pilpres 2019 | Pilbup 2020  |
|-----|---------------------------|--------------|--------------|--------------|
| 1.  | Jumlah Pemilih            | 43.922       | 43.922       | 46.123       |
| 2.  | Jumlah Pengguna Hak Pilih | 39.483       | 39.770       | 42.875       |
| 3.  | Tingkat Partisipasi (%)   | <b>89,89</b> | <b>90,55</b> | <b>92,96</b> |
| 4.  | Jumlah Suara Sah          | 37.957       | 38.632       | 42.864       |
| 5.  | Jumlah Tidak Sah/Golput   | 1.526        | 1.138        | 518          |
| 6.  | Persentase Suara Sah (%)  | 96,14        | 97,14        | 98,80        |

*Sumber : KPU Kab. Konawe Utara, 2021*

Melihat partisipasi masyarakat dalam pemilu belum optimal maka dalam rangka persiapan Pilkada Serentak Tahun 2024 yang akan dilaksanakan pada bulan November Tahun 2023, perlu upaya-upaya untuk meningkatkan partisipasi masyarakat terutama generasi muda sebagai pemilih pemula. Kegiatan pembinaan politik salah satunya adalah sosialisasi politik bagi pemilih pemula dan perempuan.

### 2.3.1.6 Sosial

Jenis Pelayanan yang diselenggarakan oleh pemerintah daerah kabupaten merupakan pelayanan dalam rangka penanggulangan masalah sosial terdiri atas :

1. Pelaksanaan program/kegiatan bidang sosial (Pemberian bantuan sosial bagi PMKS; Pelaksanaan kegiatan pelayanan dan rehabilitasi sosial bagi PMKS dalam panti sosial).
2. Penyediaan sarana dan prasarana sosial (Penyediaan sarana dan prasarana panti sosial; Penyediaan sarana prasarana pelayanan luar panti).
3. Penanggulangan korban bencana pada tahap tanggap darurat (Bantuan sosial bagi korban bencana; Evakuasi korban bencana)
4. Pelaksanaan dan Pengembangan jaminan sosial bagi penyandang cacat fisik dan mental, serta lanjut usia tidak potensial terlantar yang berasal dari masyarakat rentan dan tidak mampu
5. Pelaksanaan jaminan sosial

PMKS adalah seseorang, keluarga, atau kelompok masyarakat yang karena suatu hambatan, kesulitan, atau gangguan tidak dapat melaksanakan fungsi sosialnya dan karenanya tidak dapat menjalin hubungan yang serasi dan kreatif dengan lingkungannya sehingga tidak dapat memenuhi kebutuhan hidupnya (jasmani, rohani dan sosial) secara memadai dan wajar. Hambatan, kesulitan, dan gangguan tersebut dapat berupa kemiskinan, keterlantaran, kecacatan, ketunaan sosial, keterbelakangan, atau keterasingan dari kondisi atau perubahan lingkungan (secara mendadak) yang kurang mendukung atau menguntungkan. PMKS merupakan permasalahan sosial yang tidak hanya menjadi tanggungjawab pemerintah saja tetapi masyarakat dan dunia swasta.

**Tabel 2.47.**  
**Jumlah Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial**  
**di Kabupaten Konawe Utara**

| NO | URAIAN                                | JUMLAH       |
|----|---------------------------------------|--------------|
| 1. | Lanjut Usia                           | 3.020        |
| 2. | Disabilitas                           | 148          |
| 3. | Korban tindak kekerasan terhadap anak | 23           |
| 4. | RUTILAHU                              | 280          |
|    | <b>Total</b>                          | <b>3.471</b> |

Sumber : Dinas Sosial Kab. Konawe Utara, Tahun 2021

## 2.3.2 Urusan Pemerintahan Wajib yang Tidak Berkaitan dengan Pelayanan Dasar

### 2.3.2.1 Tenaga Kerja

#### 1) Angkatan Kerja

Tingkat partisipasi angkatan kerja merupakan perbandingan jumlah angkatan kerja terhadap jumlah penduduk usia kerja. Tingkat partisipasi angkatan kerja dapat digunakan untuk menyatakan jumlah angkatan kerja. Tingkat partisipasi angkatan kerja di Kabupaten Konawe Utara disajikan pada Tabel 2.48. Berdasarkan data yang diperoleh dari BPS, tingkat partisipasi angkatan kerja di Kabupaten Konawe Utara cenderung meningkat. Pada tahun 2020 tingkat partisipasi angkatan kerja sebesar 74,45%.

**Tabel 2.48.**  
**Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK)**  
**di Kabupaten Konawe Utara**

| No. | Jenis                   | 2019         |           | Jumlah | 2020         |           | Jumlah |
|-----|-------------------------|--------------|-----------|--------|--------------|-----------|--------|
|     |                         | Laki-Laki    | Perempuan |        | Laki-Laki    | Perempuan |        |
| 1.  | Angkatan Kerja          |              |           | 29.535 |              |           | 33.592 |
|     | - Bekerja               | 18.542       | 9.834     | 28.376 | 20.559       | 11.759    | 32.318 |
|     | - Pengangguran Terbuka  | 901          | 258       | 1.159  | 841          | 433       | 1.274  |
| 2.  | Bukan Angkatan Kerja    |              |           | 13.232 |              |           | 11.531 |
|     | - Sekolah               | 1.619        | 1.758     | 3.377  | 866          | 1.293     | 2.159  |
|     | - Mengurus Rumah Tangga | 839          | 8.008     | 8.847  | 790          | 7.686     | 8.476  |
|     | - Lainnya               | 805          | 203       | 1.008  | 686          | 210       | 896    |
|     | <b>Jumlah</b>           | 22.706       | 20.061    | 42.767 | 23.742       | 21.381    | 45.123 |
|     | <b>TPAK (%)</b>         | <b>69,06</b> |           |        | <b>74,45</b> |           |        |

Sumber : BPS, Kab. Konawe Utara Dalam Angka, 2021

#### 2) Tingkat Pengangguran

Ada dua jenis pengangguran yaitu pengangguran terbuka (*open unemployment*) dan setengah pengangguran (*disguised unemployment*).

Pengangguran Terbuka adalah orang yang tidak punya pekerjaan dan sedang mencari pekerjaan atau sedang mempersiapkan usaha. Setengah pengangguran adalah orang yang bekerja dibawah jam kerja normal (kurang dari 35 jam seminggu dan masih mencari pekerjaan atau masih bersedia menerima pekerjaan).

Tingkat Pengangguran di Kabupaten Konawe Utara cenderung mengalami penurunan meskipun dengan laju yang lambat dan berfluktuatif. Hal ini ditunjukkan oleh tingkat pengangguran terbuka (TPT) pada Tabel 2.49. TPT merupakan perbandingan antara jumlah pengangguran dengan jumlah angkatan kerja. Pada tahun 2016, tingkat pengangguran di Kabupaten Konawe Utara mencapai angka 5,95%, turun menjadi 4,23 pada tahun 2017 dan pada Tahun 2018 terus menurun menjadi 3,59%. Menurut data BPS tahun 2020 tingkat pengangguran terbuka meningkat menjadi 3,92%, dan kembali menurun menjadi 3,79% tahun 2020.

**Tabel 2.49.**  
**Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)**  
**di Kabupaten Konawe Utara**

| No. | Jenis                  | 2019         |           | Jumlah | 2020         |           | Jumlah |
|-----|------------------------|--------------|-----------|--------|--------------|-----------|--------|
|     |                        | Laki-Laki    | Perempuan |        | Laki-Laki    | Perempuan |        |
| 1.  | Angkatan Kerja         |              |           | 29.535 |              |           | 33.592 |
|     | - Bekerja              | 18.542       | 9.834     | 28.376 | 20.559       | 11.759    | 32.318 |
|     | - Pengangguran Terbuka | 901          | 258       | 1.159  | 841          | 433       | 1.274  |
|     | <b>Jumlah</b>          | 22.706       | 20.061    | 42.767 | 23.742       | 21.381    | 45.123 |
|     | <b>TPT (%)</b>         | <b>3,92%</b> |           |        | <b>3,79%</b> |           |        |

Sumber : BPS, Kab. Konawe Utara Dalam Angka, 2021

Beberapa upaya berupa program kegiatan yang telah dilakukan yaitu: Program Peningkatan kesempatan kerja, penempatan tenaga kerja, transmigrasi umum, perlindungan dan pengembangan ketenagakerjaan, peningkatan kualitas dan produktivitas tenaga kerja, dan perluasan tenaga kerja.

### 2.3.2.2 Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

Pemberdayaan Perempuan adalah usaha sistematis dan terencana untuk mencapai kesetaraan dan keadilan gender dalam kehidupan keluarga dan masyarakat. Tujuan dari pemberdayaan perempuan adalah untuk perempuan sendiri untuk menjadi agen perubahan yang aktif dalam melakukan transformasi gender.

Indeks Pemberdayaan Gender (IDG) adalah indeks komposit yang tersusun dari beberapa variabel yang mencerminkan tingkat keterlibatan wanita dalam proses pengambilan keputusan dibidang politik dan ekonomi. Indeks pemberdayaan gender di Kabupaten Konawe Utara cenderung mengalami peningkatan. Pada tahun 2017 sebesar 69,13 meningkat menjadi 69,52 pada tahun 2020. Hal ini mengindikasikan bahwa pemberdayaan perempuan di Kabupaten Konawe Utara semakin meningkat.

**Tabel 2.50.**  
**Kinerja Pemberdayaan Perempuan dan PA**  
**di Kabupaten Konawe Utara**

| No. | Uraian   | Jumlah   |
|-----|--|----------|
| 1.  | Indeks Pemberdayaan Gender (IDG)               | 69,52    |
| 2.  | Indeks Pengarusutamaan Gender (IPG)            | 86,17    |
| 3.  | Persentase Kekerasan Anak Yang Ditindaklanjuti | 100%     |
| 4.  | Panti Asuhan                                   | 1 gedung |
| 5.  | Kapasitas Tampung                              | 25 orang |
| 6.  | Anak Asuh                                      | 25 orang |
| 7.  | Pengasuh                                       | 2 orang  |

Sumber : Dinas PP dan PA Kab. Konawe Utara, Tahun 2021

**Tabel 2.51.**  
**Jumlah Kasus Kejahatan dan**  
**Kasus yang telah diselesaikan**

| No.                                       | Kasus                        | 2018        | 2019        | 2020        |
|---|------------------------------|-------------|-------------|-------------|
| 1.  | Aniaya Biasa                 | 21          | 24          | 21          |
| 2.  | Pencurian                    | 17          | 6           | 9           |
| 3.  | Pengroyokan                  | 7           | 6           | 4           |
| 4.  | Aniaya                       | 7           | -           | 23          |
| 5.  | Pengancaman                  | 2           | 1           | 2           |
| 6.  | Curi dalam keluarga          | -           | -           | -           |
| 7.  | Kekerasan Dalam Rumah Tangga | 10          | 4           | 9           |
| 8.  | Penipuan                     | 2           | 3           | 1           |
| <b>Total</b>                              |                              | <b>66</b>   | <b>44</b>   | <b>69</b>   |
| <b>Kasus yang diselesaikan</b>            |                              | <b>66</b>   | <b>44</b>   | <b>69</b>   |
| <b>Persentase Kasus Yang diselesaikan</b> |                              | <b>100%</b> | <b>100%</b> | <b>100%</b> |

Sumber : Dinas PP dan PA Kab. Konawe Utara, Tahun 2021

**Tabel 2.52.**  
**Partisipasi Perempuan dalam berpolitik**

| No.  | Uraian      | 2018          | 2019       | 2020       |
|--|-------------|---------------|------------|------------|
| 1.   | Laki - Laki | 15            | 17         | 17         |
| 2.   | Perempuan   | 5             | 3          | 3          |
| <b>Total</b>   |             | <b>20</b>     | <b>20</b>  | <b>20</b>  |
| <b>Persentase Partisipasi Perempuan dalam berpolitik</b> |             | <b>33,33%</b> | <b>15%</b> | <b>15%</b> |

*Sumber : Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak*

Di Kabupaten Konawe Utara, partisipasi politik perempuan khususnya keterwakilan perempuan dalam pengambilan keputusan menjadi agenda penting Pemerintah Daerah dan legislatif. Berbagai kebijakan afirmasi dan penguatan terus diupayakan. Dalam demokrasi inklusif, masyarakat sebagai salah satu pilar penting demokrasi mempunyai peranan yang sangat penting untuk mewujudkan partisipasi politik perempuan yang lebih luas dan bermakna. Partisipasi perempuan dalam politik sangatlah penting. Sebab keberadaan mereka dapat meningkatkan kesejahteraan kelompok perempuan dengan mewakili, mengawal dan mempengaruhi agenda dan proses pembuatan kebijakan, serta turut serta dalam proses pembangunan.

Persentase perempuan dalam berpolitik di Kabupaten Konawe Utara dilihat dengan mengukur jumlah perempuan yang menjadi anggota DPRD Kabupaten dibandingkan dengan jumlah total anggota DPRD Kabupaten Konawe Utara. Pada tahun 2018, sebanyak 5 dari 20 anggota DPRD Kabupaten Konawe Utara merupakan anggota legislator perempuan. Pada Tahun 2019 dan Tahun 2020, keterwakilan perempuan di legislatif menurun menjadi hanya 3 orang, atau hanya sebesar 15%. Ke depan diharapkan terjadi peningkatan keterwakilan perempuan dalam legislatif sebagai upaya mengawal dan memperjuangkan hak-hak perempuan menuju kesetaraan gender.

#### **2.3.2.4 Pangan**

Ketersediaan pangan adalah tersedianya pangan dari hasil produksi dalam negeri dan/atau sumber lain. Ketersediaan pangan berfungsi menjamin pasokan pangan untuk memenuhi kebutuhan seluruh penduduk, dari segi kuantitas, kualitas,

keragaman dan keamanannya. Ketersediaan pangan dapat dipenuhi dari tiga sumber yaitu (1) produksi dalam negeri; (2) pasokan pangan; (3) pengelolaan cadangan pangan.

Cadangan pangan merupakan salah satu komponen penting dalam ketersediaan pangan, karena cadangan pangan merupakan sumber pasokan untuk mengisi kesenjangan antara produksi dan kebutuhan dalam negeri atau daerah dari waktu ke waktu, sehingga diharapkan tidak terjadi lonjakan harga pangan pokok.

Pola Pangan Harapan (PPH) adalah susunan beragam pangan yang didasarkan pada sumbangan energi dari kelompok pangan utama baik secara absolut maupun dari suatu pola ketersediaan atau konsumsi pangan. Acuan untuk menilai tingkat keragaman konsumsi pangan adalah PPH dengan skor 100 sebagai pola yang ideal. Skor PPH semakin mendekati angka 100 menunjukkan bahwa pola konsumsi pangan masyarakat semakin beragam.

Kinerja pada Urusan Pangan di Kabupaten Konawe Utara secara lengkap terlihat pada tabel dibawah ini.

**Tabel 2.53.**  
**Kinerja Urusan Pangan di Kabupaten Konawe Utara**

| No. | Uraian   | Tahun |       |       |       |
|-----|--|-------|-------|-------|-------|
|     |  | 2017  | 2018  | 2019  | 2020  |
| 1.  | Ketersediaan pangan utama kkl/kapita/hari                  | 1.900 | 1.950 | 2.220 | 2.400 |
| 2.  | Pola Pangan Harapan  | 76,28 | 77,26 | 76,93 | 79,60 |
| 3.  | Rata-rata jumlah ketersediaan padi dalam setahun (ton)     | 1.373 | 1.579 | 1.581 | 1.640 |
| 4.  | Rata-rata jumlah ketersediaan jagung dalam setahun (ton)   | 68,16 | 71,25 | 72,26 | 70,56 |
| 5.  | Rata-rata jumlah ketersediaan palawija dalam setahun (ton) | 60,75 | 67,33 | 62,42 | 63,50 |

Sumber : Dinas Ketahanan Pangan, Tahun 2021

### 2.3.2.5 Pertanian

Pada urusan pertanian yang telah dilaksanakan meliputi kegiatan pengadaan tanah untuk kepentingan umum melalui Tim P2T (Panitia Pengadaan Tanah) Kabupaten Konawe Utara, Fasilitasi penyelesaian konflik tanah negara dan upaya

tertib administrasi pertanahan melalui penyediaan data base pertanahan di 11 kelurahan. Data status tanah di Kabupaten Konawe Utara tahun 2016-2020 disajikan pada Tabel 2.54.

**Tabel 2.54.**  
**Perkembangan Status Hak Tanah**  
**di Kabupaten Konawe Utara**

| No.           | Uraian            | Tahun         |               |              |              |              |
|---------------|-------------------|---------------|---------------|--------------|--------------|--------------|
|               |                   | 2016          | 2017          | 2018         | 2019         | 2020         |
| 1.            | Hak Milik         | 2.755         | 5.302         | 2.470        | 3.101        | 1.211        |
| 2.            | Hak Guna Bangunan | -             | -             | 1            | -            | 4            |
| 3.            | Hak Guna Usaha    | -             | -             | -            | -            | -            |
| 4.            | Hak Pakai         | -             | 53            | 93           | 148          | 222          |
| <b>Jumlah</b> |                   | <b>20.262</b> | <b>20.262</b> | <b>2.755</b> | <b>5.355</b> | <b>2.564</b> |

Sumber : BPN Kab. Konawe Utara, 2021

### 2.3.2.6 Lingkungan Hidup

Pada urusan lingkungan hidup, gambaran kondisi lingkungan hidup yang digambarkan melalui beberapa indikator yang terkait dengan lingkungan sebagaimana diuraikan pada tabel berikut ini :

**Tabel 2.55.**  
**Kinerja Pengelolaan Lingkungan**  
**di Kabupaten Konawe Utara**

| No. | Indikator Kinerja  | Capaian |      |      |      |      |      |
|-----|--|---------|------|------|------|------|------|
|     |  | 2015    | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
| 1.  | Cakupan Pengawasan Terhadap Pelaksanaan AMDAL  | 90      | 90   | 90   | 90   | 90   | 90   |
| 2.  | Jumlah Perusahaan Yang Memiliki AMDAL  | 42      | 42   | 44   | 48   | 54   | 54   |
| 3.  | Jumlah Perusahaan Yang Memiliki Tempat pengelolaan Limbah  | 9       | 10   | 12   | 14   | 16   | 16   |
| 4.  | Jumlah Sumber Air Yang Dipantau Kualitasnya, Ditetapkan Status Mutu Airnya Dan Diinformasikan Status Mutu Airnya | 11      | 11   | 8    | 12   | 13   | 5    |

| No. | Indikator Kinerja  | Capaian |      |      |      |      |      |
|-----|--|---------|------|------|------|------|------|
|     |  | 2015    | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
| 5.  | Jumlah Pengaduan Masyarakat Akibat Adanya Dugaan Pencemaran Dan/Atau Perusakan | 1       | 1    | 3    | 2    | 2    | 2    |

Sumber : DLH Kab. Konawe Utara, Tahun 2021

### 2.3.2.7 Administrasi Kependudukan dan Catatan Sipil

Cakupan penerbitan kartu tanda penduduk merupakan salah satu indikator SPM yang dilaksanakan Kabupaten Konawe Utara dalam pelayanan dokumen kependudukan dengan penanggungjawab kegiatan berada di Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Konawe Utara. Cakupan penerbitan KTP adalah cakupan penduduk yang telah memperoleh KTP sesuai dengan standar pelayanan lima hari harus selesai diterbitkan KTP. Perkembangan pencapaian cakupan penerbitan kartu tanda penduduk di Kabupaten Konawe Utara tahun 2026-2020 ditampilkan pada Tabel 2.56.

**Tabel 2.56.**  
**Cakupan Penerbitan KTP**  
**di Kabupaten Konawe Utara**

| No. | Indikator Kinerja                             | Capaian   |           |        |           |           |        |
|-----|---|-----------|-----------|--------|-----------|-----------|--------|
|     |   | 2019      |           |        | 2020      |           |        |
|     |   | Laki-laki | Perempuan | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | Jumlah |
| 1.  | Jumlah KTP ber-NIK yang diterbitkan           | 21.278    | 19.822    | 41.100 | 23.707    | 22.198    | 45.905 |
| 2.  | Jumlah Penduduk Wajib KTP                     | 22.838    | 21.426    | 44.264 | 23.707    | 22.198    | 45.905 |
| 3.  | Persentase penduduk yang memiliki KTP ber-NIK | 93,17     | 92,51     | 92,85  | 100,00    | 100,00    | 100,00 |

Sumber : Dinas Kependudukan dan Capil Kab. Konawe Utara, Tahun 2021

Selain cakupan penerbitan KTP, indikator SPM yang juga dilaksanakan Kabupaten Konawe Utara dalam pelayanan dokumen kependudukan adalah cakupan penerbitan akta kelahiran. Akta kelahiran merupakan salah satu dokumen hasil pencatatan sipil yang meregistrasi setiap kelahiran sebagai peristiwa kependudukan.

Cakupan penerbitan akta kelahiran adalah cakupan penduduk lahir yang memperoleh akta kelahiran sebagai bentuk registrasi kependudukan sesuai dengan standar pelayanan tujuh hari harus selesai diterbitkan.

Penerbitan akta kelahiran dilaksanakan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil melalui serangkaian kegiatan yang meliputi penyebarluasan informasi publik tentang pelayanan akta kelahiran, registrasi setiap kelahiran dan penerbitan akta kelahiran dari setiap peristiwa kelahiran di tahun bersangkutan. Pencapaian cakupan penerbitan akta kelahiran di Kabupaten Konawe Utara dari tahun 2015 hingga tahun 2020 disajikan pada Tabel 2.57.

**Tabel 2.57.**  
**Cakupan Penerbitan Akta Kelahiran**  
**di Kabupaten Konawe Utara**

| No. | Indikator Kinerja   | Capaian |        |        |        |        |        |
|-----|---|---------|--------|--------|--------|--------|--------|
|     |   | 2015    | 2016   | 2017   | 2018   | 2019   | 2020   |
| 1.  | Jumlah penduduk yang lahir dan memperoleh akta kelahiran di tahun N | 13.127  | 16.409 | 20.511 | 25.639 | 4.310  | 22.558 |
| 2.  | Jumlah kelahiran di tahun N   | 17.171  | 19.865 | 22.719 | 27.650 | 4.310  | 26.894 |
| 3.  | Persentase penerbitan akta kelahiran                                | 76,45   | 82,60  | 90,28  | 92,72  | 100,00 | 83,88  |

*Sumber : Dinas Kependudukan dan Capil Kab. Konawe Utara, Tahun 2021*

### 2.3.2.8 Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

Pemberdayaan Masyarakat Desa adalah upaya mengembangkan kemandirian dan kesejahteraan masyarakat dengan meningkatkan pengetahuan, sikap, keterampilan, perilaku, kemampuan, kesadaran, serta memanfaatkan sumberdaya melalui penetapan kebijakan, program, kegiatan, dan pendampingan yang sesuai dengan esensi masalah prioritas kebutuhan masyarakat Desa. Pemberdayaan masyarakat atau dalam kata lain community-development merupakan salah satu metode gerakan yang digunakan dalam menjalankan pembangunan masyarakat, baik dalam aspek ekonomi, sosial budaya, pendidikan, kesehatan, atau kombinasi semua aspek tersebut.

Pemerintah Kabupaten Konawe Utara melakukan pemberdayaan masyarakat desa melalui berbagai program dan kegiatan fasilitasi, seperti pelaksanaan program Jumat Berkah berupa pelayanan, penyuluhan, pemberian bantuan dan melihat langsung potensi desa serta kendala yang dihadapi masyarakat untuk diselesaikan bersama masyarakat desa. Pemerintah kabupaten juga melakukan pendampingan dan penguatan Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (PKK) di setiap desa. Upaya-upaya lain seperti pengembangan kapasitas masyarakat desa, kaderisasi masyarakat desa dalam rangka pelaksanaan Undang-Undang Desa, serta fasilitasi musyawarah pembangunan desa, fasilitasi pengembangan kebun pekarangan di desa. Upaya-upaya tersebut telah memberikan hasil yang cukup memuaskan, hal ini dapat dilihat pada peningkatan Indeks Desa Membangun (IDM) Kabupaten Konawe Utara Tahun 2020 sebesar 0,5855 dibanding Tahun 2019 sebesar 0,5429. Adapun capaian kinerja pada urusan pemberdayaan masyarakat dan desa dapat dilihat pada tabel berikut :

**Tabel 2.58.**  
**Kinerja Pemberdayaan Masyarakat dan Desa**  
**Di Kabupaten Konawe Utara**

| No. | Uraian                      | Tahun  |        |        |        |        |
|-----|-----------------------------|--------|--------|--------|--------|--------|
|     |                             | 2016   | 2017   | 2018   | 2019   | 2020   |
| 1.  | Indeks Desa Membangun (IDM) | 0,5219 | 0,5236 | 0,5352 | 0,5429 | 0,5855 |
| 2.  | Persentase BPD Aktif        | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 3.  | Persentase LPM Berprestasi  | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 4.  | Persentase PKK Aktif        | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 5.  | Persentase Posyandu Aktif   | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |

Sumber : DPMD dan Pemdes Kab. Konawe Utara, Tahun 2021

### 2.3.2.9 Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

Cakupan sasaran Pasangan Usia Subur (PUS) menjadi peserta KB aktif adalah jumlah peserta KB aktif (PA) dibandingkan dengan seluruh PUS dalam suatu wilayah pada kurun waktu tertentu. Jumlah peserta PUS pada tahun 2020 mengalami sedikit penurunan dibandingkan dengan tahun 2019, tampak pada tabel berikut ini:

**Tabel 2.59.**  
**Kepersertaan Keluarga Berencana**  
**di Kabupaten Konawe Utara**

| No. | Uraian                        | 2017   |   | 2018   |   | 2019   |   | 2020   |   |
|-----|-------------------------------|--------|---|--------|---|--------|---|--------|---|
|     |                               | Jumlah | % | Jumlah | % | Jumlah | % | Jumlah | % |
| 1.  | PUS                           | 13.882 |   | 16.979 |   | 18.279 |   | 18.276 |   |
| 2.  | Peserta KB Aktif              | 11.897 |   | 13.256 |   | 13.482 |   | 13.959 |   |
| 3.  | Peserta KB MKJP               | 15     |   | 17     |   | 22     |   | 22     |   |
| 4.  | Peserta KB Pria               | 6      |   | 13     |   | 29     |   | 29     |   |
| 5.  | Peserta KB Baru               | 1.087  |   | 1.878  |   | 1.945  |   | 2.062  |   |
| 6.  | PUS Unmetneed                 | 14     |   | 19     |   | 21     |   | 18     |   |
| 7.  | Rasio Ekseptor KB Per 100 PUS | 79,72  |   | 81,84  |   | 82,62  |   | 82,73  |   |

Sumber : DPPKB Kab. Konawe Utara, Tahun 2021

**Tabel 2.60.**  
**Jumlah Kasus Pernikahan dan Perceraian yang tercatat**

| No. | Uraian                   | Capaian |      |
|-----|--------------------------|---------|------|
|     |                          | 2019    | 2020 |
| 1.  | Pernikahan yang tercatat | 397     | 418  |
| 2.  | Perceraian yang tercatat | -       | -    |

Sumber : BPS, Konawe Utara Dalam Angka Tahun 2021

**Tabel 2.61.**  
**Jumlah Kampung KB di Kabupaten Konawe Utara**

| No. | Uraian          | Lokasi                              | Ket. |
|-----|-----------------|-------------------------------------|------|
| 1.  | Kec. Wiwirano   | - Desa Lamparinga<br>- Desa Wawoheo |      |
| 2.  | Kec. Landawe    | - Desa Matabenua<br>- Desa Matabaho |      |
| 3.  | Kec. Langgikima | - Desa Pariama<br>- Desa Mekar Jaya |      |
| 4.  | Kec. Oheo       | - Desa Mopute                       |      |
| 5.  | Kec. Asera      | - Desa Puuwanggudu                  |      |
| 6.  | Kec. Andowia    | - Desa Amolame                      |      |
| 7.  | Kec. Molawe     | - Desa Tapuemea                     |      |

| No. | Uraian                | Lokasi               | Ket. |
|-----|-----------------------|----------------------|------|
| 8.  | Kec. Lasolo           | - Desa Lalowaru      |      |
| 9.  | Kec. Lembo            | - Desa Pasir Putih   |      |
| 10. | Kec. Sawa             | - Desa Ulusawa       |      |
| 11. | Kec. Motui            | - Desa Poni - Poniki |      |
| 12. | Kec. Lasolo Kepulauan | - Desa Boenaga       |      |
| 13. | Kec. Wawolesea        | - Desa Tanjung Bunga |      |

Sumber : Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Tahun 2021

### 2.3.2.10 Perhubungan

Kabupaten Konawe Utara sebagai pintu gerbang dari wilayah utara Provinsi Sulawesi Tenggara telah memiliki beberapa fasilitas prasarana perhubungan yang mendukung arus transportasi baik barang maupun penumpang. Tabel 2.62 memperlihatkan prasarana perhubungan yang terdapat di Kabupaten Konawe Utara.

**Tabel 2.62.**  
**Sarana dan Prasarana Perhubungan**  
**di Kabupaten Konawe Utara**

| No | Jenis Prasarana Moda             | Jumlah (Unit) | Lokasi          |
|----|----------------------------------|---------------|-----------------|
| 1. | Transportasi Udara               | <b>1</b>      |                 |
|    | - Heliport                       | 1             | Kel. Wanggudu   |
| 2. | Transportasi Perairan            | <b>20</b>     | -               |
|    | - Pelabuhan Laut                 | 1             | Ds. Lameruru,   |
|    |                                  | 1             | Kel. Molawe     |
|    |                                  | 1             | Ds. Molore      |
|    |                                  | 1             | Ds. Boenaga     |
|    |                                  | 1             | Ds. Waturambaha |
|    | - Dermaga/Tambatan Perahu (Laut) | 1             | Ds. Tapungggaya |
|    |                                  | 1             | Kel. Molawe     |
|    |                                  | 1             | Ds. Pasir Putih |
|    |                                  | 1             | Ds. Tokowuta    |
|    |                                  | 2             | Ds. Taipa       |

| No | Jenis Prasarana Moda             | Jumlah (Unit) | Lokasi            |
|----|----------------------------------|---------------|-------------------|
|    |                                  | 1             | Kel. Tinobu       |
|    |                                  | 1             | Ds. Kampo Cina    |
|    |                                  | 1             | Ds. Ulu Sawa      |
|    | - Pelabuhan Sungai dan Danau     | 1             | Kel. Lamona       |
|    |                                  | 2             | Andowia           |
|    |                                  | 1             | Ds. Bandaeha-Oheo |
|    |                                  | 1             | Ds. Lambuluo      |
|    |                                  | 1             | Ds. Banggina      |
| 3. | Transportasi Darat               | 1             |                   |
|    | - Terminal Angkutan Darat Type B | 1             | Ds. Lahimbua      |

Sumber : Dinas Perhubungan Kab. Konawe Utara, 2021

**Tabel 2.63.**  
**Prasarana Terminal Khusus/Terminal Untuk Kepentingan Sendiri**  
**Di Kabupaten Konawe Utara Tahun 2008 - 2021**

| No  | Jenis Prasarana                         | Lokasi                         |                    | Status Operasional |
|-----|---|--------------------------------|--------------------|--------------------|
|     |   | Koordinat                      | Tempat             |                    |
| 1.  | Tersus PT. Cinta Djaya                  | 3°33'54.00"S // 122°12'11.89"T | Ds. Mandiodo       | Beroperasi         |
| 2.  | Tersus PT. Stargate Resource Pasific    | 3°18'27.73"S // 122°17'09.45"T | Ds. Molore         | Beroperasi         |
| 3.  | Tersus PT. Stargate Resource Pasific    | 3°18'40.57"S // 122°17'25.90"T | Ds. Molore         | Beroperasi         |
| 4.  | Tersus PT. Konawe Nikel Nusantara       | 3°23'32.65"S // 122°15'06.23"T | Ds. Morombo        | Beroperasi         |
| 5.  | Tersus. PT. Sriwijaya Raya              | 3°33'51.80"S // 122°12'37.76"T | Ds. Tapungaya      | Beroperasi         |
| 6.  | Tersus PT. Pertambangan Bumi Indonesia  | 3°23'46.24"S // 122°14'31.47"T | Ds. Morombo Pantai | Beroperasi         |
| 7.  | Tersus PT. Makmur Lestari Primatama     | 3°19'30.10"S // 122°17'39.70"T | Ds. Molore         | Belum Beroperasi   |
| 8.  | Tersus PT. Cipta Djaya Surya            | 3°19'50.20"S // 122°17'27.49"T | Ds. Molore         | Beroperasi         |
| 9.  | Tersus PT. Bumi Konawe Abadi            | 3°47'45.08"S // 122°27'51.66"T | Ds. Pudonggala     | Beroperasi         |
| 10. | Tersus PT. Bumi Konawe Minerina         | 3°34'50.79"S // 122°11'56.03"T | Ds. Mandiodo       | Beroperasi         |
| 11. | Tersus PT. Bumi Konawe Minerina         | 3°34'36.40"S // 122°14'07.66"T | Ds. Tapungaya      | Beroperasi         |
| 12. | Tersus PT. Dwimitra Multiguna Sejahtera | 3°39'59.50"S // 122°15'34.20"T | Ds. Tapunopaka     | Beroperasi         |
| 14. | Tersus PT. Dwimitra Multiguna           | 3°21'25.30"S //                | Ds. Molore         | Beroperasi         |

| No  | Jenis Prasarana                           | Lokasi                         |                    | Status Operasional |
|-----|---|--------------------------------|--------------------|--------------------|
|     |   | Koordinat                      | Tempat             |                    |
|     | Sejahtera                                 | 122°17'34.23"T                 |                    |                    |
| 15. | Tersus PT. Pernick Sultra                 | 3°21'44.94"S // 122°19'30.58"T | Ds. Waturambaha    | Beroperasi         |
| 16. | Tersus PT. Sultra Jembatan Mas            | 3°24'9.02"S // 122°23'13.89"T  | Ds. Waturambaha    | Belum Beroperasi   |
| 17. | Tersus PT. Adhi Kartiko Pratama           | 3°16'39.99"S // 122°18'36.18"T | Ds. Lameruru       | Beroperasi         |
| 18. | Tersus PT. Kembar Emas Sultra             | 3°17'19.68"S // 122°18'09.51"T | Ds. Lameruru       | Beroperasi         |
| 19. | Tersus PT. Sinar Jaya Utama Sultra        | 3°22'12.92"S // 122°20'25.17"T | Ds. Waturambaha    | Beroperasi         |
| 20. | Tersus PT. Wanagon Anoa Indonesia         | 3°34'38.96"S // 122°11'53.96"T | Ds. Mandiodo       | Beroperasi         |
| 21. | Tersus PT. Bosowa Mining                  | 3°16'48.48"S // 122°18'27.63"T | Ds. Lameruru       | Beroperasi         |
| 22. | Tersus PT. Daka Group                     | 3°26'59.32"S // 122°23'02.25"T | Ds. Boedinge       | Beroperasi         |
| 23. | Tersus PT. Mallibu                        | 3°24'08.25"S // 122°14'34.16"T | Ds. Morombo Pantai | Tidak Beroperasi   |
| 24. | Tersus PT. Cipta Djaya Surya              | 3°23'31.07"S // 122°14'37.98"T | Ds. Morombo Pantai | Beroperasi         |
| 25. | Tersus PT. Manunggal Sarana Surya Pratama | 3°24'14.63"S // 122°23'19.76"T | Ds. Waturambaha    | Beroperasi         |
| 26. | Tersus PT. Paramitha Persadatama          | 3°26'22.62"S // 122°23'01.79"T | Ds. Boedinge       | Beroperasi         |
| 27. | Tersus PT. Bhumi Karya Utama              | 3°22'52.37"S // 122°16'27.79"T | Ds. Morombo        | Beroperasi         |
| 28. | Tersus PT. Tristaco Mineral Makmur        | 3°22'22.22"S // 122°16'41.20"T | Ds. Morombo        | Beroperasi         |
| 29. | Tersus PT. Karyatama Konawe Utara         | 3°16'45.18"S // 122°18'30.49"T | Ds. Lameruru       | Belum Beroperasi   |
| 30. | Tersus PT. Duta Tambang Gunung Perkasa    | 3°23'29.88"S // 122°16'17.12"T | Ds. Morombo        | Beroperasi         |
| 31. | Tersus PT. Binanga Hartama Raya           | 3°22'54.51"S // 122°18'17.83"T | Ds. Morombo        | Beroperasi         |
| 32. | Tersus PT. Bhumi Swadaya Mineral          | 3°16'26.78"S // 122°18'39.91"T | Ds. Lameruru       | Beroperasi         |
| 33. | Tersus PT. Bososi Pratama                 | 3°23'57.87"S // 122°14'27.84"T | Ds. Morombo Pantai | Beroperasi         |
| 34. | Tersus PT. Indra Bakti Mustika            | 3°17'14.85"S // 122°18'14.35"T | Ds. Lameruru       | Belum Beroperasi   |
| 35. | Tersus PT. Roshini Indonesia              | 3°23'00.78"S // 122°21'12.71"T | Ds. Waturambaha    | Beroperasi         |
| 36. | Tersus PT. Tiran Indonesia                | 3°16'24.50"S // 122°18'48.90"T | Ds. Lameruru       | Beroperasi         |
| 37. | Tersus Pt. Primastian Metal Pratama       | 3°27'41.76"S // 122°21'56.14"T | Ds. Boedinge       | Beroperasi         |
| 38. | Tersus PT. Global Citra Konawe Utara      | 3°47'43.60"S // 122°27'37.67"T | Ds. Pudonggala     | Beroperasi         |
| 39. | Tersus PT. Antam                          | 3°27'58.48"S // 122°18'4.22"T  | Ds. Tapunopaka     | Beroperasi         |
| 40. | Tersus PT. Alam Raya Indah                | 3°22'09.00"S // 122°17'05.84"T | Ds. Morombo        | Beroperasi         |

| No  | Jenis Prasarana                   | Lokasi                         |                 | Status Operasional |
|-----|-----------------------------------|--------------------------------|-----------------|--------------------|
|     |                                   | Koordinat                      | Tempat          |                    |
| 41. | Tersus PT. Titan Agro Abadi       | 3°24'27.64"S // 122°14'35.10"T | Ds. Morombo     | Belum Beroperasi   |
| 42. | Tersus PT. Jety Baraya Sulawesi   | 3°34'3.46"S // 122°12'28.86"T  | Ds. Mandiodo    | Beroperasi         |
| 43. | Tersus PT. Kabaena Kromit Pratama | 3°34'24.46"S // 122°11'51.83"T | Ds. Mandiodo    | Beroperasi         |
| 44. | Tersus PT. Cinta Djaya            | 3°33'55.17"S // 122°12'0.51"T  | Ds. Mandiodo    | Beroperasi         |
| 45. | Tersus PT. Rizki Sinar Biokas     | 3°27'48.37"S // 122°22'3.46"T  | Ds. Boedinge    | Belum Beroperasi   |
| 46. | Tersus PT. Apollo Nikel Indonesia | 3°22'52.62"S // 122°22'0.15"T  | Ds. Waturambaha | Belum Beroperasi   |
| 47. | Galangan PT. Buana Karya Shipyard | 3°23'45.28"S // 122°15'19.08"T | Ds. Morombo     | Beroperasi         |

Sumber : Dinas Perhubungan Kabupaten Konawe Utara, 2021

Angkutan umum yang ada di Kabupaten Konawe Utara berupa armada bis angkutan penumpang sedangkan armada lain seperti kereta api, kapal laut, dan pesawat udara tidak terdapat di Kabupaten Konawe Utara.

**Tabel 2.64.**  
**Jumlah Sarana Transportasi Darat, Laut, Sungai dan Danau**  
**Di Kabupaten Konawe Utara**

| No | Jenis Sarana Angkutan | Jumlah Sarana |      |      |      |      |       |
|----|-----------------------|---------------|------|------|------|------|-------|
|    |                       | 2016          | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021  |
| 1. | Bus Besar             | 6             | 6    | 5    | 4    | 4    | 4     |
| 2. | Bus Sedang            | 5             | 5    | 6    | 10   | 10   | 56    |
| 3. | Bus Kecil             | 24            | 24   | 34   | 42   | 42   | 1.723 |
| 4. | Truck Besar           | 40            | 40   | 45   | 56   | 56   | 70    |
| 5. | Truck Sedang          | 26            | 26   | 30   | 39   | 39   | 212   |
| 6. | Truck Kecil/Pick UP   | 3             | 3    | 37   | 44   | 65   | 622   |
| 7. | Perahu Jukung         | 497           | 497  | 435  | 405  | 405  | 428   |
| 8. | Perahu Ketek          | 201           | 201  | 248  | 196  | 196  | 190   |
| 9. | Speed Boat            | 15            | 15   | 20   | 28   | 28   | 35    |

Sumber : Dinas Perhubungan Kabupaten Konawe Utara, 2021

Kedepan perlu dilakukan upaya-upaya guna meningkatkan penggunaan angkutan umum di masyarakat, antara lain melakukan kajian tentang pemerataan trayek angkutan umum pada pusat-pusat kegiatan yang belum tersentuh oleh angkutan umum, peningkatan kualitas pelayanan angkutan umum, memperbaiki sistem serta sarana dan prasarana fisik angkutan umum melalui Program peningkatan pelayanan angkutan, kegiatan pengumpulan database pelayanan angkutan, survei angkutan umum dan tradisional, dan survei angkutan barang.

### 2.3.2.11 Komunikasi dan Informatika

Pelayanan dalam urusan komunikasi dan informatika dalam upaya penyebarluasan informasi maupun efisiensi dalam komunikasi. Dalam kurun waktu lima tahun terakhir, perkembangan media komunikasi dan informasi di Kabupaten Konawe Utara memperlihatkan pertumbuhan yang cukup pesat, hal ini tentunya sangat didukung dengan kebutuhan masyarakat akan media komunikasi dan informatika yang terus meningkat. Gambaran tentang perkembangan pelayanan pada urusan komunikasi dan informatika dapat dilihat pada tabel berikut ini :

**Tabel 2.65.**  
**Kinerja Bidang Komunikasi dan Informatika**  
**di Kabupaten Konawe Utara**

| No. | Uraian   | 2017   | 2018   | 2019   | 2020   |
|-----|--|--------|--------|--------|--------|
| 1.  | Persentase wilayah yang terlayani jaringan mobile broadband                          | 72,62  | 72,89  | 72,92  | 76,02  |
| 2.  | Jumlah Kecamatan Yang Terlayani  | 7 Kec  | 7 Kec. | 7 Kec. | 7 Kec. |
| 3.  | Jumlah penduduk yang menggunakan handphone.  | 25.879 | 26.763 | 29.651 | 29.712 |
| 4.  | Jumlah BTS   | 19     | 19     | 19     | 21     |
| 5.  | Jumlah Penerapan sistem informasi/aplikasi Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah | 11     | 12     | 13     | 20     |

Sumber : Dinas Komunikasi dan Informatika Kab. Konawe Utara, Tahun 2021

Keberadaan website milik pemerintah daerah diharapkan dapat meningkatkan penyebarluasan informasi penyelenggaraan pembangunan yang dilaksanakan oleh pemerintah daerah kepada masyarakat. Pemerintah Kabupaten Konawe Utara memiliki satu website utama dengan alamat <http://www.konaweutarakab.go.id/>, dengan 9 subdomain. Subdomain untuk OPD sebagaimana disajikan pada Tabel 2.66.

**Tabel 2.66.**  
**Alamat Subdomain Website**  
**Pemerintah Kabupaten Konawe Utara dan Penerapan Sistem**  
**Informasi/Aplikasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah**

| No. | Instansi                              | Domain/Subdomain  |
|-----|---------------------------------------|---|
| 1.  | Pemerintah Daerah                     | <a href="http://www.konaweutarakab.go.id/">http://www.konaweutarakab.go.id/</a>                                     |
| 2.  | Bappeda                               | <a href="http://www.eplanning.bappeda.konaweutarakab.go.id/">http://www.eplanning.bappeda.konaweutarakab.go.id/</a> |
| 3.  | Dinas PU                              | <a href="http://simtaru.puprkonaweutarakab.id/#">http://simtaru.puprkonaweutarakab.id/#</a>                         |
| 4.  | DPKAD                                 | <a href="http://konut.simda.online">http://konut.simda.online</a>   |
|     |                                       | <a href="http://ssh.konaweutarakab.go.id">http://ssh.konaweutarakab.go.id</a>                                       |
| 5.  | Bagian Organisasi                     | <a href="http://e-kinerja.konaweutarakab.go.id">http://e-kinerja.konaweutarakab.go.id</a>                           |
| 6.  | Dinas Komunikasi dan Informatika      | <a href="http://diskominfo.konaweutarakab.go.id">http://diskominfo.konaweutarakab.go.id</a>                         |
|     |                                       | <a href="http://ppid.konaweutarakab.go.id">http://ppid.konaweutarakab.go.id</a>                                     |
| 7.  | BKPSDM                                | <a href="http://bkpsdm.konaweutarakab.go.id">http://bkpsdm.konaweutarakab.go.id</a>                                 |
|     |                                       | <a href="http://e-sila.skj.konaweutarakab.go.id">http://e-sila.skj.konaweutarakab.go.id</a>                         |
| 8.  | Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu | <a href="http://dpmptsp.konaweutarakab.go.id">http://dpmptsp.konaweutarakab.go.id</a>                               |
| 9.  | Catatan Sipil dan Kependudukan        | <a href="http://siak-online.konaweutarakab.go.id">http://siak-online.konaweutarakab.go.id</a>                       |
|     |                                       | <a href="http://dukcapilkonut.online">http://dukcapilkonut.online</a>   |

Sumber : Dinas Komunikasi dan Informatika Kab. Konawe Utara, Tahun 2021

### 2.3.2.12 Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah

Layanan umum bidang urusan koperasi dan UMKM diarahkan pada pengembangan koperasi dan UMKM menjadi unit usaha yang kuat, maju, dan mandiri serta memiliki daya saing dengan fokus pada revitalisasi koperasi serta fasilitasi koperasi dan UMKM. Perkembangan Koperasi dan UMKM Kabupaten Konawe Utara dapat dilihat pada tabel berikut.

**Tabel 2.67.**  
**Persentase Koperasi Aktif**  
**di Kabupaten Konawe Utara**

| No | Uraian                    | 2016  | 2017  | 2018  | 2019  | 2020  |
|----|---------------------------|-------|-------|-------|-------|-------|
| 1  | Jumlah Koperasi           | 268   | 268   | 287   | 287   | 296   |
| 2  | Jumlah Koperasi Aktif     | 228   | 200   | 224   | 224   | 227   |
| 3  | Persentase Koperasi Aktif | 85,07 | 74,63 | 78,05 | 78,05 | 76,69 |

Sumber : Dinas Koperasi & UMKM Kab. Konawe Utara, 2021

**Tabel 2.68.**  
**Perkembangan Modal dan aset Koperasi**  
**di Kabupaten Konawe Utara**

| No | Uraian                  | 2017    | 2018    | 2019    | 2020    |
|----|-------------------------|---------|---------|---------|---------|
| 1  | Modal Sendiri (Rp.Juta) | 4.071   | 3.871   | 3.961   | 3.968   |
| 2  | Modal Luar (Rp.Juta)    | 3.763   | 3.563   | 3.763   | 3.763   |
| 3  | Aset (Rp.Ribu)          | 610.684 | 660.684 | 675.582 | 675.582 |
| 4  | Omzet (Rp.Ribu)         | 596.740 | 698.740 | 712.500 | 705.375 |

Sumber : Dinas Koperasi & UMKM Kab. Konawe Utara, 2021

Sasaran pembangunan dalam mengembangkan UMKM di Kabupaten Konawe Utara antara lain meningkatnya kinerja, produktivitas usaha mikro kecil dan menengah (UMKM), meningkatnya akses kelembagaan keuangan dan permodalan pada UMKM/Industri Kecil dan Menengah (IKM), meningkatnya sumber daya manusia (SDM) pengelola koperasi UMKM/IKM, meningkatnya kualitas dan partisipasi masyarakat dalam pengembangan UKM, serta terwujudnya masyarakat yang berjiwa wirausaha (entrepreneur) tinggi dan mampu mengembangkan potensi dan sumber daya yang ada.

Upaya yang telah dilakukan antara lain fasilitasi UMKM, pelatihan manajemen ekspor, impor, dan pelatihan penggunaan teknologi. Perkembangan UKM di Kabupaten Konawe Utara menunjukkan hal yang positif bagi peningkatan aktivitas perekonomian. Pada tahun 2020 jumlah UMKM di Kabupaten Konawe Utara mencapai sebanyak 2.570 unit, meningkat dibanding tahun 2019.

**Tabel 2.69.**  
**Pertumbuhan Jumlah UMKM**  
**di Kabupaten Konawe Utara**

| No                 | Uraian         | 2016  | 2017  | 2018  | 2019  | 2020  |
|--------------------|----------------|-------|-------|-------|-------|-------|
| 1.                 | Usaha Mikro    | 957   | 1.176 | 1.223 | 1.021 | 1.079 |
| 2.                 | Usaha Kecil    | 1.053 | 1.452 | 1.561 | 1.323 | 1.364 |
| 3.                 | Usaha Menengah | 86    | 106   | 128   | 133   | 132   |
| <b>Jumlah UMKM</b> |                | 1.530 | 2.096 | 2.734 | 2.912 | 2.477 |

Sumber : Dinas Koperasi & UMKM Kab. Konawe Utara, 2021

**Tabel 2.70.**  
**Penyerapan Tenaga Kerja Pada UMKM**  
**di Kabupaten Konawe Utara**

| No                                      | Uraian         | 2016   | 2017   | 2018   | 2019   | 2020   |
|---|----------------|--------|--------|--------|--------|--------|
| 1.                                      | Usaha Mikro    | 1.357  | 1.471  | 1.490  | 1.506  | 1.392  |
| 2.                                      | Usaha Kecil    | 2.356  | 2.364  | 2.484  | 2.559  | 912    |
| 3.                                      | Usaha Menengah | 402    | 418    | 429    | 457    | 270    |
| Jumlah Tenaga Kerja                     |                | 3.928  | 3.928  | 4.115  | 4.253  | 4.403  |
| Angkatan Kerja                          |                | 27.499 | 28.382 | 31.104 | 29.535 | 33.592 |
| Rasio Penyerapan Tenaga Kerja Pada UMKM |                | 14,28% | 13,84% | 13,23% | 14,40% | 13,11% |

Sumber : Dinas Koperasi & UMKM Kab. Konawe Utara, 2021

### 2.3.2.13 Penanaman Modal

Dalam proses pembangunan, investasi memiliki peranan yang sangat penting. Investasi menentukan dinamika dan akselerasi pembangunan yang secara langsung maupun tidak langsung dapat meningkatkan kesejahteraan rakyat. Jika proses investasi berlangsung baik maka perekonomian akan tumbuh dengan baik selama proses investasi tersebut menghasilkan output yang efisien.

Kabupaten Konawe Utara yang kaya dengan berbagai potensi sumber daya alam, menjadi perhatian khusus bagi para penanam modal dalam negeri (1) maupun penanam modal asing (PMA) untuk berinvestasi. Kondisi ini diperlihatkan pada tabel berikut ini :

**Tabel 2.71.**  
**Jumlah dan Nilai Investasi PMDN/PMA**  
**di Kabupaten Konawe Utara**

| Tahun | Jumlah Investor |     |       | Nilai Investasi (Rp.Milyar) | Peningkatan nilai realisasi (Rp. Milyar) |
|-------|-----------------|-----|-------|-----------------------------|--|
|       | PMDN            | PMA | Total |                             |  |
| 2012  | 0               | 9   | 9     | -                           | -  |
| 2013  | 0               | 5   | 5     | -                           | -  |
| 2014  | 2               | 5   | 7     | -                           | -  |
| 2015  | 0               | 1   | 1     | 1,2                         | 1,2                                      |
| 2016  | 1               | 1   | 2     | 1,3                         | 0,1                                      |
| 2017  | 1               | 1   | 2     | 3,7                         | 2,4                                      |
| 2018  | 1               | 6   | 7     | 1,44                        | -2,26                                    |
| 2019  | 2               | 6   | 8     | 146,5                       | 145,06                                   |
| 2020  | 2               | 6   | 8     | 163,88                      | 17,38                                    |

Sumber : Dinas PM dan Pelayanan Terpadu Kab. Konawe Utara, Tahun 2021

### 2.3.2.14 Kepemudaan dan Olahraga

Kapasitas pemerintah daerah dalam memberdayakan masyarakat untuk berperan serta dalam pembangunan khususnya generasi muda yang tergabung dalam organisasi dan komunitas melalui pengembangan potensi pemuda dan peningkatan peran pemuda dalam pembangunan diantaranya melalui pelatihan bela negara, karang taruna, pemuda dan sosial, serta kader anti narkoba.

Jumlah organisasi olahraga di Kabupaten Konawe Utara mengalami peningkatan. Peningkatan organisasi olahraga di Kabupaten Konawe Utara tersebut menunjukkan keberhasilan Pemerintah Kabupaten Konawe Utara dalam memasyarakatkan olahraga.

**Tabel 2.72.**  
**Perkembangan Olahraga**  
**di Kabupaten Konawe Utara**

| No. | Uraian                   | Tahun |      |      |      |      |
|-----|--------------------------|-------|------|------|------|------|
|     |                          | 2016  | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
| 1.  | Jumlah Organisasi        | 9     | 12   | 14   | 16   | 16   |
| 2.  | Jumlah Atlit yang dibina | 1     | 1    | 1    | 4    | 11   |
| 3.  | Jumlah klub olahraga     | 17    | 20   | 20   | 21   | 21   |
| 4.  | Jumlah sarana olahraga   | 247   | 267  | 294  | 295  | 300  |

Sumber : Dispora Konawe Utara, Tahun 2021

Pada Pekan olahraga tingkat Provinsi Sulawesi Tenggara tahun 2010 Kabupaten Konawe Utara menduduki peringkat 14, pada tahun 2014 peringkat 11, dan pada tahun 2018 peringkat 6 dari 17 kabupaten/kota. Melihat organisasi olahraga yang semakin berkembang, perlu upaya pemerintah dalam mengembangkan potensi sumberdaya manusia olahraga yaitu pelatih, wasit, pembina, klub olahraga dan atlet. Selain itu juga perlu melengkapi sarana dan prasarana olahraga yang dapat dimanfaatkan untuk latihan maupun pertandingan.

### 2.3.2.15 Statistik

Urusan statistik di Kabupaten Konawe Utara masih ditangani oleh Pemerintah Pusat melalui Badan Pusat Statistik (BPS) yang bertempat di Wanggudu. Namun demikian, karena melihat bahwa di segenap kegiatan statistik perlu diadakan keseragaman dan koordinasi, maka Pemerintah Kabupaten Konawe Utara bekerjasama dengan BPS melaksanakan beberapa program yang hasilnya

dimanfaatkan oleh Pemerintah Kabupaten Konawe Utara sebagai bahan penyusunan kebijakan perencanaan pembangunan, yaitu terdiri dari 4 (empat) publikasi; Buku Daerah Dalam Angka, Buku PDRB, Statistik Daerah, dan Statistik Kesejahteraan.

### 2.3.2.16 Persandian

Bagi pemerintah daerah, masalah persandian sebagaimana dimuat dalam Pasal 12 ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, masuk menjadi salah satu urusan wajib yang tidak berkaitan dengan pelayanan dasar. Pengendalian sistem keamanan informasi merupakan pelaksanaan dari urusan persandian. Beberapa kegiatan yang dilaksanakan antara lain, meliputi: Sosialisasi Keamanan Informasi ; Pemeliharaan Jaringan telekomunikasi; Kegiatan Forum Komunikasi Sandi Daerah; Koordinasi persandian pusat dan daerah.

### 2.3.2.17 Kebudayaan

Salah satu potensi sebagai penyangga utama wisata di Kabupaten Konawe Utara adalah potensi budaya baik yang berupa warisan budaya benda maupun warisan budaya tak benda. Upaya pelestarian budaya meliputi perlindungan, pengembangan dan pemanfaatan kesenian, nilai tradisi budaya dan warisan budaya melalui festival.

**Tabel 2.73.**  
**Kinerja Urusan Kebudayaan**  
**di Kabupaten Konawe Utara**

| No. | Uraian                                   | Tahun |      |      |      |      |
|-----|--|-------|------|------|------|------|
|     |  | 2016  | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
| 1.  | Penyelenggaraan Festival Seni dan Budaya | -     | 1    | -    | -    | -    |
| 2.  | Sarana Penyelenggaraan Seni dan Budaya   | 1     | 1    | 1    | 1    | 1    |
| 3.  | Situs Cagar Budaya Yang Dilindungi       | 4     | 4    | 4    | 4    | 4    |
| 4.  | Kawasan Cagar Budaya Yang Dilindungi     | -     | -    | -    | -    | -    |
| 5.  | Bagunan Cagar Budaya Yang Dilindungi     | -     | -    | -    | -    | -    |

*Sumber : Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Konawe Utara, Tahun 2021*

### 2.3.2.18 Perpustakaan

Urusan perpustakaan selama tahun 2017 hingga 2020 masih dibutuhkan upaya yang maksimal dari pemerintah daerah dalam memberikan pelayanan dasar kepada masyarakat sehingga capaian kinerja per tahun bidang perpustakaan semakin meningkat. Capaian kinerja yang telah dicapai dapat dilihat pada tabel sebagai berikut :

**Tabel 2.74.**  
**Kinerja Urusan Perpustakaan**  
**di Kabupaten Konawe Utara**

| No. | Indikator Kinerja  | Capaian |       |       |       |       |
|-----|--|---------|-------|-------|-------|-------|
|     |  | 2016    | 2017  | 2018  | 2019  | 2020  |
| 1.  | Jumlah pengunjung perpustakaan                                     | 588     | 733   | 769   | 825   | 219   |
| 2.  | Jumlah judul buku yang tersedia di perpustakaan daerah             | 1.842   | 2.311 | 2.286 | 2.291 | 2.291 |
| 3.  | Jumlah eksamplar koleksi buku yang tersedia di perpustakaan daerah | 6.035   | 7.449 | 7.573 | 7.624 | 7.624 |
| 4.  | Jumlah desa/kelurahan yang mendapatkan bantuan buku                | 3       | 5     | 5     | 6     | -     |

Sumber : Dinas Perpustakaan Kab. Konawe Utara, Tahun 2021

### 2.3.2.19 Kearsipan

Sesuai dengan Permendagri Nomor 21 Tahun 2011, salah satu urusan yang ditangani daerah adalah kearsipan. Urusan kearsipan diarahkan untuk penyelamatan dan pelestarian arsip daerah serta peningkatan kualitas pelayanan dalam bidang kearsipan. Arsip sebagai bukti pelaksanaan kegiatan instansi memiliki fungsi strategis dan dinamis. Strategis artinya bahwa informasi yang terekam dalam arsip tidak hanya memiliki nilai guna primer yang berguna bagi instansi pencipta sebagai bahan pengambilan keputusan manajemen, tetapi arsip tentu memiliki nilai guna sekunder yaitu nilai guna kepastian dan informasional yang berguna untuk lembaga lain, orang, dan masyarakat luas. Nilai guna kepastian suatu arsip karena terkait dengan keberadaan instansi, benda, tempat, dan orang. Sementara nilai guna informasional suatu arsip karena terkait dengan terjadinya peristiwa, kebijakan pemerintah, dan lain sebagainya.

Pada urusan Kearsipan yaitu Pengelolaan arsip secara baku dengan indikator kinerja yaitu persentase arsip statis dan dinamis yang diarsipkan dan Peningkatan SDM pengelola kearsipan di Kabupaten Konawe Utara, pada tahun 2020 sebesar 9,88 persen.

### 2.3.3 Fokus Layanan Urusan Pilihan

#### 2.3.3.1 Kelautan dan Perikanan

Undang-undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan, mengamanatkan bahwa pengelolaan perikanan harus dilaksanakan berdasarkan asas manfaat, keadilan, kebersamaan, kemitraan, kemandirian, pemerataan, keterpaduan, keterbukaan, efisiensi, kelestarian, dan pembangunan yang berkelanjutan.

Sasaran pembangunan kelautan dan perikanan adalah mencapai peningkatan produksi dan produktivitas perikanan dalam rangka memenuhi kebutuhan konsumsi ikan, menyediakan bahan baku industri, meningkatkan pendapatan pembudidaya dan nelayan serta memperluas kesempatan berusaha dan kesempatan kerja. Kondisi pengelolaan sektor kelautan dan perikanan di Kabupaten Konawe Utara disajikan pada tabel berikut :

**Tabel 2.75.**  
**Kondisi Pengelolaan Sub Sektor Perikanan**  
**di Kabupaten Konawe Utara**

| No. | Indikator Kinerja                                 | Capaian Kinerja |        |        |        |        |
|-----|---|-----------------|--------|--------|--------|--------|
|     |   | 2016            | 2017   | 2018   | 2019   | 2020   |
| 1.  | Kontribusi Sub Sektor Perikanan Terhadap PDRB (%) | 15,64           | 16,30  | 6,01   | 8,19   | 8,73   |
| 2.  | Produksi Perikanan (Ton)                          |                 |        |        |        |        |
|     | Produksi Perikanan Tangkap (Ton)                  | 12.743          | 13.846 | 14.765 | 15.165 | 15.059 |
|     | Produksi Perikanan Budidaya (Ton)                 | 17.603          | 17.575 | 21.422 | 9.397  | 8.819  |
|     | Produksi Hasil Olahan Perikanan (Ton)             | 975             | 1.017  | 1.145  | 1.503  | 1.378  |
| 3.  | Nilai Hasil Perikanan (Juta Rp.)                  |                 |        |        |        |        |

| No. | Indikator Kinerja                      | Capaian Kinerja |        |        |        |        |
|-----|--|-----------------|--------|--------|--------|--------|
|     |  | 2016            | 2017   | 2018   | 2019   | 2020   |
| 4.  | Konsumsi Ikan (Kg/kap/thn)             | 49,24           | 49,34  | 49     | 49,27  | 49,32  |
| 5.  | Jumlah Unit Pengolahan Ikan            |                 |        |        |        |        |
|     | - Pengasapan Ikan                      | 75              | 82     | 84     | 85     | 88     |
|     | - Penggaraman/Pengeringan              | 245             | 249    | 252    | 255    | 258    |
| 6.  | Jumlah Unit Armada & Alat Tangkap Ikan |                 |        |        |        |        |
|     | - Perahu Tanpa Motor                   | 440             | 453    | 688    | 341    | 330    |
|     | - Motor Tempel                         | 2.113           | 2.113  | 1.968  | 2.128  | 1.832  |
|     | - Kapal Motor                          | 197             | 207    | 66     | 73     | 76     |
|     | - Alat tangkap pukat                   | 929             | 1.007  | 436    | 360    | 455    |
|     | - Alat tangkap jaring                  | 1.212           | 1220   | 1497   | 894    | 1030   |
|     | - Alat tangkap pancing                 | 960             | 980    | 1.486  | 490    | 630    |
|     | - Alat tangkap lainnya                 | 265             | 295    | 345    | 354    | 504    |
| 7.  | Nilai Tukar Nelayan                    | 100,08          | 106,06 | 106,07 | 106,09 | 106,12 |

Sumber : Dinas Kelautan dan Perikanan, Tahun 2021

### 2.3.3.2 Pariwisata

Pengembangan Potensi Kepariwisata yang tersebar diseluruh wilayah Kabupaten Konawe Utara berpedoman pada Peraturan Daerah Nomor 02 Tahun 2016 tentang Rencana Induk Pengembangan Pariwisata Daerah Kabupaten Konawe Utara Tahun 2016 – 2026 yang telah membagi Kawasan Pengembangan Pariwisata (KPP) menjadi 6 (enam) wilayah KPP yaitu : KPP Taipa, KPP Pulau Labengki, KPP Wawolesea, KPP Wiwirano, KPP Oheo, dan KPP Asera.

Perkembangan Kepariwisata Kabupaten Konawe Utara mengalami peningkatan yang cukup baik sejalan dengan meningkatnya kualitas aksesibilitas dan sarana penunjang. Capaian kinerja Kebudayaan dan Pariwisata dijabarkan pada tabel berikut :

**Tabel 2.76.**  
**Kondisi Pengelolaan Pariwisata**  
**Kabupaten Konawe Utara**

| No. | Indikator Kinerja            | Capaian |        |        |        |       |
|-----|------------------------------|---------|--------|--------|--------|-------|
|     |                              | 2016    | 2017   | 2018   | 2019   | 2020  |
| 1.  | Jumlah wisatawan Mancanegara | 942     | 1.920  | 1.940  | 1.790  | 44    |
| 2.  | Jumlah wisatawan domestik    | 23.705  | 26.613 | 53.820 | 61.446 | 8.143 |

| No.                      | Indikator Kinerja               | Capaian |        |        |        |       |
|--------------------------|---------------------------------|---------|--------|--------|--------|-------|
|                          |                                 | 2016    | 2017   | 2018   | 2019   | 2020  |
| Jumlah Kunjungan (orang) |                                 | 24.647  | 28.533 | 55.760 | 63.236 | 8.187 |
| 3.                       | Jumlah akomodasi                | 2       | 3      | 3      | 15     | 23    |
| 4.                       | Rata - rata lama tinggal (hari) | 2       | 2      | 2      | 3      | 3     |
| 5.                       | Jumlah objek wisata             | 6       | 6      | 6      | 6      | 6     |
| 6.                       | Jumlah desa wisata              | -       | -      | -      | 1      | 1     |

Sumber : Dinas Pariwisata Kab. Konawe Utara, Tahun 2021

Prioritas Pengembangan Pariwisata di Kabupaten Konawe Utara yaitu di Kawasan “Segitiga Berlian” (Taipa-Pulau Labengki-Air Panas Wawolesea). Namun demikian, Pemerintah Daerah tetap mengembangkan objek wisata lainnya di Kabupaten Konawe Utara.

### 2.3.3.3 Pertanian

Sektor pertanian merupakan salah satu prioritas pembangunan Kabupaten Konawe Utara. Sektor ini memiliki peran penting terhadap perekonomian Kabupaten Konawe Utara, karena merupakan salah satu sektor yang memberikan kontribusi terbesar terhadap PDRB, selalu berada diatas 40 persen dengan total yang bekerja di sector pertanian sebesar 39,07 dari angkatan kerja

Dalam rangka mewujudkan kedaulatan pangan, Pemerintah Kabupaten Konawe Utara telah melaksanakan pembangunan pertanian dengan memanfaatkan sumberdaya yang ada, yaitu pemanfaatan teknologi pertanian, kelembagaan, SDM pertanian dan sarana produksi. Lahan pertanian di Kabupaten Konawe Utara sesuai untuk budidaya tanaman pangan, hortikultura, perkebunan dan peternakan.

**Tabel 2.77.**  
**Perkembangan Kinerja Sektor Pertanian**  
**di Kabupaten Konawe Utara**

| No       | Kinerja  | Tahun  |        |           |          |          |
|----------|--|--------|--------|-----------|----------|----------|
|          |  | 2016   | 2017   | 2018      | 2019     | 2020     |
| <b>A</b> | <b>Pertanian Tanaman Pangan</b>                |        |        |           |          |          |
| 1        | Laju Pertumbuhan Sub Sektor Tanaman Pangan (%) | 1,73   | 2,50   | 0,52      | 1,73     | 2,51     |
| 2        | Produksi Tanaman Padi (Ton)                    | 18.072 | 18.949 | 16.422,78 | 7.339,05 | 6.560,70 |
|          | Luas Panen (Ha)                                | 5.077  | 4.211  | 3.819,25  | 1.999,45 | 1.963,44 |
|          | Produktivitas (Ton/Ha)                         | 3,56   | 4,50   | 4,30      | 3,67     | 3,34     |

| No       | Kinerja                                      | Tahun  |        |          |        |        |
|----------|--|--------|--------|----------|--------|--------|
|          |  | 2016   | 2017   | 2018     | 2019   | 2020   |
| 3        | Produksi Jagung (Ton)                        | 3.818  | 13.977 | 5.087,46 | 14.033 | 3.539  |
|          | Luas Panen (Ha)                              | 388    | 2.930  | 847,91   | 2.344  |        |
|          | Produktivitas (Ton/Ha)                       | 9,84   | 4,77   | 6,00     | 5,99   |        |
| <b>B</b> | <b>Hortikultura</b>                          |        |        |          |        |        |
| 1        | Laju Pertumbuhan Sub Sektor Hortikultura (%) | -10,84 | -4,67  | 4,86     | 6,65   | 0,12   |
| 2        | Produksi Bawang Merah (Ton)                  |        |        | 0.5      | 52.7   | 152    |
|          | Luas Panen (Ha)                              |        |        |          |        |        |
|          | Produktivitas (Ton/Ha)                       |        |        |          |        |        |
| 3        | Produksi Cabai (Ton)                         | 79,9   | 72,4   | 5.2      | 421,9  | 760    |
|          | Luas Panen (Ha)                              |        |        |          |        |        |
|          | Produktivitas (Ton/Ha)                       |        |        |          |        |        |
| <b>C</b> | <b>Peternakan</b>                            |        |        |          |        |        |
| 1        | Laju Pertumbuhan Sub Sektor Peternakan (%)   |        | 8,76   | 6,01     | 8,18   | 2,32   |
| 2        | Produksi Daging Sapi (Kg)                    | 38.800 | 40.500 | 45.200   | 89.540 | 91.675 |
|          | Produksi Daging Kambing (Kg)                 | 1.150  | 1.250  | 1.350    | 2.343  | 2.743  |
|          | Produksi Daging Ayam (Kg)                    | 31.827 | 33.652 | 35.919   | 76.670 | 78.871 |
|          | Produksi Daging Itik (Kg)                    | 298    | 305    | 314      | -      | -      |

Sumber : Dinas Tanaman Pangan Kab. Konawe Utara, Tahun 2021

### 2.3.3.4 Perkebunan

Sub Sektor perkebunan adalah sub sektor andalan Kabupaten Konawe Utara. Laju pertumbuhan sub sektor perkebunan pada PDRB tahun 2020 sebesar 8,05 persen atau meningkat dari tahun 2019 sebesar 8,19 persen. Komoditas utama yang diusahakan antara lain yaitu kakao, kelapa sawit, kelapa, lada dan cengkeh. Tabel berikut menggambarkan luas tanaman menghasilkan dan produksi hasil beberapa komoditas perkebunan di Kabupaten Konawe Utara.

**Tabel 2.78.**  
**Perkembangan Produktivitas Sub Sektor Perkebunan di Kabupaten Konawe Utara**

| No. | Komoditas    | Uraian                 | 2016     | 2017     | 2018     | 2019     | 2020     |
|-----|--------------|------------------------|----------|----------|----------|----------|----------|
| 1   | Kelapa Dalam | Luas Panen (Ha)        | 4,055    | 4,055    | 1,388    | 2,426.5  | 2,426.5  |
|     |              | Produksi (Ton)         | 1,559.08 | 1,559.08 | 1,589.13 | 1,589.13 | 961.35   |
|     |              | Produktivitas (Ton/Ha) | 38.45    | 38.45    | 114.49   | 65.49    | 39.62    |
| 2   | Kelapa Sawit | Luas Panen (Ha)        | 456      | 456      | 15,520.5 | 18,006.1 | 18,006.1 |

|   |       |                        |          |          |          |          |         |
|---|-------|------------------------|----------|----------|----------|----------|---------|
|   |       | Produksi (Ton)         | 593.75   | 593.75   | 593.75   | 593.75   | 60.23   |
|   |       | Produktivitas (Ton/Ha) | 130.21   | 130.21   | 3.83     | 3.30     | 0.33    |
| 3 | Kopi  | Luas Panen (Ha)        | 995      | 995      | 413      | 511.5    | 511.5   |
|   |       | Produksi (Ton)         | 341.46   | 341.46   | 341.46   | 341.46   | 251.54  |
|   |       | Produktivitas (Ton/Ha) | 34.32    | 34.32    | 82.68    | 66.76    | 49.18   |
| 4 | Kakao | Luas Panen (Ha)        | 7,979    | 7,979    | 2,561    | 3,988.5  | 3,988.5 |
|   |       | Produksi (Ton)         | 1,418.37 | 1,418.37 | 1,418.32 | 1,418.32 | 585.70  |
|   |       | Produktivitas (Ton/Ha) | 17.78    | 17.78    | 55.38    | 35.56    | 14.68   |

Sumber : BPS, Kab. Konawe Utara Dalam Angka, 2017 s.d 2021

### 2.3.3.5 Kehutanan

Berdasarkan Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah, urusan kehutanan sudah bukan merupakan wewenang pemerintah daerah kabupaten lagi, tetapi ditarik ke pemerintah daerah provinsi.

Sebagai upaya Pemerintah Daerah dalam pemberdayaan masyarakat, Pemerintah Kabupaten Konawe Utara telah menyiapkan rencanaa peningkatan pengelolaan perhutanan sosial. Kewenangan kab/kota dalam urusan kehutanan berupa pelaksanaan pengelolaan Hutan Tanaman Rakyat oleh kab/kota sesuai dengan PP 23 Tahun 2021 Pasal 26 ayat 7. Hutan Tanaman Rakyat di Konawe Utara seluas ±950 Ha yang berlokasi di Desa Awila, Molawe, Molawe Puncak Kec. Molawe dan Desa Banggarema Kec. Andowia.

### 2.3.3.6 Energi dan Sumberdaya Mineral

Kewenangan urusan ESDM oleh Kabupaten ini sangat terbatas, khususnya terkait Sumber Daya Energi dan kebutuhan energi secara umum. Upaya yang telah dilakukan untuk memenuhi kebutuhan energy adalah dengan melakukan kajian. Kajian Geothermal di Air Panas Wawolesea menunjukkan bahwa energy panas bumi di Wawolesea belum dapat dijadikan alternative energy dikarenakan standar panas minimal energy panas bumi seharusnya 90°C sedangkan panas bumi di Wawolesea adalah 75°C. Sehubungan dengan hal tersebut, perlu dilakukan beberapa kajian sebagai langkah awal ketercukupan energy di Kabupaten Konawe Utara.

### 2.3.3.7 Perdagangan

Urusan perdagangan di Kabupaten Konawe Utara diprioritaskan pada pengembangan pasar tradisional. Terhitung sejak disahkannya Undang-undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan, maka pasar tradisional telah berubah penyebutannya menjadi Pasar Rakyat, dengan tetap memperhatikan kekhususan pasar rakyat terkait aspek lokasi yang bersifat tetap berupa toko/kios/los dan bentuk lainnya serta menjadi tempat jual beli dengan proses tawar menawar.

Sebagai bagian dalam urat nadi perekonomian daerah, peran pasar rakyat/tradisional sangatlah signifikan untuk menjalankan berbagai fungsinya, antara lain: memberikan kontribusi terhadap perekonomian daerah; meningkatkan kesempatan kerja; menyediakan sarana berjualan, terutama bagi pelaku usaha UMKM; menjadi referensi harga bahan pokok yang mendasari perhitungan tingkat inflasi dan indikator kestabilan harga; meningkatkan PAD. Sampai dengan akhir tahun 2020 di Kabupaten Konawe Utara terdapat 14 pasar yang kondisinya sudah baik dan cukup baik, data tersebut disajikan pada Tabel 2.79.

**Tabel 2.79.**  
**Data Kondisi Pasar Tradisional/Rakyat**  
**di Kabupaten Konawe Utara**

| No. | Nama Pasar      | Luas Tanah (m2) | Kepemilikan | Jumlah Pedagang Kios/Los              | Rehab./Pemb. | Kondisi |
|-----|-----------------|-----------------|-------------|---------------------------------------|--------------|---------|
| 1.  | Pasar Motui     | 1.774,5         | Pemda       | 1 kios<br>2 los kering<br>1 los basah | 2018         | Baik    |
| 2.  | Pasar Sawa      | 405,5           | Pemda       | 1 kios<br>2 los kering<br>1 los basah | 2017         | Baik    |
| 3.  | Pasar Lembo     | 3.203,5         | Pemda       | 1 kios<br>2 los kering                | 2019         | Baik    |
| 4.  | Pasar Wawolesea | 1.475,5         | Pemda       | 1 Unit                                | 2020         | Baik    |
| 5.  | Pasar Tinobu    | 6.736           | Pemda       | 1 kios<br>4 los kering<br>2 los basah | 2019         | Baik    |
| 6.  | Pasar Molawe    | 4.864           | Pemda       | 3 kios<br>4 los kering                | 2020         | Baik    |

| No. | Nama Pasar       | Luas Tanah (m2) | Kepemilikan | Jumlah Pedagang Kios/Los              | Rehab./Pemb. | Kondisi |
|-----|------------------|-----------------|-------------|---------------------------------------|--------------|---------|
|     |                  |                 |             | 5 los basah                           |              |         |
| 7.  | Pasar Lahimbua   | 2.235           | Pemda       | 2 kios<br>1 los kering                | 2019         | Baik    |
| 8.  | Pasar Kuliner    | 5.079           | Pemda       | 2 kios<br>1 los kering                | 2020         | Baik    |
| 9.  | Pasar Asera      | 1.632,5         | Pemda       | 4 los kering                          | 2017         | Baik    |
| 10. | Pasar Todolojiyo | 1.309           | Pemda       | 1 kios<br>2 los kering<br>1 los basah | 2020         | Baik    |
| 11. | Pasar Lamona     | 9.184           | Pemda       | 1 Unit                                | 2018         | Baik    |
| 12. | Pasar Langgikima | 9.070,7         | Pemda       | 2 los kering<br>1 los basah           | 2018         | Baik    |
| 13. | Pasar Landawe    |                 | Pemda       | 1 kios<br>2 los kering<br>1 los basah | 2020         | Baik    |

Sumber : Dinas Perindag Kab. Konawe Utara, 2021

### 2.3.3.8 Perindustrian

Kontribusi sektor industri pengolahan terhadap PDRB masih relatif kecil, hanya 1,13 persen tahun 2020. Kegiatan pembangunan industri di Kabupaten Konawe Utara diarahkan pada peningkatan aktivitas dan daya saing industri kecil menengah. Perkembangan sektor industri di Kabupaten Konawe Utara disajikan pada tabel berikut :

**Tabel 2.80.**  
**Jumlah Industri Kecil Menengah**  
**di Kabupaten Konawe Utara**

| No | Uraian                       | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
|----|------------------------------|------|------|------|------|------|
| 1  | Industri Besar               | 3    | 3    | 3    | 3    | 3    |
| 2  | Industri Menengah            | 4    | 5    | 7    | 11   | 15   |
| 3  | Industri Kecil               | 399  | 251  | 254  | 257  | 276  |
| 4  | Jumlah IKM                   | 406  | 259  | 264  | 271  | 294  |
| 5  | Jumlah IKM yang difasilitasi | 25   | 27   | 35   | 38   | 42   |

Sumber : Dinas Perindag Kab. Konawe Utara 2021

**Tabel 2.81.**  
**Jenis Industri dan Jumlah Tenaga Kerja**  
**di Kabupaten Konawe Utara**

| No     | Jenis Usaha Industri          | Jumlah Perusahaan | Jumlah Tenaga Kerja | Produksi (unit) | Nilai (Rp.000) |
|--------|-------------------------------|-------------------|---------------------|-----------------|----------------|
| 1.     | Makanan dan Minuman           | 216               | 280                 | 70.704.050      | 921.800        |
| 2.     | Kayu dan hasil hutan          | 194               | 277                 | 632,905         | 883.022        |
| 3.     | Kertas dan barang dari kertas | 1                 | 3                   | 400             | 80.000         |
| 4.     | Kimia dan barang dari karet   | -                 | -                   | -               | -              |
| 5.     | Galian bukan logam            | 48                | 147                 | 134.504.834     | 1.824.150      |
| 6.     | Logam dasar besi dan baja     | 3                 | 5                   | 110             | 103.300        |
| 7.     | Furnitur                      | 60                | 107                 | 1.604.050.000   | 480.281        |
| 8.     | Pengolahan lainnya            | 1                 | 3                   | -               | 26.400         |
| 9.     | Lainnya                       | 54                | 72                  | 17.052.150      | 828.600        |
| Jumlah |                               | 577               | 894                 | 2.459.216.992   | 5.147.554      |

Sumber : BPS, Kab. Konawe Utara Dalam Angka, Tahun 2021

### 2.3.3.9 Transmigrasi

Penyelenggaraan urusan Transmigrasi sebagai suatu pendekatan untuk mencapai tujuan kesejahteraan, pemerataan pembangunan daerah, serta perekat persatuan dan kesatuan bangsa. Pelaksanaan transmigrasi di Kabupaten Konawe Utara sampai saat ini masih tergantung pada kuota dari Pemerintah Pusat. Perkembangan yang terjadi sekarang justru semakin menurunnya kuota/jatah transmigran dari tahun ke tahun. Hal ini berbanding terbalik dengan jumlah animo, minat, serta pendaftar calon transmigran yang cukup besar.

**Tabel 2.82.**  
**Penempatan Transmigrasi**  
**di Kabupaten Konawe Utara**

| Tahun | Jumlah KK | Jiwa      |           | Jumlah | Asal Daerah           |
|-------|-----------|-----------|-----------|--------|-----------------------|
|       |           | Laki-Laki | Perempuan |        |                       |
| 2016  | 75        | 158       | 125       | 287    | Jawa, Lampung, Banten |
| 2017  | 25        | 54        | 59        | 113    | Jawa, NTB             |
| 2018  | 15        | 15        | 17        | 32     | Jawa                  |
| 2019  | 14        | 16        | 18        | 34     | Jawa                  |
| 2020  | -         | -         | -         | -      | -                     |

Sumber : Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi, 2021

Kawasan Transmigrasi di Kabupaten Konawe Utara terdiri dari 4 (empat) wilayah Unit Permukiman Transmigrasi (UPT), yaitu UPT Padalere, UPT Puuhialu, UPT Puupi, dan Kota Terpadu Mandiri (KTM) Hialu. Dalam penyelenggaraan pembangunan dan pengembangan Kota Terpadu Mandiri (KTM) pada areal kawasan transmigrasi dan permukiman penduduk di Kabupaten Konawe Utara diarahkan untuk menciptakan sentra-sentra agribisnis dan agroindustri yang mampu menarik investasi swasta, sebagai penggerak perekonomian para transmigran dan penduduk sekitar menjadi pusat-pusat pertumbuhan baru, sekaligus untuk membuka kesempatan kerja dan peluang usaha.

### 2.3.4 Unsur Pendukung

#### 2.3.4.1 Sekretariat Daerah

Fungsi perumusan kebijakan merupakan fungsi penunjang urusan pemerintahan yang dilaksanakan oleh Sekretariat Daerah. Sekretariat Daerah dipimpin oleh Sekretaris Daerah yang mempunyai tugas membantu kepala daerah dalam penyusunan kebijakan dan pengoordinasian administratif terhadap pelaksanaan tugas perangkat daerah serta pelayanan administratif. Setda Kabupaten Konawe Utara terdiri atas 12 Bagian.

**Tabel 2.83.**  
**Kinerja Fungsi Pendukung Urusan Pemerintahan**  
**di Kabupaten Konawe Utara**

| No. | Indikator Kinerja   | Satuan             | 2016             | 2017           | 2018           | 2019           | 2020           |
|-----|---|--------------------|------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| 1.  | Nilai evaluasi atas penerapan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP)  | Nilai/<br>Predikat | C                | C              | B              | B              | B              |
| 2.  | Nilai evaluasi penyelenggaraan pemerintahan daerah (EKPPD)                              | Nilai/<br>Predikat | Sedang           | Sedang         | Sedang         | Sedang         | Baik           |
| 3.  | Jumlah produk hukum :<br>- Peraturan Daerah<br>- Peraturan Bupati<br>- Keputusan Bupati | Jumlah             | 15<br>136<br>838 | 9<br>43<br>392 | 7<br>35<br>445 | 6<br>81<br>436 | 4<br>52<br>852 |
| 4.  | Jumlah kegiatan   |                    |                  |                |                |                |                |

| No. | Indikator Kinerja  | Satuan             | 2016 | 2017 | 2018 | 2019          | 2020 |
|-----|--|--------------------|------|------|------|---------------|------|
|     | kerjasama kemitraan pembangunan antara pemda konawe utara dengan pemerintah daerah lainnya | Kegiatan           | 13   | 138  | 143  | 274           | 192  |
| 5.  | Persentase pengaduan masyarakat yang tertangani dan terselesaikan                          | %                  | 100  | 100  | 100  | 100           | 100  |
| 6.  | Indeks Reformasi Birokrasi   | Nilai/<br>Predikat | -    | -    | -    | CC<br>(50,04) | -    |

Sumber : Sekretariat Daerah Kab. Konawe Utara, 2021

Predikat Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah tahun 2018, 2019 dan 2020 dengan nilai B meningkat dari tahun 2017 dengan predikat C. Hal ini dapat diartikan bahwa komitmen pemerintah daerah dalam menetapkan tujuan dan sasaran yang berorientasi hasil, peningkatan keterkaitan antara program,/kegiatan dan sasaran, selanjutnya mengurutkan/cascading semua indikator kinerja dimulai dari dokumen perencanaan jangka menengah sampai dengan perencanaan tahunan masing-masing Perangkat Daerah telah membuahkan hasil yang cukup memuaskan, selanjutnya akan terus ditingkatkan di tahun - tahun mendatang.

#### 2.3.4.2 Sekretariat DPRD

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) merupakan perwakilan yang telah diberi mandat oleh rakyat dalam urusan pemerintahan. DPRD merupakan mitra Kepala Daerah yang berkedudukan sama tetapi mempunyai fungsi yang berbeda. Dalam melaksanakan fungsinya DPRD di bantu oleh Sekretariat DPRD. Sekretariat DPRD mempunyai tugas menyelenggarakan administrasi kesekretariatan dan keuangan, mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD, serta menyediakan dan mengoordinasikan tenaga ahli yang diperlukan DPRD dalam melaksanakan hak, tugas dan fungsinya sesuai dengan kebutuhan.

## 2.3.5 Unsur Penunjang

### 2.3.5.1 Perencanaan

Penyusunan rencana pembangunan Kabupaten Konawe Utara didasarkan pada Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional yang selanjutnya diturunkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah.

Dalam hal perencanaan, ketersediaan dan akurasi data tetap menjadi perhatian, di samping itu sejumlah studi dilakukan untuk menjadi pedoman arah pembangunan ke depan. Untuk sinkronisasi dan harmonisasi perencanaan pembangunan maka koordinasi dengan pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara dan Pusat juga dilaksanakan.

Tuntutan penyelenggaraan pemerintahan daerah yang semakin berkualitas dan kompetitif baik dalam aspek pelayanan publik dan akuntabilitas berbasis kinerja dan transparan memberi dampak terhadap penyusunan perencanaan pembangunan daerah yang baik dan tepat dengan melibatkan seluruh *stakeholder* pembangunan secara komprehensif. Pengintegrasian perencanaan daerah dengan pengelolaan keuangan sampai dengan *monev* dan evaluasi kinerja dalam penerapan *e-planning terintegrasi* menjadi salah satu upaya untuk mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan daerah yang berkualitas tersebut.

Untuk melaksanakan fungsinya, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Konawe Utara, mempunyai kewenangan :

1. Penyusunan Rencana Jangka Panjang Daerah (RPJPD), Rencana Jangka Menengah Daerah (RPJMD), Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RPKD) sesuai peraturan dan perundang-undangan yang berlaku;
2. Penyusunan Rencana Pendanaan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) sesuai usulan program masing-masing yang berpedoman pada peraturan dan perundang-undangan yang berlaku;
3. Penyusunan rencana kerja pengalokasian dana yang bersumber dari APBN sebagai masukan Bappenas dalam penyusunan Rencana Kerja Pemerintah (RKP);
4. Melaksanakan Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) dalam rangka menciptakan sinkronisasi program kegiatan OPD serta menjaring aspirasi masyarakat dan pelaku pembangunan se-Kabupaten Konawe Utara;

5. melaksanakan tugas koordinasi dengan Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) dalam hal Penyusunan Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (KUA), Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) serta Rencana Anggaran dan Belanja Daerah (RAPBD) serta perubahannya sesuai peraturan dan perundang-undangan yang berlaku;
6. Melaksanakan Koordinasi dengan Pemerintah Pusat, OPD Kabupaten serta membina hubungan kerja dengan Lembaga Non Departemen dan Swasta untuk kelancaran pelaksanaan tugas;
7. Melaksanakan koordinasi, monitoring, evaluasi dan pengendalian pelaksanaan pembangunan daerah pada setiap OPD lingkup Pemerintah Kabupaten sebagai bahan penyusunan program kerja pembangunan tahun berikutnya;
8. Melaksanakan pengkajian dan penelitian pembangunan Daerah untuk perencanaan pembangunan Daerah sesuai peraturan dan perundang-undangan yang berlaku;
9. Melakukan kegiatan lain dalam rangka perumusan kebijakan perencanaan pembangunan daerah sesuai dengan petunjuk Bupati.

Selain itu, tujuan yang akan dicapai yaitu untuk mencapai kualitas perencanaan didukung penelitian dan pengembangan yang salah satu caranya melalui semakin berkembangnya jejaring /network dengan *stakeholder* lain yang terkait (akademisi). Untuk mewujudkan hal tersebut terdapat beberapa kendala antara lain masih terdapatnya kesenjangan antara implementasi dan kebijakan dan belum optimalnya data/informasi dan hasil-hasil kajian penelitian dan pengembangan serta inovasi daerah.

**Tabel 2.84.**  
**Kinerja Fungsi Penunjang Perencanaan dan Kelitbangan**  
**di Kabupaten Konawe Utara**

| No. | Uraian   | 2016  | 2017  | 2018  | 2019  | 2020  |
|-----|--|-------|-------|-------|-------|-------|
| 1   | Tersedianya dokumen perencanaan yang telah ditetapkan dengan perkada tepat waktu | 2     | 2     | 2     | 2     | 2     |
| 2   | Keseuaian program RPJMD dengan program RKPD                                      | 60,34 | 60,40 | 60,68 | 62,48 | 60,74 |
| 3   | Jumlah penelitian yang dilaksanakan oleh bidang litbang Bappeda                  | -     | 3     | 2     | 3     | 3     |

Sumber : Bappeda Kab. Konawe Utara, Tahun 2021

### 2.3.5.2 Keuangan

Dalam rangka pelaksanaan kewenangan Pemerintah Daerah sebagaimana ditetapkan dalam Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah dan mengingat perimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah sebagaimana diatur dalam Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintahan Pusat dan Pemerintahan Daerah, timbul hak dan kewajiban daerah yang dapat dinilai dengan uang, sehingga perlu dikelola dalam suatu sistem pengelolaan keuangan daerah.

Pengelolaan keuangan daerah sebagaimana dimaksud merupakan sub-sistem dari sistem pengelolaan keuangan negara dan merupakan elemen pokok dalam penyelenggaraan pemerintah daerah. Pengelolaan keuangan daerah tersebut bertumpu pada upaya peningkatan efisiensi, efektifitas, akuntabilitas, dan transparansi pengelolaan keuangan publik baik dari sisi pendapatan maupun belanja.

Selain kedua undang-undang tersebut, terdapat peraturan perundang - undangan lain yang menjadi acuan pengelolaan keuangan daerah, antara lain:

1. Undang - Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
2. Undang - Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
3. Undang - Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah yang telah diubah terakhir kalinya dengan Peraturan Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual Pada Pemerintah Daerah;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodifikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);

Sumber-sumber keuangan yang menjadi pendapatan daerah terdiri atas Pendapatan Asli Daerah (PAD), dana perimbangan/dana transfer, dan lain-lain pendapatan daerah yang sah. Dana perimbangan/dana transfer merupakan sumber pendapatan daerah yang bersumber dari transfer dana dari pemerintah atasan (APBN dan APBD Provinsi Sultra) yang dialokasikan kepada daerah untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi, yang terdiri atas dana bagi hasil, dana alokasi umum, dana alokasi khusus, bagi hasil pajak daerah, dan bantuan keuangan.

Dana perimbangan/dana transfer selain dimaksudkan untuk membantu daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi, juga bertujuan untuk mengurangi ketimpangan sumber pendanaan pemerintahan antara pusat dan daerah serta untuk mengurangi kesenjangan pendanaan pemerintahan antar daerah. Ketiga komponen dana perimbangan ini merupakan bagian dari transfer ke daerah dari Pemerintah Pusat serta merupakan satu kesatuan yang utuh.

Kebijakan pengelolaan keuangan daerah diarahkan selain untuk mempercepat realisasi visi dan misi daerah juga untuk mengatasi berbagai permasalahan pokok seperti penanganan kemiskinan, perluasan kesempatan kerja, perbaikan mutu pelayanan publik utamanya pelayanan dasar, peningkatan produktivitas sektor dominan yang mempengaruhi PDRB, dan perluasan daya saing investasi. Namun demikian, berbagai permasalahan pengelolaan keuangan yang dihadapi yaitu, belum optimalnya upaya peningkatan potensi pendapatan daerah terutama dari pajak daerah; masih sering terlambatnya pelaporan keuangan daerah; belum optimalnya integrasi sistem pengelolaan keuangan secara online; dan masih banyaknya permintaan pembayaran yang bertumpu di akhir tahun adalah permasalahan pengelolaan keuangan yang dihadapi oleh Dinas Pengelolaan keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Konawe Utara. Selain itu pengelolaan aset daerah belum optimal terkait dengan masih rendahnya koordinasi antar OPD dalam penghapusan aset daerah dan masih kurangnya tenaga teknis pengukuran aset menggunakan teknologi informasi.

**Tabel 2.85**  
**Kinerja Fungsi Penunjang Keuangan**

| No. | Uraian  | 2015  | 2016  | 2017  | 2018  | 2019  | 2020  |
|-----|---|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
| 1   | Predikat Hasil Pemeriksaan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah dari BPK                              | TW    | WDP   | WTP   | WTP   | WTP   | WTP   |
| 2   | Tingkat kemandirian keuangan daerah (persentase realisasi PAD terhadap realisasi pendapatan daerah) | 1,30% | 1,35% | 1,40% | 2,00% | 1,49% | 1,79% |

Sumber : DPAKD Kab. Konawe Utara, 2021

Tabel diatas memperlihatkan masih rendahnya tingkat kemandirian keuangan daerah di Kabupaten Konawe Utara. Kondisi tersebut, perlu didukung dengan kebijakan penajaman APBD yang sesuai visi dan misi daerah melalui efektifitas dan efisiensi belanja daerah dan upaya peningkatan pendapatan daerah yang tetap mendukung iklim investasi daerah serta adanya komitmen seluruh elemen pengelola keuangan daerah, sehingga tercipta pengelolaan keuangan yang tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efektif, efisien, ekonomis, transparan, dan bertanggungjawab dengan memperhatikan asas keadilan, kepatutan, dan manfaat untuk masyarakat.

Beberapa upaya strategis untuk mendukung terwujudnya *good governance* dalam pengelolaan keuangan dan barang daerah yang profesional, terbuka, dan bertanggung jawab, ditempuh dengan:

1. Mempedomani kebijakan pemerintah dalam pengelolaan keuangan dan barang daerah;
2. Mengupayakan aplikasi sistem informasi pengelolaan keuangan dan barang daerah yang terintegrasi dengan sistem informasi pemerintahan daerah (SIPD) Kementerian Dalam Negeri RI;
3. Mengikuti Diklat teknis dan *workshop* mengenai pengelolaan pajak daerah dan retribusi daerah, perkembangan peraturan pengelolaan keuangan dan barang daerah yang dilaksanakan oleh pemerintah pusat maupun lembaga keuangan lainnya;
4. Mengupayakan adanya informasi sedini mungkin dari pemerintah pusat agar prediksi pendapatan daerah, khususnya dana perimbangan, dalam APBD semakin

realistis;

5. Melaksanakan sistem informasi pengelolaan pajak daerah yang terintegrasi;
6. Meningkatkan koordinasi antar Organisasi Pemerintah Daerah (OPD) penghasil dalam upaya tercapainya target pendapatan asli daerah yang diampu oleh masing-masing OPD penghasil dan mengevaluasi atas kinerja Pendapatan Asli Daerah;
7. Meningkatkan koordinasi antar OPD untuk memonitor dan melaporkan pengelolaan keuangan dan barang daerah yang menjadi tanggung-jawabnya;
8. Penyebarluasan informasi pendapatan, pengelolaan keuangan, dan pengelolaan aset daerah melalui media masa, media *online*, *leaflet*, dan lain-lain;
9. Menambah dan merevisi *Standard Operating Procedure* (SOP) pajak daerah, pengelolaan keuangan, dan pengelolaan aset daerah berdasarkan peraturan yang berlaku;
10. Meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa dengan memberikan fleksibilitas dalam pengelolaan keuangan berdasarkan prinsip ekonomi dan produktivitas melalui pembentukan Badan Layanan Usaha Daerah (BLUD);
11. Melaksanakan tata kelola keuangan berbasis akrual agar dapat menyajikan laporan keuangan lebih transparan dan akuntabel.

### 2.3.5.3 Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan

Fungsi penunjang urusan pemerintahan daerah kepegawaian dilaksanakan oleh Badan Kepegawaian Pelatihan Sumber Daya Manusia (BKPSDM). Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Konawe Utara Tahun 2020 berjumlah 2.728 orang terdiri dari 1.393 laki-laki dan 1.335 perempuan.

**Tabel 2.86.**  
**Kondisi Jumlah Aparatur Sipil Negara (ASN) di Kabupaten Konawe Utara**

| No.           | Golongan     | 2018         | 2019         | 2020         |
|---------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| 1             | Golongan I   | 8            | 7            | 6            |
| 2             | Golongan II  | 427          | 396          | 345          |
| 2             | Golongan III | 1.689        | 1.841        | 1.937        |
| 4             | Golongan IV  | 372          | 377          | 440          |
| <b>Jumlah</b> |              | <b>2.496</b> | <b>2.621</b> | <b>2.728</b> |

Sumber : BKPSDM Kab. Konawe Utara, 2021

**Tabel 2.87.**  
**Jumlah ASN Berdasarkan Jabatan**  
**di Kabupaten Konawe Utara**

| No.           | Golongan            | 2018         | 2019         | 2020         |
|---------------|---------------------|--------------|--------------|--------------|
| 1             | Fungsional Tertentu | 956          | 928          | 1.055        |
| 2             | Fungsional Umum     | 818          | 1.029        | 1.034        |
| 3             | Struktural          |              |              |              |
|               | Eselon IV           | 498          | 436          | 417          |
|               | Eselon III          | 195          | 191          | 189          |
|               | Eselon II           | 29           | 37           | 33           |
| <b>Jumlah</b> |                     | <b>2.496</b> | <b>2.621</b> | <b>2.728</b> |

Sumber : BKPSDM Kab. Konawe Utara, 2021

Permasalahan yang dihadapi pengelolaan kepegawaian di Kabupaten Konawe Utara diantaranya adalah belum optimalnya pengembangan dan pembinaan aparatur jabatan fungsional yang dipengaruhi oleh kurangnya informasi dan anggaran untuk pejabat fungsional untuk mengikuti diklat teknis.

**Tabel 2.88.**  
**Kinerja Fungsi Penunjang Kepegawaian, Pendidikan**  
**dan Pelatihan di Kabupaten Konawe Utara**

| No. | Uraian   | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
|-----|--|------|------|------|------|------|
| 1   | Jumlah pejabat struktural yang telah mengikuti diklat kepemimpinan sesuai jenjang jabatannya | 107  | 143  | 154  | 162  | 162  |
| 2   | Jumlah pegawai yang mengikuti diklat teknis dan fungsional                                   | 314  | 368  | 371  | 388  | 388  |

Sumber : BKPSDM Kab. Konawe Utara, 2021

Badan Pendidikan dan Pelatihan Kabupaten Konawe Utara belum memiliki sertifikasi/akreditasi, sehingga tidak dapat menyelenggarakan diklat secara mandiri dan belum adanya pasal di dalam PP Nomor 100 tahun 2001 tentang Pendidikan dan Pelatihan PNS yang menyebutkan sanksi bagi Pejabat struktural yang tidak mengikuti Diklatpim sesuai dengan jenjangnya sehingga tersirat bahwa Diklatpim bukan merupakan diklat wajib bagi pejabat struktural. Yang menjadi perhatian kedepannya yaitu perlu pengoptimalan sistem manajemen SDM aparatur dengan menggunakan teknologi informasi

sehingga program kegiatan dalam rangka peningkatan aparatur PNS dapat terkontrol dan terencana secara sistematis.

## **2.3.6 Unsur Pengawasan**

### **2.3.6.1 Pengawasan (Inspektorat Daerah)**

Salah satu fungsi penunjang pemerintahan adalah pengawasan. Fungsi ini lebih dititikberatkan pada tindakan konsultatif dan preventif agar pelaksanaan pembangunan daerah berada di jalur yang benar.

Kebijakan pengawasan Pemerintah Kabupaten Konawe Utara merupakan salah satu bentuk dan tekad untuk mendukung cita-cita reformasi yaitu untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih dan berwibawa sebagai konsekuensi untuk menciptakan kabupaten yang baik, efektif, efisien, dan bebas dari KKN. Kebijakan tersebut diambil oleh manajemen (instansi atau pejabat yang mempunyai kewenangan mengambil keputusan di bidang pengawasan) dan dijadikan sebagai pedoman bagi seluruh anggota organisasi APIP dalam melaksanakan tugas-tugas pengawasannya.

Inspektorat Kabupaten Konawe Utara sebagai Aparat Pengawas Intern Pemerintah (APIP) memiliki peran dan fungsi melaksanakan tugas pengawasan urusan pemerintahan yang diatur dalam Pasal 4 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2007. Inspektorat provinsi dan kabupaten/kota mempunyai fungsi sebagai perencanaan program pengawasan; perumusan kebijakan dan fasilitas pengawasan; pemeriksaan, pengusutan, pengujian dan penilaian pengawasan.

Auditor adalah pelaksana pengawasan yang mempunyai tugas pokok untuk melaksanakan pengawasan intern pada instansi pemerintah dan memberikan rekomendasi berdasarkan temuan-temuan pemeriksaan yang disajikan dalam Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP). Manfaat pengawasan internal melalui pemeriksaan auditor tidak hanya berupa banyaknya temuan yang dilaporkan, namun juga berupa efektivitas tindak lanjut oleh auditor. Pengawasan internal akan menjadi sia-sia tanpa tindakan perbaikan dalam penyelesaian tindak lanjut sehingga tujuan pengawasan tidak tercapai, yakni peningkatan kinerja bagi organisasi dan akan menimbulkan ketidakpercayaan publik.

Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan (TLHP) dalam lingkup pemerintah daerah di Indonesia telah diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang

Sistem Pengendalian Intern Pemerintah, Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 23 Tahun 2007 tentang Pedoman Tata Cara Pengawasan atas Penyelenggaraan Pemerintah Daerah dan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 9 Tahun 2009 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan, Pemantauan, Evaluasi dan Pelaporan Tindak Lanjut Hasil Pengawasan Fungsional.

Tuntutan kepatuhan terhadap penyelesaian tindak lanjut hasil pemeriksaan auditor atau APIP di Indonesia dalam peraturan tersebut di atas, secara hukum mengisyaratkan kewajiban untuk penyelesaiannya. Penyelesaian tindak lanjut hasil pemeriksaan merupakan bagian yang tak dapat dipisahkan dari suatu rangkaian pengawasan yang meliputi: perencanaan pengawasan, proses pengawasan, laporan hasil pengawasan sampai dengan penyelesaian tindak lanjut hasil pemeriksaan sebagaimana tercantum dalam tabel berikut ini :

**Tabel 2.89.**  
**Target dan Realisasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan (TLHP) Internal dan Eksternal di Kabupaten Konawe Utara**

| No. | Tahun | TLHP Internal dan Eksternal |               |
|-----|-------|-----------------------------|---------------|
|     |       | Target (%)                  | Realisasi (%) |
| 1.  | 2016  | 100,00                      | 70,62         |
| 2.  | 2017  | 100,00                      | 71,24         |
| 3.  | 2018  | 100,00                      | 79,31         |
| 4.  | 2019  | 100,00                      | 81,02         |
| 5.  | 2020  | 100,00                      | 80,38         |

Sumber : Inspektorat Kab. Konawe Utara, 2021

Dari tabel di atas terlihat bahwa Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan (THLP) baik internal maupun eksternal yang telah dilaksanakan oleh Inspektorat Kabupaten Konawe Utara selama tahun 2016 - 2020 dengan realisasi melebihi target yang telah direncanakan. Rata rata capaian Tindak Lanjut Hasil pemeriksaan (THLP) baik internal maupun eksternal yang dilaksanakan oleh Inspektorat Kabupaten Konawe Utara selama tahun 2016 - 2020 adalah sebesar 80,38%.

Untuk memaksimalkan kinerja APIP maka diperlukan peningkatan kualitas dan kuantitas sumberdaya aparatur Inspektorat Kabupaten Konawe Utara.

Berdasarkan formasi dan hasil Analisis Jabatan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Konawe Utara, pada tahun 2020 masih terdapat kekurangan tenaga Aparatur Pengawasan sejumlah 26 personil. Kondisi jumlah tenaga Aparatur Pengawasan dan rincian kebutuhannya terdapat pada tabel berikut ini:

**Tabel 2.90.**  
**Kondisi Jumlah Aparatur Pengawasan dan Status Leveling APIP di Kabupaten Konawe Utara**

| No.                         | Jenis Jabatan              | Jumlah     | Kebutuhan | Kekurangan |
|-----------------------------|----------------------------|------------|-----------|------------|
| <b>1</b>                    | <b>Struktural</b>          |            |           |            |
|                             | Inspektur                  | 1          | -         | -          |
|                             | Sekretaris                 | 1          | -         | -          |
|                             | Inspektur Pembantu         | 4          | -         | -          |
|                             | Kasubag                    | 2          | -         | -          |
| <b>2</b>                    | <b>Fungsional Tertentu</b> |            |           |            |
|                             | Auditor                    | 11         | 25        | 14         |
|                             | P2UPD                      | -          | 10        | 10         |
|                             | Auditor Kepegawaian        | -          | 2         | 2          |
| <b>3</b>                    | <b>Fungsional Umum</b>     | -          | -         | -          |
|                             | <b>Jumlah</b>              | 19         | 37        | 26         |
| <b>Status Leveling APIP</b> |                            | <b>2,9</b> |           |            |

Sumber : Inspektorat Kab. Konawe Utara, 2021

### 2.3.7 Unsur Kewilayahan

Fungsi penunjang pemerintahan umum merupakan fungsi penunjang urusan pemerintahan yang dilaksanakan oleh kecamatan. Kabupaten Konawe Utara terdiri dari 13 (tiga belas) wilayah kecamatan. Kecamatan dibentuk dalam rangka meningkatkan koordinasi penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan publik, dan pemberdayaan masyarakat desa. Kecamatan dipimpin oleh seorang Camat yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah. Camat adalah pegawai negeri sipil yang menguasai pengetahuan teknis pemerintahan dan memenuhi persyaratan kepegawaian sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku yang diangkat oleh Bupati.

1. Menyelenggarakan urusan pemerintahan umum;
2. Mengkoordinasikan kegiatan pemberdayaan masyarakat;
3. Mengkoordinasikan upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum;
4. Mengkoordinasikan penerapan dan penegakan Perda dan Perkada;
5. Mengkoordinasikan pemeliharaan prasarana dan sarana pelayanan umum;

6. Mengkoordinasikan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan yang dilakukan oleh perangkat daerah di Kecamatan;
7. Membina dan mengawasi penyelenggaraan kegiatan desa;
8. Melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah Kabupaten yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja perangkat daerah yang ada di Kecamatan;
9. Melaksanakan tugas lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

## 2.4 ASPEK DAYA SAING DAERAH

### 2.4.1 Fokus Kemampuan Ekonomi Daerah

#### 2.4.1.1 Kemampuan Ekonomi Daerah

Kondisi makro ekonomi daerah Kabupaten Konawe Utara disajikan pada tabel berikut ini :

**Tabel 2.91.**  
**Kondisi Makro Ekonomi Kabupaten Konawe Utara**

| Indikator                       | 2016   | 2017   | 2018   | 2019   | 2020   |
|---------------------------------|--------|--------|--------|--------|--------|
| Pertumbuhan Ekonomi             | 5,64   | 6,00   | 6,38   | 6,44   | (0,72) |
| PDRB Perkapita (Rp.000)         | 49.594 | 53.601 | 57.559 | 61.524 | 60.847 |
| Inflasi                         | 3,54   | 3,01   | 3,00   | 2,92   | 2,25   |
| Kemiskinan                      | 9,75   | 13,93  | 14,22  | 13,66  | 13,53  |
| Pengangguran                    | 5,96   | 4,23   | 3,95   | 3,92   | 3,79   |
| Indeks Pembangunan Manusia      | 67,20  | 67,71  | 68,50  | 69,22  | 69,86  |
| Indeks Ketimpangan (Gini Ratio) | 0,404  | 0,341  | 0,372  | 0,370  | 0,388  |

Sumber : BPS Tahun 2021

#### 2.4.1.2 Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga Perkapita

Pola pengeluaran konsumsi rumah tangga dimaksudkan untuk mengetahui tingkat konsumsi rumah tangga yang menjelaskan seberapa atraktif tingkat pengeluaran rumah tangga. Selain itu, pola pengeluaran dapat digunakan sebagai salah satu alat untuk menilai tingkat kesejahteraan ekonomi penduduk, dimana semakin rendah persentase pengeluaran untuk makanan terhadap total pengeluaran maka semakin baik tingkat perekonomian penduduk. Pada kondisi pendapatan terbatas, pemenuhan kebutuhan makanan akan menjadi prioritas utama, sehingga

pada kelompok masyarakat berpendapatan rendah akan terlihat bahwa sebagian besar pendapatannya digunakan untuk membeli makanan.

Persentase pengeluaran konsumsi rumah tangga di Kabupaten Konawe Utara dikelompokkan menjadi pengeluaran untuk makanan dan non makanan. Dalam kurun waktu lima tahun terakhir, persentase pengeluaran untuk kelompok non makanan cenderung mengalami peningkatan. Pada tahun 2016, persentase pengeluaran non makanan penduduk Konawe Utara lebih dominan dibandingkan pengeluaran makanan. Hal ini mengindikasikan bahwa tingkat perekonomian penduduk di Kabupaten Konawe Utara sampai dengan tahun 2020 semakin baik.

**Tabel 2.92.**  
**Persentase Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga**  
**di Kabupaten Konawe Utara**

| No.                | Jenis Pengeluaran Konsumsi | 2016    | 2017    | 2018    | 2019    | 2020      |
|--------------------|----------------------------|---------|---------|---------|---------|-----------|
| 1.                 | Non Makanan (Rp)           | 347.845 | 351.990 | 485.504 | 471.832 | 543.716   |
| 2.                 | Makanan (Rp)               | 303.306 | 402.167 | 485.025 | 662.264 | 632.825   |
| <b>Jumlah (Rp)</b> |                            | 46,58   | 651.151 | 754.157 | 970.529 | 1.134.096 |
| 3.                 | Non Makanan (%)            | 53,42   | 46,68   | 49,91   | 47,45   | 46,21     |
| 4.                 | Makanan (%)                | 46,58   | 53,32   | 50,09   | 52,55   | 53,79     |
| <b>Jumlah (%)</b>  |                            | 100     | 100     | 100     | 100     | 100       |

Sumber : BPS Statistik Kesejahteraan Rakyat Kab. Konawe Utara, 2017 s.d 2020

## 2.4.2 Fokus Fasilitas Wilayah/Infrastruktur

### 2.4.2.1 Wilayah Produktif

Wilayah produktif Kabupaten Konawe Utara meliputi wilayah pertanian, wilayah perkebunan dan Hutan Rakyat. Luasan wilayah produktif akan mengalami pergeseran setiap tahunnya mengingat perubahan peruntukan lahan khususnya perkembangan pemukiman.

Berdasarkan RTRW Kabupaten Konawe Utara Tahun 2012 - 2032, luas wilayah produktif di Kabupaten Konawe Utara seluas 239.234 Ha yang terdiri dari wilayah pertanian seluas 16.0000 Ha, Kawasan pertanian pangan berkelanjutan (KP2B) seluas 4.000 Ha, Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan seluas 1.500 Ha, wilayah perkebunan hortikultura seluas 15.000 Ha, wilayah perkebunan Kelapa Sawit seluas 15.402, wilayah perkebunan tanaman rakyat 19.925, dan Hutan Rakyat

seluas 173.400 Ha. Maka rasio luas wilayah produktif sebesar 82,30 %, dimana angka rasio ini menunjukkan 82,30 % dari luas kawasan budidaya diusahakan menjadi lahan produktif.

**Tabel 2.93.**  
**Persentase Luas Wilayah Produktif**  
**Kabupaten Konawe Utara**

| No. | Uraian                        | Luas (Ha) |
|-----|-------------------------------|-----------|
| 1.  | Luas wilayah produktif        | 239.234   |
| 2.  | Luas seluruh wilayah budidaya | 290.678   |
| 3.  | Rasio (1/2)                   | 0,82      |

Sumber : Perda 20/2012 RTRW Kab. Konawe Utara Tahun 2012 – 2032

#### 2.4.2.2 Penyediaan Air Minum

Penyediaan Air minum dilaksanakan bekerjasama dengan PDAM Kabupaten Konawe Utara (Tirta Lasolo) bekerjasama dengan pemerintah Kabupaten Konawe Utara. Dalam rangka penanganan di desa rawan kekeringan dan belum terjangkau jaringan PDAM, selama lima tahun terakhir telah dibangun Hidran Umum (HU), pembangunan Sistem Instalasi Perpipaan Air Sederhana (SIPAS). Adapun lingkungan kawasan perkotaan dibangun Sistem Pengolahan Air Minum (SPAM) di masing - masing.

Sumber air minum sebagian besar berasal dari air tanah, baik air tanah dangkal yang berupa sumur gali maupun sumur dalam dan PDAM. Penduduk menggunakan sumur gali baik terlindungi maupun tak terlindungi, mencapai 9,57%, penduduk yang menggunakan mata air baik terlindungi maupun tak terlindungi 40,39%, sisanya menggunakan air dalam kemasan 0,59%, hanya sebagian kecil menggunakan air dari PDAM yang bersumber dari sumur dalam (lebih kurang 2,47%).

Upaya Pemerintah Kabupaten Konawe Utara untuk meningkatkan akses terhadap air bersih diantaranya dengan menambah jumlah sambungan rumah ke jaringan PDAM dan membangun instalasi Sistem Penyediaan Air Sederhana (SIPAS) melalui program APBD dan Pamsimas (Penyediaan Air Minum dan Sanitasi Berbasis Masyarakat) dengan mekanisme sharing APBN di daerah yang rawan air bersih. Instalasi yang terbangun tersebut selanjutnya diserahkan kepada masyarakat

setempat untuk dimanfaatkan, dikelola, dan dipelihara.

Cakupan air bersih pada tahun 2020 menurut data Dinas Kesehatan dan Dinas Pekerjaan umum sebesar 98,10%. Hal ini menunjukkan bahwa semua masyarakat Kabupaten Konawe Utara sudah dapat mengakses air bersih, walaupun akses air bersih ini masih mengalami kendala dari segi kualitas, kontinuitas dan kuantitas.

**Tabel 2.94.**  
**Persentase Rumah Tangga Yang Menggunakan Air Minum Menurut Sumbernya di Kabupaten Konawe Utara**

| No.          | Sumber                   | Persentase (%) |
|--------------|--------------------------|----------------|
| 1.           | Pompa                    | 2,47           |
| 2.           | Air Dalam Kemasan        | 0,59           |
| 3.           | Sumur Terlindungi        | 5,35           |
| 4.           | Sumur Tak Terlindungi    | 4,22           |
| 5.           | Mata Air Terlindungi     | 32,11          |
| 6.           | Mata Air Tak Terlindungi | 8,28           |
| 7.           | Air Permukaan            | 0,69           |
| 8.           | Lainnya                  | 46,29          |
| <b>Total</b> |                          | <b>100,00</b>  |

Sumber : BPS Kab. Konawe Utara, Tahun 2021

#### 2.4.2.3 Penyediaan Energi Listrik

Komitmen pemerintah daerah pada bidang energi dengan berupaya untuk mengatasi ketersediaan listrik di Kabupaten Konawe Utara selama kurun waktu empat tahun terakhir telah memperlihatkan capaian yang sangat memuaskan. Dapat dilihat pada angka Rasio elektrifikasi Kabupaten Konawe Utara pada tahun 2020 mencapai 99,99 persen.

**Tabel 2.95.**  
**Persentase Rumah Tangga Yang Menggunakan Listrik di Kabupaten Konawe Utara**

| No. | Uraian              | Tahun |       |       |       |       |
|-----|---------------------|-------|-------|-------|-------|-------|
|     |                     | 2016  | 2017  | 2018  | 2019  | 2020  |
| 1.  | Listrik PLN         | 60,84 | 66,78 | 85,86 | 87,45 | 99,99 |
| 2.  | Listrik Non PLN     | 12,57 | 12,34 | 12,11 | 11,88 | -     |
| 3.  | Bukan Listrik       | 26,59 | 20,88 | 2,03  | 0,67  | -     |
| 4.  | Rasio Elektrifikasi | 73,41 | 79,12 | 97,97 | 99,33 | 99,99 |

Sumber : BPS Kab. Konawe Utara 2021, Dianalisis

#### 2.4.2.4 Penyediaan Jaringan Telekomunikasi

*e-Government* merupakan salah satu pengungkit dalam mendukung terwujudnya program reformasi birokrasi di daerah. Kebijakan Pemerintah Kabupaten Konawe Utara memosisikan urusan komunikasi dan informatika sebagai komponen terpenting untuk menuju pemerintahan berbasis elektronik atau teknologi informasi dan komunikasi. Mutlak bagi pemerintah Kabupaten Konawe Utara, agar mampu meningkatkan pelayanan kepada masyarakat secara prima dengan kemampuan memanfaatkan sarana dan prasarana teknologi informasi tersebut di berbagai lini.

Penggunaan teknologi informasi oleh pemerintah untuk memberikan informasi dan pelayanan bagi warganya, urusan bisnis, serta hal-hal lain yang berkenaan dengan pemerintahan disebut juga *e-Government (e-gov)*. *e-Government* telah diaplikasikan didukung dengan sarana dan prasarana pengembangan jaringan internet yang bertujuan untuk meningkatkan efisiensi internal pemerintahan, menyampaikan pelayanan publik, atau proses pemerintahan yang demokratis. Keuntungan dari *e-Government* adalah peningkatan efisiensi, kenyamanan, serta aksesibilitas yang lebih baik dari pelayanan publik. Selain penyajian informasi dan aplikasi *e-Gov* melalui *website*, Pemerintah Kabupaten Konawe Utara juga sudah menerapkan sistem informasi baik yang bersifat *intranet*, *desktop*, maupun *online sebagaimana ditampilkan* pada tabel berikut.

**Tabel 2.96.**  
**Aplikasi Sistem Informasi di Kabupaten Konawe Utara**

| No. | Tahun | Nama Sistem Informasi  |
|-----|-------|--|
| 1.  | 2010  | SIMDa Keuangan   |
| 2.  | 2015  | SIJARI (Sistem Informasi Jaringan Irigasi)                     |
| 3.  | 2016  | Sistem Informasi Administrasi Kependudukan                     |
| 4.  | 2017  | Satu Peta Untuk Semua (Konawe Utara Geoportal)                 |
| 5.  | 2019  | SIMDAren Terintegrasi  |
| 6.  | 2019  | Atisisbada (Aplikasi Teknologi Informasi Siklus Barang Daerah) |
| 7.  | 2020  | SIPD (Sistem Informasi Pemerintahan Daerah)                    |

Sumber : Dinas Komunikasi dan Informatika, Tahun 2021

### 2.4.3 Fokus Iklim Berinvestasi

Iklim investasi di Kabupaten Konawe Utara terus berkembang dan menarik investor dari tahun ke tahun seiring bertambahnya pertumbuhan ekonomi di wilayah ini. Untuk mendorong iklim investasi yang baik, Kabupaten Konawe Utara memiliki Dinas Perizinan dan Penanaman Modal yang dibentuk atas kebijakan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP). Gambaran atas iklim berinvestasi dapat dilihat pada indikator angka kriminalitas, jumlah demo, lama proses perizinan, jumlah dan macam pajak dan retribusi daerah, dan jumlah perda yang mendukung iklim usaha.

#### 2.4.3.1 Angka Kriminalitas

Dalam mendukung terciptanya iklim berinvestasi di Kabupaten Konawe Utara maka pemerintah daerah bersama dengan Forum Komunikasi Pimpinan Daerah instansi vertikal (kepolisian, TNI, dan kejaksaan) harus berupaya meningkatkan keamanan yang kondusif di masyarakat, menjaga ketertiban dalam pergaulan masyarakat, serta menanggulangi kriminalitas sehingga kuantitas dan kualitas kriminalitas dapat diminimalisir. Angka kriminalitas yang tertangani merupakan indikator yang berguna untuk menggambarkan tingkat keamanan masyarakat, semakin rendah tingkat kriminalitas, maka semakin tinggi tingkat keamanan masyarakat.

**Tabel 2.97.**  
**Angka Kriminalitas di Kabupaten Konawe Utara**

| No.                       | Tindak Kriminal       | Jumlah Kasus |              |              |              |
|---------------------------|-----------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
|                           |                       | 2017         | 2018         | 2019         | 2020         |
| 1.                        | Narkoba               | -            | -            | 1            | -            |
| 2.                        | Pembunuhan            | -            | -            | 1            | -            |
| 3.                        | Kejahatan Seksual     | 1            | -            | -            | 1            |
| 4.                        | Penganiayaan          | 14           | 6            | 7            | 23           |
| 5.                        | Pencurian             | 12           | 18           | 14           | 9            |
| 6.                        | Penipuan              | 3            | 8            | 3            | 1            |
| 7.                        | Pemalsuan Uang        | 1            | -            | -            | -            |
| 8.                        | Jumlah selama 1 tahun | 25           | 32           | 26           | 34           |
| <b>Jumlah Penduduk</b>    |                       | 59.673       | 60.884       | 62.017       | 67,871       |
| <b>Angka Kriminalitas</b> |                       | <b>0.04%</b> | <b>0.05%</b> | <b>0.04%</b> | <b>0.05%</b> |

*Sumber : Konawe Utara Dalam Angka, Tahun 2021*

Tabel 2.97 menunjukkan bahwa pada tahun 2020 angka kriminalitas di Kabupaten Konawe Utara mengalami peningkatan jika dibandingkan tahun 2019. Peningkatan angka kriminalitas ini sebagian besar adalah kasus penganiayaan sebanyak 23 kasus. Perlu penanganan yang serius dari pemerintah untuk menekan angka kriminalitas di Konawe Utara.

#### 2.4.3.2 Jumlah Demonstrasi

Salah satu yang harus dikendalikan dalam mendukung iklim investasi yang kondusif adalah demonstrasi/unjukrasa. Demonstrasi atau unjuk rasa adalah sebuah gerakan protes yang dilakukan sekumpulan orang dihadapan umum. Unjuk rasa biasanya dilakukan untuk menyatakan pendapat kelompok tersebut.

**Tabel 2.98.**  
**Jumlah Demonstrasi/Unjuk Rasa**  
**di Kabupaten Konawe Utara**

| No.                          | Uraian                | Tahun |      |      |      |      |
|------------------------------|-----------------------|-------|------|------|------|------|
|                              |                       | 2016  | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
| 1.                           | Bidang politik        | 4     | 1    | 2    | 1    | 1    |
| 2.                           | Bidang ekonomi        | 15    | 24   | 22   | 20   | 18   |
| 3.                           | Kasus pemogokan kerja | -     | -    | -    | -    | -    |
| Jumlah Demostrasi/Unjuk Rasa |                       | 17    | 19   | 25   | 24   | 19   |

*Sumber : Kesbangpol Kab. Konawe Utara, Tahun 2021*

#### 2.4.3.3 Kemudahan Perizinan

Pelayanan publik yang memuaskan masyarakat adalah tujuan akhir dari reformasi birokrasi. Sejalan dengan hal itu, Pemerintah Kabupaten Konawe Utara terus berupaya meningkatkan kualitas berbagai jenis pelayanan publik, termasuk pelayanan di bidang perizinan.

Kemudahan perijinan adalah proses pengurusan perijinan yang terkait dengan persoalan investasi relatif sangat mudah dan tidak memerlukan waktu yang lama. Kemudahan perijinan merupakan salah satu faktor pembentuk daya saing investasi yang memengaruhi masuknya investasi ke suatu daerah.

Pemerintah Kabupaten Konawe Utara terus berupaya untuk memberikan pelayanan yang baik dalam proses perijinan melalui reformasi di bidang perijinan guna

menindaklanjuti Peraturan Presiden Nomor 91 Tahun 2017 tentang Perepatan Pelaksanaan Berusaha. Kemudian menindaklanjuti Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik yang mengamanatkan untuk mengkaji peraturan daerah dan peraturan bupati terkait perijinan di Kabupaten yang sesuai dengan peraturan pemerintah tersebut, telah diadakan konsultasi publik.

Pemerintah Kabupaten Konawe Utara telah membentuk Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu yang menangani pengelolaan perijinan secara terpadu agar terjadi peningkatan pelayanan perizinan dengan prosedur yang mudah, murah, cepat, berkualitas, dan akurat. Sampai dengan Tahun 2020 terdapat 73 jenis pelayanan perizinan di Kabupaten Konawe Utara, sebagaimana ditampilkan pada table berikut:

**Tabel 2.99.**  
**Jenis Pelayanan Perizinan**  
**di Kabupaten Konawe Utara**

| No. | Sektor                      | Jumlah Jenis Perizinan | Jenis Perizinan Yang Dikeluarkan   |
|-----|-----------------------------|------------------------|--|
| 1.  | Perizinan Bidang Pendidikan | 2                      | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Izin Pendidikan Dasar Yang Diselenggarakan Oleh Masyarakat</li> <li>- Izin Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal</li> </ul>  |
| 2.  | Perizinan Bidang Kesehatan  | 11                     | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Izin Rumah Sakit Kelas C dan D</li> <li>- Izin Operasional Rumah Sakit Kelas C dan D</li> <li>- Izin Praktik dan Izin Kerja Tenaga Kesehatan</li> <li>- Izin Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan dan Optikal</li> <li>- Izin Klinik</li> <li>- Izin Operasional Klinik</li> <li>- Izin Operasional Puskesmas</li> <li>- Izinusaha Mikro/Kecil Obat Tradisional ( UMOT ) dan (UKOT)</li> <li>- Izin Produksi Makanan dan Minuman Pada Industri Rumah Tangga</li> <li>- Izin Operasional Laboratorium Klinik Umum Pratama</li> <li>- Izin PRT Alat Kesehatan dan PKRT</li> </ul> |

| No. | Sektor                          | Jumlah Jenis Perizinan | Jenis Perizinan Yang Dikeluarkan  |
|-----|---------------------------------|------------------------|---|
| 3.  | Perizinan Bidang Pekerjaan Umum | 3                      | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Izin Mendirikan Bangunan ( IMB) dan Sertifikat Layak Fungsi</li> <li>- Tanda Daftar Usaha Perseorangan (TDUP)</li> <li>- Izin Usaha Jasa Konstruksi (IUJK) (Non Kecil dan Kecil)</li> <li>- Izin Pemanfaatan Bagian-Bagian Jalan</li> <li>- Izin Pengusahaan Sumber Daya Air dan Penggunaan Sumber Daya Air</li> </ul>   |
| 4.  | Perizinan Bidang Perhubungan    | 10                     | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir</li> <li>- Izin Usaha Penyelenggaraan Angkutan Orang</li> <li>- Izin Usaha Angkutan Sungai dan dan au</li> <li>- Izin Usaha Angkutan Laut Pelayaran Rakyat</li> <li>- Izin Usaha Angkutan Laut</li> <li>- Surat Izin Usaha Trayek Penyelenggaraan Angkutan Sungai dan dan au Untuk Kapal Yang Melayani Trayek</li> <li>- Izin Usaha Penyelenggaraan Angkutan Penyebrangan(Pelayanan Dalam Kabupaten)</li> <li>- Izin Usaha Jasa Perawatan dan Perbaikan Kapal</li> <li>- Izin Mendirikan Bangunan Tempat Pendaratan dan Lepas Landas Helikopter</li> <li>- Persetujuan Hasil Analisis Dampak Lalu Lintas (Andalalin) Untuk Jalan Kabaupaten dan / Atau Jalan Desa</li> </ul> |
| 5.  | Perizinan Bidang Koperasi       | 2                      | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Izin Usaha Simpan Pinjam Untuk Koperasi Dengan Wilayah Keanggotaan Dalam Daerah Kabupaten</li> <li>- Izin Pembukaan Kantor Cabang, Cabang Pembantu dan Kantor Kas Koperasi Simpan Pinjam Untuk Koperasi Dengan Wilayah Keanggotaan Dalam Daerah Kabupaten</li> </ul>   |
| 6.  | Perizinan Bidang Sosial         | 1                      | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Izin Pengumpulan Sumbangan</li> </ul>  |

| No. | Sektor                            | Jumlah Jenis Perizinan | Jenis Perizinan Yang Dikeluarkan  |
|-----|-----------------------------------|------------------------|---|
|     |                                   |                        | Dalam Daerah Kabupaten/Kota   |
| 7.  | Perizinan Bidang Ketenagakerjaan  | 3                      | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Izin Lembaga Pelatihan Kerja (LPK)</li> <li>- Izin Usaha Lembaga Penempatan Tenaga Kerja Swasta</li> <li>- Pengesahan Peraturan dan Pendaftaran Perjanjian Kerjasama Untuk Perusahaan Yang Hanya Beroperasi Dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten</li> </ul>   |
| 8.  | Perizinan Bidang Pertanahan       | 1                      | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Izin Lokasi</li> </ul>   |
| 9.  | Perizinan Bidang Lingkungan Hidup | 3                      | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Izin Lingkungan</li> <li>- Izin Pembuangan Air Limbah</li> <li>- Izin Operasional Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (Limbah B3) Untuk Penghasil</li> </ul>  |
| 10. | Perizinan Bidang Pariwisata       | 1                      | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Tanda Daftar Usaha Pariwisata (TDUP)</li> </ul>  |
| 11. | Perizinan Bidang Pertanian        | 30                     | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Usaha Budidaya Perkebunan</li> <li>- Izin Usaha Proses Produksi Tanaman Pangan</li> <li>- Izin Usaha Obat Hewan</li> <li>- Izin Usaha Hortikultura</li> <li>- Izin Usaha Peternakan</li> <li>- Pendaftaran Usaha Perkebunan</li> <li>- Pendaftaran Usaha Tanaman Pangan</li> <li>- Pendaftaran Usaha Budi Daya Hortikultura</li> <li>- Pendaftaran Usaha Peternakan</li> <li>- Izin Pemasukan dan Pengeluaran Benih Tanaman</li> <li>- Izin Pemasukan dan Pengeluaran Benih/Bibit Ternak</li> <li>- Izin Pemasukan dan Pengeluaran Sumber Daya Genetik</li> <li>- Izin Pemasukan Agens Hayati</li> <li>- Izin Pemasukan dan Pengeluaran Bahan Pakan Asal Hewan dan Tumbuhan</li> <li>- Izin Pemasukan dan Pengeluaran Obat Hewan</li> <li>- Izin Pemasukan dan Pengeluaran Hewan Peliharaan</li> </ul> |

| No. | Sektor   | Jumlah Jenis Perizinan | Jenis Perizinan Yang Dikeluarkan   |
|-----|--|------------------------|--|
|     |  |                        | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Rekomendasi Ekspor/Impor Beras Tertentu</li> <li>- Rekomendasi Impor Produk Hortikultura</li> <li>- Rekomendasi Teknis Impor Produk Tembakau</li> <li>- Rekomendasi Pemasukan dan Pengeluaran Produk Hewan</li> <li>- Rekomendasi Pemasukan dan Pengeluaran Ternak Ruminansia dan Babi</li> <li>- Pendaftaran Pangan Segar Asal Tumbuhan</li> <li>- Pendaftaran Alat Mesin Pertanian</li> <li>- Pendaftaran Pakan Ternak</li> <li>- Pendaftaran/Registrasi Obat Hewan</li> <li>- Pendaftaran/Pelepasan Varietas Tanaman</li> <li>- Perlindungan dan Pendaftaran Varietas Tanaman</li> <li>- Pendaftaran Pestisida</li> <li>- Pendaftaran Pupuk</li> <li>- Penetapan Instalasi Karantina Tumbuhan dan Hewan</li> </ul> |
| 12. | Perizinan Bidang Perikanan Dan Kelautan        | 1                      | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Izin Perikanan (IUP) Dibidang Pembudidayaan Ikan Yang Usahanya Dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten</li> </ul>   |
| 13. | Perizinan Bidang Perdagangan Dan Perindustrian | 5                      | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Izin Pengelolaan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan dan Izin Usaha Toko Swalayan</li> <li>- Surat Tanda Pendaftaran Waralaba (STPW)</li> <li>- Izin Usaha Perdagangan Minuman Beralkohol Gol B dan C</li> <li>- Izin Usaha Industri Kecil dan Menengah (IUI) dan Izin Perluasan Usaha Industri</li> <li>- Izin Usaha Kawasan Industri dan Izin Perluasan Kawasan Industri Yang Lokasinya Di Kabupaten</li> </ul>  |

Sumber : DPMPTSP Kab. Konawe Utara, Tahun 2021

Dengan adanya penyederhanaan pelayanan dan efisiensi waktu, proses penyelesaian ijin dapat diselesaikan paling lama 12 hari kerja jika syarat administrasi dan teknisnya lengkap, jelas, dan benar. Di samping itu, di Kabupaten Konawe Utara pengurusan ijin dapat dilaksanakan secara paralel (sekali mengajukan untuk beberapa jenis ijin dalam obyek ijin yang sama). Secara terperinci pelayanan perizinan disajikan pada tabel berikut ini:

**Tabel 2.100.**  
**Lama Proses Perizinan di Kabupaten Konawe Utara**

| No. | Uraian | Lama Mengurus (Hari) | Jumlah Persyaratan (Dokumen) | Biaya Resmi (Rata-Rata Maks Rp.) |
|-----|--------|----------------------|------------------------------|----------------------------------|
| 1.  | SIUP   | -                    | -                            | -                                |
| 2.  | TDP    | -                    | -                            | -                                |
| 3.  | IUI    | 5                    | 7                            | Gratis                           |
| 4.  | TDI    | -                    | -                            | -                                |
| 5.  | IMB    | 5                    | 7                            | Gratis                           |

Sumber : DPMPTSP Kab. Konawe Utara, Tahun 2021

**Tabel 2.101.**  
**Rekapitulasi Perizinan di Kabupaten Konawe Utara**

| No. | Uraian            | Tahun |      |      |      |      |
|-----|-------------------|-------|------|------|------|------|
|     |                   | 2016  | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
| 1.  | Permohonan izin   | 159   | 191  | 202  | 256  | 530  |
| 2.  | Izin diterbitkan  | 53    | 62   | 68   | 56   | 65   |
| 3.  | Izin ditolak      | -     | -    | -    | -    | -    |
| 4.  | Izin dalam proses | 106   | 129  | 134  | 200  | 465  |

Sumber : DPMPTSP Kab. Konawe Utara, Tahun 2021

Pemerintah Kabupaten Konawe Utara berusaha menyelesaikan pengaduan masyarakat yang berkaitan dengan pelayanan perijinan dengan baik dan memuaskan melalui berbagai sarana baik datang langsung (disediakan loket khusus pengaduan), telepon, SMS, WA, *e-mail*. Pengaduan yang masuk ditangani sesuai Standar Operasional Prosedur (SOP) khusus penanganan pengaduan.

#### **2.4.3.4 Peraturan Daerah Yang Mendukung Iklim Usaha**

Peraturan Daerah merupakan sebuah instrumen kebijakan daerah yang sifatnya formal, melalui perda inilah dapat diindikasikan adanya insentif maupun disinsentif sebuah kebijakan di daerah terhadap aktivitas perekonomian. Perda yang mendukung iklim usaha dibatasi yaitu perda terkait dengan perijizinan, perda terkait dengan lalu lintas barang dan jasa, serta perda terkait dengan ketenagakerjaan.

#### **2.4.3.5 Perkembangan Pembangunan Desa**

Selain status desa perdesaan dan perkotaan, ada status desa berdasarkan perkembangan kemajuan desa, mengingat desa Kabupaten Konawe Utara memiliki karakteristik yang berbeda-beda baik dari segi luas wilayah, kondisi ekonomi, politik, dan sosial budaya. Hal ini penting karena pembangunan perdesaan merupakan salah satu amanat Undang Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, Pasal 86, yang salah satu ayatnya menyebutkan "Pemerintah dan Pemerintah Daerah wajib mengembangkan sistem informasi desa dan pembangunan kawasan perdesaan". Selain itu juga mendukung salah satu Nawacita pemerintah, yaitu "Pembangunan Indonesia dari pinggiran dengan memperkuat daerah - daerah dan desa dalam kerangka Negara Kesatuan".

Ada dua status desa berdasarkan perkembangan kemajuan desa, yaitu Indeks Pembangunan Desa (IPD) Tahun 2018 dan Indeks Desa Membangun (IDM) Tahun 2020 yang merupakan hasil analisis dari basis data yang sama yaitu hasil pendataan Potensi Desa (Podes) yang dilaksanakan oleh Badan Pusat Statistik pada tahun 2014.

Indeks Desa Membangun (IDM) merupakan Indeks Komposit yang dibentuk berdasarkan tiga indeks, yaitu Indeks Ketahanan Sosial, Indeks Ketahanan Ekonomi dan Indeks Ketahanan Ekologi/Lingkungan. Perangkat indikator yang dikembangkan dalam Indeks Desa Membangun dikembangkan berdasarkan konsepsi bahwa untuk menuju Desa maju dan mandiri perlu kerangka kerja pembangunan berkelanjutan di mana aspek sosial, ekonomi, dan ekologi menjadi kekuatan yang saling mengisi dan menjaga potensi serta kemampuan Desa untuk mensejahterakan kehidupan Desa. Kebijakan dan aktivitas pembangunan dan pemberdayaan masyarakat Desa harus menghasilkan pemerataan dan keadilan, didasarkan dan memperkuat nilai-nilai lokal dan budaya, serta ramah lingkungan dengan mengelola potensi sumber daya alam secara baik dan berkelanjutan. Dalam konteks ini ketahanan sosial, ekonomi, dan

ekologi bekerja sebagai dimensi yang memperkuat gerak proses dan pencapaian tujuan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat Desa.

Indeks Desa Membangun memotret perkembangan kemandirian Desa berdasarkan implementasi Undang-Undang Desa dengan dukungan Dana Desa serta Pendamping Desa. Indeks Desa Membangun mengarahkan ketepatan intervensi dalam kebijakan dengan korelasi intervensi pembangunan yang tepat dari Pemerintah sesuai dengan partisipasi Masyarakat yang berkorelasi dengan karakteristik wilayah Desa yaitu tipologi dan modal sosial. Hasil analisis terhadap status desa di Kabupaten Konawe Utara menurut IDM, disajikan pada Tabel 2.102 berikut ini:

**Tabel 2.102.**  
**Status Desa di Kabupaten Konawe Utara Menurut**  
**Indeks Desa Membangun (IDM) Tahun 2020**

| No. | Kecamatan | Desa         | IDM    | Klasifikasi |
|-----|-----------|--------------|--------|-------------|
| 1   | Motui     | Banggina     | 0,5016 | Tertinggal  |
|     |           | Kapolano     | 0,5595 | Tertinggal  |
|     |           | Lambuluo     | 0,5805 | Tertinggal  |
|     |           | Matandahi    | 0,5565 | Tertinggal  |
|     |           | Motui        | 0,6494 | Berkembang  |
|     |           | Poni Poniki  | 0,5210 | Tertinggal  |
|     |           | Punggulahi   | 0,5767 | Tertinggal  |
|     |           | Puuwonggia   | 0,5311 | Tertinggal  |
|     |           | Ranombupulu  | 0,6233 | Berkembang  |
|     |           | Sama Subur   | 0,4952 | Tertinggal  |
|     |           | Sambasule    | 0,5932 | Tertinggal  |
|     |           | Tobimeita    | 0,5503 | Tertinggal  |
|     |           | Tondowatu    | 0,5894 | Tertinggal  |
|     |           | Wawoluri     | 0,6471 | Berkembang  |
| 2   | Sawa      | Kokapi       | 0,7051 | Berkembang  |
|     |           | Laimeo       | 0,6100 | Berkembang  |
|     |           | Lalembo      | 0,5938 | Tertinggal  |
|     |           | Matanggonawe | 0,6811 | Berkembang  |

| No. | Kecamatan | Desa             | IDM    | Klasifikasi |
|-----|-----------|------------------|--------|-------------|
|     |           | Panggulawu       | 0,5897 | Tertinggal  |
|     |           | Pekaroa          | 0,6251 | Berkembang  |
|     |           | Pudonggala       | 0,6519 | Berkembang  |
|     |           | Pudonggala Utama | 0,6268 | Berkembang  |
|     |           | Puupi            | 0,5759 | Tertinggal  |
|     |           | Tanjung Laimeo   | 0,6195 | Berkembang  |
|     |           | Tongauna         | 0,6257 | Berkembang  |
|     |           | Tudungano        | 0,5881 | Tertinggal  |
|     |           | Ulu Sawa         | 0,6457 | Berkembang  |
| 3   | Lembo     | Alo Alo          | 0,6451 | Berkembang  |
|     |           | Bungguosu        | 0,6032 | Berkembang  |
|     |           | Lapulu           | 0,6068 | Berkembang  |
|     |           | Laramo           | 0,6049 | Berkembang  |
|     |           | Padaleu          | 0,6222 | Berkembang  |
|     |           | Pasir Putih      | 0,6367 | Berkembang  |
|     |           | Puulemo          | 0,6029 | Berkembang  |
|     |           | Puusiambu        | 0,5905 | Tertinggal  |
|     |           | Taipa            | 0,6275 | Berkembang  |
|     |           | Tongalino        | 0,6181 | Berkembang  |
|     |           | Watuwula         | 0,5489 | Tertinggal  |
| 4   | Wawolesea | Barasanga        | 0,6043 | Berkembang  |
|     |           | Kampoh Bunga     | 0,6137 | Berkembang  |
|     |           | Kampoh Cina      | 0,5744 | Tertinggal  |
|     |           | Lemo Bajo        | 0,6438 | Berkembang  |
|     |           | Otipulu          | 0,6306 | Berkembang  |
|     |           | Tanjung Bunga    | 0,5876 | Tertinggal  |
|     |           | Toreo            | 0,6365 | Berkembang  |
|     |           | Wawolesea        | 0,6379 | Berkembang  |
| 5   | Lasolo    | Abola            | 0,6284 | Berkembang  |
|     |           | Andeo            | 0,6049 | Berkembang  |
|     |           | Andumowu         | 0,6511 | Berkembang  |

| No. | Kecamatan        | Desa           | IDM    | Klasifikasi       |
|-----|------------------|----------------|--------|-------------------|
|     |                  | Basule         | 0,6194 | Berkembang        |
|     |                  | Belalo         | 0,6105 | Berkembang        |
|     |                  | Lalowaru       | 0,6130 | Berkembang        |
|     |                  | Lametono       | 0,5851 | Tertinggal        |
|     |                  | Larodangge     | 0,6359 | Berkembang        |
|     |                  | Marombo Pantai | 0,4490 | Sangat Tertinggal |
|     |                  | Matapila       | 0,6719 | Berkembang        |
|     |                  | Muara Tinobu   | 0,6984 | Berkembang        |
|     |                  | Otole          | 0,6308 | Berkembang        |
|     |                  | Tetelupai      | 0,6190 | Berkembang        |
|     |                  | Tokowuta       | 0,5784 | Tertinggal        |
|     |                  | Watukila       | 0,6116 | Berkembang        |
|     |                  | Waworaha       | 0,6249 | Berkembang        |
| 6   | Lasolo Kepulauan | Boedingi       | 0,5014 | Tertinggal        |
|     |                  | Boenaga        | 0,5483 | Tertinggal        |
|     |                  | Labengki       | 0,5749 | Tertinggal        |
|     |                  | Morombo        | 0,5083 | Tertinggal        |
|     |                  | Tapunopaka     | 0,5022 | Tertinggal        |
|     |                  | Waturambaha    | 0,5637 | Tertinggal        |
| 7   | Molawe           | Awila          | 0,6863 | Berkembang        |
|     |                  | Awila Puncak   | 0,7070 | Berkembang        |
|     |                  | Bandaeha       | 0,6608 | Berkembang        |
|     |                  | Mandiodo       | 0,6290 | Berkembang        |
|     |                  | Mataiwoi       | 0,6806 | Berkembang        |
|     |                  | Mowundo        | 0,6773 | Berkembang        |
|     |                  | Tapuemea       | 0,5975 | Tertinggal        |
|     |                  | Tapunggaya     | 0,5940 | Tertinggal        |
| 8   | Andowia          | Ambake         | 0,5744 | Tertinggal        |
|     |                  | Amolame        | 0,6690 | Berkembang        |
|     |                  | Anggolohipo    | 0,6205 | Berkembang        |
|     |                  | Banggarema     | 0,5433 | Tertinggal        |

| No.       | Kecamatan    | Desa          | IDM    | Klasifikasi       |
|-----------|--------------|---------------|--------|-------------------|
|           |              | Labungga      | 0,5559 | Tertinggal        |
|           |              | Lahimbua      | 0,6122 | Berkembang        |
|           |              | Lambudoni     | 0,6038 | Berkembang        |
|           |              | Lamondowo     | 0,6397 | Berkembang        |
|           |              | Larobende     | 0,6414 | Berkembang        |
|           |              | Laronanga     | 0,5246 | Tertinggal        |
|           |              | Mataiwoi      | 0,6448 | Berkembang        |
|           |              | Puusuli       | 0,5216 | Tertinggal        |
|           |              | Puuwonua      | 0,5873 | Tertinggal        |
|           |              | Waworate      | 0,5038 | Tertinggal        |
| <b>9</b>  | <b>Asera</b> | Alaa Wanggudu | 0,5546 | Tertinggal        |
|           |              | Amorome       | 0,5546 | Tertinggal        |
|           |              | Amorome Utama | 0,5562 | Tertinggal        |
|           |              | Andedao       | 0,5322 | Tertinggal        |
|           |              | Aseminunulai  | 0,4871 | Sangat Tertinggal |
|           |              | Kota Mulya    | 0,5841 | Tertinggal        |
|           |              | Longeo Utama  | 0,5168 | Tertinggal        |
|           |              | Oheo Trans    | 0,5327 | Tertinggal        |
|           |              | Puunggomosi   | 0,6273 | Berkembang        |
|           |              | Puuwanggudu   | 0,5770 | Tertinggal        |
|           |              | Tangguluri    | 0,5281 | Tertinggal        |
|           |              | Tapuwatu      | 0,5243 | Tertinggal        |
|           |              | Walalindu     | 0,5503 | Tertinggal        |
|           |              | Walasolo      | 0,6140 | Berkembang        |
|           |              | Wanggudu Raya | 0,6167 | Berkembang        |
|           |              | Wawolimbue    | 0,5621 | Tertinggal        |
|           |              | Wunduhaka     | 0,6238 | Berkembang        |
| <b>10</b> | <b>Oheo</b>  | Bandaeha      | 0,6657 | Berkembang        |
|           |              | Bendewuta     | 0,5151 | Tertinggal        |
|           |              | Horoe         | 0,5502 | Tertinggal        |
|           |              | Kota Maju     | 0,6476 | Berkembang        |

| No.       | Kecamatan         | Desa             | IDM    | Klasifikasi |
|-----------|-------------------|------------------|--------|-------------|
|           |                   | Lameoru          | 0,5763 | Tertinggal  |
|           |                   | Landawe          | 0,5414 | Tertinggal  |
|           |                   | Laronaha         | 0,6251 | Berkembang  |
|           |                   | Mopute           | 0,5760 | Tertinggal  |
|           |                   | Paka Indah       | 0,5917 | Tertinggal  |
|           |                   | Puuhialu         | 0,5519 | Tertinggal  |
|           |                   | Sambandete       | 0,5394 | Tertinggal  |
|           |                   | Tadolojiyo       | 0,5078 | Tertinggal  |
|           |                   | Tadolojiyo Trans | 0,5344 | Tertinggal  |
|           |                   | Tinondo          | 0,5224 | Tertinggal  |
|           |                   | Walandawe        | 0,5524 | Tertinggal  |
|           |                   | Wiwirano         | 0,5671 | Tertinggal  |
| <b>11</b> | <b>Langgikima</b> | Alenggo          | 0,5962 | Tertinggal  |
|           |                   | Lameruru         | 0,5029 | Tertinggal  |
|           |                   | Mekar Jaya       | 0,5746 | Tertinggal  |
|           |                   | Molore           | 0,5246 | Tertinggal  |
|           |                   | Molore Pantai    | 0,5311 | Tertinggal  |
|           |                   | Morombo Pantai   | 0,5837 | Tertinggal  |
|           |                   | Ngapa Inia       | 0,5738 | Tertinggal  |
|           |                   | Pariama          | 0,5998 | Berkembang  |
|           |                   | Polora Indah     | 0,5825 | Tertinggal  |
|           |                   | Sarimukti        | 0,5422 | Tertinggal  |
|           |                   | Tobimeita        | 0,5211 | Tertinggal  |
| <b>12</b> | <b>Landawe</b>    | Hialu            | 0,6098 | Berkembang  |
|           |                   | Hialu Utama      | 0,6913 | Berkembang  |
|           |                   | Kolosua          | 0,5992 | Berkembang  |
|           |                   | Kuratao          | 0,6230 | Berkembang  |
|           |                   | Landawe Utama    | 0,5144 | Tertinggal  |
|           |                   | Landiwo          | 0,5317 | Tertinggal  |
|           |                   | Laumoso          | 0,5259 | Tertinggal  |
|           |                   | Mata Benua       | 0,6067 | Berkembang  |

| No.                                      | Kecamatan | Desa           | IDM    | Klasifikasi |
|--|-----------|----------------|--------|-------------|
|  |           | Matabaho       | 0,5784 | Tertinggal  |
|  |           | Polo-Polora    | 0,5335 | Tertinggal  |
|  |           | Tambakua       | 0,5008 | Tertinggal  |
| 13                                       | Wiwirano  | Culumbatu      | 0,5759 | Tertinggal  |
|  |           | Lamonae Utama  | 0,5470 | Tertinggal  |
|  |           | Lamparinga     | 0,5222 | Tertinggal  |
|  |           | Larompana      | 0,5114 | Tertinggal  |
|  |           | Mata Osole     | 0,6832 | Berkembang  |
|  |           | Padalere       | 0,5481 | Tertinggal  |
|  |           | Padalere Utama | 0,5230 | Tertinggal  |
|  |           | Pondoa         | 0,5129 | Tertinggal  |
|  |           | Tetewatu       | 0,5687 | Tertinggal  |
|  |           | Wacu Pinodo    | 0,5298 | Tertinggal  |
|  |           | Wacumelewe     | 0,5622 | Tertinggal  |
|  |           | Wawoheo        | 0,6329 | Berkembang  |
|  |           | Wawonsangi     | 0,4963 | Tertinggal  |
|  |           | Wawontoaho     | 0,5789 | Tertinggal  |
| <b>Rata - Rata IDM Konawe Utara 2020</b> |           |                | 0,5855 | TERTINGGAL  |
| <b>Rata - Rata IDM Konawe Utara 2019</b> |           |                | 0,5824 | TERTINGGAL  |
| <b>Rata - Rata IDM Konawe Utara 2018</b> |           |                | 0,5429 | TERTINGGAL  |
| <b>Rata - Rata IDM Konawe Utara 2017</b> |           |                | 0,5352 | TERTINGGAL  |
| <b>Rata - Rata IDM Konawe Utara 2016</b> |           |                | 0,5236 | TERTINGGAL  |

Sumber : [idm.kemendesa.go.id/idm\\_data](http://idm.kemendesa.go.id/idm_data)

Indeks Desa Membangun (IDM) Kabupaten Konawe Utara sebesar 0,5855 atau yang terendah setelah Kabupaten Konawe Kepulauan (0,5654) di Provinsi Sulawesi Tenggara. Sementara Indeks Desa Membangun (IDM) berdasarkan analisis Tahun 2020, dari 159 desa di Kabupaten Konawe Utara, dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Tidak ada satupun desa di Kabupaten Konawe Utara mendapat status/klasifikasi mandiri dan maju;
2. Jumlah desa yang berstatus/klasifikasi tertinggal sebanyak 89 desa;
3. Jumlah desa yang berstatus/klasifikasi sangat tertinggal sebanyak 2 desa;

4. Jumlah desa yang berstatus/klasifikasi berkembang sebanyak 68 desa;
5. Berdasarkan *ranking* IDM, tiga desa dengan skor tertinggi adalah Desa Awila Puncak, Kecamatan Molawe (0,7070); Desa Kokapi, Kecamatan Sawa (0,7051); dan Desa Muara Tinobu, Kecamatan Lasolo (0,6984). Adapun desa dengan nilai terendah adalah Desa Morombo Pantai, Kecamatan Lasolo (0,4490); Desa Aseminunulai, Kecamatan Asera (0,4871); dan Desa Sama Subur, Kecamatan Motui (0,4952).

#### 2.4.4 Fokus Sumber Daya Manusia

Kualitas tenaga kerja dapat dilihat dari kualitas SDM yang mengenyam pendidikan tinggi dan mempunyai keahlian serta menguasai teknologi yang dibutuhkan di dunia kerja. Peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) merupakan kunci keberhasilan pembangunan nasional dan daerah. Hal ini dapat disadari oleh karena manusia sebagai subyek dan obyek dalam pembangunan. Mengingat hal tersebut, maka pembangunan SDM diarahkan agar benar-benar mampu dan memiliki etos kerja yang produktif, terampil, kreatif, disiplin dan profesional. Disamping itu juga mampu memanfaatkan, mengembangkan dan menguasai ilmu dan teknologi yang inovatif dalam rangka memacu pelaksanaan pembangunan nasional. Kualitas sumberdaya manusia juga memiliki peranan penting dalam meningkatkan daya saing daerah dan perkembangan investasi di daerah. Salah satu pengukuran dasar kualitas tenaga kerja adalah rasio lulusan S1/S2/S3 sebagaimana ditampilkan pada tabel berikut:

**Tabel 2.103.**  
**Tingkat Pendidikan Tenaga Kerja**  
**di Kabupaten Konawe Utara**

| No. | Uraian                  | Tahun  |        |        |        |        |
|-----|-------------------------|--------|--------|--------|--------|--------|
|     |                         | 2016   | 2017   | 2018   | 2019   | 2020   |
| 1.  | Jumlah lulusan S1/S2/S3 | 1.466  | 1.080  | 1.534  | 5.852  | 9.997  |
| 2.  | Jumlah penduduk         | 59.673 | 60.884 | 62.017 | 63.814 | 67.871 |
| 3.  | Rasio (1/2)             | 2.51   | 1.81   | 2,51   | 9,17   | 14,73  |

Sumber: BPS Kab. Konawe Utara 2021, Dianalisis

#### 2.4.4.1 Rasio Ketergantungan

Rasio ketergantungan menunjukkan besar beban tanggungan kelompok usia produktif atas penduduk usia non produktif. Kelompok usia produktif adalah penduduk yang berada pada kelompok umur 15-64 tahun, yang dianggap dapat bekerja dan berkontribusi secara ekonomi maupun sosial. Kelompok non produktif adalah penduduk yang berada pada kelompok umur 0-14 tahun dan 65 tahun ke atas, yang dianggap belum mampu atau sudah tidak mampu bekerja sehingga tidak berkontribusi secara ekonomi maupun sosial.

Semakin besar rasio ketergantungan berarti semakin besar beban tanggungan bagi kelompok produktif. Angka ketergantungan dianggap rendah apabila kurang dari 30, sedang apabila antara 30-40 dan tinggi apabila lebih dari 40. Semakin rendah angka ketergantungan, mengindikasikan semakin baik kondisi perekonomian karena semakin rendah kelompok non produktif yang ditanggung secara ekonomi oleh kelompok produktif. Tanggungan dapat berbentuk jaminan sosial, bantuan pensiun dan fasilitas lain yang diperoleh kelompok non produktif.

Rasio ketergantungan di Kabupaten Konawe Utara pada tahun 2020 sebesar 50,88 Hal ini menunjukkan bahwa 100 orang penduduk usia produktif di Kabupaten Konawe Utara harus menanggung 51 orang penduduk yang non produktif. Meski rasio ketergantungan tahun 2020 turun jika dibandingkan tahun 2019 (57,11) tetapi masih termasuk kategori tinggi. Oleh sebab itu untuk mengurangi rasio ketergantungan, maka pemerintah berusaha meningkatkan pelayanan kesehatan dan pemberdayaan bagi lansia sehingga selain sehat dan kuat juga dapat lebih produktif.

**Tabel 2.104.**  
**Rasio Ketergantungan (Beban Tanggungan)**  
**di Kabupaten Konawe Utara**

| No. | Uraian  | Tahun  |        |        |        |        |        |
|-----|---|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
|     |   | 2015   | 2016   | 2017   | 2018   | 2019   | 2020   |
| 1.  | Jumlah penduduk usia < 15 tahun dan > 64 tahun (usia tidak produktif) | 20.871 | 21.365 | 22.114 | 22.901 | 23.196 | 22.889 |
| 2.  | Jumlah penduduk usia 15 - 64 tahun (usia produktif)                   | 33.851 | 35.712 | 37,559 | 39.502 | 40.618 | 44.982 |
| 3.  | Rasio ketergantungan (1/2)  | 61,66  | 59,83  | 58,88  | 57,92  | 57,11  | 50,88  |

Sumber : BPS, Kab. Konawe Utara 2021, Dianalisis

## 2.5 CAPAIAN KINERJA RPJMD 2016 - 2021

Rancangan Awal RPJMD Kabupaten Konawe Utara Tahun 2021-2026 disusun dengan memperhatikan hasil evaluasi Perubahan RPJMD sampai dengan tahun 2020. Capaian indikator sasaran pokok pembangunan yang merepresentasikan pencapaian masyarakat Kabupaten Konawe Utara yang sejahtera dan beradab hingga tahun 2020 sebagai berikut:

**Tabel 2.105.**  
**Perbandingan Capaian Kinerja Sasaran s.d Tahun 2020**  
**Terhadap Target Akhir RPJMD**

| No. | Sasaran Daerah  | Indikator   | Satuan | Realisasi Tahun 2020 | Target Akhir RPJMD 2016-2021 | Capaian s.d Tahun 2020 terhadap Target Akhir RPJMD |
|-----|---|---|--------|----------------------|------------------------------|--|
| 1.  | Meningkatnya pelayanan dan pembangunan transportasi perkotaan dan perdesaan | Persentase kualitas jalan dan jembatan dalam kondisi mantap | %      | 84,03                | 87,96                        | 95,53  |
| 2.  | Meningkatnya pengelolaan sumber daya air                                    | Jaringan irigasi dalam kondisi baik                         | %      | 67,23                | 70,45                        | 95,43  |
| 3.  | Meningkatnya sarana dan prasarana perumahan dan permukiman                  | Persentase rumah layak huni                                 | %      | 68                   | 85                           | 80   |
|     |   | Jaringan Perpipaan SPAM                                     | km     | 25                   | 11,6                         | 215,52   |
|     |   | Persentase rumah tangga pengguna air bersih                 | %      | 98,10                | 100                          | 98,10  |
|     |   | Persentase penduduk berakses sanitasi yang layak            | %      | 63,37                | 100                          | 63,37  |
| 4.  | Meningkatnya Perekonomian Daerah  | Pertumbuhan Ekonomi   | %      | (0,72)               | 7,31                         | 78,25  |
|     |   | Inflasi   | %      | 2,25                 | 2,8                          | 80,36  |
| 5.  | Meningkatnya ketersediaan   | Tingkat Penguatan Cadangan Pangan                           | %      | 100                  | 100                          | 100,00   |

| No. | Sasaran Daerah  | Indikator  | Satuan       | Realisasi Tahun 2020 | Target Akhir RPJMD 2016-2021 | Capaian s.d Tahun 2020 terhadap Target Akhir RPJMD |
|-----|---|--|--------------|----------------------|------------------------------|--|
|     | pangan  |  |              |                      |                              |  |
| 6.  | Meningkatnya produksi dan produktivitas pertanian, perkebunan dan perikanan | Pertumbuhan PDRB sub sektor pertanian tanaman pangan | %            | 2,51                 | 4,52                         | 55,53  |
|     |   | Pertumbuhan PDRB sub sektor hortikultura             | %            | 6,12                 | 6,82                         | 89,74  |
|     |   | Pertumbuhan PDRB sub sektor perkebunan               | %            | 7,15                 | 8,05                         | 88,82  |
|     |   | Pertumbuhan PDRB sub sektor perikanan                | %            | 8,73                 | 11,63                        | 75,06  |
| 7.  | Meningkatnya jumlah wisatawan   | Kunjungan Wisata                                     | orang        | 8.187                | 104.000                      | 7,87   |
| 8.  | Meningkatnya koperasi dan UMKM  | Koperasi Aktif                                       | nilai        | 227                  | 233                          | 97,42  |
| 9.  | Meningkatnya investasi Daerah   | Investasi daerah                                     | Rp. (Milyar) | 163,88               | 220                          | 74,49  |
|     |   | Rasio izin yang diterbitkan                          | jumlah       | 530                  | 620                          | 85,48  |
| 10. | Meningkatnya jaringan distribusi barang                                     | Persentase peningkatan kualitas pasar                | %            | 11,82                | 13,28                        | 89,01  |
| 11. | Meningkatnya industri kecil dan menengah                                    | Pertumbuhan sektor perindustrian terhadap PDRB       | %            | 1,13                 | 5,39                         | 20,96  |
|     |   | Pertumbuhan sektor perdagangan terhadap PDRB         | %            | 11,78                | 10,23                        | 115,15   |
| 12. | Meningkatnya partisipasi angkatan kerja dan penyerapan tenaga kerja         | Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)                   | %            | 3,79                 | 3,17                         | 119,56   |
| 13. | Meningkatnya kualitas pendidikan masyarakat                                 | Indeks Pembangunan Manusia (IPM)                     | indeks       | 69,86                | 71,51                        | 97,69  |
|     |   | Angka rata-rata lama sekolah                         | tahun        | 9,21                 | 8,99                         | 102,45   |
|     |   | Angka Partisipasi                                    | %            | 99,12                | 99,84                        | 99,28  |

| No. | Sasaran Daerah  | Indikator   | Satuan    | Realisasi Tahun 2020 | Target Akhir RPJMD 2016-2021 | Capaian s.d Tahun 2020 terhadap Target Akhir RPJMD |
|-----|---|---|-----------|----------------------|------------------------------|--|
|     |   | Sekolah (APS) Penduduk Usia 7-12 tahun                    |           |                      |                              |  |
|     |   | Angka Partisipasi Sekolah (APS) Penduduk Usia 13-15 Tahun | %         | 93,63                | 97,18                        | 96,35  |
|     |   | Angka Melek Huruf Penduduk Usia 15-59 Tahun               | %         | 96,78                | 98,54                        | 98,21  |
| 14. | Meningkatnya Derajat Kesehatan Masyarakat                               | Angka usia harapan hidup                                  | tahun     | 69,10                | 68,96                        | 96,35  |
|     |   | Angka kematian Ibu  | jiwa      | 2                    | 0                            |  |
|     |   | Angka Kematian Bayi                                       | jiwa      | 14                   | 0                            |  |
|     |   | Prevalensi Balita Gizi Buruk                              | %         | 100                  | 100                          | 100  |
|     |   | Persentase Jaminan Kesehatan Masyarakat                   | %         | 97,57                | 99,64                        | 97,92  |
| 15. | Meningkatnya Kesejahteraan Masyarakat                                   | Tingkat Kemiskinan  | %         | 13,53                | 6,70                         | 201,94   |
| 16. | Meningkatnya fasilitas tempat ibadah dan aktivitas keagamaan masyarakat | Rasio tempat ibadah per satuan penduduk                   | Nilai     | 4                    | 4                            | 100,00   |
|     |   | Persentase lembaga keagamaan yang mendapatkan bantuan     | %         | 36,66                | 43,94                        | 83,43  |
| 17. | Menguatnya kebudayaan sebagai identitas daerah                          | Penyelenggaraan festival seni dan budaya                  | keg       | 0                    | 1                            | 0,00   |
| 18. | Meningkatnya Sarana dan Prestasi Olahraga                               | Sarana Olahraga   | jumlah    | 282                  | 299                          | 94,31  |
|     |   | Prestasi Cabang Olah raga                                 | peringkat | 2                    | 5                            | 40,00  |
| 19. | Meningkatnya penyelenggaraan penataan ruang                             | Kesesuaian Pemanfaatan Ruang                              | %         | 80                   | 81,28                        | 98,43  |

| No. | Sasaran Daerah  | Indikator  | Satuan          | Realisasi Tahun 2020 | Target Akhir RPJMD 2016-2021 | Capaian s.d Tahun 2020 terhadap Target Akhir RPJMD |
|-----|---|--|-----------------|----------------------|------------------------------|--|
| 20. | Meningkatnya kualitas lingkungan hidup  | Kualitas Air (penetapan kelas air)                                 | nilai           | 5                    | 16                           | 31,25  |
| 21. | Meningkatnya akuntabilitas pengelolaan keuangan dan kinerja reformasi birokrasi | Penilaian Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) | Nilai/ Predikat | B                    | BB                           |  |
|     |   | Opini BPK  | Nilai/ Predikat | WTP                  | WTP                          | 100  |
|     |   | Nilai Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (EKPPD) | Nilai           | Baik                 | Sedang                       |  |
| 22. | Meningkatnya Pembangunan Desa   | Indeks Desa Membangun  | indeks          | 0,5855               | 0,5468                       | 107,08   |

Sumber : Bappeda Kab. Konawe Utara, 2021

Mencermati pencapaian IKU Konawe Utara tahun 2020 dibandingkan dengan target akhir RPJMD Kabupaten Konawe Utara 2016 - 2021, tampak bahwa dari 43 IKU Bupati, sebanyak 31 indikator masuk dalam kategori pencapaian kinerja sangat tinggi dan tinggi, dan terdapat 5 indikator dengan capaian kinerja sangat rendah, yaitu angka kemiskinan, jumlah kunjungan wisatawan, rasio izin yang diterbitkan, angka kematian bayi, dan angka kematian ibu. Untuk itu diperlukan upaya dan kerja keras agar target penurunan dan/atau peningkatan dari capaian indikator tersebut bisa dicapai.

# BAB III GAMBARAN KEUANGAN DAERAH



Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja yang mengatur perubahan pembagian kewenangan urusan pemerintahan antara Pemerintahan Pusat, Provinsi, dan Kabupaten/Kota, maka manajemen pengelolaan keuangan daerah yang lebih adil, rasional, transparan, partisipatif dan akuntabel telah mengalami perubahan fundamental yang signifikan pada berbagai aspek penyelenggaraan pemerintahan daerah. Sedangkan berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagai pengganti atas Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005, Keuangan Daerah adalah semua hak dan kewajiban daerah dalam rangka penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang dapat dinilai dengan uang serta segala bentuk kekayaan yang dapat dijadikan milik Daerah berhubungan dengan hak dan kewajiban Daerah tersebut. Ruang lingkup Keuangan Daerah meliputi:

- a. Hak daerah untuk memungut pajak daerah dan retribusi daerah serta melakukan pinjaman;
- b. Kewajiban Daerah untuk menyelenggarakan Urusan Pemerintahan Daerah dan membayar tagihan kepada pihak ketiga;
- c. Penerimaan Daerah;
- d. Pengeluaran Daerah;
- e. Kekayaan Daerah yang dikelola sendiri atau oleh pihak lain berupa uang, surat berharga, piutang, barang, serta hak lain yang dapat dinilai dengan uang, termasuk kekayaan daerah yang dipisahkan;
- f. Kekayaan pihak lain yang dikuasai oleh Pemerintah Daerah dalam rangka penyelenggaraan tugas Pemerintahan Daerah dan/atau kepentingan umum.

Lebih lanjut, Pengelolaan Keuangan Daerah adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pertanggung jawaban, dan pengawasan keuangan daerah. Pengelolaan Keuangan Daerah dilakukan secara: tertib, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan rasa keadilan, kepatutan, manfaat untuk masyarakat, serta taat pada ketentuan peraturan perundang-undangan. Pengelolaan keuangan

daerah akan dikatakan baik jika berhasil dalam merealisasikan program-program yang dicanangkan.

Pengelolaan keuangan menyangkut pengelolaan sumber pendapatan daerah, pengeluaran belanja dan sumber-sumber pembiayaan. Suatu daerah yang mampu mengoptimalkan sumber pendapatan asli daerah dan meminimalkan sumber pendapatan dana transfer, maka daerah tersebut memiliki peluang untuk bisa menjadi daerah yang maju dan mandiri. Upaya untuk mengetahui tingkat kemampuan keuangan daerah Kabupaten Konawe Utara dapat dilakukan dengan mencermati kondisi kinerja keuangan daerah, baik kinerja keuangan masa lalu maupun kebijakan yang melandasi pengelolaannya.

### **3.1. KINERJA PENGELOLAAN KEUANGAN MASA LALU**

Keuangan daerah merupakan komponen daerah dalam rangka penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang menyatu dalam kerangka Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). APBD sebagai bentuk penjabaran kuantitatif dari tujuan dan sasaran Pemerintah Daerah serta tugas pokok dan fungsi Organisasi Perangkat Daerah, disusun dalam suatu struktur yang menggambarkan besarnya pendanaan atas berbagai sasaran yang hendak dicapai, tugas-tugas pokok dan fungsi sesuai kondisi, potensi, aspirasi dan kebutuhan riil di masyarakat untuk suatu tahun tertentu. Dengan demikian APBD dijadikan salah satu bentuk instrumen kebijakan untuk meningkatkan pelayanan umum dan kesejahteraan masyarakat di Daerah. Oleh karena itu, untuk dapat melakukan analisis pengelolaan keuangan daerah diperlukan analisis pelaksanaan APBD selama 5 (lima) tahun, yang dimaksudkan untuk menghasilkan gambaran tentang kapasitas atau kemampuan keuangan daerah dalam mendanai penyelenggaraan pembangunan daerah.

APBD terdiri dari Pendapatan Daerah, Belanja Daerah, dan Pembiayaan Daerah. Dengan demikian dalam menganalisis pengelolaan keuangan daerah, terlebih dahulu harus memahami jenis obyek Pendapatan Daerah, Belanja Daerah dan Pembiayaan Daerah sesuai dengan kewenangan Daerah. Analisis tersebut diperlukan sebagai dasar untuk menentukan kerangka pendanaan di masa yang akan datang, dengan mempertimbangkan peluang dan hambatan yang dihadapi.

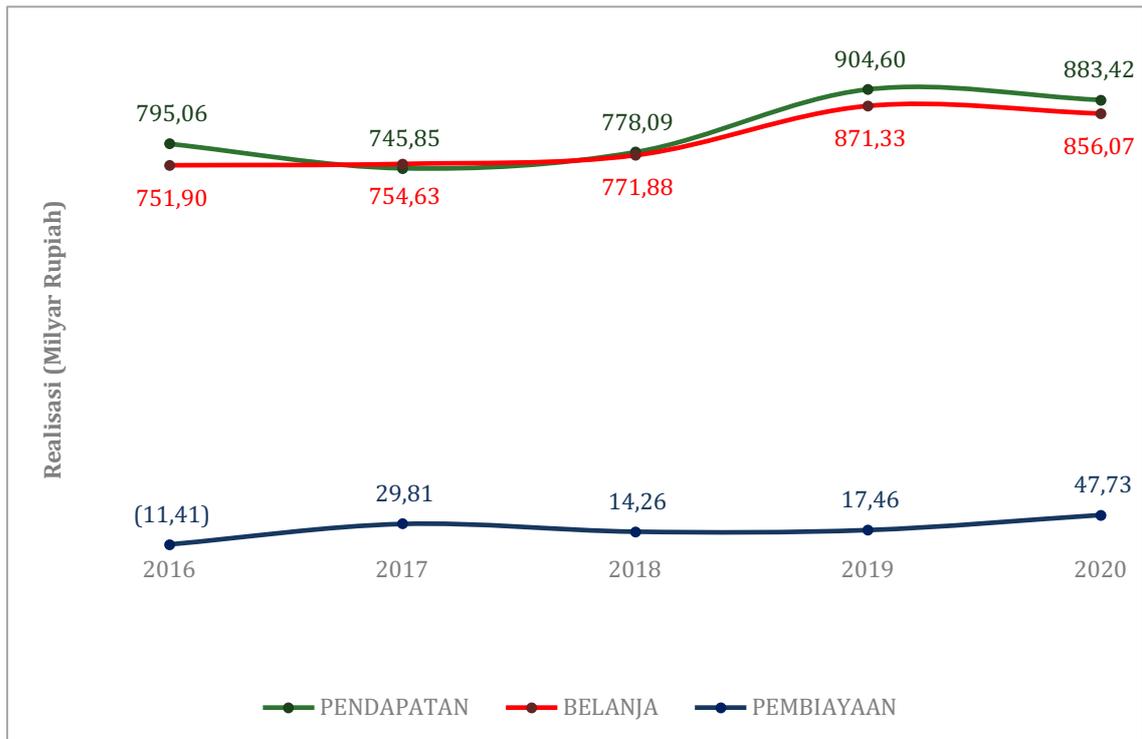
Gambaran kinerja keuangan daerah Kabupaten Konawe Utara secara umum disajikan realisasi anggaran dan kinerja keuangan untuk periode tahun anggaran

2016 sampai dengan tahun anggaran 2019 sebagai dasar untuk menentukan rata-rata pertumbuhan. Sedangkan, untuk tahun dasar ditetapkan Perubahan APBD Tahun Anggaran 2020, pasca adanya perubahan akibat dikeluarkannya kebijakan keuangan daerah dalam menghadapi wabah COVID-19. Proyeksi keuangan dilakukan untuk 5 tahun ke depan dari tahun 2021 sampai dengan tahun 2026. Perkiraan proyeksi selama 5 tahun ke depan menggunakan informasi dan kebijakan yang dikeluarkan oleh Pemerintah sebagai antisipasi dampak adanya wabah COVID-19.

Berdasarkan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran dan Pendapatan dan Belanja Daerah yang diterbitkan setiap tahun, maka komponen APBD terdiri atas: (1) Pendapatan Daerah, yang di dalamnya terdapat Pendapatan Asli Daerah, Pendapatan Transfer dan Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah; (2) Belanja Daerah, yang dibagi menjadi Belanja Operasi, Belanja Modal, Belanja Tidak Terduga dan Belanja Transfer; dan (3) Pembiayaan Daerah, yang di dalamnya terdapat Penerimaan Pembiayaan Daerah, Pengeluaran Pembiayaan Daerah, dan Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Tahun Berjalan. Pembahasan berikutnya terkait kinerja pelaksanaan APBD dan kebijakan masa lalu, dibagi dalam kinerja penerimaan daerah, yang terdiri dari Pendapatan dan Penerimaan Pembiayaan, dan kinerja pengeluaran daerah, yang terdiri dari Belanja Daerah dan Pengeluaran Pembiayaan.

### **3.1.1 Kinerja Pelaksanaan APBD**

Pada dasarnya, konsep penganggaran adalah membandingkan antara anggaran dan realisasinya antara penerimaan dikurangi dengan pengeluaran. Begitu juga, pada APBN/APBD, pada intinya adalah membandingkan antara anggaran dan realisasi penerimaan dengan anggaran dan realisasi pengeluaran. Dalam konteks APBD, penerimaan daerah terdiri dari pendapatan daerah ditambah penerimaan pembiayaan, sedangkan pengeluaran daerah terdiri dari belanja daerah ditambah pengeluaran pembiayaan. Oleh karena itu, untuk analisis keuangan daerah dalam sub bab ini akan dibagi dalam kerangka penerimaan daerah dan pengeluaran daerah. Pada sub bab penerimaan daerah akan dianalisis kinerja realisasi dan rata-rata pertumbuhan pendapatan daerah dan penerimaan pembiayaan, yang kemudian perhitungan proyeksi selama 5 tahun ke depan (dari tahun 2021 s.d tahun 2026) akan dijelaskan pada sub bab tersendiri. Gambaran umum realisasi APBD Kabupaten Konawe Utara Tahun 2016-2021 disajikan dalam gambar 3.1 berikut.



**Gambar 3.1 Gambaran Umum Realisasi APBD Kabupaten Konawe Utara Tahun 2016-2020 (Milyar Rupiah)**

Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah menjelaskan bahwa Pendapatan Daerah adalah semua penerimaan uang melalui Rekening Kas Umum Daerah yang tidak perlu dibayar kembali oleh Daerah dan penerimaan lainnya yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan diakui sebagai penambah ekuitas yang merupakan hak Daerah dalam satu tahun anggaran.

Pendapatan Daerah dikelompokkan atas: Pendapatan Asli Daerah (PAD), Pendapatan Transfer, serta Lain-lain Pendapatan Daerah yang sah. Pendapatan daerah Kabupaten Konawe Utara dalam kurun waktu tahun 2016-2020 menunjukkan peningkatan dari sebesar 796,05 Milyar rupiah pada tahun 2016 menjadi 883,42 Milyar rupiah. Secara rinci perkembangan pendapatan daerah tercantum pada gambar 3.2 berikut.



**Gambar 3.2 Perkembangan Pendapatan Daerah Kabupaten Konawe Utara Tahun 2016-2020 (Milyar Rupiah)**

Selama kurun waktu tahun 2016-2020 rata-rata pertumbuhan pendapatan daerah mencapai sebesar 4,41%. Pertumbuhan pendapatan daerah berfluktuasi, tertinggi pada tahun 2019 sebesar 13,99% dan terendah pada tahun 2017 sebesar minus 6,60%. Pertumbuhan Pendapatan Asli Daerah fluktuatif dengan rata-rata sebesar 13,21%. Pertumbuhan pendapatan transfer fluktuatif dengan rata-rata pertumbuhan 4,16%. Lain-lain pendapatan daerah yang sah juga fluktuatif dengan rata-rata pertumbuhan sebesar minus 83,21%.

Pertumbuhan APBD Kabupaten Konawe Utara tahun 2016-2020 secara rinci tercantum pada tabel berikut ini.

**Tabel 3.1  
Rata-rata Pertumbuhan Realisasi Pendapatan Daerah  
Kabupaten Konawe Utara Tahun 2016 - 2020**

| Kode  | Uraian   | Pertumbuhan(%) |               |                |              |               |              |
|-------|--|----------------|---------------|----------------|--------------|---------------|--------------|
|       |  | 2016           | 2017          | 2018           | 2019         | 2020          | Rata-rata    |
| 4     | <b>PENDAPATAN</b>  | <b>12,90</b>   | <b>(6,60)</b> | <b>4,14</b>    | <b>13,99</b> | <b>(2,40)</b> | <b>4,41</b>  |
| 4.1   | <b>PENDAPATAN ASLI DAERAH</b>                                | <b>18,97</b>   | <b>53,70</b>  | <b>(60,12)</b> | <b>14,65</b> | <b>38,83</b>  | <b>13,21</b> |
| 4.1.1 | Pendapatan Pajak Daerah                                      | (33,33)        | 28,17         | 42,41          | 24,88        | 73,56         | 27,14        |
| 4.1.2 | Pendapatan Retribusi Daerah                                  | (192,69)       | 49,60         | 50,51          | (50,73)      | 9,23          | (26,81)      |
| 4.1.3 | Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan | 6,71           | 13,15         | 23,61          | 35,57        | 21,05         | 20,02        |
| 4.1.4 | Lain-lain PAD yang Sah                                       | 43,15          | 59,12         | (145,55)       | 14,89        | 14,64         | (2,75)       |

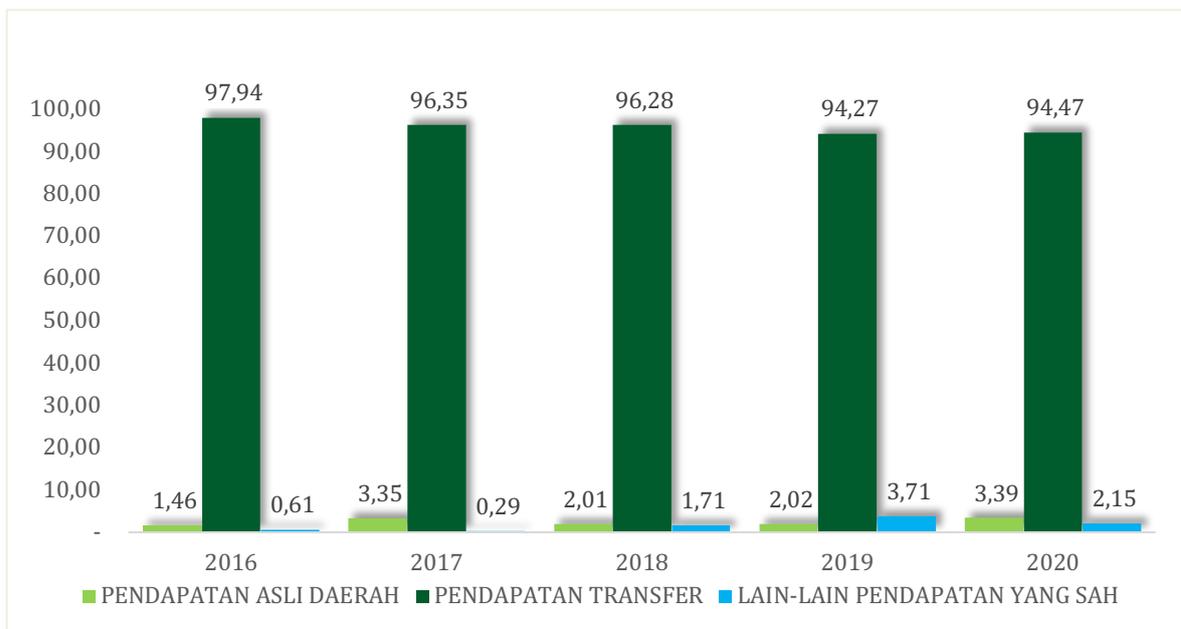
| Kode      | Uraian  | Pertumbuhan(%)  |                 |                |              |                |                |
|-----------|---|-----------------|-----------------|----------------|--------------|----------------|----------------|
|           |   | 2016            | 2017            | 2018           | 2019         | 2020           | Rata-rata      |
| 4.2       | <b>PENDAPATAN TRANSFER</b>                                  | <b>15,13</b>    | <b>(8,35)</b>   | <b>4,07</b>    | <b>12,15</b> | <b>(2,19)</b>  | <b>4,16</b>    |
| 4.2.01    | <b>Transfer Pemerintah Pusat - Dana Perimbangan</b>         | <b>11,55</b>    | <b>(14,83)</b>  | <b>6,36</b>    | <b>12,00</b> | <b>(7,70)</b>  | <b>1,47</b>    |
| 4.2.01.01 | Dana Bagi Hasil Pajak / Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam    | 5,58            | (152,01)        | 52,86          | 41,23        | 32,68          | (3,93)         |
| 4.2.01.02 | Dana Alokasi Umum   | 5,67            | (1,07)          | -              | 3,57         | (9,81)         | (0,33)         |
| 4.2.01.03 | Dana Alokasi khusus   | 30,77           | (43,41)         | 11,64          | 21,93        | (43,47)        | (4,51)         |
| 4.2.02    | <b>Transfer Pemerintah Pusat - Lainnya</b>                  | <b>40,07</b>    | <b>22,22</b>    | <b>(9,46)</b>  | <b>11,39</b> | <b>18,93</b>   | <b>16,63</b>   |
| 4.2.02.01 | Dana Otonomi Khusus   |                 |                 |                |              |                |                |
| 4.2.02.02 | Dana Penyesuaian  | 40,07           | 22,22           | (9,46)         | 11,39        | 18,93          | 16,63          |
| 4.2.03    | <b>Transfer Pemerintah Provinsi</b>                         | <b>22,19</b>    | <b>2,35</b>     | <b>9,26</b>    | <b>25,00</b> | <b>18,70</b>   | <b>15,50</b>   |
| 4.2.03.01 | Pendapatan Bagi Hasil Pajak / Pendapatan Bagi Hasil Lainnya | 22,19           | 2,35            | 9,26           | 25,00        | 18,70          | 15,50          |
| 4.3       | <b>LAIN-LAIN PENDAPATAN YANG SAH</b>                        | <b>(362,65)</b> | <b>(120,64)</b> | <b>83,55</b>   | <b>60,34</b> | <b>(76,62)</b> | <b>(83,21)</b> |
| 4.3.01    | Pendapatan Hibah  | (684,61)        | (20,64)         | 84,12          | 59,12        | (75,99)        | (127,60)       |
| 4.3.02    | Pendapatan Dana Darurat                                     |                 |                 |                |              |                |                |
| 4.3.03    | Pendapatan Lainnya  | (2,90)          | (2.886,72)      | -              | 100,00       | -              | (557,92)       |
|           |   |                 |                 |                |              |                |                |
| 5         | <b>BELANJA</b>  | <b>5,41</b>     | <b>0,36</b>     | <b>2,23</b>    | <b>11,41</b> | <b>(1,78)</b>  | <b>3,53</b>    |
| 5.1       | <b>BELANJA OPERASI</b>                                      | <b>(1,55)</b>   | <b>4,99</b>     | <b>9,90</b>    | <b>8,02</b>  | <b>(4,08)</b>  | <b>3,46</b>    |
| 5.1.01    | Belanja Pegawai   | 21,39           | (4,44)          | (17,91)        | 7,03         | 3,18           | 1,85           |
| 5.1.02    | Belanja Barang dan jasa                                     | (25,66)         | 14,21           | 28,04          | 5,66         | (33,87)        | (2,33)         |
| 5.1.03    | Belanja Bunga   |                 |                 |                |              |                |                |
| 5.1.04    | Belanja Subsidi   |                 |                 |                |              |                |                |
| 5.1.05    | Belanja Hibah   | (181,51)        | (34,05)         | 27,43          | 49,54        | 77,38          | (12,24)        |
| 5.1.06    | Bantuan Sosial  | 100,00          | 64,83           | (17,72)        | 44,78        | 22,01          | 42,78          |
| 5.1.07    | Belanja Bantuan keuangan                                    |                 |                 |                |              |                |                |
| 5.2       | <b>BELANJA MODAL</b>  | <b>(3,23)</b>   | <b>(35,71)</b>  | <b>(12,96)</b> | <b>20,05</b> | <b>(39,18)</b> | <b>(14,20)</b> |
|           | Belanja Modal   | (3,23)          | (35,71)         | (12,96)        | 20,05        | (39,18)        | (14,20)        |
| 5.2.01    | Belanja Modal Tanah   |                 |                 |                |              |                |                |
| 5.2.02    | Belanja Modal Peralatan dan Mesin                           |                 |                 |                |              |                |                |
| 5.2.03    | Belanja Modal Gedung dan Bangunan                           |                 |                 |                |              |                |                |
| 5.2.04    | Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan                   |                 |                 |                |              |                |                |
| 5.2.05    | Belanja Modal Aset Tetap Lainnya                            |                 |                 |                |              |                |                |
| 5.2.06    | Belanja Modal Aset Lainnya                                  |                 |                 |                |              |                |                |
| 5.3       | <b>BELANJA TAK TERDUGA</b>                                  | <b>100,00</b>   | <b>99,92</b>    | <b>46,75</b>   | <b>76,81</b> | <b>96,23</b>   | <b>83,94</b>   |

| Kode      | Uraian  | Pertumbuhan(%) |               |                 |                |              |              |
|-----------|---|----------------|---------------|-----------------|----------------|--------------|--------------|
|           |   | 2016           | 2017          | 2018            | 2019           | 2020         | Rata-rata    |
| 5.3.1     | Belanja Tak Terduga                             | 100,00         | 99,92         | 46,75           | 76,81          | 96,23        | 83,94        |
| 5.4       | <b>BELANJA TRANSFER</b>                         | <b>42,25</b>   | <b>24,13</b>  | <b>(6,33)</b>   | <b>11,37</b>   | <b>1,02</b>  | <b>14,49</b> |
| 5.4.01    | <b>TRANSFER / BAGI HASIL KE DESA</b>            |                |               |                 |                |              |              |
| 5.4.01.01 | Bagi Hasil Pajak                                |                |               |                 |                |              |              |
| 5.4.01.02 | Bagi Hasil Retribusi                            |                |               |                 |                |              |              |
| 5.4.01.03 | Bagi Hasil Pendapatan Lainnya                   |                |               |                 |                |              |              |
| 5.4.02    | <b>TRANSFER / BANTUAN KEUANGAN</b>              | <b>42,25</b>   | <b>24,13</b>  | <b>(6,33)</b>   | <b>11,37</b>   | <b>1,02</b>  | <b>14,49</b> |
| 5.4.02.01 | Bantuan Keuangan ke Pemerintah Daerah Lainnya   |                |               |                 |                |              |              |
| 5.4.02.02 | Bantuan Keuangan ke Desa                        | 42,25          | 24,13         | (6,33)          | 11,37          | 1,02         | 14,49        |
| 5.4.02.03 | Bantuan Keuangan Lainnya                        |                |               |                 |                |              |              |
| 6         | <b>PEMBIAYAAN</b>                               | <b>93,35</b>   | <b>138,27</b> | <b>(109,05)</b> | <b>18,36</b>   | <b>63,41</b> | <b>40,87</b> |
| 6.1       | <b>PENERIMAAN PEMBIAYAAN</b>                    | <b>92,71</b>   | <b>132,72</b> | <b>(74,21)</b>  | <b>10,78</b>   | <b>59,66</b> | <b>44,33</b> |
| 6.1.01    | Penggunaan SiLPA                                | 92,71          | 132,72        | (74,21)         | 10,78          | 59,66        | 44,33        |
| 6.1.02    | Pencairan Dana Cadangan                         |                |               |                 |                |              |              |
| 6.1.03    | Hasil Penjualan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan |                |               |                 |                |              |              |
| 6.1.04    | Penerimaan Pinjaman Daerah                      |                |               |                 |                |              |              |
| 6.1.05    | Penerimaan Kembali Pinjaman daerah              |                |               |                 |                |              |              |
| 6.1.06    | Penerimaan Piutang Daerah                       |                |               |                 |                |              |              |
| 6.1.07    | Penerimaan Kembali Dana Bergulir                |                |               |                 |                |              |              |
| 6.2       | <b>PENGELUARAN PEMBIAYAAN</b>                   | <b>100,00</b>  | <b>50,00</b>  | <b>50,00</b>    | <b>(33,33)</b> | <b>-</b>     | <b>33,33</b> |
| 6.2.01    | Pembentukan Dana Cadangan                       |                |               |                 |                |              |              |
| 6.2.02    | Penyertaan Modal Pemerintah Daerah              | 100,00         | 50,00         | 50,00           | (33,33)        | -            | 33,33        |
| 6.2.03    | Pembayaran Pokok Utang                          |                |               |                 |                |              |              |
| 6.2.04    | Pemberian Pinjaman Daerah                       |                |               |                 |                |              |              |
| 6.2.05    | Pembayaran Utang Kepada Pihak Ketiga            |                |               |                 |                |              |              |
| 6.2.06    | Dana Talangan                                   |                |               |                 |                |              |              |
| 6.2.07    | Pemberian Pinjaman Dana Bergulir                |                |               |                 |                |              |              |

Sumber : BKAD Kabupaten Konawe Utara, diolah

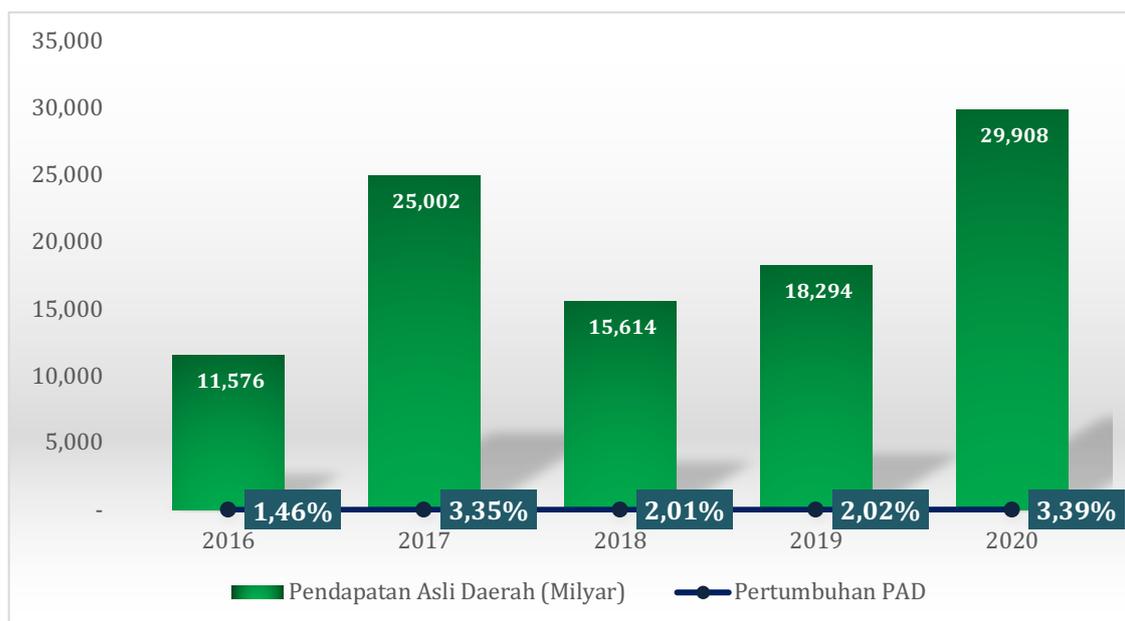
Pendapatan daerah Kabupaten Konawe Utara didominasi oleh pendapatan transfer dari pemerintah pusat dengan proporsi terhadap total pendapatan daerah cenderung menurun dari sebesar 97,94% pada tahun 2016 menjadi 94,47% pada

tahun 2020. Derajat kemandirian keuangan daerah dapat dilihat dari proporsi Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang meningkat dari sebesar 1,46% pada tahun 2016 menjadi 3,39% pada tahun 2020. Dari data tersebut terlihat ada kecenderungan peningkatan derajat kemandirian keuangan daerah. Lain-lain pendapatan yang sah proporsinya terhadap total pendapatan daerah juga cenderung meningkat dari sebesar 0,61% pada tahun 2016 menjadi 2,15% pada tahun 2020. Perkembangan proporsi unsur-unsur pendapatan daerah terhadap total pendapatan daerah dapat dilihat pada gambar berikut.



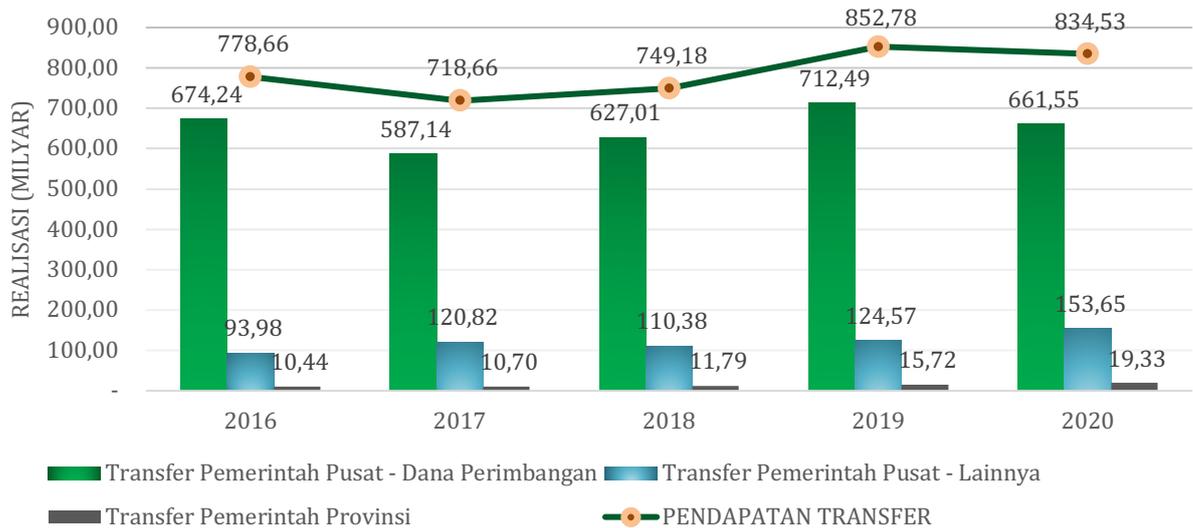
**Gambar 3.3 Proporsi Unsur Pendapatan Daerah terhadap Total Pendapatan Daerah Kabupaten Konawe Utara Tahun 2016- 2020 (Persen)**

Pendapatan asli daerah mencakup pendapatan pajak daerah, pendapatan retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah. Pendapatan asli daerah Kabupaten Konawe Utara cukup fluktuatif serta menunjukkan peningkatan dari sebesar 11,576 milyar pada tahun 2016 menjadi 29,908 milyar rupiah pada tahun 2020. Secara rinci perkembangan pendapatan asli daerah terlihat pada gambar berikut.



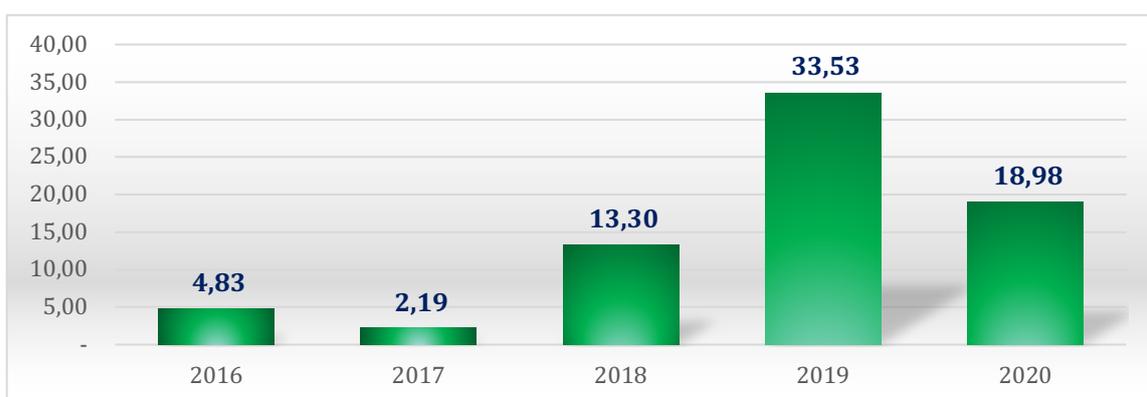
**Gambar 3.4 Perkembangan Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Konawe Utara Tahun 2016-2020 (Milyar Rupiah)**

Dana transfer meliputi dana transfer dari pemerintah pusat dana perimbangan (Dana hasil pajak/bukan pajak, Dana Alokasi Umum (DAU), dan Dana Alokasi Khusus (DAK)), transfer pemerintah pusat lainnya (dana otonomi khusus dan dana penyesuaian), dan dana transfer pemerintah provinsi. Pencapaian dana tranfer dari pemerintah pusat dan provinsi sangat ditentukan oleh kebijakan pemerintah pusat dan provinsi kepada daerah, sehingga sangat sulit untuk dipastikan pencapaiannya. Selama kurun waktu tahun 2016- 2020 perkembangan dana transfer cenderung meningkat dari sebesar 778,66 milyar rupiah pada tahun 2016 menjadi 852,78 milyar rupiah pada tahun 2019 namun mengalami penurunan menjadi 834,53 milyar rupiah pada tahun 2020 sebagai dampak pandemi Covid-19. Transfer dana perimbangan meningkat dari 674,24 milyar pada tahun 2016 menjadi 852,78 milyar rupiah pada tahun 2019 dan menurun pada tahun 2020 dikarenakan dampak pandemi Covid- 19 menjadi 661,55 milyar rupiah, seperti terlihat pada gambar berikut ini.



**Gambar 3.5 Perkembangan Pendapatan Dana Tranfer Kabupaten Konawe Utara Tahun 2016-2020 (Milyar Rupiah)**

Lain-lain pendapatan daerah mencakup: pendapatan hibah; pendapatan dana desa; pendapatan dana darurat; dan pendapatan lainnya. Pencapaian target lain-lain pendapatan daerah sangat ditentukan oleh pihak lain kepada daerah, yaitu kebijakan lembaga pemerintah/swasta dalam hal pendapatan yang bersumber dari hibah, sehingga sulit dipastikan pencapaiannya. Selama kurun waktu tahun 2016-2020 realisasi lain-lain pendapatan daerah menunjukkan peningkatan dari sebesar Rp 4,83 milyar menjadi Rp 18,98 milyar rupiah. Secara rinci perkembangan lain-lain pendapatan daerah yang sah tercantum pada gambar 3.6 berikut.



**Gambar 3.6 Perkembangan Lain-Lain Pendapatan yang Sah Kabupaten Konawe Utara Tahun 2016-2020 (Milyar Rupiah)**

Secara rinci perkembangan masing-masing unsur-unsur pendapatan daerah tercantum pada tabel 3.2 berikut ini.

**Tabel 3.2**  
**Perkembangan Pendapatan Daerah Kabupaten Konawe Utara Tahun 2016-2020 (Rupiah)**

| Kode          | Uraian   | Realisasi(Rp)          |                        |                        |                        |                        |
|---------------|--|------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|
|               |  | 2016                   | 2017                   | 2018                   | 2019                   | 2020                   |
| <b>4</b>      | <b>PENDAPATAN</b>  | <b>795.063.068.870</b> | <b>745.847.438.032</b> | <b>778.087.318.332</b> | <b>904.601.385.384</b> | <b>883.421.957.166</b> |
| <b>4.1</b>    | <b>PENDAPATAN ASLI DAERAH</b>                                | <b>11.575.504.080</b>  | <b>25.002.200.734</b>  | <b>15.614.196.958</b>  | <b>18.294.312.882</b>  | <b>29.907.922.318</b>  |
| 4.1.1         | Pendapatan Pajak Daerah                                      | 982.059.538            | 1.367.253.842          | 2.374.211.751          | 3.160.388.138          | 11.953.787.565         |
| 4.1.2         | Pendapatan Retribusi Daerah                                  | 631.247.850            | 1.252.457.000          | 2.530.962.900          | 1.679.155.148          | 1.849.981.933          |
| 4.1.3         | Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan | 1.534.897.522          | 1.767.368.780          | 2.313.598.907          | 3.591.138.519          | 4.548.358.303          |
| 4.1.4         | Lain-lain PAD yang Sah                                       | 8.427.299.170          | 20.615.121.112         | 8.395.423.400          | 9.863.631.077          | 11.555.794.517         |
| <b>4.2</b>    | <b>PENDAPATAN TRANSFER</b>                                   | <b>778.659.898.923</b> | <b>718.657.185.788</b> | <b>749.175.877.657</b> | <b>852.777.762.321</b> | <b>834.530.366.675</b> |
| <b>4.2.01</b> | <b>Transfer Pemerintah Pusat - Dana Perimbangan</b>          | <b>674.238.414.504</b> | <b>587.139.835.477</b> | <b>627.007.721.289</b> | <b>712.494.063.445</b> | <b>661.548.666.999</b> |
| 4.2.01.01     | Dana Bagi Hasil Pajak  | 56.943.414.504         | 22.595.249.534         | 47.932.193.811         | 81.553.416.587         | 121.145.641.351        |
| 4.2.01.02     | Dana Alokasi Umum  | 459.091.000.000        | 454.226.840.000        | 454.226.840.000        | 471.019.248.000        | 428.934.559.000        |
| 4.2.01.03     | Dana Alokasi khusus  | 158.204.000.000        | 110.317.745.943        | 124.848.687.478        | 159.921.398.858        | 111.468.466.648        |
| <b>4.2.02</b> | <b>Transfer Pemerintah Pusat - Lainnya</b>                   | <b>93.976.997.000</b>  | <b>120.821.635.000</b> | <b>110.381.183.800</b> | <b>124.568.294.760</b> | <b>153.651.180.000</b> |
| 4.2.02.01     | Dana Otonomi Khusus  | -                      | -                      | -                      | -                      | -                      |
| 4.2.02.02     | Dana Penyesuaian   | 93.976.997.000         | 120.821.635.000        | 110.381.183.800        | 124.568.294.760        | 153.651.180.000        |
| <b>4.2.03</b> | <b>Transfer Pemerintah Provinsi</b>                          | <b>10.444.487.419</b>  | <b>10.695.715.311</b>  | <b>11.786.972.568</b>  | <b>15.715.404.116</b>  | <b>19.330.519.676</b>  |
| 4.2.03.01     | Pendapatan Bagi Hasil Pajak                                  | 10.444.487.419         | 10.695.715.311         | 11.786.972.568         | 15.715.404.116         | 19.330.519.676         |
| <b>4.3</b>    | <b>LAIN-LAIN PENDAPATAN YANG SAH</b>                         | <b>4.827.665.867</b>   | <b>2.188.051.510</b>   | <b>13.297.243.717</b>  | <b>33.529.310.181</b>  | <b>18.983.668.173</b>  |
| 4.3.01        | Pendapatan Hibah   | 2.547.665.867          | 2.111.713.510          | 13.297.243.717         | 32.529.310.181         | 18.483.668.173         |
| 4.3.02        | Pendapatan Dana Darurat                                      | -                      | -                      | -                      | -                      | -                      |
| 4.3.03        | Pendapatan Lainnya   | 2.280.000.000          | 76.338.000             | -                      | 1.000.000.000          | 500.000.000            |
|               | <b>Jumlah</b>  | <b>795.063.068.870</b> | <b>745.847.438.032</b> | <b>778.087.318.332</b> | <b>904.601.385.384</b> | <b>883.421.957.166</b> |

Sumber : BKAD Kabupaten Konawe Utara

Pendapatan Asli Daerah (PAD) merupakan salah satu sumber utama keuangan daerah untuk membiayai pembangunan daerahnya, disamping dana perimbangan dan lain-lain pendapatan daerah yang sah, Ketergantungan yang tinggi terhadap penerimaan dari pemerintah pusat dan rendahnya peranan PAD dalam penerimaan daerah, membawa konsekuensi terhadap rendahnya kemampuan PAD dalam membiayai pengeluaran daerah, Kondisi demikian tentu saja akan sangat menyulitkan pemerintahan daerah dalam melaksanakan otonomi daerah secara nyata dan bertanggung jawab sebagaimana diamanatkan dalam undang - undang Nomor 33 Tahun 2004 sehingga dibutuhkan langkah - langkah strategis dalam upaya untuk meningkatkan PAD Kabupaten Konawe Utara, antara lain sebagai berikut :

1. Meningkatkan pendapatan daerah melalui usaha intensifikasi dan ekstensifikasi pemungutan pajak dan retribusi daerah juga mengembangkan kerjasama operasi/investasi.
2. Meningkatkan efisiensi dan efektifitas pemungutan pendapatan daerah melalui perbaikan sitem dan prosedur, misal penagihan dipermudah dengan cara jemput bola selain itu perlu dikembangkan sistem pembayaran pajak secara on-line dan ekstensifikasi sumber-sumber pendapatan.
3. Meningkatkan kinerja pendapatan daerah melalui penyempurnaan sistem administrasi dan efisiensi penggunaan anggaran daerah.
4. Meningkatkan pelayanan dan perlindungan masyarakat sebagai upaya meningkatkan kesadaran masyarakat dalam membayar pajak dan retribusi daerah.
5. Meningkatkan peran dan fungsi Lembaga Teknis dalam peningkatan pelayanan dan pendapatan.
6. Meningkatkan pengelolaan keuangan daerah dan asset daerah;
7. Mendorong iklim investasi di Kabupaten Konawe Utara antara lain melalui penyederhanaan proses perijinan dan instensifikasi pemasaran daerah, yang diharapkan akan membawa dampak peningkatan PDRB per kapita penduduk dan secara tidak langsung akan meningkatkan pendapatan daerah.

Kapasitas fiskal daerah merupakan gambaran kemampuan keuangan masing-masing daerah yang dicerminkan melalui pendapatan daerah dikurangi dengan pendapatan yang penggunaannya sudah ditentukan dan belanja tertentu. Semakin besar kapasitas fiskal daerah akan memberikan keleluasaan bagi daerah dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah. Komponen yang menjadi dasar penghitungan kapasitas fiskal daerah meliputi pendapatan yang dikurangi dengan penjumlahan dari pendapatan yang penggunaannya sudah ditentukan ditambah belanja tertentu. Secara umum, keterbatasan kapasitas fiskal dikarenakan tingginya kebutuhan anggaran belanja mengikat dan belanja wajib daerah seperti gaji PNS dan jenis pendapatan yang sifatnya ermarketed (ditentukan penggunaannya).

Pelaksanaan desentralisasi fiskal memungkinkan daerah untuk secara otonom mengembangkan potensi daerah guna meningkatkan kapasitas fiskal keuangan daerah sehingga dapat dimanfaatkan secara lebih optimal untuk membiayai program dan kegiatan strategis daerah. Pada sisi pendapatan upaya meningkatkan kapasitas fiskal dapat dilakukan dengan intensifikasi dan ekstensifikasi pajak dan retribusi daerah dan optimalisasi pemanfaatan aset daerah, adapun pada sisi belanja dapat dilakukan melalui peningkatan efektivitas dan efisiensi belanja.

Indeks kapasitas fiskal Kabupaten Konawe Utara merupakan posisi relatif kapasitas fiskal Kabupaten Konawe Utara terhadap keseluruhan kapasitas fiskal daerah di seluruh Indonesia. Indeks kapasitas fiskal Kabupaten Konawe Utara menunjukkan nilai yang berkecenderungan menurun sampai tahun 2019, namun sedikit meningkat di tahun 2020 sebagaimana disajikan dalam Tabel 3.3 di bawah ini.

**Tabel 3.3**  
**Indeks Kapasitas Fiskal Kabupaten Konawe Utara**  
**Tahun 2015-2020**

| Tahun | IKF   | Kategori      |
|-------|-------|---------------|
| 2015  | 3,18  | Sangat Tinggi |
| 2016  | 2,44  | Sangat Tinggi |
| 2017  | 0,69  | Rendah        |
| 2018  | 0,60  | Rendah        |
| 2019  | 0,491 | Sangat Rendah |
| 2020  | 0,514 | Sangat Rendah |

Sumber : Kementerian Keuangan, diolah

Data Peta Fiskal Kabupaten Konawe Utara Tahun 2021 menunjukkan bahwa Pendapatan daerah sebesar Rp. 943.443.713.657 dimana proporsi pajak daerah sebesar 0,54%, retribusi daerah 1,89% dan proporsi terbesar bersumber dari pendapatan transfer dari pemerintah pusat sebesar 91,09%. Data selengkapnya tersaji dalam tabel 3.4 berikut.

**Tabel 3.4**  
**Fiskal Kabupaten Konawe Utara Tahun 2021**

| Kode                     | Uraian  | Anggaran               |
|--------------------------|---|------------------------|
| <b>4.</b>                | <b>PENDAPATAN DAERAH</b>  |                        |
| 4.1.01                   | Pajak Daerah  | 5.124.228.248          |
| 4.1.02                   | Retribusi Daerah  | 17.789.655.087         |
| 4.1.03                   | Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan                         | 5.237.876.765          |
| 4.1.04                   | Lain-lain PAD yang Sah  | 20.619.498.917         |
| 4.2.01                   | Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat                                      | 859.347.752.000        |
| 4.2.02                   | Pendapatan Transfer Antar Daerah  | 19.330.519.640         |
| 4.3.01                   | Pendapatan Hibah  | 4.500.000.000          |
| 4.3.03                   | Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan | 11.494.183.000         |
| <b>Jumlah Pendapatan</b> |   | <b>943.443.713.657</b> |

Sumber : BKAD Kabupaten Konawe Utara

Belanja dari pendapatan transfer yang penggunaannya telah ditentukan sebesar Rp. 421.820.063.640 dengan proporsi terbesar Dana Alokasi Khusus (DAK) sebesar Rp. 135.029.659.000 dan Dana Desa sebesar Rp. 125.761.543.000 serta dana transfer umum dengan proporsi 25% sebesar Rp. 105.341.920.000. Adapun belanja tertentu secara total sebesar Rp, 456.081.929.497 dengan penggunaan diantaranya untuk anggaran pendidikan sebesar 20% dan anggaran urusan kesehatan sebesar 10%. Secara rinci data belanja disajikan dalam tabel 3.5 berikut.

**Tabel 3.5**  
**Tabel Uraian Belanja dan Pendapatan Kabupaten Konawe Utara**  
**Tahun 2021**

| No. | Uraian  | Anggaran               |
|-----|---|------------------------|
|     | <b>PENDAPATAN YANG PENGGUNAANNYA SUDAH DITENTUKAN</b>                               | <b>421.820.063.640</b> |
| 1   | BLUD  | 4.500.000.000          |
| 2   | Dana Alokasi Khusus (DAK)   | 135.029.659.000        |
| 3   | Dana Insentif Daerah (DID)  | 24.862.239.000         |
| 4   | Dana Desa   | 125.761.543.000        |
| 5   | 25 % Belanja Dana Transfer Umum   | 105.341.920.000        |
| 6   | Bantuan Operasional Sekolah (BOS)   | 11.494.183.000         |
| 7   | 10 % DBH Pajak Provinsi - PKB   | 19.330.519.640         |
|     | <b>BELANJA TERTENTU</b>   | <b>456.081.929.497</b> |
| 1   | Belanja Gaji dan Tunjangan ASN  | 190.565.918.750        |
| 2   | Belanja Tambahan Penghasilan ASN  | 47.737.638.579         |
| 3   | Belanja Gaji dan Tunjangan DPRD   | 11.066.648.332         |
| 4   | Belanja Gaji dan Tunjangan KDH/WKDH   | 320.228.516            |
| 5   | Belanja Penerimaan Lainnya Pimpinan DPRD serta KDH/WKDH                             | 2.303.176.640          |
| 7   | Belanja Iuran Jaminan/Asuransi untuk masyarakat DINAS KESEHATAN                     | 13.577.037.600         |
| 8   | Belanja Bidang Pendidikan (20%)   | 203.706.382.580        |
| 9   | Belanja Bidang Kesehatan (10%)  | 101.853.191.290        |
| 10  | Belanja Iuran Jaminan/Asuransi BPJS Kesehatan TPP, Insentif, Tunjangan Profesi Guru | 47.737.638.579         |
| 11  | 0,5% Belanja Kegiatan Pengawasan  | 5.092.659.565          |
| 12  | Belanja Kegiatan Diklat   | 10.560.723.500         |
| 13  | Bantuan Hibah partai Politik  | 381.936.100            |
|     | <b>Jumlah Belanja</b>   | <b>877.901.993.137</b> |
|     | <b>Kapasitas Fiskal</b>   | <b>65.541.720.520</b>  |

Sumber : Bappeda Kabupaten Konawe Utara Tahun 2021

Berdasarkan Tabel 3.5 dapat diketahui bahwa kapasitas fiskal Kabupaten Konawe Utara pada tahun 2021 sebesar Rp. 65.541.720.520. besaran nilai yang dapat secara leluasa dipergunakan untuk penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah di Kabupaten Konawe Utara.

### **3.1.2 Neraca Daerah**

Neraca adalah laporan yang menggambarkan posisi keuangan suatu entitas (perusahaan, pemerintah pusat, pemerintah daerah) yang meliputi aset, kewajiban dan ekuitas dana pada suatu jangka waktu tertentu. Analisis terhadap Neraca Daerah bertujuan untuk mengetahui kemampuan keuangan pemerintah daerah melalui perhitungan rasio likuiditas, solvabilitas dan kemampuan aset daerah dalam penyediaan dana untuk membiayai pembangunan daerah.

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 11 tahun 2001, Neraca Daerah adalah neraca yang disusun berdasarkan standar akuntansi pemerintah secara bertahap sesuai dengan kondisi masing-masing pemerintah. Neraca Daerah memberikan informasi mengenai posisi keuangan berupa aset, kewajiban (utang), dan ekuitas dana pada tanggal neraca tersebut dikeluarkan. Aset, kewajiban, dan ekuitas dana merupakan rekening utama yang masih dapat dirinci lagi menjadi sub rekening sampai level rincian obyek.

Merujuk pada Peraturan Pemerintah Nomor 24 tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan, Neraca Daerah merupakan salah satu laporan keuangan yang harus dibuat oleh Pemerintah Daerah. Laporan Neraca Daerah digunakan sebagai dasar untuk pengambilan keputusan yang terarah dalam rangka pengelolaan sumber-sumber daya ekonomi yang dimiliki daerah secara efisien dan efektif.

Adapun gambaran mengenai posisi Neraca Daerah Kabupaten Konawe Utara pada tahun 2016-2020 dapat dilihat pada tabel berikut ini.

**Tabel 3.6**  
**Neraca Keuangan Daerah Kabupaten Konawe Utara Tahun 2016-2020**

| No. | Uraian  | Catatan  | Tahun 2016                  | Tahun 2017                  | Tahun 2018                  | Tahun 2019                  |
|-----|---|----------|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|
| 1   | <b>ASET</b>                                   | 5.6      |                             |                             |                             |                             |
| 2   | ASET LANCAR                                   |          |                             |                             |                             |                             |
| 3   | Kas di Kas Daerah                             | 5.6.1    | 31.752.350.077,00           | 21.034.877.468,00           | 22.521.813.076,00           | 50.247.835.062,00           |
| 4   | Kas di Bendahara Pengeluaran                  | 5.6.2    | 1.886.909.085,00            | 714.045.045,00              | 246.540.362,00              | 22.452.700,00               |
| 5   | Kas di Bendahara Penerimaan                   | 5.6.3    | 14.400.147,00               | -                           | -                           | 1.164.862,00                |
| 6   | Kas di BLUD                                   | 5.6.4    | 173.388.079,00              | 405.795.907,00              | 108.173.960,00              | 568.736.992,00              |
| 7   | Kas di Bendahara FKTP                         | 5.6.5    | 4.391.044,00                | 27.511.661,00               | 73.185.629,00               | 50.343.497,00               |
| 8   | Kas di Bendahara Dana BOS                     | 5.6.6    | -                           | 440.612.012,00              | 318.067.665,00              | 2.389.986.792,00            |
| 9   | Kas Lainnya                                   | 5.6.7    | 461.472.940,00              | -                           | -                           | 40.148.626,00               |
| 10  | Investasi Jangka Pendek                       |          | -                           | -                           | -                           | -                           |
| 11  | Piutang Pendapatan                            | 5.6.8    | 6.838.275.677,00            | 11.031.645.836,00           | 16.442.272.195,00           | 21.669.404.345,00           |
| 12  | Piutang Lainnya                               | 5.6.9    | 3.695.621.695,75            | 4.625.500.651,36            | 4.705.003.106,96            | 5.100.553.893,00            |
| 13  | Penyisihan Piutang                            | 5.6.10   | (5.334.453.336,00)          | (8.029.973.508,40)          | (10.874.820.502,26)         | (7.487.812.531,95)          |
| 14  | Penyisihan Piutang Lainnya                    | 5.6.11   | -                           | -                           | -                           | (3.827.193.332,01)          |
| 15  | Persediaan                                    | 5.6.12   | 2.114.695.024,70            | 4.034.820.103,93            | 3.963.536.112,94            | 3.822.859.128,29            |
| 16  | <b>Jumlah Aset Lancar</b>                     |          | <b>41.607.050.433,45</b>    | <b>34.284.835.175,89</b>    | <b>37.503.771.604,64</b>    | <b>72.598.480.033,33</b>    |
| 17  | INVESTASI JANGKA PANJANG                      |          |                             |                             |                             |                             |
| 18  | Investasi Nonpermanen                         |          |                             |                             |                             |                             |
| 19  | Investasi Nonpermanen Lainnya                 |          | -                           | -                           | -                           | -                           |
| 20  | <b>Jumlah Investasi Nonpermanen</b>           |          | <b>-</b>                    | <b>-</b>                    | <b>-</b>                    | <b>-</b>                    |
| 21  | Investasi Permanen                            |          |                             |                             |                             |                             |
| 22  | Penyertaan Modal Pemerintah Daerah            | 5.6.12   | 6.127.500.000,00            | 8.127.500.000,00            | 11.906.983.559,00           | 14.435.151.469,00           |
| 23  | Investasi Permanen Lainnya                    |          | -                           | -                           | -                           | -                           |
| 24  | <b>Jumlah Investasi Permanen</b>              |          | <b>6.127.500.000,00</b>     | <b>8.127.500.000,00</b>     | <b>11.906.983.559,00</b>    | <b>14.435.151.469,00</b>    |
| 25  | <b>Jumlah Investasi Jangka Panjang</b>        |          | <b>6.127.500.000,00</b>     | <b>8.127.500.000,00</b>     | <b>11.906.983.559,00</b>    | <b>14.435.151.469,00</b>    |
| 26  | ASET TETAP                                    | 5.6.13   |                             |                             |                             |                             |
| 27  | Tanah   | 5.6.13.1 | 52.679.579.811,00           | 57.303.773.811,00           | 57.582.053.811,00           | 61.653.650.498,00           |
| 28  | Peralatan dan Mesin                           | 5.6.13.2 | 332.071.573.845,75          | 334.067.715.475,91          | 364.075.061.422,60          | 387.992.356.154,38          |
| 29  | Gedung dan Bangunan                           | 5.6.13.3 | 603.490.688.913,43          | 631.108.777.723,76          | 714.448.081.780,43          | 775.953.403.970,43          |
| 30  | Jalan, Irigasi, dan Jaringan                  | 5.6.13.4 | 622.858.531.936,89          | 699.011.423.685,89          | 760.400.118.117,89          | 836.483.318.042,89          |
| 31  | Aset Tetap Lainnya                            | 5.6.13.5 | 27.015.704.344,00           | 31.959.241.168,00           | 36.175.192.568,00           | 45.872.148.224,00           |
| 32  | Konstruksi Dalam Pengerjaan                   | 5.6.13.6 | 42.129.709.289,00           | 42.129.709.289,00           | 543.200.000,00              | 1.280.747.320,00            |
| 33  | Akumulasi Penyusutan                          | 5.6.13.7 | (412.398.534.340,20)        | (590.909.096.890,02)        | (706.939.762.690,48)        | (815.941.875.730,72)        |
| 34  | <b>Jumlah Aset Tetap</b>                      |          | <b>1.267.847.253.799,87</b> | <b>1.204.671.544.263,54</b> | <b>1.226.283.945.009,44</b> | <b>1.293.293.748.478,98</b> |
| 35  | DANA CADANGAN                                 |          |                             |                             |                             |                             |
| 36  | Dana Cadangan                                 |          | -                           | -                           | -                           | -                           |
| 37  | <b>Jumlah Dana Cadangan</b>                   |          | <b>-</b>                    | <b>-</b>                    | <b>-</b>                    | <b>-</b>                    |
| 38  | ASET LAINNYA                                  | 5.6.14   |                             |                             |                             |                             |
| 39  | Tagihan Jangka Panjang                        | 5.6.14.1 | 11.573.416,93               | 10.768.129,36               | 134.811.473,40              | 173.979.152,29              |
| 40  | Kemitraan dengan Pihak Ketiga                 |          | -                           | -                           | -                           | -                           |
| 41  | Aset Tak Berwujud                             | 5.6.14.2 | -                           | -                           | -                           | 372.770.000,00              |
| 42  | Amortisasi Aset Tak Berwujud                  |          | -                           | -                           | -                           | (60.064.000,00)             |
| 43  | Aset Lain-Lain                                | 5.6.14.3 | 14.671.489.311,00           | 27.519.039.320,97           | 17.798.666.460,00           | 15.234.767.053,00           |
| 44  | Akumulasi Penyusutan Aset Lainnya             |          | -                           | (14.618.578.690,97)         | (4.152.238.105,00)          | -                           |
| 45  | <b>Jumlah Aset Lainnya</b>                    |          | <b>14.683.062.727,93</b>    | <b>12.911.228.759,36</b>    | <b>13.781.239.828,40</b>    | <b>15.721.452.205,29</b>    |
| 46  | <b>Jumlah Aset</b>                            |          | <b>1.330.264.866.961,25</b> | <b>1.259.995.108.198,79</b> | <b>1.289.475.940.001,48</b> | <b>1.396.048.832.186,60</b> |
| 47  | <b>KEWAJIBAN</b>                              | 5.7      |                             |                             |                             |                             |
| 48  | KEWAJIBAN JANGKA PENDEK                       |          |                             |                             |                             |                             |
| 49  | Utang Perhitungan Pihak Ketiga (PFK)          | 5.7.1    | 2.077.176.788,00            | 1.602.842.563,00            | 2.804.154.649,00            | 2.588.694.722,00            |
| 50  | Utang Bunga                                   |          | -                           | -                           | -                           | -                           |
| 51  | Bagian Lancar Utang Jangka Panjang            |          | -                           | -                           | -                           | -                           |
| 52  | Pendapatan Diterima Dimuka                    |          | -                           | -                           | -                           | -                           |
| 53  | Utang Beban                                   | 5.7.2    | 440.520.583,00              | 50.886.248,00               | 23.760.000,00               | 23.760.000,00               |
| 54  | Utang Jangka Pendek Lainnya                   | 5.7.3    | 13.053.357.625,00           | 4.682.967.243,00            | 1.436.842.551,00            | 1.436.842.551,00            |
| 55  | <b>Jumlah Kewajiban Jangka Pendek Lainnya</b> |          | <b>15.571.054.996,00</b>    | <b>6.336.696.054,00</b>     | <b>4.264.757.200,00</b>     | <b>4.049.297.273,00</b>     |
| 56  | KEWAJIBAN JANGKA PANJANG                      |          |                             |                             |                             |                             |
| 57  | Utang Dalam Negeri                            |          | -                           | -                           | -                           | -                           |
| 58  | Utang Jangka Panjang Lainnya                  |          | -                           | -                           | -                           | -                           |
| 59  | <b>Jumlah Kewajiban Jangka Panjang</b>        |          | <b>-</b>                    | <b>-</b>                    | <b>-</b>                    | <b>-</b>                    |
| 60  | <b>Jumlah Kewajiban</b>                       |          | <b>15.571.054.996,00</b>    | <b>6.336.696.054,00</b>     | <b>4.264.757.200,00</b>     | <b>4.049.297.273,00</b>     |
| 61  | <b>EKUITAS</b>                                |          | <b>1.314.693.811.965,25</b> | <b>1.253.658.412.144,79</b> | <b>1.285.211.182.801,48</b> | <b>1.391.999.534.913,60</b> |
| 62  | EKUITAS                                       | 5.8      | 1.314.693.811.965,25        | 1.253.658.412.144,79        | 1.285.211.182.801,48        | 1.391.999.534.913,60        |
| 63  | <b>JUMLAH KEWAJIBAN DAN EKUITAS DANA</b>      |          | <b>1.330.264.866.961,25</b> | <b>1.259.995.108.198,79</b> | <b>1.289.475.940.001,48</b> | <b>1.396.048.832.186,60</b> |

Sumber: LKPD Kab. Konawe Utara Tahun 2017 - 2020 (dianalisis)

\* : Angka Target

Aset memberikan informasi tentang sumber daya yang dimiliki dan yang dikuasai oleh pemerintah daerah yang dapat memberikan manfaat ekonomi dan sosial bagi pemerintah daerah dan masyarakat dimasa yang akan datang sebagai akibat dari peristiwa masa lalu, serta dapat diukur dalam satuan moneter. Aset terdiri dari; (i) aset lancar, (ii) investasi jangka panjang, (iii) aset tetap, (iv) dana cadangan, dan (v) aset lainnya. Pada tahun 2016, Kabupaten Konawe Utara memiliki aset senilai Rp.1.330.264.866.961,25 dengan nilai aset terbesar berasal dari aset tetap yakni Rp.1.267.847.253.799,87 Sedangkan nilai pertumbuhan aset selama 2016-2020 mencapai 4,88 persen pertahun.

Aset lancar adalah kas dan sumber daya lainnya yang diharapkan dapat dicairkan menjadi kas, dijual atau dipakai habis dalam satu periode akuntansi. Pertumbuhan rata-rata Aset Lancar Pemerintah Kabupaten Konawe Utara tahun 2016-2019 memiliki perubahan yang cukup fluktuatif yaitu sebesar 69,73 persen per tahun. Pertumbuhan rata-rata tertinggi ada pada komponen Kas di Kas Daerah dengan rata-rata pertumbuhan sebesar 458,19 persen, diikuti oleh komponen Piutang Pendapatan sebesar 31,99 persen dan Piutang Lainnya sebesar 25,82 persen.

Investasi Jangka Panjang yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Konawe Utara, memberikan sumbangan dalam Neraca Aset Daerah dengan rata-rata pertumbuhan 29,97 persen pertahun. Pada tahun 2016, infestasi jangka panjang baru sebesar Rp.6.127.500000 dan tahun 2019 mencapai Rp.14.435.151.469. Investasi jangka panjang ini didominasi oleh komponen investasi permanen berupa penyertaan modal pemerintah daerah.

Pertumbuhan rata-rata Aset Tetap Pemerintah Kabupaten Konawe Utara pada tahun 2016-2020 memiliki kenaikan yang cukup besar setiap tahun yaitu sebesar 260,11 persen. Pertumbuhan rata-rata tertinggi ada pada komponen Jalan, Irigasi dan Jaringan dengan pertumbuhan sebesar 12,23 persen. Kemudian diikuti dengan komponen Gedung dan Bangunan dengan rata-rata pertumbuhan sebesar 9,25 persen dan komponen Peralatan dan Mesin sebesar 6,68 persen.

Pencatatan untuk Aset Lainnya pada kurun waktu 2016-2020 juga mengalami peningkatan seperti Aset Lainnya dengan rata-rata pertumbuhan sebesar 3,96 persen yang berasal dari komponen Aset Lainnya, lalu diikuti oleh komponen Tagihan Jangka Panjang dengan rata-rata pertumbuhan sebesar 293,51 persen.

Kewajiban umumnya timbul karena konsekuensi pelaksanaan tugas atau tanggungjawab untuk bertindak dimasa lalu. Kewajiban memberikan informasi tentang utang pemerintah daerah kepada pihak ketiga atau klaim pihak ketiga terhadap arus kas pemerintah daerah. Kewajiban dapat diklasifikasikan menjadi dua yaitu kewajiban jangka pendek dan kewajiban jangka panjang. Jumlah kewajiban yang harus dilaksanakan oleh Pemerintah Kabupaten Konawe Utara pada tahun 2016 adalah sebesar Rp.15.571.054.886 lebih rendah dari tahun 2015 yang sebesar 37.597.071.890,24 yang berasal dari Kewajiban Jangka Pendek. Kewajiban jangka pendek yang diharapkan harus diselesaikan dalam jangka waktu 12 bulan setelah tanggal pelaporan tumbuh rata-rata 58,58 persen per tahun. Peningkatan Utang Jangka Pendek ini didorong adanya peningkatan utang jangka pendek lainnya yang sebesar Rp. 13.571.054.996, Utang Perhitungan Pihak Ketiga (PFK) sebesar Rp. 2.077.176.788 dan Utang Beban sebesar Rp. 440.053.357.625.

Pada tahun 2018 jumlah Kewajiban yang dilaksanakan oleh Pemerintah Kabupaten Konawe Utara jauh lebih rendah dari tahun 2016, yaitu sebesar Rp. 4.262.757.200 yang terdiri dari komponen Utang Perhitungan Pihak Ketiga (PFK) sebesar Rp. 2.804.154.649, Utang Beban sebesar Rp. 23.760.000 dan Utang Jangka Pendek Lainnya sebesar Rp. 1.436.842.551.

Pertumbuhan Kewajiban hanya terjadi pada Kewajiban Jangka Pendek, sedangkan untuk Kewajiban Jangka Panjang tidak ada karena Pemerintah Kabupaten Konawe Utara tidak memiliki utang kepada Pemerintah Pusat ataupun Utang Jangka Panjang lainnya.

Ekuitas dana merupakan selisih antara aset dengan kewajiban pemerintah daerah. Ekuitas dana meliputi; (i) ekuitas dana lancar, (ii) ekuitas dana investasi, dan (iii) ekuitas dana cadangan. Ekuitas dana lancar adalah selisih antara aset lancar dan kewajiban jangka pendek. Ekuitas dana investasi merupakan selisih antara jumlah nilai investasi permanen, aset tetap dan aset lainnya (tidak termasuk dana cadangan) dengan nilai utang jangka panjang. Ekuitas dana cadangan merupakan kekayaan pemerintah daerah yang diinfestasikan dalam dana cadangan untuk tujuan tertentu dimasa datang. Nilai ekuitas dana Kabupaten Konawe Utara tahun 2016-2019 menunjukkan angka yang positif dengan dengan rata-rata peningkatan sebesar 5,39 persen per tahun.

Rasio Likuiditas digunakan untuk mengukur kemampuan Pemerintah Daerah dalam memenuhi kewajiban jangka pendeknya. Untuk neraca keuangan daerah, rasio likuiditas yang digunakan adalah rasio lancar (*current ratio*) dan *Quick Ratio*. Rasio lancar adalah aset lancar dibagi dengan kewajiban jangka pendek. Rasio lancar digunakan untuk melihat Kabupaten Konawe Utara dalam menyelesaikan hutang jangka pendeknya, dimana semakin besar rasio yang diperoleh, maka semakin lancar hutang pembayaran jangka pendeknya. Sedangkan *Quick Ratio* adalah aset lancar dikurangi persediaan dibagi kewajiban jangka pendek.

Berdasarkan perhitungan, nilai rasio lancar neraca keuangan Daerah Kabupaten Konawe Utara pada tahun 2016-2019 terus mengalami kenaikan dengan rata-rata sebesar 8,70 persen setiap tahunnya. Hal tersebut menunjukkan bahwa keuangan Kabupaten Konawe Utara sangat liquid dengan kemampuan pengembalian terhadap utang lancar yang sangat tinggi pada tahun 2016-2019. Jika dicermati terlihat aktiva lancar selama empat tahun berturut-turut naik dan rasio lancar juga menunjukkan kenaikan. Hal tersebut disebabkan karena kenaikan pada aktiva lancar diikuti pula dengan kenaikan kewajiban jangka pendek yang lebih besar persentasenya yaitu kewajiban utang kepada pihak ketiga. Keterangan lebih jelas dapat lihat pada tabel di bawah ini.

**Tabel 3.7**  
**Analisis Rasio Keuangan Kabupaten Konawe Utara**  
**Tahun 2016-2019**

| No. | Uraian                                | 2016 (%) | 2017 (%) | 2018 (%) | 2019 (%) | Rata-rata Pertumbuhan (%) |
|-----|---------------------------------------|----------|----------|----------|----------|---------------------------|
| 1.  | Rasio lancar ( <i>current ratio</i> ) | 2,67     | 5,41     | 8,79     | 17,93    | 8,70                      |
| 2.  | Rasio quick ( <i>quick ratio</i> )    | 2,54     | 4,77     | 7,86     | 16,98    | 8,04                      |

Sumber: LKPD Kabupaten Konawe Utara Tahun 2017 – 2020 (dianalisis)

Quick ratio lebih akurat dibandingkan rasio lancar, karena quick ratio telah mempertimbangkan persediaan didalam hitungannya. Berdasarkan tabel diatas nilai quick ratio neraca keuangan daerah Kabupaten Konawe Utara tahun 2016-2019 mengalami peningkatan setiap tahunnya. Namun nilai dari perhitungan tersebut

menunjukkan bahwa kemampuan Pemerintah Daerah Kabupaten Konawe Utara setelah dikurangi persediaan mempunyai kemampuan yang cukup kuat untuk melunasi kewajiban jangka pendeknya.

Rasio solvabilitas adalah rasio untuk mengukur kemampuan Pemerintah Daerah dalam memenuhi kewajiban jangka panjangnya. Untuk neraca keuangan daerah, rasio yang digunakan adalah rasio kewajiban terhadap aset dan rasio kewajiban terhadap ekuitas. Rasio kewajiban terhadap aset adalah kewajiban dibagi dengan aset, sedangkan rasio kewajiban terhadap ekuitas adalah kewajiban dibagi dengan ekuitas.

**Tabel 3.8**  
**Rasio Solvabilitas Kabupaten Konawe Utara**  
**Tahun 2016-2019**

| No. | Rasio Solvabilitas               | 2016 (%) | 2017 (%) | 2018 (%) | 2019 (%) | Rata-rata Pertumbuhan (%) |
|-----|----------------------------------|----------|----------|----------|----------|---------------------------|
| 1.  | Rasio Kewajiban terhadap Aset    | 0,0117   | 0,0050   | 0,0033   | 0,0029   | 0,006                     |
| 2.  | Rasio Kewajiban terhadap Ekuitas | 0,0118   | 0,0051   | 0,0033   | 0,0029   | 0,006                     |

Sumber: LKPD Kabupaten Konawe Utara Tahun 2017 – 2020 (dianalisis)

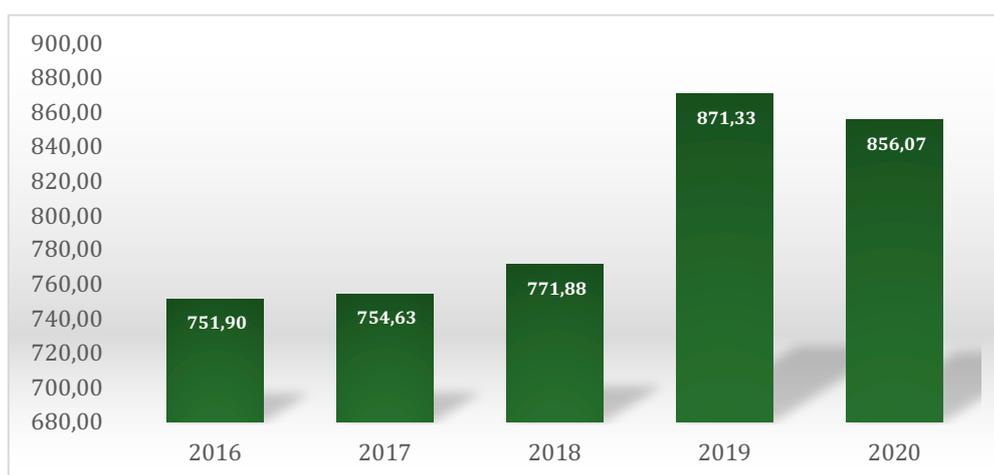
Berdasar hasil perhitungan pada tabel rasio solvabilitas diperoleh nilai rasio kewajiban terhadap aset pada tahun 2016 sebesar 0,0117 dan pada tahun 2019 sebesar 0,0029. Semakin besar nilai rasio kewajiban terhadap aset, maka semakin buruk rasio kewajiban terhadap aset. Jika dilihat dari nilai tersebut dapat dikatakan bahwa kemampuan keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Konawe Utara selama 4 (empat) tahun cukup kuat untuk membayar jika pemerintah melakukan pinjaman ke kreditor dan tingkat kemampuan membayar tersebut cenderung stabil dengan laju pertumbuhan 0,006 persen per tahun.

Rasio kewajiban terhadap ekuitas secara langsung membandingkan kewajiban dibagi dengan ekuitas. Nilai rasio kewajiban terhadap ekuitas Pemerintah Daerah Kabupaten Konawe Utara pada tahun 2016 sebesar 0,0118 dan pada tahun 2019 sebesar 0,0029. Semakin kecil nilai tersebut, maka semakin baik pula rasio kewajiban terhadap ekuitas karena menunjukkan kemampuan Pemerintah Daerah untuk membayar kewajibannya.

## 3.2. KEBIJAKAN PENGELOLAAN KEUANGAN MASA LALU

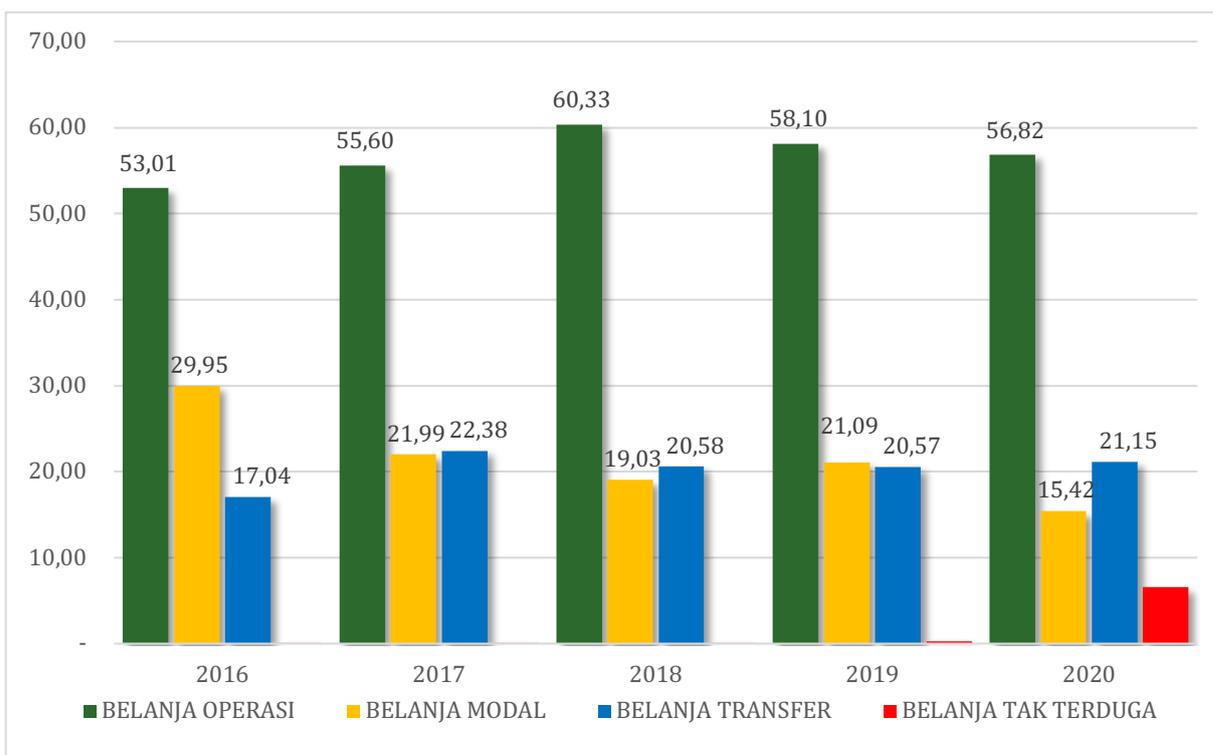
### 3.2.1. Kinerja Belanja Daerah

Belanja Daerah adalah kewajiban pemerintah daerah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih. Perkembangan belanja daerah Kabupaten Konawe Utara menunjukkan angka yang fluktuatif dalam kurun waktu tahun 2016-2020 dengan kecenderungan meningkat dari sebesar 751,90 milyar pada tahun 2016 menjadi sebesar 871,33 milyar pada tahun 2019 dan sedikit menurun menjadi 856,07 milyar rupiah di tahun 2020. Belanja daerah Kabupaten Konawe Utara tahun 2016 sampai dengan tahun 2021 secara rinci tercantum pada gambar 3.7 berikut.



**Gambar 3.7 Perkembangan Belanja Daerah Kabupaten Konawe Utara Tahun 2016-2020 (Milyar Rupiah)**

Belanja daerah Kabupaten Konawe Utara memiliki komposisi terbesar pada belanja operasi dengan proporsi sebesar 53,01% pada tahun 2016 dengan kecenderungan meningkat menjadi 60,33% pada tahun 2018 namun kembali menurun menjadi 56,82% pada tahun 2020. Selanjutnya adalah belanja modal dengan proporsi cenderung menurun dari sebesar 29,95% pada tahun 2016 menjadi 15,42% pada tahun 2020. Kemudian belanja transfer dengan kecenderungan meningkat dari sebesar 17,04% pada tahun 2016 menjadi 21,15% pada tahun 2020. Perkembangan proporsi unsur belanja daerah Kabupaten Konawe Utara tercantum pada gambar 3.8 berikut.



**Gambar 3.8 Proporsi Unsur Belanja Daerah terhadap Total Belanja Daerah Kabupaten Konawe Utara Tahun 2016-2020 (Milyar Rupiah)**

Beberapa permasalahan yang terkait dengan belanja daerah antara lain Sumber daya manusia (SDM) yang kurang memahami perencanaan belanja, terutama pada penyesuaian belanja dan kegiatan yang akan dilaksanakan sehingga terkendala pada saat pencairan dana. Selain itu, Kegiatan pengadaan barang jasa dan modal yang dilakukan melalui mekanisme lelang dilaksanakan pada pertengahan tahun berjalan sehingga penyerapan belanja daerah menumpuk di akhir tahun, serta adanya peraturan-peraturan baru dari Pemerintah Pusat dan Pemerintah Provinsi yang mengatur hal-hal yang bersifat teknis terkait pelaksanaan kegiatan dan penyerapan belanja, sehingga muncul kendala pada saat pencairan dana.

Perincian belanja daerah Kabupaten Konawe Utara selama kurun waktu tahun 2016-2020 tercantum pada tabel 3.6 berikut ini.

**Tabel 3.9**  
**Perkembangan Belanja Daerah Kabupaten Konawe Utara Tahun 2016-2020 (Rupiah)**

| No.        | Uraian                                    | Realisasi (Rp)         |                        |                        |                        |                        |
|------------|---|------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|
|            |   | 2016                   | 2017                   | 2018                   | 2019                   | 2020                   |
| <b>5</b>   | <b>BELANJA</b>                            | <b>751.901.396.691</b> | <b>754.634.224.949</b> | <b>771.881.731.451</b> | <b>871.333.037.618</b> | <b>856.065.731.732</b> |
| <b>5.1</b> | <b>BELANJA OPERASI</b>                    | <b>398.588.177.300</b> | <b>419.542.885.153</b> | <b>465.642.313.503</b> | <b>506.247.378.652</b> | <b>486.384.357.129</b> |
| 5.1.01     | Belanja Pegawai                           | 220.136.377.300        | 210.781.038.810        | 178.771.189.729        | 192.280.560.730        | 198.598.939.688        |
| 5.1.02     | Belanja Barang dan jasa                   | 169.913.000.000        | 198.049.994.343        | 275.221.523.774        | 291.735.060.498        | 217.925.323.491        |
| 5.1.03     | Belanja Bunga                             | -                      | -                      | -                      | -                      | -                      |
| 5.1.04     | Belanja Subsidi                           | -                      | -                      | -                      | -                      | -                      |
| 5.1.05     | Belanja Hibah                             | 6.468.800.000          | 4.825.800.000          | 6.649.600.000          | 13.176.900.000         | 58.249.225.950         |
| 5.1.06     | Bantuan Sosial                            | 2.070.000.000          | 5.886.052.000          | 5.000.000.000          | 9.054.857.424          | 11.610.868.000         |
| 5.1.07     | Belanja Bantuan keuangan                  |                        |                        |                        |                        |                        |
| <b>5.2</b> | <b>BELANJA MODAL</b>                      | <b>225.164.000.000</b> | <b>165.920.510.866</b> | <b>146.886.999.088</b> | <b>183.722.108.496</b> | <b>132.001.111.279</b> |
|            | Belanja Modal                             | 225.164.000.000        | 165.920.510.866        | 146.886.999.088        | 183.722.108.496        | 132.001.111.279        |
| 5.2.01     | Belanja Modal Tanah                       | -                      | -                      | -                      | -                      | -                      |
| 5.2.02     | Belanja Modal Peralatan dan Mesin         | -                      | -                      | -                      | -                      | -                      |
| 5.2.03     | Belanja Modal Gedung dan Bangunan         | -                      | -                      | -                      | -                      | -                      |
| 5.2.04     | Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan | -                      | -                      | -                      | -                      | -                      |
| 5.2.05     | Belanja Modal Aset Tetap Lainnya          | -                      | -                      | -                      | -                      | -                      |
| 5.2.06     | Belanja Modal Aset Lainnya                | -                      | -                      | -                      | -                      | -                      |

| No.           | Uraian  | Realisasi (Rp)         |                        |                        |                        |                        |
|---------------|---|------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|
|               |   | 2016                   | 2017                   | 2018                   | 2019                   | 2020                   |
| <b>5.3</b>    | <b>BELANJA TAK TERDUGA</b>                    | <b>219.391</b>         | <b>263.562.880</b>     | <b>495.000.000</b>     | <b>2.135.000.000</b>   | <b>56.599.230.000</b>  |
| 5.3.1         | Belanja Tak Terduga                           | 219.391                | 263.562.880            | 495.000.000            | 2.135.000.000          | 56.599.230.000         |
| <b>5.4</b>    | <b>BELANJA TRANSFER</b>                       | <b>128.149.000.000</b> | <b>168.907.266.050</b> | <b>158.857.418.860</b> | <b>179.228.550.470</b> | <b>181.081.033.324</b> |
| <b>5.4.01</b> | <b>TRANSFER / BAGI HASIL KE DESA</b>          | -                      | -                      | -                      | -                      | -                      |
| 5.4.01.01     | Bagi Hasil Pajak                              | -                      | -                      | -                      | -                      | -                      |
| 5.4.01.02     | Bagi Hasil Retribusi                          | -                      | -                      | -                      | -                      | -                      |
| 5.4.01.03     | Bagi Hasil Pendapatan Lainnya                 | -                      | -                      | -                      | -                      | -                      |
| <b>5.4.02</b> | <b>TRANSFER / BANTUAN KEUANGAN</b>            | <b>128.149.000.000</b> | <b>168.907.266.050</b> | <b>158.857.418.860</b> | <b>179.228.550.470</b> | <b>181.081.033.324</b> |
| 5.4.02.01     | Bantuan Keuangan ke Pemerintah Daerah Lainnya | -                      | -                      | -                      | -                      | -                      |
| 5.4.02.02     | Bantuan Keuangan ke Desa                      | 128.149.000.000        | 168.907.266.050        | 158.857.418.860        | 179.228.550.470        | 181.081.033.324        |
| 5.4.02.03     | Bantuan Keuangan Lainnya                      | -                      | -                      | -                      | -                      | -                      |
|               |   |                        |                        |                        |                        |                        |
|               | <b>BELANJA</b>                                | <b>751.901.396.691</b> | <b>754.634.224.949</b> | <b>771.881.731.451</b> | <b>871.333.037.618</b> | <b>856.065.731.732</b> |
|               | <b>SURPLUS / DEFISIT</b>                      | <b>43.161.672.179</b>  | <b>(8.786.786.917)</b> | <b>6.205.586.881</b>   | <b>33.268.347.766</b>  | <b>27.356.225.434</b>  |

Sumber : BKAD Kabupaten Konawe Utara Tahun 2021

### 3.2.2 Proporsi Penggunaan Anggaran

Proporsi penggunaan anggaran untuk belanja pegawai dalam kurun waktu tahun 2016-2020 menunjukkan kecenderungan menurun dari sebesar 29,24 persen pada tahun 2016 menjadi sebesar 23,12 persen pada tahun 2021. Proporsi penggunaan anggaran untuk belanja pegawai dalam kurun waktu tahun 2016-2020 Kabupaten Konawe Utara tersaji dalam tabel berikut.

**Tabel 3.10**  
**Analisis Proporsi Belanja Pegawai**

| No.              | Tahun Anggaran | Total Belanja Untuk Kebutuhan Pemenuhan Aparatur (Rp) | Total Pengeluaran (Belanja + Pengeluaran Pembiayaan) (Rp) | Persentase    |
|------------------|----------------|---|---|---------------|
|                  |                | (a)   | (b)   | (a)/(b) x 100 |
| 1.               | 2016           | 220.136.377.300                                       | 752.901.396.691   | 29,24         |
| 2.               | 2017           | 210.781.038.810                                       | 756.634.224.949   | 27,86         |
| 3.               | 2018           | 178.771.189.729                                       | 775.881.731.451   | 23,04         |
| 4.               | 2019           | 192.280.560.730                                       | 874.333.037.618   | 21,99         |
| 5.               | 2020           | 198.598.939.688                                       | 859.065.731.732   | 23,12         |
| <b>Rata-rata</b> |                |   |   | <b>25,05</b>  |

Sumber : BKAD Kabupaten Konawe Utara Tahun 2021, dianalisis

Pada tahun 2016 proporsi belanja aparatur mencapai 29,24%, sedangkan pada tahun 2017 proporsi belanja aparatur turun menjadi 27,86%. Tahun 2018 sampai dengan tahun 2020 berflktuatif dan mencapai titik terendah pada tahun 2019 sebesar 21,99%. Prporosi belanja pegawai mulai tahun 2016 sampai dengan tahun 2021 masih dibawah 30 persen dengan rata-rata sebesar 25,05 persen. Hal ini menunjukkan bahwa kinerja pengelolaan belanja daerah sangat baik, karena proporsi belanja aparatur masih lebih sedikit dibandingkan dengan proporsi belanja daerah yang bersifat pelayanan masyarakat yaitu masih diatas 70 persen. Namun demikian pengelolaan belanja daerah perlu dikelola dengan baik agar proporsi belanja daerah yang digunakan untuk kebutuhan rutin birokrasi tidak lebih besar dibandingkan dengan proporsi belanja untuk memberikan pelayanan publik.

### 3.2.3 Analisis Pembiayaan

Sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2010 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah, pembiayaan daerah meliputi semua penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran berkenaan maupun pada tahun anggaran berikutnya.

Kondisi anggaran dalam APBD Kabupaten Konawe Utara Tahun Anggaran 2016, perbandingan antara pendapatan dan belanja masih lebih besar pendapatan. Sedangkan pada tahun 2017-2018, kondisi belanja lebih besar dari pendapatan sehingga dalam pembiayaan digunakan untuk menutup defisit dari selisih tersebut. Sumber-sumber penerimaan pembiayaan yang paling besar masih tetap dari pos Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) tahun anggaran sebelumnya.

Kondisi pembiayaan daerah dipengaruhi oleh sisi penerimaan dan pengeluaran. Selama kurun waktu 2016 hingga 2020, APBD Kabupaten Konawe Utara mengalami dua kali defisit anggaran yakni pada tahun 2016 dan 2019, serta mengalami tiga (3) kali surplus anggaran yakni pada tahun 2017, 2019 dan 2020. Kondisi APBD yang mengalami surplus dan defisit tersebut memiliki pengaruh yang sangat signifikan terhadap jumlah Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) pada tahun berkenaan dan tentu berpengaruh total terhadap penerimaan pembiayaan pada tahun selanjutnya. Selain itu penerimaan pembiayaan juga didapat dari pencairan dana cadangan dan penerimaan piutang daerah. Sedangkan pengeluaran pembiayaan lebih banyak digunakan untuk infestasi pemerintah dalam rangka pembiayaan BUMD, baik Perusahaan Daerah (PD), Bank Perkreditan Rakyat (BPR) maupun PDAM. Selain itu pengeluaran pembiayaan juga dialokasikan untuk pemenuhan dana cadangan.

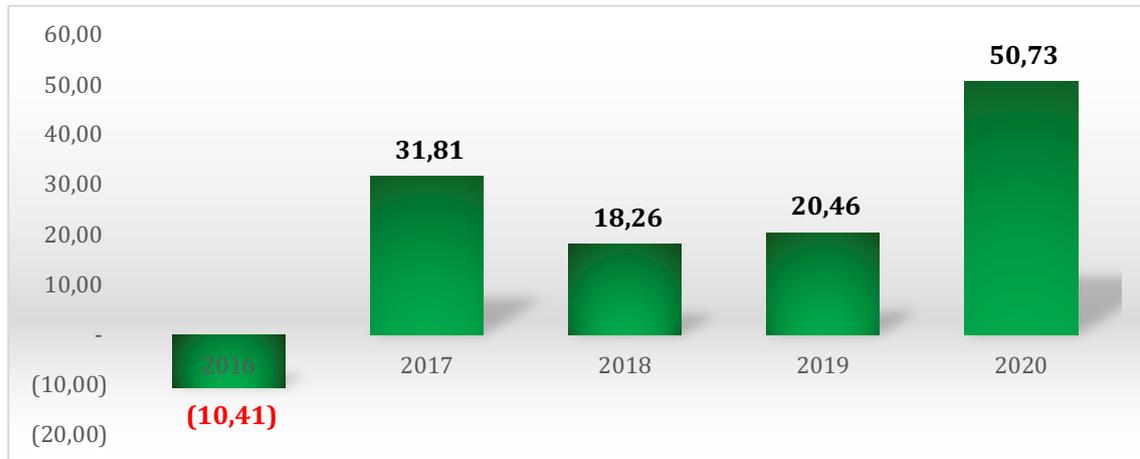
Perkembangan penerimaan dan pengeluaran pembiayaan daerah Kabupaten Konawe Utara Tahun 2016-2020 dapat dilihat pada tabel 3.11 berikut.

**Tabel 3.11.**  
**Perkembangan Pembiayaan Daerah Kabupaten Konawe Utara Tahun 2016-2020 (Rupiah)**

| NO.        | Uraian  | Realisasi (Rp)          |                       |                       |                       |                       |
|------------|---|-------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
|            |   | 2016                    | 2017                  | 2018                  | 2019                  | 2020                  |
| <b>6.1</b> | <b>PENERIMAAN PEMBIAYAAN</b>                    | <b>(10.406.141.033)</b> | <b>31.806.786.447</b> | <b>18.258.039.162</b> | <b>20.463.626.043</b> | <b>50.731.973.809</b> |
| 6.1.01     | Penggunaan SiLPA                                | (10.406.141.033)        | 31.806.786.447        | 18.258.039.162        | 20.463.626.043        | 50.731.973.809        |
| 6.1.02     | Pencairan Dana Cadangan                         | -                       | -                     | -                     | -                     | -                     |
| 6.1.03     | Hasil Penjualan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan | -                       | -                     | -                     | -                     | -                     |
| 6.1.04     | Penerimaan Pinjaman Daerah                      | -                       | -                     | -                     | -                     | -                     |
| 6.1.05     | Penerimaan Kembali Pinjaman daerah              | -                       | -                     | -                     | -                     | -                     |
| 6.1.06     | Penerimaan Piutang Daerah                       | -                       | -                     | -                     | -                     | -                     |
| 6.1.07     | Penerimaan Kembali Dana Bergulir                | -                       | -                     | -                     | -                     | -                     |
| <b>6.2</b> | <b>PENGELUARAN PEMBIAYAAN</b>                   | <b>1.000.000.000</b>    | <b>2.000.000.000</b>  | <b>4.000.000.000</b>  | <b>3.000.000.000</b>  | <b>3.000.000.000</b>  |
| 6.2.01     | Pembentukan Dana Cadangan                       | -                       | -                     | -                     | -                     | -                     |
| 6.2.02     | Penyertaan Modal Pemerintah Daerah              | 1.000.000.000           | 2.000.000.000         | 4.000.000.000         | 3.000.000.000         | 3.000.000.000         |
| 6.2.03     | Pembayaran Pokok Utang                          | -                       | -                     | -                     | -                     | -                     |
| 6.2.04     | Pemberian Pinjaman Daerah                       | -                       | -                     | -                     | -                     | -                     |
| 6.2.05     | Pembayaran Utang Kepada Pihak Ketiga            | -                       | -                     | -                     | -                     | -                     |
| 6.2.06     | Dana Talangan                                   | -                       | -                     | -                     | -                     | -                     |
| 6.2.07     | Pemberian Pinjaman Dana Bergulir                | -                       | -                     | -                     | -                     | -                     |
|            | <b>PEMBIAYAAN NETTO</b>                         | <b>(11.406.141.033)</b> | <b>29.806.786.447</b> | <b>14.258.039.162</b> | <b>17.463.626.043</b> | <b>47.731.973.809</b> |
|            | <b>SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN</b>           | <b>31.755.531.146</b>   | <b>21.019.999.530</b> | <b>20.463.626.043</b> | <b>50.731.973.809</b> | <b>75.088.199.243</b> |

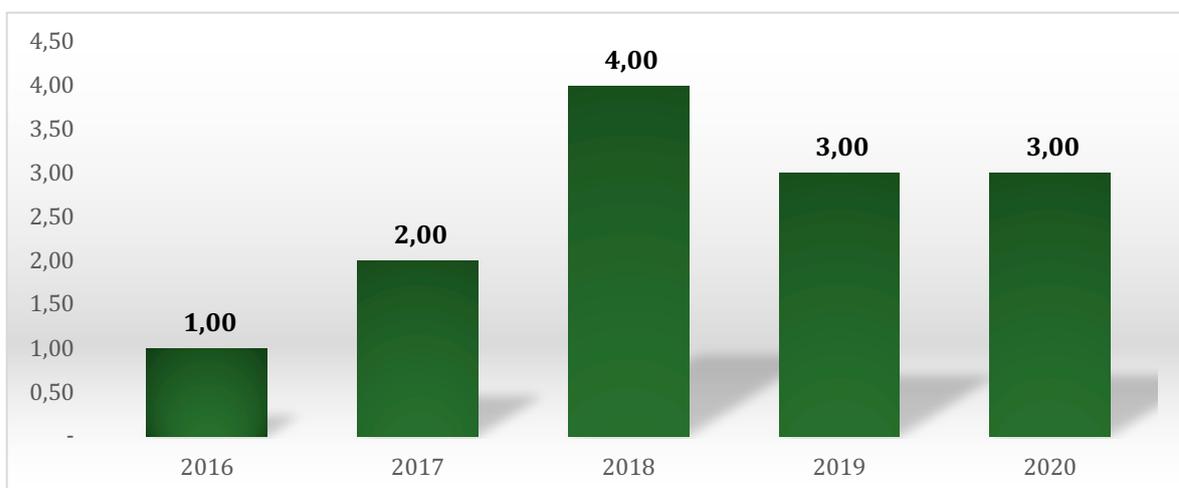
Sumber : BKAD Kabupaten Konawe Utara Tahun 2021

Perkembangan penerimaan pembiayaan daerah Kabupaten Konawe Utara menunjukkan peningkatan dari sebesar minus 10,41 milyar pada tahun 2016 menjadi 50,73 milyar pada tahun 2020, seperti terlihat pada gambar 3.9 berikut.



**Gambar 3.9 Perkembangan Penerimaan Pembiayaan Kabupaten Konawe Utara Tahun 2016-2020 (Milyar Rupiah)**

Pengeluaran pembiayaan Daerah adalah uang yang keluar dari kas daerah. Pengeluaran pembiayaan di Kabupaten Konawe Utara berasal dari Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah. Pengeluaran pembiayaan daerah pada tahun 2016 sebesar 1,00 milyar rupiah mengalami fluktuasi menjadi 3,00 milyar rupiah pada tahun 2020 cenderung stabil, seperti terlihat pada gambar 3.10 berikut.



**Gambar 3.10 Perkembangan Pengeluaran Pembiayaan Kabupaten Konawe Utara Tahun 2016-2020 (Milyar Rupiah)**

Defisit riil anggaran Kabupaten Konawe Utara selama kurun waktu tahun 2016-2020 hanya terjadi pada tahun 2017 sebesar Rp 9.786.786.917 sedangkan tahun 2016, tahun 2018, tahun 2019, dan tahun 2020 terjadi surplus anggaran seperti tercantum pada tabel 3.12 berikut ini.

**Tabel 3.12**  
**Penutup Defisit Riil Anggaran Kabupaten Konawe Utara Tahun 2016-2020**

| No.                         | Uraian                        | 2016                  | 2017                   | 2018                 | 2019                  | 2020                  |
|-----------------------------|-------------------------------|-----------------------|------------------------|----------------------|-----------------------|-----------------------|
| 1.                          | Realisasi Pendapatan Daerah   | 795.063.068.870       | 745.847.438.032        | 778.087.318.332      | 904.601.385.384       | 883.421.957.166       |
| <b>Dikurangi realisasi:</b> |                               |                       |                        |                      |                       |                       |
| 2                           | Belanja Daerah                | 751.901.396.691       | 754.634.224.949        | 771.881.731.451      | 871.333.037.618       | 856.065.731.732       |
| 3.                          | Pengeluaran Pembiayaan Daerah | 1.000.000.000         | 1.000.000.000          | 1.000.000.000        | 1.000.000.000         | 1.000.000.000         |
| <b>Defisit Riil</b>         |                               | <b>42.161.672.179</b> | <b>(9.786.786.917)</b> | <b>5.205.586.881</b> | <b>32.268.347.766</b> | <b>26.356.225.434</b> |

Sumber : Dinas BKAD Kabupaten Konawe Utara, dianalisis

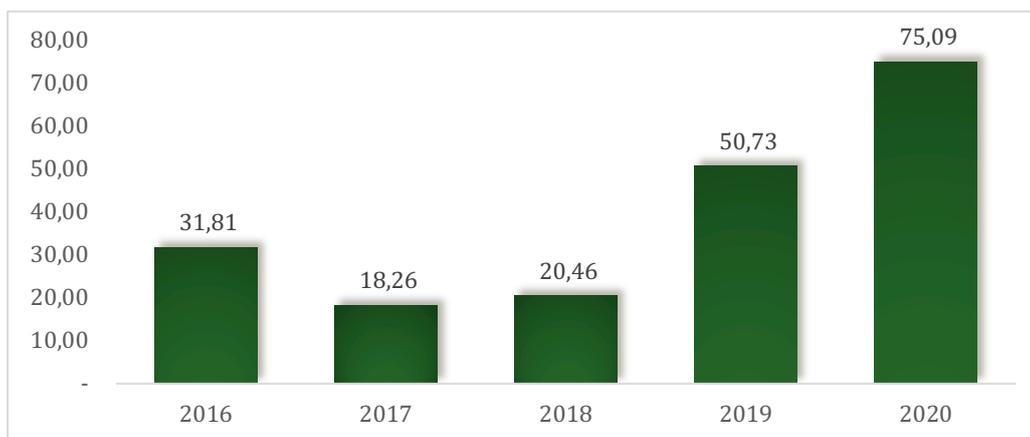
Sumber penutup defisit riil anggaran terutama berasal dari Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) Tahun Anggaran sebelumnya dengan rincian yang dalam tabel 3.13 berikut.

**Tabel 3.13**  
**Komposisi Penutup Defisit Riil Anggaran**  
**Kabupaten Konawe Utara Tahun 2016-2020**

| NO. | Uraian  | Proporsi dari total defisit riil (%) |      |      |      |      |
|-----|---|--------------------------------------|------|------|------|------|
|     |   | 2016                                 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
| 1   | Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) Tahun Anggaran Sebelumnya | 100                                  | 100  | 100  | 100  | 100  |
| 2   | Pencairan Dana Cadangan   | -                                    | -    | -    | -    | -    |
| 3   | Hasil Penjualan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan                   | -                                    | -    | -    | -    | -    |
| 4   | Penerimaan Pinjaman Daerah  | -                                    | -    | -    | -    | -    |
| 5   | Penerimaan Kembali Pinjaman daerah                                | -                                    | -    | -    | -    | -    |
| 6   | Penerimaan Piutang Daerah   | -                                    | -    | -    | -    | -    |
| 7   | Penerimaan Kembali Dana Bergulir                                  | -                                    | -    | -    | -    | -    |

Sumber : Dinas BKAD Kabupaten Konawe Utara, dianalisis

Sisa Lebih Perhitungan Anggaran yang selanjutnya disingkat SiLPA adalah selisih lebih realisasi penerimaan dan pengeluaran anggaran selama satu periode anggaran. SiLPA tahun berjalan di Kabupaten Konawe Utara menunjukkan kecenderungan peningkatan dari sebesar 31,81 milyar rupiah pada tahun 2016 menjadi sebesar 75,09 milyar rupiah pada tahun 2020 yang tercantum pada gambar 3.11 berikut.



**Gambar 3.11 Perkembangan SiLPA tahun Berjalan Kabupaten Konawe Utara Tahun 2016-2020 (Milyar Rupiah)**

Realisasi Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Kabupaten Konawe Utara Tahun 2016-2020 berfluktuatif namun cenderung meningkat, dari sebesar Rp 31.806.786.447 pada tahun 2016 menjadi Rp 18.258.039.162 pada tahun 2017 dan Rp 75.088.199.243 pada tahun 2020. Adapun komponen realisasi Sisa Lebih Perhitungan Anggaran antara lain pelampauan penerimaan PAD, pelampauan penerimaan pendapatan transfer, pelampauan penerimaan lain-lain pendapatan daerah yang sah, sisa penghematan belanja atau akibat lainnya, pelampauan penerimaan pembiayaan, dan sisa pengeluaran pembiayaan.

Pada Tahun 2020, komponen sisa penghematan belanja atau akibat lainnya menyumbangkan SiLPA terbesar yaitu Rp 112.083.952.322 dengan presentase 149,27%. Secara rinci Realisasi Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Kabupaten Konawe Utara Tahun 2016-2020 dapat dilihat pada tabel 3.14 berikut ini.

**Tabel 3.14**  
**Realisasi Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Kabupaten Konawe Utara**  
**Tahun 2016-2020**

| No. | Uraian   | 2016             |              | 2017             |              | 2018             |              | 2019            |              | 2020             |              |
|-----|--|------------------|--------------|------------------|--------------|------------------|--------------|-----------------|--------------|------------------|--------------|
|     |  | Rp               | % dari SiLPA | Rp               | % dari SiLPA | Rp               | % dari SiLPA | Rp              | % dari SiLPA | Rp               | % dari SiLPA |
| 1   | Jumlah SiLPA   | 31.806.786.447   | 100,00       | 18.258.039.162   | 100,00       | 20.463.626.043   | 100          | 50.731.973.809  | 100          | 75.088.199.243   | 100,00       |
| 2   | Pelampauan penerimaan PAD                                  | 1.575.504.080    | 4,95         | 12.252.200.734   | 67,11        | (483.114.281)    | 100,00       | (2.608.186.071) | (5,14)       | (36.685.031.624) | (48,86)      |
| 3   | Pelampauan penerimaan pendapatan transfer                  | (8.339.976.496)  | (26,22)      | (11.890.372.523) | (65,12)      | 19.789.096.289   | 96,70        | 6.571.431.445   | 12,95        | (15.306.185.001) | (20,38)      |
| 4   | Pelampauan penerimaan lain-lain pendapatan daerah yang sah | (48.193.166.829) | (151,52)     | 7.541.226.775    | 41,30        | 5.463.416.928    | 26,70        | 28.102.718.900  | 55,39        | (1.658.579.263)  | (2,21)       |
| 5   | Sisa penghematan belanja atau akibat lainnya               | 92.670.566.725   | 291,35       | (3.251.318.881)  | (17,81)      | (11.367.876.795) | (55,55)      | 1.202.383.492   | 2,37         | 112.083.952.322  | 149,27       |
| 6   | Pelampauan penerimaan pembiayaan                           | (15.406.141.033) | (48,44)      | 13.606.303.057   | 74,52        | 8.062.103.902    | 39,40        | 16.463.626.043  | 32,45        | 16.654.042.809   | 22,18        |
| 7   | Sisa pengeluaran pembiayaan                                | 9.500.000.000    | 29,87        | -                | -            | (1.000.000.000)  | (4,89)       | 1.000.000.000   | 1,97         | -                | -            |

Sumber : BKAD Kabupaten Konawe Utara Tahun 2016-2021, diolah

### 3.3. KERANGKA PENDANAAN

#### 3.3.1 Proyeksi Keuangan Daerah

Asumsi penyusunan Proyeksi keuangan daerah Kabupaten Konawe Utara tahun 2022-2026 dengan mempertimbangkan pemulihan ekonomi akibat pandemi covid-19. Pemulihan ekonomi akan memicu peningkatan pertumbuhan ekonomi sehingga diharapkan terjadi peningkatan pendapatan daerah. Pertumbuhan ekonomi dalam jangka menengah Kabupaten Konawe Utara tahun 2022-2026 kemungkinan besar masih terpengaruh oleh Pandemi Covid-19, terutama dalam dua tahun ke depan.

Penjelasan asumsi proyeksi keuangan daerah tahun 2021- 2026 sebagai berikut:

1. Untuk tahun 2021 pendapatan asli daerah utamanya pajak dan retribusi kemungkinan besar masih terpengaruh oleh pelaksanaan new normal selama masa Pandemi Covid-19, sehingga hanya mengalami sedikit peningkatan dibandingkan tahun 2020. Kemudian untuk tahun 2022-2026 diproyeksikan pendapatan asli daerah mengalami sedikit peningkatan dengan asumsi kondisi perekonomian sudah dapat pulih kembali setelah vaksin Covid-19 diberikan pada tahun 2021 dan ditargetkan selesai pada bulan april tahun 2022, serta adanya kebijakan ekonomi tahun 2022 yang diarahkan pada upaya pemulihan ekonomi. Diharapkan kebijakan ini akan berdampak pada membaiknya pertumbuhan ekonomi dan meningkatnya pendapatan asli daerah pada tahun 2022 hingga tahun 2026.
2. Pendapatan daerah yang berasal dari transfer pemerintah pusat diasumsikan masih sama dengan APBD tahun 2021 yang tertuang PMK No. 35/PMK.07/2020. Namun diharapkan kedepan transfer dari pemerintah pusat dan pemerintah provinsi dalam kurun waktu tahun 2022-2026 dapat meningkat sehingga dapat disesuaikan dalam RKPD, tentunya kepastiannya mendasarkan pada postur APBN dan APBD Provinsi Sulawesi Tenggara.
3. Lain-lain pendapatan yang sah diasumsikan sama selama kurun waktu tahun 2022-2026.
4. Wacana pengajuan pinjaman daerah tahun 2021 sebesar 300 milyar rupiah diasumsikan dapat terealisasi pada tahun 2022 sehingga meningkatkan penerimaan pembiayaan yang berdampak pada peningkatan belanja daerah

utamanya dalam prioritas percepatan pembangunan infrastruktur serta pemulihan ekonomi akibat pandemi Covid-19.

5. Pembayaran Cicilan Pokok Utang Yang Jatuh Tempo dimulai pada tahun 2023 dilakukan selama empat tahun sampai dengan tahun 2026.

Dengan mendasarkan pada asumsi dan kebijakan di atas, maka dilakukan proyeksi pendapatan, belanja dan pembiayaan daerah tahun 2021-2026 sebagaimana tercantum pada tabel 3.15 berikut

**Tabel 3.15**  
**Proyeksi Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan Daerah Kabupaten Konawe Utara Tahun 2021-2026**

| Kode       | Uraian  | Proyeksi (Rp)          |                        |                        |                          |                          |                          |
|------------|---|------------------------|------------------------|------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
|            |   | 2021                   | 2022                   | 2023                   | 2024                     | 2025                     | 2026                     |
| <b>4</b>   | <b>PENDAPATAN DAERAH</b>  | <b>943.443.713.657</b> | <b>966.729.787.331</b> | <b>991.752.874.555</b> | <b>1.018.998.181.177</b> | <b>1.048.843.609.521</b> | <b>1.081.742.401.453</b> |
| <b>4.1</b> | <b>PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)</b>                                       | <b>48.771.259.017</b>  | <b>55.879.657.901</b>  | <b>64.172.292.422</b>  | <b>73.873.332.570</b>    | <b>85.254.199.368</b>    | <b>98.644.368.986</b>    |
| 4.1.01     | Pajak Daerah  | 5.124.228.248          | 6.514.943.795          | 8.283.099.540          | 10.531.132.756           | 13.389.282.185           | 17.023.133.371           |
| 4.1.02     | Retribusi Daerah  | 17.789.655.087         | 19.431.640.252         | 21.225.180.647         | 23.184.264.820           | 25.324.172.463           | 27.661.593.582           |
| 4.1.03     | Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan                         | 5.237.876.765          | 6.294.880.296          | 7.565.187.140          | 9.091.841.905            | 10.926.575.601           | 13.131.558.557           |
| 4.1.04     | Lain-lain PAD yang Sah  | 20.619.498.917         | 23.638.193.558         | 27.098.825.095         | 31.066.093.089           | 35.614.169.118           | 40.828.083.476           |
| <b>4.2</b> | <b>PENDAPATAN TRANSFER</b>  | <b>878.678.271.640</b> | <b>894.697.218.561</b> | <b>911.267.117.728</b> | <b>928.648.982.877</b>   | <b>946.949.272.910</b>   | <b>966.291.730.848</b>   |
| 4.2.1      | Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat                                      | 859.347.752.000        | 872.152.033.505        | 884.972.668.397        | 897.981.766.623          | 911.182.098.592          | 924.576.475.441          |
| 4.2.2      | Pendapatan Transfer Antar Daerah  | 19.330.519.640         | 22.545.185.056         | 26.294.449.331         | 30.667.216.255           | 35.767.174.318           | 41.715.255.407           |
| <b>4.3</b> | <b>LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH</b>                               | <b>15.994.183.000</b>  | <b>16.152.910.869</b>  | <b>16.313.464.404</b>  | <b>16.475.865.729</b>    | <b>16.640.137.243</b>    | <b>16.806.301.618</b>    |
| 4.3.1      | Pendapatan Hibah  | 4.500.000.000          | 4.516.200.000          | 4.532.458.320          | 4.548.775.170            | 4.565.150.761            | 4.581.585.303            |
| 4.3.2      | Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan | 11.494.183.000         | 11.636.710.869         | 11.781.006.084         | 11.927.090.559           | 12.074.986.482           | 12.224.716.315           |
|            | <b>Jumlah Pendapatan</b>  | <b>943.443.713.657</b> | <b>966.729.787.331</b> | <b>991.752.874.555</b> | <b>1.018.998.181.177</b> | <b>1.048.843.609.521</b> | <b>1.081.742.401.453</b> |

| Kode       | Uraian                                     | Proyeksi (Rp)            |                          |                        |                        |                          |                          |
|------------|--|--------------------------|--------------------------|------------------------|------------------------|--------------------------|--------------------------|
|            |  | 2021                     | 2022                     | 2023                   | 2024                   | 2025                     | 2026                     |
| <b>5</b>   | <b>BELANJA</b>                             | <b>1.015.281.912.900</b> | <b>1.314.979.787.331</b> | <b>965.002.874.555</b> | <b>994.248.181.177</b> | <b>1.024.093.609.521</b> | <b>1.056.992.401.453</b> |
| <b>5.1</b> | <b>BELANJA OPERASI</b>                     | <b>653.241.399.185</b>   | <b>659.840.263.854</b>   | <b>665.389.618.333</b> | <b>671.261.037.840</b> | <b>677.498.045.532</b>   | <b>684.150.920.539</b>   |
| 5.1.01     | Belanja Pegawai                            | 290.851.822.141          | 293.324.062.629          | 295.817.317.162        | 298.331.764.357        | 300.867.584.354          | 303.424.958.821          |
| 5.1.02     | Belanja Barang dan Jasa                    | 349.032.635.944          | 349.905.217.534          | 350.779.980.578        | 351.656.930.529        | 352.536.072.855          | 353.417.413.038          |
| 5.1.03     | Belanja Hibah                              | 13.356.941.100           | 14.991.830.691           | 16.826.830.767         | 18.886.434.853         | 21.198.134.479           | 23.792.786.139           |
| 5.1.04     | Belanja Bantuan Sosial                     | -                        | 1.619.153.000            | 1.965.489.827          | 2.385.908.101          | 2.896.253.843            | 3.515.762.540            |
| <b>5.2</b> | <b>BELANJA MODAL</b>                       | <b>171.725.154.876</b>   | <b>462.134.853.668</b>   | <b>103.787.560.123</b> | <b>124.192.824.896</b> | <b>144.666.957.944</b>   | <b>167.592.359.506</b>   |
| 5.2.1      | Belanja Modal Tanah                        | 3.100.000.000            | 3.107.440.000            | 3.114.897.856          | 3.122.373.611          | 3.129.867.308            | 3.137.378.989            |
| 5.2.2      | Belanja Modal Peralatan dan Mesin          | 66.563.761.305           | 67.279.230.502           | 26.208.840.463         | 41.624.545.831         | 47.312.412.440           | 47.500.887.195           |
| 5.2.3      | Belanja Modal Gedung dan Bangunan          | 38.940.304.156           | 200.415.375.867          | 29.896.243.452         | 34.382.977.622         | 43.625.649.949           | 48.874.332.878           |
| 5.2.4      | Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi | 59.076.866.462           | 187.261.083.630          | 40.468.166.962         | 40.935.640.444         | 46.443.675.306           | 63.896.151.102           |
| 5.2.5      | Belanja Modal Aset Tetap Lainnya           | 4.044.222.953            | 4.071.723.669            | 4.099.411.390          | 4.127.287.387          | 4.155.352.942            | 4.183.609.343            |
| <b>5.3</b> | <b>BELANJA TIDAK TERDUGA</b>               | <b>5.790.203.639</b>     | <b>6.597.358.026</b>     | <b>7.517.029.735</b>   | <b>8.564.903.680</b>   | <b>9.758.851.253</b>     | <b>11.119.235.118</b>    |
| 5.3.1      | Belanja Tidak Terduga                      | 5.790.203.639            | 6.597.358.026            | 7.517.029.735          | 8.564.903.680          | 9.758.851.253            | 11.119.235.118           |
| <b>5.4</b> | <b>BELANJA TRANSFER</b>                    | <b>184.525.155.200</b>   | <b>186.407.311.783</b>   | <b>188.308.666.363</b> | <b>190.229.414.760</b> | <b>192.169.754.791</b>   | <b>194.129.886.290</b>   |
| 5.4.02     | Belanja Bantuan Keuangan                   | 184.525.155.200          | 186.407.311.783          | 188.308.666.363        | 190.229.414.760        | 192.169.754.791          | 194.129.886.290          |
|            | <b>Jumlah Belanja</b>                      | <b>1.015.281.912.900</b> | <b>1.314.979.787.331</b> | <b>965.002.874.555</b> | <b>994.248.181.177</b> | <b>1.024.093.609.521</b> | <b>1.056.992.401.453</b> |
|            | <b>Total Surplus/(Defisit)</b>             | <b>(71.838.199.243)</b>  | <b>(348.250.000.000)</b> | <b>26.750.000.000</b>  | <b>24.750.000.000</b>  | <b>24.750.000.000</b>    | <b>24.750.000.000</b>    |

| Kode       | Uraian   | Proyeksi (Rp)            |                          |                          |                          |                          |                          |
|------------|--|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
|            |  | 2021                     | 2022                     | 2023                     | 2024                     | 2025                     | 2026                     |
| <b>6</b>   | <b>PEMBIAYAAN</b>  |                          |                          |                          |                          |                          |                          |
| <b>6.1</b> | <b>PENERIMAAN PEMBIAYAAN</b>                                 | <b>75.088.199.243</b>    | <b>352.500.000.000</b>   | <b>52.500.000.000</b>    | <b>52.500.000.000</b>    | <b>52.500.000.000</b>    | <b>52.500.000.000</b>    |
| 6.1.01     | Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya             | 75.088.199.243           | 52.500.000.000           | 52.500.000.000           | 52.500.000.000           | 52.500.000.000           | 52.500.000.000           |
| 6.1.02     | Penerimaan Pinjaman Daerah                                   | -                        | 300.000.000.000          | -                        | -                        | -                        | -                        |
|            | <b>Jumlah Penerimaan Pembiayaan</b>                          | <b>75.088.199.243</b>    | <b>352.500.000.000</b>   | <b>52.500.000.000</b>    | <b>52.500.000.000</b>    | <b>52.500.000.000</b>    | <b>52.500.000.000</b>    |
| <b>6.2</b> | <b>PENGELUARAN PEMBIAYAAN</b>                                | <b>3.250.000.000</b>     | <b>4.250.000.000</b>     | <b>79.250.000.000</b>    | <b>77.250.000.000</b>    | <b>77.250.000.000</b>    | <b>77.250.000.000</b>    |
| 6.2.1      | Pembentukan Dana Cadangan                                    | -                        | 1.000.000.000            | 1.000.000.000            | 1.000.000.000            | 1.000.000.000            | 1.000.000.000            |
| 6.2.2      | Penyertaan Modal Daerah                                      | 3.250.000.000            | 3.250.000.000            | 3.250.000.000            | 1.250.000.000            | 1.250.000.000            | 1.250.000.000            |
| 6.2.3      | Pembayaran Cicilan Pokok Utang Yang Jatuh Tempo              | -                        | -                        | 75.000.000.000           | 75.000.000.000           | 75.000.000.000           | 75.000.000.000           |
|            | <b>Jumlah Pengeluaran Pembiayaan</b>                         | <b>3.250.000.000</b>     | <b>4.250.000.000</b>     | <b>79.250.000.000</b>    | <b>77.250.000.000</b>    | <b>77.250.000.000</b>    | <b>77.250.000.000</b>    |
|            | <b>Pembiayaan Netto</b>                                      | <b>71.838.199.243</b>    | <b>348.250.000.000</b>   | <b>(26.750.000.000)</b>  | <b>(24.750.000.000)</b>  | <b>(24.750.000.000)</b>  | <b>(24.750.000.000)</b>  |
|            | <b>Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Daerah Tahun Berkenaan</b> | <b>-</b>                 | <b>-</b>                 | <b>-</b>                 | <b>-</b>                 | <b>-</b>                 | <b>-</b>                 |
|            | <b>TOTAL APBD</b>  | <b>1.018.531.912.900</b> | <b>1.319.229.787.331</b> | <b>1.044.252.874.555</b> | <b>1.071.498.181.177</b> | <b>1.101.343.609.521</b> | <b>1.134.242.401.453</b> |

Sumber : Bappeda Kabupaten Konawe Utara Tahun 2021

### 3.3.2. Perhitungan Kerangka Pendanaan

Analisis Kerangka pendanaan bertujuan untuk menghitung kapasitas riil keuangan daerah yang akan dialokasikan untuk pendanaan program pembangunan jangka menengah daerah selama 5 (lima) tahun ke depan. Langkah awal yang harus dilakukan adalah mengidentifikasi seluruh penerimaan daerah, kemudian menentukan ke pos-pos mana sumber penerimaan tersebut akan dialokasikan.

Dari total pendapatan dan penerimaan yang dikurangi total belanja wajib dan pengeluaran yang wajib mengikat serta prioritas utama diperoleh kapasitas riil kemampuan keuangan. Suatu kapasitas riil keuangan daerah adalah total penerimaan daerah setelah dikurangkan dengan berbagai pos belanja pegawai dan pengeluaran pembiayaan. Untuk menentukan proyeksi kapasitas riil keuangan daerah yang akan digunakan untuk membiayai program/kegiatan selama 5 (lima) tahun kedepan (2021-2026) dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Konawe Utara sebagaimana tabel berikut.

Berdasarkan dana alokasi pagu indikatif yang tersedia, kemudian dialokasikan ke berbagai program/kegiatan sesuai urutan prioritas. Adapun ketentuan prioritas anggaran sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017, sebagai berikut:

- a. Prioritas I adalah dialokasikan untuk pengeluaran wajib mengikat serta untuk program - program pelayanan wajib dasar terutama pemenuhan SPM;
- b. Prioritas II adalah dialokasikan untuk program-program terkait dengan pelaksanaan visi dan misi Bupati (Janji Bupati) di luar program prioritas untuk pemenuhan urusan wajib pelayanan dasar;
- c. Prioritas III adalah untuk program-program urusan pemerintahan lainnya serta penunjang tugas dan fungsi OPD.

Pembagian anggaran untuk masing-masing prioritas I, II dan III dapat dilihat pada tabel berikut.

**Tabel 3.16**  
**Kapasitas Riil Kemampuan Keuangan Daerah**  
**untuk Mendanai Pembangunan Daerah Kabupaten Konawe Utara**  
**Tahun 2021-2026**

| No.  | Uraian                                    | Proyeksi                 |                          |                          |                          |                          |                          |
|--|---|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
|  |   | 2021<br>(Rp)             | 2022<br>(Rp)             | 2023<br>(Rp)             | 2024<br>(Rp)             | 2025<br>(Rp)             | 2026<br>(Rp)             |
| 1.   | Pendapatan                                | 943.443.713.657          | 966.729.787.331          | 991.752.874.555          | 1.018.998.181.177        | 1.048.843.609.521        | 1.081.742.401.453        |
| 2.   | Pencairan dana cadangan<br>(sesuai Perda) | -                        | -                        | -                        | -                        | -                        | -                        |
| 3.   | Sisa Lebih Riil Perhitungan<br>Anggaran   | 75.088.199.243           | 52.500.000.000           | 52.500.000.000           | 52.500.000.000           | 52.500.000.000           | 52.500.000.000           |
| 4.   | Penerimaan Pinjaman<br>Daerah             | -                        | 300.000.000.000          | -                        | -                        | -                        | -                        |
| <b>Total penerimaan</b>                      |   | <b>1.018.531.912.900</b> | <b>1.319.229.787.331</b> | <b>1.044.252.874.555</b> | <b>1.071.498.181.177</b> | <b>1.101.343.609.521</b> | <b>1.134.242.401.453</b> |
|  | Dikurangi:                                |                          |                          |                          |                          |                          |                          |
| 5.   | Belanja Pegawai                           | 290.851.822.141          | 293.324.062.629          | 295.817.317.162          | 298.331.764.357          | 300.867.584.354          | 303.424.958.821          |
| 6.   | Pengeluaran Pembiayaan                    | 3.250.000.000            | 4.250.000.000            | 79.250.000.000           | 77.250.000.000           | 77.250.000.000           | 77.250.000.000           |
| <b>Kapasitas riil kemampuan<br/>keuangan</b> |   | <b>724.430.090.759</b>   | <b>1.021.655.724.702</b> | <b>669.185.557.393</b>   | <b>695.916.416.820</b>   | <b>723.226.025.166</b>   | <b>753.567.442.631</b>   |

Sumber : Bappeda Kabupaten Konawe Utara Tahun 2021

**Tabel 3.17**  
**Rencana Penggunaan Kapasitas Riil Kemampuan Keuangan Daerah**  
**Kabupaten Konawe Utara Tahun 2021-2026**

| No. | Uraian  | Proyeksi        |                   |                 |                 |                 |                 |
|-----|---|-----------------|-------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
|     |   | 2021<br>(Rp)    | 2022<br>(Rp)      | 2023<br>(Rp)    | 2024<br>(Rp)    | 2025<br>(Rp)    | 2026<br>(Rp)    |
| 1.  | Kapasitas riil kemampuan keuangan   | 724.430.090.759 | 1.021.655.724.702 | 669.185.557.393 | 695.916.416.820 | 723.226.025.166 | 753.567.442.631 |
|     | digunakan untuk mendanai prioritas :  |                 |                   |                 |                 |                 |                 |
| 2.  | Prioritas I<br>Pengeluaran wajib mengikat serta untuk program-program pelayanan wajib dasar terutama pemenuhan SPM  | 467.558.269.297 | 476.426.247.982   | 485.834.528.730 | 495.928.869.113 | 506.822.837.647 | 518.652.606.725 |
| 3.  | Prioritas II<br>Program terkait dengan pelaksanaan visi dan misi Bupati (Janji Bupati) di luar program prioritas untuk pemenuhan urusan wajib pelayanan dasar | 179.810.275.023 | 490.706.529.047   | 128.345.720.064 | 139.991.283.394 | 151.482.231.263 | 164.440.385.134 |
| 4.  | Prioritas III<br>Program-program urusan pemerintahan lainnya serta penunjang tugas dan fungsi OPD   | 77.061.546.439  | 54.522.947.672    | 55.005.308.599  | 59.996.264.312  | 64.920.956.256  | 70.474.450.772  |
|     | <b>Jumlah prioritas I, II, dan III</b>  | 724.430.090.759 | 1.021.655.724.702 | 669.185.557.393 | 695.916.416.820 | 723.226.025.166 | 753.567.442.631 |

Sumber : Bappeda Kabupaten Konawe Utara Tahun 2021

Tabel 3.16 dan 3.17 di atas menginformasikan bahwa kemampuan keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Konawe Utara terus membaik secara perlahan dari tahun ke tahun, namun hasil perhitungan di atas menunjukkan bahwa secara keseluruhan kapasitas riil kemampuan keuangan daerah Kabupaten Konawe Utara relatif terbatas. Ini dikarenakan adanya dampak dari pandemi Covid-19 yang menyebabkan krisis perekonomian global dan nasional, yang juga menyebabkan tekanan anggaran (fiscal distress). Perekonomian dunia dan nasional diperkirakan akan kembali normal setelah 2 tahun dari selesainya pandemi, atau jika diperkirakan sampai dengan akhir tahun 2020 pandemi akan mereda, maka baru tahun 2023 perekonomian global akan kembali normal. Di masa 2 tahun ke depan diperkirakan fiskal Pemerintah dan Pemerintah Daerah akan mengalami tekanan dan penurunan kapasitas. Sehingga, diperkirakan dengan kondisi yang terjadi pada tahun 2020 ini, baru pada tahun 2023 kapasitas riil kemampuan keuangan daerah Pemerintah Kabupaten Konawe Utara akan membaik.

# BAB IV PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS DAERAH



Analisis isu strategis merupakan pemahaman permasalahan pembangunan dan isu-isu penting dalam penyusunan rencana pembangunan jangka menengah Kabupaten Konawe Utara Tahun 2021-2026. Isu strategis merupakan tantangan atau peluang yang harus diperhatikan atau diprioritaskan dalam perencanaan pembangunan karena dampaknya yang signifikan bagi masyarakat di masa mendatang. Suatu analisis isu-isu strategis menghasilkan rumusan strategi dan kebijakan yang bersifat antisipatif dan solusi atas berbagai kondisi yang tidak ideal di masa depan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dalam jangka menengah. Sedangkan pada sisi lain, permasalahan pembangunan daerah menggambarkan kinerja daerah atau kondisi masyarakat yang belum ideal. Dengan demikian, rumusan tentang permasalahan pembangunan dan isu strategis merupakan bagian penting dalam penentuan strategi dan kebijakan pembangunan jangka menengah Kabupaten Konawe Utara.

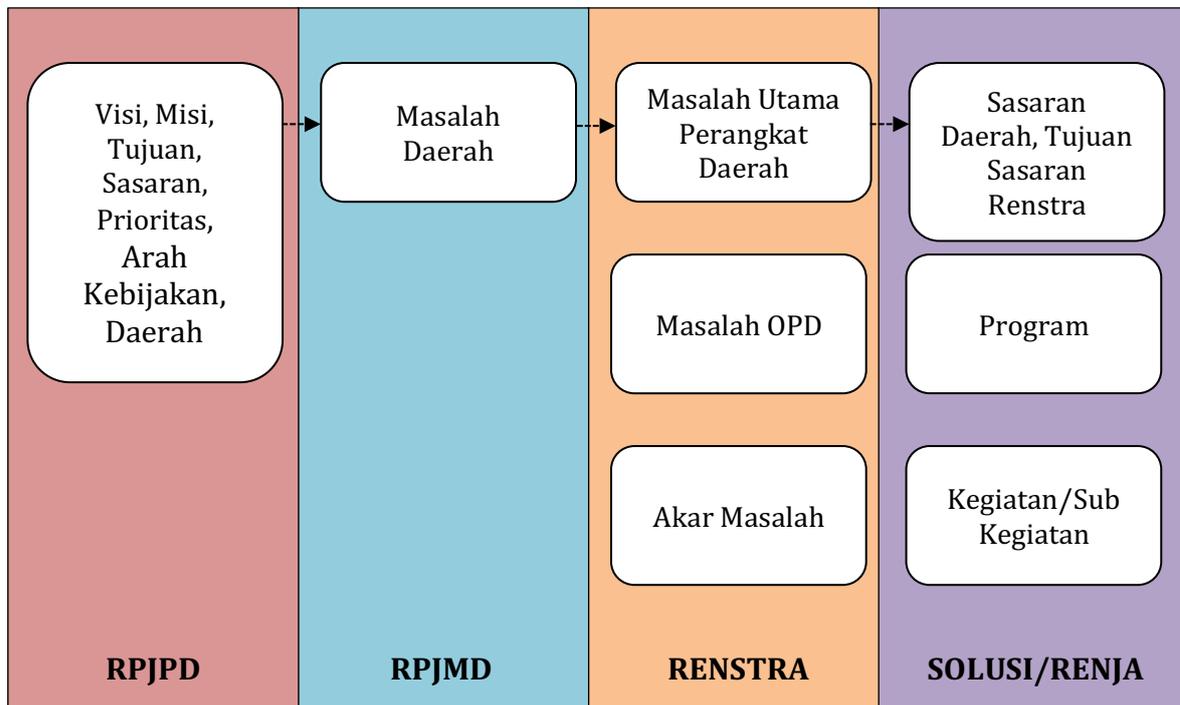
Perkembangan terkini, permasalahan dan tantangan pembangunan Kabupaten Konawe Utara, regional, nasional maupun internasional semakin bertambah sebagai implikasi terjadinya pandemi COVID-19 yang dimulai pada awal tahun 2020 dan hingga saat ini belum dapat dipastikan sampai kapan pandemi dapat dikendalikan atau berakhir. Dampak pandemi sudah terjadi pada tahun 2020 dan masih akan berlanjut pada tahun-tahun berikutnya. Oleh karena itu, permasalahan dan tantangan pembangunan sebagai dampak pandemi COVID-19 harus diintegrasikan ke dalam permasalahan dan isu strategis pembangunan Kabupaten Konawe Utara.

#### **4.1 PERMASALAHAN PEMBANGUNAN**

Permasalahan pembangunan daerah merupakan kesenjangan antara sasaran pembangunan yang ingin dicapai di masa mendatang dengan kondisi riil saat perencanaan pembangunan dilaksanakan. Untuk meminimalisir kesenjangan tersebut dalam rangka mewujudkan visi dan misi kepala daerah terpilih, maka diperlukan perumusan yang tepat terkait analisis permasalahan daerah.

Identifikasi permasalahan pembangunan Kabupaten Konawe Utara dilakukan terhadap data capaian pembangunan sampai dengan tahun 2020 seluruh bidang urusan pemerintahan dan permasalahan daerah dalam rangka mencapai visi, misi, dan tujuan pembangunan daerah dalam RPJPD Kabupaten Konawe Utara tahun 2012-2032. Identifikasi permasalahan dilakukan dalam *Forum Group Discussion* (FGD)

dengan perangkat daerah terkait. Hasil FGD dipetakan dengan pendekatan kerangka logis masalah pada RPJMD dan Renstra. Kerangka logis permasalahan Daerah dan Perangkat Daerah ditunjukkan Gambar 4.1.



**Gambar 4.1 Hubungan Permasalahan Daerah dan Perangkat Daerah**

Hasil analisis permasalahan yang merupakan penjabaran Arah Kebijakan RPJPD Kabupaten Konawe Utara Tahun 2012-2032, ditemukan 26 (dua puluh enam) masalah utama di Kabupaten Konawe Utara dalam rangka mewujudkan layanan publik dan kesejahteraan masyarakat sebagaimana ditunjukkan dalam tabel 4.1 sebagai berikut.

**Tabel 4.1 Keterkaitan Masalah Daerah dan Permasalahan Perangkat Daerah**

| No. | Arah Kebijakan RPJPD  | Masalah Daerah  | Masalah OPD   | Urusan       | Ket.                      |
|-----|---|---|---|--------------|---------------------------|
| 1.  | Peningkatan kualitas pendidikan, aksesibilitas, dan partisipasi masyarakat dalam pendidikan, serta pemerataan pendidikan dan kesempatan memperoleh pendidikan yang bermutu. | Belum optimalnya akses pendidikan                                   | <ol style="list-style-type: none"> <li>Masih rendahnya perluasan akses dan pemerataan akses masyarakat terhadap layanan pendidikan yang ditujukan oleh masih rendahnya Angka Rata-Rata Lama Sekolah (9,21 Tahun), APK PAUD (63,75), APM SD (97,70), dan APM SMP (77,64).</li> <li>Masih rendahnya mutu, relevansi dan daya saing pendidikan yang ditunjukkan oleh rasio guru sekolah (PAUD, SD 8,44, SMP 12,69), rendahnya persentase guru tersertifikasi (SD 30,64 % dan SMP 30,20%).</li> <li>Masih rendahnya persentase sekolah akreditasi SD (17,31 %) dan SMP (41,67%) dan masih belum meratanya keberadaan sekolah dasar dan sekolah menengah di wilayah Kabupaten Konawe Utara (65,41% dari jumlah desa).</li> </ol> | Pendidikan   | Wajib Pelayanan Dasar     |
|     |   |   | <ol style="list-style-type: none"> <li>Masih kurang optimalnya kapasitas perpustakaan daerah dan sekolah guna mendorong minat baca masyarakat.</li> <li>Masih belum optimalnya pengelolaan perpustakaan digital, guna mendorong minat baca masyarakat, dalam rangka penyesuaian terhadap kondisi zaman.</li> </ol>  | Perpustakaan | Wajib Non Pelayanan Dasar |
| 2.  | Peningkatan kualitas dan kuantitas pelayanan kesehatan, aksesibilitas, dan  | Derajat kesehatan masyarakat dan capaian keluarga sehat masih perlu | <ol style="list-style-type: none"> <li>Belum terpenuhinya SPM Bidang Kesehatan</li> <li>Masih ditemukannya balita dengan kondisi gizi kurang (296 jiwa), gizi buruk, dan stunting.</li> </ol>   | Kesehatan    | Wajib Pelayanan Dasar     |

| No. | Arah Kebijakan RPJPD                    | Masalah Daerah | Masalah OPD   | Urusan | Ket. |
|-----|---|----------------|---|--------|------|
|     | partisipasi masyarakat dalam Kesehatan. | ditingkat      | <ol style="list-style-type: none"> <li>3. Cakupan pelayanan untuk ibu hamil, ibu nifas, bayi, balita dan anak masih perlu ditingkatkan sesuai standar.</li> <li>4. Ketersediaan sarana dan prasarana kesehatan baik di Rumah Sakit, puskesmas dan puskesmas pembantu masih perlu ditingkatkan sesuai standar (akreditasi puskesmas baru 72,73 %).</li> <li>5. Standar Pelayanan Minimal pada Rumah Sakit Umum Daerah belum tercapai secara optimal.</li> <li>6. Optimalisasi upaya preventif dan promotif terhadap pandemi Covid-19 guna menurunkan dampak dari pandemi tersebut.</li> <li>7. Masih diperlukannya peningkatan pencegahan dan penanganan terhadap penderita penyakit menular antara lain HIV/AIDS, TB, dll., dan penyakit tidak menular seperti hipertensi, kanker, diabetes, dll.</li> <li>8. Tingkat pengetahuan serta kesadaran masyarakat untuk menerapkan gaya hidup sehat untuk mencegah penyakit masih rendah (Semakin tingginya warga usia produktif yang menderita penyakit degeneratif).</li> <li>9. Jumlah dokter dan tenaga kesehatan yang kurang dibanding dengan jumlah warga kabupaten (pasien) yang dilayani (0,2).</li> </ol> |        |      |

| No. | Arah Kebijakan RPJPD  | Masalah Daerah                             | Masalah OPD  | Urusan          | Ket.                      |
|-----|---|--|--|-----------------|---------------------------|
|     |   |  | 10. Masih adanya angka stunting di Kabupaten Konawe Utara sebesar 11,6 % terhadap jumlah balita  |                 |                           |
| 3.  | Peningkatan perluasan kesempatan kerja, kualitas tenaga kerja, perlindungan tenaga kerja, dan transmigrasi.   | Masih tingginya angka pengangguran terbuka | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Adanya pemutusan hubungan kerja terutama sebagai dampak pandemi Covid-19 (TPT 3,79)</li> <li>2. Masih diperlukannya fasilitasi pembentukan wirausaha baru untuk peningkatan perekonomian masyarakat, baik terkait pelatihan produksi, pengelolaan dan manajemen usaha, permodalan dan pemasaran.</li> <li>3. Masih kurangnya tenaga kerja bersertifikat kompetensi</li> <li>4. Belum optimalnya penempatan tenaga kerja (74,45 TPAK)</li> <li>5. Pengawasan ketenagakerjaan. perlindungan serta hubungan industrial belum optimal dijalankan.</li> </ol> | Tenaga Kerja    | Wajib Non Pelayanan Dasar |
| 4.  | Pencapaian pertumbuhan ekonomi yang berkualitas dan berkesinambungan sehingga pendapatan perkapita pada akhir periode pembangunan jangka panjang mencapai tingkat | Rendahnya pertumbuhan ekonomi              | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Masih rendahnya iklim investasi daerah</li> <li>2. Masih kurang optimalnya pengelolaan data investasi serta data potensi investasi Kabupaten Konawe Utara yang dapat dipromosikan untuk menunjang peningkatan jumlah investasi di daerah.</li> <li>3. Masih kurang optimalnya pertumbuhan investasi (11,86 )</li> <li>4. Masih perlunya peningkatan sistem</li> </ol>  | Penanaman Modal | Wajib Non Pelayanan Dasar |

| No. | Arah Kebijakan RPJPD   | Masalah Daerah                  | Masalah OPD   | Urusan                             | Ket.                      |
|-----|--|---------------------------------|---|------------------------------------|---------------------------|
|     | kesejahteraan setara dengan kabupaten maju di Indonesia.   |                                 | pelayanan investasi yang berbasis TIK yang terintegrasi secara nasional   |                                    |                           |
| 5.  | Peningkatan inovasi produk dan perluasan jangkauan pemasaran baik dalam negeri maupun luar negeri; penerapan sistem industri, dalam lingkup mikro, kecil dan menengah, serta koperasi yang ramah lingkungan dan berbasis keluarga dan teknologi; fasilitasi kawasan pengembangan industri kreatif yang memadai; peningkatan produktivitas pertanian, perikanan dan kelautan serta kehutanan diarahkan untuk menghasilkan produk- produk yang bertumpu pada sistem agribisnis dan agroindustri, guna menjamin | Masih rendahnya kapasitas KUMKM | <ol style="list-style-type: none"> <li>Masih belum optimalnya pemanfaatan fasilitasi akses permodalan untuk usaha mikro (Rp.3.763.000.000 kurang lebih sama dengan Modal sendiri Rp. 3.958.000.000)</li> <li>Masih ada produk usaha mikro yang belum layak diuji mutukan dan belum memiliki sertifikasi merk, halal dan ijin edar Badan POM.</li> <li>Masih kurang optimalnya volume usaha koperasi (76,79 koperasi aktif).</li> <li>Jenis usaha koperasi yang kurang variatif dan masih rendahnya minat masyarakat untuk bergabung dalam keanggotaan sebuah lembaga koperasi (masih fokus di simpan pinjam)</li> <li>Masih diperlukan upaya peningkatan daya saing produk-produk lokal di pasar domestik.</li> <li>Kurangnya jiwa enterpreneurship maupun pengetahuan manajemen usaha yang dimiliki pelaku UMKM, sehingga jenis usaha yang ditekuni seringkali tidak bertahan lama.</li> </ol> | Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah | Wajib Non Pelayanan Dasar |

| No. | Arah Kebijakan RPJPD  | Masalah Daerah  | Masalah OPD   | Urusan     | Ket.           |
|-----|---|---|---|------------|----------------|
|     | ketersediaan pangan dan nilai tambah dalam rangka mengurangi kemiskinan dan pengangguran; pengembangan kepariwisataan memanfaatkan keberagaman pesona keindahan alam, budaya dan potensi daerah lainnya; penguatan kelembagaan ekonomi guna menciptakan regulasi dan perizinan yang efisien dan efektif; dan optimalisasi fungsi pasar tradisional untuk meningkatkan pendapatan pedagang melalui pemberian modal yang mudah dan murah. |   |   |            |                |
|     |   | Masih rendahnya kontribusi sektor - sektor unggulan daerah terhadap | 7. Belum optimalnya pengembangan Obyek Daya Tarik Wisata.<br>8. Menurunnya kunjungan di objek wisata dikarenakan pandemi covid-19 dan kondisi | Pariwisata | Urusan Pilihan |

| No. | Arah Kebijakan RPJPD | Masalah Daerah  | Masalah OPD  | Urusan                 | Ket.           |
|-----|----------------------|---|--|------------------------|----------------|
|     |                      | perekonomian daerah   | <p>infrastruktur jalan yang rusak.</p> <p>9. Masih belum optimalnya kerjasama dengan stakeholder bidang pariwisata.</p> <p>10. Masih rendahnya individu/kelompok yang mengaplikasikan keahlian dibidang handicraft, kuliner, fashion, dll.</p> <p>11. Masih rendahnya pelaku usaha kreatif yang belum mendapatkan legalisasi usaha.</p>  |                        |                |
|     |                      | Belum optimalnya sarana dan prasarana perdagangan   | <p>12. Masih adanya sentra dan pasar yang belum beroperasi secara optimal.</p> <p>13. Masih diperlukannya penerapan protokol kesehatan sektor perdagangan dalam rangka penyesuaian terhadap kondisi new normal.</p> <p>14. Masih kurangnya minat masyarakat terhadap produk lokal UMKM karena kurang promosi dan pemasaran terhadap produk-produk tersebut.</p> <p>15. Belum optimalnya koordinasi dalam hal pemantauan harga pasar.</p> | Perdagangan            | Urusan Pilihan |
|     |                      | Masih rendahnya kontribusi sektor industri pengolahan terhadap pertumbuhan ekonomi daerah | <p>16. Masih belum berkembangnya Industri Kecil Menengah di daerah</p> <p>17. Rendahnya daya saing IKM</p> <p>18. Belum optimalnya fasilitasi IKM (48,30 % dari 294 IKM)</p>   | Perindustrian          | Urusan Pilihan |
|     |                      | Masih rendahnya kontribusi sektor - sektor unggulan                                       | <p>19. Masih belum optimalnya pembudidaya perikanan dan kelautan yang memanfaatkan fasilitas sarana dan</p>  | Perikanan dan Kelautan | Urusan Pilihan |

| No. | Arah Kebijakan RPJPD | Masalah Daerah  | Masalah OPD  | Urusan    | Ket.           |
|-----|----------------------|---|--|-----------|----------------|
|     |                      | daerah terhadap perekonomian daerah   | <p>prasarana yang telah disediakan.</p> <p>20. Teknologi Tepat Guna (TTG) yang belum sepenuhnya diaplikasikan oleh pembudidaya perikanan serta belum optimalnya pengolahan produk unggulan hasil perikanan.</p>  |           |                |
|     |                      | Masih rendahnya kontribusi sektor - sektor unggulan daerah terhadap perekonomian daerah | <p>21. Terbatasnya sarana dan prasarana pendukung dalam pengembangan pertanian tanaman pangan (JUT, saluran irigasi teknis 67,23 % dalam kondisi baik), alsintan, pupuk, dll),</p> <p>22. Belum optimalnya pembudidayaan, distribusi dan pemasaran pertanian, peternakan dalam rangka peningkatan ketahanan pangan.</p> <p>23. Masih kurang optimalnya lembaga pertanian atau kelompok tani dalam mengembangkan budidaya, distribusi dan pemasaran produk pertanian, peternakan dan perikanan.</p> <p>24. Masih kurang optimalnya pemanfaatan fasilitas sarana dan prasarana produksi oleh pembudidaya tanaman pangan dan hortikultura binaan.</p> <p>25. Masih terdapat pembudidaya tanaman pangan dan hortikultura yang belum mengaplikasikan Teknologi Tepat Guna dalam proses budidaya.</p> <p>26. Masih terdapat pembudidaya ternak binaan yang belum menggunakan Teknologi Tepat Guna.</p> | Pertanian | Urusan Pilihan |

| No. | Arah Kebijakan RPJPD   | Masalah Daerah  | Masalah OPD   | Urusan         | Ket.                      |
|-----|--|---|---|----------------|---------------------------|
|     |  | Belum optimalnya pola konsumsi pangan masyarakat  | <p>27. Kurang optimalnya ketahanan pangan masyarakat, terutama dalam menghadapi pandemi Covid-19 (79,60 Pola Pangan Harapan)</p> <p>28. Belum optimalnya diversifikasi produk pangan masyarakat</p> <p>29. Ketersediaan beras dikelola oleh Bulog yang terbagi ke dalam beberapa wilayah (divre). Sehingga belum ada data tersendiri untuk stok beras Kabupaten Konawe Utara (lumbung pangan lokal Kabupaten Konawe Utara).</p>                       | Pangan         | Wajib Non Pelayanan Dasar |
|     |  | Masih rendahnya kontribusi sektor - sektor unggulan daerah terhadap perekonomian daerah | <p>30. Terbatasnya prasarana jalan produksi perkebunan</p> <p>31. Kurangnya bibit tanaman unggulan</p> <p>32. Masih rendahnya akses permodalan bagi petani untuk mengembangkan perkebunan rakyat</p>  | Perkebunan     | Urusan Pilihan            |
| 6.  | Peningkatan jaringan infrastruktur yang andal guna meningkatkan aksesibilitas serta mendukung kegiatan produksi pada kawasan-kawasan pertumbuhan baru/ kawasan strategis | Masih terbatasnya infrastruktur wilayah dan sarana prasarana dasar                      | <p>1. Kondisi infrastruktur jalan dan jembatan belum memadai untuk menunjang aksesibilitas pusat - pusat produksi (Persentase keterhubungan/konektivitas jalan)</p> <p>2. Masih terbatasnya kondisi jaringan jalan kawasan perkotaan Wanggudu.</p> <p>3. Rendahnya Rumah Tangga air minum perpipaan layak (48,33 %) dan sanitasi layak (36,31 %).</p> <p>4. Masih terjadinya genangan di beberapa titik di Konawe Utara karena curah hujan tinggi</p> | Pekerjaan Umum | Wajib Pelayanan Dasar     |

| No. | Arah Kebijakan RPJPD | Masalah Daerah   | Masalah OPD   | Urusan                           | Ket.                      |
|-----|----------------------|--|---|----------------------------------|---------------------------|
|     |                      |  | serta masih adanya jaringan drainase yang belum berfungsi optimal.<br>5. Belum adanya lembaga pengelola air minum.  |                                  |                           |
|     |                      | Masih terbatasnya infrastruktur wilayah dan sarana prasarana dasar | 6. Masih tingginya angka RTLH di Konawe Utara yaitu 26% dari 17.147 rumah.<br>7. Masih tingginya angka Backlog yaitu 1.720 unit.<br>8. Belum optimalnya pembenahan atau rehabilitasi jalan dan saluran lingkungan serta sarana dan prasarana permukiman.<br>9. Belum optimalnya peningkatan kualitas kawasan permukiman kumuh dan rumah layak huni.<br>10. Masih diperlukannya peningkatan sarana prasarana permukiman antara lain penyediaan air layak minum dan sanitasi. | Perumahan dan Kawasan Permukiman | Wajib Pelayanan Dasar     |
|     |                      | Masih terbatasnya infrastruktur wilayah dan sarana prasarana dasar | 11. Belum optimalnya pengelenggaraan lalu lintas dan angkutan jalan.<br>12. Terbatasnya sarana angkutan antar daerah, maupun angkutan dari kecamatan ke Ibukota kabupaten.<br>13. Belum optimalnya pengelolaan Terminal Lahimbua sehingga diperlukan kebijakan yang terintegrasi untuk memanfaatkan terminal penumpang.<br>14. Masih adanya kejadian kecelakaan lalu lintas dikarenakan kurangnya kesadaran pengguna jalan untuk tertib berlalu lintas.                     | Perhubungan                      | Wajib Non Pelayanan Dasar |
|     |                      | Masih terbatasnya infrastruktur                                    | 15. Masih perlunya peningkatan sarana prasarana dan jaringan utilitas untuk   | Komunikasi, Informatika, dan     | Wajib Non Pelayanan Dasar |

| No. | Arah Kebijakan RPJPD   | Masalah Daerah   | Masalah OPD   | Urusan                                    | Ket.                      |
|-----|--|--|---|---|---------------------------|
|     |  | wilayah dan sarana prasarana dasar   | menunjang sistem informasi di seluruh kecamatan dan kawasan perkotaan.  | Persandian                                |                           |
| 7.  | Perencanaan, Pemanfaatan dan pengendalian ruang dalam suatu sistem wilayah pembangunan yang berkelanjutan, melalui: penataan ruang sesuai Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW).   | Belum optimalnya pemanfaatan dan pengendalian penataan ruang dalam rangka mendukung pembangunan dan investasi daerah | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Belum selesainya Revisi RTRW Kabupaten Konawe Utara</li> <li>2. Belum ditetapkannya RDTR Kawasan Perkotaan Wanggudu dan kawasan lainnya untuk mendukung kemudahan perizinan melalui OSS</li> <li>3. Masih lemahnya pengawasan penataan ruang</li> <li>4. Masih adanya bangunan yang belum memiliki IMB atau bangunan yang tidak sesuai dengan IMB.</li> <li>5. Masih lemahnya penertiban tata ruang terhadap indikasi pelanggaran tata ruang</li> </ol>   | Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang         | Wajib Dasar Pelayanan     |
| 8.  | Pengelolaan sumber daya alam yang berorientasi pada pelestarian lingkungan hidup yang tercermin oleh tetap terjaganya fungsi, daya dukung, dan kemampuan pemulihannya dalam mendukung kualitas kehidupan industri dan ekonomi secara serasi dan seimbang. Pengurangan risiko bencana melalui | Belum optimalnya Pengelolaan kualitas lingkungan hidup dan Kebencanaan   | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Masih diperlukan upaya pembangunan baru RTH di Ibukota Kabupaten dan mengoptimalkan fungsi Ruang Terbuka Hijau yang tersedia.</li> <li>2. Belum optimalnya sarana dan prasarana penanganan sampah.</li> <li>3. Masih diperlukan peningkatan peran serta masyarakat dalam pengelolaan kebersihan.</li> <li>4. Masih adanya kegiatan/usaha diawasi yang belum menaati/mematuhi aspek lingkungan, mengingat masih adanya tindakan-tindakan yang mencemari lingkungan (air, udara, tanah) dan menurunkan kualitas lingkungan hidup.</li> <li>5. Masih adanya permasalahan lingkungan</li> </ol> | Lingkungan Hidup, BPBD, Pemadam Kebakaran | Wajib Non Pelayanan Dasar |

| No. | Arah Kebijakan RPJPD   | Masalah Daerah                                       | Masalah OPD   | Urusan                                  | Ket.                      |
|-----|--|--|---|---|---------------------------|
|     | penataan pemukiman dan merelokasi penduduk dari wilayah rawan bencana, melalui: pembuatan rencana penataan permukiman berbasis mitigasi bencana; sosialisasi dan peningkatan kewaspadaan masyarakat siaga bencana; dan peningkatan kelembagaan dan kapasitas masyarakat. |  | hidup yang perlu ditangani, antara lain terkait limbah, kebisingan dan polusi udara dari kegiatan usaha.<br>6. Masih tingginya resiko bencana di Konawe Utara (172,4/Tinggi/Zona Merah)<br>7. Belum optimalnya mitigasi bencana<br>8. Masih terbatasnya sarana prasarana penanganan bencana alam<br>9. Masih rendahnya kesadaran masyarakat terhadap resiko bencana alam<br>10. Masih terjadi kebakaran lahan/hutan ketika musim kemarau. |   |                           |
| 9.  | Pengurangan penyandang masalah kesejahteraan sosial, tercapainya pertumbuhan penduduk tumbuh seimbang, serta peningkatan peran perempuan dalam pembangunan.  | Belum optimalnya penanganan kemiskinan               | 1. Belum optimalnya pemberdayaan sosial, rehabilitasi sosial dan perlindungan jaminan sosial.<br>2. Data DTKS masih perlu disinkronisasi<br>3. Belum optimalnya program penanganan PMKS, dilihat dari banyaknya PMKS usia produktif yang dilatih/dibina yang belum berproduksi.   | Sosial                                  | Wajib Pelayanan Dasar     |
|     |  | Belum optimalnya pengarusutamaan gender dan hak anak | 4. Belum optimalnya upaya perlindungan perempuan dan anak, dilihat dari masih terdapat permasalahan perempuan dan   | Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan | Wajib Non Pelayanan Dasar |

| No. | Arah Kebijakan RPJPD   | Masalah Daerah                                     | Masalah OPD  | Urusan                                       | Ket.                      |
|-----|--|--|--|--|---------------------------|
|     |  |  | <p>anak antara lain Kekerasan Dalam Rumah Tangga.</p> <p>5. Kurang optimalnya peran jejaring dalam penanganan permasalahan perempuan dan anak.</p> <p>6. Pemberdayaan perempuan di sektor ekonomi belum sepenuhnya optimal (69,52 IDG/86,17 IPG)</p>   | Anak, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa       |                           |
|     |  | Belum optimalnya pengendalian penduduk             | <p>7. Masih adanya pasangan usia subur yang belum mengikuti KB (76,38 dari 18.276 PUS)</p> <p>8. Masih adanya pasangan usia subur yang tidak terpenuhi kebutuhan KB/unmeet need (18 jiwa)</p> <p>9. Masih ada pasangan usia subur (PUS) yang istrinya berusia kurang dari 20 tahun.</p>  | Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana | Wajib Non Pelayanan Dasar |
| 10. | Peningkatan prestasi olahraga dan kualitas generasi muda, melalui: peningkatan sarana dan prasarana penunjang olah raga; membudayakan olah raga dalam kehidupan sehari-hari bagi masyarakat; dan peningkatan kualitas dan partisipasi pemuda dalam pembangunan dan | Belum optimalnya pembinaan kepemudaan dan olahraga | <p>1. Terbatasnya calon peserta yang akan menjadi kader dikarenakan kurangnya minat masyarakat dan waktu pengkaderan yang sering berbenturan dengan jadwal kegiatan pribadi (sekolah, kuliah, dll).</p> <p>2. Kurang meratanya sarana prasarana olah raga yang tersedia dan dalam kondisi baik.</p> <p>3. Masih diperlukannya pembinaan dan pengembangan tenaga atlit dan pelatih profesional.</p> | Kepemudaan dan Olahraga                      | Wajib Non Pelayanan Dasar |

| No. | Arah Kebijakan RPJPD   | Masalah Daerah                             | Masalah OPD  | Urusan                     | Ket.                              |
|-----|--|--|--|----------------------------|-----------------------------------|
|     | pemberdayaan pemuda sebagai subyek pembangunan, melalui pengembangan lembaga kepemudaan yang berwawasan kebangsaan.  |  |  |                            |                                   |
| 11. | Peningkatan karakter masyarakat yang berbudaya, tangguh, kompetitif, berakhlak mulia, berkeperibadian Indonesia, berdasarkan falsafah Pancasila yang dicirikan dengan watak dan perilaku yang beriman dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berbudi luhur, bertoleransi, bergotong royong, berjiwa patriotik, berkembang dan dinamis. | Terbatasnya event budaya yang dilaksanakan | <ol style="list-style-type: none"> <li>Masih belum optimalnya upaya penguatan budaya lokal dan upaya yang mendorong nilai-nilai budaya menjadi identitas daerah (kantor pemerintahan, sekolah, ruang publik, hotel, rumah makan) dalam rangka meningkatkan daya tarik wisata.</li> <li>Masih ada bangunan cagar budaya yang belum terpelihara dengan baik, karena pelibatan pemilik/pengelola cagar budaya dalam pengembangan kawasan sejarah/cagar budaya masih belum optimal.</li> <li>Infratraktur kebudayaan masih terbatas dan pengelolaan komunitas budaya belum optimal</li> <li>Masih belum optimalnya pembinaan kelompok seni agar layak tampil.</li> </ol> | Kebudayaan                 | Wajib Non Pelayanan Dasar         |
|     |  | Masih rendahnya pemahaman                  | <ol style="list-style-type: none"> <li>Belum optimalnya pemahaman masyarakat akan ideologi Pancasila dan karakter</li> </ol>   | Ketentraman dan Ketertiban | Wajib Non Pelayanan Dasar, Urusan |

| No. | Arah Kebijakan RPJPD  | Masalah Daerah   | Masalah OPD   | Urusan  | Ket.             |
|-----|---|--|---|---|------------------|
|     |   | masyarakat terhadap nilai-nilai keagamaan              | 6. kebangsaan<br>Belum optimalnya pemberdayaan masyarakat dan organisasi kemasyarakatan   | Umum serta Perlindungan Masyarakat, Pembedayaan Masyarakat dan Desa | Penunjang        |
|     |   |  | 7. Belum optimalnya pengembangan nilai-nilai keagamaan dalam kehidupan masyarakat   | Sekretariat Daerah  | Urusan Penunjang |
| 12. | Peningkatan kapabilitas perangkat daerah dan kemampuan pengelolaan keuangan daerah secara efisien, efektif, transparan, partisipatif dan akuntabel, melalui: peningkatan kinerja, kapasitas dan profesionalisme aparatur pemerintah dan lembaga pemerintah dalam rangka mendukung keberhasilan pembangunan. | Akuntabilitas keuangan daerah masih perlu ditingkatkan | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Indeks Reformasi Birokrasi dari 8 area perubahan masih rendah (CC : 50,04) Tahun 2019</li> <li>2. Perlunya mempertahankan opini WTP dari BPK</li> <li>3. Konsistensi perencanaan dan penganggaran masih perlu ditingkatkan</li> <li>4. Manajemen pengelolaan asset masih perlu ditingkatkan</li> <li>5. Kenaikan PAD yang belum optimal</li> <li>6. Tingkat kemandirian daerah (1,59 %)</li> <li>7. Kurang optimalnya realisasi pendapatan daerah pada tahun 2020 karena dampak Covid- 19.</li> </ol> | Keuangan, Sekretariat Daerah  | Urusan Penunjang |
|     |   | Belum optimalnya penerapan zona                        | <ol style="list-style-type: none"> <li>8. Belum optimalnya kapabilitas APIP</li> <li>9. Masih rendahnya Sistem Pengendalian</li> </ol>  | Pengawasan  | Urusan Penunjang |

| No. | Arah Kebijakan RPJPD | Masalah Daerah   | Masalah OPD  | Urusan                                   | Ket.                      |
|-----|----------------------|--|--|--|---------------------------|
|     |                      | integritas   | Intern Pemerintah/SPIP (level 3) dan implementasi Zona Integritas.<br>10. Belum optimalnya upaya pengawasan dan penegakan peraturan.   |  |                           |
|     |                      | Penyusunan, implementasi, evaluasi dan pengendalian perencanaan masih perlu ditingkatkan | 11. Masih terdapat inkonsistensi perencanaan dan penganggaran.<br>12. Kesesuaian Program RPJMD dan RKPD (60,74)<br>13. Masih adanya pelaksanaan kegiatan yang tidak tepat waktu pada beberapa Perangkat Daerah.<br>14. Masih terdapat kegiatan pada beberapa Perangkat Daerah yang belum optimal.<br>15. Masih banyaknya Perangkat Daerah yang dokumen perencanaan tahunannya belum berkualitas. | Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan | Urusan Penunjang          |
|     |                      |  | 16. Masih adanya data penunjang perencanaan dan hasil pembangunan yang masih perlu validasi.   | Statistik                                | Wajib Non Pelayanan Dasar |
|     |                      | Belum optimalnya inplementasi manajemen ASN  | 17. Belum optimalnya keterisian jabatan fungsional, formasi ASN, dan pola pengembangan karir ASN<br>18. Kompetensi ASN belum sesuai dengan bidang pekerjaan  | Kepegawaian                              | Urusan Penunjang          |
|     |                      | Akuntabilitas kinerja masih perlu ditingkatkan   | 19. Implemnetasi SAKIP masih perlu ditingkatkan.<br>20. Belum optimalnya capaian kinerja pembangunan   | Sekretariat Daerah                       | Urusan Pemerintahan Umum  |
|     |                      | Belum optimalnya pelaksanaan Sistem Pemerintahan   | 21. Masih diperlukan optimalisasi pengelolaan dan pemanfaatan sistem satu data. Belum ada aplikasi tunggal untuk menampung   | Komunikasi dan Informatika               | Wajib Non Pelayanan Dasar |

| No. | Arah Kebijakan RPJPD   | Masalah Daerah                           | Masalah OPD   | Urusan             | Ket.                     |
|-----|--|--|---|--------------------|--------------------------|
|     |  | Berbasis Elektronik (SPBE)               | data skala kabupaten yang hasil pengolahannya bisa digunakan untuk berbagai kepentingan (aplikasi masih tumpang tindih).<br>22. Penerapan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) belum maksimal karena keterbatasan sarana prasarana dan jaringan.  |                    |                          |
| 13. | Peningkatan kualitas pelayanan kepada masyarakat, melalui: peningkatan teknologi informasi dalam pelayanan publik; peningkatan kualitas pelayanan publik sesuai dengan Standar Pelayanan Minimal (SPM) dan <i>Standart Operating Procedure</i> (SOP) yang berorientasi pada terciptanya kepuasan masyarakat; peningkatan sarana dan prasarana publik; dan peningkatan daya respon terhadap keinginan dan kebutuhan | Belum optimalnya kualitas layanan publik | <ol style="list-style-type: none"> <li>Masih diperlukannya penataan kelembagaan, pelaksanaan evaluasi pelayanan publik dan administrasi pemerintahan sesuai peraturan yang berlaku.</li> <li>Masih perlunya evaluasi peraturan yang berlaku dalam rangka penyesuaian peraturan perundang-undangan dikaitkan dengan perkembangan daerah dan kondisi masyarakat.</li> <li>BUMD belum memiliki kinerja sesuai standar.</li> <li>Masih adanya SOP yang belum dievaluasi, agar prosedur pelayanan publik dapat lebih mudah dan cepat.</li> </ol> | Sekretariat Daerah | Urusan Pemerintahan Umum |

| No. | Arah Kebijakan RPJPD | Masalah Daerah                                       | Masalah OPD   | Urusan   | Ket.   |
|-----|----------------------|--|---|--|--|
|     | masyarakat.          |  |   |  |  |
|     |                      |  | 5. Masih adanya penduduk lahir yang belum memperoleh akte kelahiran (83,88 %)<br>6. Masih adanya penduduk meninggal yang belum memperoleh akte kematian.<br>7. Belum semua warga Kabupaten Konawe Utara yang wajib ber-KTP memiliki KTP.<br>8. Masih adanya kecamatan yang memproses dokumen administrasi kependudukan tidak sesuai dengan SOP.<br>9. Kualitas dan kuantitas SDM di bidang pelayanan masih kurang | Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil | Urusan Wajib Non Pelayanan Dasar                           |
|     |                      |  | 10. Penyediaan tanah dan / atau bangunan bagi pembangunan untuk kepentingan umum masih diperlukan koordinasi dengan instansi lain (BPN-ATR, dll) terkait proses pengumpulan dan verifikasi data.<br>11. Masih adanya aset tanah yang belum dilakukan sertifikasi serta pemasangan pagar, papan, patok karena masih belum jelas batas dan belum lengkap bukti kepemilikannya.                                      | Pertanahan, Sekretariat Daerah                 | Urusan Wajib Non Pelayanan Dasar, Urusan Pemerintahan Umum |
|     |                      | Belum optimalnya kualitas layanan publik kewilayahan | 12. Belum optimalnya kualitas pelayanan publik di kecamatan dan kelurahan<br>13. Belum optimalnya pelimpahan kewenangan pelayanan pada Camat  | Kecamatan, Sekretariat Daerah                  | Urusan Pemerintahan Umum dan Kewilayahan                   |
| 14. | Menciptakan          | Belum optimalnya                                     | 1. Masih adanya temuan pelanggaran  | Ketentraman                                    | Urusan Wajib   |

| No. | Arah Kebijakan RPJPD   | Masalah Daerah   | Masalah OPD  | Urusan  | Ket.                     |
|-----|--|--|--|---|--------------------------|
|     | ketertiban masyarakat, melalui terciptanya kepastian hukum, ketertiban, dan perlindungan masyarakat. | Penegakan hukum daerah dan pemenuhan Hak Asasi Manusia | <p>peraturan.</p> <p>2. Masih terdapat gangguan ketentraman dan ketertiban umum.</p> <p>3. Masih kurangnya partisipasi lembaga/komunitas dalam kegiatan yang mendorong nilai-nilai kebangsaan.</p> <p>4. Masih adanya warga yang belum berperan untuk disiplin dalam menjalankan protokol kesehatan untuk pencegahan dan penanganan pandemik covid-19.</p> | dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat | Pelayanan Dasar          |
|     |  |  | 5. Belum optimalnya penyusunan produk hukum dan penegakan aturan hukum daerah untuk kewibawaan daerah dan mengatur serta mensejahterakan rakyat  | Sekretariat Daerah, Sekretariat Dewan             | Urusan Pemerintahan Umum |

Sumber : Bappeda Kabupaten Konawe Utara, 2021

Berdasarkan hasil identifikasi permasalahan terhadap seluruh bidang urusan penyelenggaraan pemerintahan. Selanjutnya permasalahan sektoral tersebut digabung menjadi satu rumusan masalah pembangunan di Kabupaten Konawe Utara. Suatu kebijakan pembangunan harus memiliki dasar rumusan permasalahan yang relevan sehingga kebijakan publik memiliki pertimbangan matang sebagai dasar penentuan prioritas pembangunan. Prioritas pembangunan yang baik akan menciptakan agenda utama pembangunan dan memberikan harapan baru bagi pemerintah daerah dalam 5 (lima) tahun kedepan. Berdasarkan hasil analisis permasalahan pembangunan untuk masing-masing aspek dan urusan pemerintahan, maka RPJMD tahun 2021-2026 dirumuskan menjadi lima permasalahan utama pembangunan Kabupaten Konawe Utara yaitu:

1. Rendahnya kualitas sumberdaya manusia;
2. Pertumbuhan ekonomi yang masih rendah dan tidak berkualitas;
3. Belum terpenuhinya pelayanan infrastruktur wilayah dan sarana parasarana kawasan permukiman;
4. Belum terwujudnya tata kelola pemerintahan yang baik;
5. Belum terciptanya kualitas lingkungan hidup yang baik dan mitigasi bencana alam;
6. Belum terwujudnya pembangunan kebudayaan dan kehidupan keagamaan masyarakat.

Keenam permasalahan utama tersebut menjadi pemicu utama belum maksimalnya pembangunan daerah di Kabupaten Konawe Utara sehingga belum tercapainya kesejahteraan masyarakat dan daya saing daerah.

**Tabel 4.2 Rumusan Permasalahan Pembangunan Daerah**

| No. | Masalah Daerah  | Bidang/Pilar | Rumusan Permasalahan Pembangunan          |
|-----|---|--------------|---|
| 1.  | Belum optimalnya akses pendidikan   | Sosial       | 1. Rendahnya kualitas sumber daya manusia |
| 2.  | Derajat kesehatan masyarakat dan capaian keluarga sehat masih perlu ditingkat | Sosial       |   |
| 3.  | Masih tingginya angka pengangguran terbuka                                    | Sosial       |   |

| No. | Masalah Daerah   | Bidang/Pilar | Rumusan Permasalahan Pembangunan  |
|-----|--|--------------|---|
| 4.  | Masih rendahnya pertumbuhan ekonomi  | Ekonomi      | 2. Pertumbuhan ekonomi yang masih rendah dan tidak berkualitas                                |
| 5.  | Masih rendahnya kapasitas dan kontribusi sektor KUMKM terhadap perekonomian daerah                                   | Ekonomi      |   |
| 6.  | Masih rendahnya kontribusi sektor - sektor unggulan daerah terhadap perekonomian daerah                              | Ekonomi      |   |
| 7.  | Belum optimalnya sarana prasarana perdagangan  | Ekonomi      |   |
| 8.  | Belum optimalnya pola konsumsi pangan masyarakat   | Ekonomi      |   |
| 9.  | Masih terbatasnya infrastruktur wilayah dan sarana prasarana dasar   | Ekonomi      | 3. Belum terpenuhinya pelayanan infrastruktur wilayah dan sarana prasarana kawasan permukiman |
| 10. | Belum optimalnya pemanfaatan dan pengendalian penataan ruang dalam rangka mendukung pembangunan dan investasi daerah | Lingkungan   | 4. Belum terciptanya kualitas lingkungan hidup yang baik                                      |
| 11. | Belum optimalnya Pengelolaan kualitas lingkungan hidup dan Kebencanaan   | Lingkungan   |   |
| 12. | Belum optimalnya penanganan kemiskinan   | Sosial       | 1. Rendahnya kualitas sumber daya manusia Kabupaten Konawe Utara                              |
| 13. | Belum optimalnya pengarusutamaan gender dan hak anak   | Sosial       |   |
| 14. | Belum optimalnya pengendalian penduduk   | Sosial       |   |
| 15. | Belum optimalnya pembinaan kepemudaan dan olahraga   | Sosial       |   |
| 16. | Terbatasnya event budaya yang dilaksanakan   | Sosial       |   |
| 17. | Masih rendahnya pemahaman masyarakat terhadap nilai-nilai keagamaan  | Sosial       | 5. Belum terwujudnya pembangunan kebudayaan dan kehidupan keagamaan                           |

| No. | Masalah Daerah   | Bidang/Pilar | Rumusan Permasalahan Pembangunan                        |
|-----|--|--------------|---|
|     |  |              | masyarakat  |
| 18. | Akuntabilitas keuangan daerah masih perlu ditingkatkan                                   | Tata Kelola  | 6. Belum terwujudnya tata kelola pemerintahan yang baik |
| 19. | Belum optimalnya penerapan zona integritas   | Tata Kelola  |   |
| 20. | Penyusunan, implementasi, evaluasi dan pengendalian perencanaan masih perlu ditingkatkan | Tata Kelola  |   |
| 21. | Belum optimalnya inplementasi manajemen ASN  | Tata Kelola  |   |
| 22. | Akuntabilitas kinerja masih perlu ditingkatkan   | Tata Kelola  |   |
| 23. | Belum optimalnya pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)              | Tata Kelola  |   |
| 24. | Belum optimalnya kualitas layanan publik   | Tata Kelola  |   |
| 25. | Belum optimalnya kualitas layanan publik kewilayahan                                     | Tata Kelola  |   |
| 26. | Belum optimalnya Penegakan hukum daerah dan pemenuhan Hak Asasi Manusia                  | Tata Kelola  |   |

Sumber : Bappeda Kab. Konawe Utara, 2021

#### 4.2 ISU STRATEGIS

Isu strategis merupakan tantangan atau peluang yang harus diperhatikan atau dikedepankan karena dampaknya yang signifikan dalam pelaksanaan pembangunan. Perumusan isu strategis mempertimbangkan permasalahan daerah dan lingkungan strategis. Suatu analisis isu-isu strategis menghasilkan rumusan kebijakan yang bersifat antisipatif dan solutif atas berbagai kondisi yang tidak ideal di masa depan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Dengan demikian, rumusan tentang isu strategis merupakan bagian penting dalam penentuan strategi dan kebijakan pembangunan dalam lima tahun mendatang.

#### 4.2.1 Isu Global/Internasional

Isu strategis internasional yang relevan dan wajib diperhatikan bagi pembangunan 5 (lima) tahun mendatang antara lain: Komitmen Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan/TPB (*Sustainable Development Goals/SDGs*); Pandemi Covid-19; Perubahan iklim global (*global warning/climate change*); dan Kemajuan Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) yang semakin pesat (revolusi industri 4.0).

##### 4.2.1.1 Komitmen Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB)/Sustainable Development Goals (SDGs)

Tujuan Pembangunan Berkelanjutan/TPB (*Sustainable Development Goals/SDGs*) adalah seperangkat target yang berhubungan dengan pembangunan internasional di masa mendatang. SDG's menjadi salah satu acuan dalam kebijakan pembangunan Nasional saat ini yang telah dituangkan dalam peraturan perundang-undangan antara lain: Peraturan Presiden RI Nomor 59 tahun 2017 tentang Pelaksanaan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan; Peraturan Menteri Dalam Negeri RI Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah; Peraturan Menteri Dalam Negeri RI Nomor 7 Tahun 2018 tentang Pembuatan dan Pelaksanaan Kajian Lingkungan Hidup Strategis Dalam Penyusunan Rencanan Pembangunan Jangka Menengah Daerah.

Pengarusutamaan SDGs dalam rencana pembangunan daerah diarahkan untuk dapat menjawab permasalahan kesejahteraan masyarakat serta mengakomodasi nilai-nilai lokal dan karakteristik masing-masing daerah. Konsep SDGs pada intinya bertujuan untuk membawa pembangunan ke arah yang lebih adil bagi semua pihak. Adapun 17 (ketujuh belas) tujuan pembangunan berkelanjutan adalah sebagai berikut:

1. **Tidak Ada Kemiskinan:** Mengakhiri kemiskinan dalam segala bentuknya di mana saja.

2. **Menghapuskan Kelaparan:** Mengakhiri kelaparan dan kematian akibat kelaparan, mencapai keamanan pangan dan perbaikan nutrisi, serta menggalakkan pertanian yang berkelanjutan.
3. **Kesehatan yang Baik:** Memastikan hidup sehat dan menggalakkan kesejahteraan bagi semua orang pada segala usia.
4. **Pendidikan Berkualitas:** Memastikan pendidikan inklusif bagi semua orang, dan menggalakkan kesetaraan serta kesempatan belajar seumur hidup yang berkualitas.
5. **Kesetaraan Gender:** Mencapai kesetaraan gender melalui pemberdayaan kaum wanita dan anak perempuan.
6. **Air Bersih dan Sanitasi:** Memastikan ketersediaan dan pengelolaan air serta sanitasi berkelanjutan bagi semua orang.
7. **Energi Terbarukan:** Memastikan akses ke energi yang terjangkau, andal, berkelanjutan dan terbarukan bagi semua orang.
8. **Pekerjaan yang Baik dan Pertumbuhan Ekonomi:** Menggalakkan pertumbuhan ekonomi yang terus menerus, inklusif dan berkelanjutan, lapangan kerja yang lengkap dan produktif serta pekerjaan yang layak bagi semua orang.
9. **Industri, Inovasi dan Infrastruktur:** Membangun infrastruktur yang kukuh, menggalakkan industrialisasi inklusif dan berkelanjutan, serta membantu mengembangkan inovasi.
10. **Berkurangnya Ketidaksetaraan:** Mengurangi ketidaksetaraan di dalam dan di antara negara-negara.
11. **Kota dan Masyarakat Berkelanjutan:** Membangun kota dan pemukiman warga yang inklusif, aman dan kukuh.
12. **Pemakaian yang Bertanggungjawab:** Memastikan pemakaian dan pola produksi yang berkelanjutan.
13. **Aksi Iklim:** Mengambil tindakan segera untuk memberantas perubahan iklim dan dampaknya.
14. **Kehidupan di Bawah Air:** Mengambil tindakan segera untuk memberantas perubahan iklim dan dampaknya.
15. **Kehidupan di Darat:** Melindungi, memulihkan dan menggalakkan penggunaan ekosistem bumi yang berkelanjutan, mengelola hutan secara berkelanjutan,

memberantas penggersangan lahan, dan menghentikan serta membalikkan degradasi lahan dan menghentikan penyusutan keekaragaman hayati.

16. **Perdamaian dan Keadilan:** Menggalakkan masyarakat yang damai dan inklusif untuk pengembangan yang berkelanjutan, menyediakan akses untuk keadilan bagi semua orang, serta membangun berbagai lembaga yang efektif, bertanggungjawab dan inklusif di semua strata.

17. **Kemitraan:** Memperkuat sarana pelaksanaan dan menghidupkan kembali kemitraan global untuk perkembangan yang berkelanjutan.

SDG/s/TPB mencakup 17 (*tujuh belas*) item tujuan, 169 target dan 319 indikator pembangunan yang harus dilaksanakan oleh Pemerintah, baik Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi maupun Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota di Indonesia. Perincian jumlah cakupan indikator TPB berdasarkan kewenangan pemerintahan adalah sebagai berikut :

1. Jumlah indikator yang menjadi kewenangan Pemerintah Pusat sebanyak 308 indikator;
2. Jumlah indikator yang menjadi kewenangan Pemerintah Provinsi sebanyak 235 indikator;
3. Jumlah indikator yang menjadi kewenangan Pemerintah kabupaten sebanyak 220 indikator;
4. Jumlah indikator yang menjadi kewenangan Pemerintah kota sebanyak 222 indikator.

Selain cakupan indikator berdasarkan kewenangan sebagaimana dimaksud di atas, faktor lain yang menentukan jumlah indikator TPB dan karenanya menjadi bagian dari kewajiban Pemerintah Daerah Kabupaten adalah kekhususan indikator, kondisi geografis dan ketentuan indikator RPJMD.

Selanjutnya, dengan merujuk pada konsepsi di atas, Pemerintah Kabupaten Konawe Utara, sesuai kewenangannya, telah melakukan identifikasi, serta pengumpulan dan analisis data terhadap 220 indikator TPB pada 4 (empat) Pilar Pembangunan (*yaitu pilar pembangunan social, pilar pembangunan ekonomi, pilar pembangunan lingkungan dan pilar pembangunan hukum dan tata kelola*). Hasil identifikasi, pengumpulan dan analisis data tersebut antara lain membuahakan beberapa informasi yang disajikan secara singkat berikut ini.

Dari 220 indikator TPB yang dianalisis (pada empat pilar pembangunan) diperoleh indikasi bahwa terdapat 49,09% (108 indikator) yang telah dilaksanakan oleh Pemerintah Kabupaten Konawe Utara, dengan rincian : 59 indikator (26,82%) telah mencapai target, dan 49 indikator (22,27%) belum mencapai target. Pilar Pembangunan dengan persentase pencapaian target tertinggi adalah **Pilar Sosial**, yakni sebesar 22 indikator (atau 42,37%), sedangkan pilar pembangunan dengan persentase pencapaian target terendah adalah **Pilar Lingkungan**, yakni hanya sebanyak 9 indikator (atau sebesar 15,25%).

Lebih lanjut disebutkan bahwa dari 220 indikator TPB yang menjadi kewenangan Pemerintah Kabupaten (Konawe Utara), terdapat 71 indikator (atau sebesar 32,37%) yang belum memiliki data, terdiri dari :

- Pilar Pembangunan Sosial : 37 indikator (52,11%)
- Pilar Pembangunan Ekonomi : 23 indikator (32,39%)
- Pilar Pembangunan Lingkungan : 5 indikator (7,04 %)
- Pilar Pembangunan Hukum dan Tata Kelola : 6 indikator (8,45 %)

Hasil analisis statistik juga menunjukkan bahwa terdapat sebanyak 15,91% atau sebesar 35 indikator TPB yang bukan merupakan target RPJMD Kabupaten Konawe Utara, terdiri dari :

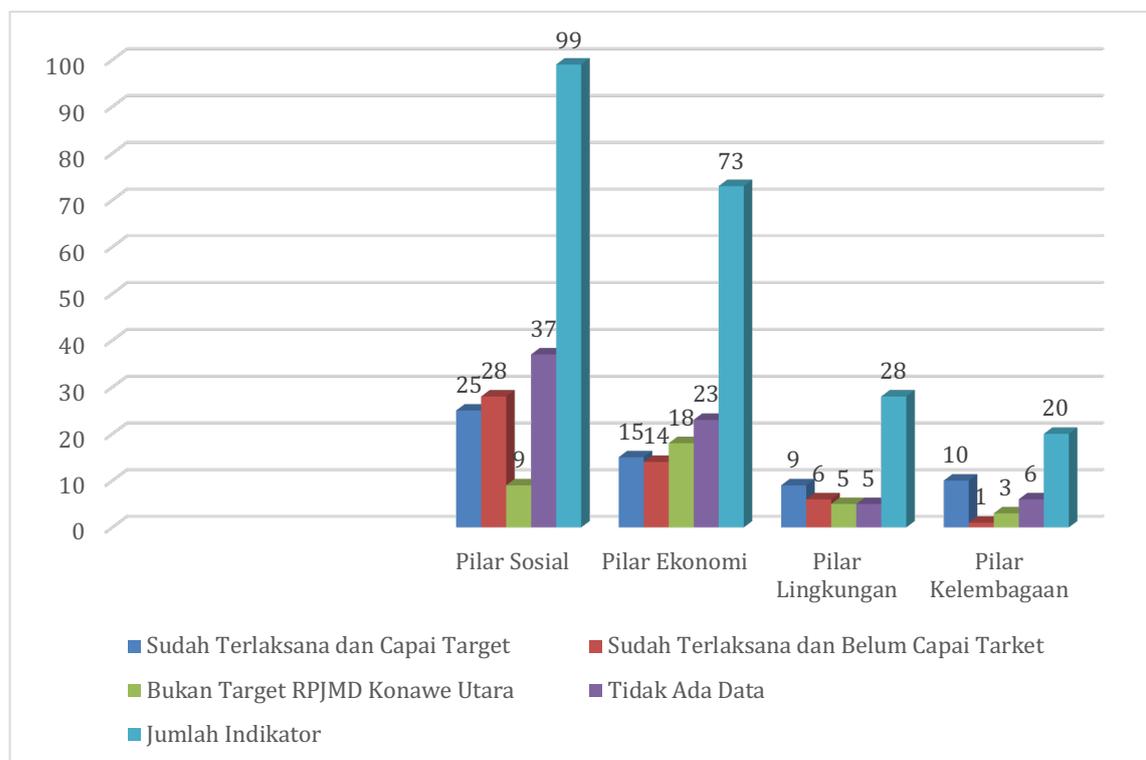
- Pilar Pembangunan Sosial : 9 indikator (27,71%)
- Pilar Pembangunan Ekonomi : 18 indikator (51,43%)
- Pilar Pembangunan Lingkungan : 5 indikator (14,29 %)
- Pilar Pembangunan Hukum dan Tata Kelola : 3 indikator (8,57 %)

Untuk lebih jelasnya, gambaran kuantitatif mengenai pencapaian target TPB pada masing-masing pilar pembangunan berkelanjutan di Kabupaten Konawe Utara, dapat dilihat pada tabel 4.3. dan gambar 4.1. berikut ini.

Tabel 4.3.  
Pencapaian Target Pembangunan Berkelanjutan di Kabupaten Konawe Utara

| Pilar                     | Sudah Terlaksana dan Capai Target |       | Sudah Terlaksana dan Belum Capai Target |       | Bukan Target RPJMD Konawe Utara |       | Tidak Ada Data | Jumlah Indikator |     | Persentase (%) |
|---------------------------|-----------------------------------|-------|---|-------|---------------------------------|-------|----------------|------------------|-----|----------------|
|                           | Jumlah                            | (%)   | Jumlah                                  | (%)   | Jumlah                          | (%)   | Jumlah         | (%)              |     |                |
| Pilar Sosial              | 25                                | 42,37 | 28                                      | 57,14 | 9                               | 25,71 | 37             | 52,11            | 99  | 45,00          |
| Pilar Ekonomi             | 15                                | 25,42 | 14                                      | 28,57 | 18                              | 51,43 | 23             | 32,39            | 73  | 33,18          |
| Pilar Lingkungan          | 9                                 | 15,25 | 6                                       | 12,24 | 5                               | 14,29 | 5              | 7,04             | 28  | 12,73          |
| Pilar Kelembagaan         | 10                                | 16,95 | 1                                       | 2,04  | 3                               | 8,57  | 6              | 8,45             | 20  | 9,09           |
| Jumlah                    | 59                                |       | 49                                      |       | 35                              |       | 71             |                  | 220 |                |
| Persentase                | 26,82                             |       | 22,27                                   |       | 15,91                           |       | 32,27          |                  |     |                |
| Jumlah Terlaksana         | 108                               |       |   |       |                                 |       |                |                  |     |                |
| Persentase Terlaksana (%) | 49,09                             |       |   |       |                                 |       |                |                  |     |                |

Sumber : KLHS RPJMD Kabupaten Konawe Utara, 2021



Sumber : KLHS RPJMD Kabupaten Konawe Utara, 2021

**Gambar 4.2 Pencapaian Target Pembangunan Berkelanjutan di Kabupaten Konawe Utara**

Adapun capaian target indikator berdasarkan tujuan TPB di Kabupaten Konawe secara umum dapat dilihat pada tabel 4.4. berikut ini.

**Tabel 4.4.**  
**Capaian Target Indikator TPB Kabupaten Konawe Utara**

| No. | Ringkasan Tujuan TPB                              | Sudah Terlaksana dan Capai Target | Sudah Terlaksana dan Belum Capai Target | Bukan Target RPJMD Konawe Utara | Tidak Ada Data | Jumlah Indikator |
|-----|---|-----------------------------------|---|---------------------------------|----------------|------------------|
| 1   | Tanpa Kemiskinan                                  | 5                                 | 5                                       | 2                               | 5              | 17               |
| 2   | Tanpa Kelaparan                                   | 0                                 | 0                                       | 0                               | 4              | 4                |
| 3   | Kehidupan sehat dan sejahtera                     | 12                                | 13                                      | 4                               | 27             | 56               |
| 4   | Pendidikan berkualitas                            | 8                                 | 3                                       | 2                               | 1              | 14               |
| 5   | Kesetaraan Gender                                 | 0                                 | 7                                       | 1                               | 0              | 8                |
| 6   | Energi Bersih dan Terjangkau                      | 0                                 | 0                                       | 3                               | 3              | 6                |
| 7   | Pekerjaan Layak dan Pertumbuhan Ekonomi           | 7                                 | 6                                       | 7                               | 6              | 26               |
| 8   | Industri, Inovasi dan Infrastruktur               | 1                                 | 5                                       | 3                               | 7              | 17               |
| 9   | Berkurangnya Kesenjangan                          | 1                                 | 1                                       | 4                               | 7              | 15               |
| 10  | Kemitraan untuk Mencapai Tujuan                   | 6                                 | 2                                       | 1                               | 0              | 9                |
| 11  | Air Bersih dan Sanitasi Layak                     | 0                                 | 0                                       | 1                               | 1              | 2                |
| 12  | Kota dan Permukiman yang Berkelanjutan            | 0                                 | 0                                       | 1                               | 2              | 3                |
| 13  | Konsumsi dan produksi yang bertanggungjawab       | 1                                 | 1                                       | 0                               | 0              | 2                |
| 14  | Penanganan Perubahan Iklim                        | 3                                 | 5                                       | 1                               | 0              | 9                |
| 15  | Ekosistem Laut                                    | 2                                 |   | 1                               | 1              | 6                |
| 16  | Ekosistem Darat                                   | 3                                 |   | 1                               | 1              | 6                |
| 17  | Perdamaian, Keadilan dan Kelembagaan Yang Tangguh | 10                                | 1                                       | 3                               | 6              | 20               |
|     | <b>Jumlah</b>                                     | <b>59</b>                         | <b>49</b>                               | <b>35</b>                       | <b>71</b>      | <b>220</b>       |
|     | <b>Persentase</b>                                 | <b>26,82</b>                      | <b>22,27</b>                            | <b>15,91</b>                    | <b>32,27</b>   |                  |
|     | <b>Jumlah Terlaksana</b>                          | <b>108</b>                        |   |                                 |                |                  |
|     | <b>Persentase Terlaksana (%)</b>                  | <b>49,09</b>                      |   |                                 |                |                  |

Sumber : KLHS RPJMD Kabupaten Konawe Utara, 2021

#### 4.2.1.2 Kesadaran Aksi Global Terkait Climate Action (Aksi Iklim)

Perkembangan lingkungan pada era globalisasi pembangunan sekarang ini menunjukkan penurunan. Hal ini disebabkan pembangunan yang mengesampingkan faktor kelestarian lingkungan hidup sehingga menyebabkan kelestarian hidup yang buruk dengan akibat ancaman global warming. *Global warming* merupakan efek atau dampak dari rusaknya kelestarian ekosistem alam yang dapat mengakibatkan kekeringan, kelangkaan bahan pangan, hingga banjir dan bahkan menjadi penyebab utama adanya bencana alam. Perlu adanya antisipasi dari pemerintah dan masyarakat dunia dalam menyikapi *global warming*. Segala bentuk perencanaan pembangunan harus mempunyai strategi dalam menerapkan pembangunan yang

ramah lingkungan. Hal ini dilakukan agar kelestarian alam dapat terjaga dan efek *global warming* dapat diminimalisir atau dapat dihindari namun tetap terlaksana pertumbuhan ekonomi yang lebih baik.

Terkait hal tersebut maka Kabupaten Konawe Utara harus mengambil peran yang penting dalam menjalankan aksi iklim tersebut. Hal ini perlu dilakukan, mengingat Kabupaten Konawe Utara adalah salah satu kabupaten di Provinsi Sulawesi Tenggara yang kegiatan eksplorasi sumberdaya alamnya cukup masif. Seperti yang telah disebut sebelumnya bahwa pengurangan emisi karbon sebagian besar terkait dengan aktivitas ekonomi. Oleh karena itu upaya Kabupaten Konawe Utara dalam ikut aktif menyukseskan aksi pelaksanaan aksi iklim bagi Indonesia perlu menjadi salah satu pertimbangan utama dalam menyusun perencanaan pembangunan kedepan.

#### **4.2.1.3 Dampak Pandemi Covid-19**

Hadirnya pandemi COVID-19 telah membawa perubahan terhadap dunia dengan berbagai tantangan yang tidak pernah terbayangkan sebelumnya. Di Indonesia, COVID-19 telah menjangkiti lebih dari 1,3 juta orang sejak kasus pertama diumumkan pada bulan Maret 2020, setidaknya 35.000 orang telah meninggal dunia. Namun, upaya untuk menghambat penyebaran virus COVID-19 telah menghambat kegiatan perekonomian dan dampaknya terhadap tingkat kesejahteraan sosial semakin dirasakan masyarakat. Setelah menunjukkan pencapaian penurunan kemiskinan beberapa tahun belakangan ini, tingkat kemiskinan kembali meningkat setelah pandemi COVID-19. Satu dari 10 orang di Indonesia hari ini hidup di bawah garis kemiskinan nasional. Tingkat kemiskinan anak juga dapat meningkat secara signifikan. Dampak negatif terhadap keadaan sosial-ekonomi dari pandemi bisa menjadi jauh lebih buruk tanpa adanya bantuan sosial dari pemerintah.

Dalam menghadapi krisis ekonomi ini, Pemerintah Indonesia telah mengeluarkan sejumlah paket stimulus fiskal skala besar melalui Program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN). Dalam aspek jumlah anggaran pemerintah yang diperuntukkan untuk mengurangi dampak negatif dari pandemi COVID-19, Indonesia berada pada peringkat lima besar dari negara-negara di wilayah Asia Pasifik (ADB, 2021). Pada tahun 2020, Pemerintah Indonesia mengalokasikan sekitar Rp 695,2 triliun (sekitar US\$ 49 miliar) untuk PEN. Oleh karena krisis masih berlangsung, pada

bulan Februari 2021 Pemerintah Indonesia kembali mengumumkan alokasi anggaran senilai Rp 699,43 triliun (sekitar US\$ 49,3 miliar) untuk melanjutkan keberlangsungan program PEN (Kemenkeu, 2021).

Indonesia terus melakukan sejumlah upaya perbaikan dalam memperkuat berbagai program perlindungan sosialnya untuk menangani krisis setelah pandemi COVID-19. Program-program perlindungan sosial ini telah diperluas untuk melindungi masyarakat miskin terhadap guncangan ekonomi, dan juga masyarakat berpenghasilan menengah kebawah yang jumlahnya terus meningkat namun menjadi rentan terhadap risiko jatuh miskin di kemudian hari. Selain itu, usaha-usaha kecil juga menerima bantuan pemerintah seiring dengan upaya mereka untuk terus bertahan di tengah penurunan perekonomian dan pembatasan kegiatan masyarakat setelah pandemi COVID-19.

Untuk mengukur dampak dari COVID-19 terhadap rumah tangga Indonesia dan untuk memberikan informasi sebagai dasar pembuatan kebijakan pemerintah, UNICEF, UNDP, Prospera, dan The SMERU Research Institute berkolaborasi dalam sebuah survei berskala nasional di akhir tahun 2020. Survei ini meliputi 12.216 sampel rumah tangga representatif tingkat nasional yang tersebar di 34 provinsi yang dilakukan dalam kurun waktu antara Oktober dan November 2020. Ini merupakan survei terbesar terkait dampak pandemi COVID-19 dan berfokus pada anak serta kelompok rentan. Survei ini dilakukan melalui wawancara tatap muka dengan rumah tangga yang sebelumnya juga telah diwawancarai oleh Badan Pusat Statistik sebagai sampel dari Survei Sosial Ekonomi Nasional (SUSENAS) di tahun 2019. Pelaksanaannya melibatkan kerjasama erat dengan Pemerintah Indonesia.

Berdasarkan survei tersebut, Dampak Sosial Ekonomi Covid-19 Terhadap Rumah Tangga dan Rekomendasi Kebijakan Strategis Untuk Indonesia, sebagai berikut :

### **Temuan utama 1: Keuangan rumah tangga mengalami dampak parah dari pandemi COVID-19**

Hampir tiga perempat rumah tangga (74,3%) yang diwawancarai pada bulan Oktober-November 2020 mengalami penurunan pendapatan dari yang mereka terima pada bulan Januari 2020. Proporsi rumah tangga dengan penurunan pendapatan lebih besar adalah mereka yang memiliki anak (75,3%) dan mereka yang

tinggal di wilayah perkotaan (78,3%). Rumah tangga perkotaan juga mengalami penurunan pendapatan yang lebih besar dibandingkan rumah tangga perdesaan.

Rumah tangga pada seluruh kelompok pendapatan dari yang termiskin hingga yang paling berkecukupan melaporkan persentase penurunan pendapatan yang sama. Terdapat banyak rumah tangga yang sebelumnya aman secara ekonomi dan berada di tengah-tengah kelompok distribusi pendapatan kemudian jatuh miskin atau menjadi rentan terhadap kemiskinan.

Bagi sebagian besar rumah tangga, penurunan pendapatan bukanlah satu-satunya tantangan: hampir seperempat (24,4%) responden juga melaporkan peningkatan pengeluaran. Penyumbang utama dari peningkatan pengeluaran adalah naiknya biaya belanja bahan makanan dan keperluan pokok lainnya. Proporsi rumah tangga dengan anak yang menghabiskan lebih banyak biaya internet dan telepon genggam secara signifikan lebih besar (65%) dibandingkan rumah tangga yang tidak memiliki anak (28,9%).

Hanya sedikit dari pencari nafkah utama (14%) yang berganti pekerjaan sebagai akibat dari COVID-19. Meskipun demikian, hampir setengah (47,3%) dari mereka yang pindah pekerjaan berganti dari pekerjaan di sektor formal menjadi pekerjaan di sektor informal, yang mana perlindungan ketenagakerjaan untuk pekerjaan di sektor informal umumnya rendah. Setengah dari seluruh rumah tangga (51,5%) tidak memiliki tabungan untuk berjaga-jaga. Hampir sepertiga (27,3%) menggadaikan kepemilikan barang-barang untuk bertahan hidup. Seperempat dari mereka (25,3%) meminjam uang secara informal dari keluarga atau teman.

Usaha kecil merupakan sumber pendapatan yang penting bagi banyak rumah tangga. Satu pertiga dari responden memiliki setidaknya satu anggota rumah tangga yang menjalankan usaha mikro dan kecil, dan hampir seluruh usaha ini (87,5%) telah terkena dampak dari pandemi COVID-19. Kekhawatiran yang utama dari para pelaku usaha mikro dan kecil ini ialah pelanggan yang menjadi lebih sedikit, menurunnya penerimaan, serta meningkatnya biaya operasional.

## **Temuan utama 2: Anak-anak mengalami ketertinggalan dalam hal pendidikan dan layanan kesehatan**

Hampir tiga dari empat orang tua merasakan kekhawatiran terkait ketertinggalan pembelajaran sebagai hasil dari gangguan dalam proses pendidikan anak setelah pandemi COVID-19. Akses terhadap koneksi internet yang baik

merupakan tantangan utama bagi anak untuk belajar dari rumah, dimana 57,3% rumah tangga dengan anak melaporkan hal ini sebagai keprihatinan utama mereka. Rumah tangga yang berlokasi di wilayah perdesaan dan kurang berkecukupan lebih sering mengalami permasalahan internet dan keterbatasan perangkat dibandingkan mereka yang tinggal di perkotaan dan lebih berkecukupan.

Banyak orang tua yang melaporkan memiliki keterbatasan waktu (28,7%) dan/atau keterbatasan kemampuan (25,3%) dalam mendukung anak belajar dari rumah. Rumah tangga dengan anak mengakses lebih sedikit layanan kesehatan, dimana ketakutan akan penularan COVID-19 adalah alasan utama mereka menghindari kunjungan ke tempat layanan kesehatan. Lebih dari 1 dari 10 rumah tangga dengan anak usia dibawah 5 tahun belum membawa anak mereka ke klinik imunisasi sejak April 2020 karena adanya ketakutan terhadap virus COVID-19.

Penutupan sekolah, isolasi sosial, bersamaan dengan ketidakpastian ekonomi menghadapi anak dengan risiko-risiko lainnya. Survei ini menemukan bahwa 45% rumah tangga melaporkan adanya tantangan perilaku dari anak mereka. Dari mereka yang melaporkan hal tersebut, 20,5% diantaranya mengatakan anak mengalami kesulitan untuk berkonsentrasi dalam belajar; 12,9% menjadi lebih mudah marah, dan 6,5% mengalami kesulitan tidur.

### **Temuan utama 3: Bantuan sosial telah mencapai mereka yang membutuhkan, tetapi masih banyak yang bisa dilakukan**

Sebagian besar rumah tangga (85,3%) menerima setidaknya satu bentuk bantuan sosial, baik berupa tunai maupun barang. Setengah dari rumah tangga (50,8%) menerima bantuan tunai. Rumah tangga yang paling tidak berkecukupan menerima paling banyak bantuan. Dari rumah tangga yang berada di 40% terbawah kelompok distribusi pengeluaran, lebih dari 90% diantaranya menerima setidaknya satu bantuan dan lebih dari 60% menerima bantuan tunai. Rumah tangga yang aman secara ekonomi sebelum pandemi COVID-19 namun ternyata mengalami penurunan pendapatan yang signifikan juga dapat menjangkau bantuan sosial yang ada (sekitar 70%). Bantuan-bantuan sosial yang diterima meliputi program seperti penangguhan pajak, subsidi kredit, dan bantuan paket internet yang ditargetkan bagi rumah tangga yang baru terkena dampak pandemi COVID-19.

Banyak rumah tangga menerima bantuan tunai dan barang secara bersamaan dan terdapat sedikit rumah tangga yang menerima bantuan tunai saja. Hal ini

mengindikasikan penyebaran manfaat bantuan-bantuan sosial yang lebih luas. Dua pertiga (67,4%) dari penerima bantuan sosial pemerintah menyatakan bantuan-bantuan tersebut membantu dalam mengatasi dampak penurunan keuangan rumah tangga setelah pandemi COVID-19. Mereka menggunakan bantuan tersebut untuk membeli kebutuhan sehari-hari dan memenuhi kebutuhan listrik, air, dan internet atau pulsa telepon genggam.

Meskipun demikian, lebih dari sepertiga (38%) dari rumah tangga paling miskin yang berada di 40% terbawah kelompok distribusi pengeluaran tidak menerima bantuan tunai apapun di bulan Oktober- November 2020. Terdapat sangat sedikit rumah tangga (7,5%) dengan usaha mikro-kecil yang menerima bantuan usaha dari pemerintah setelah pandemi. Hampir empat puluh persen dari pemilik usaha kecil mengatakan mereka tidak mengetahui adanya bantuan usaha mikro-kecil dari pemerintah.

#### **Temuan utama 4: Perempuan mengalami penambahan tanggungjawab dan tugas dalam peran pengasuhan anak**

Para ibu tiga kali lebih sering mengasuh anak dibandingkan ayah: 71,5% rumah tangga menjawab ibu sebagai sosok utama yang lebih berperan dalam membantu anak belajar di rumah, dibandingkan 22% rumah tangga yang hanya menjawab ayah yang lebih berperan. Setengah dari para perempuan juga terlibat dalam pekerjaan untuk mendukung keluarga. Mereka mengalami kesulitan dalam menyeimbangkan tuntutan pekerjaan rumah-tangga dan tambahan tanggungjawab lainnya yang muncul karena penutupan sekolah sehingga anak-anak harus belajar dari rumah.

#### **Temuan utama 5: Kerawanan pangan dan kelompok rentan harus menjadi perhatian lebih kedepannya**

Hampir sepertiga (30%) responden merasa khawatir mereka tidak bisa memberi makan keluarga. Proporsi dari rumah tangga yang menghadapi kerawanan pangan sedang dan parah telah meningkat menjadi 11,7% di tahun 2020. Penurunan pendapatan dan gangguan sistem pasokan makanan adalah faktor-faktor utama yang menyebabkan kerawanan pangan.

Rumah tangga yang memiliki anggota dengan disabilitas mengalami kehilangan pendapatan dan pekerjaan yang lebih tinggi. Satu dari 10 rumah tangga dengan anggota keluarga disabilitas ringan mengalami kehilangan pekerjaan karena

pandemi COVID-19 dan delapan dari 10 rumah tangga tersebut mengalami penurunan pendapatan dibandingkan sebelum pandemi COVID-19. Sedangkan, rumah tangga dengan anggota penyandang disabilitas berat tidak dapat menjangkau layanan kesehatan atau layanan terapi yang mereka butuhkan. Terdapat lebih banyak rumah tangga yang dikepalai oleh perempuan tidak memiliki tabungan (56,7%) dimana tabungan dapat digunakan sebagai penyangga kehidupan di saat krisis, dibandingkan rumah tangga yang dikepalai laki-laki (50,6%).

### **Rekomendasi kebijakan strategis, meliputi :**

1. **Diperlukan dukungan lebih besar bagi anak-anak**, terkait pembelajaran, perlindungan sosial, kesehatan dan gizi, serta perlindungan anak. Dukungan terhadap pembukaan kembali sekolah secara aman dan bertahap; pastikan manfaat dari program bantuan tunai mencakup seluruh rumah tangga terdampak yang memiliki anak; utamakan penyampaian vaksinasi dan obat-obatan untuk melindungi anak dari penyakit; ikut sertakan layanan kesehatan mental bagi orangtua dan anak sebagai bagian dari bentuk tanggap kesehatan masyarakat terkait pandemi COVID-19.
2. **Perluas cakupan bantuan pangan**, dan atasi gangguan pasokan pangan untuk melawan meningkatnya kerawanan pangan. Memperlengkapi bantuan pangan berbasis tunai dengan promosi kesehatan dan gizi sehingga pemenuhan gizi lebih dapat tercapai. Sediakan pengawasan gizi pada tingkat lokal. Pastikan ketersediaan dan keterjangkauan pasokan makanan yang bergizi.
3. **Pertahankan dukungan untuk kelompok pendapatan menengah kebawah**, yang sekarang lebih rentan dan tidak berkecukupan melalui berbagai program yang pro pasar tenaga kerja dan bantuan sosial tunai.
4. **Teruskan pendampingan dalam pemulihan usaha keluarga**, melalui program bantuan tunai yang disesuaikan dengan kebutuhan mereka, diseminasi informasi terkait tingkat manfaat, pendaftaran program berdasarkan kebutuhan masyarakat, dan menghubungkan penerima bantuan dengan dukungan pelengkap. Pastikan usaha yang dimiliki perempuan juga didukung secara adil.
5. **Kurangi beban tanggungjawab pengasuhan anak dari perempuan**, dengan membuka kembali sekolah secara perlahan dan aman, melakukan kampanye untuk mempromosikan pembagian tanggungjawab dalam pengasuhan anak di rumah

yang seimbang antara laki-laki dan perempuan, dan berikan kedua orang tua keterampilan dan dukungan yang dibutuhkan untuk membantu anak belajar dari rumah saat sekolah ditutup dan/atau pada periode pembelajaran campuran.

6. **Pastikan orang dengan disabilitas dapat mengakses layanan kesehatan dan perawatan kesehatan**, yang mereka butuhkan. Prioritaskan rumah tangga dengan anggota penyandang disabilitas untuk mendapatkan bantuan sosial dan dampingi dengan kesempatan untuk meningkatkan keterampilan atau pelatihan kembali.
7. **Hubungkan pendaftaran baru bantuan sosial dengan basis data tunggal** untuk penargetan bantuan kedepannya. Rekomendasi yang sifatnya khusus meliputi konsolidasi dan integrasi data penerima bantuan tunai dengan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS). Kembangkan peraturan dan pedoman untuk mengumpulkan informasi yang terstandarisasi secara nasional. Pastikan izin usaha mikro yang baru memiliki nomor identifikasi rumah tangga untuk keperluan penggabungan data secara lebih terintegrasi.
8. **Upayakan tingkat pemahaman yang lebih besar terkait informasi jenis bantuan pemerintah** dengan mengembangkan media yang mudah digunakan dan dilengkapi informasi terbaru tentang program bantuan usaha.

#### 4.2.1.4 Perkembangan Teknologi Informasi (Revolusi Industri 4.0)

Globalisasi yang terjadi saat ini salah satunya ditandai dengan kecepatan arus informasi dan ekonomi digital yang tidak dapat dilepaskan oleh pengaruh besar teknologi. Kemampuan teknologi dalam mengintegrasikan tradisi perdagangan, dapat mengubah bentuknya menjadi lebih sempurna, universal, dan spasial temporal (mampu menembus ruang dan waktu). Bagaimana kemudian teknologi juga mampu menggerakkan arus informasi dan gagasan tanpa batas, sehingga yang diperlukan adalah kemampuan mentransformasikan teknologi informasi menjadi sebuah aktivitas positif, baik secara ekonomi, sosial, maupun budaya yang tetap sejalan dengan nilai-nilai luhur kepribadian bangsa Indonesia.

Selain itu, bagaimana mengantisipasi dimulainya era industri 4.0 (industri yang mengkombinasikan kecerdasan buatan, data raksasa, komputasiawan, serba internet dan cetak tiga dimensi) terutama pada industri otomotif, serta industri makanan dan minuman dan lainnya, serta bagaimana mengkombinasikan dengan

penyerapan dan penciptaan lapangan kerja baru. Dibidang pemerintahan juga penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) merupakan keharusan.

#### 4.2.2 Isu Nasional yang Tercantum dalam RPJMN 2020 - 2024

Isu-isu nasional yang memiliki potensi besar untuk memengaruhi arah pembangunan Kabupaten Konawe Utara pada masa mendatang adalah kebijakan dari pemerintah pusat. Dokumen perencanaan tingkat nasional merupakan salah satu sumber kebijakan yang memiliki kepastian tinggi dan dalam amanat peraturan perundangan wajib diikuti dan harus berpedoman pada RPJMN.

Kebijakan pembangunan nasional yang tercantum dalam RPJMN 2020-2024 diarahkan untuk mencapai visi pembangunan nasional yaitu ***“TERWUJUDNYA INDONESIA YANG BERDAULAT, MANDIRI, DAN BERKEPRIBADIAN BERLANDASKAN GOTONG-ROYONG”***. Visi tersebut diwujudkan melalui 9 (sembilan) Misi yang dikenal sebagai Nawacita Kedua yaitu :

1. Peningkatan Kualitas Manusia Indonesia.
2. Struktur Ekonomi yang Produktif, Mandiri, dan Berdaya Saing
3. Pembangunan yang Merata dan Berkeadilan
4. Mencapai Lingkungan Hidup yang Berkelanjutan
5. Kemajuan Budaya yang Mencerminkan Kepribadian Bangsa
6. Penegakan Sistem Hukum yang Bebas Korupsi, Bermartabat, dan Terpercaya
7. Perlindungan bagi Segenap Bangsa dan Memberikan Rasa Aman pada Seluruh Warga
8. Pengelolaan Pemerintahan yang Bersih, Efektif, dan Terpercaya
9. Sinergi Pemerintah Daerah dalam Kerangka Negara Kesatuan

Presiden menetapkan 7 (tujuh) Prioritas Nasional dalam Pembangunan Tahun 2020-2024 beserta isu strategisnya sebagai berikut.

1. Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan yang Berkualitas dan Berkeadilan
  - Keberlanjutan Sumber Daya Alam
  - Efektivitas Tata Kelola Sumber Daya Ekonomi
  - Transformasi Struktur Berjalan Lambat
  - Revolusi Industri 4.0 dan Ekonomi Digital

2. Mengembangkan Wilayah untuk Mengurangi Kesenjangan dan Menjamin Pemerataan
  - Ketimpangan Antar wilayah, yang ditandai dengan tingginya kemiskinan di Kawasan Timur Indonesia; ketimpangan pendapatan; terjadinya konsentrasi kegiatan ekonomi di Kawasan Barat Indonesia terutama Pulau Jawa; terbatasnya sarana prasarana dan aksesibilitas di daerah tertinggal, desa dan Kawasan pedesaan, Kawasan transmigrasi, dan Kawasan perbatasan; dan belum optimalnya pengembangan ekonomi lokal di daerah tertinggal, desa dan Kawasan pedesaan, Kawasan transmigrasi, dan Kawasan perbatasan.
3. Meningkatkan Sumber Daya Manusia Berkualitas dan Berdaya Saing
  - Pengendalian penduduk dan penguatan tata Kelola kependudukan
  - Perlindungan sosial bagi seluruh penduduk
  - Pemenuhan layanan dasar
  - Peningkatan kualitas anak, perempuan, dan pemuda
  - Pengentasan kemiskinan
  - Peningkatan produktivitas dan daya saing
4. Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan
  - Melemahnya ideologi Pancasila dan ketahanan budaya bangsa
  - Belum optimalnya pemajuan kebudayaan Indonesia
  - Belum mantapnya Pendidikan karakter dan budi pekerti
  - Masih lemahnya pemahaman dan pengamalan nilai-nilai ajaran agama
  - Belum kukuhnya moderasi beragama untuk memperkuat toleransi dan kerukunan
  - Belum optimalnya peran keluarga
  - Rendahnya budaya literasi, inovasi, dan kreativitas
5. Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi dan Pelayanan Dasar
  - Penyediaan akses perumahan dan permukiman layak, aman dan terjangkau
  - Penyediaan akses air minum dan sanitasi layak dan aman
  - Pengelolaan air tanah dan air baku berkelanjutan
  - Keselamatan dan keamanan transportasi
  - Ketahanan kebencanaan infrastruktur
  - Waduk multiguna dan modernisasi irigasi

- Konektivitas jalan, kereta api, laut, udara, dan darat
  - Infrastruktur perkotaan meliputi transportasi, energi dan ketenagalistrikan, infrastruktur dan ekosistem TIK perkotaan, penyediaan akses air minum dan sanitasi yang layak dan aman, penyediaan akses perumahan dan permukiman layak, aman dan terjangkau
  - Energi dan ketenagalistrikan meliputi keberlanjutan penyediaan, akses serta keterjangkauan dan kecukupan penyediaan
  - Transformasi digital meliputi penuntasan dan pemanfaatan infrastruktur TIK, serta fasilitas pendukung transformasi digital
6. Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana, dan Perubahan Iklim
- Peningkatan kualitas lingkungan hidup
  - Peningkatan ketahanan bencana dan iklim
  - Pembangunan rendah karbon
7. Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik
- Konsolidasi demokrasi
  - Optimalisasi kebijakan luar negeri
  - Penegakan hukum nasional
  - Reformasi birokrasi dan tata Kelola
  - Menjaga stabilitas keamanan nasional

Berdasarkan telaahan RPJMN tahap IV (2020-2025), maka pembangunan Kabupaten Konawe Utara dalam lima tahun kedepan harus selaras dengan arahan kebijakan maupun agenda RPMN tahap IV dengan menyesuaikan kemampuan daerah.

#### **4.2.3 Isu Strategis Provinsi Sulawesi Tenggara 2018-2023**

Perencanaan pembangunan jangka menengah Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun 2018-2023 memiliki isu strategis sebagai berikut:

1. Penanggulangan Kemiskinan;
2. Peningkatan Kualitas Sumberdaya Manusia;
3. Peningkatan Daya Saing Ekonomi dan Produktivitas Tenaga Kerja;
4. Pembangunan Berkelanjutan dengan Memperhatikan Daya Dukung Lingkungan dan Sumber Daya Alam;

5. Tata Kelola Pemerintahan;
6. Peningkatan Kapasitas Infrastruktur Dasar dan Wilayah.

#### **4.2.4 Isu Strategis Yang Dihasilkan Dari Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) RPJMD Kabupaten Konawe Utara Tahun 2021-2026**

Menurut Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (UUPPLH), Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) adalah rangkaian analisis yang sistematis, menyeluruh, dan partisipatif untuk memastikan bahwa prinsip pembangunan berkelanjutan telah menjadi dasar dan terintegrasi dalam pembangunan suatu wilayah dan/atau kebijakan, rencana dan/atau program.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2018 tentang Pembuatan dan Pelaksanaan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) dalam Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), lebih mengutamakan pendekatan strategis, sehingga bukan KRP dalam RPJMD yang dinilai dampaknya, tetapi lebih memastikan strategi pembangunan berkelanjutan sesuai Tujuan Pembangunan Berkelanjutan/Sustainable Development Goals (TPB/SDG's), yang tertuang dalam Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan, telah diintegrasikan ke dalam RPJMD.

Terkait hal ini, terdapat dari 220 indikator TPB yang dianalisis (pada empat pilar pembangunan) diperoleh indikasi bahwa terdapat 49,09% (108 indikator) yang telah dilaksanakan oleh Pemerintah Kabupaten Konawe Utara, dengan rincian : 59 indikator (26,82%) telah mencapai target, dan 49 indikator (22,27%) belum mencapai target. Disebutkan kemudian bahwa terdapat 71 indikator (atau sebesar 32,37%) yang belum memiliki data serta sebanyak 15,91% atau sebesar 35 indikator TPB yang bukan merupakan target RPJMD Kabupaten Konawe Utara. Penentuan isu strategis KLHS Kabupaten Konawe Utara didahului dengan penentuan isu panjang pembangunan berkelanjutan kemudian dilakukan penentuan isu strategis prioritas. Adapun isu strategis prioritas Kabupaten Konawe Utara dari hasil KLHS RPJMD 2021-2026 adalah sebagai berikut :

1. Peningkatan kualitas pelaksanaan penanggulangan kemiskinan dan kesehatan masyarakat dan lingkungan hidup;

2. Optimalisasi pembangunan kualitas sumber daya manusia dan Reformasi Birokrasi;
3. Implementasi pembangunan perekonomian dan pertanian berkelanjutan serta kepariwisataan;
4. Percepatan pembangunan infrastruktur dasar dan konektivitas wilayah.

#### **4.2.5 Rumusan Isu - Isu Strategis Kabupaten Konawe Utara**

Berangkat dari berbagai permasalahan daerah, isu internasional, isu nasional, isu regional dan amanat dalam RPJPD, maka dirumuskan isu strategis pembangunan daerah Kabupaten Konawe Utara melalui berbagai pertimbangan di antaranya memiliki pengaruh yang besar terhadap pencapaian sasaran Pembangunan Nasional, merupakan tugas dan tanggung jawab Pemerintah Daerah, luasnya dampak yang ditimbulkan terhadap daerah dan masyarakat, memiliki daya ungkit terhadap pembangunan daerah, dan kemudahan untuk dikelola. Adapun isu strategis tersebut adalah sebagai berikut.

**Tabel 4.5 Keterkaitan Isu Strategis Kabupaten Konawe Utara, Isu Internasional, Isu Nasional, Isu Provinsi Sulawesi Tenggara, dan Isu Strategis KLHS RPJMD**

| No. | Rumusan Isu Strategis RPJMD                            | Masalah Daerah   | Isu Global SDGs/TPB   | Pandemi Covid-19   | Isu Strategis Nasional dalam RPJMN 2020-2024  | Isu Strategis RPJMD Provinsi Sultra  | Isu KLHS RPJMD  |
|-----|--|--|---|--|---|--|---|
| 1.  | Peningkatan Kualitas dan daya saing sumberdaya manusia | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Belum optimalnya akses pendidikan</li> <li>- Derajat kesehatan masyarakat dan capaian keluarga sehat masih perlu ditingkat</li> <li>- Masih tingginya angka pengangguran terbuka</li> <li>- Belum optimalnya penanganan kemiskinan</li> <li>- Belum optimalnya pengarusutamaan gender dan hak anak</li> <li>- Belum optimalnya pengendalian penduduk</li> <li>- Belum optimalnya pembinaan kepemudaan dan olahraga</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>- <b>Tidak Ada Kemiskinan:</b> Mengakhiri kemiskinan dalam segala bentuknya di mana saja</li> <li>- <b>Menghapuskan Kelaparan:</b> Mengakhiri kelaparan dan kematian akibat kelaparan, mencapai keamanan pangan dan perbaikan nutrisi, serta menggalakkan pertanian yang berkelanjutan.</li> <li>- <b>Kesehatan yang Baik:</b> Memastikan hidup sehat dan menggalakkan kesejahteraan bagi semua orang pada segala usia.</li> <li>- <b>Pendidikan Berkualitas:</b> Memastikan pendidikan inklusif bagi semua orang, dan menggalakkan kesetaraan serta kesempatan</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Anak – anak mengalami ketertinggalan dalam hal pendidikan dan layanan sosial</li> <li>- Perempuan mengalami penambahan tanggungjawab dan tugas dalam peran pengasuhan anak</li> </ul> | <p><b>Meningkatkan Sumber Daya Manusia Berkualitas dan Berdaya Saing</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Pengendalian penduduk dan penguatan tata Kelola kependudukan</li> <li>- Perlindungan sosial bagi seluruh penduduk</li> <li>- Pemenuhan layanan dasar</li> <li>- Peningkatan kualitas anak, perempuan, dan pemuda</li> <li>- Pengentasan kemiskinan</li> <li>- Peningkatan produktivitas dan daya saing</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Penanggulangan Kemiskinan;</li> <li>- Peningkatan Kualitas Sumberdaya Manusia;</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Peningkatan kualitas pelaksanaan penanggulangan kemiskinan dan kesehatan masyarakat dan lingkungan</li> <li>- Optimalisasi pembangunan kualitas sumber daya manusia dan Reformasi Birokrasi</li> </ul> |

| No. | Rumusan Isu Strategis RPJMD           | Masalah Daerah  | Isu Global SDGs/TPB  | Pandemi Covid-19  | Isu Strategis Nasional dalam RPJMN 2020-2024  | Isu Strategis RPJMD Provinsi Sultra   | Isu KLHS RPJMD   |
|-----|---------------------------------------|---|--|---|---|---|--|
|     |                                       |   | <p>belajar seumur hidup yang berkualitas.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- <b>Kesetaraan Gender:</b> Mencapai kesetaraan gender melalui pemberdayaan kaum wanita dan anak perempuan.</li> <li>- <b>Berkurangnya Ketidaksetaraan:</b> Mengurangi ketidaksetaraan di dalam dan di antara negara-negara.</li> </ul>                                       |   |   |   |  |
| 2.  | Peningkatan Daya saing ekonomi daerah | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Rendahnya pertumbuhan ekonomi</li> <li>- Masih rendahnya kapasitas dan kontribusi sektor KUMKM terhadap perekonomian daerah</li> <li>- Masih rendahnya kontribusi sektor - sektor unggulan daerah terhadap perekonomian daerah</li> <li>- Belum optimalnya sarana prasarana perdagangan</li> <li>- Belum optimalnya pola konsumsi pangan masyarakat</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>- <b>Pekerjaan yang Baik dan Pertumbuhan Ekonomi:</b> Mengalakkan pertumbuhan ekonomi yang terus menerus, inklusif dan berkelanjutan, lapangan kerja yang lengkap dan produktif serta pekerjaan yang layak bagi semua orang.</li> <li>- <b>Industri, Inovasi dan Infrastruktur:</b> Membangun infrastruktur yang</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Keuangan rumah tangga mengalami dampak parah dari pandemi Covid-19</li> <li>- Bantuan sosial telah mencapai mereka yang membutuhkan, tetapi masih banyak yang bisa dilakukan</li> <li>- Kerawanan pangan dan kelompok rentan harus menjadi perhatian lebih kedepannya</li> </ul> | <p><b>Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan yang Berkualitas dan Berkeadilan</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Keberlanjutan Sumber Daya Alam</li> <li>- Efektivitas Tata Kelola Sumber Daya Ekonomi</li> <li>- Transformasi Struktur Berjalan Lambat</li> <li>- Revolusi Industri 4.0 dan Ekonomi Digital</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Peningkatan Daya Saing Ekonomi dan Produktivitas Tenaga Kerja</li> </ul> | Implementasi pembangunan perekonomian dan pertanian berkelanjutan serta kepariwisataan |

| No. | Rumusan Isu Strategis RPJMD   | Masalah Daerah   | Isu Global SDGs/TPB   | Pandemi Covid-19  | Isu Strategis Nasional dalam RPJMN 2020-2024   | Isu Strategis RPJMD Provinsi Sultra                      | Isu KLHS RPJMD   |
|-----|---|--|---|---|--|--|--|
|     |   |  | <p>kukuh, menggalakkan industrialisasi inklusif dan berkelanjutan, serta membantu mengembangkan inovasi.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- <b>Pemakaian yang Bertanggungjawab</b> : Memastikan pemakaian dan pola produksi yang berkelanjutan.</li> </ul>  |   |  |  |  |
| 3.  | Pembangunan Infrastruktur wilayah dan sarana prasarana Kawasan permukiman | - Masih terbatasnya infrastruktur wilayah dan sarana prasarana dasar | <ul style="list-style-type: none"> <li>- <b>Air Bersih dan Sanitasi:</b> Memastikan ketersediaan dan pengelolaan air serta sanitasi berkelanjutan bagi semua orang.</li> <li>- <b>Industri, Inovasi dan Infrastruktur:</b> Membangun infrastruktur yang kukuh, menggalakkan industrialisasi inklusif dan berkelanjutan, serta membantu mengembangkan inovasi.</li> <li>- <b>Kota dan Masyarakat Berkelanjutan:</b></li> </ul> | - Meningkatnya kebutuhan listrik, pulsa dan air bersih; | <p><b>Mengembangkan Wilayah untuk Mengurangi Kesenjangan dan Menjamin Pemerataan</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Ketimpangan Antar wilayah, yang ditandai dengan tingginya kemiskinan di Kawasan Timur Indonesia; ketimpangan pendapatan; terjadinya konsentrasi kegiatan ekonomi di Kawasan Barat Indonesia terutama Pulau Jawa; terbatasnya sarana prasarana dan aksesibilitas di daerah tertinggal,</li> </ul> | - Peningkatan Kapasitas Infrastruktur Dasar dan Wilayah. | Percepatan pembangunan. Infrastruktur dasar dan konektivitas wilayah |

| No. | Rumusan Isu Strategis RPJMD | Masalah Daerah | Isu Global SDGs/TPB   | Pandemi Covid-19 | Isu Strategis Nasional dalam RPJMN 2020-2024   | Isu Strategis RPJMD Provinsi Sultra | Isu KLHS RPJMD |
|-----|-----------------------------|----------------|---|------------------|--|-------------------------------------|----------------|
|     |                             |                | Membangun kota dan pemukiman warga yang inklusif, aman dan kukuh. |                  | <p>desa dan Kawasan pedesaan, Kawasan transmigrasi, dan Kawasan perbatasan; dan belum optimalnya pengembangan ekonomi lokal di daerah tertinggal, desa dan Kawasan pedesaan, Kawasan transmigrasi, dan Kawasan perbatasan.</p> <p><b>Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi dan Pelayanan Dasar</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Penyediaan akses perumahan dan permukiman layak, aman dan terjangkau</li> <li>- Penyediaan akses air minum dan sanitasi layak dan aman</li> <li>- Pengelolaan air tanah dan air baku berkelanjutan</li> <li>- Keselamatan dan keamanan transportasi</li> <li>- Ketahanan kebencanaan infrastruktur</li> <li>- Waduk multiguna dan modernisasi</li> </ul> |                                     |                |

| No. | Rumusan Isu Strategis RPJMD                            | Masalah Daerah   | Isu Global SDGs/TPB                               | Pandemi Covid-19                          | Isu Strategis Nasional dalam RPJMN 2020-2024   | Isu Strategis RPJMD Provinsi Sultra | Isu KLHS RPJMD                           |
|-----|--|--|---|---|--|-------------------------------------|--|
|     |  |  |   |   | irigasi<br>- Konektivitas jalan, kereta api, laut, udara, dan darat<br>- Infrastruktur perkotaan meliputi transportasi, energi dan ketenagalistrikan , infrastruktur dan ekosistem TIK perkotaan, penyediaan akses air minum dan sanitasi yang layak dan aman, penyediaan akses perumahan dan permukiman layak, aman dan terjangkau<br>- Energi dan ketenagalistrikan meliputi keberlanjutan penyediaan, akses serta keterjangkauan dan kecukupan penyediaan<br>- Transformasi digital meliputi penuntasan dan pemanfaatan infrastruktur TIK, serta fasilitas pendukung transformasi digital |                                     |  |
| 4.  | Perbaiki Tata Kelola pemerintahan dan pelayanan publik | - Akuntabilitas keuangan daerah masih perlu ditingkatkan | - <b>Perdamaian dan Keadilan:</b><br>Menggalakkan | - Terhambatnya aktivitas pelayanan publik | <b>Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan</b>  | - Tata Kelola Pemerintahan          | Optimalisasi pembangunan kualitas sumber |

| No. | Rumusan Isu Strategis RPJMD                                     | Masalah Daerah  | Isu Global SDGs/TPB  | Pandemi Covid-19                              | Isu Strategis Nasional dalam RPJMN 2020-2024   | Isu Strategis RPJMD Provinsi Sultra  | Isu KLHS RPJMD  |
|-----|---|---|--|---|--|--|---|
|     |   | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Belum optimalnya penerapan zona integritas</li> <li>- Penyusunan, implementasi, evaluasi dan pengendalian perencanaan masih perlu ditingkatkan</li> <li>- Belum optimalnya implementasi manajemen ASN</li> <li>- Akuntabilitas kinerja masih perlu ditingkatkan</li> <li>- Belum optimalnya pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)</li> <li>- Belum optimalnya kualitas layanan publik</li> <li>- Belum optimalnya kualitas layanan publik kewilayahan</li> <li>- Belum optimalnya Penegakan hukum daerah dan pemenuhan Hak Asasi Manusia</li> </ul> | <p>masyarakat yang damai dan inklusif untuk pengembangan yang berkelanjutan, menyediakan akses untuk keadilan bagi semua orang, serta membangun berbagai lembaga yang efektif, bertanggungjawab dan inklusif di semua strata.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- <b>Kemitraan:</b> Memperkuat sarana pelaksanaan dan menghidupkan kembali kemitraan global untuk perkembangan yang berkelanjutan.</li> </ul> | dan pelaksanaan program/kegiatan pembangunan. | <p><b>Transformasi Pelayanan Publik</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Konsolidasi demokrasi</li> <li>- Optimalisasi kebijakan luar negeri</li> <li>- Penegakan hukum nasional</li> <li>- Reformasi birokrasi dan tata Kelola</li> <li>- Menjaga stabilitas keamanan nasional</li> </ul> |  | <p>daya manusia dan Reformasi Birokrasi</p>   |
| 5.  | Peningkatan Kualitas lingkungan hidup dan mitigasi bencana alam | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Belum optimalnya pemanfaatan dan pengendalian penataan ruang dalam rangka mendukung pembangunan dan investasi daerah</li> <li>- Belum optimalnya Pengelolaan kualitas lingkungan hidup dan</li> </ul>  | <ul style="list-style-type: none"> <li>- <b>Energi Terbarukan:</b> Memastikan akses ke energi yang terjangkau, andal, berkelanjutan dan terbarukan bagi semua orang.</li> <li>- <b>Aksi Iklim:</b> Mengambil</li> </ul>  |   | <p><b>Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana, dan Perubahan Iklim</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Peningkatan kualitas lingkungan hidup</li> <li>- Peningkatan ketahanan bencana dan iklim</li> </ul>   | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Pembangunan Berkelanjutan dengan Memperhatikan Daya Dukung Lingkungan dan Sumber Daya Alam</li> </ul> | <p>Peningkatan kualitas pelaksanaan penanggulangan kemiskinan dan kesehatan masyarakat dan lingkungan</p> |

| No. | Rumusan Isu Strategis RPJMD | Masalah Daerah | Isu Global SDGs/TPB  | Pandemi Covid-19 | Isu Strategis Nasional dalam RPJMN 2020-2024 | Isu Strategis RPJMD Provinsi Sultra | Isu KLHS RPJMD |
|-----|-----------------------------|----------------|--|------------------|--|-------------------------------------|----------------|
|     |                             | Kebencanaan    | <p>tindakan segera untuk memberantas perubahan iklim dan dampaknya.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- <b>Kehidupan di Bawah Air:</b><br/>Mengambil tindakan segera untuk memberantas perubahan iklim dan dampaknya.</li> <li>- <b>Kehidupan di Darat:</b><br/>Melindungi, memulihkan dan menggalakkan penggunaan ekosistem bumi yang berkelanjutan, mengelola hutan secara berkelanjutan, memberantas penggersion lahan, dan menghentikan serta membalikkan degradasi lahan dan menghentikan penyusutan keekaragaman hayati.</li> </ul> |                  | - Pembangunan rendah karbon                  |                                     |                |

| No. | Rumusan Isu Strategis RPJMD                               | Masalah Daerah  | Isu Global SDGs/TPB   | Pandemi Covid-19  | Isu Strategis Nasional dalam RPJMN 2020-2024   | Isu Strategis RPJMD Provinsi Sultra  | Isu KLHS RPJMD   |
|-----|---|---|---|---|--|--|--|
| 6.  | Pembangunan kebudayaan dan kehidupan keagamaan masyarakat | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Terbatasnya event budaya yang dilaksanakan</li> <li>- Masih rendahnya pemahaman masyarakat terhadap nilai-nilai keagamaan</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>- <b>Perdamaian dan Keadilan:</b> Menggalakkan masyarakat yang damai dan inklusif untuk pengembangan yang berkelanjutan, menyediakan akses untuk keadilan bagi semua orang, serta membangun berbagai lembaga yang efektif, bertanggungjawab dan inklusif di semua strata.</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Terhambatnya aktivitas pelayanan publik dan pelaksanaan program/kegiatan pembangunan.</li> </ul> | <b>Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Melemahnya ideologi Pancasila dan ketahanan budaya bangsa</li> <li>- Belum optimalnya pemajuan kebudayaan Indonesia</li> <li>- Belum mantapnya Pendidikan karakter dan budi pekerti</li> <li>- Masih lemahnya pemahaman dan pengamalan nilai-nilai ajaran agama</li> <li>- Belum kukuhnya moderasi beragama untuk memperkuat toleransi dan kerukunan</li> <li>- Belum optimalnya peran keluarga</li> <li>- Rendahnya budaya literasi, inovasi, dan kreativitas</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Peningkatan Kualitas Sumberdaya Manusia;</li> </ul> | Peningkatan kualitas pelaksanaan penanggulangan kemiskinan dan kesehatan masyarakat dan lingkungan |

Sumber : Bappeda Kab. Konawe Utara, 2021

## 1. Kualitas dan daya saing sumber daya manusia Kabupaten Konawe Utara

Daya saing Sumber Daya Manusia (SDM) berhubungan dengan bagaimana kualitas masyarakat Kabupaten Konawe Utara berperan di berbagai sektor penting dalam perekonomian daerah. Rendahnya daya saing SDM Kabupaten Konawe Utara memiliki masalah inti yakni rendahnya kualitas SDM. Oleh karena itu, perlu dilakukan upaya-upaya untuk memecahkan permasalahan terkait kualitas SDM yang akan berdampak pada peningkatan daya saing masyarakat Kabupaten Konawe Utara.

Indikasi untuk mengukur kualitas SDM antara lain dengan mengukur sejauh mana SDM Kabupaten Konawe Utara dapat bersaing dengan SDM wilayah lain, sekurang-kurangnya di Provinsi Sulawesi Tenggara. Selain itu, masih dominannya produk primer yang menjadi andalan ekspor menunjukkan bahwa kemandirian lokal SDM masih menjadi kendala utama pembangunan karena belum mampu memberi nilai tambah terhadap pengelolaan sumber daya alam yang dihasilkan.

Rendahnya kualitas SDM Kabupaten Konawe Utara berhubungan dengan permasalahan pokok antara lain rendahnya akses dan mutu pendidikan, rendahnya akses dan mutu pelayanan kesehatan, dan rendahnya serta belum meratanya pendapatan per kapita masyarakat. Permasalahan rendahnya akses dan mutu pendidikan dapat dilihat dari angka melek huruf di Kabupaten Konawe Utara sebesar 96,72 persen pada tahun 2019 dan angka rata-rata lama sekolah 9,21 tahun 2020. Oleh karena itu, untuk memperbaiki daya saing SDM di Kabupaten Konawe Utara pada masa datang, perlu perhatian khusus dari pemerintah terkait pendidikan, terutama dari segi kualitas maupun sarana dan prasarana penunjangnya.

Permasalahan berikutnya yang memengaruhi rendahnya daya saing SDM Kabupaten Konawe Utara adalah akses dan mutu pelayanan kesehatan. Peningkatan layanan kesehatan sangat perlu dilakukan mengingat kesehatan merupakan kunci utama individu dalam melaksanakan aktivitasnya. Angka harapan hidup di Kabupaten Konawe Utara cenderung naik perlahan dimana pada tahun 2017 sebesar 68,71 dan meningkat menjadi 69,1 tahun 2020. Selain itu masih terdapatnya angka kematian ibu yakni sebesar 2 jiwa pada tahun 2020 juga perlu diberi perhatian khusus meskipun angka tersebut jauh berkurang dari tahun 2019 dimana terdapat 5 kematian ibu/1.000 kelahiran hidup. Demikian pula Angka Kematian Bayi tahun 2020 sebanyak 14 jiwa meningkat signifikan dari tahun 2019 sebanyak 4 jiwa. Mutu pelayanan kesehatan juga perlu ditingkatkan sampai ke wilayah perdesaan terpencil

dan perbatasan mengingat penduduk dengan keluhan kesehatan sebesar 431 jiwa pada tahun 2019 dan tahun 2020 tersebar di seluruh sudut wilayah Kabupaten Konawe Utara.

Permasalahan turunan yang juga dapat memengaruhi rendahnya daya saing SDM Kabupaten Konawe Utara adalah pendapatan per kapita. Pendapatan per kapita di Kabupaten Konawe Utara mengalami penurunan dimana pada tahun 2019 sebesar 61,52 juta rupiah turun menjadi 60,84 juta rupiah di tahun 2020. Angka pendapatan perkapita hanya membagi total produksi barang dan jasa dengan jumlah penduduk, namun belum mampu menggambarkan pemerataan pendapatan.

Pengeluaran rata-rata per kapita sebulan masyarakat Kabupaten Konawe Utara pada tahun 2020 sebesar Rp 1.176.540,-. Jika dilihat berdasarkan kelompok pengeluaran, proporsi pengeluaran rata-rata per kapita sebulan untuk konsumsi makanan pada tahun 2020 yang sebesar Rp 632.825 dan bukan makanan Rp. 543.716. Angka tersebut bermakna bahwa pengeluaran per bulan masyarakat Kabupaten Konawe Utara menunjukkan masih didominasi untuk konsumsi makanan. Semakin tinggi pendapatan/kesejahteraan seseorang, maka proporsi pengeluaran untuk memenuhi kebutuhan makanan akan menurun, namun sebaliknya pengeluaran untuk non makanan proporsinya akan semakin meningkat. Berbagai variabel yang dapat mengilustrasikan isu ini antara lain:

- Peningkatan kualitas sarana prasarana sekolah dan tenaga pendidik secara merata di seluruh wilayah Kabupaten Konawe Utara.
- Peningkatan kualitas sarana prasarana kesehatan dan tenaga kesehatan secara merata di seluruh wilayah Kabupaten Konawe Utara.
- Peningkatan kesehatan ibu dan anak.
- Mempromosikan budaya hidup sehat bagi semua segala usia.
- Mencapai kesetaraan gender dengan memberdayakan perempuan dan anak.
- Cakupan layanan jaminan kesejahteraan sosial secara menyeluruh dan terintegrasi secara sistem bagi masyarakat berpenghasilan rendah dan masyarakat terdampak bencana Covid-19.

## **2. Daya saing ekonomi daerah**

Pertumbuhan ekonomi menjelaskan berbagai dampak dari kebijakan dan aktivitas ekonomi oleh masyarakat dan pelaku usaha. Di lain pihak, pertumbuhan

ekonomi juga memberi dampak lanjutan terutama pada tingkat kesejahteraan masyarakat.

Pertumbuhan ekonomi merupakan pertumbuhan Produk Domestik Regional bruto (PDRB) Atas Dasar Harga Konstan. Tercatat pada tahun 2020 perekonomian Kabupaten Konawe Utara turun menjadi -0,72%, pertumbuhan ini turun signifikan dibandingkan pertumbuhan ekonomi pada tahun 2019 sebesar 6,44 %. Hal ini terjadi karena pandemi Covid-19 yang melanda dunia, sehingga menyebabkan perekonomian nasional terkontraksi menjadi -2,07 dan Provinsi Sulawesi Tenggara sebesar -0,65 %.

Jika ditilik menurut lapangan usaha, sektor pertanian, kehutanan, perikanan yang merupakan sektor dengan peranan terbesar dalam PDRB Kabupaten Konawe Utara sebesar 39,75 persen sekaligus menjadi sektor unggulan daerah tetapi pertumbuhannya mengalami penurunan, tahun 2019 tumbuh 5,21 persen dan -1,20 persen pada tahun 2020. Sektor – sektor yang mengalami pertumbuhan positif pada tahun 2020 di masa pandemi Covid-19 yaitu sektor informasi dan komunikasi mengalami sebesar 11,08, jasa keuangan dan asuransi 6,61 persen, jasa kesehatan dan kegiatan sosial 9,88 persen, jasa pendidikan 6,82 persen, pengadaan listrik dan gas 5,57 persen dan pengadaan air, pengolahan sampah, limbah, dan daur ulang sebesar 4,24 persen.

Dari dilihat aspek ketenagakerjaan, dimana jumlah penduduk Kabupaten Konawe Utara tahun 2020 sebanyak 67.871 jiwa dengan jumlah penduduk usia produktif 44.982 (66,28 persen), dari penduduk usia produktif tersebut sebanyak 74,45 % merupakan Angkatan Kerja, selanjutnya dari angkatan kerja sebanyak 3,79 persen adalah Pengangguran. Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) di Kabupaten Konawe Utara mengalami penurunan 0,13 persen dari tahun 2019 sebesar 3,92 persen dan tahun 2018 sebesar 3,59 persen.

Sebanyak 42,99 persen penduduk yang bekerja di Sektor Pertanian, Kehutanan, Kelautan dan berdasarkan tingkat pendidikan, para pekerja di Kabupaten Konawe Utara masih banyak yang memiliki pendidikan SD ke bawah yaitu sekitar 35,38 persen. Berbagai lapangan kerja juga masih banyak dipenuhi oleh SDM dari luar Kabupaten Konawe Utara karena tidak mampu dipenuhi oleh SDM lokal. Kondisi ini mencerminkan kualitas tenaga kerja di wilayah Kabupaten Konawe Utara relatif masih rendah. Dengan demikian, dalam 5 tahun kedepan harus dilakukan upaya

peningkatan produktivitas sektor-sektor yang mampu menyerap tenaga kerja relatif lebih tinggi dan sesuai dengan kondisi masyarakat Kabupaten Konawe Utara.

Pertumbuhan ekonomi yang lambat dan penurunan angka pengangguran terbuka di Kabupaten Konawe Utara, belum mampu menurunkan kemiskinan dengan signifikan yang cenderung menurun dalam tiga tahun terakhir. Tercatat angka kemiskinan di tahun 2020 sebesar 13,53 persen atau menurun dari 13,66 persen di tahun 2019.

Adanya stagnasi pertumbuhan sektor pertanian dan kegiatan ekonomi lainnya di daerah perdesaan menyebabkan penurunan kemiskinan tergolong lambat. Tersedianya lapangan kerja seharusnya mengurangi kemiskinan. Namun, kalau sekarang ini, ada lapangan kerja, tetapi masyarakat tetap miskin. Hal ini menjadi permasalahan pokok di Kabupaten Konawe Utara yang harus dituntaskan dalam 5 tahun mendatang.

Tingginya kemiskinan di Konawe Utara menyebabkan orientasi untuk bekerja berubah. Penduduk rela bekerja tanpa dibayar asalkan tempat tinggal dan makan minum setiap hari terjamin. Mereka juga rela dibayar murah karena jenis lapangan kerja terbatas. Dengan demikian, berarti kemiskinan harus ditekan dulu dengan penciptaan lapangan kerja berkualitas.

Agar lapangan kerja berkualitas di Konawe Utara dibutuhkan investasi, sedikitnya investasi menjadi salah satu akar masalah kemiskinan di Kabupaten Konawe Utara. Investasi penting untuk menambah lapangan kerja berkualitas, yang akhirnya bisa menekan kemiskinan. Untuk itu kedepan harus bisa meningkatkan investasi di daerah. Investasi yang ditarik mesti berbasis keunggulan daerah. Konawe Utara memiliki potensi pertanian dan perikanan melalui pengembangan agroindustri. Investasi untuk memaksimalkan potensi itu dan menciptakan nilai tambah akan menjadikan perekonomian daerah unggul. Berbagai variabel yang dapat mengilustrasikan isu ini antara lain:

- Peningkatan iklim investasi daerah
- Menumbuhkan dan mengembangkan kewirausahaan Usaha Mikro untuk menanggulangi kemiskinan dan pengangguran.
- Peningkatan produktifitas pertanian, perkebunan dan perikanan melalui peningkatan kualitas benih akan menjadi prioritas, pemanfaatan teknologi, dan penciptaan inovasi bidang pertanian perkebunan dan perikanan.

- Mengembangkan nilai tambah (*value added*) melalui agroindustri komoditas unggulan yang mampu berdaya saing dan berkelanjutan.
- Mengembangkan sistem distribusi dan pemasaran produk lokal berbasis online yang terintegrasi antara produsen, lembaga keuangan dan konsumen.
- Penguatan ketahanan pangan melalui manajemen stok yang baik dan diversifikasi produk olahan sub sector pertanian antara lain perikanan.
- Peningkatan performa BUMD sebagai badan usaha profit yang juga dapat memberikan support bagi ekonomi masyarakat.
- Pengembangan pariwisata yang mampu menjadi pendorong dan penggerak bagi bertumbuhkembangnya ekonomi lokal dan UMKM.

### **3. Infrastruktur wilayah dan sarana prasarana kawasan permukiman**

Pengembangan infrastruktur merupakan salah satu faktor kunci keberhasilan pembangunan secara keseluruhan. Hal ini mengingat dampaknya yang hampir memengaruhi indikator kunci keberhasilan pembangunan dasar, baik pendidikan, kesehatan, maupun ekonomi.

Pembangunan infrastruktur berkualitas dengan kapasitas yang memadai dan merata merupakan faktor penting untuk mendorong konektivitas antar wilayah sehingga dapat mempercepat dan memperluas pembangunan ekonomi. Dibutuhkan jaringan infrastruktur yang efektif guna meningkatkan keterkaitan sektor primer berbasis pertanian dengan sektor industri pendukungnya melalui kluster dan pengembangan kawasan berdasarkan potensi dan unggulan komoditas daerah.

Kualitas dan kapasitas infrastruktur yang memadai akan memperlancar konektivitas, menurunkan biaya transportasi dan biaya logistik sehingga dapat meningkatkan daya saing produk dan mempercepat laju pertumbuhan ekonomi. Belum terpenuhinya infrastruktur (jalan, jembatan, pelabuhan, air bersih, kelistrikan, telekomunikasi) secara merata. Selain itu, sebab utama lainnya adalah kualitas infrastruktur yang belum memadai dimana terlihat minimnya kemantapan jalan kabupaten sebesar 84,03 persen pada tahun 2020.

Dalam pengelolaan jaringan irigasi sebagai infrastruktur pengembangan pertanian, tolok ukur keberhasilan pengelolaan adalah efisiensi dan efektifitas. Tolok ukur efisiensi dapat diwakili dengan cakupan daerah irigasi (DI) yang terlayani air irigasi sementara tolok ukur efektifitas diwakili oleh capaian saluran irigasi dalam

kondisi baik. Sampai dengan Tahun 2020, di wilayah Kabupaten Konawe Utara terdapat 22 Daerah Irigasi (DI) dengan total luas 3.941 Ha. Kondisi jaringan irigasi primer dalam kondisi baik tahun 2020 adalah 66,79% (7.698,26 m), sedangkan irigasi sekunder sebesar 69,65% (1.453,39).

Dari sisi transportasi, bahwa rasio panjang jalan terhadap luas wilayah di Kabupaten Konawe Utara masih kecil dan masih jauh di bawah rasio rata-rata provinsi dan nasional. Selain itu, akses jalan di wilayah pedalaman belum berkondisi mantap, bahkan banyak jalan yang terputus oleh alur sungai maupun karena rusak parah sehingga sulit untuk dilalui. Sarana transportasi umum juga belum berkembang baik dari jumlah armada angkutan darat maupun pemanfaatan terminal angkutan darat yang belum optimal. Jumlah angkutan darat yang ada di Kabupaten konawe utara hanya berjumlah 216 unit. Hal ini menyebabkan terbatasnya akses ke pusat-pusat produksi dan belum optimalnya pemasaran ke pusat-pusat distribusi. Berbagai variabel yang dapat mengilustrasikan isu ini antara lain:

- Percepatan pengembangan jaringan jalan sesuai dengan Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Konawe Utara dan RDTR Kawasan Perkotaan Wanggudu.
- Pemantapan infrastruktur pendukung kualitas permukiman, jalan, kegiatan ekonomi, pariwisata, Industri, perdagangan dan Jasa.
- Pengembangan sarana transportasi orang dan transportasi barang.
- Peningkatan jaringan komunikasi dan teknologi informasi untuk memfasilitasi seluruh aktivitas pemerintahan dan aktivitas sosial ekonomi.
- Pengembangan sistem sanitasi yang terintegrasi untuk mewujudkan 100% terlayani sistem sanitasi.
- Penyediaan sarana prasarana umum (RTH, Landmark, Tempat Olah Raga, Balai Pertemuan, Tempat Ibadah, Pemakaman, dll) yang berkualitas dan merata.
- Pengembangan jaringan air bersih dan manajemen pengelolaan air yang baik.

#### **4. Perbaiki tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik**

Terdapat empat elemen penting penyelenggaraan tata kelola pemerintahan yang baik, meliputi: *accountability*, *transparancy*, *predictability*, dan *participation*. Tanpa empat elemen tersebut, sulit sekali untuk menjamin bahwa pembangunan daerah diselenggarakan dengan efektif dan efisien. Mencermati kinerja “tata kelola pemerintahan yang baik” di lingkungan Pemerintahan Kabupaten Konawe Utara yang

belum terwujud, beberapa faktor penyebabnya dapat diidentifikasi antara lain: belum optimalnya pelaksanaan Reformasi Birokrasi pada 8 area perubahan dimana capaian pada tahun 2020 indeks Reformasi Birokrasi baru mencapai 50,08 (CC), belum terwujudnya penyelenggaraan pemerintahan yang profesional, kompeten, bersih, dan bebas KKN; pelayanan publik yang belum prima; serta akuntabilitas kinerja yang belum memuaskan.

Reformasi birokrasi masih menjadi isu strategis nasional dan daerah. Beberapa hal yang menjadi penyebab belum terlaksananya reformasi birokrasi secara optimal adalah profesional aparatur belum mencapai standar yang ditentukan, kompetensi ASN masih perlu ditingkatkan, untuk itu hal - hal yang perlu dilaksanakan antara lain :

- Pengelolaan Pemerintahan yang Transparan, Bersih, dan Efektif.
- Menyederhanakan birokrasi, meningkatkan kemudahan dan kecepatan layanan publik berbasis Teknologi Informasi dan Komunikasi menuju Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)
- Pengembangan kualitas ASN secara merit sistem.
- Pemantapan sistem informasi pemerintahan daerah yang transparan.

## **5. Kualitas lingkungan hidup dan mitigasi bencana alam**

Mengingat Kabupaten Konawe Utara adalah daerah dengan Indeks Resiko Bencana tinggi yaitu 172,4 (tinggi/zona merah), maka penyelesaian isu lingkungan berkaitan dengan masalah bencana banjir, pencemaran lingkungan serta menjalankan keterpaduan kegiatan pasca tambang dengan konservasi lingkungan harus menjadi perhatian dalam pembangunan lima tahun ke depan. Berbagai variabel yang dapat mengilustrasikan isu ini antara lain:

- Menumbuhkan kesadaran masyarakat akan pentingnya menjaga lingkungan.
- Pengurangan kerentanan bencana alam.
- Menyediakan dan mengembangkan sarana prasarana penanganan bencana.
- Melatih dan mendorong kesadaran masyarakat untuk tanggap pencegahan dan mitigasi bencana.

## **6. Pembangunan kebudayaan dan kehidupan keagamaan masyarakat**

Kabupaten Konawe Utara merupakan daerah majemuk yang memiliki khazanah budaya yang kaya dan melimpah bersumber dari nilai, tradisi, adat istiadat, kearifan lokal, seni, dan bahasa yang tumbuh dan berkembang di tengah masyarakat. Kekayaan budaya tersebut tidak cukup hanya untuk dilestarikan, tapi juga perlu dikembangkan dan dimanfaatkan. Namun demikian belum optimalnya pengembangan kebudayaan sehingga menyebabkan masyarakat dan pelaku budaya belum sepenuhnya merasakan manfaat dari kekayaan budaya yang dimiliki Kabupaten Konawe Utara. Hal ini tercermin dari masih terbatasnya event budaya yang dilaksanakan di Kabupaten Konawe Utara, dikarenakan belum optimalnya peran pemerintah dalam pembinaan di satu sisi, dan di sisi lainnya, dukungan para budayawan dan seniman.

Untuk meningkatkan peran kebudayaan dalam pembangunan perlu dilakukan upaya pemajuan kebudayaan dengan membangun kapasitas kelembagaan masyarakat adat yang berkelanjutan (Lembaga Adat Tolaki, Lembaga Adat Bajo, Lembaga Adat Landawe, Lembaga Adat Culambatu, Lembaga Adat Muna Buton, Lembaga Adat Bugis - Makassar, Lembaga Adat Toraja, Lembaga Adat Jawa dan Sunda, Lembaga Adat Bali dan Lembaga Adat Flobamora) agar siap dipromosikan melalui pengembangan event budaya. Melalui pemajuan kebudayaan, diharapkan kekayaan budaya dapat menjadi kekuatan penggerak dan modal dasar pembangunan daerah di Kabupaten Konawe Utara.

Para pemangku budaya dan seni harus bersinergi agar kekayaan budaya khas Konawe Utara dapat dilestarikan dan dimanfaatkan sehingga dapat meningkatkan daya tarik Kabupaten Konawe Utara, khususnya dengan sektor pariwisata. Dengan penguatan seni budaya serta dikolaborasikan dengan sektor lainnya maka dapat dimanfaatkan bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Selanjutnya dalam kerangka pembangunan daerah, agama dapat menjadi landasan spiritual, moral dan etika dalam kehidupan bermasyarakat Sesuai Sila Pertama Pancasila, Ketuhanan Yang Maha Esa, para pendiri bangsa menempatkan nilai agama sebagai landasan moralitas. Nilai-nilai agama dapat ditransformasikan untuk membentuk insan yang beriman dan bertakwa, berakhlak mulia, berkepribadian luhur, dan bermanfaat bagi diri dan lingkungannya.

# BAB V

## VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN PEMBANGUNAN



## 5.1 Visi

Visi Kabupaten Konawe Utara harus menemukan relevansi dalam upaya meningkatkan pembangunan dan penyelenggaraan pemerintahan daerah yang akuntabel. Visi pembangunan menjadi penting untuk menyatukan cita dan cipta bersama seluruh pemangku kepentingan dalam pencapaian pembangunan daerah sesuai dengan rumusan permasalahan pembangunan dan isu strategis yang dihadapi oleh Kabupaten Konawe Utara. Visi juga dibangun sebagai usaha bersama seluruh pemangku kepentingan untuk menyamakan dan menyelaraskan pandangan tentang apa yang ingin dicapai dalam satu periode pembangunan.

Visi pembangunan daerah dalam RPJMD adalah visi Bupati dan Wakil Bupati terpilih yang disampaikan pada saat pemilihan kepala daerah (Pilkada Serentak Tahun 2020). Visi menggambarkan arah pembangunan atau kondisi masa depan daerah yang ingin dicapai dalam kurun waktu 5 (lima) tahun. Visi pembangunan jangka menengah yang akan diwujudkan dalam RPJMD Kabupaten Konawe Utara Tahun 2021-2026 adalah:



**“KONWE UTARA LEBIH SEJAHTERA & BERDAYA SAING”**

Visi RPJMD Kabupaten Konawe Utara Tahun 2021 - 2026 terdiri dari 2 (tiga) frase yaitu:

### 1. Lebih Sejahtera

RPJMD Kabupaten Konawe Utara tahun 2021-2026 ini merupakan akhir periode dari Bapak Dr. Ir. H. Ruksamin, ST, M.Si, IPU, ASEAN.Eng sebagai Bupati Konawe Utara. Untuk itu refleksi dari spirit visi pembangunan daerah pada kurun waktu tahun sebelumnya (2016 - 2021) yang hendak dilanjutkan dan disempurnakan pada kurun waktu 5 (lima) tahun ke depan yang didampingi oleh Bapak H. Abuhaera, S.Sos, M.Si sebagai Wakil Bupati Konawe Utara. Oleh karena itu, pemaknaan lebih sejahtera menjadi penting untuk diperhatikan.

Daerah sejahtera dalam kerangka pembangunan adalah daerah yang menunjukkan kemakmuran, mampu memenuhi kebutuhan dasar masyarakat (lahir dan batin) secara adil dan merata. Daerah sejahtera menekankan peningkatan pertumbuhan dan pemerataan ekonomi berkelanjutan, peningkatan pendapatan perkapita yang tinggi dan terus bertumbuh, serta memberikan kesempatan seluas-luasnya untuk bekerja dan berusaha, penurunan angka kemiskinan, peningkatan kualitas sumber daya manusia, peningkatan akses masyarakat terhadap pelayanan dasar, peningkatan perlindungan dan kesejahteraan sosial, peningkatan kesejahteraan pekerja, peningkatan partisipasi pemuda dan prestasi olah raga, serta peningkatan peranan perempuan dalam pembangunan. Seluruh aspek - aspek tersebut dibangun diatas pondasi nilai - nilai keagamaan dan kebudayaan lokal, dengan kondisi yang lebih sejahtera ini, diharapkan akan terpenuhi seluruh kebutuhan sosial dasar bagi seluruh warga Konawe Utara, sehingga hidup secara bermartabat

## **2. Berdaya Saing**

Berdaya saing dapat dimaknai sebagai kemampuan dan kekuatan untuk bersaing dengan daerah lain dengan memanfaatkan keunggulan komparatif dan kompetitif yang dimiliki Kabupaten Konawe Utara. Berdaya saing secara rinci mengandung dua makna sebagaimana yaitu :

- Kemampuan daerah dalam mengelola aset dan proses, daya tarik dan agresivitas pada sektor ekonomi, sosial dan budaya untuk menciptakan nilai tambah dalam rangka menambah kekayaan daerah guna mensejahterakan masyarakat.
- Kemampuan daerah dalam mengembangkan lingkungan yang produktif bagi bisnis dan inovasi yang berkelanjutan.

## **5.2 Misi**

Misi adalah rumusan umum yang akan menjadi pemandu tugas bersama antara pemerintah daerah dan masyarakat untuk mewujudkan visi. Perumusan misi RPJMD Kabupaten Konawe Utara tahun 2021-2026 dilakukan dengan memperhatikan permasalahan daerah dan isu-isu strategis pembangunan jangka menengah dan keselarasannya dengan misi RPJPD Kabupaten Konawe Utara tahun 2012-2032, RPJMN Tahun 2020-2024, dan RPJMD Provinsi Sulawesi Tenggara tahun

2018-2023. Berdasarkan visi di atas, maka dirumuskan 6 (enam) Misi Pembangunan Kabupaten Konawe Utara Tahun 2021-2026 sebagai berikut:



1. Meningkatkan kualitas dan daya saing sumberdaya manusia;
2. Meningkatkan ketersediaan infrastruktur dasar dan sarana prasarana kawasan permukiman;
3. Mewujudkan keadilan sosial dan nilai tambah dalam pengelolaan sumberdaya alam guna meningkatkan daya saing ekonomi;
4. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang akuntabel, mendorong reformasi birokrasi, dan pelayanan publik yang prima;
5. Meningkatkan kualitas lingkungan hidup dan ketahanan bencana; dan
6. Membangun peradaban masyarakat yang bertumpu pada nilai - nilai keagamaan dan kebudayaan lokal.

Maksud pelaksanaan misi tersebut adalah sebagai berikut :

**1. Meningkatkan kualitas dan daya saing sumberdaya manusia**

Untuk mencapai Kabupaten Konawe Utara yang lebih sejahtera dan berdaya saing, maka salah satu hal yang harus diupayakan adalah meningkatkan kualitas sumberdaya manusia. Saat ini hampir disemua tatanan masyarakat sedang dihadapkan pada isu perubahan yang dinamikanya semakin tinggi sebagai akibat dari pengaruh kemajuan teknologi informasi. Oleh karena itu, Pemerintah Kabupaten Konawe Utara bersama dengan masyarakat perlu membangun sumber daya manusia yang berkualitas, memiliki kompetensi dan produktivitas yang tinggi, menguasai kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi, memiliki derajat kesehatan yang tinggi, optimalnya pengarusutamaan gender, pengarusutamaan hak anak, serta masyarakat yang memiliki pendapatan per kapita yang merata.

**2. Meningkatkan ketersediaan infrastruktur dasar dan sarana prasarana kawasan permukiman**

Keterbatasan dan kualitas infrastruktur yang belum memadai menjadi problem daya saing di Kabupaten Konawe Utara dalam rangka mendukung perekonomian daerah dan peningkatan investasi. Misi ini diarahkan untuk pemenuhan infrastruktur dasar yang berkualitas guna mendukung pertumbuhan dan kelancaran perekonomian masyarakat dengan memperhatikan daya dukung dan daya tampung lingkungan, serta antisipasi bencana yang mengancam keberadaan sumber daya potensial dan strategis.

Hal ini diwujudkan melalui pembangunan jalan untuk menghubungkan sentra-sentra produksi dan kawasan pertumbuhan ekonomi menuju pusat pemasaran. Dalam rangka meningkatkan daya saing Kabupaten Konawe Utara juga perlu dilakukan pembangunan dermaga, pengembangan pelabuhan Molawe dan Tinobu, serta peningkatan sarana dan prasarana telekomunikasi di seluruh kecamatan.

Sebagai upaya pemenuhan Standar Pelayanan Minimal bidang Pekerjaan Umum maka pemenuhan kecukupan layanan air minum, air baku dan air limbah menjadi perhatian khusus dalam 5 tahun kedepan, penyediaan sarana prasarana kawasan permukiman dan permukiman kumuh, optimalnya pelayanan persampahan perkotaan. Selanjutnya peningkatan jaringan irigasi serta infrastruktur pertanian dilaksanakan peningkatan kualitas dan kapasitas pengelolaan sumber daya air,

### **3. Mewujudkan keadilan sosial dan nilai tambah dalam pengelolaan sumberdaya alam guna meningkatkan daya saing ekonomi**

Kabupaten Konawe Utara adalah kabupaten di Provinsi Sulawesi Tenggara yang memiliki potensi sumberdaya alam yang cukup besar guna menopang perekonomian daerah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Oleh karena itu, misi ini meletakkan konsep pondasinya pada pengelolaan potensi sumberdaya alam dalam menumbuhkan nilai tambah perekonomian daerah melalui peningkatan produksi dan industrialisasi sektor - sektor unggulan. Dalam kondisi ideal, diharapkan akan mampu menumbuhkan tingkat perekonomian masyarakat yang dapat dilihat dari pertumbuhan ekonomi daerah dan PDRB perkapita masyarakat. Adapun sasaran misi ini adalah perekonomian yang ditopang dari berbagai upaya seperti peningkatan investasi, pengembangan

industri pertambangan, peningkatan sarana prasarana perdagangan, peningkatan nilai modal usaha KUMKM, peningkatan produksi pertanian dan perkebunan, peningkatan nilai produksi perikanan, dan juga pembangunan bidang pariwisata. Upaya tersebut diharapkan dapat meningkatkan perluasan lapangan kerja mengurangi kemiskinan dan pengangguran.

**4. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang akuntabel, mendorong reformasi birokrasi, dan pelayanan publik yang prima**

Misi ini bertujuan untuk meningkatkan tata kelola pemerintahan yang efektif dan efisien, sehingga akan berdampak pada peningkatan indeks reformasi birokrasi yang kemudian dapat diandalkan dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat. Kondisi ini dapat akan dapat dilihat dari optimalnya implementasi sistem pemerintahan berbasis elektronik, meningkatnya kualitas pelayanan publik, meningkatnya kualitas manajemen ASN, meningkatnya akuntabilitas kinerja pemerintahan, meningkatnya akuntabilitas pengelolaan keuangan, dan meningkatnya penerapan zona integritas pada Organisasi Perangkat Daerah.

**5. Meningkatkan kualitas lingkungan hidup dan ketahanan bencana**

Aktivitas pembangunan dan pengelolaan sumberdaya alam yang sesuai dengan daya dukung dan daya tampung lingkungan menjadi sangat penting. Berdasarkan kejadian bencana banjir besar pada tahun 2019, maka penyelenggaraan penataan ruang dengan pola-pola adaptasi pengurangan resiko bencana menjadi sebuah keharusan. Misi ini dimaksudkan sebagai rangkaian peningkatan kualitas kesiapsiagaan teknis dan manajemen pencegahan, penanggulangan dan pemulihan bencana alam dan bencana sosial, serta penyelamatan, pelestarian, perlindungan dan konservasi lingkungan untuk mewujudkan prinsip-prinsip pembangunan berkelanjutan (sustainable development) dalam konteks pengelolaan sumberdaya alam di Konawe Utara.

Beberapa upaya yang harus dilakukan bermuara meningkatnya Indeks Kualitas Lingkungan dan menurunnya Indeks Resiko bencana. Dalam rangka mewujudkan kualitas lingkungan yang baik, pemerintah daerah harus mulai menumbuhkan kesadaran semua pihak akan pentingnya menjaga lingkungan dan sadar bencana.

## **6. Membangun peradaban masyarakat yang bertumpu pada nilai - nilai keagamaan dan kebudayaan lokal**

Dengan melihat keragaman budaya dan kearifan lokal di Kabupaten Konawe Utara, maka Pemerintah Daerah bersama masyarakat mengemban misi untuk melestarikan budaya dan kearifan lokal tersebut. Dalam praktiknya misi ini akan mendorong peningkatan intensitas event budaya yang diselenggarakan, baik oleh pemerintah daerah ataupun oleh masyarakat.

Kemudian untuk misi mengembangkan tata kehidupan yang berakhlaqul karimah nantinya akan diimplementasikan guna untuk mencapai tujuan berupa mewujudkan kehidupan masyarakat yang dilandasi nilai-nilai kerukunan beragama.

Misi RPJMD Kabupaten Konawe Utara memiliki keselarasan dengan : Sasaran Pokok RPJPD Kabupaten Konawe Utara 2012-2032; Misi dan 7 Agenda Pembangunan RPJMN tahun 2020-2024, dan Misi RPJMD Provinsi Sulawesi Tenggara tahun 2018-2023 sebagai berikut:

**Tabel 5.1**  
**Keterkaitan Misi RPJMD Kabupaten Konawe Utara Tahun 2021-2026**  
**dengan Sasaran Pokok RPJPD Kabupaten Konawe Utara Tahun 2012-2032,**  
**Misi dan 7 Agenda Pembangunan RPJMN Tahun 2020-2024,**  
**dan RPJMD Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun 2018-2023**

| Nomor Sasaran Pokok Pada RPJPD  | Misi RPJMN 2020-2024                             | 7 Agenda RPJMN 2020-2024   | RPJMD Prov. Sultra Tahun 2018-2023   | Misi RPJMD Kabupaten Konawe Utara 2021-2026                        |
|---|--|--|--|--|
| <p>3. Tersedianya sumberdaya manusia yang berkualitas serta mampu memenuhi tuntutan kebutuhan dan kemajuan pembangunan</p> <p>8. Terwujudnya pembangunan bidang kependudukan yang lebih terencana</p> <p>15. Tersedianya akses pelayanan sosial bagi masyarakat miskin</p> <p>16. Tidak adanya diskriminasi dalam pembangunan</p> <p>18. Terwujudnya kesejahteraan sosial</p> | <p>1. Peningkatan kualitas manusia Indonesia</p> | <p>- Meningkatkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing</p> | <p>1. Meningkatkan kualitas hidup masyarakat agar dapat berdaulat dan aman dalam bidang ekonomi, pangan, pendidikan, kesehatan, lingkungan, politik, serta iman dan taqwa.</p> | <p>1. Meningkatkan kualitas dan daya saing sumberdaya manusia.</p> |

| Nomor Sasaran Pokok Pada RPJPD  | Misi RPJMN 2020-2024  | 7 Agenda RPJMN 2020-2024  | RPJMD Prov. Sultra Tahun 2018-2023   | Misi RPJMD Kabupaten Konawe Utara 2021-2026   |
|---|---|---|--|---|
| <p>5. Tersedianya fasilitas wilayah/infrastruktur daerah</p> <p>12. Terciptanya pemerataan pembangunan infrastruktur di seluruh wilayah kecamatan dan kelurahan/desa</p>  | <p>4. Mencapai lingkungan hidup yang berkelanjutan</p>  | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Memperkuat infrastruktur untuk mendukung pengembangan ekonomi dan pelayanan dasar</li> </ul>   | <p>4. Meningkatkan konektivitas dan kemitraan antar pemerintah, swasta dan masyarakat dalam rangka peningkatan daya saing daerah melalui pembangunan dan perbaikan infrastruktur dan aspek-aspek sosial ekonomi.</p> | <p>2. Meningkatkan ketersediaan infrastruktur dasar dan sarana prasarana kawasan permukiman.</p>                              |
| <p>4. Kemampuan ekonomi daerah yang semakin tinggi</p> <p>6. Terwujudnya iklim berinvestasi yang kondusif</p> <p>9. Terwujudnya pembangunan ekonomi yang berbasis kerakyatan dengan mengedepankan keunggulan kompetitif</p> | <p>2. Struktur ekonomi yang produktif, mandiri, dan berdaya saing</p> <p>3. Pembangunan yang merata dan berkeadilan</p> | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan yang Berkualitas dan Berkeadilan</li> <li>- Mengembangkan Wilayah untuk Mengurangi Kesenjangan dan Menjamin Pemerataan</li> </ul> | <p>3. Memajukan daya saing wilayah melalui penguatan ekonomi lokal dan peningkatan investasi.</p>  | <p>3. Mewujudkan keadilan sosial dan nilai tambah dalam pengelolaan sumberdaya alam guna meningkatkan daya saing ekonomi.</p> |

| Nomor Sasaran Pokok Pada RPJPD   | Misi RPJMN 2020-2024   | 7 Agenda RPJMN 2020-2024   | RPJMD Prov. Sultra Tahun 2018-2023   | Misi RPJMD Kabupaten Konawe Utara 2021-2026  |
|--|--|--|--|--|
| 17. Terwujudnya kesejahteraan ekonomi  |  |  |  |  |
| 10. Terwujudnya pembangunan sistem kelembagaan yang efektif dan efisien<br>14. Terciptanya kesempatan yang sama dalam berusaha | 6. Penegakkan sistem hukum yang bebas korupsi, bermartabat, dan terpercaya<br>7. Perlindungan bagi segenap bangsa dan memberikan rasa aman pada seluruh warga<br>8. Pengelolaan pemerintahan yang bersih, efektif, dan terpercaya<br>9. Sinergi pemerintah daerah dalam kerangka negara kesatuan | - Memperkuat stabilitas Polhukhankam dan transformasi pelayanan publik           | 2. Mendorong birokrasi pemerintahan provinsi yang modern, tata kelola pemerintahan desa yang baik ( <i>good village governance</i> ) serta memberikan bantuan kepada kecamatan dan kelurahan sebagai pusat pelayanan pemerintahan. | 4. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang akuntabel, mendorong reformasi birokrasi, dan pelayanan publik yang prima. |
| 11. Terwujudnya Pengelolaan Lingkungan Hidup Yang Berkualitas  | 4. Mencapai lingkungan hidup yang berkelanjutan  | - Membangun lingkungan hidup, meningkatkan ketahanan bencana dan perubahan iklim | 1. Meningkatkan kualitas hidup masyarakat agar dapat berdaulat dan aman dalam bidang ekonomi, pangan, pendidikan,  | 5. Meningkatkan kualitas lingkungan hidup dan ketahanan bencana.   |

| Nomor Sasaran Pokok Pada RPJPD  | Misi RPJMN 2020-2024   | 7 Agenda RPJMN 2020-2024                            | RPJMD Prov. Sultra Tahun 2018-2023  | Misi RPJMD Kabupaten Konawe Utara 2021-2026   |
|---|--|---|---|---|
| <p>1. Terwujudnya karakter masyarakat Kabupaten Konawe Utara yang tangguh, berakhlak mulia, bermoral berdasarkan falsafah Pancasila</p> <p>2. Makin mantapnya budaya lokal yang tercermin dengan meningkatnya pemahaman dan implementasi nilai-nilai budaya</p> <p>7. Terwujudnya pembangunan bidang sosial yang lebih berkualitas</p> <p>13. Berkurangnya kesenjangan sosial</p> | <p>5. Kemajuan budaya yang mencerminkan kepribadian bangsa</p> | <p>- Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan</p> | <p>kesehatan, lingkungan, politik, serta iman dan taqwa.</p> <p>1. Meningkatkan kualitas hidup masyarakat agar dapat berdaulat dan aman dalam bidang ekonomi, pangan, pendidikan, kesehatan, lingkungan, politik, serta iman dan taqwa.</p> | <p>6. Membangun peradaban masyarakat yang bertumpu pada nilai-nilai keagamaan dan kebudayaan lokal.</p> |

Sumber : Bappeda Kab. Konawe Utara, 2021

### 5.3 Tujuan dan Sasaran Pembangunan

Tujuan dan sasaran merupakan arahan bagi pelaksanaan setiap urusan pemerintahan daerah dalam mendukung pelaksanaan misi. Tujuan merupakan dampak (impact) keberhasilan pembangunan daerah yang diperoleh dari pencapaian berbagai Program Perangkat Daerah terkait. Selaras dengan penggunaan paradigma penganggaran berbasis kinerja maka perencanaan pembangunan daerah pun menggunakan prinsip yang sama. Rencana pembangunan daerah lebih ditekankan pada target kinerja, baik pada dampak, hasil, maupun keluaran dari suatu kegiatan, program, dan sasaran. Perumusan tujuan dari visi dan misi Bupati dan Wakil Bupati terpilih juga menjadi landasan perumusan visi, misi, tujuan dan sasaran Renstra Perangkat Daerah untuk periode 5 (lima) tahun.

Tujuan adalah pernyataan-pernyataan tentang hal-hal yang perlu dilakukan untuk mencapai visi, melaksanakan misi dengan menjawab isu strategis daerah dan permasalahan pembangunan daerah. Sedangkan sasaran adalah hasil yang diharapkan dari suatu tujuan yang diformulasikan secara terukur, spesifik, mudah dicapai, rasional, untuk dapat dilaksanakan dalam jangka waktu 5 (lima) tahun kedepan.

Penjabaran tujuan dan sasaran RPJMD Kabupaten Konawe Utara Tahun 2021-2026 yang akan dicapai pada masing-masing misi tercantum pada tabel berikut ini.

**Tabel 5.2 Tujuan dan Sasaran RPJMD Kabupaten Konawe Utara Tahun 2021 - 2026**

Visi : **KON**awe Utar**A** Lebih **SejahterA** dan **BeR**daya **SA**ing

| No. | Misi RPJMD  | Tujuan RPJMD                             | Sasaran RPJMD  | Indikator Tujuan/Sasaran           | Satuan   | Kondisi Awal |         | Target Kinerja |         |        |        |        |
|-----|---|--|--|------------------------------------|----------|--------------|---------|----------------|---------|--------|--------|--------|
|     |   |  |  |                                    |          | 2020         | 2021    | 2022           | 2023    | 2024   | 2025   | 2026   |
| 1.  | Meningkatkan kualitas dan daya saing sumberdaya manusia | Meningkatkan kualitas sumberdaya manusia |  | Indeks Pembangunan Manusia (IPM)   | Indeks   | 69,86        | 70,266  | 70,672         | 71,078  | 71,484 | 71,890 | 72,296 |
|     |   |  | Meningkatnya akses pendidikan                                      | Rata - Rata Lama Sekolah           | Tahun    | 9,21         | 9,40    | 9,60           | 9,79    | 9,99   | 10,18  | 10,37  |
|     |   |  |  | Harapan Lama Sekolah               | Tahun    | 12,83        | 13,07   | 13,30          | 13,54   | 13,77  | 14,01  | 14,25  |
|     |   |  | Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat                          | Angka Usia Harapan Hidup           | Tahun    | 69,51        | 70,09   | 70,67          | 71,26   | 71,84  | 72,42  | 73,00  |
|     |   |  | Meningkatnya kualitas hidup perempuan dan pengarusutamaan hak anak | Indeks Pembangunan Gender (IPG)    | Indeks   | 86,17        | 86,41   | 86,66          | 86,90   | 87,14  | 87,39  | 87,63  |
|     |   |  |  | Kota Layak Anak                    | Kategori | Pratama      | Pratama | Pratama        | Pratama | Madya  | Madya  | Madya  |
|     |   |  | Meningkatnya Sumberdaya Manusia Yang Kompeten dan Produktif        | Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja | Persen   | 74,45        | 75,15   | 75,84          | 76,54   | 77,24  | 77,93  | 78,63  |
|     |   |  | Meningkatnya ketahanan pangan                                      | Skor Pola Pangan Harapan           | Skor     | 79,60        | 80,52   | 81,53          | 82,56   | 83,56  | 84,58  | 85,58  |
|     |   |  | Meningkatnya penanganan  | Persentase Penurunan               | Persen   | 13,53        | 12,87   | 12,21          | 11,55   | 10,23  | 9,57   | 9,57   |

| No. | Misi RPJMD  | Tujuan RPJMD   | Sasaran RPJMD                                     | Indikator Tujuan/<br>Sasaran   | Satuan | Kondisi Awal |       | Target Kinerja |       |       |       |       |
|-----|---|--|---|--|--------|--------------|-------|----------------|-------|-------|-------|-------|
|     |   |  |   |  |        | 2020         | 2021  | 2022           | 2023  | 2024  | 2025  | 2026  |
|     |   |  | masalah kesejahteraan sosial                      | Warga Miskin (DTKS/Data Terpadu Kesejahteraan Sosial)                |        |              |       |                |       |       |       |       |
| 2.  | Meningkatkan ketersediaan infrastruktur dasar dan sarana prasarana kawasan permukiman | Meningkatkan kualitas infrastruktur wilayah dan kawasan permukiman |   | Persentase Keterhubungan /Konektivitas Wilayah                       | Persen | 85,15        | 85,84 | 86,53          | 87,22 | 87,91 | 88,60 | 89,29 |
|     |   |  | Meningkatnya kapasitas infrastruktur wilayah      | Proporsi Panjang Jalan dan Jembatan Dalam Kondisi Mantap             | Persen | 84,03        | 84,81 | 85,58          | 86,36 | 87,13 | 87,91 | 88,68 |
|     |   |  |   | Persentase Daerah Irigasi (DI) Yang Terlayani Jaringan Irigasi       | Persen | 67,23        | 67,79 | 68,35          | 68,91 | 69,47 | 70,03 | 70,59 |
|     |   |  | Terpenuhinya sarana parasarana kawasan permukiman | Persentase kawasan permukiman (Perkotaan/Perdesaan) yang tidak kumuh | Persen | 78,45        | 81,58 | 84,72          | 87,85 | 90,99 | 94,12 | 97,26 |
|     |   |  |   | Rasio Akses Air Minum perpipaan layak                                | Persen | 48,33        | 56,86 | 59,20          | 61,54 | 63,88 | 66,22 | 68,79 |
|     |   |  |   | Rasio Akses Sanitasi Layak   | Persen | 36,31        | 39,28 | 54,28          | 56,62 | 58,96 | 61,30 | 63,64 |
|     |   |  |   | Cakupan  | Persen | 15,38        | 18,63 | 21,88          | 25,13 | 28,38 | 31,63 | 34,88 |

| No. | Misi RPJMD   | Tujuan RPJMD                                    | Sasaran RPJMD  | Indikator Tujuan/<br>Sasaran                               | Satuan              | Kondisi Awal |        | Target Kinerja |        |        |        |        |
|-----|--|---|--|--|---------------------|--------------|--------|----------------|--------|--------|--------|--------|
|     |  |   |  |  |                     | 2020         | 2021   | 2022           | 2023   | 2024   | 2025   | 2026   |
|     |  |   |  | layanan persampahan  |                     |              |        |                |        |        |        |        |
| 3.  | Mewujudkan keadilan sosial dan nilai tambah dalam pengelolaan sumberdaya alam guna meningkatkan daya saing ekonomi | Meningkatkan pertumbuhan dan daya saing ekonomi |  | Pertumbuhan Ekonomi  | Persen              | -0,72        | 4,90   | 5,24           | 5,58   | 5,91   | 6,25   | 6,59   |
|     |  |   |  | PDRB Perkapita   | Rp. Juta/Jiwa/Tahun | 60.847       | 61.177 | 61.508         | 61.838 | 62.169 | 62.500 | 62.830 |
|     |  |   |  | Tingkat Pengangguran Terbuka                               | Persen              | 3,79         | 3,75   | 3,70           | 3,66   | 3,62   | 3,58   | 3,53   |
|     |  |   |  | Indeks Gini  | Indeks              | 0,388        | 0,384  | 0,380          | 0,376  | 0,372  | 0,368  | 0,364  |
|     |  |   |  | Tingkat Kemiskinan   | Persen              | 13,53        | 13,40  | 13,27          | 13,14  | 13,01  | 12,88  | 12,75  |
|     |  |   | Meningkatnya pertumbuhan sektor - sektor unggulan daerah | Pertumbuhan PDRB Sektor Pertanian, Kehutanan dan Perikanan | Persen              | 39,75        | 39,89  | 40,03          | 40,16  | 40,30  | 40,44  | 40,58  |
|     |  |   |  | Pertumbuhan PDRB Sektor Pertambangan dan Pengalihan        | Persen              | 21,24        | 21,29  | 21,34          | 21,39  | 21,44  | 21,49  | 21,54  |
|     |  |   |  | Pertumbuhan PDRB Sektor Perdagangan                        | Persen              | 11,78        | 11,80  | 11,82          | 11,85  | 11,87  | 11,89  | 11,91  |
|     |  |   |  | Pertumbuhan PDRB Sektor Industri                           | Persen              | 1,13         | 1,14   | 1,15           | 1,15   | 1,16   | 1,17   | 1,18   |

| No. | Misi RPJMD   | Tujuan RPJMD  | Sasaran RPJMD  | Indikator Tujuan/Sasaran           | Satuan   | Kondisi Awal |         | Target Kinerja |         |         |         |         |
|-----|--|---|--|------------------------------------|----------|--------------|---------|----------------|---------|---------|---------|---------|
|     |  |   |  |                                    |          | 2020         | 2021    | 2022           | 2023    | 2024    | 2025    | 2026    |
|     |  |   |  | Pengolahan                         |          |              |         |                |         |         |         |         |
|     |  |   |  | Persentase PAD Sektor Pariwisata   | Persen   | 0,03         | 0,04    | 0,05           | 0,06    | 0,07    | 0,08    | 0,09    |
|     |  |   |  | Nilai Omset Usaha Koperasi         | Rp. Ribu | 705.375      | 741.587 | 777.799        | 814.011 | 850.223 | 886.435 | 922.647 |
|     |  |   | Meningkatnya investasi daerah  | Pertumbuhan Investasi PMDN dan PMA | Persen   | 11,86        | 13,49   | 15,12          | 16,74   | 18,37   | 20,00   | 21,63   |
| 4.  | Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang akuntabel, mendorong reformasi birokrasi, dan pelayanan publik yang prima | Meningkatkan kualitas tata kelola pemerintahan yang efektif dan efisien |  | Indeks Reformasi Birokrasi         | Indeks   | 50,08        | 50,24   | 50,40          | 50,57   | 50,73   | 50,89   | 51,05   |
|     |  |   | Meningkatnya akuntabilitas kinerja pemerintahan dan pengelolaan keuangan daerah                          | Nilai SAKIP                        | Kategori | B            | B       | BB             | BB      | BB      | BB      | BB      |
|     |  |   |  | Opini BPK                          | Kategori | WTP          | WTP     | WTP            | WTP     | WTP     | WTP     | WTP     |
|     |  |   | Terwujudnya birokrasi yang kapabel, optimalnya implementasi SPBE, serta pelayanan publik yang terpercaya | Indeks Maturitas Kelembagaan       | Level    | 1            | 1       | 2              | 3       | 3       | 3       | 3       |

| No. | Misi RPJMD   | Tujuan RPJMD                           | Sasaran RPJMD  | Indikator Tujuan/<br>Sasaran                                 | Satuan | Kondisi Awal |        | Target Kinerja |        |        |        |        |
|-----|--|--|--|--|--------|--------------|--------|----------------|--------|--------|--------|--------|
|     |  |  |  |  |        | 2020         | 2021   | 2022           | 2023   | 2024   | 2025   | 2026   |
|     |  |  |  | Indeks SPBE (Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)) | Indeks | 1,3          | 1,38   | 1,46           | 1,54   | 1,62   | 1,70   | 1,78   |
|     |  |  |  | Indeks Kepuasan Masyarakat                                   | Indeks | 3,34         | 3,41   | 3,48           | 3,55   | 3,62   | 3,69   | 3,76   |
|     |  |  | Meningkatnya kualitas manajemen ASN                                | Indeks Merit Sistem  | Indeks | 162          | 177    | 192            | 207    | 222    | 237    | 252    |
|     |  |  | Meningkatnya kapasitas pemerintahan desa                           | Indeks Desa Membangun  | Indeks | 0,5855       | 0,5946 | 0,6037         | 0,6128 | 0,6218 | 0,6309 | 0,6400 |
| 5.  | Meningkatkan kualitas lingkungan hidup dan ketahanan bencana | Meningkatkan kualitas lingkungan hidup |  | Indeks Kualitas Lingkungan Hidup                             | Indeks | 58,84        | 59,67  | 60,50          | 61,33  | 62,16  | 62,99  | 63,82  |
|     |  |  | Terjaganya kualitas pemanfaatan dan pengendalian pemanfaatan ruang | Persentase Ketaatan Terhadap Perencanaan Tata Ruang          | Persen | 80           | 80,49  | 80,98          | 81,47  | 81,96  | 82,45  | 82,94  |
|     |  |  | Menurunnya tingkat pencemaran air dan udara                        | Indeks Kualitas Air dan Udara                                | Indeks | 92,58        | 93,32  | 94,06          | 94,80  | 95,54  | 96,28  | 97,02  |
|     |  |  | Terwujudnya tata kelola dan manajemen                              | Indeks Resiko Bencana  | Indeks | 172,4        | 170,71 | 169,02         | 167,33 | 165,64 | 163,95 | 162,26 |

| No. | Misi RPJMD   | Tujuan RPJMD  | Sasaran RPJMD  | Indikator Tujuan/<br>Sasaran                  | Satuan | Target Kinerja |       |       |       |       |       |       |
|-----|--|---|--|---|--------|----------------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
|     |  |   |  |   |        | Kondisi Awal   | 2020  | 2021  | 2022  | 2023  | 2024  | 2025  |
|     |  |   | bencana  |   |        |                |       |       |       |       |       |       |
| 6.  | Membangun peradaban masyarakat yang bertumpu pada nilai - nilai keagamaan dan kebudayaan lokal | Melestarikan seni budaya lokal  |  | Persentase Kapasitas Lembaga Adat Yang Dibina | Persen | 100            | 100   | 100   | 100   | 100   | 100   | 100   |
|     |  |   | Meningkatnya intensitas event seni budaya yang diselenggarakan | Jumlah penyelenggaraan event seni budaya      | Nilai  | 0              | 1     | 2     | 3     | 4     | 5     | 5     |
|     |  | Mewujudkan kehidupan masyarakat yang dilandasi nilai - nilai kerukunan beragama |  | Indeks kerukunan beragama                     | Indeks | 73,92          | 74,29 | 74,66 | 75,03 | 75,40 | 75,77 | 76,14 |
|     |  |   |  | Persentase Pengelolaan Potensi Konflik Sosial | Persen | 100            | 100   | 100   | 100   | 100   | 100   | 100   |

Sumber : Bappeda Kab. Konawe Utara, 2021

Selanjutnya, untuk menjelaskan kerangka logis keterhubungan kebijakan daerah dan perangkat daerah, sasaran dipisahkan menjadi sasaran yang terkait dengan pencapaian visi dan misi Bupati dan Wakil Bupati dan sasaran yang tidak secara langsung terkait dengan pencapaian visi dan misi tetapi secara langsung menjadi prioritas perangkat daerah. Selanjutnya sasaran secara spesifik pembangunan daerah terangkai menjadi sebagai arsitektur kinerja 'impact' yang saling terhubung. Dengan demikian, indikator tujuan pembangunan merupakan representasi langsung keberhasilan pencapaian pembangunan daerah pada akhir periode Bupati dan Wakil Bupati Konawe Utara pada tahun 2024. Berikut ini disajikan tabel keterkaitan kinerja daerah dan perangkat daerah Kabupaten Konawe Utara.

**Tabel 5.3 Keterkaitan Indikator Kinerja Utama (IKU) Kepala Daerah dan Perangkat Daerah Kabupaten Konawe Utara Tahun 2021-2026**

| Tujuan   | Indikator Tujuan                 | Sasaran  | Indikator Sasaran                  | IKU Renstra  | OPD              |
|--|----------------------------------|--|------------------------------------|--|------------------|
| <b>Mis 1 : Meningkatkan kualitas dan daya saing sumberdaya manusia</b> |                                  |  |                                    |  |                  |
| Meningkatkan kualitas sumberdaya manusia                               | Indeks Pembangunan Manusia (IPM) | Meningkatnya akses pendidikan                                      | Rata - Rata Lama Sekolah           | Angka Melek Huruf, Angka Partisipasi Kasar, Angka Kelulusan, Angka Partisipasi Sekolah, Tenaga Pendidik dan Kependidikan, Jumlah Guru Yang Bersertifikat   | Dinas P & K      |
|  |                                  |  | Harapan Lama Sekolah               |  | Dinas P & K      |
|  |                                  | Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat                          | Angka Usia Harapan Hidup           | Angka Kematian Bayi / 1000 kelahiran hidup, Angka Kematian Ibu / 100.000 kelahiran hidup, Rasio Puskesmas per satuan penduduk x 1.000, Tingkat Penggunaan Tempat Tidur, Rasio Dokter / 100.000 Penduduk, Rasio Bidan / 100.000 Penduduk, Rasio Perawat / 100.000 Penduduk, Prevalensi Balita Gizi Buruk, Prevalensi Kasus Suntung, Prevalensi Tuberkulosis (TB) / 100.000 Penduduk | Dinkes, RSUD     |
|  |                                  | Meningkatnya kualitas hidup perempuan dan pengarusutamaan hak anak | Indeks Pembangunan Gender (IPG)    | Persentase Perempuan yang menduduki jabatan publik, Jumlah Korban Kekerasan Perempuan yang ditindak lanjuti, Jumlah Korban Kekerasan Anak yang ditindak lanjuti  | DPPPA            |
|  |                                  |  | Kota Layak Anak                    |  | DPPPA            |
|  |                                  |  |                                    | Jumlah Peserta KB Aktif, Persentase Keluarga Sejahtera, Cakupan PUS Unmeetneed   | DPPKB            |
|  |                                  | Meningkatnya Sumberdaya Manusia Yang Kompeten dan Produktif        | Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja | Besaran Pencari Kerja Yang ditempatkan, Jumlah Tenaga Kerja yang mendapat Pelatihan berbasis Kompetensi, Jumlah Penyelesaian Kasus Hubungan Industrial   | Disnaker         |
|  |                                  | Meningkatnya ketahanan   | Skor Pola Pangan Harapan           | Ketersediaan Energi dan Protein Perkapita, Tingkat Penguatan   | Ketahanan Pangan |

| Tujuan   | Indikator Tujuan  | Sasaran  | Indikator Sasaran  | IKU Renstra  | OPD  |
|--|---|--|--|--|--|
|  |   | pangan   |  | Cadangan Pangan  |  |
|  |   | Meningkatnya penanganan masalah kesejahteraan sosial     | Persentase Penurunan Warga Miskin (DTKS/Data Terpadu Kesejahteraan Sosial) | Persentase PPKS Yang memperoleh bantuan sosial, Persentase Korban Bencana Yang Menerima Bantuan Sosial Selama Masa Tanggap Darurat   | Dinsos   |
|  |   |  |  | Tingkat Waktu Tanggap (respon time rate) daerah WMK, Jumlah Desa Tangguh Bencana   | Dinsos, BPBD, Damkar                                     |
| <b>Misi 2 : Meningkatkan ketersediaan infrastruktur dasar dan sarana prasarana kawasan permukiman</b>                              |   |  |  |  |  |
| Meningkatkan kualitas infrastruktur wilayah dan Kawasan Permukiman   | Indeks Layanan Infrastruktur (Ketersediaan, Aksesibilitas, Keterjangkauan, Keberlanjutan) | Meningkatnya kapasitas infrastruktur wilayah             | Proporsi Panjang Jalan dan Jembatan Dalam Kondisi Mantap                   | Panjang Jalan Dalam Kondisi Mantap<br>Persentase Ketersediaan Fasilitas Perlengkapan Jalan (Rambu, Marka, APIL, Guadrail, Delinator, dll) yang berfungsi baik, Persentase Penurunan Angka Kecelakaan Lalu Lintas | Dinas PUPR<br>Dinas Perhubungan                          |
|  |   |  | Persentase Daerah Irigasi (DI) Yang Terlayani Jaringan Irigasi             | Luas Daerah Irigasi dalam kondisi baik   | Dinas PUPR   |
|  |   | Terpenuhinya sarana parasarana kawasan permukiman        | Persentase kawasan permukiman (Perkotaan/Perdesaan) yang tidak kumuh       | Luas Kawasan Permukiman Kumuh Yang ditangani, Jumlah rumah layak huni  | Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman                   |
|  |   |  | Rasio Akses Air Minum  | Rumah Tangga Pengguna Air Bersih Perpipaan   | Dinas PUPR   |
|  |   |  | Rasio Akses Sanitasi Layak   | Penduduk Berakses Sanitasi Yang Layak  | Dinas PUPR   |
|  |   |  | Cakupan layanan persampahan  | Jumlah sarana prasarana pelayanan persampahan  | DLH  |
| <b>Misi 3 : Mewujudkan keadilan sosial dan nilai tambah dalam pengelolaan sumberdaya alam guna meningkatkan daya saing ekonomi</b> |   |  |  |  |  |
| Meningkatkan pertumbuhan dan daya saing ekonomi  | Pertumbuhan Ekonomi   | Meningkatnya pertumbuhan sektor - sektor unggulan daerah | Pertumbuhan PDRB Sektor Pertanian, Kehutanan dan Perikanan                 | Produktivitas Tanaman Pertanian, Produktisi Tanaman Perkebunan, Produksi Tanaman Hortikultura, Jumlah Produksi Peternakan (Daging dan Telur), Produktivitas perikanan tangkap, Produktivitas perikanan budidaya  | Dinas Tanaman Pangan & Peternakan, Dinas Perkebunan, DKP |
|  | PDRB Perkapita  |  |  | Produktivitas Tanaman Pertanian, Produksi Tanaman Perkebunan, Produksi Tanaman Hortikultura, Jumlah Produksi Peternakan (Daging dan Telur), Produktivitas perikanan tangkap, Produktivitas perikanan budidaya    | Dinas Tanaman Pangan & Peternakan, Dinas Perkebunan, DKP |
|  | Tingkat Pengangguran Terbuka  |  | Pertumbuhan PDRB Sektor Pertambangan dan Penggalian                        | Persentase IUI dan IUKI efektif  | Dinas Perindustrian dan Perdagangan, Bapenda, DPMPTSP    |
|  | Tingkat Kemiskinan  |  | Pertumbuhan PDRB Sektor Perdagangan  | Kontribusi Sektor Perdagangan, Jumlah Omset yang dihasilkan dari Usaha Sektor Perdagangan, Persentase Pasar Sehat, Persentase Peningkatan Pelaku Usaha Perdagangan   | Dinas Perindustrian dan Perdagangan                      |
|  | Indeks Gini   |  | Pertumbuhan PDRB Sektor Industri Pengolahan                                | Jumlah Omset yang dihasilkan dari Usaha Sektor Perindustrian   | Dinas Perindustrian dan                                  |

| Tujuan   | Indikator Tujuan           | Sasaran   | Indikator Sasaran   | IKU Renstra  | OPD                |
|--|----------------------------|---|---|--|--------------------|
|  |                            |   |   |  | Perdagangan        |
|  |                            |   | Persentase PAD Sektor Pariwisata                            | Jumlah Kunjungan wisata, Lama Kunjungan Wisata   | Dinas Pariwisata   |
|  |                            |   | Nilai Omset Usaha Koperasi                                  | Persentase koperasi aktif, Jumlah UMKM yang dibina   | Diskop & UMKM      |
|  |                            | Meningkatnya investasi daerah   | Pertumbuhan Investasi PMDN dan PMA                          | Lama Proses Perizinan, Jumlah nilai investasi PMA/PMDN   | DPMPTSP            |
| <b>Misi 4 : Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang akuntabel, mendorong reformasi birokrasi, dan pelayanan publik yang prima</b> |                            |   |   |  |                    |
| Meningkatkan kualitas tata kelola pemerintahan yang efektif dan efisien  | Indeks Reformasi Birokrasi | Meningkatnya akuntabilitas kinerja pemerintahan dan pengelolaan keuangan daerah                                       | Nilai SAKIP   | Jumlah Sarana dan Prasarana Keagamaan Yang Dibangun/Rehabilitasi, Persentase penyerapan anggaran pembangunan dan realisasinya, Nilai dan status kinerja Pemerintah Daerah ( Nilai EKPPD ),   | Setda              |
|  |                            |   | Opini BPK   | Penetapan APBD dan APBDP Tepat Waktu, Ketepatan Waktu Penyusunan, Persentase Aset Pemda Yang Terinventarisir   | BPKAD              |
|  |                            |   |   | Persentase Sinergitas Perencanaan, Persentase Keterukuran Indikator Perencanaan, Persentase Konsistensi Pelaksanaan Pembangunan, Persentase Tingkat Partisipatif Perencanaan, Persentase OPD Yang Pencapaian Kinerja Sesuai Target, Persentase implementasi rencana kelitbangan, Persentase sistem data dan statistik yang terintegrasi. | Bappeda            |
|  |                            |   |   | Persentase Kenaikan Pendapatan Daerah, Tingkat kemandirian keuangan daerah (Rasio PAD dibandingkan Pendapatan Daerah)  | Dinas Pendapatan   |
|  |                            | Terwujudnya birokrasi yang kapabel, Optimalnya implementasi SPBE, serta meningkatnya pelayanan publik yang terpercaya | Indeks Maturitas Kelembagaan                                | Tingkat leveling kapabilitas Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP), Persentase penyelesaian tindak lanjut temuan hasil pemeriksaan BPK  | Inspektorat        |
|  |                            |   | Indeks SPBE (Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) | Jumlah Penerapan SPBE, Persentase Pengelolaan Layanan Pengaduan Berbasis Online Yang didistribusikan ke OPD, Jumlah sarana persandian  | Diskominfo         |
|  |                            |   | Indeks Kepuasan Masyarakat                                  | Pertumbuhan Pengunjung Perpustakaan Daerah   | Dinas Perpustakaan |
|  |                            |   |   | Persentase Arsip Statis dan Dinamis Yang Diarsipkan  | Dinas Perpustakaan |
|  |                            |   |   | Kepemilikan dokumen kependudukan Berbasis Elektronik, Persentase Kepemilikan dokumen Pencatatan Sipil Berbasis Elektronik, OPD Yang Memanfaatkan Data Kependudukan   | Disdukcapil        |
|  |                            |   |   | Persentase Peraturan Daerah Yang Dihasilkan  | Sekwan             |
|  |                            |   |   | Jumlah Organisasi Kepemudaan yang dibina, Jumlah Cabang Olahraga Yang Berprestasi  | Dikpora            |
|  |                            |   |   | Angka Kriminalitas, Persentase Partisipasi Politik Pemilih Pada  | Satpol, Kesbangpol |

| Tujuan   | Indikator Tujuan                         | Sasaran  | Indikator Sasaran                                   | IKU Renstra   | OPD                        |
|--|--|--|---|---|----------------------------|
|  |  |  |   | Pemilihan Umum, Persentase Penduduk/Etnis/Suku/Agama/Ormas Yang Memahami Nilai-Nilai Kehidupan Politik dan Berbangsa,   |                            |
|  |  |  |   | Jumlah Penerapan SPBE, Survei Kepuasan Masyarakat   | Diskominfo, DPMPSTP, Setda |
|  |  | Meningkatnya kualitas manajemen ASN                                | Indeks Merit Sistem                                 | Persentase Penempatan Pegawai Sesuai Kompetensi, Persentase Peningkatan Kualitas SDM Aparatur   | BKPSDM                     |
|  |  | Meningkatnya kapasitas pemerintahan desa                           | Indeks Desa Membangun                               | Jumlah Desa Berkembang, Persentase 1(satu) BUMDes dalam 1(satu) Desa Yang Aktif, Persentase Penyampaian RKPDes, APBDes, dan Laporan Keuangan Desa Tepat Waktu dan Sesuai Peraturan Bupati | BPMD dan Pemdes            |
| <b>Misi 5 : Meningkatkan kualitas lingkungan hidup dan ketahanan bencana</b>                                   |  |  |   |   |                            |
| Meningkatkan kualitas lingkungan hidup   | Indeks Kualitas Lingkungan Hidup         | Terjaganya kualitas pemanfaatan dan pengendalian pemanfaatan ruang | Persentase Ketaatan Terhadap Perencanaan Tata Ruang | Persentase Ketaatan Terhadap Rencana Tata Ruang Wilayah   | PUPR                       |
|  |  | Menurunnya tingkat pencemaran air dan udara                        | Indeks Kualitas Air dan Udara                       | Kualitas Air (penetapan kelas air), Kualitas Udara (penetapan kelas udara), Kualitas Tutupan Lahan, Persentase Usaha yang memilah B3 dan Limbah B3, Cakupan Wilayah Pelayanan Persampahan | DLH                        |
|  |  | Terwujudnya tata kelola dan manajemen bencana                      | Indeks Resiko Bencana                               | Jumlah Desa Tangguh Bencana   | BPBD, PUPR, Damkar         |
| <b>Misi 6 : Membangun peradaban masyarakat yang bertumpu pada nilai - nilai keagamaan dan kebudayaan lokal</b> |  |  |   |   |                            |
| Melestarikan seni budaya lokal   | Persentase seni budaya yang dilestarikan | Meningkatnya intensitas event seni budaya yang diselenggarakan     | Jumlah penyelenggaraan event seni budaya            | Persentase Kesenian dan Budaya Lokal yang dilestarikan, Jumlah Lembaga adat Yang dibina, Persentase Pengembangan Kurikulum Muatan Lokal penunjang proses pendidikan                       | Dinas P & K                |
| Mewujudkan kehidupan masyarakat yang dilandasi nilai - nilai kerukunan beragama                                | Indeks kerukunan beragama                | Meningkatnya pengelolaan potensi konflik sosial                    | Persentase Pengelolaan Potensi Konflik Sosial       | Penanganan Potensi Konflik tidak menjadi konflik  | Kesbangpol                 |

Sumber : Bappeda Kab. Konawe Utara, 2021

# BAB VI

## STRATEGI, ARAH KEBIJAKAN, DAN PROGRAM PEMBANGUNAN



## 6.1 STRATEGI

Dalam rangka pencapaian visi dan misi yang diuraikan dalam tujuan dan sasaran, dirumuskan strategi dan arah kebijakan pembangunan daerah. Sebagai salah satu rujukan penting dalam perencanaan pembangunan daerah, rumusan strategi akan mengimplementasikan bagaimana sasaran pembangunan akan dicapai dengan serangkaian arah kebijakan. Strategi akan diturunkan kedalam sejumlah arah kebijakan dan program pembangunan operasional dari upaya-upaya nyata dalam mewujudkan visi pembangunan daerah. Strategi pembangunan jangka menengah daerah RPJMD Kabupaten Konawe Utara tahun 2021- 2026 dapat dilihat pada tabel berikut ini.

**Tabel 6.1**  
**Strategi Pembangunan Jangka Menengah Daerah**  
**Kabupaten Konawe Utara Tahun 2021-2026**

| Misi/Tujuan   | Sasaran  | Strategi   |
|---|--|--|
| <b>Misi 1 : Meningkatkan kualitas dan daya saing sumberdaya manusia</b> |  |  |
| Meningkatkan kualitas sumberdaya manusia                                | Meningkatnya akses pendidikan                                      | Peningkatan partisipasi pendidikan dan peningkatan kualitas pengelolaan pendidikan melalui pendidikan karakter, peningkatan motivasi belajar, pemberian bantuan beasiswa bagi peserta didik, beasiswa Konasara bagi perguruan tinggi, peningkatan sarana prasarana sekolah serta bahan ajar, peningkatan kualitas dan pemerataan tenaga pengajar sesuai dengan kebutuhan wilayah |
|   | Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat                          | Peningkatan pelayanan kesehatan (promotif, preventif, kuratif, rehabilitatif), penerapan hidup bersih dan sehat, pengendalian penyakit dan perbaikan status gizi masyarakat, serta perluasan jaminan kesehatan   |
|   | Meningkatnya kualitas hidup perempuan dan pengarusutamaan hak anak | Peningkatan kualitas hidup melalui pemberdayaan perempuan, pengarusutamaan gender dalam pembangunan, perlindungan perempuan,   |

| Misi/Tujuan  | Sasaran   | Strategi   |
|--|---|--|
|  |   | pengarustamaan hak anak, serta meningkatkan pengendalian penduduk melalui intensifikasi program KB   |
|  | Meningkatnya Sumberdaya Manusia Yang Kompeten dan Produktif | Memperluas kesempatan kerja, pelatihan tenaga kerja, penyediaan lapangan kerja, perlindungan dan pengawasan ketenagakerjaan  |
|  | Meningkatnya ketahanan pangan                               | Penyediaan pangan yang baik dengan harga yang terjangkau dalam rangka meningkatkan kualitas konsumsi pangan  |
|  | Meningkatnya penanganan masalah kesejahteraan sosial        | Penurunan angka kemiskinan melalui program - program penanggulangan kemiskinan bagi warga miskin   |
| <b>Misi 2 : Meningkatkan ketersediaan infrastruktur dasar dan sarana prasarana kawasan permukiman</b>                              |   |  |
| Meningkatkan kualitas infrastruktur wilayah  | Meningkatnya kapasitas infrastruktur wilayah                | Peningkatan kualitas infrastruktur jalan, jembatan, drainase, dan irigasi melalui pengembangan jaringan, pembangunan dan rehabilitasi  |
|  |   | Penyediaan sarana prasarana perhubungan  |
|  |   | Percepatan pembangunan sarana prasarana kawasan perkotaan Wanggudu   |
|  | Terpenuhinya sarana parasarana kawasan permukiman           | Penurunan angka backlog rumah dan penurunan luas kawasan kumuh melalui peningkatan kualitas rumah layak huni dan jalan lingkungan permukiman, serta pembangunan dan rebailitasi rumah korban bencana |
|  |   | Peningkatan cakupan dan kualitas layanan air bersih, air limbah domestik, dan persampahan  |
| <b>Misi 3 : Mewujudkan keadilan sosial dan nilai tambah dalam pengelolaan sumberdaya alam guna meningkatkan daya saing ekonomi</b> |   |  |
| Meningkatkan pertumbuhan dan daya saing ekonomi  | Meningkatnya pertumbuhan sektor - sektor unggulan daerah    | Peningkatan produksi dan produktivitas pertanian melalui penyediaan bibit, sarana dan prasarana pertanian, kapasitas petani/kelompok tani, dan bantuan permodalan                                    |

| Misi/Tujuan  | Sasaran   | Strategi   |
|--|---|--|
|  |   | Pengembangan perternakan melalui penyediaan sarana prasarana, pemanfaatan teknologi, dan peningkatan kesehatan hewan   |
|  |   | Meningkatkan produktivitas perikanan melalui pembinaan nelayan tangkap dan budidaya, penyediaan sarana prasarana, dan pengembangan pola kemitraan  |
|  |   | Meningkatkan kinerja ekspor dan perdagangan dalam negeri melalui peningkatan kualitas pasar, pengawasan, promosi dan pemasaran produk - produk unggulan  |
|  |   | Pengembangan kapasitas koperasi dan UMKM   |
|  |   | Mendorong pengembangan industri dan kawasan industri sesuai dengan potensi daerah  |
|  |   | Peningkatan kunjungan wisata melalui pengembangan atraksi serta peningkatan destinasi wisata baru  |
|  | Meningkatnya investasi daerah   | Peningkatan layanan perizinan, penyediaan informasi potensi dan peluang investasi, memberikan kepastian hukum dan jaminan keamanan, serta peningkatan kapasitas Perusahaan Daerah guna mendorong investasi berkualitas dengan melibatkan pengusaha-pengusaha lokal |
| <b>Misi 4 : Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang akuntabel, mendorong reformasi birokrasi, dan pelayanan publik yang prima</b> |   |  |
| Meningkatkan kualitas tata kelola pemerintahan yang efektif dan efisien  | Meningkatnya akuntabilitas kinerja pemerintahan dan pengelolaan keuangan daerah | Implementasi reformasi birokrasi dan pelayanan publik melalui optimalisasi pencapaian target pada 8 (delapan) area perubahan   |
|  |   | Peningkatan kualitas kebijakan daerah di bidang pemerintahan, kesejahteraan rakyat, hukum, pembangunan dan penyelenggaraan administrasi umum melalui koordinasi,   |

| Misi/Tujuan | Sasaran  | Strategi   |
|-------------|--|--|
|             |  | pemantauan dan evaluasi serta pemusan rekomendasi kebijakan kepala daerah  |
|             |  | Peningkatan kualitas perencanaan pembangunan daerah melalui peningkatan kapasitas SDM perencana, sinkronisasi kebijakan pusat dan daerah, perbaikan mekanisme SIPD serta optimaslisasi pengendalian dan evaluasi rencana pembangunan       |
|             |  | Peningkatan kualitas pengelolaan keuangan daerah dan aset melalui peningkatan kapasitas SDM, pengendalian belanja dan dana transfer, sinkronisasi perencanaan dan penganggaran, pengelolaan pembiayaan, pemanfaatan dan inventarisasi aset |
|             |  | Peningkatan pelayanan, pendaftaran, penetapan, dan penagihan sumber-sumber PAD   |
|             | Terwujudnya birokrasi yang kapabel dan optimalnya implementasi SPBE, serta meningkatnya pelayanan publik yang terpercaya | Optimalisasi pengawasan intern, melalui peningkatan SDM APIP yang berkualitas dan peningkatan sistem pengawasan yang efektif   |
|             |  | Pengembangan sarana prasarana e-government untuk menunjang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik dan pelayanan publik  |
|             |  | Peningkatan implementasi Satu Data yang didukung teknologi informasi yang andal  |
|             |  | Meningkatkan kepemilikan dokumen administrasi kependudukan dan catatan sipil melalui peningkatan kesadaran masyarakat dan perbaikan kualitas layanan administrasi kependudukan   |
|             |  | Meningkatkan kunjungan perpustakaan dan pengelolaan kearsipan melalui pengembangan sarana prasarana kearsipan  |

| Misi/Tujuan  | Sasaran  | Strategi   |
|--|--|--|
|  |  | Peningkatan kualitas pelayanan sekretariat DPRD dengan memfasilitasi kegiatan-kegiatan DPRD dan penyaluran aspirasi masyarakat   |
|  |  | Meningkatkan kualitas penyelenggaraan pemerintahan umum di tingkat kecamatan   |
|  |  | Meningkatkan partisipasi pemuda dan prestasi olahraga melalui peningkatan sarana prasarana dan pembinaan organisasi kepemudaan   |
|  |  | Meningkatkan kondusivitas daerah, penegakan Perda dan peningkatan SDM  |
|  |  | Meningkatkan kinerja unit pelayanan informasi publik melalui penerapan SOP dan peningkatan SDM   |
|  | Meningkatnya kualitas manajemen ASN                                | Meningkatkan profesionalisme Aparatur Sipil Negara (ASN) melalui penerapan Sistem Merit dan pengembangan jabatan fungsional  |
|  | Meningkatnya kapasitas pemerintahan desa                           | Peningkatan kualitas aparatur pemerintahan desa, pengembangan BUMDes, dan pengembangan usaha ekonomi produktif masyarakat desa   |
| <b>Misi 5 : Meningkatkan kualitas lingkungan hidup dan ketahanan bencana</b> |  |  |
| Meningkatkan kualitas lingkungan hidup                                       | Terjaganya kualitas pemanfaatan dan pengendalian pemanfaatan ruang | Percepatan penetapan peraturan tentang rencana tata ruang penataan ruang dan meningkatkan pengendalian pemanfaatan ruang   |
|  | Menurunnya tingkat pencemaran air dan udara                        | Meningkatkan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup melalui pemantauan kualitas air, tanah dan udara, serta tertib hukum lingkungan   |
|  | Terwujudnya tata kelola dan manajemen bencana                      | Meningkatkan ketahanan daerah dalam menghadapi bencana melalui pengurangan resiko bencana untuk ketangguhan (mitigasi, kesiapsiagaan, pra bencana), manajemen kedaruratan, dan manajemen pemulihan |

| Misi/Tujuan  | Sasaran  | Strategi  |
|--|--|---|
| <b>Misi 6 : Membangun peradaban masyarakat yang bertumpu pada nilai - nilai keagamaan dan kebudayaan lokal</b> |  |   |
| Melestarikan seni budaya lokal   | Meningkatnya intensitas event seni budaya yang diselenggarakan | Pelestarian budaya lokal melalui peningkatan event seni budaya dengan pemberdayaan berbasis lembaga-lembaga adat  |
| Mewujudkan kehidupan masyarakat yang dilandasi nilai - nilai kerukunan beragama                                | Meningkatnya pengelolaan potensi konflik sosial                | Meningkatkan pendidikan politik dan wawasan kebangsaan untukantisipasi terhadap potensi konflik sosial di masyarakat  |
|  | Meningkatnya kualitas pelayanan kehidupan beragama             | Pembangunan dan rehabilitasi sarana keagamaan, peningkatan kualitas pemahaman, penghayatan dan pengamalan ajaran agama pada semua jalur, jenis dan jenjang pendidikan, peningkatan upaya menjaga keserasian sosial dalam kelompok keagamaan |

Sumber : Bappeda Kab. Konawe Utara, 2021

## 6.2 ARAH KEBIJAKAN PEMBANGUNAN DAERAH

Arah kebijakan merupakan penjabaran dari strategi pembangunan daerah berupa rumusan kerangka kerja untuk menyelesaikan masalah pembangunan daerah yang dilaksanakan secara bertahap dengan mempertimbangkan urgensi permasalahan dan penekanan yang berbeda tiap tahunnya (tematik) namun tetap berkesinambungan dalam rangka pencapaian tujuan dan sasaran pembangunan guna pelaksanaan misi pembangunan jangka menengah daerah, sebagai berikut :

**Tabel 6.2**  
**Arah Kebijakan Pembangunan Jangka Menengah Daerah**  
**Kabupaten Konawe Utara Tahun 2021-2026**

| Misi/Tujuan   | Sasaran                                   | Strategi   | Arah Kebijakan   |  |  |  |  |  |
|---|---|--|--|--|--|--|--|--|
|   |   |  | 2021   | 2022   | 2023   | 2024   | 2025   | 2026   |
| <b>Misi 1 : Meningkatkan kualitas dan daya saing sumberdaya manusia</b> |   |  |  |  |  |  |  |  |
| Meningkatkan kualitas sumberdaya manusia                                | Meningkatnya akses dan mutu pendidikan    | Peningkatan partisipasi pendidikan dan peningkatan kualitas pengelolaan pendidikan melalui pendidikan karakter, peningkatan motivasi belajar, pemberian bantuan beasiswa bagi peserta didik, beasiswa Konasara bagi perguruan tinggi, peningkatan sarana prasarana sekolah serta bahan ajar, peningkatan kualitas dan pemerataan tenaga pengajar sesuai dengan kebutuhan wilayah | Peningkatan akses pelayanan pendidikan di masa pandemi Covid-19                | Peningkatan akses pendidikan dan tata kelola pelayanan pendidikan di masa pandemi Covid-19 | Peningkatan akses dan mutu pendidikan melalui keterjangkauan biaya pendidikan dan meningkatkan pengetahuan masyarakat melalui literasi | Pemerataan dan peningkatan kompetensi pendidik dan tenaga kependidikan disertai peningkatan sarana prasarana pendidikan dan pengembangan kurikulum lokal dan pendidikan karakter | Peningkatan peran keluarga dan masyarakat dalam penguatan pendidikan karakter dengan tetap meningkatkan kompetensi pendidik dan tenaga kependidikan disertai penguatan sarana prasarana pendidikan | Pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi untuk peningkatan mutu pembelajaran dan percepatan pemerataan kualitas layanan pendidikan |
|   | Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat | Peningkatan pelayanan kesehatan (promotif, preventif, kuratif, rehabilitatif), penerapan hidup bersih dan sehat, pengendalian penyakit dan   | Peningkatan kapasitas sumberdaya dan penguatan tata kelola pelayanan kesehatan | Peningkatan kapasitas sumberdaya dan penguatan tata kelola pelayanan kesehatan             | Penguatan peran serta masyarakat dan keluarga secara aktif dalam peningkatan derajat kesehatan masyarakat                              | Penguatan sarana prasarana dan alat kesehatan pada semua tingkatan pelayanan kesehatan   | Percepatan pencapaian target peningkatan derajat kesehatan masyarakat  | Penataan keberlanjutan program peningkatan derajat kesehatan masyarakat  |

| Misi/Tujuan | Sasaran  | Strategi   | Arah Kebijakan  |   |  |   |   |   |  |
|-------------|--|--|---|---|--|---|---|---|--|
|             |  |  | 2021  | 2022  | 2023   | 2024  | 2025  | 2026  |  |
|             |  | perbaikan status gizi masyarakat, serta perluasan jaminan kesehatan  |   |   |  |   |   |   |  |
|             | Meningkatnya kualitas hidup perempuan dan pengarusutamaan hak anak | Peningkatan kualitas hidup melalui pemberdayaan perempuan, pengarusutamaan gender dalam pembangunan, perlindungan perempuan, pengarusutamaan hak anak, serta meningkatkan pengendalian penduduk melalui intensifikasi program KB | Perumusan rencana aksi daerah PUG dan PUHA  | Pengarusutamaan gender dan pemenuhan hak anak melalui optimalisasi pelaksanaan rencana aksi daerah, serta peningkatan program KB dan kesejahteraan keluarga | Penguatan kebijakan, regulasi dan kelembagaan PUG dan PUHA serta penguatan perencanaan dan penganggaran yang responsif gender dan responsif anak | Penguatan sistem penyediaan, pemutakhiran dan pemanfaatan data pilah gender dan anak serta peningkatan pengetahuan tentang PUG dan PUHA | Peningkatan peran dan partisipasi perempuan dalam pembangunan   | Peningkatan PUG dan PUHA melalui jejaring dan kerjasama antara pemerintah dengan komunitas, lembaga masyarakat, dunia usaha, perguruan tinggi |  |
|             | Meningkatnya Sumberdaya Manusia Yang Kompeten dan Produktif        | Memperluas kesempatan kerja, pelatihan tenaga kerja, penyediaan lapangan kerja, perlindungan dan pengawasan ketenagakerjaan  | Perluasan kesempatan kerja dan penurunan tingkat pengangguran terbuka   | Perluasan kesempatan kerja dan penurunan tingkat pengangguran terbuka   | Perluasan kesempatan kerja dan penurunan tingkat pengangguran terbuka  | Perluasan kesempatan kerja dan penurunan tingkat pengangguran terbuka   | Perluasan kesempatan kerja dan penurunan tingkat pengangguran terbuka   | Perluasan kesempatan kerja dan penurunan tingkat pengangguran terbuka   |  |
|             | Meningkatnya ketahanan pangan                                      | Penyediaan pangan yang baik dengan harga yang terjangkau dalam rangka meningkatkan kualitas konsumsi pangan  | Pemenuhan pangan bagi kelompok masyarakat terutama warga miskin (akibat bencana alam, sosial, ekonomi) melalui pendistribusian bantuan pangan | Peningkatan ketersediaan pangan, pemantapan penanganan kerawanan pangan, stabilisasi pasokan dan harga pangan   | Peningkatan ketersediaan pangan, pemantapan penanganan kerawanan pangan, stabilisasi pasokan dan harga pangan                                    | Peningkatan ketersediaan pangan, pemantapan penanganan kerawanan pangan, stabilisasi pasokan dan harga pangan                           | Peningkatan ketersediaan pangan, pemantapan penanganan kerawanan pangan, stabilisasi pasokan dan harga pangan | Peningkatan ketersediaan pangan, pemantapan penanganan kerawanan pangan, stabilisasi pasokan dan harga pangan                                 |  |

| Misi/Tujuan   | Sasaran  | Strategi  | Arah Kebijakan   |  |  |   |   |   |
|---|--|---|--|--|--|---|---|---|
|   |  |   | 2021   | 2022   | 2023   | 2024  | 2025  | 2026  |
|   | Meningkatnya penanganan masalah kesejahteraan sosial | Penurunan angka kemiskinan melalui program - program penanggulangan kemiskinan bagi warga miskin                                      | Peningkatan kualitas data terpadu kesejahteraan sosial dengan mengoptimalkan peran serta masyarakat serta peningkatan kelembagaan penanggulangan kesejahteraan sosial di semua tingkatan | Peningkatan kualitas data terpadu kesejahteraan sosial dengan mengoptimalkan peran serta masyarakat serta peningkatan kelembagaan penanggulangan kesejahteraan sosial di semua tingkatan | Meningkatkan ketersediaan dan jangkauan pelayanan dasar bagi penduduk miskin melalui kolaborasi pemerintah, masyarakat, perguruan tinggi dan dunia usaha | Penguatan kapasitas dan pembinaan usaha bagi penduduk miskin melalui peningkatan ketrampilan dan kemudahan akses pembiayaan | Mendorong sinkronisasi pelaksanaan kegiatan penanggulangan kemiskinan di daerah dalam perencanaan dan pelaksanaan percepatan penurunan kemiskinan | Penyiapan keberlanjutan sinergitas program penanggulangan kemiskinan dan peran serta masyarakat, perguruan tinggi dan dunia usaha |
| <b>Misi 2 : Meningkatkan ketersediaan infrastruktur dasar dan sarana prasarana kawasan permukiman</b> |  |   |  |  |  |   |   |   |
| Meningkatkan kualitas infrastruktur wilayah   | Meningkatnya kapasitas infrastruktur wilayah         | Peningkatan kualitas infrastruktur jalan, jembatan, drainase, dan irigasi melalui pengembangan jaringan, pembangunan dan rehabilitasi | Pembangunan dan peningkatan jalan/jembatan kewenangan kabupaten dan jalan kawasan strategis  | Pembangunan dan peningkatan jalan/jembatan kewenangan kabupaten dan jalan kawasan strategis  | Pembangunan dan peningkatan jalan/jembatan kewenangan kabupaten dan jalan kawasan strategis  | Pembangunan dan peningkatan jalan/jembatan kewenangan kabupaten dan jalan kawasan strategis                                 | Pembangunan dan peningkatan jalan/jembatan kewenangan kabupaten dan jalan kawasan strategis   | Pembangunan dan peningkatan jalan/jembatan kewenangan kabupaten dan jalan kawasan strategis                                       |
|   |  | Penyediaan sarana prasarana perhubungan   | Peningkatan sarana parasarana lalu lintas jalan dan pelabuhan/dermaga  | Peningkatan sarana parasarana lalu lintas jalan dan pelabuhan/dermaga  | Peningkatan sarana parasarana lalu lintas jalan dan pelabuhan/dermaga  | Peningkatan sarana parasarana lalu lintas jalan dan pelabuhan/dermaga   | Peningkatan sarana parasarana lalu lintas jalan dan pelabuhan/dermaga   | Peningkatan sarana parasarana lalu lintas jalan dan pelabuhan/dermaga   |
|   |  | Percepatan pembangunan sarana prasarana kawasan perkotaan Waggudu   | Penetapan perencanaan pembangunan kawasan perkotaan Waggudu  | Pelaksanaan pembangunan jaringan jalan kawasan perkotaan Waggudu   | Pelaksanaan pembangunan jaringan jalan kawasan perkotaan Waggudu   | Peningkatan kualitas jaringan jalan kawasan perkotaan Waggudu   | Peningkatan kualitas jaringan jalan, dan RTH Kawasan Perkotaan Waggudu  | Peningkatan kualitas jaringan jalan, dan RTH Kawasan Perkotaan Waggudu  |
|   | Terpenuhinya sarana parasarana kawasan permukiman    | Penurunan luas kawasan kumuh melalui peningkatan kualitas rumah layak huni dan jalan lingkungan permukiman, serta pembangunan dan     | Perumusan rencana penanganan, pencegahan, dan peningkatan kualitas kawasan permukiman kumuh yang berkualitas   | Penjaringan stakeholder potensial untuk pembiayaan penanganan kawasan permukiman kumuh   | Pelaksanaan pencegahan dan peningkatan kualitas kawasan permukiman kumuh   | Pelaksanaan pencegahan dan peningkatan kualitas kawasan permukiman kumuh  | Pelaksanaan pencegahan dan peningkatan kualitas kawasan permukiman kumuh  | Pengelolaan kawasan permukiman kumuh yang telah ditangani   |

| Misi/Tujuan  | Sasaran  | Strategi   | Arah Kebijakan  |   |   |   |   |   |
|--|--|--|---|---|---|---|---|---|
|  |  |  | 2021  | 2022  | 2023  | 2024  | 2025  | 2026  |
|  |  | reabilitasi rumah korban bencana   |   |   |   |   |   |   |
|  |  | Peningkatan cakupan dan kualitas layanan air bersih, air limbah domestik, dan persampahan  | Validasi data kondisi dan pelayanan air bersih, air limbah, dan persampahan termasuk aspek kelembagaannya                           | Peningkatan cakupan dan kualitas layanan air bersih, air limbah domestik, dan penanganan persampahan                                | Peningkatan cakupan dan kualitas layanan air bersih, air limbah domestik, dan penanganan persampahan                                | Peningkatan cakupan dan kualitas layanan air bersih, air limbah domestik, dan penanganan persampahan                                | Peningkatan cakupan dan kualitas layanan air bersih, air limbah domestik, dan penanganan persampahan                                | Penguatan kelembagaan pengelolaan air bersih dan persampahan  |
| <b>Misi 3 : Mewujudkan keadilan sosial dan nilai tambah dalam pengelolaan sumberdaya alam guna meningkatkan daya saing ekonomi</b> |  |  |   |   |   |   |   |   |
| Meningkatkan pertumbuhan dan daya saing ekonomi  | Meningkatnya pertumbuhan sektor - sektor unggulan daerah | Peningkatan produksi dan produktivitas pertanian melalui penyediaan bibit, sarana dan prasarana pertanian, kapasitas petani/keompok tani, dan bantuan permodalan | Peningkatan pengelolaan sektor ekonomi unggulan daerah melalui peningkatan SDM, akses permodalan, pemasaran dan daya saing produksi | Peningkatan pengelolaan sektor ekonomi unggulan daerah melalui peningkatan SDM, akses permodalan, pemasaran dan daya saing produksi | Peningkatan pengelolaan sektor ekonomi unggulan daerah melalui peningkatan SDM, akses permodalan, pemasaran dan daya saing produksi | Peningkatan pengelolaan sektor ekonomi unggulan daerah melalui peningkatan SDM, akses permodalan, pemasaran dan daya saing produksi | Peningkatan pengelolaan sektor ekonomi unggulan daerah melalui peningkatan SDM, akses permodalan, pemasaran dan daya saing produksi | Peningkatan pengelolaan sektor ekonomi unggulan daerah melalui peningkatan SDM, akses permodalan, pemasaran dan daya saing produksi |
|  |  | Pengembangan peternakan melalui penyediaan sarana prasarana, pemanfaatan teknologi, dan peningkatan kesehatan hewan  | Peningkatan produksi peternakan untuk memenuhi komsumsi daerah dan kawasan industri   | Peningkatan produksi peternakan untuk memenuhi komsumsi daerah dan kawasan industri   | Peningkatan produksi peternakan untuk memenuhi komsumsi daerah dan kawasan industri   | Peningkatan produksi peternakan untuk memenuhi komsumsi daerah dan kawasan industri   | Peningkatan produksi peternakan untuk memenuhi komsumsi daerah dan kawasan industri   | Peningkatan produksi peternakan untuk memenuhi komsumsi daerah dan kawasan industri   |
|  |  | Meningkatkan produktivitas perikanan melalui pembinaan nelayan tangkap dan budidaya, penyediaan sarana prasarana, dan pengembangan pola kemitraan.               | Peningkatan pengelolaan sektor perikanan melalui pemberdayaan nelayan, akses permodalan, pemasaran dan daya saing produksi          | Peningkatan pengelolaan sektor perikanan melalui pemberdayaan nelayan, akses permodalan, pemasaran dan daya saing produksi          | Peningkatan pengelolaan sektor perikanan melalui pemberdayaan nelayan, akses permodalan, pemasaran dan daya saing produksi          | Peningkatan pengelolaan sektor perikanan melalui pemberdayaan nelayan, akses permodalan, pemasaran dan daya saing produksi          | Peningkatan pengelolaan sektor perikanan melalui pemberdayaan nelayan, akses permodalan, pemasaran dan daya saing produksi          | Peningkatan pengelolaan sektor perikanan melalui pemberdayaan nelayan, akses permodalan, pemasaran dan daya saing produksi          |

| Misi/Tujuan | Sasaran                       | Strategi  | Arah Kebijakan   |  |  |  |  |  |
|-------------|-------------------------------|---|--|--|--|--|--|--|
|             |                               |   | 2021   | 2022   | 2023   | 2024   | 2025   | 2026   |
|             |                               | Meningkatkan kinerja ekspor dan perdagangan dalam negeri melalui peningkatan kualitas pasar, pengawasan, promosi dan pemasaran produk - produk unggulan | Peningkatan kualitas sarana prasarana perdagangan dan peningkatan pemasaran produk unggulan daerah         | Peningkatan kualitas sarana prasarana perdagangan dan peningkatan pemasaran produk unggulan daerah         | Peningkatan kualitas sarana prasarana perdagangan dan peningkatan pemasaran produk unggulan daerah         | Peningkatan kualitas sarana prasarana perdagangan dan peningkatan pemasaran produk unggulan daerah         | Peningkatan kualitas sarana prasarana perdagangan dan peningkatan pemasaran produk unggulan daerah         | Peningkatan kualitas sarana prasarana perdagangan dan peningkatan pemasaran produk unggulan daerah         |
|             |                               | Pengembangan kapasitas koperasi dan UMKM  | Penguatan koperasi dan UMKM dalam menghadapi dampak pandemi Covid-19                                       | Penguatan kapasitas koperasi dalam memberikan akses permodalan bagi UMKM                                   | Penguatan kapasitas koperasi dalam memberikan akses permodalan bagi UMKM                                   | Penguatan kapasitas koperasi dalam memberikan akses permodalan bagi UMKM                                   | Penguatan kapasitas koperasi dalam memberikan akses permodalan bagi UMKM                                   | Penguatan kapasitas koperasi dalam memberikan akses permodalan bagi UMKM                                   |
|             |                               | Mendorong pengembangan industri dan kawasan industri sesuai dengan potensi daerah   | Fasilitasi pengembangan kawasan industri untuk penciptaan lapangan kerja dan mendorong pertumbuhan ekonomi | Fasilitasi pengembangan kawasan industri untuk penciptaan lapangan kerja dan mendorong pertumbuhan ekonomi | Fasilitasi pengembangan kawasan industri untuk penciptaan lapangan kerja dan mendorong pertumbuhan ekonomi | Fasilitasi pengembangan kawasan industri untuk penciptaan lapangan kerja dan mendorong pertumbuhan ekonomi | Fasilitasi pengembangan kawasan industri untuk penciptaan lapangan kerja dan mendorong pertumbuhan ekonomi | Fasilitasi pengembangan kawasan industri untuk penciptaan lapangan kerja dan mendorong pertumbuhan ekonomi |
|             |                               | Peningkatan kunjungan wisata melalui pengembangan atraksi serta peningkatan destinasi wisata baru   | Peningkatan promosi daya tarik objek wisata  | Peningkatan promosi daya tarik objek wisata serta pengembangan sarana prasarana                            | Peningkatan promosi daya tarik objek wisata serta pengembangan sarana prasarana                            | Peningkatan kualitas SDM kepariwisataan yang mampu berdaya saing   | Peningkatan peran masyarakat dalam pengembangan, pelestarian, pemajuan pariwisata dan ekonomi kreatif      | Peningkatan kolaborasi dalam penciptaan iklim pariwisata yang kondusif                                     |
|             | Meningkatnya investasi daerah | Peningkatan layanan perizinan, penyediaan informasi potensi dan peluang investasi, memberikan   | Peningkatan iklim investasi daerah dan peningkatan kapasitas Perusahaan Daerah                             | Peningkatan iklim investasi daerah dan peningkatan kapasitas Perusahaan Daerah                             | Peningkatan iklim investasi daerah dan peningkatan kapasitas Perusahaan Daerah                             | Peningkatan iklim investasi daerah dan peningkatan kapasitas Perusahaan Daerah                             | Peningkatan iklim investasi daerah dan peningkatan kapasitas Perusahaan Daerah                             | Peningkatan iklim investasi daerah dan peningkatan kapasitas Perusahaan Daerah                             |

| Misi/Tujuan  | Sasaran   | Strategi   | Arah Kebijakan   |  |  |  |  |  |
|--|---|--|--|--|--|--|--|--|
|  |   |  | 2021   | 2022   | 2023   | 2024   | 2025   | 2026   |
|  |   | kepastian hukum dan jaminan keamanan, serta peningkatan kapasitas Perusahaan Daerah guna mendorong investasi berkualitas dengan melibatkan pengusaha-pengusaha lokal   |  |  |  |  |  |  |
| <b>Misi 4 : Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang akuntabel, mendorong reformasi birokrasi, dan pelayanan publik yang prima</b> |   |  |  |  |  |  |  |  |
| Meningkatkan kualitas tata kelola pemerintahan yang efektif dan efisien  | Meningkatnya akuntabilitas kinerja pemerintahan dan pengelolaan keuangan daerah | Implementasi reformasi birokrasi dan pelayanan publik melalui optimalisasi pencapaian target pada 8 (delapan) area perubahan   | Penataan organisasi dan jabatan fungsional dalam rangka meningkatkan profesional ASN dan mewujudkan pelayanan publik yang terpercaya                         | Meningkatkan dan memperluas pemahaman Reformasi Birokrasi kepada SDM Apratur   | Optimalisasi implementasi Reformasi Birokrasi  | Optimalisasi implementasi Reformasi Birokrasi  | Optimalisasi implementasi Reformasi Birokrasi  | Perwujudan pemerintahan yang bebas dari korupsi dan birokrasi yang melayani  |
|  |   | Peningkatan kualitas kebijakan daerah di bidang pemerintahan, kesejahteraan rakyat, hukum, pembangunan dan penyelenggaraan administrasi umum melalui koordinasi, pemantauan dan evaluasi serta penganalisaan rekomendasi kebijakan kepala daerah | Meningkatkan kualitas tata kelola pemerintahan melalui sistem akuntabilitas kinerja, perencanaan, keuangan, pengawasan, keterbukaan informasi berbasis SPBE. | Meningkatkan kualitas tata kelola pemerintahan melalui sistem akuntabilitas kinerja, perencanaan, keuangan, pengawasan, keterbukaan informasi berbasis SPBE. | Meningkatkan kualitas tata kelola pemerintahan melalui sistem akuntabilitas kinerja, perencanaan, keuangan, pengawasan, keterbukaan informasi berbasis SPBE. | Meningkatkan kualitas tata kelola pemerintahan melalui sistem akuntabilitas kinerja, perencanaan, keuangan, pengawasan, keterbukaan informasi berbasis SPBE. | Meningkatkan kualitas tata kelola pemerintahan melalui sistem akuntabilitas kinerja, perencanaan, keuangan, pengawasan, keterbukaan informasi berbasis SPBE. | Meningkatkan kualitas tata kelola pemerintahan melalui sistem akuntabilitas kinerja, perencanaan, keuangan, pengawasan, keterbukaan informasi berbasis SPBE. |
|  |   | Peningkatan kualitas perencanaan   |  |  |  |  |  |  |

| Misi/Tujuan | Sasaran   | Strategi   | Arah Kebijakan |      |      |      |      |      |
|-------------|---|--|----------------|------|------|------|------|------|
|             |   |  | 2021           | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
|             |   | pembangunan daerah melalui peningkatan kapasitas SDM perencana, sinkronisasi kebijakan pusat dan daerah, perbaikan mekanisme SIPD serta optimaslisasi pengendalian dan evaluasi rencana pembangunan  |                |      |      |      |      |      |
|             |   | Peningkatan kualitas pengelolaan keuangan daerah dan aset melalui peningkatan kapasitas SDM, pengendalian belanja dan dana transfer, sinkronisasi perencanaan dan penganggaran, pengelolaan pembiayaan, pemanfaatan dan inventarisasi aset |                |      |      |      |      |      |
|             |   | Peningkatan pelayanan, pendaftaran, penetapan, dan penagihan sumber-sumber PAD   |                |      |      |      |      |      |
|             | Terwujudnya birokrasi yang kapabel dan optimalnya | Optimalisasi pengawasan intern, melalui peningkatan SDM APIP yang  |                |      |      |      |      |      |

| Misi/Tujuan | Sasaran  | Strategi   | Arah Kebijakan |      |      |      |      |      |
|-------------|--|--|----------------|------|------|------|------|------|
|             |  |  | 2021           | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
|             | implementasi SPBE, serta meningkatnya pelayanan publik yang terpercaya | berkualitas dan peningkatan sistem pengawasan yang efektif   |                |      |      |      |      |      |
|             |  | Pengembangan sarana prasarana e-government untuk menunjang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik dan pelayanan publik  |                |      |      |      |      |      |
|             |  | Peningkatan implementasi Satu Data yang didukung teknologi informasi yang andal  |                |      |      |      |      |      |
|             |  | Meningkatkan kepemilikan dokumen administrasi kependudukan dan catatan sipil melalui peningkatan kesadaran masyarakat dan perbaikan kualitas layanan administrasi kependudukan |                |      |      |      |      |      |
|             |  | Meningkatkan kunjungan perpustakaan dan pengelolaan kearsipan melalui pengembangan sarana prasarana kearsipan  |                |      |      |      |      |      |
|             |  | Peningkatan kualitas   |                |      |      |      |      |      |

| Misi/Tujuan | Sasaran                             | Strategi   | Arah Kebijakan  |  |   |   |  |  |  |
|-------------|-------------------------------------|--|---|--|---|---|--|--|--|
|             |                                     |  | 2021  | 2022   | 2023  | 2024  | 2025   | 2026   |  |
|             |                                     | pelayanan sekretariat DPRD dengan memfasilitasi kegiatan-kegiatan DPRD dan penyaluran aspirasi masyarakat                      |   |  |   |   |  |  |  |
|             |                                     | Meningkatkan kualitas penyelenggaraan pemerintahan umum di tingkat kecamatan   |   |  |   |   |  |  |  |
|             |                                     | Meningkatkan partisipasi pemuda dan prestasi olahraga melalui peningkatan sarana prasarana dan pembinaan organisasi kepemudaan |   |  |   |   |  |  |  |
|             |                                     | Meningkatkan kondusivitas daerah, penegakan Perda dan peningkatan SDM  |   |  |   |   |  |  |  |
|             |                                     | Meningkatkan kinerja unit pelayanan informasi publik melalui penerapan SOP dan peningkatan SDM                                 | Penyusunan penyaluran dan implementasi pedoman pelayanan informasi publik | Penerapan sistem pelayanan informasi publik      | Inovasi penerapan sistem pelayanan informasi publik | Inovasi penerapan sistem pelayanan informasi publik | Penguatan sistem pelayanan informasi publik      | Penguatan sistem pelayanan informasi publik  |  |
|             | Meningkatnya kualitas manajemen ASN | Meningkatkan profesionalisme Aparatur Sipil Negara (ASN) melalui penerapan Sistem Merit dan                                    | Peningkatan kapasitas dan kualitas manajemen ASN                          | Peningkatan kapasitas dan kualitas manajemen ASN | Peningkatan kapasitas dan kualitas manajemen ASN    | Peningkatan kapasitas dan kualitas manajemen ASN    | Peningkatan kapasitas dan kualitas manajemen ASN | Perwujudan SDM Aparatur yang profesional, bersih dalam pelayanan kepada masyarakat |  |

| Misi/Tujuan  | Sasaran  | Strategi  | Arah Kebijakan   |  |  |  |  |  |
|--|--|---|--|--|--|--|--|--|
|  |  |   | 2021   | 2022   | 2023   | 2024   | 2025   | 2026   |
|  |  | pengembangan jabatan fungsional   |  |  |  |  |  |  |
|  | Meningkatnya kapasitas pemerintahan desa                           | Peningkatan kualitas aparatur pemerintahan desa, pengembangan BUMDes, dan pengembangan usaha ekonomi produktif masyarakat desa                      | Penguatan pemerintahan desa dan pengembangan potensi desa  | Penguatan pemerintahan desa dan pengembangan potensi desa  | Penguatan pemerintahan desa dan pengembangan potensi desa  | Penguatan pemerintahan desa dan pengembangan potensi desa  | Penguatan pemerintahan desa dan pengembangan potensi desa  | Akselerasi menuju desa manu dan mandiri  |
| <b>Misi 5 : Meningkatkan kualitas lingkungan hidup dan ketahanan bencana</b> |  |   |  |  |  |  |  |  |
| Meningkatkan kualitas lingkungan hidup                                       | Terjaganya kualitas pemanfaatan dan pengendalian pemanfaatan ruang | Percepatan penetapan peraturan tentang rencana tata ruang penataan ruang dan meningkatkan pengendalian pemanfaatan ruang                            | Penyusunan rencana revisi tata ruang wilayah   | Penetapan rencana tata ruang wilayah dan rencana detail tata ruang   | Peningkatan Pengendalian pemanfaatan ruang   | Peningkatan Pengendalian pemanfaatan ruang   | Peningkatan Pengendalian pemanfaatan ruang   | Peningkatan Pengendalian pemanfaatan ruang   |
|  | Menurunnya tingkat pencemaran air dan udara                        | Meningkatkan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup melalui pemantauan kualitas air, tanah dan udara, serta tertib hukum lingkungan          | Perumusan dan penetapan rencana pengelolaan dan perlindungan lingkungan hidup (RPPLH)  | Pengurangan pencemaran dan kerusakan lingkungan melalui peningkatan kapasitas daerah dalam implementasi PPLH                 | Pengurangan pencemaran dan kerusakan lingkungan melalui peningkatan kapasitas daerah dalam implementasi PPLH                 | Pengurangan pencemaran dan kerusakan lingkungan melalui peningkatan kapasitas daerah dalam implementasi PPLH                 | Pengurangan pencemaran dan kerusakan lingkungan melalui peningkatan kapasitas daerah dalam implementasi PPLH                 | Pengurangan pencemaran dan kerusakan lingkungan melalui peningkatan kapasitas daerah dalam implementasi PPLH                 |
|  | Terwujudnya tata kelola dan manajemen bencana                      | Meningkatkan ketahanan daerah dalam menghadapi bencana melalui pengurangan resiko bencana untuk ketangguhan (mitigasi, kesiapsiagaan, pra bencana), | Pengurangan resiko bencana serta membangun komitmen bersama stakeholder PRB dan peningkatan partisipasi masyarakat dalam PRB | Pengurangan resiko bencana serta membangun komitmen bersama stakeholder PRB dan peningkatan partisipasi masyarakat dalam PRB | Pengurangan resiko bencana serta membangun komitmen bersama stakeholder PRB dan peningkatan partisipasi masyarakat dalam PRB | Pengurangan resiko bencana serta membangun komitmen bersama stakeholder PRB dan peningkatan partisipasi masyarakat dalam PRB | Pengurangan resiko bencana serta membangun komitmen bersama stakeholder PRB dan peningkatan partisipasi masyarakat dalam PRB | Pengurangan resiko bencana serta membangun komitmen bersama stakeholder PRB dan peningkatan partisipasi masyarakat dalam PRB |

| Misi/Tujuan  | Sasaran  | Strategi  | Arah Kebijakan   |  |  |  |  |  |
|--|--|---|--|--|--|--|--|--|
|  |  |   | 2021   | 2022   | 2023   | 2024   | 2025   | 2026   |
|  |  | manajemen kedaruratan, dan manajemen pemulihan  |  |  |  |  |  |  |
| <b>Misi 6 : Membangun peradaban masyarakat yang bertumpu pada nilai - nilai keagamaan dan kebudayaan lokal</b> |  |   |  |  |  |  |  |  |
| Melestarikan seni budaya lokal   | Meningkatnya intensitas event seni budaya yang diselenggarakan | Pelestarian budaya lokal melalui peningkatan event seni budaya dengan pemberdayaan berbasis lembaga-lembaga adat  |  | Penanaman nilai - nilai budaya masyarakat melalui penyelenggaraan event seni dan budaya                                  | Peningkatan peran serta komunitas dan lembaga - lembaga adat dalam penyelenggaraan event seni dan budaya                 | Peningkatan kualitas dan kuantitas event seni dan budaya   | Peningkatan pelaku seni budaya yang berwawasan nasional dan global   | Penguatan keberlanjutan pelestarian, pemberdayaan, pengembangan seni budaya lokal  |
| Mewujudkan kehidupan masyarakat yang dilandasi nilai - nilai kerukunan beragama                                | Meningkatnya pengelolaan potensi konflik sosial                | Meningkatkan pendidikan politik dan wawasan kebangsaan untuk antisipasi terhadap potensi konflik sosial di masyarakat   |  | Pengendalian potensi konflik dan optimalisasi peran serta stakeholder dalam mewujudkan kondusivitas wilayah              |  |  |  |  |
|  | Meningkatnya kualitas pelayanan kehidupan beragama             | Pembangunan dan rehabilitasi sarana keagamaan, peningkatan kualitas pemahaman, penghayatan dan pengamalan ajaran agama pada semua jalur, jenis dan jenjang pendidikan, peningkatan upaya menjaga keserasian sosial dalam kelompok keagamaan | Peningkatan kualitas pelayanan dan pemahaman agama serta kehidupan beragama dan peningkatan kerukunan antarumat beragama | Peningkatan kualitas pelayanan dan pemahaman agama serta kehidupan beragama dan peningkatan kerukunan antarumat beragama | Peningkatan kualitas pelayanan dan pemahaman agama serta kehidupan beragama dan peningkatan kerukunan antarumat beragama | Peningkatan kualitas pelayanan dan pemahaman agama serta kehidupan beragama dan peningkatan kerukunan antarumat beragama | Peningkatan kualitas pelayanan dan pemahaman agama serta kehidupan beragama dan peningkatan kerukunan antarumat beragama | Peningkatan kualitas pelayanan dan pemahaman agama serta kehidupan beragama dan peningkatan kerukunan antarumat beragama |

Sumber : Bappeda Kab. Konawe Utara, 2021

### 6.3 ARAH KEBIJAKAN PEMBANGUNAN KEWILAYAHAN

Perencanaan pembangunan daerah pada prinsipnya bertujuan mengintegrasikan rencana tata ruang wilayah dengan rencana pembangunan daerah. Dalam kaitan itu, penyusunan RPJMD harus berpedoman pada RTRW. Oleh karena itu, diperlukan penelaahan RTRW untuk menjamin agar arah kebijakan dalam RPJMD selaras dengan, atau tidak menyimpang dari arah kebijakan RTRW. Untuk mewujudkan tujuan penataan ruang wilayah Kabupaten Konawe Utara, maka ditetapkan kebijakan dan strategi pembangunan kewilayah meliputi:

1. Kebijakan pengembangan dan peningkatan pusat-pusat pelayanan yang dapat mendorong pertumbuhan yang merata sesuai dengan hirarki dan skala pelayanannya, melalui strategi :
  - a. meningkatkan dan mempertahankan fungsi pusat pelayanan eksisting;
  - b. mengembangkan pusat pelayanan baru di seluruh Kabupaten Konawe Utara;
  - c. menetapkan pusat pelayanan sebagai kawasan fungsional sesuai dengan unggulan wilayah sekitarnya; dan
  - d. meningkatkan keterkaitan antar pusat pelayanan sehingga tercipta keterpaduan antar wilayah.
2. Kebijakan pengembangan dan peningkatan kualitas dan jangkauan jaringan transportasi, energi listrik, telekomunikasi, dan sumber daya air, pelayanan sarana dan prasarana air minum, persampahan, air limbah, dan drainase untuk meningkatkan pertumbuhan wilayah, melalui strategi :
  - a. mengembangkan dan meningkatkan sistem jaringan prasarana transportasi internal dan regional kabupaten dalam menunjang pergerakan barang dan penumpang;
  - b. mengembangkan simpul-simpul transportasi dalam rangka peningkatan sistem jaringan pelayanan inter dan antarmoda untuk meningkatkan pelayanan barang dan penumpang;
  - c. mengembangkan dan meningkatkan jaringan energi listrik dengan memanfaatkan energi terbarukan dan tidak terbarukan secara optimal untuk mendukung pengembangan sektor unggulan;
  - d. mengembangkan dan meningkatkan jaringan telekomunikasi untuk meningkatkan keterkaitan antarwilayah;

- e. mengembangkan dan meningkatkan jaringan sumber daya air untuk menciptakan keterpaduan pengelolaan sumber daya air; dan
  - f. mengembangkan dan meningkatkan pelayanan prasarana dan sarana air minum, persampahan, air limbah dan drainase untuk meningkatkan kualitas lingkungan permukiman penduduk.
3. Kebijakan pengembangan kegiatan industri pertambangan yang ramah lingkungan dalam rangka memberi nilai tambah dalam perekonomian wilayah, melalui strategi:
- a. mengembangkan kegiatan pendukung dan/atau kegiatan turunan dari sektor pertambangan;
  - b. mendorong pengembangan pusat kegiatan industri pertambangan yang inovatif dan ramah lingkungan;
  - c. mengembangkan usaha mikro, kecil, dan menengah yang ramah lingkungan untuk mendukung kegiatan industri pertambangan; dan
  - d. mengembangkan dan meningkatkan pelayanan prasarana dan sarana penunjang kegiatan industri pertambangan.
4. Kebijakan pengembangan kegiatan unggulan pertanian, perkebunan, perikanan, dan pertambangan secara bijak dengan memperhatikan daya dukung lingkungan, melalui strategi :
- a. mewujudkan pemanfaatan kawasan budidaya secara efisien, serasi dan seimbang berdasarkan kesesuaian lahannya;
  - b. mengembangkan dan meningkatkan pengembangan pertanian dalam rangka mendukung swasembada pangan;
  - c. mengembangkan dan meningkatkan pengembangan perkebunan dengan memperhatikan daya dukung lingkungan untuk mendukung kesejahteraan rakyat;
  - d. mengembangkan dan meningkatkan pengembangan perikanan untuk mendukung kesejahteraan rakyat;
  - e. mengembangkan kegiatan pendukung dan/atau kegiatan turunan dari kegiatan perkebunan dan perikanan untuk kesejahteraan rakyat;
  - f. mengembangkan kegiatan pertambangan yang ramah lingkungan dan berkelanjutan;

- g. mengintegrasikan kawasan unggulan pertanian tanaman pangan, perkebunan dan hortikultura serta kawasan pertambangan dengan wilayah sekitar dan kawasan unggulan lain;
  - h. meningkatkan kualitas sumber daya manusia yang mampu mengelola sektor pertanian, perkebunan, perikanan dan pertambangan secara profesional dan berkelanjutan melalui penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan; dan
  - i. mengembangkan dan meningkatkan pelayanan prasarana dan sarana penunjang kegiatan pertanian, perkebunan, perikanan, dan pertambangan, termasuk kegiatan pendukungnya guna mendukung aksesibilitas pusat-pusat pertumbuhan kawasan.
5. Kebijakan pelestarian lingkungan hidup dalam upaya mempertahankan dan meningkatkan daya dukung lingkungan demi kelangsungan di masa mendatang; melalui strategi :
- a. mempertahankan kawasan lindung di wilayah darat dan wilayah laut untuk meningkatkan daya dukung lingkungan hidup;
  - b. mempertahankan kawasan hutan dengan luas paling sedikit 70% (tujuh puluh persen) dari luas wilayah keseluruhan;
  - c. menyelenggarakan upaya terpadu untuk melestarikan fungsi lingkungan hidup terutama kawasan tangkapan air, sempadan pantai, sempadan sungai, kawasan sekitar mata air, dan kawasan perairan laut;
  - d. mengelola sumber daya alam tak terbarukan untuk menjamin pemanfaatannya secara bijaksana dan sumber daya alam yang terbarukan untuk menjamin kesinambungan ketersediaannya dengan tetap memelihara dan meningkatkan kualitas nilai serta keanekaragamannya; dan
  - e. mengembalikan dan meningkatkan kualitas lingkungan yang telah rusak akibat kegiatan budidaya, dalam rangka mewujudkan dan memelihara keseimbangan ekosistem lingkungan.
6. Kebijakan peningkatan fungsi kawasan untuk pertahanan dan keamanan negara, melalui strategi :
- a. menetapkan aset-aset budidaya militer dan kepolisian dengan fungsi khusus pertahanan dan keamanan;
  - b. mengembangkan kegiatan budidaya secara selektif di dalam aset-aset militer dan kepolisian untuk menjaga fungsi pertahanan dan keamanan; dan

- c. mengembangkan kawasan lindung dan/atau kawasan budidaya tidak terbangun di sekitar aset-aset militer/kepolisian sebagai zona penyangga yang memisahkan kawasan budidaya terbangun.

#### **6.4 PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH**

Berdasarkan rumusan strategi dan arah kebijakan sebagaimana diuraikan di atas, maka untuk mencapai tujuan dan sasaran yang ditetapkan guna mewujudkan Visi dan Misi Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Konawe Utara Tahun 2021-2026, maka program Perangkat Daerah dijabarkan pada setiap misi sebagaimana ditunjukkan dalam Tabel 6.3 sebagai berikut.

Tabel 6.3  
PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH YANG DISERTAI PAGU INDIKATIF KABUPATEN KONAWE UTARA TAHUN 2021 - 2026

| Kode   | Misi/Tujuan/Sasaran/ Program Pembangunan Daerah | Indikator Kinerja   | Satuan  | Kondisi Kinerja awal RPJMD (2020)   | Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan                             |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                 | Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD |                   | Perangkat daerah Penanggungjawab |                 |                 |                 |
|--|---|---|---|---|--|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|--|-------------------|----------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|
|  |   |   |   |   | 2021   |                 | 2022            |                 | 2023            |                 | 2024            |                 | 2025            |                 | 2026            |                 | Target                                   | Rp.               |                                  |                 |                 |                 |
|  |   |   |   |   | Target   | Rp.             | Target          | Rp.             | Target          | Rp.             | Target          | Rp.             | Target          | Rp.             | Target          | Rp.             |  |                   |                                  |                 |                 |                 |
| 1  | 2   | 3   | 4   | 5   | 6  | 7               | 8               | 9               | 10              | 11              | 12              | 13              | 14              | 15              | 16              | 17              | 18                                       | 19                | 20                               |                 |                 |                 |
| <b>VISI : "KONAWE UTARA LEBIH SEJAHTERA &amp; BERDAYA SAING"</b> |   |   |   |   |  | 499.807.013.731 |                 | 535.708.724.747 |                 | 553.939.893.630 |                 | 567.464.857.359 |                 | 583.719.217.434 |                 | 594.261.615.170 |  | 2.872.718.840.385 |                                  |                 |                 |                 |
| 1  |   | <b>Misi 1 : Meningkatkan Kualitas Dan Daya Saing Sumberdaya Manusia</b> |   |   |  | 141.158.491.413 |                 | 151.447.649.508 |                 | 157.213.858.390 |                 | 159.296.197.054 |                 | 163.491.712.710 |                 | 162.051.176.838 |  | 830.035.031.545   |                                  |                 |                 |                 |
| 1  | 1   | Tujuan 1 : Meningkatkan kualitas sumberdaya manusia                     | Indeks Pembangunan Manusia (IPM)                      | Indeks  | 69,86  | 70,266          | 141.158.491.413 | 70,672          | 151.447.649.508 | 71,078          | 157.213.858.390 | 71,484          | 159.296.197.054 | 71,89           | 163.491.712.710 | 72,296          | 162.051.176.838                          | 72,296            | 830.035.031.545                  |                 |                 |                 |
| 1  | 1   | 1   | Sasaran 1 : Meningkatkan akses pendidikan             | Rata - Rata Lama Sekolah  | Tahun  | 9,21            | 9,404           | 78.334.800.000  | 9,598           | 83.629.800.000  | 9,792           | 89.954.800.000  | 9,986           | 10,18           | 102.614.800.000 | 10,374          | 102.614.800.000                          | 10,374            | 474.879.000.000                  | Dinas P & K     |                 |                 |
|  |   |   |   | Harapan Lama Sekolah  | Tahun  | 12,83           | 13,066          |                 | 13,302          |                 | 13,538          |                 | 13,774          |                 | 14,01           | 14,246          | 14,246                                   | 14,246            |                                  | Dinas P & K     |                 |                 |
|  |   |   |   | Persentase capaian SPM  | %  | 86              |                 |                 | 87              |                 | 88              |                 | 89              |                 | 90              | 90              | 90                                       | 90                |                                  |                 |                 |                 |
|  |   |   |   | APK SD  | Indeks   | 107,97          | 107,30          |                 | 106,80          |                 | 106,25          |                 | 105,79          |                 | 104,7           | 103,59          | 103,59                                   | 103,59            |                                  |                 |                 |                 |
|  |   |   |   | APK SMP   | Indeks   | 87,10           | 86,90           |                 | 86,19           |                 | 85,35           |                 | 84,13           |                 | 83,90           | 82,95           | 82,95                                    | 82,95             |                                  |                 |                 |                 |
|  |   |   |   | APM SD  | Indeks   | 97,70           | 98,15           |                 | 98,65           |                 | 98,90           |                 | 99,07           |                 | 99,31           | 99,45           | 99,45                                    | 99,45             |                                  |                 |                 |                 |
|  |   |   |   | APM SMP   | Indeks   | 77,64           | 78,03           | 76.119.800.000  | 78,45           | 81.414.800.000  | 79,35           | 87.739.800.000  | 80,45           | 93.849.800.000  | 81,69           | 100.264.800.000 | 81,89                                    | 100.264.800.000   | 81,89                            | 463.534.000.000 | Dinas P & K     |                 |
|  |   |   |   | Persentase SD Terakreditasi Minimal B                                       | %  | 17,31           | 17,31           |                 | 19,23           |                 | 19,23           |                 | 20,19           |                 | 20,19           | 21,15           | 21,15                                    | 21,15             |                                  |                 |                 |                 |
|  |   |   |   | Persentase SMP Terakreditasi Minimal B                                      | %  | 41,67           | 41,67           |                 | 44,44           |                 | 44,44           |                 | 47,22           |                 | 47,22           | 50              | 50                                       | 50,00             |                                  |                 |                 |                 |
|  |   |   |   | Program Pengembangan Kurikulum  | Persentase pengembangan kurikulum muatan lokal penunjang proses pendidikan | Persen          | 68              | 70              | 1.675.000.000   | 72              | 1.675.000.000   | 74              | 1.675.000.000   | 78              | 1.675.000.000   | 80              | 1.675.000.000                            | 80                | 1.675.000.000                    | 80              | 8.375.000.000   | Dinas P & K     |
|  |   |   |   | Program Pendidik Dan Tenaga Kependidikan                                    | Persentase Guru SD Bersertifikat Pendidik                                  | Persen          | 30,64           | 31,096          | 135.000.000     | 31,552          | 135.000.000     | 32,008          | 135.000.000     | 32,464          | 135.000.000     | 32,92           | 135.000.000                              | 32,92             | 135.000.000                      | 32,920          | 675.000.000     | Dinas P & K     |
|  |   |   |   |   | Persentase Guru SMP Bersertifikat Pendidik                                 | Persen          | 30,2            | 30,516          | 135.000.000     | 30,832          | 135.000.000     | 31,148          | 135.000.000     | 31,464          | 135.000.000     | 31,78           | 135.000.000                              | 31,78             | 135.000.000                      | 31,780          | 675.000.000     | Dinas P & K     |
|  |   |   |   |   | Rasio tenaga pendidik terhadap peserta didik (SD)                          | Persen          | 10,66           | 10,962          | 135.000.000     | 11,264          | 135.000.000     | 11,566          | 135.000.000     | 11,868          | 135.000.000     | 12,170          | 270.000.000                              | 12,170            | 270.000.000                      | 12,170          | 945.000.000     | Dinas P & K     |
|  |   |   |   |   | Rasio tenaga pendidik terhadap peserta didik (SMP)                         | Persen          | 12,25           | 12,67           | 135.000.000     | 13,09           | 135.000.000     | 13,51           | 135.000.000     | 13,93           | 135.000.000     | 14,35           | 135.000.000                              | 14,35             | 135.000.000                      | 14,350          | 675.000.000     | Dinas P & K     |
| 1  | 1   | 2   | Sasaran 2 : Meningkatkan derajat kesehatan masyarakat | Angka Usia Harapan Hidup  | Tahun  | 69,51           | 70,09           | 49.042.714.108  | 70,67           | 49.977.228.027  | 71,26           | 49.597.639.003  | 71,84           | 45.919.469.227  | 72,42           | 42.820.330.259  | 73,00                                    | 40.590.310.078    | 73,00                            | 264.752.594.143 | Dinas Kesehatan |                 |
|  |   |   |   | Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat | Angka Kematian Bayi / 1000 kelahiran hidup                                 | rasio           | 2,08            | 1,87            |                 | 1,64            |                 | 1,41            |                 | 1,18            |                 | 0,95            |  | 0,72              |                                  | 1               |                 |                 |
|  |   |   |   |   | Angka kematian ibu melahirkan per 100.000 kelahiran hidup                  | rasio           | 138,79          | 137             |                 | 135             |                 | 133             |                 | 131             |                 | 129             |  | 127               |                                  | 127             |                 |                 |
|  |   |   |   |   | Prevalensi Balita Gizi Buruk   | %               | 0,3             | 0,3             | 31.813.406.448  | 0,2             | 32.131.540.512  | 0,2             | 29.561.017.271  | 0,2             | 25.126.864.681  | 0,1             | 21.357.834.979                           | 0                 | 18.154.159.732                   | 0               | 158.144.823.623 | Dinas Kesehatan |
|  |   |   |   |   | Prevalensi kasus Stunting  | %               |                 | 11              |                 | 10,8            |                 | 10,6            |                 | 10,4            |                 | 10,2            |  | 10                |                                  | 10              |                 |                 |
|  |   |   |   |   | Rasio Puskesmas per satuan penduduk x 1000                                 | Rasio           | 0,324144        | 0,32            |                 | 0,32            |                 | 0,32            |                 | 0,32            |                 | 0,32            |  | 0,32              |                                  | 0               |                 |                 |
|  |   |   |   |   | Prevalensi Tuberkulosis (TB) /100.000 penduduk                             | Rasio           | 143             | 140             |                 | 137             |                 | 134             |                 | 131             |                 | 128             |  | 125               |                                  | 125             |                 |                 |
|  |   |   |   | Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan                 | Rasio dokter per 100.000 penduduk  | Rasio           | 27,99           | 49,71           | 1.452.884.875   | 52,30           | 1.529.352.500   | 56,24           | 1.929.352.500   | 60,16           | 2.229.352.500   | 64,05           | 2.429.352.500                            | 67,92             | 2.729.352.500                    | 67,92           | 10.846.762.500  | Dinas Kesehatan |
|  |   |   |   |   | rasio bidan / 100.000 penduduk   | Rasio           | 215,11          | 216,78          |                 | 222,95          |                 | 229,08          |                 | 235,17          |                 | 241,23          |  | 247,24            |                                  | 247,24          |                 |                 |
|  |   |   |   |   | Rasio perawat / 100.000 penduduk   | Rasio           | 109,03          | 129,79          |                 | 141,75          |                 | 153,64          |                 | 165,44          |                 | 177,17          |  | 188,83            |                                  | 188,83          |                 |                 |
|  |   |   |   | Program Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan dan Makanan Minuman                 | Jumlah sertifikat laek higien  | Sertifikat      | 0               | 0               | 657.993.750     | 5               | 692.625.000     | 8               | 1.002.625.000   | 10              | 1.232.625.000   | 13              | 1.472.625.000                            | 16                | 1.732.625.000                    | 16              | 6.133.125.000   | Dinas Kesehatan |
|  |   |   |   |   | Jumlah Rekomendasi Ijin Apotek/Toko Obat                                   | Rekomendasi     | 6               | 8               |                 | 10              |                 | 12              |                 | 15              |                 | 20              |  | 20                |                                  | 20              |                 |                 |
|  |   |   |   | Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan                            | Jumlah Desa Siaga Aktif  | desa            | 104             | 107             | 4.034.211.100   | 110             | 4.246.538.000   | 113             | 5.546.538.000   | 116             | 5.602.003.380   | 119             | 5.658.023.414                            | 122               | 5.714.603.648                    | 122             | 30.801.917.542  | Dinas Kesehatan |
|  |   |   |   |   | Jumlah posyandu aktif  | posyandu        | 165             |                 |                 | 165             |                 | 165             |                 | 165             |                 | 165             |  | 165               |                                  | 165             |                 |                 |
|  |   |   |   |   | Persentase Rumah Tangga ber PHBS   | %               | 85              | 87              |                 | 89              |                 | 91              |                 | 93              |                 | 94              |  | 95                |                                  | 95              |                 |                 |
|  |   |   |   | Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat | Rata-rata Kunjungan Rawat Jalan Per Hari                                   | Rawat Jalan     | 10              |                 | 8.637.670.435   | 12              | 8.724.047.139   | 17              | 8.811.287.611   | 23              | 8.899.400.487   | 29              | 8.988.394.492                            | 35                | 9.258.046.326                    | 35              | 44.681.176.055  | RSUD            |
|  |   |   |   |   | Length Of Stay (LOS)/Rata-rata Lama Hari Dirawat                           | Hari            | 9-8             |                 |                 | 8-7             |                 | 7-6             |                 | 6-5             |                 | 5-4             |  | 4-3               |                                  | 4-3             |                 |                 |
|  |   |   |   |   | Bed Occupancy Rate (BOR)/ Tingkat Penggunaan Tempat Tidur                  | %               | 20              |                 |                 | 35              |                 | 60              |                 | 75              |                 | 80              |  | 85                |                                  | 85              |                 |                 |

| Kode  | Misi/Tujuan/Sasaran/ Program Pembangunan Daerah                                 | Indikator Kinerja  | Satuan          | Kondisi Kinerja awal RPJMD (2020) | Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan |               |            |               |         |               |          |               |         |               |        |               | Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD |                | Perangkat daerah Penanggungjawab |
|-------|---|--|-----------------|-----------------------------------|--|---------------|------------|---------------|---------|---------------|----------|---------------|---------|---------------|--------|---------------|--|----------------|----------------------------------|
|       |   |  |                 |                                   | 2021   |               | 2022       |               | 2023    |               | 2024     |               | 2025    |               | 2026   |               | Target                                   | Rp.            |                                  |
|       |   |  |                 |                                   | Target   | Rp.           | Target     | Rp.           | Target  | Rp.           | Target   | Rp.           | Target  | Rp.           | Target | Rp.           |  |                |                                  |
| 1     | 2   | 3  | 4               | 5                                 | 6  | 7             | 8          | 9             | 10      | 11            | 12       | 13            | 14      | 15            | 16     | 17            | 18                                       | 19             | 20                               |
| 6     | Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan                     | Emergency Respon Time Rate Kurang Dari 5 Menit                             | %               |                                   | 40   | 2.446.547.500 | 50         | 2.568.874.875 | 70      | 2.645.941.121 | 80       | 2.725.319.355 | 90      | 2.807.078.936 | 100    | 2.891.291.304 | 100                                      | 13.638.505.590 | RSUD                             |
| 7     | Program Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan dan Makanan Minuman                     | Kecepatan Pelayanan Resep Obat Jadi Kurang dari 30 Menit                   | %               |                                   | 40   | -             | 50         | 54.250.000    | 70      | 55.877.500    | 80       | 57.553.825    | 90      | 59.280.440    | 100    | 61.058.853    | 100                                      | 288.020.618    | RSUD                             |
| 8     | Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan                                | Persentase Masyarakat yang Diberdayakan                                    | %               |                                   | 70   | -             | 80         | 30.000.000    | 90      | 45.000.000    | 100      | 46.350.000    | 90      | 47.740.500    | 100    | 49.172.715    | 100                                      | 218.263.215    | RSUD                             |
| 1 1 3 | Sasaran 3 : Meningkatkan kualitas hidup perempuan dan pengarusutamaan hak anak  | Indeks Pembangunan Gender (IPG)  | Indeks          | 86,17                             | 86,413   | 8.348.485.806 | 86,6566667 | 8.765.910.096 | 86,9    | 9.028.887.399 | 87,14333 | 9.299.754.021 | 87,3867 | 9.578.746.642 | 87,63  | 9.866.109.041 | 87,63                                    | 46.539.407.200 |                                  |
|       |   | Kota Layak Anak  | Kategori        | Pratama                           | Pratama  |               | Pratama    |               | Pratama |               | Madya    | Madya         | Madya   | Madya         | Madya  | Madya         | Madya                                    |                |                                  |
| 1 1 1 | Program Pengarusutamaan Gender Dan Pemberdayaan Perempuan                       | Persentase Perempuan yang Menduduki Jabatan Publik                         | %               |                                   | 7,69   | 151.409.000   | 7,87       | 158.979.450   | 7,96    | 163.748.834   | 8,05     | 168.661.299   | 8,14    | 173.721.137   | 8,23   | 178.932.772   | 8,23                                     | 844.043.491    | DPPPA                            |
| 2     | Program Perlindungan Perempuan  | Jumlah Perempuan korban kekerasan yang mendapat pelayanan/ditangani        | Orang           | 3                                 | 3  | 66.342.750    | 2          | 69.659.888    | 2       | 71.749.684    | 1        | 73.902.175    | 1       | 76.119.240    | 1      | 78.402.817    | 1  | 369.833.803    | DPPPA                            |
| 3     | Program Peningkatan Kualitas Keluarga   | Persentase peningkatan kualitas keluarga                                   | %               | 100                               | 100  | 52.137.000    | 100        | 54.743.850    | 100     | 56.386.166    | 100      | 58.077.750    | 100     | 59.820.083    | 100    | 61.614.685    | 100                                      | 290.642.534    | DPPPA                            |
| 4     | Program Pengelolaan Sistem Data Gender Dan Anak                                 | Persentase pengelolaan data gender dan anak                                | %               | 100                               | 100  | 21.599.500    | 100        | 22.679.475    | 100     | 23.359.859    | 100      | 24.060.655    | 100     | 24.782.475    | 100    | 25.525.949    | 100                                      | 120.408.413    | DPPPA                            |
| 5     | Program Pemenuhan Hak Anak (Pha)  | Persentase Perlindungan dan Pemenuhan Hak Anak                             | %               |                                   | 55,25  | 160.256.500   | 60         | 168.269.325   | 72      | 173.317.405   | 73       | 178.516.927   | 80      | 183.872.435   | 88     | 189.388.608   | 92                                       | 893.364.699    | DPPPA                            |
| 6     | Program Perlindungan Khusus Anak  | Jumlah korban kekerasan anak yang ditindaklanjuti                          | Orang           | 3                                 | 3  | 31.237.000    | 2          | 32.798.850    | 2       | 33.782.816    | 1        | 34.796.300    | 1       | 35.840.189    | 1      | 36.915.395    | 1  | 174.133.549    | DPPPA                            |
| 7     | Program Pengendalian Penduduk   | Persentase pertumbuhan penduduk  | %               |                                   | 6,71   | 751.886.056   | 7,06       | 789.480.359   | 7,41    | 813.164.770   | 7,76     | 837.559.713   | 8,11    | 862.686.504   | 8,46   | 888.567.099   | 8,46                                     | 4.191.458.444  |                                  |
| 8     | Program Pembinaan Keluarga Berencana (KB)                                       | Jumlah Peserta KB Aktif  | Orang           | 11.786                            | 11.786   | 5.963.313.000 | 11.871     | 6.261.478.650 | 11.923  | 6.449.323.010 | 11.957   | 6.642.802.700 | 11.973  | 6.842.086.781 | 12.051 | 7.047.349.384 | 12.051                                   | 33.243.040.524 | DPPKB                            |
| 9     | Program Pemberdayaan Dan Peningkatan Keluarga Sejahtera (KS)                    | Persentase Keluarga Sejahtera  | %               |                                   | 81,58  | 1.150.305.000 | 81,82      | 1.207.820.250 | 81,94   | 1.244.054.858 | 82,06    | 1.281.376.503 | 82,18   | 1.319.817.798 | 82,30  | 1.359.412.332 | 82,30                                    | 6.412.481.741  | DPPKB                            |
|       |   | Cakupan PUS Unmetneed  | %               | 0,09                              | 0,09   |               | 0,13       |               | 0,07    |               | 0,05     |               | 0,03    |               | 0,01   |               | 0,01                                     |                |                                  |
| 1 1 4 | Sasaran 4 : Meningkatkan Sumberdaya Manusia Yang Kompeten dan Produktif         | Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja   | Persen          | 74,45                             | 75,14667                                       | 240.027.313   | 75,8433333 | 252.178.679   | 76,54   | 260.535.289   | 77,23667 | 269.186.116   | 77,9333 | 278.142.381   | 78,63  | 287.415.771   | 78,63                                    | 1.347.458.236  |                                  |
| 1 1 1 | Program Perencanaan Tenaga Kerja  | Persentase Tersedianya Perencanaan Tenaga Kerja                            | %               | 100                               | 100  | 30.000.000    | 100        | 31.650.000    | 100     | 33.390.750    | 100      | 35.227.241    | 100     | 37.164.740    | 100    | 39.208.800    | 100                                      | 176.641.531    | Transnaker                       |
| 2     | Program Penempatan Tenaga Kerja   | Besaran Pencari Kerja Yang ditempatkan                                     | Orang           | 306                               | 306  | 58.327.000    | 349        | 61.243.350    | 351     | 63.080.651    | 367      | 64.973.070    | 397     | 66.922.262    | 403    | 68.929.930    | 403                                      | 325.149.263    | Transnaker                       |
| 3     | Program Hubungan Industrial   | Persentase Penyelesaian Kasus Hubungan Industrial                          | %               | 0                                 | 100  | 42.862.063    | 100        | 45.005.166    | 100     | 46.355.321    | 100      | 47.745.981    | 100     | 49.178.360    | 100    | 50.653.711    | 100                                      | 238.938.539    | Transnaker                       |
| 4     | Program Pelatihan Kerja dan Produktivitas Tenaga Kerja                          | Jumlah Tenaga Kerja yang mendapat Pelatihan berbasis Kompetensi            | Orang           | 70                                | 70   | 108.838.250   | 75         | 114.280.163   | 77      | 117.708.567   | 80       | 121.239.824   | 83      | 124.877.019   | 85     | 128.623.330   | 85                                       | 606.728.903    | UPT BLK                          |
| 1 1 5 | Sasaran 5 : Meningkatkan ketahanan pangan                                       | Skor Pola Pangan Harapan   | Skor            | 79,6                              | 80,52  | 1.808.647.494 | 81,53      | 5.267.094.725 | 82,56   | 4.709.895.577 | 83,56    | 3.971.023.535 | 84,58   | 4.314.570.348 | 85,58  | 4.690.865.176 | 85,58                                    | 23.640.268.858 |                                  |
| 1 1 1 | Program Pengelolaan Sumber Daya Ekonomi Untuk Kedaulatan Dan Kemandirian Pangan | Persentase Desa Mandiri Pangan   | Persen          |                                   | 3,14   | 370.000.000   | 6,29       | 1.638.133.000 | 9,43    | 1.306.196.300 | 12,58    | 398.850.000   | 15,72   | 438.735.000   | 18,87  | 482.608.500   | 18,87                                    | 4.264.522.800  | Ketapang                         |
| 2     | Program Peningkatan Diversifikasi Dan Ketahanan Pangan Masyarakat               | Persentase Desa Lumbung Pangan   | Persen          |                                   | 2,52   | 686.819.497   | 5,03       | 2.181.668.753 | 7,55    | 1.869.658.241 | 10,60    | 1.936.724.065 | 12,58   | 2.130.396.471 | 15,09  | 2.343.436.119 | 15,09                                    | 10.461.883.649 | Ketapang                         |
| 3     | Program Penanganan Kerawanan Pangan   | Tingkat Penguatan Cadangan Pangan  | %               | 100                               | 100  | 21.394.500    | 100        | 323.590.500   | 100     | 348.449.550   | 100      | 383.294.505   | 100     | 421.623.956   | 100    | 463.786.351   | 100                                      | 1.940.744.862  | Ketapang                         |
|       |   | Persentase penanganan kerawanan pangan                                     | %               | 100                               | 100  |               | 100        |               | 100     |               | 100      |               | 100     |               | 100    |               | 100                                      |                |                                  |
| 4     | Program Pengawasan Keamanan Pangan  | Ketersediaan energi dan protein perkapita                                  | Kkl/Kapita/Hari |                                   | 2,753  | 43.614.000    | 2,811      | 402.542.000   | 2,870   | 442.796.200   | 2,928    | 487.075.820   | 2,986   | 535.783.402   | 3,046  | 589.361.742   | 3,046                                    | 2.457.559.164  | Ketapang                         |
|       |   |  | Gr/Kapita/Hari  |                                   | 70,86  |               | 72,27      |               | 75,34   |               | 76,85    |               | 78,39   |               | 79,95  |               | 79,95                                    |                |                                  |
| 5     | Program Peningkatan Diversifikasi Dan Ketahanan Pangan Masyarakat               | Skor PPH Konsumsi  | Skor            | 79,6                              | 79,6   | 686.819.497   | 81,15      | 721.160.472   | 81,93   | 742.795.286   | 82,70    | 765.079.145   | 83,48   | 788.031.519   | 84,25  | 811.672.464   | 84,25                                    | 4.515.558.383  | Ketapang                         |
| 1 1 6 | Sasaran 6 : Meningkatkan penanganan masalah kesejahteraan sosial                | Persentase Penurunan Warga Miskin (DTKS/Data Terpadu Kesejahteraan Sosial) | Persen          | 13,53                             | 12,87  | 3.383.816.692 | 12,21      | 3.555.437.982 | 11,55   | 3.662.101.121 | 10,89    | 3.771.964.155 | 10,23   | 3.885.123.079 | 9,57   | 4.001.676.772 | 9,57                                     | 18.876.303.108 |                                  |
| 1     | Program Pemberdayaan Sosial   | Persentase usaha ekonomi keluarga yang mendapatkan pembinaan               | %               |                                   | 51,61  | 2.344.756.042 | 53,85      | 2.461.993.844 | 55,22   | 2.535.853.659 | 56,52    | 2.611.929.269 | 57,14   | 2.690.287.147 | 61,64  | 2.770.995.762 | 61,64                                    | 13.071.059.682 | Dinas Sosial                     |

| Kode | Misi/Tujuan/Sasaran/ Program Pembangunan Daerah | Indikator Kinerja   | Satuan  | Kondisi Kinerja awal RPJMD (2020)                                    | Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan |         |                       |                |                       |                |                       |                |                       |                |                       |                | Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD |                | Perangkat daerah Penanggungjawab |                 |                 |
|------|---|---|---|--|--|---------|-----------------------|----------------|-----------------------|----------------|-----------------------|----------------|-----------------------|----------------|-----------------------|----------------|--|----------------|----------------------------------|-----------------|-----------------|
|      |   |   |   |  | 2021   |         | 2022                  |                | 2023                  |                | 2024                  |                | 2025                  |                | 2026                  |                | Target                                   | Rp.            |                                  |                 |                 |
|      |   |   |   |  | Target   | Rp.     | Target                | Rp.            | Target                | Rp.            | Target                | Rp.            | Target                | Rp.            | Target                | Rp.            |  |                |                                  |                 |                 |
| 1    | 2   | 3   | 4   | 5  | 6  | 7       | 8                     | 9              | 10                    | 11             | 12                    | 13             | 14                    | 15             | 16                    | 17             | 18                                       | 19             | 20                               |                 |                 |
|      | 2   | Program Rehabilitasi Sosial   | Persentase DTKS yang memperoleh pelayanan dan rehabilitasi  | %  |  | 30,09   | 221.566.900           | 31,44          | 235.075.700           | 34,25          | 242.127.971           | 40,00          | 249.391.810           | 49,64          | 256.873.564           | 59,43          | 264.579.771                              | 59,43          | 1.248.048.817                    | Dinas Sosial    |                 |
|      | 3   | Program Perlindungan dan Jaminan Sosial   | Persentase PPKS yang memperoleh bantuan sosial  | %  |  | 27,48   | 817.493.750           | 29,18          | 858.368.438           | 31,89          | 884.119.491           | 36,01          | 910.643.075           | 41,84          | 937.962.368           | 48,06          | 966.101.239                              | 48,06          | 4.557.194.610                    | Dinas Sosial    |                 |
| 2    |   | <b>Misi 2 : Meningkatkan ketersediaan infrastruktur dasar dan sarana prasarana kawasan permukiman</b> |   |  |  |         | <b>44.422.479.725</b> |                | <b>50.018.455.751</b> |                | <b>51.519.009.424</b> |                | <b>53.064.579.707</b> |                | <b>54.656.517.098</b> |                | <b>56.296.212.611</b>                    |                | <b>265.554.774.590</b>           |                 |                 |
| 2    | 1   | Tujuan 2 : Meningkatkan kualitas infrastruktur wilayah  | Persentase Keterhubungan /Konektivitas Wilayah  | Persen   | 85,15  | 85,84   | 44.422.479.725        | 86,53          | 50.018.455.751        | 87,22          | 51.519.009.424        | 87,91          | 53.064.579.707        | 88,6           | 54.656.517.098        | 89,29          | 56.296.212.611                           | 89,29          | 265.554.774.590                  |                 |                 |
| 2    | 1   | 1   | Sasaran 7 : Meningkatkan kapasitas infrastruktur wilayah  | Proporsi Panjang Jalan dan Jembatan Dalam Kondisi Mantap             | Persen   | 84,03   | 84,8057               | 31.901.750.996 | 85,5814               | 34.541.844.216 | 86,3571               | 87,1328        | 36.645.442.529        | 87,9085        | 37.744.805.804        | 88,684         | 38.877.149.979                           | 88,6842        | 183.387.342.070                  |                 |                 |
|      |   |   | Persentase Daerah Irigasi (DI) Yang Terlayani Jaringan Irigasi  | Persen   | 67,23  | 67,79   | 68,35                 |                | 68,91                 |                | 69,47                 | 70,03          |                       | 70,59          |                       | 70,59          |  |                |                                  |                 |                 |
|      | 1   | Program Pengelolaan Sumber Daya Air (SDA)   | Luas Daerah Irigasi Dalam Kondisi Baik  | Ha   | 2650   | 2.671,6 | 6.438.600.000         | 2.693,67       | 6.760.530.000         | 2.715,74       | 6.963.345.900         | 2.737,81       | 7.172.246.277         | 2.759,88       | 7.387.413.665         | 2.781,95       | 7.609.036.075                            | 2.781,95       | 35.892.571.918                   | Dinas PUPR      |                 |
|      | 2   | Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase  | Persentase Drainase Yang Terbangun  | %  |  | 41,48   |                       | -              | 42,91                 | 1.045.005.670  | 44,34                 | 1.076.355.840  | 45,77                 | 1.108.646.515  | 47,20                 | 1.141.905.911  | 48,63                                    | 1.176.163.088  | 48,63                            | 5.548.077.024   | Dinas PUPR      |
|      | 3   | Program Penataan Bangunan Gedung  | Persentase isian aplikasi SI-BPB  | %  |  | 27      | 631.300.000           | 38             | 662.865.000           | 53             | 682.750.950           | 64             | 703.233.479           | 85             | 724.330.483           | 95             | 746.060.397                              | 95             | 3.519.240.309                    | Dinas PUPR      |                 |
|      | 4   | Program Penyelenggaraan Jalan   | Panjang jalan dalam kondisi mantap  | Km   | 588,16   | 593,59  | 18.890.555.636        | 599,02         | 19.835.083.418        | 604,45         | 20.430.135.920        | 609,88         | 21.043.039.998        | 615,31         | 21.674.331.198        | 620,74         | 22.324.561.134                           | 620,74         | 105.307.151.668                  | Dinas PUPR      |                 |
|      | 6   | Program Penyelenggaraan Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan (LLAJ)   | Persentase Ketersediaan Fasilitas Perlengkapan Jalan (Rambu, Marka, APIL, Guadrail, Delinator, dll) yang berfungsi baik | %  | 30   | 30,00   | 3.949.302.500         | 34,39          | 4.146.767.625         | 36,58          | 4.271.170.654         | 38,78          | 4.399.305.773         | 40,97          | 4.531.284.947         | 43,16          | 4.667.223.495                            | 43             | 22.015.752.494                   | Dishub          |                 |
|      |   |   | Persentase Penurunan Angka Kecelakaan Lalu Lintas   | %  | 85   | 85,00   |                       | 86,75          |                       | 87,62          |                       | 88,50          |                       | 89,37          |                       | 90,24          |  | 90,24          |                                  |                 |                 |
|      | 7   | Program Pengelolaan Pelayaran   | Persentase Pelabuhan Rakyat/Dermaga Rakyat Yang Berfungsi Baik  | %  | 63,64  | 72,73   | 1.991.992.860         | 81,82          | 2.091.592.503         | 90,91          | 2.154.340.278         | 100            | 2.218.970.486         | 100            | 2.285.539.601         | 100            | 2.354.105.789                            | 100            | 11.104.548.658                   | Dishub          |                 |
| 2    | 1   | 2   | Sasaran 8 : Terpenuhinya sarana parasarana kawasan permukiman   | Persentase kawasan permukiman (Perkotaan/Perdesaan) yang tidak kumuh | Persen   | 78,45   | 81,58                 | 12.520.728.729 | 84,72                 | 15.476.611.535 | 87,85                 | 15.940.909.882 | 90,99                 | 16.419.137.178 | 94,12                 | 16.911.711.293 | 97,26                                    | 17.419.062.632 | 97,26                            | 82.167.432.520  |                 |
|      |   |   |   | Rasio Akses Air Minum Layak  | Persen   | 48,33   | 56,86                 |                | 59,2                  |                | 61,54                 |                | 63,88                 |                | 66,22                 |                | 68,79                                    |                | 68,79                            |                 |                 |
|      |   |   |   | Rasio Akses Sanitasi Layak   | Persen   | 36,31   | 39,28                 |                | 54,28                 |                | 56,62                 |                | 58,96                 |                | 61,3                  |                | 63,64                                    |                | 63,64                            |                 |                 |
|      |   |   |   | Cakupan layanan persampahan  | Persen   | 15,38   | 18,63                 |                | 21,88                 |                | 25,13                 |                | 28,38                 |                | 31,63                 |                | 34,88                                    |                | 34,88                            |                 |                 |
|      | 1   | Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum                                      | Rumah Tangga Pengguna Air Bersih Perpipa  | Unit   | 18812  | 18.853  | 5.735.526.386         | 18.894         | 6.022.302.705         | 18.935         | 6.202.971.786         | 18.976         | 6.389.060.940         | 19.017         | 6.580.732.768         | 19.058         | 6.778.154.751                            | 19.058         | 31.973.222.951                   | Dinas PUPR      |                 |
|      | 2   | Program Pengembangan Sistem Dan Pengelolaan Persampahan Regional                                      | Jumlah sarana dan prasarana pelayanan persampahan yang berfungsi baik   | Unit   |  | 5       |                       | -              | 5                     | 375.465.240    | 6                     | 386.729.197    | 6                     | 398.331.073    | 6                     | 410.281.005    | 6  | 422.589.435    | 6                                | 1.993.395.951   | Dinas PUPR      |
|      | 3   | Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah  | Penduduk Berakses Sanitasi Yang Layak   | KK   | 8562,55  | 8.813   | 1.953.358.363         | 9063           | 2.051.026.281         | 9313           | 2.112.557.070         | 9563           | 2.175.933.782         | 9813           | 2.241.211.795         | 10.063         | 2.308.448.149                            | 10.063         | 10.889.177.077                   | Dinas PUPR      |                 |
|      | 4   | Program Pengembangan Perumahan  | Persentase pembangunan perumahan untuk korban bencana alam  | %  |  | 0       |                       | -              | 5                     | 1.049.813.240  | 5                     | 1.081.307.637  | 5                     | 1.113.746.866  | 5                     | 1.147.159.272  | 5  | 1.181.574.050  | 25                               | 5.573.601.066   | Dinas Perumahan |
|      | 5   | Program Kawasan Permukiman  | Jumlah rumah layak huni   | Unit   | 12.766   | 12.816  | 2.786.883.980         | 12.896         | 2.926.228.179         | 12.996         | 3.014.015.024         | 13.096         | 3.104.435.475         | 13.196         | 3.197.568.539         | 13.296         | 3.293.495.596                            | 13.296         | 15.535.742.813                   | Dinas Perumahan |                 |
|      | 6   | Program Perumahan dan Kawasan Permukiman Kumuh  | Luas Kawasan Permukiman Kumuh Yang ditangani  | Ha   | 76,83  | 76,83   |                       | -              | 76,83                 | 904.567.890    | 76,83                 | 931.704.927    | 76,83                 | 959.656.075    | 76,83                 | 988.445.757    | 76,83                                    | 1.018.099.129  | 384                              | 4.802.473.777   | Dinas Perumahan |

| Kode | Misi/Tujuan/Sasaran/ Program Pembangunan Daerah  | Indikator Kinerja   | Satuan   | Kondisi Kinerja awal RPJMD (2020)                                    | Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan |                |                |                |                |                |                |                |                |                |                |                | Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD |                 | Perangkat daerah Penanggungjawab |                 |
|------|--|---|--|--|--|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|--|-----------------|----------------------------------|-----------------|
|      |  |   |  |  | 2021   |                | 2022           |                | 2023           |                | 2024           |                | 2025           |                | 2026           |                | Target                                   | Rp.             |                                  |                 |
|      |  |   |  |  | Target   | Rp.            | Target         | Rp.            | Target         | Rp.            | Target         | Rp.            | Target         | Rp.            | Target         | Rp.            |  |                 |                                  |                 |
| 1    | 2  | 3   | 4  | 5  | 6  | 7              | 8              | 9              | 10             | 11             | 12             | 13             | 14             | 15             | 16             | 17             | 18                                       | 19              | 20                               |                 |
| 7    | Program Peningkatan Prasarana, Sarana Dan Utilitas Umum (PSU)  | Persentase pembangunan sarana dan prasarana dan utilitas umum | %  |  | 100  | 2.044.960.000  | 100            | 2.147.208.000  | 100            | 2.211.624.240  | 100            | 2.277.972.967  | 100            | 2.346.312.156  | 100            | 2.416.701.521  | 100                                      | 11.399.818.884  | Dinas Perumahan                  |                 |
| 3    | <b>Misi 3 : Mewujudkan keadilan sosial dan nilai tambah dalam pengelolaan sumberdaya alam guna meningkatkan daya saing ekonomi</b> |   |  |  |  | 25.683.868.369 |                | 28.870.613.225 |                | 30.236.025.223 |                | 31.128.448.930 |                | 32.062.302.398 |                | 33.024.171.470 |  | 155.321.561.246 |                                  |                 |
| 3    | 1  | Tujuan 3 : Meningkatkan pertumbuhan dan daya saing ekonomi    | Pertumbuhan Ekonomi  | Persen   | -0,72  | 4,9            |                | 5,238          |                | 5,576          |                | 5,914          |                | 6,252          |                | 6,59           |  | 6,59            |                                  |                 |
|      |  |   | PDRB Perkapita   | Rp. Juta/Ijwa/Tahun  | 60,847   | 61,178         | 25.683.868.369 | 61,508         | 28.870.613.225 | 61,839         | 30.236.025.223 | 62,169         | 31.128.448.930 | 62,500         | 32.062.302.398 | 62,831         | 33.024.171.470                           | 62,831          | 155.321.561.246                  |                 |
|      |  |   | Tingkat Pengangguran Terbuka   | Persen   | 3,79   | 3,747          |                | 3,704          |                | 3,661          |                | 3,618          |                | 3,575          |                | 3,532          |  | 3,532           |                                  |                 |
|      |  |   | Indeks Gini  | Indeks   | 0,388  | 0,384          |                | 0,380          |                | 0,376          |                | 0,372          |                | 0,368          |                | 0,364          |  | 0,364           |                                  |                 |
|      |  |   | Tingkat Kemiskinan   | Persen   | 13,53  | 13,4           |                | 13,27          |                | 13,14          |                | 13,01          |                | 12,88          |                | 12,75          |  | 12,75           |                                  |                 |
| 3    | 1  | 1   | Sasaran 9 : Meningkatkan pertumbuhan sektor - sektor unggulan daerah                               | Pertumbuhan PDRB Sektor Pertanian, Kehutanan dan Perikanan           | Persen   | 39,75          | 39,888         |                | 40,026         |                | 40,164         |                | 40,302         |                | 40,44          |                | 40,578                                   |                 | 40,578                           |                 |
|      |  |   |  | Pertumbuhan PDRB Sektor Pertambangan dan Penggalian                  | Persen   | 21,24          | 21,29          |                | 21,34          |                | 21,39          |                | 21,44          |                | 21,49          |                | 21,54                                    |                 | 21,54                            |                 |
|      |  |   |  | Pertumbuhan PDRB Sektor Perdagangan                                  | Persen   | 11,78          | 11,802         | 24.950.999.755 | 11,824         | 27.685.196.650 | 11,846         | 29.015.046.151 | 11,868         | 29.885.497.536 | 11,89          | 30.782.062.462 | 11,912                                   | 31.705.524.336  | 11,912                           | 149.073.327.135 |
|      |  |   |  | Pertumbuhan PDRB Sektor Industri Pengolahan                          | Persen   | 1,13           | 1,138          |                | 1,146          |                | 1,154          |                | 1,162          |                | 1,17           |                | 1,178                                    |                 | 1,178                            |                 |
|      |  |   |  | Persentase PAD Sektor Pariwisata                                     | Persen   | 0,033462       | 0,043462       |                | 0,053462       |                | 0,063462       |                | 0,073462       |                | 0,08346        |                | 0,0935                                   |                 | 0,09346                          |                 |
|      |  |   |  | Nilai Omset Usaha Koperasi   | Rp. ribu                                       | 705.375        | 741.587        |                | 777.799        |                | 814.011        |                | 850.223        |                | 886.435        |                | 922.647                                  |                 | 922.647                          |                 |
|      | 1  | 1   | Program Pengelolaan Perikanan Tangkap  | Persentase Kelompok Nelayan yang di lakukan pembinaan                | Persen   | 40             | 50             | 3.286.068.875  | 60             | 3.450.372.319  | 70             | 3.553.883.488  | 80             | 3.660.499.993  | 90             | 3.770.314.993  | 100                                      | 3.883.424.443   | 100                              | 18.318.495.235  |
|      |  |   |  | Produktivitas perikanan tangkap                                      | Ton  | 15059          | 15.059         |                | 15.149         |                | 15.239         |                | 15.419         |                | 15.509         |                | 15.599                                   |                 | 15.599                           |                 |
|      | 2  | 2   | Program Pengelolaan Perikanan Budidaya   | Produktivitas perikanan budidaya                                     | Ton  | 8818,73        | 8.879,27       | 2.918.916.000  | 8.939,81       | 3.064.861.800  | 9.000,35       | 3.156.807.654  | 9.060,89       | 3.251.511.884  | 9.121,43       | 3.349.057.240  | 9.181,87                                 | 3.449.528.957   | 9.242,31                         | 16.271.767.535  |
|      |  |   |  | Persentase kelompok pembudidaya yang dibina                          | persen   | 40             | 50             |                | 60             |                | 70             |                | 80             |                | 85             |                | 95                                       |                 | 95                               |                 |
|      | 3  | 3   | Program Pengawasan Sumber Daya Kelautan Dan Perikanan  | Persentase POKMASWAS yang dibina                                     | persen   | 40             | 45             | 50.630.000     | 50             | 53.161.500     | 55             | 54.756.345     | 60             | 56.399.035     | 65             | 58.091.006     | 70                                       | 59.833.737      | 70                               | 282.241.623     |
|      | 4  | 4   | Program Pengolahan Dan Pemasaran Hasil Perikanan   | Persentase kelompok pengolah dan pemasar hasil perikanan yang dibina | persen   | 45             | 50             | 263.285.000    | 55             | 276.449.250    | 60             | 284.742.728    | 65             | 293.285.009    | 70             | 302.083.560    | 75                                       | 311.146.066     | 75                               | 1.467.706.613   |
|      | 5  | 5   | Program Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata  | Lama menginap  | Hari   | 1              | 1              | 378.055.891    | 2              | 396.958.686    | 2              | 408.867.446    | 3              | 421.133.469    | 3              | 433.767.474    | 4  | 446.780.498     | 4                                | 2.107.507.573   |
|      | 6  | 6   | Program Pemasaran Pariwisata   | Jumlah kunjungan wisata  | Jiwa   | 8187           | 9.084          | 944.445.717    | 9.981          | 991.668.003    | 10.878         | 1.021.418.043  | 11.775         | 1.052.060.584  | 12.672         | 1.083.622.402  | 13.569                                   | 1.116.131.074   | 13.569                           | 5.264.900.106   |
|      | 7  | 7   | Program Pengembangan Ekonomi Kreatif Melalui Pemanfaatan dan Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual | Persentase pengembangan prasarana ekonomi kreatif                    | persen   | 0              | -              |                | 10             | 200.000.000    | 40             | 305.987.200    | 50             | 315.166.816    | 55             | 324.621.820    | 60                                       | 334.360.475     | 60                               | 1.480.136.312   |
|      | 8  | 8   | Program Pengembangan Sumber Daya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif                                    | Persentase pembinaan ekonomi kreatif dan SDM kepariwisataan          | persen   | 100            |                | 80.174.626     | 100            | 84.183.357     | 100            | 86.708.858     | 100            | 89.310.124     | 100            | 91.989.427     | 100                                      | 94.749.110      | 100                              | 446.940.877     |
|      | 10   | 10  | Program Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian   | Produktivitas tanaman perkebunan                                     | Kw/Ha  | 417,3          | -              |                | 356.002.570    |                | 366.682.647    |                | 377.683.127    |                | 389.013.620    |                | 400.684.029                              |                 | 1.890.065.993                    |                 |
|      | 11   | 11  | Program Penyediaan dan Pengembangan Prasarana Pertanian  | Jumlah Produksi tanaman Perkebunan                                   | Ton  | 2.011          | 2.092          | 2.494.590.000  | 2.173          | 2.619.319.500  | 2.254          | 2.697.899.085  | 2.335          | 2.778.836.058  | 2.416          | 2.862.201.139  | 2.497                                    | 2.948.067.173   | 2.497                            | 13.906.322.955  |
|      |  |   |  | Jumlah Produksi tanaman Hortikultura                                 | kg   | 166.040        | 166.119        |                | 166.198        |                | 166.277        |                | 166.356        |                | 166.435        |                | 166.514                                  |                 | 166.514                          |                 |
|      | 12   | 12  | Program Pengendalian Dan Penanggulangan Bencana Pertanian  | Persentase luas areal pengendalian OPT                               | persen   | 0              |                | 98.750.250     | 14             | 98.750.250     | 14             | 101.712.758    | 14             | 104.764.140    | 14             | 107.907.064    | 14                                       | 111.144.276     | 70                               | 524.278.489     |
|      | 13   | 13  | Program Penyuluhan Pertanian   | Persentase peningkatan SDM kelembagaan kelompok tani                 | persen   | 100            |                | 70.547.500     | 100            | 74.074.875     | 100            | 76.297.121     | 100            | 78.586.035     | 100            | 80.943.616     | 100                                      | 83.371.924      | 100                              | 393.273.571     |
|      | 14   | 14  | Program Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian   | Produktivitas tanaman pangan   | Kw/Ha  | 432,71         |                | 63.000.000     | 463            | 66.150.000     | 493,29         | 68.134.500     | 523,58         | 70.178.535     | 553,87         | 72.283.891     | 584,16                                   | 74.452.408      | 584,16                           | 351.199.334     |
|      |  |   |  | Jumlah Produksi tanaman pangan                                       | ton  |                | 107.046        |                | 107.417        |                | 107.788        |                | 108.159        |                | 108.530        |                | 108.901                                  |                 | 108.901                          |                 |
|      | 15   | 15  | Program Penyediaan dan Pengembangan Prasarana Pertanian  | Jumlah produksi peternakan (Daging dan Telur)                        | kg   | 216.361        | 217.655        | 7.579.280.326  | 243.410        | 7.958.244.342  | 254.605        | 8.196.991.673  | 265.856        | 8.442.901.423  | 305.881        | 8.696.188.465  | 342.089                                  | 8.957.074.119   | 342.089                          | 42.251.400.022  |
|      | 16   | 16  | Program Pengendalian Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner                            | Persentase pengendalian penyakit hewan ternak                        | persen   | 50             |                | 137.911.288    | 60             | 144.806.852    | 60             | 149.151.058    | 65             | 153.625.590    | 70             | 158.234.357    | 70                                       | 162.981.388     | 70                               | 768.799.246     |

| Kode  | Misi/Tujuan/Sasaran/ Program Pembangunan Daerah                          | Indikator Kinerja   | Satuan      | Kondisi Kinerja awal RPJMD (2020) | Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan |               |             |               |             |               |             |               |             |               |             |               | Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD |                | Perangkat daerah Penanggungjawab  |
|-------|--|---|-------------|-----------------------------------|--|---------------|-------------|---------------|-------------|---------------|-------------|---------------|-------------|---------------|-------------|---------------|--|----------------|-----------------------------------|
|       |  |   |             |                                   | 2021   |               | 2022        |               | 2023        |               | 2024        |               | 2025        |               | 2026        |               | Target                                   | Rp.            |                                   |
|       |  |   |             |                                   | Target   | Rp.           | Target      | Rp.           | Target      | Rp.           | Target      | Rp.           | Target      | Rp.           | Target      | Rp.           |  |                |                                   |
| 1     | 2  | 3   | 4           | 5                                 | 6  | 7             | 8           | 9             | 10          | 11            | 12          | 13            | 14          | 15            | 16          | 17            | 18                                       | 19             | 20                                |
| 17    | Program Pengendalian Dan Penanggulangan Bencana Pertanian                | Persentase pengendalian bencana pertanian dan penanggulangannya     | %           |                                   | 100  | 524.282.750   | 100         | 550.496.888   | 100         | 567.011.794   | 100         | 584.022.148   | 100         | 601.542.812   | 100         | 619.589.097   | 100                                      | 2.922.662.739  | Dinas Tanaman Pangan & Peternakan |
| 18    | Program Perizinan Usaha Pertanian  | Persentase izin yang diterbitkan                                    | persen      |                                   | 80   | -             | 85          | 125.486.500   | 88          | 129.251.095   | 90          | 133.128.628   | 95          | 137.122.487   | 95          | 141.236.161   | 95                                       | 666.224.871    | Dinas Tanaman Pangan & Peternakan |
| 19    | Program Penyuluhan Pertanian   | Persentase peningkatan SDM kelembagaan kelompok tani                | persen      |                                   | 100  | 406.855.003   | 100         | 427.197.753   | 100         | 440.013.686   | 100         | 453.214.096   | 100         | 466.810.519   | 100         | 480.814.835   | 100                                      | 2.268.050.889  | Dinas Tanaman Pangan & Peternakan |
| 20    | Program Perizinan Dan Pendaftaran Perusahaan                             | Persentase pengajuan SKA yang diproses dan ditindaklanjuti          | persen      |                                   | 0  | 115.460.000   | 10          | 121.233.000   | 20          | 124.869.990   | 30          | 128.616.090   | 40          | 132.474.572   | 50          | 136.448.810   | 50                                       | 643.642.462    | Disperindag                       |
| 21    | Program Peningkatan Sarana Distribusi Perdagangan                        | Persentase pasar sehat  | pasar       | %                                 | 29,41  | 1.600.118.350 | 52,94       | 1.680.124.268 | 64,71       | 1.730.527.996 | 76,47       | 1.782.443.835 | 88,24       | 1.835.917.150 | 100,00      | 1.890.994.665 | 100                                      | 8.920.007.914  | Disperindag                       |
|       |  | Persentase peningkatan pelaku usaha perdagangan                     | pasar       | %                                 | 64,71  |               | 76,47       |               | 82,35       |               | 88,24       |               | 94,12       |               | 100,00      |               | 100                                      |                |                                   |
| 22    | Program Stabilisasi Harga Barang Kebutuhan Pokok Dan Barang Penting      | Persentase stabilisasi jenis barang penting                         | persen      |                                   | 40   | 157.804.962   | 45          | 165.695.210   | 45          | 170.666.066   | 50          | 175.786.048   | 50          | 181.059.630   | 55          | 186.491.419   | 55                                       | 879.698.373    | Disperindag                       |
| 23    | Program Standardisasi Dan Perlindungan Konsumen                          | Jumlah Omset yang dihasilkan dari Usaha Sektor Perdagangan          | persen      | 51,28                             | 51,49  | 204.129.000   | 51,7        | 214.335.450   | 51,91       | 220.765.514   | 52,12       | 227.388.479   | 52,33       | 234.210.133   | 52,54       | 241.236.437   | 52,54                                    | 1.137.936.013  | Disperindag                       |
| 24    | Program Penggunaan Dan Pemasaran Produk Dalam Negeri                     | Kontribusi Sektor Perdagangan                                       | persen      |                                   | 12,6   | -             | 13,42       | -             | 14,24       | -             | 15,06       | -             | 15,88       | -             | 16,70       | -             | 16,70                                    | -              | Disperindag                       |
| 25    | Program Perencanaan Dan Pembangunan Industri                             | Jumlah Omset yang dihasilkan dari Sektor Usaha Perindustrian        | %           |                                   | 63,3   | 792.984.541   | 63,55       | 832.633.768   | 63,80       | 857.612.781   | 64,05       | 883.341.165   | 64,30       | 909.841.399   | 64,55       | 937.136.641   | 64,80                                    | 4.420.565.755  | Disperindag                       |
| 26    | Program Pengendalian Izin Usaha Industri Kabupaten/Kota                  | Persentase IUI dan IUKI efektif                                     | %           | 20                                | 20   | -             | 20          | 86.754.850    | 20          | 89.357.496    | 20          | 92.038.220    | 20          | 94.799.367    | 20          | 97.643.348    | 20                                       | 460.593.281    | Disperindag                       |
| 27    | Program Perencanaan Kawasan Transmigrasi                                 | Persentase ketersediaan dperencanaan daerah kawasan transmigrasi    | persen      |                                   | 100  | 22.019.000    | 100         | 23.119.950    | 100         | 423.119.950   | 100         | 435.813.549   | 100         | 448.887.955   | 100         | 462.354.594   | 100                                      | 1.793.295.997  | Transnaker                        |
| 28    | Program Pembangunan Kawasan Transmigrasi                                 | Persentase pembangunan sarana dan prasarana di kawasan transmigrasi | persen      |                                   | 100  | 1.939.332.113 | 100         | 2.036.298.719 | 100         | 2.097.387.680 | 100         | 2.160.309.311 | 100         | 2.225.118.590 | 100         | 2.291.872.148 | 100                                      | 10.810.986.447 | Transnaker                        |
| 29    | Program Pengembangan Kawasan Transmigrasi                                | Persentase warga transmigrasi yang mandiri                          | persen      |                                   | 100  | 64.454.000    | 100         | 67.676.700    | 100         | 69.707.001    | 100         | 71.798.211    | 100         | 73.952.157    | 100         | 76.170.722    | 100                                      | 359.304.791    | Transnaker                        |
| 30    | Program Pengawasan dan Pemeriksaan Koperasi                              | Persentase koperasi aktif yang dibina                               | Koperasi    |                                   | 22,32  | 74.845.063    | 31,25       | 78.587.316    | 35,71       | 80.944.936    | 37,95       | 83.373.284    | 40,18       | 85.874.482    | 42,41       | 88.450.717    | 42,41                                    | 417.230.734    | Dikop & UMKM                      |
| 31    | Program Penilaian Kesehatan Ksp/Usp Koperasi                             | Persentase koperasi sehat   | %           |                                   | 16   | 39.084.500    | 17          | 41.038.725    | 18          | 42.269.887    | 19          | 43.537.983    | 20          | 44.844.123    | 21          | 46.189.447    | 21                                       | 217.880.164    | Dikop & UMKM                      |
| 32    | Program Pendidikan Dan Latihan Perkoperasian                             | Persentase peningkatan koperasi yang mengikuti pelatihan            | %           |                                   | 55,74  | -             | 67,57       | 155.837.000   | 74,32       | 160.512.110   | 81,08       | 165.327.473   | 84,46       | 170.287.297   | 87,84       | 175.395.916   | 87,84                                    | 827.359.797    | Dikop & UMKM                      |
| 33    | Program Pemberdayaan Dan Perlindungan Koperasi                           | Persentase koperasi aktif   | %           | 76,69                             | 76,01  | 204.520.000   | 76,35       | 214.746.000   | 77,03       | 221.188.380   | 77,70       | 227.824.031   | 79,39       | 234.658.752   | 81,08       | 241.698.515   | 81                                       | 1.140.115.679  | Dikop & UMKM                      |
| 34    | Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil, Dan Usaha Mikro (UMKM) | Persentase wirausaha baru   | %           |                                   | 0,90   | 439.455.000   | 0,39        | 461.427.750   | 0,76        | 475.270.583   | 0,77        | 489.528.700   | 0,78        | 504.214.561   | 0,79        | 519.340.998   | 0,79                                     | 2.449.782.591  | Dikop & UMKM                      |
| 35    | Program Pengembangan UMKM  | Jumlah UMKM yang dibina   | UMKM        |                                   | -  | 50            | 567.503.500 | 50            | 584.528.605 | 50            | 602.064.463 | 50            | 620.126.397 | 50            | 638.730.189 | 50            | 3.012.953.154                            | Dikop & UMKM   |                                   |
| 3 1 2 | Sasaran 10 : Meningkatkan investasi daerah                               | Pertumbuhan Investasi PMDN dan PMA                                  | Persen      | 11,86                             | 13,488   | 732.868.614   | 15,116      | 1.185.416.575 | 16,744      | 1.220.979.072 | 18,372      | 1.242.951.394 | 20          | 1.280.239.936 | 21,628      | 1.318.647.134 | 21,628                                   | 6.248.234.111  |                                   |
| 1     | Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal                               | Jumlah Perbup yang mendukung iklim Investasi                        | Perbup      |                                   | 0  | -             | 2           | 250.000.000   | 3           | 257.500.000   | 4           | 250.567.950   | 5           | 258.084.989   | 6           | 265.827.538   | 6  | 1.281.980.477  | DPMPSTP                           |
| 2     | Program Promosi Penanaman Modal  | Jumlah nilai investasi PMA/PMDN                                     | Rp (milyar) | 163,88                            | 180,99   | 118.628.000   | 198,1       | 124.559.400   | 215,21      | 128.296.182   | 232,32      | 132.145.067   | 249,43      | 136.109.419   | 266,54      | 140.192.702   | 266,54                                   | 661.302.771    | DPMPSTP                           |
| 3     | Program Pelayanan Penanaman Modal  | Lama proses perizinan   | hari        | 2                                 | 2  | 291.667.614   | 2           | 306.250.995   | 2           | 315.438.525   | 2           | 324.901.680   | 2           | 334.648.731   | 2           | 344.688.193   | 2  | 1.625.928.123  | DPMPSTP                           |
| 4     | Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal                         | Persentase pengawasan investasi                                     | %           |                                   | 100  | 322.573.000   | 100         | 338.701.650   | 100         | 348.862.700   | 100         | 359.328.580   | 100         | 370.108.438   | 100         | 381.211.691   | 100                                      | 1.798.213.059  | DPMPSTP                           |
| 5     | Program Pengelolaan data Dan Sistem Informasi Penanaman Modal            | Jumlah izin yang diterbitkan  | Izin        |                                   | 290  | -             | 345         | 165.904.530   | 398         | 170.881.666   | 442         | 176.008.116   | 495         | 181.288.359   | 500         | 186.727.010   | 500                                      | 880.809.681    | DPMPSTP                           |
|       |  | Survey Kepuasan Masyarakat  | %           | 76,61                             | 77,24  | -             | 77,78       | -             | 78,45       | -             | 79,21       | -             | 79,86       | -             | 80,36       | -             | 80,36                                    | -              |                                   |

| Kode | Misi/Tujuan/Sasaran/ Program Pembangunan Daerah   | Indikator Kinerja  | Satuan   | Kondisi Kinerja awal RPJMD (2020)  | Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                 | Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD |                   | Perangkat daerah Penanggungjawab |                   |                |         |
|------|---|--|--|--|--|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|--|-------------------|----------------------------------|-------------------|----------------|---------|
|      |   |  |  |  | 2021   |                 | 2022            |                 | 2023            |                 | 2024            |                 | 2025            |                 | 2026            |                 | Target                                   | Rp.               |                                  |                   |                |         |
|      |   |  |  |  | Target   | Rp.             | Target          | Rp.             | Target          | Rp.             | Target          | Rp.             | Target          | Rp.             | Target          | Rp.             |  |                   |                                  |                   |                |         |
| 1    | 2   | 3  | 4  | 5  | 6  | 7               | 8               | 9               | 10              | 11              | 12              | 13              | 14              | 15              | 16              | 17              | 18                                       | 19                | 20                               |                   |                |         |
| 4    | Misi 4 : Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang akuntabel, mendorong reformasi birokrasi, dan pelayanan publik yang prima |  |  |  |  | 274.330.703.231 |                 | 290.761.193.580 |                 | 299.973.923.530 |                 | 308.581.302.293 |                 | 317.723.385.973 |                 | 326.702.056.018 |  | 1.544.831.956.394 |                                  |                   |                |         |
| 4    | 1   | Tujuan 4 : Meningkatkan kualitas tata kelola pemerintahan yang efektif dan efisien | Indeks Reformasi Birokrasi   | Indeks   | 50,08  | 50,242          | 274.330.703.231 | 50,404          | 290.761.193.580 | 50,566          | 299.973.923.530 | 50,728          | 308.581.302.293 | 50,89           | 317.723.385.973 | 51,052          | 326.702.056.018                          | 51,052            | 1.544.831.956.394                |                   |                |         |
| 4    | 1   | 1  | Sasaran 11 : Meningkatkan akuntabilitas kinerja pemerintahan dan pengelolaan keuangan daerah | Nilai SAKIP  | Kategori                                       | B               | B               |                 | BB                                       |                   | BB                               |                   |                |         |
|      |   |  | Opini BPK  | Kategori   | WTP  | WTP             | 249.716.836.009 |                 | 264.601.887.730 |                 | 272.946.832.691 |                 | 280.739.868.730 |                 | 289.046.709.402 |                 | 297.165.079.150                          |                   | 1.405.590.472.703                |                   |                |         |
|      |   | 1  | Program Penyelenggaraan Statistik Sektoral   | Persentase sistem data dan statistik yang terintegrasi                         | Persen   | -               | 25              | 72.187.500      | 35              | 440.000.000     | 45              | 887.250.000     | 55              | 969.112.500     | 65              | 1.102.568.125   | 75                                       | 1.157.696.531     | 75                               | 4.628.814.656     | Bappeda        |         |
|      |   | 2  | Program Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat  | Jumlah Sarana dan Prasarana keagamaan Yang Dibangun/Rehabilitasi               | unit   | 64              | 64              | 6.310.969.000   | 64              | 6.626.517.450   | 64              | 6.825.312.974   | 64              | 7.030.072.363   | 64              | 7.240.974.534   | 64                                       | 7.458.203.770     | 64                               | 35.181.081.089    | Setda          |         |
|      |   |  |  | Nilai EKPPD  | nilai  | baik            | baik            |                 |                 | baik            |                 | baik            |                 | baik            |                 | baik            |  | baik              |                                  | baik              |                |         |
|      |   | 3  | Program Perekonomian dan Pembangunan   | Persentase penyerapan anggaran pembangunan dan realisasinya                    | persen   | 88              | 90              | 884.363.813     | 93              | 928.582.004     | 95              | 956.439.464     | 95              | 985.132.648     | 95,5            | 1.014.686.627   | 96                                       | 1.045.127.226     | 96                               | 4.929.967.968     | Setda          |         |
|      |   | 4  | Program Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah                            | Persentase konsistensi pelaksanaan pembangunan                                 | persen   | 93,35           | 93,92           |                 | 94,49           |                 | 95,06           |                 | 95,63           |                 | 96,2            |                 | 96,77                                    |                   | 96,77                            |                   | 71.571.808.691 | Bappeda |
|      |   |  |  | Persentase Keterukuran Indikator Perencanaan                                   | persen   | 100             | 100,00          | 12.294.019.864  | 100             | 13.575.662.377  | 100             | 13.973.878.358  | 100             | 14.242.890.061  | 100             | 14.596.930.883  | 100                                      | 14.843.144.511    | 100                              |                   |                |         |
|      |   |  |  | Persentase Tingkat Partisipatif Perencanaan                                    | persen   | 12,77           | 15,27           |                 | 17,77           |                 | 20,27           |                 | 22,27           |                 | 25,27           |                 | 27,77                                    |                   | 27,77                            |                   |                |         |
|      |   | 5  | Program Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah                           | Persentase sinergitas perencanaan  | persen   | 74,16           | 75              | 11.476.479.364  | 75,06           | 12.714.736.207  | 75,51           | 13.087.124.403  | 75,96           | 13.329.533.488  | 76,41           | 13.656.173.612  | 76,86                                    | 13.874.164.522    | 76,86                            | 67.001.034.732    | Bappeda        |         |
|      |   |  |  | Persentase OPD Yang Pencapaian Kinerja Sesuai Target                           | persen   | 77,27           | 78              |                 | 79,21           |                 | 80,18           |                 | 81,15           |                 | 82,12           |                 | 83,09                                    |                   | 83,09                            |                   |                |         |
|      |   | 6  | Program Penelitian dan Pengembangan Daerah   | Persentase implementasi rencana kelitbang.                                     | Persen   |                 | 25              | 339.302.500     | 30              | 1.020.700.500   | 35              | 1.042.267.625   | 40              | 923.331.006     | 45              | 877.785.057     | 50                                       | 712.424.309       | 50                               | 4.915.810.997     | Bappeda        |         |
|      |   | 7  | Program Pengelolaan Keuangan Daerah  | Penetapan APBD/APBDP tepat waktu   | Tepat Waktu                                    |                 | Tepat Waktu     | 197.124.097.274 | Tepat Waktu     | 206.980.302.138 | Tepat Waktu     | 213.189.711.202 | Tepat Waktu     | 219.585.402.538 | Tepat Waktu     | 226.172.964.614 | Tepat Waktu                              | 232.958.153.552   | Tepat Waktu                      | 1.098.886.534.044 | BKAD           |         |
|      |   | 8  | Program Pengelolaan Barang Milik Daerah  | Persentase aset pemda yang terinventarisir                                     | persen   |                 | 90              | 2.296.133.800   | 90              | 2.410.940.490   | 90              | 2.483.268.705   | 90              | 2.557.766.766   | 90              | 2.634.499.769   | 90                                       | 2.713.534.762     | 90                               | 12.800.010.491    | BKAD           |         |
|      |   | 9  | Program Pengelolaan Keuangan Daerah  | Tingkat kemandirian keuangan daerah (Rasio PAD dibandingkan pendapatan daerah) | persen   | 1,79            | 3,38            | 9.856.204.864   | 3,72            | 10.349.015.107  | 4,31            | 10.659.485.560  | 4,53            | 10.979.270.127  | 4,84            | 11.308.648.231  | 5,12                                     | 11.647.907.678    | 5,12                             | 54.944.326.702    | Bapenda        |         |
|      |   | 10   | Program Pengelolaan Pendapatan Daerah  | Persentase kenaikan pendapatan daerah  | persen   | 5,5             | 27              | 817.540.500     | 30              | 858.417.525     | 32              | 884.170.051     | 35              | 910.695.152     | 37              | 938.016.007     | 40                                       | 966.156.487       | 40                               | 4.557.455.222     | Bapenda        |         |
|      |   | 11   | Program Penyelenggaraan Pengawasan   | Persentase penyelesaian tindak lanjut temuan hasil pemeriksaan BPK             | persen   |                 | 80,44           | 2.086.908.000   | 80,5            | 2.191.253.400   | 80,56           | 2.256.991.002   | 80,62           | 2.324.700.732   | 80,69           | 2.394.441.754   | 80,75                                    | 2.466.275.007     | 80,75                            | 11.633.661.895    | Inspektorat    |         |

| Kode | Misi/Tujuan/Sasaran/ Program Pembangunan Daerah | Indikator Kinerja  | Satuan  | Kondisi Kinerja awal RPJMD (2020) | Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan |               |                |               |                |               |                |               |                |               |                |               | Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD |                | Perangkat daerah Penanggungjawab |                |               |      |
|------|---|--|---|-----------------------------------|--|---------------|----------------|---------------|----------------|---------------|----------------|---------------|----------------|---------------|----------------|---------------|--|----------------|----------------------------------|----------------|---------------|------|
|      |   |  |   |                                   | 2021   |               | 2022           |               | 2023           |               | 2024           |               | 2025           |               | 2026           |               | Target                                   | Rp.            |                                  |                |               |      |
|      |   |  |   |                                   | Target   | Rp.           | Target         | Rp.           | Target         | Rp.           | Target         | Rp.           | Target         | Rp.           | Target         | Rp.           |  |                |                                  |                |               |      |
| 1    | 2   | 3  | 4   | 5                                 | 6  | 7             | 8              | 9             | 10             | 11            | 12             | 13            | 14             | 15            | 16             | 17            | 18                                       | 19             | 20                               |                |               |      |
|      | 12  | Program Perumusan Kebijakan, Pendampingan Dan Asistensi                | Tingkat leveling kapabilitas Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP)   | level                             |  | 2             | 1.280.972.000  | 2             | 1.345.020.600  | 3             | 1.385.371.218  | 3             | 1.426.932.355  | 3             | 1.469.740.325  | 3             | 1.513.832.535                            | 3              | 7.140.897.033                    | Inspektorat    |               |      |
|      | 13  | Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik              | Persentase pelimpahan wewenang administrasi urusan pemerintahan yang dilaksanakan oleh camat                          | Persen                            | 53,48  | -             | 53,91          | 52,34         | 50,91          | 54,35         | 53,91          | 54,78         | 55,53          | 55,22         | 57,19          | 55,65         | 58,91                                    | 55,65          | 27.790.671                       | Kecamatan      |               |      |
|      | 14  | Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum                     | Terlaksananya koordinasi dan pengawasan keamanan dan ketertiban umum di wilayah kecamatan                             | persen                            | 100  | -             | 100            | 2.508.645     | 100            | 2.583.904     | 100            | 2.661.421     | 100            | 2.741.264     | 100            | 2.823.502     | 100                                      | 13.318.737     | Kecamatan                        |                |               |      |
|      | 15  | Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum                       | Persentase penyelenggaraan urusan pemerintahan  | persen                            | 100  | -             | 100            | 31.456.380    | 100            | 32.400.071    | 100            | 33.372.074    | 100            | 34.373.236    | 100            | 35.404.433    | 100                                      | 167.006.194    | Kecamatan                        |                |               |      |
|      | 16  | Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan                     | Persentase Pemberdayaan Masyarakat  | Persen                            | 57   | 4.877.657.531 | 59             | 5.121.540.408 | 62             | 5.275.186.620 | 66             | 5.433.442.218 | 69             | 5.596.445.485 | 72             | 5.764.338.849 | 72                                       | 27.190.953.580 | Kecamatan                        |                |               |      |
| 4    | 1   | 2  | Sasaran 12 : Terwujudnya birokrasi yang kapabel, optimalnya implementasi SPBE, serta pelayanan publik yang terpercaya | Indeks Maturitas Kelembagaan      | Level  | 1             | 1              | 2             | 3              | 3             | 3              | 3             | 3              | 3             | 3              | 3             | 3  | 3              | 3                                |                |               |      |
|      |   |  | Indeks SPBE (Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE))  | Indeks                            | 1,3  | 1,38          | 15.543.275.606 | 1,46          | 16.549.505.204 | 1,54          | 17.128.996.172 | 1,62          | 17.646.396.058 | 1,7           | 18.175.787.939 | 1,78          | 18.721.061.577                           | 1,78           | 88.221.746.951                   |                |               |      |
|      |   |  | Indeks Kepuasan Masyarakat  | Indeks                            | 3,34   | 3,41          | 3,48           | 3,55          | 3,62           | 3,69          | 3,76           |               |                |               |                |               |  |                |                                  |                |               |      |
|      | 1   | Program Pendaftaran Penduduk   | Kepemilikan dokumen kependudukan Berbasis Elektronik  | %                                 | 100  | 100           | 420.946.000    | 100           | 441.993.300    | 100           | 455.253.099    | 100           | 468.910.692    | 100           | 482.978.013    | 100           | 497.467.353                              | 100            | 2.346.602.457                    | Dukcapil       |               |      |
|      | 2   | Program Pencatatan Sipil   | Persentase Kepemilikan dokumen Pencatatan Sipil Berbasis Elektronik   | %                                 | 95   | 95            | 252.838.500    | 95            | 265.480.425    | 100           | 273.444.838    | 100           | 281.648.183    | 100           | 290.097.628    | 100           | 298.800.557                              | 100            | 1.409.471.631                    | Dukcapil       |               |      |
|      | 3   | Program Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan                | OPD Yang Memanfaatkan Data Kependudukan   | OPD                               | 4  | 4             | 190.766.500    | 7             | 200.304.825    | 8             | 206.313.970    | 9             | 212.503.389    | 10            | 218.878.491    | 11            | 225.444.845                              | 11             | 1.063.445.519                    | Dukcapil       |               |      |
|      | 4   | Program Pengelolaan Profil Kependudukan                                | Jumlah Data Base kependudukan terupdate   | Database                          | 1  | -             | 1              | 240.975.630   | 1              | 248.204.899   | 1              | 255.651.046   | 1              | 263.320.577   | 1              | 271.220.195   | 1  | 1.279.372.347  | Dukcapil                         |                |               |      |
|      | 5   | Program Informasi Dan Komunikasi Publik                                | Persentase Pengelolaan Layanan Pengaduan Berbasis Online Yang didistribusikan ke OPD                                  | %                                 | 0  | 0             | 192.882.500    | 25            | 202.526.625    | 45            | 208.602.424    | 69            | 214.860.496    | 75            | 221.306.311    | 80            | 227.945.501                              | 80             | 1.075.241.357                    | Diskominfo     |               |      |
|      | 6   | Program Pengelolaan Aplikasi Informatika                               | Jumlah Penerapan SPBE   | aplikasi                          | 1  | 1             | 524.215.000    | 3             | 550.425.750    | 3             | 566.938.523    | 5             | 583.946.678    | 5             | 601.465.079    | 7             | 619.509.031                              | 7              | 2.922.285.060                    | Diskominfo     |               |      |
|      | 7   | Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Kepemudaan                   | Jumlah Organisasi Kepemudaan yang dibina  | Organisasi                        | 12   | 12            | 1.069.737.617  | 12            | 1.123.224.498  | 12            | 1.156.921.233  | 13            | 1.191.628.870  | 13            | 1.227.377.736  | 13            | 1.264.199.068                            | 13             | 5.963.351.404                    | Dikpora        |               |      |
|      | 8   | Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Keolahragaan                 | Jumlah Cabang Olahraga Yang Berprestasi   | Cabor                             | 7  | 7             | 4.896.674.876  | 7             | 5.141.508.620  | 8             | 5.295.753.878  | 8             | 5.454.626.495  | 8             | 5.618.265.290  | 8             | 5.786.813.248                            | 8              | 27.296.967.531                   | Dikpora        |               |      |
|      | 9   | Program Pembinaan Perpustakaan   | Pertumbuhan Pengunjung Perpustakaan Daerah  | %                                 | 30,00  | 791.403.275   | 49,87          | 830.973.439   | 50,00          | 855.902.642   | 58,13          | 881.579.721   | 65,75          | 908.027.113   | 69,81          | 935.267.926   | 69,81                                    | 4.411.750.841  | Dinas Perpustakaan               |                |               |      |
|      | 10  | Program Pengelolaan Arsip  | Persentase Penyelamatan Arsip Yang Telah Direservasi  | persen                            | 13,35  | 106.476.588   | 15,23          | 111.800.417   | 16,15          | 115.154.430   | 27,31          | 118.609.063   | 33,05          | 122.167.335   | 36,22          | 125.832.355   | 36,22                                    | 593.563.600    | Dinas Perpustakaan               |                |               |      |
|      | 11  | Program Perlindungan Dan Penyelamatan Arsip                            | Persentase perlindungan dan penyelamatan arsip  | persen                            | 19,67  | 238.196.250   | 23,22          | 238.196.250   | 25,32          | 249.000.000   | 28,41          | 260.000.000   | 32,58          | 267.800.000   | 35,69          | 275.834.000   | 35,69                                    | 1.290.830.250  | Dinas Perpustakaan               |                |               |      |
|      | 12  | Program Perizinan Penggunaan Arsip                                     | Jumlah izin penggunaan arsip yang diterbitkan   | izin                              | 0  | -             | 0              | -             | 1              | 79.347.950    | 1              | 81.728.389    | 1              | 84.180.240    | 1              | 86.705.647    | 1  | 331.962.226    | Dinas Perpustakaan               |                |               |      |
|      | 13  | Program Dukungan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRD                     | Persentase Peraturan Daerah Yang Dihasilkan   | persen                            | 52   | 6.859.138.500 | 54             | 7.202.095.425 | 56             | 7.418.158.288 | 58             | 7.640.703.036 | 60             | 7.869.924.127 | 62             | 8.106.021.851 | 62                                       | 38.236.902.728 | Sekwan                           |                |               |      |
| 4    | 1   | 3  | Sasaran 13 : Meningkatkan kualitas manajemen ASN  | Indeks Merit System               | Indeks   | 162           | 177            | 8.312.388.116 | 192            | 8.728.007.522 | 207            | 8.989.847.747 | 222            | 9.259.543.180 | 237            | 9.537.329.475 | 252                                      | 9.823.449.360  | 252                              | 46.338.177.284 |               |      |
|      | 1   | Program Kepegawaian Daerah   | Persentase Penempatan Pegawai Sesuai Kompetensi   | persen                            | 71,73  | 4.156.194.058 | 73,46          | 4.364.003.761 | 75,19          | 4.494.923.874 | 76,92          | 4.629.771.590 | 78,65          | 4.768.664.738 | 80,38          | 4.911.724.680 | 80,38                                    | 23.169.088.642 | BKPSDM                           |                |               |      |
|      | 2   | Program Pengembangan Sumber Daya Manusia                               | Persentase Peningkatan Kualitas SDM Aparatur  | persen                            | 81,81  | 4.156.194.058 | 83,12          | 4.364.003.761 | 84,43          | 4.494.923.874 | 85,74          | 4.629.771.590 | 87,05          | 4.768.664.738 | 88,36          | 4.911.724.680 | 88,36                                    | 23.169.088.642 | BKPSDM                           |                |               |      |
| 4    | 1   | 4  | Sasaran 14 : Meningkatkan kapasitas pemerintahan desa   | Indeks Desa Membangun             | Indeks   | 0,5855        | 0,594583       | 758.203.500   | 0,6036667      | 881.793.125   | 0,61275        | 908.246.919   | 0,621833       | 935.494.326   | 0,63092        | 963.559.156   | 0,64                                     | 992.465.931    | 0,64                             | 4.681.559.457  |               |      |
|      | 1   | Program Penataan Desa  | Persentase BPD, LPM, dan PKK aktif  | persen                            | 100  | 100           | -              | 85.679.450    | 100            | 88.249.834    | 100            | 90.897.329    | 100            | 93.624.248    | 100            | 96.432.976    | 100                                      | 454.883.836    | 100                              | 454.883.836    | DPMD          |      |
|      | 2   | Program Peningkatan Kerjasama Desa                                     | Jumlah Desa Berkembang  | Desa                              | 68   | 68            | 68.857.000     | 74            | 72.299.850     | 77            | 74.468.846     | 79            | 76.702.911     | 80            | 79.003.998     | 81            | 81.374.118                               | 81             | 383.849.723                      | 81             | 383.849.723   | DPMD |
|      | 3   | Program Administrasi Pemerintahan Desa                                 | Persentase Penyampaian RKPDes, APBDes, dan Laporan Keuangan Desa Tepat Waktu dan Sesuai Peraturan Bupati              | %                                 | 81,76  | 81,76         | 322.068.875    | 82,88         | 338.172.319    | 83,45         | 348.317.488    | 84,01         | 358.767.013    | 84,57         | 369.530.023    | 85,13         | 380.615.924                              | 85             | 1.795.402.767                    | 85             | 1.795.402.767 | DPMD |
|      | 4   | Program Pemberdayaan Lembaga Masyarakat Adat Dan Masyarakat Hukum Adat | Persentase 1(satu) BUMDes dalam 1(satu) Desa Yang Aktif   | %                                 | 100  | 100           | 367.277.625    | 100           | 385.641.506    | 100           | 397.210.751    | 100           | 409.127.074    | 100           | 421.400.886    | 100           | 434.042.913                              | 100            | 2.047.423.131                    | 100            | 2.047.423.131 | DPMD |

| Kode | Misi/Tujuan/Sasaran/ Program Pembangunan Daerah | Indikator Kinerja  | Satuan  | Kondisi Kinerja awal RPJMD (2020)  | Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan |        |                      |               |                      |               |                      |               |                       |               |                       |               | Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD |               | Perangkat daerah Penanggungjawab |                |              |
|------|---|--|---|--|--|--------|----------------------|---------------|----------------------|---------------|----------------------|---------------|-----------------------|---------------|-----------------------|---------------|--|---------------|----------------------------------|----------------|--------------|
|      |   |  |   |  | 2021   |        | 2022                 |               | 2023                 |               | 2024                 |               | 2025                  |               | 2026                  |               | Target                                   | Rp.           |                                  |                |              |
|      |   |  |   |  | Target   | Rp.    | Target               | Rp.           | Target               | Rp.           | Target               | Rp.           | Target                | Rp.           | Target                | Rp.           |  |               |                                  |                |              |
| 1    | 2   | 3  | 4   | 5  | 6  | 7      | 8                    | 9             | 10                   | 11            | 12                   | 13            | 14                    | 15            | 16                    | 17            | 18                                       | 19            | 20                               |                |              |
| 5    |   | <b>Misi 5 : Meningkatkan kualitas lingkungan hidup dan ketahanan bencana</b>                                   |   |  |  |        | <b>9.064.460.893</b> |               | <b>9.587.052.078</b> |               | <b>9.893.463.640</b> |               | <b>10.208.467.549</b> |               | <b>10.514.721.576</b> |               | <b>10.830.163.223</b>                    |               | <b>51.033.868.065</b>            |                |              |
| 5    | 1   | Tujuan 5 : Meningkatkan kualitas lingkungan hidup  | Indeks Kualitas Lingkungan Hidup  | Indeks   | 58,84  | 59,67  | 9.064.460.893        | 60,5          | 9.587.052.078        | 61,33         | 9.893.463.640        | 62,16         | 10.208.467.549        | 62,99         | 10.514.721.576        | 63,82         | 10.830.163.223                           | 63,82         | 51.033.868.065                   |                |              |
| 5    | 1   | 1  | Sasaran 15 : Terjaganya kualitas pemanfaatan dan pengendalian pemanfaatan ruang   | Persentase Ketaatan terhadap Perencanaan Tata Ruang  | Persen   | 80     | 80,49                | 2.464.797.000 | 80,98                | 2.588.036.850 | 81,47                | 2.665.677.956 | 81,96                 | 2.745.648.294 | 82,45                 | 2.828.017.743 | 82,94                                    | 2.912.858.275 | 82,94                            | 13.740.239.118 |              |
|      |   | 1  | Program Penyelenggaraan Penataan Ruang  | Persentase Ketaatan terhadap Rencana Tata Ruang Wilayah  | %  | 80     | 80                   | 1.799.131.000 | 80,98                | 1.889.087.550 | 81,47                | 1.945.760.177 | 81,96                 | 2.004.132.982 | 82,45                 | 2.064.256.971 | 82,94                                    | 2.126.184.680 | 83                               | 10.029.422.360 | Dinas PUPR   |
|      |   | 2  | Program Penatagunaan Tanah  | Persentase penatagunaan tanah untuk wilayah Kabupaten  | %  | 100    | 100                  | 665.666.000   | 100                  | 698.949.300   | 100                  | 719.917.779   | 100                   | 741.515.312   | 100                   | 763.760.772   | 100                                      | 786.673.595   | 100                              | 3.710.816.758  | Setda        |
| 5    | 1   | 2  | Sasaran 16 : Menurunnya tingkat pencemaran air dan udara  | Indeks Kualitas Air dan Udara  | Indeks   | 92,576 | 93,3168              | 4.181.303.505 | 94,0576              | 4.184.658.480 | 94,7984              | 4.328.998.235 | 95,5392               | 4.477.068.182 | 96,28                 | 4.611.380.227 | 97,021                                   | 4.749.721.634 | 97,0208                          | 22.351.826.758 |              |
|      |   | 1  | Program Perencanaan Lingkungan Hidup  | Persentase ketersediaan dokumen perencanaan lingkungan yang berkualitas  | Persen   | 100    | 100                  | 1.000.000.000 | 100                  | 1.050.000.000 | 100                  | 1.081.500.000 | 100                   | 1.113.945.000 | 100                   | 1.147.363.350 | 100                                      | 1.181.784.251 | 100                              | 5.574.592.601  | DLH          |
|      |   | 2  | Program Pengendalian Pencemaran Dan/Atau Kerusakan Lingkungan Hidup   | Indeks Kualitas Air  | nilai  | 1,576  | 1,76                 | 199.268.550   | 1,94                 | 209.231.978   | 2,12                 | 215.508.937   | 2,30                  | 221.974.205   | 2,48                  | 228.633.431   | 2,66                                     | 235.492.434   | 2,66                             | 1.110.840.984  | 2,66         |
|      |   |  |   | Indeks Kualitas Udara  | nilai  | 91     | 91,09                |               | 91,19                |               | 91,38                |               | 91,57                 |               | 91,76                 |               | 91,95                                    |               | 92,14                            |                |              |
|      |   | 3  | Program Pengelolaan Keaneekaragaman Hayati (Kehati)   | Indeks Tutupan Lahan   | %  | 77,68  | 77,68                | 2.307.479.830 | 77,86                | 2.422.853.822 | 77,95                | 2.495.539.436 | 78,04                 | 2.570.405.619 | 78,13                 | 2.647.517.788 | 78,22                                    | 2.726.943.321 | 78,22                            | 12.863.259.986 | DLH          |
|      |   | 4  | Program Pengendalian Bahan Berbahaya Dan Beracun (B3) Dan Limbah Bahan Berbahaya Dan Beracun (Limbah B3)                | Persentase usaha yang memilah B3 dan limbah B3   | %  | 65     | 65                   | 36.311.750    | 68                   | 38.127.338    | 70                   | 39.271.158    | 75                    | 40.449.292    | 78                    | 41.662.771    | 80                                       | 42.912.654    | 80                               | 202.423.213    | DLH          |
|      |   | 5  | Program Pembinaan Dan Pengawasan Terhadap Izin Lingkungan Dan Izin Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH) | Persentase pembinaan dan pengawasan terhadap izin lingkungan dan izin perlindungan serta pengelolaan LH (PPLH) | %  | 82     | 82                   | 49.197.750    | 85                   | 51.657.638    | 90                   | 53.207.367    | 95                    | 54.803.588    | 100                   | 56.447.695    | 100                                      | 58.141.126    | 100                              | 274.257.413    | DLH          |
|      |   | 6  | Program Peningkatan Pendidikan, Pelatihan Dan Penyuluhan Lingkungan Hidup Untuk Masyarakat                              | Persentase ASN bersertifikat AMDAL yang profesional  | %  | 60     | 60                   | 19.724.000    | 70                   | 40.000.000    | 80                   | 60.000.000    | 90                    | 80.000.000    | 100                   | 82.400.000    | 100                                      | 84.872.000    | 100                              | 347.272.000    | DLH          |
|      |   | 7  | Program Penghargaan Lingkungan Hidup Untuk Masyarakat   | Persentase kelompok masyarakat yang mendapat penghargaan LH  | %  | 50     | 50                   | 31.329.750    | 60                   | 32.896.238    | 63                   | 33.883.125    | 65                    | 34.899.618    | 68                    | 35.946.607    | 70                                       | 37.025.005    | 70                               | 174.650.593    | DLH          |
|      |   | 8  | Program Penanganan Pengaduan Lingkungan Hidup   | Persentase aduan LH yang diselesaikan  | %  | 100    | 100                  | 16.993.875    | 100                  | 17.843.569    | 100                  | 18.378.876    | 100                   | 18.930.242    | 100                   | 19.498.149    | 100                                      | 20.083.094    | 100                              | 94.733.930     | DLH          |
|      |   | 9  | Program Pengelolaan Persampahan   | Cakupan wilayah pelayanan persampahan  | %  | 15,38  | 15,38                | 20.998.000    | 15,38                | 22.047.900    | 15,38                | 22.709.337    | 15,38                 | 23.390.617    | 15,38                 | 24.092.336    | 15,38                                    | 24.815.106    | 15                               | 117.055.295    | DLH          |
|      |   | 10   | Program Pengakuan Keberadaan Masyarakat Hukum Adat (MHA), Kearifan Lokal Dan Hak MHA Yang Terkait Dengan PPLH           | Persentase MHA yang Terakui  | %  | 100,00 | 100,00               | 500.000.000   | 100,00               | 300.000.000   | 100,00               | 309.000.000   | 100,00                | 318.270.000   | 100,00                | 327.818.100   | 100,00                                   | 337.652.643   | 100                              | 1.592.740.743  | DLH          |
| 5    | 1   | 3  | Sasaran 17 : Terwujudnya tata kelola dan manajemen bencana  | Indeks Resiko Bencana  | Indeks   | 172,4  | 170,71               | 2.418.360.388 | 169,02               | 2.814.356.747 | 167,33               | 2.898.787.450 | 165,64                | 2.985.571.073 | 163,95                | 3.075.323.606 | 162,26                                   | 3.167.583.314 | 162,26                           | 14.941.802.190 |              |
|      |   | 1  | Program Penganggulangan Bencana   | Jumlah Desa Tangguh Bencana  | Desa   | 1      | 2                    | 1.599.761.660 | 9                    | 1.679.749.743 | 9                    | 1.730.142.235 | 9                     | 1.782.046.502 | 9                     | 1.835.507.897 | 9  | 1.890.573.134 | 45                               | 8.918.019.512  | BPBD         |
|      |   | 2  | Program Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran                               | Tingkat Waktu Tanggap (Respo n Time Rate) Daerah WMK   | %  | 66     | 67,3                 | -             | 68,6                 | 275.078.340   | 69,9                 | 283.330.690   | 71,2                  | 291.830.611   | 72,5                  | 300.585.529   | 73,8                                     | 309.603.095   | 73,8                             | 1.460.428.265  | Damkar       |
|      |   | 3  | Program Peningkatan Ketenteraman dan Ketertiban Umum  | Angka Kriminalitas   | kasus  | 34     | 30                   | 158.419.500   | 26                   | 166.340.475   | 23                   | 171.330.689   | 20                    | 176.470.610   | 18                    | 181.764.728   | 17                                       | 187.217.670   | 17                               | 883.124.172    | Satpol PP,   |
|      |   | 4  | Program Penanganan Bencana  | Persentase Korban Bencana Yang Menerima Bantuan Sosial Selama Masa Tanggap Darurat                             | %  | 100    | 100                  | 660.179.228   | 100                  | 693.188.189   | 100                  | 713.983.835   | 100                   | 735.403.350   | 100                   | 757.465.451   | 100                                      | 780.189.414   | 100                              | 3.680.230.239  | Dinas Sosial |
| 6    |   | <b>Misi 6 : Membangun peradaban masyarakat yang bertumpu pada nilai - nilai keagamaan dan kebudayaan lokal</b> |   |  |  |        | <b>5.147.010.100</b> |               | <b>5.023.760.605</b> |               | <b>5.103.613.423</b> |               | <b>5.185.861.826</b>  |               | <b>5.270.577.681</b>  |               | <b>5.357.835.011</b>                     |               | <b>25.941.648.546</b>            |                |              |
| 6    | 1   | Tujuan 6 : Melestarikan seni budaya lokal  | Persentase kapasitas lembaga adat yang dibina   | Persen   | 100  | 100    | 2.948.000.000        | 100           | 2.714.800.000        | 100           | 2.725.384.000        | 100           | 2.736.285.520         | 100           | 2.747.514.086         | 100           | 2.759.079.508                            | 100           | 13.683.063.114                   |                |              |
| 6    | 1   | 1  | Sasaran 18 : Meningkatkan intensitas event seni budaya yang diselenggarakan   | Jumlah penyelenggaraan event seni budaya   | Nilai  | 0      | 1                    | 2.948.000.000 | 2                    | 2.714.800.000 | 3                    | 2.725.384.000 | 4                     | 2.736.285.520 | 5                     | 2.747.514.086 | 5  | 2.759.079.508 | 5                                | 13.683.063.114 |              |
|      |   | 1  | Program Pengembangan Kebudayaan   | Persentase budaya lokal daerah yang dikembangkan   | Persen   | 57     | 57                   | 2.312.000.000 | 59                   | 2.312.000.000 | 61                   | 2.312.000.000 | 62                    | 2.312.000.000 | 65                    | 2.312.000.000 | 65                                       | 2.312.000.000 | 65                               | 11.560.000.000 | Dinas P & K  |

| Kode | Misi/Tujuan/Sasaran/ Program Pembangunan Daerah | Indikator Kinerja  | Satuan   | Kondisi Kinerja awal RPJMD (2020) | Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan |       |               |       |               |       |               |       |               |       |               |       | Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD |       | Perangkat daerah Penanggungjawab |             |
|------|---|--|--|-----------------------------------|--|-------|---------------|-------|---------------|-------|---------------|-------|---------------|-------|---------------|-------|--|-------|----------------------------------|-------------|
|      |   |  |  |                                   | 2021   |       | 2022          |       | 2023          |       | 2024          |       | 2025          |       | 2026          |       | Target                                   | Rp.   |                                  |             |
|      |   |  |  |                                   | Target   | Rp.   | Target        | Rp.   | Target        | Rp.   | Target        | Rp.   | Target        | Rp.   | Target        | Rp.   |  |       |                                  |             |
| 1    | 2   | 3  | 4  | 5                                 | 6  | 7     | 8             | 9     | 10            | 11    | 12            | 13    | 14            | 15    | 16            | 17    | 18                                       | 19    | 20                               |             |
|      | 2   | Program Pengembangan Kesenian Tradisional  | Jumlah Lembaga adat Yang dibina  | lembaga                           | 8  | 8     | 336.000.000   | 8     | 352.800.000   | 8     | 363.384.000   | 8     | 374.285.520   | 8     | 385.514.086   | 8     | 397.079.508                              | 8     | 1.873.063.114                    | Dinas P & K |
|      | 3   | Program Pelestarian dan Pengelolaan Cagar Budaya   | Jumlah Cagar Budaya yang dilestarikan  | Situs                             | 4  | 4     | 300.000.000   | 4     | 50.000.000    | 4     | 50.000.000    | 4     | 50.000.000    | 4     | 50.000.000    | 4     | 50.000.000                               | 4     | 250.000.000                      | Dinas P & K |
| 6    | 2   | Tujuan 7 : Mewujudkan kehidupan masyarakat yang dilandasi nilai - nilai kerukunan beragama   | Indeks kerukunan beragama  | Indeks                            | 73,92  | 74,29 | 2.199.010.100 | 74,66 | 2.308.960.605 | 75,03 | 2.378.229.423 | 75,4  | 2.449.576.306 | 75,77 | 2.523.063.595 | 76,14 | 2.598.755.503                            | 76,14 | 12.258.585.432                   |             |
| 6    | 2   | 1 Sasaran 19 : Meningkatkan pengelolaan potensi konflik sosial   | Persentase Pengelolaan Potensi Konflik Sosial  | Persen                            | 100  | 100   | 2.199.010.100 | 100   | 2.308.960.605 | 100   | 2.378.229.423 | 100   | 2.449.576.306 | 100   | 2.523.063.595 | 100   | 2.598.755.503                            | 100   | 12.258.585.432                   |             |
|      | 1   | Program Penguatan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan   | Persentase Penduduk/Etnis/Suku/Agama/Ormas Yang Memahami Nilai-Nilai Kehidupan Politik dan Berbangsa | persen                            |  | 78,31 | 108.470.000   | 78,62 | 113.893.500   | 78,93 | 117.310.305   | 79,24 | 120.829.614   | 79,55 | 124.454.503   | 79,86 | 128.188.138                              | 79,86 | 604.676.059                      | Kesbangpol  |
|      | 2   | Program Peningkatan Peran Partai Politik dan Lembaga Pendidikan Melalui Pendidikan Politik dan Pengembangan Etika Serta Budaya Politik | Persentase Partisipasi Politik Pemilih Pada Pemilihan Umum   | persen                            |  | 93,13 | 747.883.100   | 93,3  | 785.277.255   | 93,47 | 808.835.573   | 93,64 | 833.100.640   | 93,81 | 858.093.659   | 93,98 | 883.836.469                              | 93,98 | 4.169.143.595                    | Kesbangpol  |
|      | 3   | Program Pemberdayaan Dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan  | Persentase pemberdayaan dan pengawasan organisasi kemasyarakatan kabupaten                           | persen                            |  | 100   | 207.356.000   | 100   | 217.723.800   | 100   | 224.255.514   | 100   | 230.983.179   | 100   | 237.912.675   | 100   | 245.050.055                              | 100   | 1.155.925.223                    | Kesbangpol  |
|      | 4   | Program Pembinaan Dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial, Dan Budaya   | Persentase pembinaan ketahanan bidang politik, sosial dan budaya                                     | persen                            |  | 100   | 375.227.500   | 100   | 393.988.875   | 100   | 405.808.541   | 100   | 417.982.797   | 100   | 430.522.281   | 100   | 443.437.950                              | 100   | 2.091.740.445                    | Kesbangpol  |
|      | 5   | Program Peningkatan Kewaspadaan Nasional dan Peningkatan Kualitas dan Fasilitasi Penanganan Konflik Sosial                             | Penanganan Potensi Konflik Tidak menjadi Konflik   | 100                               |  | 100   | 760.073.500   | 100   | 798.077.175   | 100   | 822.019.490   | 100   | 846.680.075   | 100   | 872.080.477   | 100   | 898.242.892                              | 100   | 4.237.100.109                    | Kesbangpol  |

# BAB VII KERANGKA PENDANAAN PEMBANGUNAN DAN PROGRAM PERANGKAT DAERAH



## 7.1 KERANGKA PENDANAAN PEMBANGUNAN

Berdasarkan gambaran keuangan daerah yang dijelaskan dalam bab III, maka proyeksi belanja tahun 2021-2026 ditunjukkan dalam gambar 7.1 berikut.

**Tabel 7.1**  
**Kerangka Pendanaan Pembangunan Tahun 2021 - 2026**

| Kode     | Uraian                                     | Tahun                    |                          |                          |                        |                          |                          |
|----------|--|--------------------------|--------------------------|--------------------------|------------------------|--------------------------|--------------------------|
|          |  | 2021                     | 2022                     | 2023                     | 2024                   | 2025                     | 2026                     |
| <b>5</b> | <b>BELANJA</b>                             | <b>1.015.281.912.900</b> | <b>1.264.979.787.331</b> | <b>1.040.002.874.555</b> | <b>985.498.181.177</b> | <b>1.015.343.609.521</b> | <b>1.049.492.401.453</b> |
| 5.1      | <b>BELANJA OPERASI</b>                     | <b>653.241.399.185</b>   | <b>659.840.263.854</b>   | <b>665.389.618.333</b>   | <b>671.261.037.840</b> | <b>677.498.045.532</b>   | <b>684.150.920.539</b>   |
| 5.1.01   | Belanja Pegawai                            | 290.851.822.141          | 293.324.062.629          | 295.817.317.162          | 298.331.764.357        | 300.867.584.354          | 303.424.958.821          |
| 5.1.02   | Belanja Barang dan Jasa                    | 349.032.635.944          | 349.905.217.534          | 350.779.980.578          | 351.656.930.529        | 352.536.072.855          | 353.417.413.038          |
| 5.1.03   | Belanja Hibah                              | 13.356.941.100           | 14.991.830.691           | 16.826.830.767           | 18.886.434.853         | 21.198.134.479           | 23.792.786.139           |
| 5.1.04   | Belanja Bantuan Sosial                     | -                        | 1.619.153.000            | 1.965.489.827            | 2.385.908.101          | 2.896.253.843            | 3.515.762.540            |
| 5.2      | <b>BELANJA MODAL</b>                       | <b>171.725.154.876</b>   | <b>412.134.853.668</b>   | <b>178.787.560.123</b>   | <b>115.442.824.896</b> | <b>135.916.957.944</b>   | <b>160.092.359.506</b>   |
| 5.2.1    | Belanja Modal Tanah                        | 3.100.000.000            | 3.107.440.000            | 3.114.897.856            | 3.122.373.611          | 3.129.867.308            | 3.137.378.989            |
| 5.2.2    | Belanja Modal Peralatan dan Mesin          | 66.563.761.305           | 67.279.230.502           | 71.208.840.463           | 36.874.545.831         | 47.312.412.440           | 47.500.887.195           |
| 5.2.3    | Belanja Modal Gedung dan Bangunan          | 38.940.304.156           | 150.415.375.867          | 39.896.243.452           | 30.382.977.622         | 40.875.649.949           | 41.374.332.878           |
| 5.2.4    | Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi | 59.076.866.462           | 187.261.083.630          | 60.468.166.962           | 40.935.640.444         | 40.443.675.306           | 63.896.151.102           |
| 5.2.5    | Belanja Modal Aset Tetap Lainnya           | 4.044.222.953            | 4.071.723.669            | 4.099.411.390            | 4.127.287.387          | 4.155.352.942            | 4.183.609.343            |
| 5.3      | <b>BELANJA TIDAK TERDUGA</b>               | <b>5.790.203.639</b>     | <b>6.597.358.026</b>     | <b>7.517.029.735</b>     | <b>8.564.903.680</b>   | <b>9.758.851.253</b>     | <b>11.119.235.118</b>    |
| 5.3.1    | Belanja Tidak Terduga                      | 5.790.203.639            | 6.597.358.026            | 7.517.029.735            | 8.564.903.680          | 9.758.851.253            | 11.119.235.118           |
| 5.4      | <b>BELANJA TRANSFER</b>                    | <b>184.525.155.200</b>   | <b>186.407.311.783</b>   | <b>188.308.666.363</b>   | <b>190.229.414.760</b> | <b>192.169.754.791</b>   | <b>194.129.886.290</b>   |
| 5.4.02   | Belanja Bantuan Keuangan                   | 184.525.155.200          | 186.407.311.783          | 188.308.666.363          | 190.229.414.760        | 192.169.754.791          | 194.129.886.290          |
|          | <b>Jumlah Belanja</b>                      | <b>1.015.281.912.900</b> | <b>1.264.979.787.331</b> | <b>1.040.002.874.555</b> | <b>985.498.181.177</b> | <b>1.015.343.609.521</b> | <b>1.049.492.401.453</b> |

Sumber : Bappeda Kab. Konawe Utara, 2021

## 7.2 PROGRAM PERANGKAT DAERAH

Indikasi rencana program dalam RPJMD Kabupaten Konawe Utara Tahun 2021-2026 merupakan rencana program pembangunan daerah yang menunjang pencapaian visi dan misi Kepala Daerah dan Program Perangkat Daerah dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan daerah yang selanjutnya dijabarkan dalam Rencana Strategis Perangkat Daerah berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodifikasi, dan Nomenklatur Perencanaan

Pembangunan dan Keuangan Daerah, sebagaimana dimutakhirkan melalui Kepmendagri Nomor 050-3708 tahun 2020.

Program Perangkat Daerah untuk mendukung pencapaian tujuan pembangunan daerah terbagi ke dalam 6 (enam) urusan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar, 18 (delapan belas) urusan wajib yang tidak berkaitan dengan pelayanan dasar, 5 (lima) urusan pilihan, dan 2 (dua) Unsur pendukung urusan pemerintahan, 5 (lima) unsur penunjang urusan pemerintahan, 1 (satu) unsur pengawasan urusan pemerintahan, 1 (satu) unsur kewilayahan, 1 (satu) unsur pemerintahan umum, dan Non Urusan.

## **7.2.1 URUSAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**

### **7.2.1.1 Urusan Pemerintahan Bidang Pendidikan**

Program yang akan dilaksanakan adalah sebagai berikut

1. Program Pengelolaan Pendidikan,
2. Program Pengembangan Kurikulum
3. Program Pendidik Dan Tenaga Kependidikan

### **7.2.1.2. Urusan Pemerintahan Bidang Kesehatan**

Program yang akan dilaksanakan adalah sebagai berikut

1. Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat
2. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan
3. Program Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan dan Makanan Minuman
4. Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan

### **7.2.1.3 Urusan Pemerintahan Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang**

Program yang akan dilaksanakan adalah sebagai berikut

1. Program Pengelolaan Sumber Daya Air (SDA)
2. Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum
3. Program Pengembangan Sistem Dan Pengelolaan Persampahan Regional
4. Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah
5. Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase

6. Program Pengembangan Permukiman
7. Program Penataan Bangunan Gedung
8. Program Penyelenggaraan Jalan
9. Program Pengembangan Jasa Konstruksi
10. Program Penyelenggaraan Penataan Ruang

#### **7.2.1.4 Urusan Pemerintahan Bidang Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman**

Program yang akan dilaksanakan adalah sebagai berikut

1. Program Pengembangan Perumahan
2. Program Kawasan Permukiman
3. Program Perumahan dan Kawasan Permukiman Kumuh
4. Program Peningkatan Prasarana, Sarana Dan Utilitas Umum (PSU)

#### **7.2.1.5 Urusan Pemerintahan Bidang Ketenteraman dan Ketertiban Umum Serta Perlindungan Masyarakat**

Program yang akan dilaksanakan adalah sebagai berikut

1. Program Peningkatan Ketenteraman dan Ketertiban Umum
2. Program Penanggulangan Bencana
3. Program Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran
4. Program Penguatan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan
5. Program Peningkatan Peran Partai Politik dan Lembaga Pendidikan Melalui Pendidikan Politik dan Pengembangan Etika Serta Budaya Politik
6. Program Pemberdayaan Dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan
7. Program Pembinaan Dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial, Dan Budaya
8. Program Peningkatan Kewaspadaan Nasional dan Peningkatan Kualitas dan Fasilitasi Penanganan Konflik Sosial

#### **7.2.1.6 Urusan Pemerintahan Bidang Sosial**

Program yang akan dilaksanakan adalah sebagai berikut

1. Program Pemberdayaan Sosial
2. Program Rehabilitasi Sosial

3. Program Perlindungan dan Jaminan Sosial
4. Program Penanganan Bencana

## **7.2.2. URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**

### **7.2.2.1 Urusan Pemerintahan Bidang Tenaga Kerja**

Program yang akan dilaksanakan adalah sebagai berikut

1. Program Pelatihan Kerja dan Produktivitas Tenaga Kerja
2. Program Penempatan Tenaga Kerja
3. Program Hubungan Industrial

### **7.2.2.2 Urusan Pemerintahan Bidang Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak**

Program yang akan dilaksanakan adalah sebagai berikut

1. Program Pengarusutamaan Gender Dan Pemberdayaan Perempuan
2. Program Perlindungan Perempuan
3. Program Peningkatan Kualitas Keluarga
4. Program Pemenuhan Hak Anak (PHA)
5. Program Perlindungan Khusus Anak

### **7.2.2.3 Urusan Pemerintahan Bidang Pangan**

Program yang akan dilaksanakan adalah sebagai berikut

1. Program Peningkatan Diversifikasi Dan Ketahanan Pangan Masyarakat
2. Program Penanganan Kerawanan Pangan
3. Program Pengawasan Keamanan Pangan

### **7.2.2.4 Urusan Pemerintahan Bidang Pertanahan**

Program yang akan dilaksanakan adalah sebagai berikut

1. Program Penyelesaian Ganti Kerugian Dan Santunan Tanah Untuk Pembangunan
2. Program Redistribusi Tanah, Serta Ganti Kerugian Program Tanah Kelebihan Maksimum Dan Tanah Absentee

### **7.2.2.5 Urusan Pemerintahan Bidang Lingkungan Hidup**

Program yang akan dilaksanakan adalah sebagai berikut

1. Program Perencanaan Lingkungan Hidup
2. Program Pengendalian Pencemaran Dan/Atau Kerusakan Lingkungan Hidup
3. Program Pengelolaan Keanekaragaman Hayati (Kehati)
4. Program Pengendalian Bahan Berbahaya Dan Beracun (B3) Dan Limbah Bahan Berbahaya Dan Beracun (Limbah B3)
5. Program Pembinaan Dan Pengawasan Terhadap Izin Lingkungan Dan Izin Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH)
6. Program Peningkatan Pendidikan, Pelatihan Dan Penyuluhan Lingkungan Hidup Untuk Masyarakat
7. Program Penghargaan Lingkungan Hidup Untuk Masyarakat
8. Program Penanganan Pengaduan Lingkungan Hidup
9. Program Pengelolaan Persampahan
10. Program Pengakuan Keberadaan Masyarakat Hukum Adat (MHA), Kearifan Lokal Dan Hak MHA Yang Terkait Dengan PPLH.

### **7.2.2.6 Urusan Pemerintahan Bidang Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil**

Program yang akan dilaksanakan adalah sebagai berikut

1. Program Pendaftaran Penduduk
2. Program Pencatatan Sipil

### **7.2.2.7 Urusan Pemerintahan Bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Desa**

Program yang akan dilaksanakan adalah sebagai berikut

1. Program Peningkatan Kerjasama Desa
2. Program Administrasi Pemerintahan Desa
3. Program Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat Dan Masyarakat Hukum Adat
4. Program Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan

### **7.2.2.8 Urusan Pemerintahan Bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana**

Program yang akan dilaksanakan adalah sebagai berikut

1. Program Pengendalian Penduduk
2. Program Pembinaan Keluarga Berencana (KB)
3. Program Pemberdayaan Dan Peningkatan Keluarga Sejahtera (KS)

### **7.2.2.9 Urusan Pemerintahan Bidang Perhubungan**

Program yang akan dilaksanakan adalah sebagai berikut

1. Program Penyelenggaraan Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan (LLAJ)

### **7.2.2.10 Urusan Pemerintahan Bidang Komunikasi dan Informatika**

Program yang akan dilaksanakan adalah sebagai berikut

1. Program Informasi Dan Komunikasi Publik
2. Program Aplikasi Informatika

### **7.2.2.11 Urusan Pemerintahan Bidang Koperasi, Usaha Kecil, dan Menengah**

Program yang akan dilaksanakan adalah sebagai berikut

1. Program Pengawasan dan Pemeriksaan Koperasi
2. Program Penilaian Kesehatan Ksp/Usp Koperasi
3. Program Pendidikan Dan Latihan Perkoperasian
4. Program Pemberdayaan Dan Perlindungan Koperasi
5. Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil, Dan Usaha Mikro (UMKM)
6. Program Pengembangan UMKM

### **7.2.2.12 Urusan Pemerintahan Bidang Penanaman Modal**

Program yang akan dilaksanakan adalah sebagai berikut

1. Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal
2. Program Promosi Penanaman Modal
3. Program Pelayanan Penanaman Modal
4. Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal
5. Program Pengelolaan data Dan Sistem Informasi Penanaman Modal

#### **7.2.2.13 Urusan Pemerintahan Bidang Kepemudaan dan Olahraga**

Program yang akan dilaksanakan adalah sebagai berikut

1. Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Kepemudaan
2. Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Keolahragaan

#### **7.2.2.14 Urusan Pemerintahan Bidang Statistik**

Program yang akan dilaksanakan adalah sebagai berikut

1. Program Penyelenggaraan Statistik Sektor

#### **7.2.2.15 Urusan Pemerintahan Bidang Persandian**

Program yang akan dilaksanakan adalah sebagai berikut

1. Program Penyelenggaraan Persandian Untuk Pengamanan Informasi

#### **7.2.2.16 Urusan Pemerintahan Bidang Kebudayaan**

Program yang akan dilaksanakan adalah sebagai berikut

1. Program Pengembangan Kebudayaan
2. Program Pengembangan Kesenian Tradisional
3. Program Pembinaan Sejarah
4. Program Pelestarian dan Pengelolaan Cagar Budaya

#### **7.2.2.17 Urusan Pemerintahan Bidang Perpustakaan**

Program yang akan dilaksanakan adalah sebagai berikut

1. Program Pembinaan Perpustakaan
2. Program Pelestarian Koleksi Nasional Dan Naskah Kuno

#### **7.2.2.18 Urusan Pemerintahan Bidang Kearsipan**

Program yang akan dilaksanakan adalah sebagai berikut

1. Program Pengelolaan Arsip
2. Program Perlindungan Dan Penyelamatan Arsip
3. Program Perizinan Penggunaan Arsip

### **7.2.3 URUSAN PILIHAN**

#### **7.2.3.1 Urusan Pemerintahan Bidang Kelautan dan Perikanan**

Program yang akan dilaksanakan adalah sebagai berikut

1. Program Pengelolaan Perikanan Tangkap
2. Program Pengelolaan Perikanan Budidaya
3. Program Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan

#### **7.2.3.2 Urusan Pemerintahan Bidang Pariwisata**

Program yang akan dilaksanakan adalah sebagai berikut

1. Program Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata
2. Program Pemasaran Pariwisata
3. Program Pengembangan Ekonomi Kreatif Melalui Pemanfaatan dan Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual
4. Program Pengembangan Sumber Daya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif

#### **7.2.3.3 Urusan Pemerintahan Bidang Pertanian**

Program yang akan dilaksanakan adalah sebagai berikut

1. Program Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian
2. Program Penyediaan dan Pengembangan Prasarana Pertanian
3. Program Pengendalian Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner
4. Program Pengendalian Dan Penanggulangan Bencana Pertanian
5. Program Perizinan Usaha Pertanian
6. Program Penyuluhan Pertanian

#### **7.2.3.4 Urusan Pemerintahan Bidang Perdagangan**

Program yang akan dilaksanakan adalah sebagai berikut

1. Program Perizinan Dan Pendaftaran Perusahaan
2. Program Peningkatan Sarana Distribusi Perdagangan
3. Program Stabilisasi Harga Barang Kebutuhan Pokok Dan Barang Penting
4. Program Pengembangan Ekspor
5. Program Standardisasi Dan Perlindungan Konsumen
6. Program Penggunaan Dan Pemasaran Produk Dalam Negeri

#### **7.2.3.5 Urusan Pemerintahan Bidang Perindustrian**

Program yang akan dilaksanakan adalah sebagai berikut

1. Program Perencanaan Dan Pembangunan Industri
2. Program Pengendalian Izin Usaha Industri Kabupaten/Kota
3. Program Pengelolaan Sistem Informasi Industri Nasional

#### **7.2.3.6 Urusan Pemerintahan Bidang Transmigrasi**

Program yang akan dilaksanakan adalah sebagai berikut

1. Program Perencanaan Kawasan Transmigrasi
2. Program Pembangunan Kawasan Transmigrasi
3. Program Pengembangan Kawasan Transmigrasi

### **7.2.4 UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN**

#### **7.2.4.1 Sekretariat Daerah**

Program yang akan dilaksanakan adalah sebagai berikut

1. Program Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat
2. Program Perekonomian dan Pembangunan

#### **7.2.4.2 Sekretariat DPRD**

Program yang akan dilaksanakan adalah sebagai berikut

1. Program Dukungan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRD

### **7.2.5 UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN**

#### **7.2.5.1 Perencanaan**

Program yang akan dilaksanakan adalah sebagai berikut

1. Program Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah
2. Program Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah

#### **7.2.5.2 Keuangan**

Program yang akan dilaksanakan adalah sebagai berikut

1. Program Pengelolaan Keuangan Daerah
2. Program Pengelolaan Barang Milik Daerah
3. Program Pengelolaan Pendapatan Daerah

#### **7.2.5.3 Kepegawaian**

Program yang akan dilaksanakan adalah sebagai berikut

## 1. Program Kepegawaian Daerah

### **7.2.5.4 Pendidikan dan Pelatihan**

Program yang akan dilaksanakan adalah sebagai berikut

1. Program Pengembangan Sumber Daya Manusia

### **7.2.5.5 Penelitian dan Pengembangan**

Program yang akan dilaksanakan adalah sebagai berikut

1. Program Penelitian dan Pengembangan Daerah

### **7.2.5.6 Pengawasan**

Program yang akan dilaksanakan adalah sebagai berikut

1. Program Penyelenggaraan Pengawasan
2. Program Perumusan Kebijakan, Pendampingan Dan Asistensi

## **7.2.7 UNSUR KEWILAYAHAN**

### **7.2.7.1 Kecamatan dan Kelurahan**

Program yang akan dilaksanakan adalah sebagai berikut

1. Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik
2. Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan
3. Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum
4. Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum

## **7.2.8 UNSUR PEMERINTAHAN UMUM**

### **7.2.8.1 Kesatuan Bangsa dan Politik**

Program yang akan dilaksanakan adalah sebagai berikut

1. Program Penguatan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan
2. Program Peningkatan Peran Partai Politik dan Lembaga Pendidikan Melalui Pendidikan Politik dan Pengembangan Etika Serta Budaya Politik
3. Program Pemberdayaan Dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan
4. Program Pembinaan Dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial, Dan Budaya
5. Program Peningkatan Kewaspadaan Nasional dan Peningkatan Kualitas dan Fasilitasi Penanganan Konflik Sosial.

**Tabel 7.2**  
**Indikasi Rencana Program Perangkat Daerah Yang Disertai Kebutuhan Pendanaan Kabupaten Konawe Utara Tahun 2021 - 2026**

Visi : "Konawe Utara Lebih Sejahtera Dan Berdaya Saing"

| NO.                                    | Urusan/OPD/Program  | Indikator Kinerja (Outcome)  | Satuan      | Capaian Pada Tahun Dasar Perencanaan (Tahun 2021) |                      | Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan |                      |         |                      |         |                      |         |                      |         |                      | Capaian Akhir Tahun RPJMD |                      | Perangkat Daerah |             |
|--|---|--|-------------|---|----------------------|--|----------------------|---------|----------------------|---------|----------------------|---------|----------------------|---------|----------------------|---------------------------|----------------------|------------------|-------------|
|  |   |  |             | Kinerja   | Pagu Indikatif (Rp.) | 2022   |                      | 2023    |                      | 2024    |                      | 2025    |                      | 2026    |                      | Kinerja                   | Pagu Indikatif (Rp.) |                  |             |
|  |   |  |             |   |                      | Kinerja  | Pagu Indikatif (Rp.) | Kinerja | Pagu Indikatif (Rp.) | Kinerja | Pagu Indikatif (Rp.) | Kinerja | Pagu Indikatif (Rp.) | Kinerja | Pagu Indikatif (Rp.) |                           |                      |                  |             |
| 1                                      | 2   | 3  | 4           | 5   | 6                    | 7  | 8                    | 9       | 10                   | 11      | 12                   | 13      | 14                   | 15      | 16                   | 17                        | 18                   | 19               |             |
| <b>TOTAL PAGU INDIKATIF</b>            |   |  |             |   | 953.417.574.125      |  | 973.598.888.229      |         | 962.066.004.050      |         | 979.079.264.232      |         | 995.391.572.491      |         | 1.003.228.255.270    |                           | 4.913.363.984.273    |                  |             |
| <b>1</b>                               | <b>URUSAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR</b>                   |  |             |   | 387.185.979.274      |  | 402.554.903.833      |         | 392.538.234.221      |         | 397.770.747.287      |         | 400.736.620.483      |         | 395.092.026.836      |                           | 1.988.692.532.660    |                  |             |
| <b>1.01</b>                            | <b>Urusan Pemerintahan Bidang Pendidikan</b>                                |  |             |   | 176.481.565.206      |  | 182.330.561.476      |         | 189.162.569.126      |         | 199.631.977.006      |         | 202.930.857.122      |         | 203.018.283.641      |                           | 977.074.248.370      |                  |             |
| <b>1.01.01</b>                         | <b>Dinas Pendidikan dan Kebudayaan</b>                                      |  |             |   | 176.481.565.206      |  | 182.330.561.476      |         | 189.162.569.126      |         | 199.631.977.006      |         | 202.930.857.122      |         | 203.018.283.641      |                           | 977.074.248.370      |                  |             |
| 1                                      | Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota                 | Persentase pelaksanaan program penunjang SKPD                              | Persen      | 85,29   | 95.762.840.131       | 86,43  | 96.198.890.147       | 87,57   | 96.631.591.657       | 89,13   | 100.914.464.213      | 90,54   | 97.584.512.945       | 90,54   | 97.590.743.139       | 91                        | 488.920.202.102      | Dinas P & K      |             |
| 2                                      | Program Pengelolaan Pendidikan  | Persentase capaian SPM   | %           | 86  | 78.478.725.075       | 87   | 83.891.671.329       | 88      | 90.290.977.469       | 89      | 96.477.512.793       | 90      | 102.971.344.176      | 90      | 103.052.540.502      | 90                        | 476.684.046.268      | 90,00            | Dinas P & K |
|  |   | APK SD   | Indeks      | 107,3   |                      | 106,8  |                      | 106,25  |                      | 105,79  |                      | 104,7   |                      | 103,59  |                      |                           |                      |                  |             |
|  |   | APK SMP  | Indeks      | 86,9  |                      | 86,19  |                      | 85,35   |                      | 84,13   |                      | 83,9    |                      | 82,95   |                      |                           |                      |                  |             |
|  |   | APM SD   | Indeks      | 98,15   |                      | 98,65  |                      | 98,9    |                      | 99,07   |                      | 99,31   |                      | 99,45   |                      |                           |                      |                  |             |
|  |   | APM SMP  | Indeks      | 78,03   |                      | 78,45  |                      | 79,35   |                      | 80,45   |                      | 81,69   |                      | 81,89   |                      |                           |                      |                  |             |
|  |   | Persentase SD Terakreditasi Minimal B                                      | %           | 17,31   |                      | 19,23  |                      | 19,23   |                      | 20,19   |                      | 20,19   |                      | 21,15   |                      |                           |                      |                  |             |
| Persentase SMP Terakreditasi Minimal B | %   | 41,67  | 44,44       | 44,44   | 47,22                | 47,22  | 50                   | 50,00   |                      |         |                      |         |                      |         |                      |                           |                      |                  |             |
| 3                                      | Program Pengembangan Kurikulum  | Persentase pengembangan kurikulum muatan lokal penunjang proses pendidikan | Persen      | 70  | 1.675.000.000        | 72   | 1.675.000.000        | 74      | 1.675.000.000        | 78      | 1.675.000.000        | 80      | 1.675.000.000        | 80      | 1.675.000.000        | 80                        | 8.375.000.000        | Dinas P & K      |             |
| 4                                      | Program Pendidik Dan Tenaga Kependidikan                                    | Persentase Guru SD Bersertifikat Pendidik                                  | Persen      | 31,096  | 135.000.000          | 31,552   | 135.000.000          | 32,008  | 135.000.000          | 32,464  | 135.000.000          | 32,92   | 135.000.000          | 32,92   | 135.000.000          | 32,920                    | 675.000.000          | Dinas P & K      |             |
|  |   | Persentase Guru SMP Bersertifikat Pendidik                                 | Persen      | 30,516  | 135.000.000          | 30,832   | 135.000.000          | 31,148  | 135.000.000          | 31,464  | 135.000.000          | 31,78   | 135.000.000          | 31,78   | 135.000.000          | 31,780                    | 675.000.000          | Dinas P & K      |             |
|  |   | Rasio tenaga pendidik terhadap peserta didik (SD)                          | Persen      | 10,962  | 135.000.000          | 11,264   | 135.000.000          | 11,566  | 135.000.000          | 11,868  | 135.000.000          | 12,170  | 270.000.000          | 12,170  | 270.000.000          | 12,170                    | 945.000.000          | Dinas P & K      |             |
|  |   | Rasio tenaga pendidik terhadap peserta didik (SMP)                         | Persen      | 12,67   | 135.000.000          | 13,09  | 135.000.000          | 13,51   | 135.000.000          | 13,93   | 135.000.000          | 14,35   | 135.000.000          | 14,35   | 135.000.000          | 14,350                    | 675.000.000          | Dinas P & K      |             |
| 5                                      | Program Pengendalian Perizinan Pendidikan                                   | Persentase pengendalian perizinan PAUD                                     | Persen      | 65  | 25.000.000           | 68   | 25.000.000           | 70      | 25.000.000           | 72      | 25.000.000           | 75      | 25.000.000           | 75      | 25.000.000           | 75.000                    | 125.000.000          | Dinas P & K      |             |
| <b>1.02</b>                            | <b>Urusan Pemerintahan Bidang Kesehatan</b>                                 |  |             |   | 123.176.214.651      |  | 124.852.063.575      |         | 112.026.007.537      |         | 108.972.121.446      |         | 106.503.509.001      |         | 98.577.209.083       |                           | 550.930.910.642      |                  |             |
| <b>1.02.01</b>                         | <b>Dinas Kesehatan</b>  |  |             |   | 100.170.732.714      |  | 101.434.414.919      |         | 88.307.019.897       |         | 84.961.007.557       |         | 82.195.699.509       |         | 73.968.039.498       |                           | 430.866.181.380      |                  |             |
| 1                                      | Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota                 | Persentase pelaksanaan program penunjang SKPD                              | Persen      | 100   | 62.212.236.541       | 100  | 62.834.358.906       | 100     | 50.267.487.125       | 100     | 50.770.161.996       | 100     | 51.277.863.616       | 100     | 45.637.298.619       | 100                       | 260.787.170.263      | Dinas Kesehatan  |             |
| 2                                      | Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat | Angka Kematian Bayi / 1000 kelahiran hidup                                 | rasio       | 1,87  | 31.813.406.448       | 1,64   | 32.131.540.512       | 1,41    | 29.561.017.271       | 1,18    | 25.126.864.681       | 0,95    | 21.357.834.979       | 0,72    | 18.154.159.732       | 1                         | 126.331.417.175      | Dinas Kesehatan  |             |
|  |   | Angka kematian ibu melahirkan per 100.000 kelahiran hidup                  | rasio       | 137   |                      | 135  |                      | 133     |                      | 131     |                      | 129     |                      | 127     |                      |                           |                      |                  |             |
|  |   | Prevalensi Balita Gizi Buruk   | %           | 0,3   |                      | 0,2  |                      | 0,2     |                      | 0,2     |                      | 0,1     |                      | 0       |                      |                           |                      |                  |             |
|  |   | Prevalensi kasus Stunting  | %           | 11  |                      | 10,8   |                      | 10,6    |                      | 10,4    |                      | 10,2    |                      | 10      |                      |                           |                      |                  |             |
|  |   | Rasio Puskesmas per satuan penduduk x 1000                                 | Rasio       | 0,32  |                      | 0,32   |                      | 0,32    |                      | 0,32    |                      | 0,32    |                      | 0       |                      |                           |                      |                  |             |
|  |   | Prevalensi Tuberkulosis (TB) /100.000 penduduk                             | Rasio       | 140   |                      | 137  |                      | 134     |                      | 131     |                      | 128     |                      | 125     |                      |                           |                      |                  |             |
| 3                                      | Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan                 | Rasio dokter per 100.000 penduduk  | Rasio       | 49,71   | 1.452.884.875        | 52,30  | 1.529.352.500        | 56,24   | 1.929.352.500        | 60,16   | 2.229.352.500        | 64,05   | 2.429.352.500        | 67,92   | 2.729.352.500        | 67,92                     | 10.846.762.500       | Dinas Kesehatan  |             |
|  |   | rasio bidan / 100.000 penduduk   | Rasio       | 216,78  |                      | 222,95   |                      | 229,08  |                      | 235,17  |                      | 241,23  |                      | 247,24  |                      |                           |                      |                  |             |
|  |   | Rasio perawat / 100.000 penduduk   | Rasio       | 129,79  |                      | 141,75   |                      | 153,64  |                      | 165,44  |                      | 177,17  |                      | 188,83  |                      |                           |                      |                  |             |
| 4                                      | Program Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan dan Makanan Minuman                 | Jumlah sertifikat laek higien  | Sertifikat  | 0   | 657.993.750          | 5  | 692.625.000          | 8       | 1.002.625.000        | 10      | 1.232.625.000        | 13      | 1.472.625.000        | 16      | 1.732.625.000        | 16                        | 6.133.125.000        | Dinas Kesehatan  |             |
|  |   | Jumlah Rekomendasi Ijin Apotek/Toko Obat                                   | Rekomendasi | 8   |                      | 10   |                      | 12      |                      | 15      |                      | 17      |                      | 20      |                      |                           |                      |                  |             |
|  |   | Jumlah Desa Siaga Aktif  | desa        | 107   |                      | 110  |                      | 113     |                      | 116     |                      | 119     |                      | 122     |                      |                           |                      |                  |             |

| NO.               | Urusan/OPD/Program   | Indikator Kinerja (Outcome)   | Satuan      | Capaian Pada Tahun Dasar Perencanaan (Tahun 2021) |                       | Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan |                       |          |                       |          |                       |          |                       |          |                       | Capaian Akhir Tahun RPJMD |                        | Perangkat Daerah |
|-------------------|--|---|-------------|---|-----------------------|--|-----------------------|----------|-----------------------|----------|-----------------------|----------|-----------------------|----------|-----------------------|---------------------------|------------------------|------------------|
|                   |  |   |             | Kinerja   | Pagu Indikatif (Rp.)  | 2022   |                       | 2023     |                       | 2024     |                       | 2025     |                       | 2026     |                       | Kinerja                   | Pagu Indikatif (Rp.)   |                  |
|                   |  |   |             |   |                       | Kinerja  | Pagu Indikatif (Rp.)  | Kinerja  | Pagu Indikatif (Rp.)  | Kinerja  | Pagu Indikatif (Rp.)  | Kinerja  | Pagu Indikatif (Rp.)  | Kinerja  | Pagu Indikatif (Rp.)  |                           |                        |                  |
| 1                 | 2  | 3   | 4           | 5   | 6                     | 7  | 8                     | 9        | 10                    | 11       | 12                    | 13       | 14                    | 15       | 16                    | 17                        | 18                     | 19               |
| 5                 | Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan   | Jumlah posyandu aktif   | posyandu    | 165   | 4.034.211.100         | 165  | 4.246.538.000         | 165      | 5.546.538.000         | 165      | 5.602.003.380         | 165      | 5.658.023.414         | 165      | 5.714.603.648         | 165                       | 26.767.706.442         | Dinas Kesehatan  |
|                   |  | Persentase Rumah Tangga ber PHBS                                      | %           | 87  |                       | 89   |                       | 91       |                       | 93       |                       | 94       |                       | 95       |                       | 95                        |                        |                  |
| <b>1.02.01.02</b> | <b>Rumah Sakit Umum Daerah</b>   |   |             |   | <b>23.005.481.937</b> |  | <b>23.417.648.656</b> |          | <b>23.718.987.640</b> |          | <b>24.011.113.889</b> |          | <b>24.307.809.492</b> |          | <b>24.609.169.584</b> |                           | <b>120.064.729.262</b> |                  |
| 1                 | Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota                                      | Persentase pelaksanaan program penunjang SKPD                         | Persen      | 100   | 11.921.264.002        | 100  | 12.040.476.642        | 100      | 12.160.881.408        | 100      | 12.282.490.223        | 100      | 12.405.315.125        | 100      | 12.529.368.276        | 100                       | 12.654.661.959         | RSUD             |
| 2                 | Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat                      | Rata-rata Kunjungan Rawat Jalan Per Hari                              | Rawat Jalan | 10  | 8.637.670.435         | 12   | 8.724.047.139         | 17       | 8.811.287.611         | 23       | 8.899.400.487         | 29       | 8.988.394.492         | 35       | 9.078.278.437         | 35                        | 44.501.408.165         | RSUD             |
|                   |  | Length Of Stay (LOS)/Rata-rata Lama Hari Dirawat                      | Hari        | 9-8   |                       | 8-7  |                       | 7-6      |                       | 6-5      |                       | 5-4      |                       | 4-3      |                       | 4-3                       |                        | 4-3              |
|                   |  | Bed Occupancy Rate (BOR)/ Tingkat Penggunaan Tempat Tidur             | %           | 20  |                       | 35   |                       | 60       |                       | 75       |                       | 80       |                       | 85       |                       | 85                        |                        | 85               |
| 3                 | Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan                                      | Emergency Respon Time Rate Kurang Dari 5 Menit                        | %           | 40  | 2.446.547.500         | 50   | 2.568.874.875         | 70       | 2.645.941.121         | 80       | 2.725.319.355         | 90       | 2.807.078.936         | 100      | 2.891.291.304         | 100                       | 13.638.505.590         | RSUD             |
| 4                 | Program Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan dan Makanan Minuman                                      | Kecepatan Pelayanan Resep Obat Jadi Kurang dari 30 Menit              | %           | 40  | -                     | 50   | 54.250.000            | 70       | 55.877.500            | 80       | 57.553.825            | 90       | 59.280.440            | 100      | 61.058.853            | 100                       | 288.020.618            | RSUD             |
| 5                 | Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan   | Persentase Masyarakat yang Diberdayakan                               | %           | 70  | -                     | 80   | 30.000.000            | 90       | 45.000.000            | 100      | 46.350.000            | 90       | 47.740.500            | 100      | 49.172.715            | 100                       | 218.263.215            | RSUD             |
| <b>1.3</b>        | <b>Urusan Pemerintahan Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang</b>                              |   |             |   | <b>44.683.043.438</b> |  | <b>48.152.975.079</b> |          | <b>43.051.986.803</b> |          | <b>39.761.642.138</b> |          | <b>40.760.107.585</b> |          | <b>41.786.583.156</b> |                           | <b>213.513.294.761</b> |                  |
| <b>1.03.01</b>    | <b>Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang</b>   |   |             |   | <b>44.683.043.438</b> |  | <b>48.152.975.079</b> |          | <b>43.051.986.803</b> |          | <b>39.761.642.138</b> |          | <b>40.760.107.585</b> |          | <b>41.786.583.156</b> |                           | <b>213.513.294.761</b> |                  |
| 1                 | Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota                                      | Persentase pelaksanaan program penunjang SKPD                         | Persen      | 100   | 9.234.572.053         | 100  | 9.511.609.215         | 100      | 9.796.957.491         | 100      | 10.090.866.216        | 100      | 10.393.592.202        | 100      | 10.705.399.968        | 100                       | 50.498.425.092         | Dinas PUPR       |
| 2                 | Program Pengelolaan Sumber Daya Air (SDA)  | Luas Daerah Irigasi Dalam Kondisi Baik                                | Ha          | 2.671,6   | 6.438.600.000         | 2.693,67                                       | 6.760.530.000         | 2.715,74 | 6.963.345.900         | 2.737,81 | 7.172.246.277         | 2.759,88 | 7.387.413.665         | 2.781,95 | 7.609.036.075         | 2.781,95                  | 35.892.571.918         | Dinas PUPR       |
| 3                 | Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum                                 | Rumah Tangga Pengguna Air Bersih Perpipa                              | Unit        | 18.853  | 5.735.526.386         | 18.894   | 6.022.302.705         | 18.935   | 6.202.971.786         | 18.976   | 6.389.060.940         | 19.017   | 6.580.732.768         | 19.058   | 6.778.154.751         | 19.058                    | 31.973.222.951         | Dinas PUPR       |
| 4                 | Program Pengembangan Sistem Dan Pengelolaan Persampahan Regional                                 | Jumlah sarana dan prasarana pelayanan persampahan yang berfungsi baik | Unit        | 5   | -                     | 5  | 375.465.240           | 6        | 386.729.197           | 6        | 398.331.073           | 6        | 410.281.005           | 6        | 422.589.435           | 6                         | 1.993.395.951          | Dinas PUPR       |
| 5                 | Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah   | Penduduk Berakses Sanitasi Yang Layak                                 | KK          | 8.813   | 1.953.358.363         | 9063   | 2.051.026.281         | 9313     | 2.112.557.070         | 9563     | 2.175.933.782         | 9813     | 2.241.211.795         | 10063    | 2.308.448.149         | 10063                     | 10.889.177.077         | Dinas PUPR       |
| 6                 | Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase   | Persentase Drainase Yang Terbangun                                    | %           | 41,48   | -                     | 42,91  | 1.045.005.670         | 44,34    | 1.076.355.840         | 45,77    | 1.108.646.515         | 47,20    | 1.141.905.911         | 48,63    | 1.176.163.088         | 48,63                     | 5.548.077.024          | Dinas PUPR       |
| 7                 | Program Penataan Bangunan Gedung   | Persentase isian aplikasi SI-BPB                                      | %           | 27  | 631.300.000           | 38   | 662.865.000           | 53       | 682.750.950           | 64       | 703.233.479           | 85       | 724.330.483           | 95       | 746.060.397           | 95                        | 3.519.240.309          | Dinas PUPR       |
| 8                 | Program Penyelenggaraan Jalan  | Panjang jalan dalam kondisi mantap                                    | Km          | 593,59  | 18.890.555.636        | 599,02   | 19.835.083.418        | 604,45   | 13.884.558.392        | 609,88   | 9.719.190.875         | 615,31   | 9.816.382.783         | 620,74   | 9.914.546.611         | 620,74                    | 63.169.762.080         | Dinas PUPR       |
| 9                 | Program Penyelenggaraan Penataan Ruang   | Persentase Ketaatan terhadap Rencana Tata Ruang Wilayah               | %           | 80  | 1.799.131.000         | 80,98  | 1.889.087.550         | 81,47    | 1.945.760.177         | 81,96    | 2.004.132.982         | 82,45    | 2.064.256.971         | 82,94    | 2.126.184.680         | 83                        | 10.029.422.360         | Dinas PUPR       |
| <b>1.4</b>        | <b>Urusan Pemerintahan Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman</b>                               |   |             |   | <b>8.693.605.240</b>  |  | <b>11.082.666.632</b> |          | <b>11.415.146.631</b> |          | <b>11.757.601.030</b> |          | <b>12.110.329.061</b> |          | <b>12.473.638.933</b> |                           | <b>58.839.382.286</b>  |                  |
| <b>1.04.01</b>    | <b>Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman</b>   |   |             |   | <b>8.693.605.240</b>  |  | <b>11.082.666.632</b> |          | <b>11.415.146.631</b> |          | <b>11.757.601.030</b> |          | <b>12.110.329.061</b> |          | <b>12.473.638.933</b> |                           | <b>58.839.382.286</b>  |                  |
| 1                 | Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota                                      | Persentase pelaksanaan program penunjang SKPD                         | Persen      | 100   | 3.861.761.260         | 100  | 4.054.849.323         | 100      | 4.176.494.803         | 100      | 4.301.789.647         | 100      | 4.430.843.336         | 100      | 4.563.768.636         | 100                       | 21.527.745.745         | Dinas Perumahan  |
| 2                 | Program Pengembangan Perumahan   | Persentase pembangunan perumahan untuk korban bencana alam            | %           | 0   | -                     | 5  | 1.049.813.240         | 5        | 1.081.307.637         | 5        | 1.113.746.866         | 5        | 1.147.159.272         | 5        | 1.181.574.050         | 25                        | 5.573.601.066          | Dinas Perumahan  |
| 3                 | Program Kawasan Permukiman   | Jumlah rumah layak huni   | Unit        | 12.816  | 2.786.883.980         | 12.896   | 2.926.228.179         | 12.996   | 3.014.015.024         | 13.096   | 3.104.435.475         | 13.196   | 3.197.568.539         | 13.296   | 3.293.495.596         | 13.296                    | 15.535.742.813         | Dinas Perumahan  |
| 4                 | Program Perumahan dan Kawasan Permukiman Kumuh   | Luas Kawasan Permukiman Kumuh Yang ditangani                          | Ha          | 76,83   | -                     | 76,83  | 904.567.890           | 76,83    | 931.704.927           | 76,83    | 959.656.075           | 76,83    | 988.445.757           | 76,83    | 1.018.099.129         | 76,83                     | 4.802.473.777          | Dinas Perumahan  |
| 5                 | Program Peningkatan Prasarana, Sarana Dan Utilitas Umum (PSU)                                    | Persentase pembangunan sarana dan prasarana dan utilitas umum         | %           | 100   | 2.044.960.000         | 100  | 2.147.208.000         | 100      | 2.211.624.240         | 100      | 2.277.972.967         | 100      | 2.346.312.156         | 100      | 2.416.701.521         | 100                       | 11.399.818.884         | Dinas Perumahan  |
| <b>1.5</b>        | <b>Urusan Pemerintahan Bidang Ketenteraman dan Ketertiban Umum Serta Perlindungan Masyarakat</b> |   |             |   | <b>27.257.585.446</b> |  | <b>28.895.543.058</b> |          | <b>29.424.197.291</b> |          | <b>29.965.329.029</b> |          | <b>30.519.278.778</b> |          | <b>31.086.396.919</b> |                           | <b>149.890.745.075</b> |                  |
| <b>1.05.01</b>    | <b>Satuan Polisi Pamong Praja</b>  |   |             |   | <b>6.411.589.785</b>  |  | <b>6.732.169.274</b>  |          | <b>6.934.134.352</b>  |          | <b>7.142.158.383</b>  |          | <b>7.356.423.135</b>  |          | <b>7.577.115.829</b>  |                           | <b>35.742.000.973</b>  |                  |
| 1                 | Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota                                      | Persentase pelaksanaan program penunjang SKPD                         | Persen      | 100   | 6.253.170.285         | 100  | 6.565.828.799         | 100      | 6.762.803.663         | 100      | 6.965.687.773         | 100      | 7.174.658.406         | 100      | 7.389.898.159         | 100                       | 34.858.876.800         | Satpol PP,       |
| 2                 | Program Peningkatan Ketenteraman dan Ketertiban Umum   | Angka Kriminalitas  | kasus       | 30  | 158.419.500           | 26   | 166.340.475           | 23       | 171.330.689           | 20       | 176.470.610           | 18       | 181.764.728           | 17       | 187.217.670           | 17                        | 883.124.172            | Satpol PP,       |

| NO.            | Urusan/OPD/Program  | Indikator Kinerja (Outcome)  | Satuan | Capaian Pada Tahun Dasar Perencanaan (Tahun 2021) |                       | Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan |                        |         |                        |         |                        |         |                        |         |                        | Capaian Akhir Tahun RPJMD |                        | Perangkat Daerah |
|----------------|---|--|--------|---|-----------------------|--|------------------------|---------|------------------------|---------|------------------------|---------|------------------------|---------|------------------------|---------------------------|------------------------|------------------|
|                |   |  |        | Kinerja   | Pagu Indikatif (Rp.)  | 2022   |                        | 2023    |                        | 2024    |                        | 2025    |                        | 2026    |                        | Kinerja                   | Pagu Indikatif (Rp.)   |                  |
|                |   |  |        |   |                       | Kinerja  | Pagu Indikatif (Rp.)   | Kinerja | Pagu Indikatif (Rp.)   | Kinerja | Pagu Indikatif (Rp.)   | Kinerja | Pagu Indikatif (Rp.)   | Kinerja | Pagu Indikatif (Rp.)   |                           |                        |                  |
| 1              | 2   | 3  | 4      | 5   | 6                     | 7  | 8                      | 9       | 10                     | 11      | 12                     | 13      | 14                     | 15      | 16                     | 17                        | 18                     | 19               |
| <b>1.05.02</b> | <b>Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan</b>   |  |        |   | <b>3.140.897.837</b>  |  | <b>3.573.021.069</b>   |         | <b>3.680.211.701</b>   |         | <b>3.790.618.052</b>   |         | <b>3.904.336.594</b>   |         | <b>4.021.466.691</b>   |                           | <b>18.969.654.107</b>  |                  |
| 1              | Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota                               | Persentase pelaksanaan program penunjang SKPD                                      | Persen | 100   | 3.140.897.837         | 100  | 3.297.942.729          | 100     | 3.396.881.011          | 100     | 3.498.787.441          | 100     | 3.603.751.064          | 100     | 3.711.863.596          | 100                       | 17.509.225.841         | Damkar           |
| 2              | Program Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran | Tingkat Waktu Tanggap (Respon Time Rate) Daerah WMK                                | %      | 67,3  | -                     | 68,6   | 275.078.340            | 69,9    | 283.330.690            | 71,2    | 291.830.611            | 72,5    | 300.585.529            | 73,8    | 309.603.095            | 73,8                      | 1.460.428.265          | Damkar           |
| <b>1.05.03</b> | <b>Badan Penanggulangan Bencana Daerah</b>  |  |        |   | <b>17.705.097.824</b> |  | <b>18.590.352.715</b>  |         | <b>18.809.851.237</b>  |         | <b>19.032.552.594</b>  |         | <b>19.258.519.050</b>  |         | <b>19.487.814.399</b>  |                           | <b>95.179.089.996</b>  |                  |
| 1              | Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota                               | Persentase pelaksanaan program penunjang SKPD                                      | Persen | 100   | 16.105.336.164        | 100  | 16.910.602.972         | 100     | 17.079.709.002         | 100     | 17.250.506.092         | 100     | 17.423.011.153         | 100     | 17.597.241.264         | 100                       | 86.261.070.483         | BPBD             |
| 2              | Program Penanggulangan Bencana  | Jumlah Desa Tangguh Bencana  | Desa   | 2   | 1.599.761.660         | 9  | 1.679.749.743          | 9       | 1.730.142.235          | 9       | 1.782.046.502          | 9       | 1.835.507.897          | 9       | 1.890.573.134          | 45                        | 8.918.019.512          | BPBD             |
| <b>1.6</b>     | <b>Urusan Pemerintahan Bidang Sosial</b>  |  |        |   | <b>6.893.965.293</b>  |  | <b>7.241.094.013</b>   |         | <b>7.458.326.833</b>   |         | <b>7.682.076.638</b>   |         | <b>7.912.538.937</b>   |         | <b>8.149.915.105</b>   |                           | <b>38.443.951.526</b>  |                  |
| <b>1.06.01</b> | <b>Dinas Sosial</b>   |  |        |   | <b>6.893.965.293</b>  |  | <b>7.241.094.013</b>   |         | <b>7.458.326.833</b>   |         | <b>7.682.076.638</b>   |         | <b>7.912.538.937</b>   |         | <b>8.149.915.105</b>   |                           | <b>38.443.951.526</b>  |                  |
| 1              | Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota                               | Persentase pelaksanaan program penunjang SKPD                                      | Persen | 100   | 2.849.969.373         | 100  | 2.992.467.842          | 100     | 3.082.241.877          | 100     | 3.174.709.133          | 100     | 3.269.950.407          | 100     | 3.368.048.919          | 100                       | 15.887.418.178         | Dinas Sosial     |
| 2              | Program Pemberdayaan Sosial   | Persentase usaha ekonomi keluarga yang mendapatkan pembinaan                       | %      | 51,61   | 2.344.756.042         | 53,85  | 2.461.993.844          | 55,22   | 2.535.853.659          | 56,52   | 2.611.929.269          | 57,14   | 2.690.287.147          | 61,64   | 2.770.995.762          | 61,64                     | 13.071.059.682         | Dinas Sosial     |
| 3              | Program Rehabilitasi Sosial   | Persentase DTKS yang memperoleh pelayanan dan rehabilitasi                         | %      | 30,09   | 221.566.900           | 31,44  | 235.075.700            | 34,25   | 242.127.971            | 40,00   | 249.391.810            | 49,64   | 256.873.564            | 59,43   | 264.579.771            | 59,43                     | 1.248.048.817          | Dinas Sosial     |
| 4              | Program Perlindungan dan Jaminan Sosial   | Persentase PPKS yang memperoleh bantuan sosial                                     | %      | 27,48   | 817.493.750           | 29,18  | 858.368.438            | 31,89   | 884.119.491            | 36,01   | 910.643.075            | 41,84   | 937.962.368            | 48,06   | 966.101.239            | 48,06                     | 4.557.194.610          | Dinas Sosial     |
| 5              | Program Penanganan Bencana  | Persentase Korban Bencana Yang Menerima Bantuan Sosial Selama Masa Tanggap Darurat | %      | 100   | 660.179.228           | 100  | 693.188.189            | 100     | 713.983.835            | 100     | 735.403.350            | 100     | 757.465.451            | 100     | 780.189.414            | 100                       | 3.680.230.239          | Dinas Sosial     |
| <b>2</b>       | <b>URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR</b>              |  |        |   | <b>91.701.809.585</b> |  | <b>102.603.329.191</b> |         | <b>105.461.131.265</b> |         | <b>108.383.651.187</b> |         | <b>112.336.656.144</b> |         | <b>116.393.009.477</b> |                           | <b>545.177.777.263</b> |                  |
| <b>2.1</b>     | <b>Urusan Pemerintahan Bidang Tenaga Kerja</b>  |  |        |   | <b>6.190.076.346</b>  |  | <b>6.499.730.163</b>   |         | <b>6.695.513.318</b>   |         | <b>6.897.213.486</b>   |         | <b>7.105.010.573</b>   |         | <b>7.319.090.008</b>   |                           | <b>34.516.557.548</b>  |                  |
| <b>2.1.01</b>  | <b>Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja</b>  |  |        |   | <b>6.190.076.346</b>  |  | <b>6.499.730.163</b>   |         | <b>6.695.513.318</b>   |         | <b>6.897.213.486</b>   |         | <b>7.105.010.573</b>   |         | <b>7.319.090.008</b>   |                           | <b>34.516.557.548</b>  |                  |
| 1              | Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota                               | Persentase pelaksanaan program penunjang SKPD                                      | Persen | 100   | 5.950.049.033         | 100  | 6.247.551.485          | 100     | 6.434.978.029          | 100     | 6.628.027.370          | 100     | 6.826.868.191          | 100     | 7.031.674.237          | 100                       | 33.169.099.312         | Transnaker       |
| 2              | Program Perencanaan Tenaga Kerja  | Persentase Tersedianya Perencanaan Tenaga Kerja                                    | %      | 100   | 30.000.000            | 100  | 31.650.000             | 100     | 33.390.750             | 100     | 35.227.241             | 100     | 37.164.740             | 100     | 39.208.800             | 100                       | 176.641.531            | Transnaker       |
| 3              | Program Penempatan Tenaga Kerja   | Besaran Pencari Kerja Yang ditempatkan   | Orang  | 306   | 58.327.000            | 349  | 61.243.350             | 351     | 63.080.651             | 367     | 64.973.070             | 397     | 66.922.262             | 403     | 68.929.930             | 403                       | 325.149.263            | Transnaker       |
| 4              | Program Hubungan Industrial   | Persentase Penyelesaian Kasus Hubungan Industrial                                  | %      | 100   | 42.862.063            | 100  | 45.005.166             | 100     | 46.355.321             | 100     | 47.745.981             | 100     | 49.178.360             | 100     | 50.653.711             | 100                       | 238.938.539            | Transnaker       |
| 2              | Program Pelatihan Kerja dan Produktivitas Tenaga Kerja                                    | Jumlah Tenaga Kerja yang mendapat Pelatihan berbasis Kompetensi                    | Orang  | 70  | 108.838.250           | 75   | 114.280.163            | 77      | 117.708.567            | 80      | 121.239.824            | 83      | 124.877.019            | 85      | 128.623.330            | 85                        | 606.728.903            | UPT BLK          |
| <b>2.2</b>     | <b>Urusan Pemerintahan Bidang Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak</b>            |  |        |   | <b>4.167.069.494</b>  |  | <b>4.375.422.969</b>   |         | <b>4.506.685.658</b>   |         | <b>4.641.886.227</b>   |         | <b>4.781.142.814</b>   |         | <b>4.924.577.099</b>   |                           | <b>23.229.714.767</b>  |                  |
| <b>2.02.01</b> | <b>Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak</b>                                 |  |        |   | <b>4.167.069.494</b>  |  | <b>4.375.422.969</b>   |         | <b>4.506.685.658</b>   |         | <b>4.641.886.227</b>   |         | <b>4.781.142.814</b>   |         | <b>4.924.577.099</b>   |                           | <b>23.229.714.767</b>  |                  |
| 1              | Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota                               | Persentase pelaksanaan program penunjang SKPD                                      | Persen | 100   | 3.684.087.744         | 100  | 3.868.292.131          | 100     | 3.984.340.895          | 100     | 4.103.871.122          | 100     | 4.226.987.256          | 100     | 4.353.796.873          | 100                       | 20.537.288.277         | DPPPA            |
| 2              | Program Pengarusutamaan Gender Dan Pemberdayaan Perempuan                                 | Persentase Perempuan Yang Menduduki Jabatan Publik                                 | %      | 7,69  | 151.409.000           | 7,87   | 158.979.450            | 7,96    | 163.748.834            | 8,05    | 168.661.299            | 8,14    | 173.721.137            | 8,23    | 178.932.772            | 8,23                      | 844.043.491            | DPPPA            |
| 3              | Program Perlindungan Perempuan  | Jumlah Perempuan Korban Kekerasan yang mendapatkan pelayanan/ditangani             | Orang  | 3   | 66.342.750            | 2  | 69.659.888             | 2       | 71.749.684             | 1       | 73.902.175             | 1       | 76.119.240             | 1       | 78.402.817             | 1                         | 369.833.803            | DPPPA            |
| 4              | Program Peningkatan Kualitas Keluarga   | Persentase peningkatan kualitas keluarga   | %      | 100   | 52.137.000            | 100  | 54.743.850             | 100     | 56.386.166             | 100     | 58.077.750             | 100     | 59.820.083             | 100     | 61.614.685             | 100                       | 290.642.534            | DPPPA            |
| 5              | Program Pengelolaan Sistem Data Gender Dan Anak   | Persentase pengelolaan data gender dan anak  | %      | 100   | 21.599.500            | 100  | 22.679.475             | 100     | 23.359.859             | 100     | 24.060.655             | 100     | 24.782.475             | 100     | 25.525.949             | 100                       | 120.408.413            | DPPPA            |
| 6              | Program Pemenuhan Hak Anak (Pha)  | Persentase Perlindungan dan Pemenuhan Hak Anak                                     | %      | 55,25   | 160.256.500           | 60   | 168.269.325            | 72      | 173.317.405            | 73      | 178.516.927            | 80      | 183.872.435            | 88      | 189.388.608            | 92                        | 893.364.699            | DPPPA            |
| 7              | Program Perlindungan Khusus Anak  | Jumlah korban kekerasan anak yang ditindaklanjuti                                  | Orang  | 3   | 31.237.000            | 2  | 32.798.850             | 2       | 33.782.816             | 1       | 34.796.300             | 1       | 35.840.189             | 1       | 36.915.395             | 1                         | 174.133.549            | DPPPA            |

| NO.     | Urusan/OPD/Program  | Indikator Kinerja (Outcome)  | Satuan                            | Capaian Pada Tahun Dasar Perencanaan (Tahun 2021) |                      | Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan |                      |                |                      |                |                      |                |                      |                |                      | Capaian Akhir Tahun RPJMD |                      | Perangkat Daerah |
|---------|---|--|-----------------------------------|---|----------------------|--|----------------------|----------------|----------------------|----------------|----------------------|----------------|----------------------|----------------|----------------------|---------------------------|----------------------|------------------|
|         |   |  |                                   | Kinerja   | Pagu Indikatif (Rp.) | 2022   |                      | 2023           |                      | 2024           |                      | 2025           |                      | 2026           |                      | Kinerja                   | Pagu Indikatif (Rp.) |                  |
|         |   |  |                                   |   |                      | Kinerja  | Pagu Indikatif (Rp.) | Kinerja        | Pagu Indikatif (Rp.) | Kinerja        | Pagu Indikatif (Rp.) | Kinerja        | Pagu Indikatif (Rp.) | Kinerja        | Pagu Indikatif (Rp.) |                           |                      |                  |
| 1       | 2   | 3  | 4                                 | 5   | 6                    | 7  | 8                    | 9              | 10                   | 11             | 12                   | 13             | 14                   | 15             | 16                   | 17                        | 18                   | 19               |
| 2.3     | Urusan Pemerintahan Bidang Pangan   |  |                                   |   | 5.021.563.580        |  | 10.357.037.663       |                | 9.981.663.929        |                | 9.687.716.712        |                | 10.645.440.703       |                | 11.698.937.093       |                           | 52.370.796.100       |                  |
| 2.03.01 | Dinas Ketahanan Pangan  |  |                                   |   | 5.021.563.580        |  | 10.357.037.663       |                | 9.981.663.929        |                | 9.687.716.712        |                | 10.645.440.703       |                | 11.698.937.093       |                           | 52.370.796.100       |                  |
| 1       | Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota   | Persentase pelaksanaan program penunjang SKPD  | Persen                            | 100   | 3.899.735.583        | 100  | 5.811.103.410        | 100            | 6.014.563.638        | 100            | 6.481.772.322        | 100            | 7.118.901.874        | 100            | 7.819.744.381        | 100                       | 33.246.085.625       | Ketapang         |
| 2       | Program Pengelolaan Sumber Daya Ekonomi Untuk Kedaulatan Dan Kemandirian Pangan   | Persentase Desa Mandiri Pangan   | Persen                            | 3,14  | 370.000.000          | 6,29   | 1.638.133.000        | 9,43           | 1.306.196.300        | 12,58          | 398.850.000          | 15,72          | 438.735.000          | 18,87          | 482.608.500          | 18,87                     | 4.264.522.800        | Ketapang         |
| 3       | Program Peningkatan Diversifikasi Dan Ketahanan Pangan Masyarakat   | Persentase Desa Lumbung Pangan   | Persen                            | 2,52  | 686.819.497          | 5,03   | 2.181.668.753        | 7,55           | 1.869.658.241        | 10,60          | 1.936.724.065        | 12,58          | 2.130.396.471        | 15,09          | 2.343.436.119        | 15,09                     | 10.461.883.649       | Ketapang         |
| 4       | Program Penanganan Kerawanan Pangan   | Tingkat Penguatan Cadangan Pangan<br>Persentase penanganan kerawanan pangan                                    | %<br>%                            | 100<br>100  | 21.394.500           | 100<br>100                                     | 323.590.500          | 100<br>100     | 348.449.550          | 100<br>100     | 383.294.505          | 100<br>100     | 421.623.956          | 100<br>100     | 463.786.351          | 100<br>100                | 1.940.744.862        | Ketapang         |
| 5       | Program Pengawasan Keamanan Pangan  | Ketersediaan energi dan protein perkapita  | KkI/Kapita/Hari<br>Gr/Kapita/Hari | 2.753<br>70,86                                    | 43.614.000           | 2.811<br>72,27                                 | 402.542.000          | 2.870<br>75,34 | 442.796.200          | 2.928<br>76,85 | 487.075.820          | 2.986<br>78,39 | 535.783.402          | 3.046<br>79,95 | 589.361.742          | 3.046<br>79,95            | 2.457.559.164        | Ketapang         |
| 2.4     | Urusan Pemerintahan Bidang Pertanahan   |  |                                   |   | 1.945.666.000        |  | 2.042.949.300        |                | 2.104.237.779        |                | 2.527.155.312        |                | 2.602.969.972        |                | 2.681.059.071        |                           | 11.958.371.434       |                  |
| 4.01.01 | Sekretariat Daerah  |  |                                   |   | 1.945.666.000        |  | 2.042.949.300        |                | 2.104.237.779        |                | 2.527.155.312        |                | 2.602.969.972        |                | 2.681.059.071        |                           | 11.958.371.434       |                  |
| 1       | Program Penyelesaian Ganti Kerugian Dan Santunan Tanah Untuk Pembangunan  | Persentase penyelesaian ganti kerugian tanah untuk pembangunan   | %                                 | 100   | 1.280.000.000        | 100  | 1.344.000.000        | 100            | 1.384.320.000        | 100            | 1.785.640.000        | 100            | 1.839.209.200        | 100            | 1.894.385.476        | 100                       | 8.247.554.676        | Setda            |
| 3       | Program Penatagunaan Tanah  | Persentase penatagunaan tanah untuk wilayah Kabupaten  | %                                 | 100   | 665.666.000          | 100  | 698.949.300          | 100            | 719.917.779          | 100            | 741.515.312          | 100            | 763.760.772          | 100            | 786.673.595          | 100                       | 3.710.816.758        | Setda            |
| 2.5     | Urusan Pemerintahan Bidang Lingkungan Hidup   |  |                                   |   | 9.502.461.622        |  | 9.771.874.503        |                | 10.083.830.738       |                | 10.404.545.660       |                | 10.716.682.030       |                | 11.038.182.491       |                           | 52.015.115.423       |                  |
| 2.05.01 | Dinas Lingkungan Hidup  |  |                                   |   | 9.502.461.622        |  | 9.771.874.503        |                | 10.083.830.738       |                | 10.404.545.660       |                | 10.716.682.030       |                | 11.038.182.491       |                           | 52.015.115.423       |                  |
| 1       | Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota   | Persentase pelaksanaan program penunjang SKPD  | Persen                            | 100   | 5.321.158.117        | 100  | 5.587.216.023        | 100            | 5.754.832.504        | 100            | 5.927.477.479        | 100            | 6.105.301.803        | 100            | 6.288.460.857        | 100                       | 29.663.288.665       | DLH              |
| 2       | Program Perencanaan Lingkungan Hidup  | Persentase ketersediaan dokumen perencanaan lingkungan yang berkualitas  | Persen                            | 100   | 1.000.000.000        | 100  | 1.050.000.000        | 100            | 1.081.500.000        | 100            | 1.113.945.000        | 100            | 1.147.363.350        | 100            | 1.181.784.251        | 100                       | 5.574.592.601        | DLH              |
| 3       | Program Pengendalian Pencemaran Dan/Atau Kerusakan Lingkungan Hidup   | Indeks Kualitas Air<br>Indeks Kualitas Udara   | nilai<br>nilai                    | 1,76<br>91,09                                     | 199.268.550          | 1,94<br>91,19                                  | 209.231.978          | 2,12<br>91,38  | 215.508.937          | 2,30<br>91,57  | 221.974.205          | 2,48<br>91,76  | 228.633.431          | 2,66<br>91,95  | 235.492.434          | 2,66<br>91,95             | 1.110.840.984        | DLH              |
| 4       | Program Pengelolaan Keanekaragaman Hayati (Kehati)  | Indeks Tutupan Lahan   | %                                 | 77,68   | 2.307.479.830        | 77,86  | 2.422.853.822        | 77,95          | 2.495.539.436        | 78,04          | 2.570.405.619        | 78,13          | 2.647.517.788        | 78,22          | 2.726.943.321        | 78,22                     | 12.863.259.986       | DLH              |
| 5       | Program Pengendalian Bahan Berbahaya Dan Beracun (B3) Dan Limbah Bahan Berbahaya Dan Beracun (Limbah B3)                | Persentase usaha yang memilah B3 dan limbah B3   | %                                 | 65  | 36.311.750           | 68   | 38.127.338           | 70             | 39.271.158           | 75             | 40.449.292           | 78             | 41.662.771           | 80             | 42.912.654           | 80                        | 202.423.213          | DLH              |
| 6       | Program Pembinaan Dan Pengawasan Terhadap Izin Lingkungan Dan Izin Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH) | Persentase pembinaan dan pengawasan terhadap izin lingkungan dan izin perlindungan serta pengelolaan LH (PPLH) | %                                 | 82  | 49.197.750           | 85   | 51.657.638           | 90             | 53.207.367           | 95             | 54.803.588           | 100            | 56.447.695           | 100            | 58.141.126           | 100                       | 274.257.413          | DLH              |
| 7       | Program Peningkatan Pendidikan, Pelatihan Dan Penyuluhan Lingkungan Hidup Untuk Masyarakat                              | Persentase ASN bersertifikat AMDAL yang profesional  | %                                 | 60  | 19.724.000           | 70   | 40.000.000           | 80             | 60.000.000           | 90             | 80.000.000           | 100            | 82.400.000           | 100            | 84.872.000           | 100                       | 347.272.000          | DLH              |
| 8       | Program Penghargaan Lingkungan Hidup Untuk Masyarakat   | Persentase kelompok masyarakat yang mendapat penghargaan LH  | %                                 | 50  | 31.329.750           | 60   | 32.896.238           | 63             | 33.883.125           | 65             | 34.899.618           | 68             | 35.946.607           | 70             | 37.025.005           | 70                        | 174.650.593          | DLH              |
| 9       | Program Penanganan Pengaduan Lingkungan Hidup   | Persentase aduan LH yang diselesaikan  | %                                 | 100   | 16.993.875           | 100  | 17.843.569           | 100            | 18.378.876           | 100            | 18.930.242           | 100            | 19.498.149           | 100            | 20.083.094           | 100                       | 94.733.930           | DLH              |
| 10      | Program Pengelolaan Persampahan   | Cakupan wilayah pelayanan persampahan  | %                                 | 15,38   | 20.998.000           | 15,38  | 22.047.900           | 15,38          | 22.709.337           | 15,38          | 23.390.617           | 15,38          | 24.092.336           | 15,38          | 24.815.106           | 15                        | 117.055.295          | DLH              |
| 11      | Program Pengakuan Keberadaan Masyarakat Hukum Adat (MHA), Kearifan Lokal Dan Hak MHA Yang Terkait Dengan PPLH           | Persentase MHA yang Terakui  | %                                 | 100   | 500.000.000          | 100  | 300.000.000          | 100            | 309.000.000          | 100            | 318.270.000          | 100            | 327.818.100          | 100            | 337.652.643          | 100                       | 1.592.740.743        | DLH              |
| 2.6     | Urusan Pemerintahan Bidang Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil   |  |                                   |   | 4.116.277.093        |  | 4.563.066.578        |                | 4.699.958.575        |                | 4.840.957.332        |                | 4.986.186.052        |                | 5.135.771.634        |                           | 24.225.940.171       |                  |
| 2.06.01 | Dinas Kependudukan Pencatatan Sipil   |  |                                   |   | 4.116.277.093        |  | 4.563.066.578        |                | 4.699.958.575        |                | 4.840.957.332        |                | 4.986.186.052        |                | 5.135.771.634        |                           | 24.225.940.171       |                  |
| 1       | Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota   | Persentase pelaksanaan program penunjang SKPD  | Persen                            | 100   | 3.251.726.093        | 100  | 3.414.312.398        | 100            | 3.516.741.770        | 100            | 3.622.244.023        | 100            | 3.730.911.343        | 100            | 3.842.838.684        | 100                       | 18.127.048.217       | Dukcapil         |
| 2       | Program Pendaftaran Penduduk  | Kepemilikan dokumen kependudukan Berbasis Elektronik   | %                                 | 100   | 420.946.000          | 100  | 441.993.300          | 100            | 455.253.099          | 100            | 468.910.692          | 100            | 482.978.013          | 100            | 497.467.353          | 100                       | 2.346.602.457        | Dukcapil         |
| 3       | Program Pencatatan Sipil  | Persentase Kepemilikan dokumen Pencatatan Sipil Berbasis Elektronik  | %                                 | 95  | 252.838.500          | 95   | 265.480.425          | 100            | 273.444.838          | 100            | 281.648.183          | 100            | 290.097.628          | 100            | 298.800.557          | 100                       | 1.409.471.631        | Dukcapil         |

| NO.     | Urusan/OPD/Program  | Indikator Kinerja (Outcome)  | Satuan   | Capaian Pada Tahun Dasar Perencanaan (Tahun 2021) |                      | Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan |                      |         |                      |         |                      |         |                      |         |                      | Capaian Akhir Tahun RPJMD |                      | Perangkat Daerah |
|---------|---|--|----------|---|----------------------|--|----------------------|---------|----------------------|---------|----------------------|---------|----------------------|---------|----------------------|---------------------------|----------------------|------------------|
|         |   |  |          | Kinerja   | Pagu Indikatif (Rp.) | 2022   |                      | 2023    |                      | 2024    |                      | 2025    |                      | 2026    |                      | Kinerja                   | Pagu Indikatif (Rp.) |                  |
|         |   |  |          |   |                      | Kinerja  | Pagu Indikatif (Rp.) | Kinerja | Pagu Indikatif (Rp.) | Kinerja | Pagu Indikatif (Rp.) | Kinerja | Pagu Indikatif (Rp.) | Kinerja | Pagu Indikatif (Rp.) |                           |                      |                  |
| 1       | 2   | 3  | 4        | 5   | 6                    | 7  | 8                    | 9       | 10                   | 11      | 12                   | 13      | 14                   | 15      | 16                   | 17                        | 18                   | 19               |
| 4       | Program Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan                             | OPD Yang Memanfaatkan Data Kependudukan  | OPD      | 4   | 190.766.500          | 7  | 200.304.825          | 8       | 206.313.970          | 9       | 212.503.389          | 10      | 218.878.491          | 11      | 225.444.845          | 11                        | 1.063.445.519        | Dukcapil         |
| 5       | Program Pengelolaan Profil Kependudukan   | Jumlah Data Base kependudukan terupdate  | Database | 1   | -                    | 1  | 240.975.630          | 1       | 248.204.899          | 1       | 255.651.046          | 1       | 263.320.577          | 1       | 271.220.195          | 1                         | 1.279.372.347        | Dukcapil         |
| 2.7     | <b>Urusan Pemerintahan Bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Desa</b>                  |  |          |   | 8.588.507.719        |  | 9.103.612.555        |         | 9.376.720.932        |         | 9.658.022.560        |         | 9.947.763.236        |         | 10.246.196.133       |                           | 48.332.315.416       |                  |
| 2.07.01 | <b>Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa</b>                                       |  |          |   | 8.588.507.719        |  | 9.103.612.555        |         | 9.376.720.932        |         | 9.658.022.560        |         | 9.947.763.236        |         | 10.246.196.133       |                           | 48.332.315.416       |                  |
| 1       | Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota                         | Persentase pelaksanaan program penunjang SKPD  | Persen   | 100   | 7.830.304.219        | 100  | 8.221.819.430        | 100     | 8.468.474.013        | 100     | 8.722.528.233        | 100     | 8.984.204.080        | 100     | 9.253.730.203        | 100                       | 43.650.755.959       | DPMD             |
| 2       | Program Penataan Desa   | Persentase BPD, LPM, dan PKK aktif   | persen   | 100   | -                    |  | 85.679.450           | 100     | 88.249.834           | 100     | 90.897.329           | 100     | 93.624.248           | 100     | 96.432.976           | 100                       | 454.883.836          | DPMD             |
| 3       | Program Peningkatan Kerjasama Desa  | Jumlah Desa Berkembang   | Desa     | 71  | 68.857.000           | 74   | 72.299.850           | 77      | 74.468.846           | 79      | 76.702.911           | 80      | 79.003.998           | 81      | 81.374.118           | 81                        | 383.849.723          | DPMD             |
| 4       | Program Administrasi Pemerintahan Desa  | Persentase Penyampaian RKPDes, APBDDes, dan Laporan Keuangan Desa Tepat Waktu dan Sesuai Peraturan Bupati              | %        | 82,32   | 322.068.875          | 82,88  | 338.172.319          | 83,45   | 348.317.488          | 84,01   | 358.767.013          | 84,57   | 369.530.023          | 85,13   | 380.615.924          | 85,13                     | 1.795.402.767        | DPMD             |
| 5       | Program Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat Dan Masyarakat Hukum Adat | Persentase 1 (satu) BUMDes dalam 1 (satu) Desa Yang Aktif  | %        | 100   | 367.277.625          | 100  | 385.641.506          | 100     | 397.210.751          | 100     | 409.127.074          | 100     | 421.400.886          | 100     | 434.042.913          | 100                       | 2.047.423.131        | DPMD             |
| 2.8     | <b>Urusan Pemerintahan Bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana</b>      |  |          |   | 11.749.728.296       |  | 12.337.214.711       |         | 12.707.331.152       |         | 13.088.551.087       |         | 13.481.207.619       |         | 13.885.643.848       |                           | 65.499.948.417       |                  |
| 2.08.01 | <b>Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana</b>                           |  |          |   | 11.749.728.296       |  | 12.337.214.711       |         | 12.707.331.152       |         | 13.088.551.087       |         | 13.481.207.619       |         | 13.885.643.848       |                           | 65.499.948.417       |                  |
| 1       | Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota                         | Persentase pelaksanaan program penunjang SKPD  | Persen   | 100   | 6.884.224.240        | 100  | 7.228.435.452        | 100     | 7.445.288.516        | 100     | 7.668.647.171        | 100     | 7.898.706.586        | 100     | 8.135.667.784        | 100                       | 38.376.745.508       | DPPKB            |
| 2       | Program Pengendalian Penduduk   | Persentase pertumbuhan penduduk  | %        | 6,71  | 751.886.056          | 7,06   | 789.480.359          | 7,41    | 813.164.770          | 7,76    | 837.559.713          | 8,11    | 862.686.504          | 8,46    | 888.567.099          | 8,46                      | 4.191.458.444        | DPPKB            |
| 3       | Program Pembinaan Keluarga Berencana (KB)   | Jumlah Peserta KB Aktif  | Orang    | 11.786  | 2.963.313.000        | 11.871   | 3.111.478.650        | 11.923  | 3.204.823.010        | 11.957  | 3.300.967.700        | 11.973  | 3.399.996.731        | 12.051  | 3.501.996.633        | 12.051                    | 16.519.262.723       | DPPKB            |
| 4       | Program Pemberdayaan Dan Peningkatan Keluarga Sejahtera (KS)                        | Persentase Keluarga Sejahtera  | %        | 81,70   | 1.150.305.000        | 81,82  | 1.207.820.250        | 81,94   | 1.244.054.858        | 82,06   | 1.281.376.503        | 82,18   | 1.319.817.798        | 82,30   | 1.359.412.332        | 82,30                     | 6.412.481.741        | DPPKB            |
|         |   | Cakupan PUS Unmeetneed   | %        | 0,09  |                      | 0,13   |                      | 0,07    |                      | 0,05    |                      | 0,03    |                      | 0,01    |                      | 0,01                      |                      |                  |
| 2.9     | <b>Urusan Pemerintahan Bidang Perhubungan</b>                                       |  |          |   | 9.614.392.954        |  | 10.095.112.602       |         | 10.397.965.980       |         | 10.709.904.959       |         | 11.031.202.108       |         | 11.362.138.171       |                           | 53.596.323.820       |                  |
| 2.09.01 | <b>Dinas Perhubungan</b>  |  |          |   | 9.614.392.954        |  | 10.095.112.602       |         | 10.397.965.980       |         | 10.709.904.959       |         | 11.031.202.108       |         | 11.362.138.171       |                           | 53.596.323.820       |                  |
| 1       | Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota                         | Persentase pelaksanaan program penunjang SKPD  | Persen   | 100   | 3.673.097.594        | 100  | 3.856.752.474        | 100     | 3.972.455.048        | 100     | 4.091.628.699        | 100     | 4.214.377.560        | 100     | 4.340.808.887        | 100                       | 20.476.022.668       | Dishub           |
| 2       | Program Penyelenggaraan Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan (LLAJ)                       | Persentase Ketersediaan Fasilitas Perengkapan Jalan (Rambu, Marka, APIL, Guadrail, Delinator, dll) yang berfungsi baik | %        | 30,00   | 3.949.302.500        | 34,39  | 4.146.767.625        | 36,58   | 4.271.170.654        | 38,78   | 4.399.305.773        | 40,97   | 4.531.284.947        | 43,16   | 4.667.223.495        | 43,16                     | 22.015.752.494       | Dishub           |
|         |   | Persentase Penurunan Angka Kecelakaan Lalu Lintas  | %        | 85,00   |                      | 86,75  |                      | 87,62   |                      | 88,50   |                      | 89,37   |                      | 90,24   |                      | 90,24                     |                      |                  |
| 3       | Program Pengelolaan Pelayaran   | Persentase Pelabuhan Rakyat/Dermaga Rakyat Yang Berfungsi Baik   | %        | 72,73   | 1.991.992.860        | 81,82  | 2.091.592.503        | 90,91   | 2.154.340.278        | 100     | 2.218.970.486        | 100     | 2.285.539.601        | 100     | 2.354.105.789        | 100                       | 11.104.548.658       | Dishub           |
| 2.10    | <b>Urusan Pemerintahan Bidang Komunikasi dan Informatika</b>                        |  |          |   | 3.998.300.146        |  | 4.198.215.153        |         | 4.324.161.608        |         | 4.453.886.456        |         | 4.587.503.050        |         | 4.725.128.141        |                           | 22.288.894.408       |                  |
| 2.10.01 | <b>Dinas Komunikasi dan Informatika</b>   |  |          |   | 3.998.300.146        |  | 4.198.215.153        |         | 4.324.161.608        |         | 4.453.886.456        |         | 4.587.503.050        |         | 4.725.128.141        |                           | 22.288.894.408       |                  |
| 1       | Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota                         | Persentase pelaksanaan program penunjang SKPD  | Persen   | 100   | 3.281.202.646        | 100  | 3.445.262.778        | 100     | 3.548.620.662        | 100     | 3.655.079.281        | 100     | 3.764.731.660        | 100     | 3.877.673.610        | 100                       | 18.291.367.991       | Diskominfo       |
| 2       | Program Informasi Dan Komunikasi Publik   | Persentase Pengelolaan Layanan Pengaduan Berbasis Online Yang didistribusikan ke OPD                                   | %        | 0   | 192.882.500          | 25   | 202.526.625          | 45      | 208.602.424          | 69      | 214.860.496          | 75      | 221.306.311          | 80      | 227.945.501          | 80                        | 1.075.241.357        | Diskominfo       |
| 3       | Program Pengelolaan Aplikasi Informatika  | Jumlah Penerapan SPBE  | aplikasi | 1   | 524.215.000          | 3  | 550.425.750          | 3       | 566.938.523          | 5       | 583.946.678          | 5       | 601.465.079          | 7       | 619.509.031          | 7                         | 2.922.285.060        | Diskominfo       |
| 2.11    | <b>Urusan Pemerintahan Bidang Koperasi, Usaha Kecil, dan Menengah</b>               |  |          |   | 4.583.483.276        |  | 5.535.997.940        |         | 5.702.077.878        |         | 5.873.140.214        |         | 6.049.334.421        |         | 6.230.814.453        |                           | 29.391.364.906       |                  |
| 2.11.01 | <b>Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah</b>                                      |  |          |   | 4.583.483.276        |  | 5.535.997.940        |         | 5.702.077.878        |         | 5.873.140.214        |         | 6.049.334.421        |         | 6.230.814.453        |                           | 29.391.364.906       |                  |
| 1       | Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota                         | Persentase pelaksanaan program penunjang SKPD  | Persen   | 100   | 3.825.578.713        | 100  | 4.016.857.649        | 100     | 4.137.363.378        | 100     | 4.261.484.279        | 100     | 4.389.328.808        | 100     | 4.521.008.672        | 100                       | 21.326.042.786       | Dikop & UMKM     |
| 2       | Program Pengawasan dan Pemeriksaan Koperasi   | Persentase koperasi aktif yang dibina  | Koperasi | 22,32   | 74.845.063           | 31,25  | 78.587.316           | 35,71   | 80.944.936           | 37,95   | 83.373.284           | 40,18   | 85.874.482           | 42,41   | 88.450.717           | 42,41                     | 417.230.734          | Dikop & UMKM     |
| 3       | Program Penilaian Kesehatan Ksp/Usp Koperasi  | Persentase koperasi sehat  | %        | 16  | 39.084.500           | 17   | 41.038.725           | 18      | 42.269.887           | 19      | 43.537.983           | 20      | 44.844.123           | 21      | 46.189.447           | 21                        | 217.880.164          | Dikop & UMKM     |
| 4       | Program Pendidikan Dan Latihan Perkoperasian  | Persentase peningkatan koperasi yang mengikuti pelatihan   | %        | 55,74   | -                    | 67,57  | 155.837.000          | 74,32   | 160.512.110          | 81,08   | 165.327.473          | 84,46   | 170.287.297          | 87,84   | 175.395.916          | 87,84                     | 827.359.797          | Dikop & UMKM     |
| 5       | Program Pemberdayaan Dan Perlindungan Koperasi                                      | Persentase koperasi aktif  | %        | 76,01   | 204.520.000          | 76,35  | 214.746.000          | 77,03   | 221.188.800          | 77,70   | 227.824.031          | 79,39   | 234.658.752          | 81,08   | 241.698.515          | 81                        | 1.140.115.679        | Dikop & UMKM     |

| NO.            | Urusan/OPD/Program   | Indikator Kinerja (Outcome)                            | Satuan      | Capaian Pada Tahun Dasar Perencanaan (Tahun 2021) |                       | Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan |                       |         |                       |         |                       |         |                       |         |                       | Capaian Akhir Tahun RPJMD |                        | Perangkat Daerah   |
|----------------|--|--|-------------|---|-----------------------|--|-----------------------|---------|-----------------------|---------|-----------------------|---------|-----------------------|---------|-----------------------|---------------------------|------------------------|--------------------|
|                |  |  |             | Kinerja   | Pagu Indikatif (Rp.)  | 2022   |                       | 2023    |                       | 2024    |                       | 2025    |                       | 2026    |                       | Kinerja                   | Pagu Indikatif (Rp.)   |                    |
|                |  |  |             |   |                       | Kinerja  | Pagu Indikatif (Rp.)  | Kinerja | Pagu Indikatif (Rp.)  | Kinerja | Pagu Indikatif (Rp.)  | Kinerja | Pagu Indikatif (Rp.)  | Kinerja | Pagu Indikatif (Rp.)  |                           |                        |                    |
| 1              | 2  | 3  | 4           | 5   | 6                     | 7  | 8                     | 9       | 10                    | 11      | 12                    | 13      | 14                    | 15      | 16                    | 17                        | 18                     | 19                 |
| 6              | Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil, Dan Usaha Mikro (UMKM) | Persentase wirausaha baru                              | %           | 0,90  | 439.455.000           | 0,39   | 461.427.750           | 0,76    | 475.270.583           | 0,77    | 489.528.700           | 0,78    | 504.214.561           | 0,79    | 519.340.998           | 0,79                      | 2.449.782.591          | Dikop & UMKM       |
| 7              | Program Pengembangan UMKM  | Jumlah UMKM yang dibina                                | UMKM        | -   | -                     | 50   | 567.503.500           | 50      | 584.528.605           | 50      | 602.064.463           | 50      | 620.126.397           | 50      | 638.730.189           | 50                        | 3.012.953.154          | Dikop & UMKM       |
| <b>2.12</b>    | <b>Usuran Pemerintahan Bidang Penanaman Modal</b>                        |  |             |   | <b>4.697.905.038</b>  |  | <b>5.348.704.820</b>  |         | <b>5.509.165.964</b>  |         | <b>5.659.783.893</b>  |         | <b>5.829.577.410</b>  |         | <b>6.004.464.733</b>  |                           | <b>28.351.696.821</b>  |                    |
| <b>2.12.01</b> | <b>Dinas Penanaman Modal dan PTSP</b>                                    |  |             |   | <b>4.697.905.038</b>  |  | <b>5.348.704.820</b>  |         | <b>5.509.165.964</b>  |         | <b>5.659.783.893</b>  |         | <b>5.829.577.410</b>  |         | <b>6.004.464.733</b>  |                           | <b>28.351.696.821</b>  |                    |
| 1              | Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota              | Persentase pelaksanaan program penunjang SKPD          | Persen      | 100   | 3.965.036.424         | 100  | 4.163.288.245         | 100     | 4.288.186.893         | 100     | 4.416.832.499         | 100     | 4.549.337.474         | 100     | 4.685.817.599         | 100                       | 22.103.462.710         | DPMPPTSP           |
| 2              | Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal                               | Jumlah Perbup yang mendukung iklim Investasi           | Perbup      | 0   | -                     | 2  | 250.000.000           | 3       | 257.500.000           | 4       | 250.567.950           | 5       | 258.084.989           | 6       | 265.827.538           | 6                         | 1.281.980.477          | DPMPPTSP           |
| 3              | Program Promosi Penanaman Modal  | Jumlah nilai investasi PMA/PMDN                        | Rp (milyar) | 180,99  | 118.628.000           | 198,1  | 124.559.400           | 215,21  | 128.296.182           | 232,32  | 132.145.067           | 249,43  | 136.109.419           | 266,54  | 140.192.702           | 266,54                    | 661.302.771            | DPMPPTSP           |
| 4              | Program Pelayanan Penanaman Modal  | Lama proses perizinan                                  | hari        | 2   | 291.667.614           | 2  | 306.250.995           | 2       | 315.438.525           | 2       | 324.901.680           | 2       | 334.648.731           | 2       | 344.688.193           | 2                         | 1.625.928.123          | DPMPPTSP           |
| 5              | Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal                         | Persentase pengawasan investasi                        | %           | 100   | 322.573.000           | 100  | 338.701.650           | 100     | 348.862.700           | 100     | 359.328.580           | 100     | 370.108.438           | 100     | 381.211.691           | 100                       | 1.798.213.059          | DPMPPTSP           |
| 6              | Program Pengelolaan data Dan Sistem Informasi Penanaman Modal            | Jumlah izin yang diterbitkan                           | Izin        | 290   | -                     | 345  | 165.904.530           | 398     | 170.881.666           | 442     | 176.008.116           | 495     | 181.288.359           | 500     | 186.727.010           | 500                       | 880.809.681            | DPMPPTSP           |
|                |  | Survey Kepuasan Masyarakat                             | %           | 77,24   | -                     | 77,78  | -                     | 78,45   | -                     | 79,21   | -                     | 79,86   | -                     | 80,36   | -                     | 80,36                     | -                      | -                  |
| <b>2.13</b>    | <b>Usuran Pemerintahan Bidang Kepemudaan dan Olahraga</b>                |  |             |   | <b>9.989.119.395</b>  |  | <b>10.488.575.365</b> |         | <b>10.803.232.626</b> |         | <b>11.127.329.604</b> |         | <b>11.461.149.493</b> |         | <b>11.804.983.977</b> |                           | <b>55.685.271.065</b>  |                    |
| <b>2.13.01</b> | <b>Dinas Kepemudaan dan Olahraga</b>                                     |  |             |   | <b>9.989.119.395</b>  |  | <b>10.488.575.365</b> |         | <b>10.803.232.626</b> |         | <b>11.127.329.604</b> |         | <b>11.461.149.493</b> |         | <b>11.804.983.977</b> |                           | <b>55.685.271.065</b>  |                    |
| 1              | Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota              | Persentase pelaksanaan program penunjang SKPD          | Persen      | 100   | 4.022.706.902         | 100  | 4.223.842.247         | 100     | 4.350.557.515         | 100     | 4.481.074.240         | 100     | 4.615.506.467         | 100     | 4.753.971.661         | 100                       | 22.424.952.130         | Dikpora            |
| 2              | Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Kepemudaan                     | Jumlah Organisasi Kepemudaan yang dibina               | Organisasi  | 12  | 1.069.737.617         | 12   | 1.123.224.498         | 12      | 1.156.921.233         | 13      | 1.191.628.870         | 13      | 1.227.377.736         | 13      | 1.264.199.068         | 13                        | 5.963.351.404          | Dikpora            |
| 3              | Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Keolahragaan                   | Jumlah Cabang Olahraga Yang Berprestasi                | Cabor       | 7   | 4.896.674.876         | 7  | 5.141.508.620         | 8       | 5.295.753.878         | 8       | 5.454.626.495         | 8       | 5.618.265.290         | 8       | 5.786.813.248         | 8                         | 27.296.967.531         | Dikpora            |
| <b>2.14</b>    | <b>Usuran Pemerintahan Bidang Statistik</b>                              |  |             |   | <b>72.187.500</b>     |  | <b>440.000.000</b>    |         | <b>887.250.000</b>    |         | <b>969.112.500</b>    |         | <b>1.102.568.125</b>  |         | <b>1.157.696.531</b>  |                           | <b>4.556.627.156</b>   |                    |
| <b>5.01.2</b>  | <b>Badan Perencanaan Pembangunan Daerah</b>                              |  |             |   | <b>72.187.500</b>     |  | <b>440.000.000</b>    |         | <b>887.250.000</b>    |         | <b>969.112.500</b>    |         | <b>1.102.568.125</b>  |         | <b>1.157.696.531</b>  |                           | <b>4.556.627.156</b>   |                    |
| 1              | Program Penyelenggaraan Statistik Sektor                                 | Persentase sistem data dan statistik yang terintegrasi | Persen      | 25  | 72.187.500            | 35   | 440.000.000           | 45      | 887.250.000           | 55      | 969.112.500           | 65      | 1.102.568.125         | 75      | 1.157.696.531         | 75                        | 4.628.814.656          | Bappeda            |
| <b>2.15</b>    | <b>Usuran Pemerintahan Bidang Persandian</b>                             |  |             |   | -                     |  | -                     |         | -                     |         | -                     |         | -                     |         | -                     |                           | -                      |                    |
| <b>2.10.01</b> | <b>Dinas Komunikasi dan Informatika</b>                                  |  |             |   | -                     |  | -                     |         | -                     |         | -                     |         | -                     |         | -                     |                           | -                      |                    |
| 1              | Program Penyelenggaraan Persandian Untuk Pengamanan Informasi            |  |             |   | -                     |  | -                     |         | -                     |         | -                     |         | -                     |         | -                     |                           | -                      | Diskominfo         |
| <b>2.16</b>    | <b>Usuran Pemerintahan Bidang Kebudayaan</b>                             |  |             |   | <b>2.948.000.000</b>  |  | <b>2.714.800.000</b>  |         | <b>2.725.384.000</b>  |         | <b>2.736.285.520</b>  |         | <b>2.747.514.086</b>  |         | <b>2.759.079.508</b>  |                           | <b>13.683.063.114</b>  |                    |
| <b>1.01.01</b> | <b>Dinas Pendidikan dan Kebudayaan</b>                                   |  |             |   | <b>2.948.000.000</b>  |  | <b>2.714.800.000</b>  |         | <b>2.725.384.000</b>  |         | <b>2.736.285.520</b>  |         | <b>2.747.514.086</b>  |         | <b>2.759.079.508</b>  |                           | <b>13.683.063.114</b>  |                    |
| 1              | Program Pengembangan Kebudayaan  | Persentase budaya lokal daerah yang dikembangkan       | Persen      | 57  | 2.312.000.000         | 59   | 2.312.000.000         | 61      | 2.312.000.000         | 62      | 2.312.000.000         | 65      | 2.312.000.000         | 65      | 2.312.000.000         | 65                        | 11.560.000.000         | Dinas P & K        |
| 2              | Program Pengembangan Kesenian Tradisional                                | Jumlah Lembaga adat Yang dibina                        | lembaga     | 8   | 336.000.000           | 8  | 352.800.000           | 8       | 363.384.000           | 8       | 374.285.520           | 8       | 385.514.086           | 8       | 397.079.508           | 8                         | 1.873.063.114          | Dinas P & K        |
| 3              | Program Pelestarian dan Pengelolaan Cagar Budaya                         | Jumlah Cagar Budaya yang dilestarikan                  | Situs       | 4   | 300.000.000           | 4  | 50.000.000            | 4       | 50.000.000            | 4       | 50.000.000            | 4       | 50.000.000            | 4       | 50.000.000            | 4                         | 250.000.000            | Dinas P & K        |
| <b>2.17</b>    | <b>Usuran Pemerintahan Bidang Perpustakaan</b>                           |  |             |   | <b>4.172.398.288</b>  |  | <b>4.381.018.202</b>  |         | <b>4.512.448.748</b>  |         | <b>4.647.822.211</b>  |         | <b>4.787.256.877</b>  |         | <b>4.930.874.584</b>  |                           | <b>23.259.420.623</b>  |                    |
| <b>2.17.01</b> | <b>Dinas Perpustakaan</b>  |  |             |   | <b>4.172.398.288</b>  |  | <b>4.381.018.202</b>  |         | <b>4.512.448.748</b>  |         | <b>4.647.822.211</b>  |         | <b>4.787.256.877</b>  |         | <b>4.930.874.584</b>  |                           | <b>23.259.420.623</b>  |                    |
| 1              | Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota              | Persentase pelaksanaan program penunjang SKPD          | Persen      | 100   | 3.380.995.013         | 100  | 3.550.044.764         | 100     | 3.656.546.107         | 100     | 3.766.242.490         | 100     | 3.879.229.764         | 100     | 3.995.606.657         | 100                       | 18.847.669.782         | Dinas Perpustakaan |
| 2              | Program Pembinaan Perpustakaan   | Pertumbuhan Pengunjung Perpustakaan Daerah             | %           | 30,00   | 791.403.275           | 49,87  | 830.973.439           | 50,00   | 855.902.642           | 58,13   | 881.579.721           | 65,75   | 908.027.113           | 69,81   | 935.267.926           | 69,81                     | 4.411.750.841          | Dinas Perpustakaan |
| <b>2.18</b>    | <b>Usuran Pemerintahan Bidang Kearsipan</b>                              |  |             |   | <b>344.672.838</b>    |  | <b>349.996.667</b>    |         | <b>443.502.380</b>    |         | <b>460.337.451</b>    |         | <b>474.147.575</b>    |         | <b>488.372.002</b>    |                           | <b>2.216.356.076</b>   |                    |
| <b>2.17.01</b> | <b>Dinas Perpustakaan</b>  |  |             |   | <b>344.672.838</b>    |  | <b>349.996.667</b>    |         | <b>443.502.380</b>    |         | <b>460.337.451</b>    |         | <b>474.147.575</b>    |         | <b>488.372.002</b>    |                           | <b>2.216.356.076</b>   |                    |
| 1              | Program Pengelolaan Arsip  | Persentase Penyelamatan Arsip Yang Telah Direservasi   | persen      | 13,35   | 106.476.588           | 15,23  | 111.800.417           | 16,15   | 115.154.430           | 27,31   | 118.609.063           | 33,05   | 122.167.335           | 36,22   | 125.832.355           | 36,22                     | 593.563.600            | Dinas Perpustakaan |
| 2              | Program Perlindungan Dan Penyelamatan Arsip                              | Persentase perlindungan dan penyelamatan arsip         | persen      | 19,67   | 238.196.250           | 23,22  | 238.196.250           | 25,32   | 249.000.000           | 28,41   | 260.000.000           | 32,58   | 267.800.000           | 35,69   | 275.834.000           | 35,69                     | 1.290.830.250          | Dinas Perpustakaan |
| 3              | Program Perizinan Penggunaan Arsip                                       | Jumlah izin penggunaan arsip yang diterbitkan          | izin        | 0   | -                     | 0  | -                     | 1       | 79.347.950            | 1       | 81.728.389            | 1       | 84.180.240            | 1       | 86.705.647            | 1                         | 331.962.226            | Dinas Perpustakaan |
| <b>3</b>       | <b>URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN</b>                                       |  |             |   | <b>50.383.340.167</b> |  | <b>53.765.813.583</b> |         | <b>55.895.081.592</b> |         | <b>57.571.934.040</b> |         | <b>59.299.092.061</b> |         | <b>61.078.064.823</b> |                           | <b>287.609.986.098</b> |                    |

| NO.     | Urusan/OPD/Program   | Indikator Kinerja (Outcome)  | Satuan | Capaian Pada Tahun Dasar Perencanaan (Tahun 2021) |                      | Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan |                      |         |                      |         |                      |         |                      |         |                      | Capaian Akhir Tahun RPJMD |                      | Perangkat Daerah                  |
|---------|--|--|--------|---|----------------------|--|----------------------|---------|----------------------|---------|----------------------|---------|----------------------|---------|----------------------|---------------------------|----------------------|-----------------------------------|
|         |  |  |        | Kinerja   | Pagu Indikatif (Rp.) | 2022   |                      | 2023    |                      | 2024    |                      | 2025    |                      | 2026    |                      | Kinerja                   | Pagu Indikatif (Rp.) |                                   |
|         |  |  |        |   |                      | Kinerja  | Pagu Indikatif (Rp.) | Kinerja | Pagu Indikatif (Rp.) | Kinerja | Pagu Indikatif (Rp.) | Kinerja | Pagu Indikatif (Rp.) | Kinerja | Pagu Indikatif (Rp.) |                           |                      |                                   |
| 1       | 2  | 3  | 4      | 5   | 6                    | 7  | 8                    | 9       | 10                   | 11      | 12                   | 13      | 14                   | 15      | 16                   | 17                        | 18                   | 19                                |
| 3.1     | Urusan Pemerintahan Bidang Kelautan dan Perikanan  |  |        |   | 11.112.596.550       |  | 11.668.226.378       |         | 12.018.273.169       |         | 12.378.821.364       |         | 12.750.186.005       |         | 13.132.691.585       |                           | 61.948.198.500       |                                   |
| 3.01.01 | Dinas Kelautan dan Perikanan   |  |        |   | 11.112.596.550       |  | 11.668.226.378       |         | 12.018.273.169       |         | 12.378.821.364       |         | 12.750.186.005       |         | 13.132.691.585       |                           | 61.948.198.500       |                                   |
| 1       | Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota  | Persentase pelaksanaan program penunjang SKPD                        | Persen | 100   | 4.593.696.675        | 100  | 4.823.381.509        | 100     | 4.968.082.954        | 100     | 5.117.125.443        | 100     | 5.270.639.206        | 100     | 5.428.758.382        | 100                       | 25.607.987.493       | DKP                               |
| 2       | Program Pengelolaan Perikanan Tangkap  | Persentase Kelompok Nelayan yang di lakukan pembinaan                | Persen | 50  | 3.286.068.875        | 60   | 3.450.372.319        | 70      | 3.553.883.488        | 80      | 3.660.499.993        | 90      | 3.770.314.993        | 100     | 3.883.424.443        | 100                       | 18.318.495.235       | DKP                               |
|         |  | Produktivitas perikanan tangkap                                      | Ton    | 15.059  |                      | 15.149   |                      | 15.239  |                      | 15.419  |                      | 15.509  |                      | 15.599  |                      | 15.599                    |                      |                                   |
| 3       | Program Pengelolaan Perikanan Budidaya   | Persentase kelompok pembudidaya yang dibina                          | persen | 50  | 2.918.916.000        | 60   | 3.064.861.800        | 70      | 3.156.807.654        | 80      | 3.251.511.884        | 85      | 3.349.057.240        | 95      | 3.449.528.957        | 95                        | 16.271.767.535       | DKP                               |
| 4       | Program Pengawasan Sumber Daya Kelautan Dan Perikanan  | Persentase POKMASWAS yang dibina                                     | persen | 45  | 50.630.000           | 50   | 53.161.500           | 55      | 54.756.345           | 60      | 56.399.035           | 65      | 58.091.006           | 70      | 59.833.737           | 70                        | 282.241.623          | DKP                               |
| 5       | Program Pengolahan Dan Pemasaran Hasil Perikanan   | Persentase kelompok pengolah dan pemasar hasil perikanan yang dibina | persen | 50  | 263.285.000          | 55   | 276.449.250          | 60      | 284.742.728          | 65      | 293.285.009          | 70      | 302.083.560          | 75      | 311.146.066          | 75                        | 1.467.706.613        | DKP                               |
| 3.2     | Urusan Pemerintahan Bidang Pariwisata  |  |        |   | 5.826.106.017        |  | 6.317.411.318        |         | 6.606.920.857        |         | 6.805.128.483        |         | 7.009.282.338        |         | 7.219.560.808        |                           | 33.958.303.804       |                                   |
| 3.02.01 | Dinas Pariwisata   |  |        |   | 5.826.106.017        |  | 6.317.411.318        |         | 6.606.920.857        |         | 6.805.128.483        |         | 7.009.282.338        |         | 7.219.560.808        |                           | 33.958.303.804       |                                   |
| 1       | Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota  | Persentase pelaksanaan program penunjang SKPD                        | Persen | 100   | 4.423.429.783        | 100  | 4.644.601.272        | 100     | 4.783.939.310        | 100     | 4.927.457.490        | 100     | 5.075.281.214        | 100     | 5.227.539.651        | 100                       | 24.658.818.937       | Dispar                            |
| 2       | Program Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata  | Lama menginap  | Hari   | 1   | 378.055.891          | 2  | 396.958.686          | 2       | 408.867.446          | 3       | 421.133.469          | 3       | 433.767.474          | 4       | 446.780.498          | 4                         | 2.107.507.573        | Dispar                            |
| 3       | Program Pemasaran Pariwisata   | Jumlah kunjungan wisata  | Orang  | 9.084   | 944.445.717          | 9.981  | 991.668.003          | 10.878  | 1.021.418.043        | 11.775  | 1.052.060.584        | 12.672  | 1.083.622.402        | 13.569  | 1.116.131.074        | 13.569                    | 5.264.900.106        | Dispar                            |
| 4       | Program Pengembangan Ekonomi Kreatif Melalui Pemanfaatan dan Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual | Persentase pengembangan prasarana ekonomi kreatif                    | persen | 0   | -                    | 10   | 200.000.000          | 40      | 305.987.200          | 50      | 315.166.816          | 55      | 324.621.820          | 60      | 334.360.475          | 60                        | 1.480.136.312        | Dispar                            |
| 5       | Program Pengembangan Sumber Daya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif                                    | Persentase pembinaan ekonomi kreatif dan SDM kepariwisataan          | persen | 100   | 80.174.626           | 100  | 84.183.357           | 100     | 86.708.858           | 100     | 89.310.124           | 100     | 91.989.427           | 100     | 94.749.110           | 100                       | 446.940.877          | Dispar                            |
| 3.3     | Urusan Pemerintahan Bidang Pertanian   |  |        |   | 23.849.298.109       |  | 25.518.314.572       |         | 26.283.864.009       |         | 27.072.379.929       |         | 27.884.551.327       |         | 28.721.087.867       |                           | 135.480.197.705      |                                   |
| 3.03.01 | Dinas Perkebunan   |  |        |   | 6.357.719.331        |  | 7.026.670.355        |         | 7.237.470.466        |         | 7.454.594.580        |         | 7.678.232.417        |         | 7.908.579.390        |                           | 37.305.547.207       |                                   |
| 1       | Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota  | Persentase pelaksanaan program penunjang SKPD                        | Persen | 100   | 3.693.831.581        | 100  | 3.878.523.160        | 100     | 3.994.878.855        | 100     | 4.114.725.220        | 100     | 4.238.166.977        | 100     | 4.365.311.986        | 100                       | 20.591.606.199       | Dinas Perkebunan                  |
| 2       | Program Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian   | Produktivitas tanaman perkebunan                                     | Ton    | 2.092   | -                    | 2.173  | 356.002.570          | 2.254   | 366.682.647          | 2.335   | 377.683.127          | 2.416   | 389.013.620          | 2.497   | 400.684.029          | 2.497                     | 1.890.065.993        | Dinas Perkebunan                  |
| 3       | Program Penyediaan dan Pengembangan Prasarana Pertanian  | Jumlah Produksi tanaman Perkebunan                                   | Ton    | 2.092   | 2.494.590.000        | 2.173  | 2.619.319.500        | 2.254   | 2.697.899.085        | 2.335   | 2.778.836.058        | 2.416   | 2.862.201.139        | 2.497   | 2.948.067.173        | 2.497                     | 13.906.322.955       | Dinas Perkebunan                  |
|         |  | Jumlah Produksi tanaman Hortikultura                                 | Ton    | 166.119   |                      | 166.198  |                      | 166.277 |                      | 166.356 |                      | 166.435 |                      | 166.514 |                      | 166.514                   |                      |                                   |
| 4       | Program Pengendalian Dan Penanggulangan Bencana Pertanian  | Persentase luas areal pengendalian OPT                               | persen | 0   | 98.750.250           | 14   | 98.750.250           | 14      | 101.712.758          | 14      | 104.764.140          | 14      | 107.907.064          | 14      | 111.144.276          | 70                        | 524.278.489          | Dinas Perkebunan                  |
| 5       | Program Penyuluhan Pertanian   | Persentase peningkatan SDM kelembagaan kelompok tani                 | persen | 100   | 70.547.500           | 100  | 74.074.875           | 100     | 76.297.121           | 100     | 78.586.035           | 100     | 80.943.616           | 100     | 83.371.924           | 100                       | 393.273.571          | Dinas Perkebunan                  |
| 3.03.02 | Dinas Tanaman Pangan dan Peternakan  |  |        |   | 17.491.578.778       |  | 18.491.644.217       |         | 19.046.393.543       |         | 19.617.785.350       |         | 20.206.318.910       |         | 20.812.508.478       |                           | 98.174.650.498       |                                   |
| 1       | Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota  | Persentase pelaksanaan program penunjang SKPD                        | persen | 100   | 8.780.249.411        | 100  | 9.219.261.882        | 100     | 9.495.839.738        | 100     | 9.780.714.930        | 100     | 10.074.136.378       | 100     | 10.376.360.469       | 100                       | 48.946.313.397       | Dinas Tanaman Pangan & Peternakan |
| 2       | Program Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian   | Produktivitas tanaman pangan   | Kw/Ha  | 432,71  | 63.000.000           | 463  | 66.150.000           | 493,29  | 68.134.500           | 523,58  | 70.178.535           | 553,87  | 72.283.891           | 584,16  | 74.452.408           | 584,16                    | 351.199.334          | Dinas Tanaman Pangan & Peternakan |
| 3       | Program Penyediaan dan Pengembangan Prasarana Pertanian  | Jumlah Produksi tanaman pangan                                       | ton    | 107,046   | 7.579.280.326        | 107,417  | 7.958.244.342        | 107,788 | 8.196.991.673        | 108,159 | 8.442.901.423        | 108,530 | 8.696.188.465        | 108,901 | 8.957.074.119        | 108,901                   | 42.251.400.022       | Dinas Tanaman Pangan & Peternakan |
|         |  | Jumlah produksi peternakan (Daging dan Telur)                        | kg     | 217,655   |                      | 243,410  |                      | 254,605 |                      | 265,856 |                      | 305,881 |                      | 342,089 |                      | 342,089                   |                      |                                   |
| 4       | Program Pengendalian Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner                            | Persentase pengendalian penyakit hewan ternak                        | persen | 50  | 137.911.288          | 60   | 144.806.852          | 60      | 149.151.058          | 65      | 153.625.590          | 70      | 158.234.357          | 70      | 162.981.388          | 70                        | 768.799.246          | Dinas Tanaman Pangan & Peternakan |
| 5       | Program Pengendalian Dan Penanggulangan Bencana Pertanian  | Persentase pengendalian bencana pertanian dan penanggulangannya      | %      | 100   | 524.282.750          | 100  | 550.496.888          | 100     | 567.011.794          | 100     | 584.022.148          | 100     | 601.542.812          | 100     | 619.589.097          | 100                       | 2.922.662.739        | Dinas Tanaman Pangan & Peternakan |
| 6       | Program Perizinan Usaha Pertanian  | Persentase izin yang diterbitkan                                     | persen | 80  | -                    | 85   | 125.486.500          | 88      | 129.251.095          | 90      | 133.128.628          | 95      | 137.122.487          | 95      | 141.236.161          | 95                        | 666.224.871          | Dinas Tanaman Pangan & Peternakan |

| NO.            | Urusan/OPD/Program | Indikator Kinerja (Outcome)   | Satuan  | Capaian Pada Tahun Dasar Perencanaan (Tahun 2021) |                        | Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan |                        |                |                        |                |                        |                |                        |                |                        | Capaian Akhir Tahun RPJMD |                          | Perangkat Daerah |                                   |
|----------------|--------------------|---|---|---|------------------------|--|------------------------|----------------|------------------------|----------------|------------------------|----------------|------------------------|----------------|------------------------|---------------------------|--------------------------|------------------|-----------------------------------|
|                |                    |   |   | Kinerja   | Pagu Indikatif (Rp.)   | 2022   |                        | 2023           |                        | 2024           |                        | 2025           |                        | 2026           |                        | Kinerja                   | Pagu Indikatif (Rp.)     |                  |                                   |
|                |                    |   |   |   |                        | Kinerja  | Pagu Indikatif (Rp.)   | Kinerja        | Pagu Indikatif (Rp.)   | Kinerja        | Pagu Indikatif (Rp.)   | Kinerja        | Pagu Indikatif (Rp.)   | Kinerja        | Pagu Indikatif (Rp.)   |                           |                          |                  |                                   |
| 1              | 2                  | 3   | 4   | 5   | 6                      | 7  | 8                      | 9              | 10                     | 11             | 12                     | 13             | 14                     | 15             | 16                     | 17                        | 18                       | 19               |                                   |
|                | 7                  | Program Penyuluhan Pertanian  | Persentase peningkatan SDM kelembagaan kelompok tani                | persen  | 100                    | 406.855.003                                    | 100                    | 427.197.753    | 100                    | 440.013.686    | 100                    | 453.214.096    | 100                    | 466.810.519    | 100                    | 480.814.835               | 100                      | 2.268.050.889    | Dinas Tanaman Pangan & Peternakan |
| <b>3.4</b>     |                    | <b>Usuran Pemerintahan Bidang Perdagangan</b>                       |   |   | <b>6.776.549.837</b>   |  | <b>7.215.377.329</b>   |                | <b>7.448.838.649</b>   |                | <b>7.672.303.808</b>   |                | <b>7.902.472.922</b>   |                | <b>8.139.547.110</b>   |                           | <b>38.378.539.818</b>    |                  |                                   |
| <b>3.04.01</b> |                    | <b>Dinas Perindustrian dan Perdagangan</b>                          |   |   | <b>6.776.549.837</b>   |  | <b>7.215.377.329</b>   |                | <b>7.448.838.649</b>   |                | <b>7.672.303.808</b>   |                | <b>7.902.472.922</b>   |                | <b>8.139.547.110</b>   |                           | <b>38.378.539.818</b>    |                  |                                   |
|                | 1                  | Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota         | Persentase pelaksanaan program penunjang SKPD                       | Persen  | 100                    | 4.699.037.525                                  | 100                    | 4.933.989.401  | 100                    | 5.082.009.083  | 100                    | 5.234.469.356  | 100                    | 5.391.503.436  | 100                    | 5.553.248.540             | 100                      | 26.195.219.816   | Disperindag                       |
|                | 2                  | Program Perizinan Dan Pendaftaran Perusahaan                        | Persentase pengajuan SKA yang diproses dan ditindaklanjuti          | persen  | 0                      | 115.460.000                                    | 10                     | 121.233.000    | 20                     | 124.869.990    | 30                     | 128.616.090    | 40                     | 132.474.572    | 50                     | 136.448.810               | 50                       | 643.642.462      | Disperindag                       |
|                | 3                  | Program Peningkatan Sarana Distribusi Perdagangan                   | Persentase pasar sehat  | pasar   | 35,29                  | 1.600.118.350                                  | 52,94                  | 1.680.124.268  | 64,71                  | 1.730.527.996  | 76,47                  | 1.782.443.835  | 88,24                  | 1.835.917.150  | 100,00                 | 1.890.994.665             | 100                      | 8.920.007.914    | Disperindag                       |
|                |                    |   | Persentase peningkatan pelaku usaha perdagangan                     | pasar   | 64,71                  |  | 76,47                  |                | 88,24                  |                | 94,12                  |                | 100,00                 |                |                        |                           |                          |                  |                                   |
|                | 4                  | Program Stabilisasi Harga Barang Kebutuhan Pokok Dan Barang Penting | Persentase stabilitasi jenis barang penting                         | persen  | 40                     | 157.804.962                                    | 45                     | 165.695.210    | 45                     | 170.666.066    | 50                     | 175.786.048    | 50                     | 181.059.630    | 55                     | 186.491.419               | 55                       | 879.698.373      | Disperindag                       |
|                | 6                  | Program Standardisasi Dan Perlindungan Konsumen                     | Jumlah Omset yang dihasilkan dari Usaha Sektor Perdagangan          | persen  | 51,49                  | 204.129.000                                    | 51,7                   | 214.335.450    | 51,91                  | 220.765.514    | 52,12                  | 227.388.479    | 52,33                  | 234.210.133    | 52,54                  | 241.236.437               | 52,54                    | 1.137.936.013    | Disperindag                       |
|                | 7                  | Program Penggunaan Dan Pemasaran Produk Dalam Negeri                | Kontribusi Sektor Perdagangan                                       | persen  | 12,6                   | -  | 13,42                  | -              | 14,24                  | -              | 15,06                  | -              | 15,88                  | -              | 16,70                  | -                         | 16,70                    | -                | Disperindag                       |
|                | 8                  | Program Pengembangan Ekspor   | Persentase pengembangan ekspor kabupaten                            | Persen  | -                      | -  | 20                     | 100.000.000    | 22                     | 120.000.000    | 24                     | 123.600.000    | 26                     | 127.308.000    | 28                     | 131.127.240               | 28                       | 602.035.240      | Disperindag                       |
| <b>3.5</b>     |                    | <b>Usuran Pemerintahan Bidang Perindustrian</b>                     |   |   | <b>792.984.541</b>     |  | <b>919.388.618</b>     |                | <b>946.970.277</b>     |                | <b>975.379.385</b>     |                | <b>1.004.640.766</b>   |                | <b>1.034.779.989</b>   |                           | <b>4.881.159.035</b>     |                  |                                   |
| <b>3.04.01</b> |                    | <b>Dinas Perindustrian dan Perdagangan</b>                          |   |   | <b>792.984.541</b>     |  | <b>919.388.618</b>     |                | <b>946.970.277</b>     |                | <b>975.379.385</b>     |                | <b>1.004.640.766</b>   |                | <b>1.034.779.989</b>   |                           | <b>4.881.159.035</b>     |                  |                                   |
|                | 1                  | Program Perencanaan Dan Pembangunan Industri                        | Jumlah Omset yang dihasilkan dari Sektor Usaha Perindustrian        | %   | 51,49                  | 792.984.541                                    | 51,7                   | 832.633.768    | 51,91                  | 857.612.781    | 52,12                  | 883.341.165    | 52,33                  | 909.841.399    | 52,54                  | 937.136.641               | 52,54                    | 4.420.565.755    | Disperindag                       |
|                | 2                  | Program Pengendalian Izin Usaha Industri Kabupaten/Kota             | Persentase IUI dan LUKI efektif                                     | %   | 20                     | -  | 20                     | 86.754.850     | 20                     | 89.357.496     | 20                     | 92.038.220     | 20                     | 94.799.367     | 20                     | 97.643.348                | 20                       | 460.593.281      | Disperindag                       |
| <b>3.5</b>     |                    | <b>Usuran Pemerintahan Bidang Transmigrasi</b>                      |   |   | <b>2.025.805.113</b>   |  | <b>2.127.095.369</b>   |                | <b>2.590.214.631</b>   |                | <b>2.667.921.070</b>   |                | <b>2.747.958.702</b>   |                | <b>2.830.397.463</b>   |                           | <b>12.963.587.236</b>    |                  |                                   |
| <b>2.1.01</b>  |                    | <b>Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja</b>                          |   |   | <b>2.025.805.113</b>   |  | <b>2.127.095.369</b>   |                | <b>2.590.214.631</b>   |                | <b>2.667.921.070</b>   |                | <b>2.747.958.702</b>   |                | <b>2.830.397.463</b>   |                           | <b>12.963.587.236</b>    |                  |                                   |
|                | 1                  | Program Perencanaan Kawasan Transmigrasi                            | Persentase ketersediaan dperencanaan daerah kawasan transmigrasi    | persen  | 100                    | 22.019.000                                     | 100                    | 23.119.950     | 100                    | 423.119.950    | 100                    | 435.813.549    | 100                    | 448.887.955    | 100                    | 462.354.594               | 100                      | 1.793.295.997    | Transnaker                        |
|                | 2                  | Program Pembangunan Kawasan Transmigrasi                            | Persentase pembangunan sarana dan prasarana di kawasan transmigrasi | persen  | 100                    | 1.939.332.113                                  | 100                    | 2.036.298.719  | 100                    | 2.097.387.680  | 100                    | 2.160.309.311  | 100                    | 2.225.118.590  | 100                    | 2.291.872.148             | 100                      | 10.810.986.447   | Transnaker                        |
|                | 3                  | Program Pengembangan Kawasan Transmigrasi                           | Persentase warga transmigrasi yang mandiri                          | persen  | 100                    | 64.454.000                                     | 100                    | 67.676.700     | 100                    | 69.707.001     | 100                    | 71.798.211     | 100                    | 73.952.157     | 100                    | 76.170.722                | 100                      | 359.304.791      | Transnaker                        |
| <b>4</b>       |                    | <b>UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN</b>                          |   |   | <b>85.776.289.873</b>  |  | <b>89.163.049.888</b>  |                | <b>91.154.635.116</b>  |                | <b>93.205.967.902</b>  |                | <b>95.318.840.671</b>  |                | <b>97.495.099.624</b>  |                           | <b>466.337.593.201</b>   |                  |                                   |
| <b>4.1</b>     |                    | <b>Sekretariat Daerah</b>   |   |   | <b>56.365.789.398</b>  |  | <b>59.184.078.868</b>  |                | <b>60.959.601.234</b>  |                | <b>62.788.389.271</b>  |                | <b>64.672.040.949</b>  |                | <b>66.612.202.178</b>  |                           | <b>314.216.312.499</b>   |                  |                                   |
| <b>4.01.01</b> |                    | <b>Sekretariat Daerah</b>   |   |   | <b>56.365.789.398</b>  |  | <b>59.184.078.868</b>  |                | <b>60.959.601.234</b>  |                | <b>62.788.389.271</b>  |                | <b>64.672.040.949</b>  |                | <b>66.612.202.178</b>  |                           | <b>314.216.312.499</b>   |                  |                                   |
|                | 1                  | Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota         | Persentase pelaksanaan program penunjang SKPD                       | Persen  | 100                    | 49.170.456.585                                 | 100                    | 51.628.979.414 | 100                    | 53.177.848.797 | 100                    | 54.773.184.261 | 100                    | 56.416.379.788 | 100                    | 58.108.871.182            | 100                      | 274.105.263.442  | Setda                             |
|                | 2                  | Program Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat                       | Jumlah Sarana dan Prasarana keagamaan Yang Dibangun/Rehabilitasi    | unit  | 64                     | 6.310.969.000                                  | 64                     | 6.626.517.450  | 64                     | 6.825.312.974  | 64                     | 7.030.072.363  | 64                     | 7.240.974.534  | 64                     | 7.458.203.770             | 64                       | 35.181.081.089   | Setda                             |
|                | 3                  | Program Perekonomian dan Pembangunan                                | Nilai EKPPD   | nilai   | baik                   |  | baik                   |                | baik                   |                | baik                   |                | baik                   |                | baik                   |                           |                          |                  |                                   |
|                |                    |   | Persentase penyerapan anggaran pembangunan dan realisasinya         | persen  | 90                     | 884.363.813                                    | 93                     | 928.582.004    | 95                     | 956.439.464    | 95                     | 985.132.648    | 95,5                   | 1.014.686.627  | 96                     | 1.045.127.226             | 96                       | 4.929.967.968    | Setda                             |
| <b>4.2</b>     |                    | <b>Sekretariat DPRD</b>   |   |   | <b>29.410.500.475</b>  |  | <b>29.978.971.020</b>  |                | <b>30.195.033.883</b>  |                | <b>30.417.578.631</b>  |                | <b>30.646.799.722</b>  |                | <b>30.882.897.446</b>  |                           | <b>152.121.280.702</b>   |                  |                                   |
| <b>4.02.01</b> |                    | <b>Sekretariat DPRD</b>   |   |   | <b>29.410.500.475</b>  |  | <b>29.978.971.020</b>  |                | <b>30.195.033.883</b>  |                | <b>30.417.578.631</b>  |                | <b>30.646.799.722</b>  |                | <b>30.882.897.446</b>  |                           | <b>152.121.280.702</b>   |                  |                                   |
|                | 1                  | Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota         | Persentase pelaksanaan program penunjang SKPD                       | Persen  | 100                    | 22.551.361.975                                 | 100                    | 22.776.875.595 | 100                    | 22.776.875.595 | 100                    | 22.776.875.595 | 100                    | 22.776.875.595 | 100                    | 22.776.875.595            | 100                      | 113.884.377.974  | Sekwan                            |
|                | 2                  | Program Dukungan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRD                  | Persentase Peraturan Daerah Yang Dihasilkan                         | persen  | 52                     | 6.859.138.500                                  | 54                     | 7.202.095.425  | 56                     | 7.418.158.288  | 58                     | 7.640.703.036  | 60                     | 7.869.924.127  | 62                     | 8.106.021.851             | 62                       | 38.236.902.728   | Sekwan                            |
| <b>5</b>       |                    | <b>UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN</b>                          |   |   | <b>283.470.183.879</b> |  | <b>267.790.022.296</b> |                | <b>257.562.227.334</b> |                | <b>260.908.628.458</b> |                | <b>264.624.877.714</b> |                | <b>268.202.304.529</b> |                           | <b>1.319.088.060.330</b> |                  |                                   |
| <b>5.1</b>     |                    | <b>Perencanaan</b>  |   |   | <b>10.006.147.209</b>  |  | <b>12.026.408.553</b>  |                | <b>11.766.645.267</b>  |                | <b>12.230.638.806</b>  |                | <b>12.944.462.032</b>  |                | <b>13.591.685.134</b>  |                           | <b>62.559.839.792</b>    |                  |                                   |
| <b>5.01.01</b> |                    | <b>Badan Perencanaan Pembangunan Daerah</b>                         |   |   | <b>10.006.147.209</b>  |  | <b>12.026.408.553</b>  |                | <b>11.766.645.267</b>  |                | <b>12.230.638.806</b>  |                | <b>12.944.462.032</b>  |                | <b>13.591.685.134</b>  |                           | <b>62.559.839.792</b>    |                  |                                   |

| NO.     | Urusan/OPD/Program   | Indikator Kinerja (Outcome)  | Satuan      | Capaian Pada Tahun Dasar Perencanaan (Tahun 2021) |                        | Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan |                        |             |                        |             |                        |             |                        |             |                        | Capaian Akhir Tahun RPJMD |                          | Perangkat Daerah |       |       |       |       |       |       |
|---------|--|--|-------------|---|------------------------|--|------------------------|-------------|------------------------|-------------|------------------------|-------------|------------------------|-------------|------------------------|---------------------------|--------------------------|------------------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
|         |  |  |             | Kinerja   | Pagu Indikatif (Rp.)   | 2022   |                        | 2023        |                        | 2024        |                        | 2025        |                        | 2026        |                        | Kinerja                   | Pagu Indikatif (Rp.)     |                  |       |       |       |       |       |       |
|         |  |  |             |   |                        | Kinerja  | Pagu Indikatif (Rp.)   | Kinerja     | Pagu Indikatif (Rp.)   | Kinerja     | Pagu Indikatif (Rp.)   | Kinerja     | Pagu Indikatif (Rp.)   | Kinerja     | Pagu Indikatif (Rp.)   |                           |                          |                  |       |       |       |       |       |       |
| 1       | 2  | 3  | 4           | 5   | 6                      | 7  | 8                      | 9           | 10                     | 11          | 12                     | 13          | 14                     | 15          | 16                     | 17                        | 18                       | 19               |       |       |       |       |       |       |
| 1       | Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota        | Persentase pelaksanaan program penunjang SKPD                                  | Persen      | 100   | 7.156.723.553          | 100  | 8.562.986.243          | 100         | 7.878.786.842          | 100         | 8.148.387.459          | 100         | 8.658.098.118          | 100         | 9.091.003.024          | 100                       | 42.339.261.686           | Bappeda          |       |       |       |       |       |       |
| 2       | Program Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah  | Persentase konsistensi pelaksanaan pembangunan                                 | persen      | 93,92   | 2.409.423.657          | 94,49  | 3.023.422.310          | 95,06       | 3.174.593.426          | 95,63       | 3.333.323.097          | 96,2        | 3.499.989.252          | 96,77       | 3.674.988.714          | 96,77                     | 21.311.727.021           | Bappeda          |       |       |       |       |       |       |
|         |  | Persentase Keterukuran Indikator Perencanaan                                   | persen      | 100,00  |                        | 100  |                        | 100         |                        | 100         |                        | 100         |                        | 100         |                        | 100                       |                          | 100              | 100   | 100   | 100   | 100   | 100   |       |
|         |  | Persentase Tingkat Partisipatif Perencanaan                                    | persen      | 15,27   |                        | 17,77  |                        | 20,27       |                        | 22,27       |                        | 25,27       |                        | 27,77       |                        | 27,77                     |                          | 27,77            | 27,77 | 27,77 | 27,77 | 27,77 | 27,77 | 27,77 |
| 3       | Program Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah | Persentase sinergitas perencanaan  | persen      | 75  | 440.000.000            | 75,06  | 440.000.000            | 75,51       | 713.265.000            | 75,96       | 748.928.250            | 76,41       | 786.374.663            | 76,86       | 825.693.396            | 76,86                     | 3.954.261.308            | Bappeda          |       |       |       |       |       |       |
|         |  | Persentase OPD Yang Pencapaian Kinerja Sesuai Target                           | persen      | 78  |                        | 79,21  |                        | 80,18       |                        | 81,15       |                        | 82,12       |                        | 83,09       |                        | 83,09                     |                          | 83,09            | 83,09 | 83,09 | 83,09 | 83,09 | 83,09 |       |
| 5.2     | <b>Keuangan</b>  |  |             |   | <b>258.558.402.844</b> |  | <b>239.448.265.350</b> |             | <b>228.999.827.112</b> |             | <b>231.528.566.697</b> |             | <b>234.089.755.918</b> |             | <b>236.683.934.137</b> |                           | <b>1.170.750.349.214</b> |                  |       |       |       |       |       |       |
| 5.02.01 | <b>Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah</b>                  |  |             |   | <b>249.817.027.909</b> |  | <b>230.269.821.668</b> |             | <b>219.546.030.120</b> |             | <b>221.791.155.795</b> |             | <b>224.060.222.689</b> |             | <b>226.353.514.911</b> |                           | <b>1.122.020.745.183</b> |                  |       |       |       |       |       |       |
| 1       | Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota        | Persentase pelaksanaan program penunjang SKPD                                  | Persen      | 100   | 50.396.796.835         | 100  | 50.447.193.632         | 100         | 37.876.956.993         | 100         | 38.255.726.563         | 100         | 38.638.283.829         | 100         | 39.024.666.667         | 100                       | 204.242.827.684          | BKAD             |       |       |       |       |       |       |
| 2       | Program Pengelolaan Keuangan Daerah                                | Penetapan APBD/APBD tepat waktu  | Tepat Waktu | Tepat Waktu                                       | 197.124.097.274        | Tepat Waktu                                    | 177.411.687.547        | Tepat Waktu | 179.185.804.422        | Tepat Waktu | 180.977.662.466        | Tepat Waktu | 182.787.439.091        | Tepat Waktu | 184.615.313.482        | Tepat Waktu               | 904.977.907.008          | BKAD             |       |       |       |       |       |       |
| 3       | Program Pengelolaan Barang Milik Daerah                            | Persentase aset pemda yang terinventarisir                                     | persen      | 90  | 2.296.133.800          | 90   | 2.410.940.490          | 90          | 2.483.268.705          | 90          | 2.557.766.766          | 90          | 2.634.499.769          | 90          | 2.713.534.762          | 90                        | 12.800.010.491           | BKAD             |       |       |       |       |       |       |
| 5.02.02 | <b>Badan Pendapatan Daerah</b>                                     |  |             |   | <b>8.741.374.935</b>   |  | <b>9.178.443.682</b>   |             | <b>9.453.796.992</b>   |             | <b>9.737.410.902</b>   |             | <b>10.029.533.229</b>  |             | <b>10.330.419.226</b>  |                           | <b>48.729.604.031</b>    |                  |       |       |       |       |       |       |
| 1       | Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota        | Persentase pelaksanaan program penunjang SKPD                                  | persen      | 100   | 5.952.593.463          | 100  | 6.250.223.136          | 100         | 6.437.729.830          | 100         | 6.630.861.725          | 100         | 6.829.787.577          | 100         | 7.034.681.204          | 100                       | 33.183.283.473           | Bapenda          |       |       |       |       |       |       |
| 2       | Program Pengelolaan Keuangan Daerah                                | Tingkat kemandirian keuangan daerah (Rasio PAD dibandingkan pendapatan daerah) | persen      | 3,38  | 1.971.240.972          | 3,72   | 2.069.803.021          | 4,31        | 2.131.897.111          | 4,53        | 2.195.854.025          | 4,84        | 2.261.729.645          | 5,12        | 2.329.581.535          | 5,12                      | 10.988.865.336           | Bapenda          |       |       |       |       |       |       |
| 3       | Program Pengelolaan Pendapatan Daerah                              | Persentase kenaikan pendapatan daerah  | persen      | 27  | 817.540.500            | 30   | 858.417.525            | 32          | 884.170.051            | 35          | 910.695.152            | 37          | 938.016.007            | 40          | 966.156.487            | 40                        | 4.557.455.222            | Bapenda          |       |       |       |       |       |       |
| 5.3     | <b>Kepegawaian</b>   |  |             |   | <b>10.410.137.268</b>  |  | <b>10.930.644.131</b>  |             | <b>11.258.563.455</b>  |             | <b>11.596.320.359</b>  |             | <b>11.944.209.970</b>  |             | <b>12.302.536.269</b>  |                           | <b>58.032.274.184</b>    |                  |       |       |       |       |       |       |
| 5.03.01 | <b>Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia</b>      |  |             |   | <b>10.410.137.268</b>  |  | <b>10.930.644.131</b>  |             | <b>11.258.563.455</b>  |             | <b>11.596.320.359</b>  |             | <b>11.944.209.970</b>  |             | <b>12.302.536.269</b>  |                           | <b>58.032.274.184</b>    |                  |       |       |       |       |       |       |
| 1       | Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota        | Persentase pelaksanaan program penunjang SKPD                                  | Persen      | 100   | 6.253.943.210          | 100  | 6.566.640.371          | 100         | 6.763.639.582          | 100         | 6.966.548.769          | 100         | 7.175.545.232          | 100         | 7.390.811.589          | 100                       | 34.863.185.542           | BKPSDM           |       |       |       |       |       |       |
| 2       | Program Kepegawaian Daerah   | Persentase Penempatan Pegawai Sesuai Kompetensi                                | persen      | 71,73   | 4.156.194.058          | 73,46  | 4.364.003.761          | 75,19       | 4.494.923.874          | 76,92       | 4.629.771.590          | 78,65       | 4.768.664.738          | 80,38       | 4.911.724.680          | 80,38                     | 23.169.088.642           | BKPSDM           |       |       |       |       |       |       |
| 5.4     | <b>Pendidikan dan Pelatihan</b>                                    |  |             |   | <b>4.156.194.058</b>   |  | <b>4.364.003.761</b>   |             | <b>4.494.923.874</b>   |             | <b>4.629.771.590</b>   |             | <b>4.768.664.738</b>   |             | <b>4.911.724.680</b>   |                           | <b>23.169.088.642</b>    |                  |       |       |       |       |       |       |
| 5.03.01 | <b>Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia</b>      |  |             |   | <b>4.156.194.058</b>   |  | <b>4.364.003.761</b>   |             | <b>4.494.923.874</b>   |             | <b>4.629.771.590</b>   |             | <b>4.768.664.738</b>   |             | <b>4.911.724.680</b>   |                           | <b>23.169.088.642</b>    |                  |       |       |       |       |       |       |
| 1       | Program Pengembangan Sumber Daya Manusia                           | Persentase Peningkatan Kualitas SDM Aparatur                                   | persen      | 81,81   | 4.156.194.058          | 83,12  | 4.364.003.761          | 84,43       | 4.494.923.874          | 85,74       | 4.629.771.590          | 87,05       | 4.768.664.738          | 88,36       | 4.911.724.680          | 88,36                     | 23.169.088.642           | BKPSDM           |       |       |       |       |       |       |
| 5.5     | <b>Penelitian dan Pengembangan</b>                                 |  |             |   | <b>339.302.500</b>     |  | <b>1.020.700.500</b>   |             | <b>1.042.267.625</b>   |             | <b>923.331.006</b>     |             | <b>877.785.057</b>     |             | <b>712.424.309</b>     |                           | <b>4.576.508.497</b>     |                  |       |       |       |       |       |       |
| 5.01.01 | <b>Badan Perencanaan Pembangunan Daerah</b>                        |  |             |   | <b>339.302.500</b>     |  | <b>1.020.700.500</b>   |             | <b>1.042.267.625</b>   |             | <b>923.331.006</b>     |             | <b>877.785.057</b>     |             | <b>712.424.309</b>     |                           | <b>4.576.508.497</b>     |                  |       |       |       |       |       |       |
| 1       | Program Penelitian dan Pengembangan Daerah                         | Persentase implementasi rencana kelitbangan.                                   | Persen      | 25  | 339.302.500            | 30   | 1.020.700.500          | 35          | 1.042.267.625          | 40          | 923.331.006            | 45          | 877.785.057            | 50          | 712.424.309            | 50                        | 4.576.508.497            | Bappeda          |       |       |       |       |       |       |
| 6       | <b>UNSUR PENGAWASAN URUSAN PEMERINTAHAN</b>                        |  |             |   | <b>7.775.205.334</b>   |  | <b>8.163.965.601</b>   |             | <b>8.408.884.569</b>   |             | <b>8.661.151.106</b>   |             | <b>8.920.985.639</b>   |             | <b>9.188.615.208</b>   |                           | <b>43.343.602.122</b>    |                  |       |       |       |       |       |       |
| 6.01    | <b>Pengawasan</b>  |  |             |   | <b>7.775.205.334</b>   |  | <b>8.163.965.601</b>   |             | <b>8.408.884.569</b>   |             | <b>8.661.151.106</b>   |             | <b>8.920.985.639</b>   |             | <b>9.188.615.208</b>   |                           | <b>43.343.602.122</b>    |                  |       |       |       |       |       |       |
| 6.01.01 | <b>Inspektorat</b>   |  |             |   | <b>7.775.205.334</b>   |  | <b>8.163.965.601</b>   |             | <b>8.408.884.569</b>   |             | <b>8.661.151.106</b>   |             | <b>8.920.985.639</b>   |             | <b>9.188.615.208</b>   |                           | <b>43.343.602.122</b>    |                  |       |       |       |       |       |       |
| 1       | Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota        | Persentase pelaksanaan program penunjang SKPD                                  | Persen      | 100   | 4.407.325.334          | 100  | 4.627.691.601          | 100         | 4.766.522.349          | 100         | 4.909.518.019          | 100         | 5.056.803.560          | 100         | 5.208.507.667          | 100                       | 24.569.043.195           | Inspektorat      |       |       |       |       |       |       |
| 2       | Program Penyelenggaraan Pengawasan                                 | Persentase penyelesaian tindak lanjut temuan hasil pemeriksaan BPK             | persen      | 80,44   | 2.086.908.000          | 80,5   | 2.191.253.400          | 80,56       | 2.256.991.002          | 80,62       | 2.324.700.732          | 80,69       | 2.394.441.754          | 80,75       | 2.466.275.007          | 80,75                     | 11.633.661.895           | Inspektorat      |       |       |       |       |       |       |
| 3       | Program Perumusan Kebijakan, Pendampingan Dan Asistensi            | Tingkat leveling kapabilitas Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP)        | level       | 2   | 1.280.972.000          | 2  | 1.345.020.600          | 3           | 1.385.371.218          | 3           | 1.426.932.355          | 3           | 1.469.740.325          | 3           | 1.513.832.535          | 3                         | 7.140.897.033            | Inspektorat      |       |       |       |       |       |       |
| 7       | <b>URUSAN KEWILAYAHAN</b>  |  |             |   | <b>41.545.966.434</b>  |  | <b>43.700.064.281</b>  |             | <b>45.012.338.209</b>  |             | <b>46.362.708.355</b>  |             | <b>47.753.589.606</b>  |             | <b>49.186.197.294</b>  |                           | <b>232.014.897.746</b>   |                  |       |       |       |       |       |       |

| NO.     | Urusan/OPD/Program   | Indikator Kinerja (Outcome)  | Satuan | Capaian Pada Tahun Dasar Perencanaan (Tahun 2021) |                      | Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan |                      |         |                      |         |                      |         |                      |         |                      | Capaian Akhir Tahun RPJMD |                      | Perangkat Daerah |
|---------|--|--|--------|---|----------------------|--|----------------------|---------|----------------------|---------|----------------------|---------|----------------------|---------|----------------------|---------------------------|----------------------|------------------|
|         |  |  |        | Kinerja   | Pagu Indikatif (Rp.) | 2022   |                      | 2023    |                      | 2024    |                      | 2025    |                      | 2026    |                      | Kinerja                   | Pagu Indikatif (Rp.) |                  |
|         |  |  |        |   |                      | Kinerja  | Pagu Indikatif (Rp.) | Kinerja | Pagu Indikatif (Rp.) | Kinerja | Pagu Indikatif (Rp.) | Kinerja | Pagu Indikatif (Rp.) | Kinerja | Pagu Indikatif (Rp.) |                           |                      |                  |
| 1       | 2  | 3  | 4      | 5   | 6                    | 7  | 8                    | 9       | 10                   | 11      | 12                   | 13      | 14                   | 15      | 16                   | 17                        | 18                   | 19               |
| 7.01    | Kecamatan dan Kelurahan  |  |        |   | 41.545.966.434       |  | 43.700.064.281       |         | 45.012.338.209       |         | 46.362.708.355       |         | 47.753.589.606       |         | 49.186.197.294       |                           | 232.014.897.746      |                  |
| 7.01.01 | Kecamatan  |  |        |   | 41.545.966.434       |  | 43.700.064.281       |         | 45.012.338.209       |         | 46.362.708.355       |         | 47.753.589.606       |         | 49.186.197.294       |                           | 232.014.897.746      |                  |
| 1       | Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota  | Persentase pelaksanaan program penunjang SKPD  | Persen | 100   | 36.668.308.903       | 100  | 38.501.724.348       | 100     | 39.656.776.079       | 100     | 40.846.479.361       | 100     | 42.071.873.742       | 100     | 43.334.029.954       | 100                       | 204.410.883.484      | Kecamatan        |
| 2       | Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik  | Persentase pelimpahan wewenang administrasi urusan pemerintahan yang dilaksanakan oleh camat         | Persen | 53,48   | -                    | 53,91  | 5.234.500            | 54,35   | 5.391.535            | 54,78   | 5.553.281            | 55,22   | 5.719.879            | 55,65   | 5.891.476            | 55,65                     | 27.790.671           | Kecamatan        |
| 3       | Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum   | Terlaksananya koordinasi dan pengawasan keamanan dan ketertiban umum di wilayah kecamatan            | persen | 100   | -                    | 100  | 2.508.645            | 100     | 2.583.904            | 100     | 2.661.421            | 100     | 2.741.264            | 100     | 2.823.502            | 100                       | 13.318.737           | Kecamatan        |
| 4       | Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum   | Persentase penyelenggaraan urusan pemerintahan   | persen | 100   | -                    | 100  | 31.456.380           | 100     | 32.400.071           | 100     | 33.372.074           | 100     | 34.373.236           | 100     | 35.404.433           | 100                       | 167.006.194          | Kecamatan        |
| 5       | Program Pembinaan Dan Pengawasan Pemerintahan Desa   | Persentase terlaksananya pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa                                  | persen | 100   | -                    | 100  | 37.600.000           | 100     | 40.000.000           | 100     | 41.200.000           | 100     | 42.436.000           | 100     | 43.709.080           | 100                       | 204.945.080          | Kecamatan        |
| 6       | Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan   | Persentase Pemberdayaan Masyarakat   | Persen | 57  | 4.877.657.531        | 59   | 5.121.540.408        | 62      | 5.275.186.620        | 66      | 5.433.442.218        | 69      | 5.596.445.485        | 72      | 5.764.338.849        | 72                        | 27.190.953.580       | Kelurahan        |
| 8       | UNSUR PEMERINTAHAN UMUM  |  |        |   | 5.578.799.579        |  | 5.857.739.558        |         | 6.033.471.745        |         | 6.214.475.897        |         | 6.400.910.174        |         | 6.592.937.479        |                           | 31.099.534.853       |                  |
| 8.01.01 | Badan Kesatuan Bangsa dan Politik  |  |        |   | 5.578.799.579        |  | 5.857.739.558        |         | 6.033.471.745        |         | 6.214.475.897        |         | 6.400.910.174        |         | 6.592.937.479        |                           | 31.099.534.853       |                  |
| 1       | Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota  | Persentase pelaksanaan program penunjang SKPD  | Persen | 100   | 3.379.789.479        | 100  | 3.548.778.953        | 100     | 3.655.242.322        | 100     | 3.764.899.591        | 100     | 3.877.846.579        | 100     | 3.994.181.976        | 100                       | 18.840.949.421       | Kesbangpol       |
| 2       | Program Penguatan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan   | Persentase Penduduk/Etnis/Suku/Agama/Ormas Yang Memahami Nilai-Nilai Kehidupan Politik dan Berbangsa | persen | 78,31   | 108.470.000          | 78,62  | 113.893.500          | 78,93   | 117.310.305          | 79,24   | 120.829.614          | 79,55   | 124.454.503          | 79,86   | 128.188.138          | 79,86                     | 604.676.059          | Kesbangpol       |
| 3       | Program Peningkatan Peran Partai Politik dan Lembaga Pendidikan Melalui Pendidikan Politik dan Pengembangan Etika Serta Budaya Politik | Persentase Partisipasi Politik Pemilih Pada Pemilihan Umum   | persen | 93,13   | 747.883.100          | 93,3   | 785.277.255          | 93,47   | 808.835.573          | 93,64   | 833.100.640          | 93,81   | 858.093.659          | 93,98   | 883.836.469          | 93,98                     | 4.169.143.595        | Kesbangpol       |
| 4       | Program Pemberdayaan Dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan  | Persentase pemberdayaan dan pengawasan organisasi kemasyarakatan kabupaten                           | persen | 100   | 207.356.000          | 100  | 217.723.800          | 100     | 224.255.514          | 100     | 230.983.179          | 100     | 237.912.675          | 100     | 245.050.055          | 100                       | 1.155.925.223        | Kesbangpol       |
| 5       | Program Pembinaan Dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial, Dan Budaya   | Persentase pembinaan ketahanan bidang politik, sosial dan budaya                                     | persen | 100   | 375.227.500          | 100  | 393.988.875          | 100     | 405.808.541          | 100     | 417.982.797          | 100     | 430.522.281          | 100     | 443.437.950          | 100                       | 2.091.740.445        | Kesbangpol       |
| 6       | Program Peningkatan Kewaspadaan Nasional dan Peningkatan Kualitas dan Fasilitasi Penanganan Konflik Sosial                             | Penanganan Potensi Konflik Tidak menjadi Konflik   | 100    | 100   | 760.073.500          | 100  | 798.077.175          | 100     | 822.019.490          | 100     | 846.680.075          | 100     | 872.080.477          | 100     | 898.242.892          | 100                       | 4.237.100.109        | Kesbangpol       |

# BAB VIII KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAH DAERAH



Indikator kinerja daerah disusun untuk memberi gambaran tentang ukuran keberhasilan pencapaian visi dan misi kepala daerah dan wakil kepala daerah yang ditetapkan menjadi Indikator Kinerja Utama (IKU) daerah dan indikator kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah. Indikator Kinerja Utama (IKU) merupakan indikator kinerja sasaran Visi Misi Bupati dan Wakil Bupati Konawe Utara. Indikator ini menjadi alat ukur untuk mengetahui ketercapaian visi dan misi RPJMD Tahun 2021-2026.

Selanjutnya indikator kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah dari setiap aspek, fokus menurut bidang urusan penyelenggaraan pemerintahan daerah sesuai dengan kewenangan. Indikator kinerja daerah secara teknis pada dasarnya dirumuskan dengan mengambil indikator dari Program Perangkat Daerah yang telah ditetapkan (outcome) atau kompositnya (impact). Suatu indikator kinerja daerah dapat dirumuskan berdasarkan hasil analisis pengaruh dari satu atau lebih indikator capaian kinerja program (outcome) terhadap tingkat capaian indikator kinerja daerah berkenaan setelah program dan kegiatan prioritas ditetapkan.

Indikator Kinerja Utama Kabupaten Konawe Utara disajikan pada tabel 8.1, sedangkan tabel Penetapan Indikator Kinerja Daerah Terhadap Capaian Kinerja Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan disajikan pada tabel 8.2.

**Tabel 8.1**  
**Penetapan Indikator Kinerja Utama Kabupaten Konawe Utara Tahun 2021 - 2026**

| Indikator Kinerja Utama   | Satuan   | Kondisi Kinerja Pada Awal RPJMD | Target Capaian Setiap Tahun |         |         |        |        |        | Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode |
|---|----------|---------------------------------|-----------------------------|---------|---------|--------|--------|--------|------------------------------------|
|   |          | 2020                            | 2021                        | 2022    | 2023    | 2024   | 2025   | 2026   | 2026                               |
| <b>Misi 1 : Meningkatkan Kualitas Dan Daya Saing Sumberdaya Manusia</b>               |          |                                 |                             |         |         |        |        |        |                                    |
| <i>Tujuan 1 : Meningkatkan kualitas sumberdaya manusia</i>                            |          |                                 |                             |         |         |        |        |        |                                    |
| 1. Indeks Pembangunan Manusia (IPM)   | Indeks   | 69,86                           | 70,266                      | 70,672  | 71,078  | 71,484 | 71,890 | 72,296 | 72,296                             |
| <i>Sasaran 1 : Meningkatnya akses pendidikan</i>                                      |          |                                 |                             |         |         |        |        |        |                                    |
| 2. Rata - Rata Lama Sekolah   | Tahun    | 9,21                            | 9,40                        | 9,60    | 9,79    | 9,99   | 10,18  | 10,37  | 10,37                              |
| 3. Harapan Lama Sekolah   | Tahun    | 12,83                           | 13,07                       | 13,30   | 13,54   | 13,77  | 14,01  | 14,25  | 14,25                              |
| <i>Sasaran 2 : Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat</i>                          |          |                                 |                             |         |         |        |        |        |                                    |
| 4. Angka Usia Harapan Hidup   | Tahun    | 69,51                           | 70,09                       | 70,67   | 71,26   | 71,84  | 72,42  | 73,00  | 73,00                              |
| <i>Sasaran 3 : Meningkatnya kualitas hidup perempuan dan pengarusutamaan hak anak</i> |          |                                 |                             |         |         |        |        |        |                                    |
| 5. Indeks Pembangunan Gender (IPG)  | Indeks   | 86,17                           | 86,41                       | 86,66   | 86,90   | 87,14  | 87,39  | 87,63  | 87,63                              |
| 6. Kota Layak Anak  | Kategori | Pratama                         | Pratama                     | Pratama | Pratama | Madya  | Madya  | Madya  | Madya                              |
| <i>Sasaran 4 : Meningkatnya Sumberdaya Manusia Yang Kompeten dan Produktif</i>        |          |                                 |                             |         |         |        |        |        |                                    |

| Indikator Kinerja Utama   | Satuan | Kondisi Kinerja Pada Awal RPJMD | Target Capaian Setiap Tahun |       |       |       |       |       | Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode |
|---|--------|---------------------------------|-----------------------------|-------|-------|-------|-------|-------|------------------------------------|
|   |        | 2020                            | 2021                        | 2022  | 2023  | 2024  | 2025  | 2026  | 2026                               |
| 7. Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja   | Persen | 74,45                           | 75,15                       | 75,84 | 76,54 | 77,24 | 77,93 | 78,63 | 78,63                              |
| <i>Sasaran 5 : Meningkatnya ketahanan pangan</i>  |        |                                 |                             |       |       |       |       |       |                                    |
| 8. Skor Pola Pangan Harapan   | Skor   | 79,60                           | 80,52                       | 81,53 | 82,56 | 83,56 | 84,58 | 85,58 | 85,58                              |
| <i>Sasaran 6 : Meningkatnya penanganan masalah kesejahteraan sosial</i>                               |        |                                 |                             |       |       |       |       |       |                                    |
| 9. Penurunan Persentase Warga Miskin (DTKS/Data Terpadu Kesejahteraan Sosial)                         | Persen | 13,53                           | 12,87                       | 12,21 | 11,55 | 10,23 | 9,57  | 9,57  | 9,57                               |
| <b>Misi 2 : Meningkatkan ketersediaan infrastruktur dasar dan sarana prasarana kawasan permukiman</b> |        |                                 |                             |       |       |       |       |       |                                    |
| <i>Tujuan 2 : Meningkatkan kualitas infrastruktur wilayah</i>   |        |                                 |                             |       |       |       |       |       |                                    |
| 10. Persentase Keterhubungan/Konektivitas Wilayah   | Persen | 85,15                           | 85,15                       | 85,15 | 85,15 | 85,15 | 85,15 | 85,15 | 85,15                              |
| <i>Sasaran 7 : Meningkatnya kapasitas infrastruktur wilayah</i>                                       |        |                                 |                             |       |       |       |       |       |                                    |
| 11. Proporsi Panjang Jalan dan Jembatan Dalam Kondisi Mantap  | Persen | 84,03                           | 84,81                       | 85,58 | 86,36 | 87,13 | 87,91 | 88,68 | 88,68                              |

| Indikator Kinerja Utama  | Satuan                 | Kondisi Kinerja Pada Awal RPJMD | Target Capaian Setiap Tahun |         |         |         |         |         | Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode |
|--|------------------------|---------------------------------|-----------------------------|---------|---------|---------|---------|---------|------------------------------------|
|  |                        | 2020                            | 2021                        | 2022    | 2023    | 2024    | 2025    | 2026    | 2026                               |
| 12. Persentase Daerah Irigasi (DI) Yang Terlayani Jaringan Irigasi   | Persen                 | 67,23                           | 67,79                       | 68,35   | 68,91   | 69,47   | 70,03   | 70,59   | 70,59                              |
| <i>Sasaran 8 : Terpenuhinya sarana parasarana kawasan permukiman</i>   |                        |                                 |                             |         |         |         |         |         |                                    |
| 13. Persentase kawasan permukiman (Perkotaan/Perdesaan) yang tidak kumuh   | Persen                 | 78,45                           | 81,58                       | 84,72   | 87,85   | 90,99   | 94,12   | 97,26   | 97,26                              |
| 14. Rasio Akses Air Minum Layak  | Persen                 | 48,33                           | 56,86                       | 56,86   | 56,86   | 56,86   | 56,86   | 68,79   | 68,79                              |
| 15. Rasio Akses Sanitasi Layak   | Persen                 | 36,31                           | 39,28                       | 39,28   | 39,28   | 39,28   | 39,28   | 39,28   | 39,28                              |
| 16. Cakupan layanan persampahan  | Persen                 | 15,38                           | 18,63                       | 21,88   | 25,13   | 28,38   | 31,63   | 34,88   | 34,88                              |
| <b>Misi 3 : Mewujudkan keadilan sosial dan nilai tambah dalam pengelolaan sumberdaya alam guna meningkatkan daya saing ekonomi</b> |                        |                                 |                             |         |         |         |         |         |                                    |
| <i>Tujuan 3 : Meningkatkan pertumbuhan dan daya saing ekonomi</i>  |                        |                                 |                             |         |         |         |         |         |                                    |
| 17. Pertumbuhan Ekonomi  | Persen                 | -0,72                           | 4,90                        | 5,24    | 5,58    | 5,91    | 6,25    | 6,59    | 6,59                               |
| 18. PDRB Perkapita   | Rp.<br>Juta/Jiwa/Tahun | 60,8470                         | 61,1776                     | 61,5082 | 61,8388 | 62,1694 | 62,5000 | 62,8306 | 62,8306                            |

| Indikator Kinerja Utama   | Satuan   | Kondisi Kinerja Pada Awal RPJMD | Target Capaian Setiap Tahun |         |         |         |         |         | Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode |
|---|----------|---------------------------------|-----------------------------|---------|---------|---------|---------|---------|------------------------------------|
|   |          | 2020                            | 2021                        | 2022    | 2023    | 2024    | 2025    | 2026    | 2026                               |
| 19. Tingkat Pengangguran Terbuka  | Persen   | 3,79                            | 3,75                        | 3,70    | 3,66    | 3,62    | 3,58    | 3,53    | 3,53                               |
| 20. Indeks Gini   | Indeks   | 0,388                           | 0,384                       | 0,380   | 0,376   | 0,372   | 0,368   | 0,364   | 0,364                              |
| 21. Tingkat Kemiskinan  | Persen   | 13,53                           | 13,40                       | 13,27   | 13,14   | 13,01   | 12,88   | 12,75   | 12,75                              |
| <i>Sasaran 9 : Meningkatnya pertumbuhan sektor - sektor unggulan daerah</i> |          |                                 |                             |         |         |         |         |         |                                    |
| 22. Pertumbuhan PDRB Sektor Pertanian, Kehutanan dan Perikanan              | Persen   | 39,75                           | 39,89                       | 40,03   | 40,16   | 40,30   | 40,44   | 40,58   | 40,58                              |
| 23. Pertumbuhan PDRB Sektor Pertambangan dan Pengalihan                     | Persen   | 21,24                           | 21,29                       | 21,34   | 21,39   | 21,44   | 21,49   | 21,54   | 21,54                              |
| 24. Pertumbuhan PDRB Sektor Perdagangan                                     | Persen   | 11,78                           | 11,80                       | 11,82   | 11,85   | 11,87   | 11,89   | 11,91   | 11,91                              |
| 25. Pertumbuhan PDRB Sektor Industri Pengolahan                             | Persen   | 1,13                            | 1,14                        | 1,15    | 1,15    | 1,16    | 1,17    | 1,18    | 1,18                               |
| 26. Persentase PAD Sektor Pariwisata  | Persen   | 0,03                            | 0,04                        | 0,05    | 0,06    | 0,07    | 0,08    | 0,09    | 0,09                               |
| 27. Nilai Omset Usaha Koperasi  | Rp. ribu | 705.375                         | 741.587                     | 777.799 | 814.011 | 850.223 | 886.435 | 922.647 | 922.647                            |

| Indikator Kinerja Utama  | Satuan   | Kondisi Kinerja Pada Awal RPJMD | Target Capaian Setiap Tahun |       |       |       |       |       | Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode |
|--|----------|---------------------------------|-----------------------------|-------|-------|-------|-------|-------|------------------------------------|
|  |          | 2020                            | 2021                        | 2022  | 2023  | 2024  | 2025  | 2026  | 2026                               |
| <i>Sasaran 10 : Meningkatnya investasi daerah</i>  |          |                                 |                             |       |       |       |       |       |                                    |
| 28. Pertumbuhan Investasi PMDN dan PMA   | Persen   | 11,86                           | 13,49                       | 15,12 | 16,74 | 18,37 | 20,00 | 21,63 | 21,63                              |
| <b>Misi 4 : Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang akuntabel, mendorong reformasi birokrasi, dan pelayanan publik yang prima</b> |          |                                 |                             |       |       |       |       |       |                                    |
| <i>Tujuan 4 : Meningkatkan kualitas tata kelola pemerintahan yang efektif dan efisien</i>  |          |                                 |                             |       |       |       |       |       |                                    |
| 29. Indeks Reformasi Birokrasi   | Indeks   | 50,08                           | 50,24                       | 50,40 | 50,57 | 50,73 | 50,89 | 51,05 | 51,05                              |
| <i>Sasaran 11 : Meningkatnya akuntabilitas kinerja pemerintahan dan pengelolaan keuangan daerah</i>                                |          |                                 |                             |       |       |       |       |       |                                    |
| 30. Nilai SAKIP  | Kategori | B                               | B                           | BB    | BB    | BB    | BB    | BB    | BB                                 |
| 31. Opini BPK  | Kategori | WTP                             | WTP                         | WTP   | WTP   | WTP   | WTP   | WTP   | WTP                                |
| <i>Sasaran 12 : Terwujudnya birokrasi yang kapabel, optimalnya implementasi SPBE, serta pelayanan publik yang terpercaya</i>       |          |                                 |                             |       |       |       |       |       |                                    |
| 32. Indeks Maturitas Kelembagaan   | Level    | 1                               | 1                           | 2     | 3     | 3     | 3     | 3     | 3                                  |
| 33. Indeks SPBE (Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE))   | Indeks   | 1,3                             | 1,38                        | 1,46  | 1,54  | 1,62  | 1,70  | 1,78  | 1,78                               |
| 34. Indeks Kepuasan Masyarakat   | Indeks   | 3,34                            | 3,41                        | 3,48  | 3,55  | 3,62  | 3,69  | 3,76  | 3,76                               |
| <i>Sasaran 13 : Meningkatnya kualitas manajemen ASN</i>  |          |                                 |                             |       |       |       |       |       |                                    |

| Indikator Kinerja Utama  | Satuan | Kondisi Kinerja Pada Awal RPJMD | Target Capaian Setiap Tahun |        |        |        |        |        | Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode |
|--|--------|---------------------------------|-----------------------------|--------|--------|--------|--------|--------|------------------------------------|
|  |        | 2020                            | 2021                        | 2022   | 2023   | 2024   | 2025   | 2026   | 2026                               |
| 35. Indeks Merit System  | Indeks | 162                             | 177                         | 192    | 207    | 222    | 237    | 252    | 252                                |
| <i>Sasaran 14 : Meningkatnya kapasitas pemerintahan desa</i>   |        |                                 |                             |        |        |        |        |        |                                    |
| 36. Indeks Desa Membangun  | Indeks | 0,5855                          | 0,5946                      | 0,6037 | 0,6128 | 0,6218 | 0,6309 | 0,6400 | 0,6400                             |
| <b>Misi 5 : Meningkatkan kualitas lingkungan hidup dan ketahanan bencana</b>                                   |        |                                 |                             |        |        |        |        |        |                                    |
| <i>Tujuan 5 : Meningkatkan kualitas lingkungan hidup</i>   |        |                                 |                             |        |        |        |        |        |                                    |
| 37. Indeks Kualitas Lingkungan Hidup   | Indeks | 58,84                           | 59,67                       | 60,50  | 61,33  | 62,16  | 62,99  | 63,82  | 63,82                              |
| <i>Sasaran 15 : Terjaganya kualitas pemanfaatan dan pengendalian pemanfaatan ruang</i>                         |        |                                 |                             |        |        |        |        |        |                                    |
| 38. Persentase Ketaatan terhadap Perencanaan Tata Ruang  | Persen | 80                              | 80,49                       | 80,98  | 81,47  | 81,96  | 82,45  | 82,94  | 82,94                              |
| <i>Sasaran 16 : Menurunnya tingkat pencemaran air dan udara</i>  |        |                                 |                             |        |        |        |        |        |                                    |
| 39. Indeks Kualitas Air dan Udara  | Indeks | 92,58                           | 93,32                       | 94,06  | 94,80  | 95,54  | 96,28  | 97,02  | 97,02                              |
| <i>Sasaran 17 : Terwujudnya tata kelola dan manajemen bencana</i>  |        |                                 |                             |        |        |        |        |        |                                    |
| 40. Indeks Resiko Bencana  | Indeks | 172,4                           | 170,71                      | 169,02 | 167,33 | 165,64 | 163,95 | 162,26 | 162,26                             |
| <b>Misi 6 : Membangun peradaban masyarakat yang bertumpu pada nilai - nilai keagamaan dan kebudayaan lokal</b> |        |                                 |                             |        |        |        |        |        |                                    |

| Indikator Kinerja Utama  | Satuan | Kondisi Kinerja Pada Awal RPJMD | Target Capaian Setiap Tahun |       |       |       |       |       | Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode |
|--|--------|---------------------------------|-----------------------------|-------|-------|-------|-------|-------|------------------------------------|
|  |        | 2020                            | 2021                        | 2022  | 2023  | 2024  | 2025  | 2026  | 2026                               |
| <i>Tujuan 6 : Melestarikan seni budaya lokal</i>                                   |        |                                 |                             |       |       |       |       |       |                                    |
| 41. Persentase kapasitas lembaga adat yang dibina                                  | Persen | 100                             | 100                         | 100   | 100   | 100   | 100   | 100   | 100                                |
| <i>Sasaran 18 : Meningkatnya intensitas event seni budaya yang diselenggarakan</i> |        |                                 |                             |       |       |       |       |       |                                    |
| 42. Jumlah penyelenggaraan event seni budaya                                       | Event  | 0                               | 1                           | 2     | 3     | 4     | 5     | 5     | 5                                  |
| <i>Sasaran 18 : Meningkatnya intensitas event seni budaya yang diselenggarakan</i> |        |                                 |                             |       |       |       |       |       |                                    |
| 43. Indeks kerukunan beragama  | Indeks | 73,92                           | 74,29                       | 74,66 | 75,03 | 75,40 | 75,77 | 76,14 | 76,14                              |
| <i>Sasaran 19 : Meningkatnya pengelolaan potensi konflik sosial</i>                |        |                                 |                             |       |       |       |       |       |                                    |
| 44. Persentase Pengelolaan Potensi Konflik Sosial                                  | Persen | 100                             | 100                         | 100   | 100   | 100   | 100   | 100   | 100                                |

**Tabel 8.2**  
**Penetapan Indikator Kinerja Daerah Terhadap Capaian Kinerja Penyelenggaraan Urusan Pemerintah Kabupaten Konawe Utara Tahun 2021 – 2026**

| No.      | Aspek/Fokus/Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan daerah                   | Satuan                    | Kondisi Kinerja Pada Awal RPJMD<br>2020 | Target Capaian Setiap Tahun |           |           |           |           |           | Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode<br>2026 |
|----------|--|---------------------------|---|-----------------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|--|
|          |  |                           |   | 2021                        | 2022      | 2023      | 2024      | 2025      | 2026      |  |
| <b>A</b> | <b>ASPEK KESEJAHTERAAN MASYARAKAT</b>  |                           |   |                             |           |           |           |           |           |  |
|          | <b>Fokus Kesejahteraan dan Pemerataan Ekonomi</b>                                |                           |   |                             |           |           |           |           |           |  |
| 1        | Laju Pertumbuhan Penduduk  | %                         | 6,36                                    | 6,71                        | 7,06      | 7,41      | 7,76      | 8,11      | 8,46      | 8,46                                       |
| 2        | Laju Pertumbuhan Ekonomi   | %                         | -0,72                                   | 4,9                         | 5,238     | 5,576     | 5,914     | 6,252     | 6,59      | 6,59                                       |
| 3        | Laju inflasi   | %                         | 1,37                                    | 1,84                        | 2,31      | 2,78      | 3,25      | 3,72      | 4,19      | 4,19                                       |
| 4        | Indeks Gini  | Nilai                     | 0,388                                   | 0,384                       | 0,380     | 0,376     | 0,372     | 0,368     | 0,364     | 0,364                                      |
| 5        | Kontribusi lapangan usaha yang terkait dengan perdagangan dan jasa terhadap PDRB | %                         | 17,46                                   | 18,73                       | 20,00     | 21,27     | 22,54     | 23,81     | 25,08     | 25,08                                      |
| 6        | Nilai Tukar Petani   | nilai                     | 96,33                                   | 96,58                       | 96,83     | 97,08     | 97,33     | 97,58     | 97,82     | 97,82                                      |
| 7        | Nilai Tukar Nelayan  | nilai                     | 106,12                                  | 106,28                      | 106,43    | 106,59    | 106,75    | 106,91    | 107,06    | 107,06                                     |
|          | <b>Fokus Kesejahteraan Sosial</b>  |                           |   |                             |           |           |           |           |           |  |
| 1        | Indeks Pembangunan Manusia   | Nilai                     | 69,86                                   | 70,27                       | 70,67     | 71,08     | 71,48     | 71,89     | 72,30     | 72,30                                      |
| 2        | Pengeluaran per Kapita disesuaikan   | Rp<br>Juta/jiwa/<br>tahun | 60.847,00                               | 60.847,33                   | 60.847,66 | 60.847,99 | 60.848,32 | 60.848,65 | 60.848,98 | 60.848,98                                  |
| 3        | Angka Harapan Hidup (AHH)  | Tahun                     | 69,51                                   | 70,09                       | 70,67     | 71,26     | 71,84     | 72,42     | 73,00     | 73,00                                      |
| 4        | Rata-rata Lama Sekolah (RLS)   | Tahun                     | 9,21                                    | 9,40                        | 9,60      | 9,79      | 9,99      | 10,18     | 10,37     | 10,37                                      |

| No.   | Aspek/Fokus/Bidang<br>Urusan/Indikator Kinerja<br>Pembangunan daerah | Satuan | Kondisi<br>Kinerja<br>Pada Awal<br>RPJMD | Target Capaian Setiap Tahun |        |        |        |        |        | Kondisi<br>Kinerja<br>Pada Akhir<br>Periode |
|---|--|--------|--|-----------------------------|--------|--------|--------|--------|--------|---|
|   |  |        |  | 2020                        | 2021   | 2022   | 2023   | 2024   | 2025   |   |
| 5   | Harapan Lama Sekolah (HLS)   | Tahun  | 12,83                                    | 13,07                       | 13,30  | 13,54  | 13,77  | 14,01  | 14,25  | 14,25                                       |
| 6   | Angka Kemiskinan   | %      | 13,53                                    | 13,4                        | 13,27  | 13,14  | 13,01  | 12,88  | 12,75  | 12,75                                       |
| 7   | Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)                                   | %      | 3,79                                     | 3,75                        | 3,70   | 3,66   | 3,62   | 3,58   | 3,53   | 3,53  |
| 8   | Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK)                            | %      | 74,45                                    | 75,17                       | 75,89  | 76,61  | 77,33  | 78,06  | 78,78  | 78,78                                       |
| 9   | Opini BPK  | Opini  | WTP                                      | WTP                         | WTP    | WTP    | WTP    | WTP    | WTP    | WTP   |
| 10  | Penduduk yang berusia >15 tahun melek huruf (tidak buta aksara)      | %      | 96,78                                    | 97,02                       | 97,26  | 97,50  | 97,73  | 97,97  | 98,21  | 98,21                                       |
| <b>Fokus Seni Budaya dan Olahraga</b>                                     |  |        |  |                             |        |        |        |        |        |   |
| 1   | Penyelenggaraan Festival seni dan budaya                             | event  | 0  | 1                           | 1      | 1      | 1      | 1      | 1      | 1   |
| <b>B ASPEK LAYANAN UMUM</b>   |  |        |  |                             |        |        |        |        |        |   |
| <b>1. Urusan Pemerintahan Wajib Yang Berkaitan Dengan Pelayanan Dasar</b> |  |        |  |                             |        |        |        |        |        |   |
| <b>1.01 Urusan Pendidikan</b>   |  |        |  |                             |        |        |        |        |        |   |
|   | Angka Melek Huruf  | %      | 98                                       | 98,18                       | 98,36  | 98,54  | 98,71  | 98,89  | 99,07  | 99,07                                       |
|   | Angka Partisipasi Kasar  |        |  |                             |        |        |        |        |        |   |
| 1   | PAUD (3-6 tahun)   | %      | 63,75                                    | 65,72                       | 67,69  | 69,66  | 71,62  | 73,59  | 75,56  | 75,56                                       |
| 2   | SD/MI  | %      | 107,97                                   | 108,32                      | 108,67 | 109,02 | 109,37 | 109,72 | 110,07 | 110,07                                      |
| 3   | SLTP/MTs   | %      | 87,74                                    | 88,6                        | 89,46  | 90,32  | 91,18  | 92,04  | 92,90  | 92,90                                       |
|   | Angka Partisipasi Murni  |        |  |                             |        |        |        |        |        |   |
| 1   | SD/MI  | %      | 97,70                                    | 97,87                       | 98,04  | 98,21  | 98,38  | 98,55  | 98,72  | 98,72                                       |

| No.                              | Aspek/Fokus/Bidang<br>Urusan/Indikator Kinerja<br>Pembangunan daerah | Satuan | Kondisi<br>Kinerja<br>Pada Awal<br>RPJMD | Target Capaian Setiap Tahun |       |       |       |       |       | Kondisi<br>Kinerja<br>Pada Akhir<br>Periode |
|----------------------------------|--|--------|--|-----------------------------|-------|-------|-------|-------|-------|---|
|                                  |  |        |  | 2021                        | 2022  | 2023  | 2024  | 2025  | 2026  |   |
| 2                                | SLTP/MTs   | %      | 77,64                                    | 78,96                       | 80,28 | 81,6  | 82,92 | 84,24 | 85,56 | 85,56                                       |
| Angka Kelulusan                  |  |        |  |                             |       |       |       |       |       |   |
| 1                                | Angka Kelulusan SD/MI  | %      | 100                                      | 100                         | 100   | 100   | 100   | 100   | 100   | 100   |
| 2                                | Angka Kelulusan SMP/MTs  | %      | 100                                      | 100                         | 100   | 100   | 100   | 100   | 100   | 100   |
| Angka Partisipasi Sekolah :      |  |        |  |                             |       |       |       |       |       |   |
| 1                                | Angka Partisipasi dari SD/MI ke<br>SMP/MTs                           | %      | 96,38                                    | 96,77                       | 97,16 | 97,55 | 97,94 | 98,33 | 98,72 | 98,72                                       |
| 2                                | Angka Partisipasi dari SMP/MTs ke<br>SMA/MA                          | %      | 84,41                                    | 84,59                       | 84,77 | 84,95 | 85,13 | 85,31 | 85,49 | 85,49                                       |
| Tenaga Pendidik dan Kependidikan |  |        |  |                             |       |       |       |       |       |   |
| 1                                | Rasio murid/guru (SD)  | rasio  | 10,66                                    | 10,96                       | 11,26 | 11,57 | 11,87 | 12,17 | 12,47 | 12,47                                       |
| 2                                | Rasio murid/guru (SMP)   | rasio  | 12,25                                    | 12,67                       | 13,09 | 13,51 | 13,93 | 14,35 | 14,77 | 14,77                                       |
| Jumlah Guru Yang Bersertifikat   |  |        |  |                             |       |       |       |       |       |   |
| 1                                | SD/MI  | %      | 30,64                                    | 31,10                       | 31,55 | 32,01 | 32,46 | 32,92 | 33,38 | 33,38                                       |
| 2                                | SLTP/MTs   | %      | 30,20                                    | 30,52                       | 30,83 | 31,15 | 31,46 | 31,78 | 32,10 | 32,10                                       |
| <b>1.02 Urusan Kesehatan</b>     |  |        |  |                             |       |       |       |       |       |   |
| 1                                | Angka Kematian Bayi / 1000 kelahiran<br>hidup                        | rasio  | 2,08                                     | 1,87                        | 1,64  | 1,41  | 1,18  | 0,95  | 0,72  | 0,72  |
| 2                                | Angka Kematian Ibu / 100.000<br>kelahiran hidup                      | rasio  | 138,79                                   | 137                         | 135   | 133   | 131   | 129   | 127   | 1,00  |
| 3                                | Rasio Puskesmas per satuan penduduk<br>x 1000                        | rasio  | 0,32                                     | 0,32                        | 0,32  | 0,32  | 0,32  | 0,32  | 0,32  | 0,32  |
| 4                                | Tingkat Penggunaan Tempat Tidur                                      | %      |  | 20                          | 35    | 60    | 75    | 80    | 85    | 85  |

| No.  | Aspek/Fokus/Bidang<br>Urusan/Indikator Kinerja<br>Pembangunan daerah | Satuan | Kondisi<br>Kinerja<br>Pada Awal<br>RPJMD | Target Capaian Setiap Tahun |          |          |          |          |          | Kondisi<br>Kinerja<br>Pada Akhir<br>Periode |
|--|--|--------|--|-----------------------------|----------|----------|----------|----------|----------|---|
|  |  |        |  | 2021                        | 2022     | 2023     | 2024     | 2025     | 2026     |   |
| 5  | Rasio dokter / 100.000 penduduk                                      | rasio  | 27,99                                    | 49,71                       | 52,30    | 56,24    | 60,16    | 64,05    | 67,92    | 67,92                                       |
| 6  | Rasio bidan / 100.000 penduduk                                       | rasio  | 215,11                                   | 216,78                      | 222,95   | 229,08   | 235,17   | 241,23   | 247,24   | 247,24                                      |
| 7  | Rasio perawat / 100.000 penduduk                                     | rasio  | 109,03                                   | 129,79                      | 141,75   | 153,64   | 165,44   | 177,17   | 188,83   | 188,83                                      |
| 8  | Prevalensi Balita Gizi Buruk   | %      | 0,3                                      | 0,3                         | 0,3      | 0,2      | 0,2      | 0,1      | 0        | 0   |
| 9  | Prevalensi kasus Stunting  | %      | 11,2                                     | 11                          | 10,8     | 10,6     | 10,4     | 10,2     | 10       | 10  |
| 10   | Prevalensi Tuberkulosis (TB) /100.000 penduduk                       | rasio  | 143                                      | 140                         | 137      | 134      | 131      | 128      | 125      | 125   |
| <b>1.03 Urusan Pekerjaan Umum &amp; Penataan Ruang</b>       |  |        |  |                             |          |          |          |          |          |   |
| 1  | Panjang jalan dalam kondisi mantap                                   | Km     | 588,16                                   | 593,59                      | 599,02   | 604,45   | 609,88   | 615,31   | 620,74   | 620,74                                      |
| 2  | Luas Daerah Irigasi Dalam Kondisi Baik                               | Ha     | 2.650,00                                 | 2.671,60                    | 2.693,67 | 2.715,74 | 2.737,81 | 2.759,88 | 2.781,95 | 2.781,95                                    |
| 3  | Rumah Tangga Pengguna Air Bersih Perpipaan                           | Unit   | 18.812                                   | 18.853                      | 18.894   | 18.935   | 18.976   | 19.017   | 19.058   | 19.058                                      |
| 4  | Penduduk Berakses Sanitasi Yang Layak                                | Unit   | 8.563                                    | 8.813                       | 9.063    | 9.313    | 9.563    | 9.813    | 10.063   | 10.063                                      |
| 5  | Persentase Ketaatan terhadap Rencana Tata Ruang Wilayah              | %      | 80,00                                    | 80,49                       | 80,98    | 81,47    | 81,96    | 82,45    | 82,94    | 82,94                                       |
| <b>1.04 Urusan Perumahan Rakyat &amp; Kawasan Permukiman</b> |  |        |  |                             |          |          |          |          |          |   |
| 1  | Luas Kawasan Permukiman Kumuh Yang ditangani                         | Ha     | 76,83                                    | 76,83                       | 76,83    | 76,83    | 76,83    | 76,83    | 76,83    | 76,83                                       |
| 2  | Jumlah rumah layak huni  | Unit   | 12.766                                   | 12.816                      | 12.896   | 12.996   | 13.096   | 13.196   | 13.296   | 13.296                                      |

| No.   | Aspek/Fokus/Bidang<br>Urusan/Indikator Kinerja<br>Pembangunan daerah               | Satuan | Kondisi<br>Kinerja<br>Pada Awal<br>RPJMD<br>2020 | Target Capaian Setiap Tahun |       |       |       |       |       | Kondisi<br>Kinerja<br>Pada Akhir<br>Periode<br>2026 |
|---|--|--------|--|-----------------------------|-------|-------|-------|-------|-------|---|
|   |  |        |  | 2021                        | 2022  | 2023  | 2024  | 2025  | 2026  |   |
| <b>1.05 Urusan Ketentraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat</b>    |  |        |  |                             |       |       |       |       |       |   |
| 1   | Tingkat Waktu Tanggap (Respon time rate) daerah WMK                                | %      | 66,00  | 67,3                        | 68,6  | 69,9  | 71,2  | 72,5  | 73,8  | 73,8  |
| 2   | Angka Kriminalitas   | kasus  | 34   | 30                          | 26    | 23    | 20    | 18    | 17    | 17  |
| 3   | Jumlah Desa Tangguh Bencana  | %      | 1  | 15                          | 25    | 30    | 35    | 40    | 47    | 47  |
| <b>1.06 Urusan Sosial</b>   |  |        |  |                             |       |       |       |       |       |   |
| 1   | Persentase PPKS yang memperoleh bantuan sosial                                     | %      | 27,32  | 27,48                       | 29,18 | 31,89 | 36,01 | 41,84 | 48,06 | 48,06   |
| 2   | Persentase Korban Bencana Yang Menerima Bantuan Sosial Selama Masa Tanggap Darurat | %      | 100  | 100                         | 100   | 100   | 100   | 100   | 100   | 100   |
| <b>2. Urusan Pemerintahan Wajib Yang Tidak Berkaitan Dengan Pelayanan Dasar</b> |  |        |  |                             |       |       |       |       |       |   |
| <b>2.01 Urusan Tenaga Kerja</b>   |  |        |  |                             |       |       |       |       |       |   |
| 1   | Besaran Pencari Kerja Yang ditempatkan   | Orang  | 306  | 321                         | 349   | 351   | 367   | 397   | 403   | 403   |
| 2   | Jumlah Tenaga Kerja yang mendapat Pelatihan berbasis Kompetensi                    | Orang  | 70   | 70                          | 75    | 77    | 80    | 83    | 85    | 85  |

| No.   | Aspek/Fokus/Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan daerah | Satuan          | Kondisi Kinerja Pada Awal RPJMD | Target Capaian Setiap Tahun |        |        |        |        |        | Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode |
|---|--|-----------------|---------------------------------|-----------------------------|--------|--------|--------|--------|--------|------------------------------------|
|   |  |                 | 2020                            | 2021                        | 2022   | 2023   | 2024   | 2025   | 2026   | 2026                               |
| 3   | Jumlah Penyelesaian Kasus Hubungan Industrial                  | Kasus           | 0                               | 0                           | 1      | 1      | 1      | 1      | 1      | 1                                  |
| <b>2.02 Urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak</b> |  |                 |                                 |                             |        |        |        |        |        |                                    |
| 1   | Persentase Perempuan yang menduduki jabatan publik             | %               | 7,69                            | 7,69                        | 7,87   | 7,96   | 8,05   | 8,14   | 8,23   | 8,23                               |
| 2   | Jumlah Korban Kekerasan Perempuan yang ditindak lanjuti        | Orang           | 3                               | 3                           | 2      | 2      | 1      | 1      | 1      | 1,00                               |
| 3   | Jumlah Korban Kekerasan Anak yang ditindak lanjuti             | Orang           | 3                               | 3                           | 2      | 2      | 1      | 1      | 1      | 1,00                               |
| <b>2.03 Urusan Pangan</b>                                       |  |                 |                                 |                             |        |        |        |        |        |                                    |
| 1   | Ketersediaan Energi dan Protein Perkapita                      | Kkl/Kapita/Hari | 2.699                           | 2.753                       | 2.811  | 2.870  | 2.928  | 2.986  | 3.046  | 3.046                              |
|   |  | Gr/Kapita/Hari  | 70,86                           | 72,27                       | 73,79  | 75,34  | 76,85  | 78,39  | 79,95  | 79,95                              |
| 2   | Tingkat Penguatan Cadangan Pangan                              | %               | 100,00                          | 100                         | 100    | 100    | 100    | 100    | 100    | 100                                |
| <b>2.04 Urusan Pertanian</b>                                    |  |                 |                                 |                             |        |        |        |        |        |                                    |
| 1   | Persentase Penatagunaan Tanah untuk Wilayah Kabupaten          | %               | 100,00                          | 100,00                      | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00                             |
| <b>2.05 Urusan Lingkungan Hidup</b>                             |  |                 |                                 |                             |        |        |        |        |        |                                    |

| No.         | Aspek/Fokus/Bidang<br>Urusan/Indikator Kinerja<br>Pembangunan daerah | Satuan | Kondisi<br>Kinerja<br>Pada Awal<br>RPJMD | Target Capaian Setiap Tahun |       |       |       |       |       | Kondisi<br>Kinerja<br>Pada Akhir<br>Periode |
|-------------|--|--------|--|-----------------------------|-------|-------|-------|-------|-------|---|
|             |  |        |  | 2020                        | 2021  | 2022  | 2023  | 2024  | 2025  |   |
| 1           | Kualitas Air (penetapan kelas air)                                   | nilai  | 1,58                                     | 1,76                        | 1,94  | 2,12  | 2,30  | 2,48  | 2,66  | 2,66  |
| 2           | Kualitas Udara (penetapan kelas udara)                               | nilai  | 91,09                                    | 91,09                       | 91,19 | 91,38 | 91,57 | 91,76 | 91,95 | 91,95                                       |
| 3           | Kualitas Tutupan Lahan   | %      | 77,68                                    | 77,68                       | 77,86 | 77,95 | 78,04 | 78,13 | 78,22 | 78,22                                       |
| 4           | Persentase Usaha yang memilah B3 dan Limbah B3                       | %      | 65                                       | 65                          | 68    | 70    | 75    | 78    | 80    | 80  |
| 5           | Cakupan Wilayah Pelayanan Persampahan                                | %      | 15,38                                    | 15,38                       | 15,38 | 15,38 | 15,38 | 15,38 | 15,38 | 15,38                                       |
| <b>2.06</b> | <b>Urusan Administrasi Kependudukan dan Catatan Sipil</b>            |        |  |                             |       |       |       |       |       |   |
| 1           | Kepemilikan dokumen kependudukan Berbasis Elektronik                 | %      | 100                                      | 100                         | 100   | 100   | 100   | 100   | 100   | 100   |
| 2           | Persentase Kepemilikan dokumen Pencatatan Sipil Berbasis Elektronik  | %      | 83,88                                    | 95                          | 95    | 100   | 100   | 100   | 100   | 100   |
| 3           | OPD Yang Memanfaatkan Data Kependudukan                              | OPD    | 4  | 4                           | 7     | 8     | 9     | 10    | 11    | 11  |
| <b>2.07</b> | <b>Urusan Pemberdayaan Masyarakat Desa</b>                           |        |  |                             |       |       |       |       |       |   |
| 1           | Jumlah Desa Berkembang   | Desa   | 68                                       | 71                          | 73    | 75    | 77    | 79    | 80    | 80  |
| 2           | Persentase 1(satu) BUMDes dalam 1(satu) Desa Yang Aktif              | %      | 100                                      | 100                         | 100   | 100   | 100   | 100   | 100   | 100   |
| 3           | Persentase Penyampaian RKPDes, APBDes, dan Laporan Keuangan Desa     | %      | 81,76                                    | 82,32                       | 82,88 | 83,45 | 84,01 | 84,57 | 85,13 | 85,13                                       |

| No.         | Aspek/Fokus/Bidang<br>Urusan/Indikator Kinerja<br>Pembangunan daerah  | Satuan   | Kondisi<br>Kinerja<br>Pada Awal<br>RPJMD<br>2020 | Target Capaian Setiap Tahun |        |        |        |        |        | Kondisi<br>Kinerja<br>Pada Akhir<br>Periode<br>2026 |
|-------------|---|----------|--|-----------------------------|--------|--------|--------|--------|--------|---|
|             |   |          |  | 2021                        | 2022   | 2023   | 2024   | 2025   | 2026   |   |
|             | Tepat Waktu dan Sesuai Peraturan Bupati   |          |  |                             |        |        |        |        |        |   |
| <b>2.08</b> | <b>Urusan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana</b>  |          |  |                             |        |        |        |        |        |   |
| 1           | Jumlah Peserta KB Aktif   | Orang    | 11.786   | 11.813                      | 11.871 | 11.923 | 11.957 | 11.973 | 12.051 | 12.051  |
| 2           | Persentase Keluarga Sejahtera   | %        | 81,58  | 81,70                       | 81,82  | 81,94  | 82,06  | 82,18  | 82,30  | 82,30   |
| 3           | Cakupan PUS Unmeetneed  | %        | 0,09   | 0,09                        | 0,13   | 0,07   | 0,05   | 0,03   | 0,01   | 0,01  |
| <b>2.09</b> | <b>Urusan Perhubungan</b>   |          |  |                             |        |        |        |        |        |   |
| 1           | Persentase Ketersediaan Fasilitas Perlengkapan Jalan (Rambu, Marka, APIL, Guadrail, Delinator, dll) yang berfungsi baik | %        | 30,00  | 32,19                       | 34,39  | 36,58  | 38,78  | 40,97  | 43,16  | 43,16   |
| 2           | Persentase Penurunan Angka Kecelakaan Lalu Lintas   | %        | 85,00  | 85,87                       | 86,75  | 87,62  | 88,50  | 89,37  | 90,24  | 90,24   |
| <b>2.10</b> | <b>Urusan Komunikasi dan Informatika</b>  |          |  |                             |        |        |        |        |        |   |
| 1           | Jumlah Penerapan SPBE   | aplikasi | 1  | 1                           | 3      | 3      | 5      | 5      | 7      | 7   |
| 2           | Persentase Pengelolaan Layanan Pengaduan Berbasis Online Yang didistribusikan ke OPD                                    | %        | 0  | 0                           | 25     | 45     | 69     | 75     | 80     | 80  |

| No.   | Aspek/Fokus/Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan daerah             | Satuan      | Kondisi Kinerja Pada Awal RPJMD<br>2020 | Target Capaian Setiap Tahun |        |        |        |        |        | Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode<br>2026 |
|---|--|-------------|---|-----------------------------|--------|--------|--------|--------|--------|--|
|   |  |             |   | 2021                        | 2022   | 2023   | 2024   | 2025   | 2026   |  |
| <b>2.11 Urusan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah</b> |  |             |   |                             |        |        |        |        |        |  |
| 1   | Persentase koperasi aktif  | %           | 76,01                                   | 76,01                       | 76,35  | 77,03  | 77,70  | 79,39  | 81,08  | 81,08                                      |
| 2   | Jumlah UMKM yang dibina  | %           | 0                                       | 0                           | 50     | 50     | 50     | 50     | 50     | 50   |
| <b>2.12 Urusan Penanaman Modal</b>                    |  |             |   |                             |        |        |        |        |        |  |
| 1   | Lama Proses Perizinan  | Hari        | 2                                       | 2                           | 2      | 2      | 2      | 2      | 2      | 2  |
| 2   | Jumlah nilai investasi PMA/PMDN  | Rp (milyar) | 163,88                                  | 180,99                      | 198,10 | 215,21 | 232,32 | 249,43 | 266,54 | 266,54                                     |
| 3   | Survey Kepuasan Masyarakat   | %           | 76,61                                   | 77,24                       | 77,78  | 78,45  | 79,21  | 79,86  | 80,36  | 80,36                                      |
| <b>2.13 Urusan Kebudayaan</b>                         |  |             |   |                             |        |        |        |        |        |  |
| 1   | Persentase Kesenian dan Budaya Lokal yang dilestarikan                     | Persen      | 57                                      | 59                          | 63     | 65     | 67     | 75     | 75     | 75   |
| 2   | Jumlah Lembaga adat Yang dibina  | lembaga     | 8                                       | 8                           | 8      | 8      | 8      | 8      | 8      | 8  |
| 3   | Persentase pengembangan kurikulum muatan lokal penunjang proses pendidikan | %           | 0                                       | 70                          | 72     | 74     | 78     | 80     | 82     | 82   |
| <b>2.14 Urusan Perpustakaan</b>                       |  |             |   |                             |        |        |        |        |        |  |
| 1   | Pertumbuhan Pengunjung Perpustakaan Daerah                                 | %           | 30,00                                   | 51,00                       | 72,00  | 93,00  | 114,00 | 135,00 | 156,00 | 52,55                                      |

| No.   | Aspek/Fokus/Bidang<br>Urusan/Indikator Kinerja<br>Pembangunan daerah | Satuan     | Kondisi<br>Kinerja<br>Pada Awal<br>RPJMD<br>2020 | Target Capaian Setiap Tahun |          |          |          |          |          | Kondisi<br>Kinerja<br>Pada Akhir<br>Periode<br>2026 |
|---|--|------------|--|-----------------------------|----------|----------|----------|----------|----------|---|
|   |  |            |  | 2021                        | 2022     | 2023     | 2024     | 2025     | 2026     |   |
| <b>2.15 Urusan Kearsipan</b>                |  |            |  |                             |          |          |          |          |          |   |
| 1   | Persentase Arsip Statis dan Dinamis Yang Diarsipkan                  | %          | 32,50  | 35,57                       | 38,64    | 41,71    | 44,77    | 47,84    | 50,91    | 50,91   |
| <b>2.16 Urusan Kepemudaan dan Olah Raga</b> |  |            |  |                             |          |          |          |          |          |   |
| 1   | Jumlah Organisasi Kepemudaan yang dibina                             | organisasi | 12   | 12                          | 12       | 12       | 13       | 13       | 13       | 13  |
| 2   | Jumlah Cabang Olahraga Yang Berprestasi                              | cabor      | 7  | 7                           | 7        | 8        | 8        | 8        | 8        | 8   |
| <b>2.17 Urusan Statistik</b>                |  |            |  |                             |          |          |          |          |          |   |
| 1   | Persentase sistem data dan statistik yang terintegrasi               | Persen     | -  | 25                          | 35       | 45       | 55       | 67       | 75       | 75  |
| <b>2.18 Urusan Persandian</b>               |  |            |  |                             |          |          |          |          |          |   |
| 1   | Jumlah sarana persandian   | Paket      | 1  | 1                           | 1        | 1        | 1        | 1        | 1        | 1   |
| <b>3. Urusan Pemerintahan Pilihan</b>       |  |            |  |                             |          |          |          |          |          |   |
| <b>3.01 Urusan Kelautan</b>                 |  |            |  |                             |          |          |          |          |          |   |
| 1   | Produktivitas perikanan tangkap                                      | ton        | 15.059   | 15.149                      | 15.239   | 15.329   | 15.419   | 15.509   | 15.599   | 15.599  |
| 2   | Produktivitas perikanan budidaya                                     | ton        | 8.818,73   | 8.879,27                    | 8.939,81 | 9.000,35 | 9.060,89 | 9.121,43 | 9.181,97 | 9.181,97  |
| <b>3.02 Urusan Pariwisata</b>               |  |            |  |                             |          |          |          |          |          |   |

| No.                              | Aspek/Fokus/Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan daerah | Satuan | Kondisi Kinerja Pada Awal RPJMD | Target Capaian Setiap Tahun |         |         |         |         |         | Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode |
|----------------------------------|--|--------|---------------------------------|-----------------------------|---------|---------|---------|---------|---------|------------------------------------|
|                                  |  |        |                                 | 2020                        | 2021    | 2022    | 2023    | 2024    | 2025    |                                    |
| 1                                | Jumlah Kunjungan wisata  | Jiwa   | 8.187                           | 9.084                       | 9.981   | 10.878  | 11.775  | 12.672  | 13.569  | 13.569                             |
| 2                                | Lama menginap  | Hari   | 1                               | 1                           | 2       | 2       | 3       | 3       | 4       | 4                                  |
| <b>3.03 Urusan Pertanian</b>     |  |        |                                 |                             |         |         |         |         |         |                                    |
| 1                                | Produktivitas Tanaman Pertanian                                | Kw/Ha  | 417,3                           | 432,71                      | 463,00  | 493,29  | 523,58  | 553,87  | 584,16  | 584,16                             |
| 2                                | Produksi Tanaman Perkebunan                                    | Ton    | 2.011                           | 2.092                       | 2.173   | 2.254   | 2.335   | 2.416   | 2.497   | 2.497                              |
| 3                                | Produksi Tanaman Hortikultura                                  | Ton    | 166.040                         | 166.119                     | 166.198 | 166.277 | 166.356 | 166.435 | 166.514 | 166.514                            |
| 4                                | Jumlah Produksi Peternakan (Daging dan Telur)                  | kg     | 216.361                         | 217.655                     | 243.410 | 254.605 | 265.856 | 305.881 | 342.089 | 342.089                            |
| <b>3.04 Urusan Perindustrian</b> |  |        |                                 |                             |         |         |         |         |         |                                    |
| 1                                | Jumlah Omset yang dihasilkan dari Usaha Sektor Perindustrian   | %      | 63,3                            | 63,55                       | 63,80   | 64,05   | 64,30   | 64,55   | 64,80   | 64,80                              |
| 2                                | Persentase IUI dan IUKI Efektif                                | %      | 20                              | 20                          | 20      | 20      | 20      | 20      | 20      | 20                                 |
| <b>3.05 Urusan Perdagangan</b>   |  |        |                                 |                             |         |         |         |         |         |                                    |
| 1                                | Kontribusi Sektor Perdagangan                                  | %      | 11,78                           | 12,60                       | 13,42   | 14,24   | 15,06   | 15,88   | 16,70   | 16,70                              |
| 2                                | Jumlah Omset yang dihasilkan dari Usaha Sektor Perdagangan     | %      | 51,28                           | 51,49                       | 51,70   | 51,91   | 52,12   | 52,33   | 52,54   | 52,54                              |
| 3                                | Persentase pasar sehat   | %      | 29,41                           | 35,29                       | 52,94   | 64,71   | 76,47   | 88,24   | 100,00  | 100,00                             |
| 4                                | Persentase peningkatan pelaku usaha perdagangan                | %      |                                 | 64,71                       | 76,47   | 82,35   | 88,24   | 94,12   | 100,00  | 100,00                             |

| No.                             | Aspek/Fokus/Bidang<br>Urusan/Indikator Kinerja<br>Pembangunan daerah | Satuan | Kondisi<br>Kinerja<br>Pada Awal<br>RPJMD<br>2020 | Target Capaian Setiap Tahun |        |        |        |        |        | Kondisi<br>Kinerja<br>Pada Akhir<br>Periode<br>2026 |
|---------------------------------|--|--------|--|-----------------------------|--------|--------|--------|--------|--------|---|
|                                 |  |        |  | 2021                        | 2022   | 2023   | 2024   | 2025   | 2026   |   |
| <b>3.06 Urusan Transmigrasi</b> |  |        |  |                             |        |        |        |        |        |   |
| 1                               | Persentase Warga Transmigrasi yang mandiri                           | %      | 100  | 100,00                      | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00  |
| 2                               | Persentase pembangunan sarana dan prasarana di kawasan transmigrasi  | %      | 100  | 100,00                      | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00  |
| <b>4. Unsur Pendukung</b>       |  |        |  |                             |        |        |        |        |        |   |
| <b>4.01 Sekretariat Daerah</b>  |  |        |  |                             |        |        |        |        |        |   |
| 1                               | Jumlah Sarana dan Prasarana Keagamaan Yang Dibangun/Rehabilitasi     | unit   | 64   | 64                          | 64     | 64     | 64     | 64     | 64     | 64  |
| 2                               | Persentase penyerapan anggaran pembangunan dan realisasinya          | %      |  | 90                          | 93     | 95     | 95     | 95,5   | 96     | 96,00   |
| 3                               | Nilai dan status kinerja Pemerintah Daerah ( Nilai EKPPD )           | Nilai  | Baik   | Baik                        | Baik   | Baik   | Baik   | Baik   | Baik   | Baik  |
| <b>4.02 Sekretariat DPRD</b>    |  |        |  |                             |        |        |        |        |        |   |
| 1                               | Persentase Peraturan Daerah Yang Dihasilkan                          | %      | 65   | 70                          | 80     | 85     | 90     | 95     | 100    | 100   |
| <b>5. Unsur Penunjang</b>       |  |        |  |                             |        |        |        |        |        |   |
| <b>5.01 Perencanaan</b>         |  |        |  |                             |        |        |        |        |        |   |
| 1                               | Persentase Sinergitas Perencanaan                                    | %      | 74,16  | 74,61                       | 75,06  | 75,51  | 75,96  | 76,41  | 76,86  | 76,86   |

| No.                                  | Aspek/Fokus/Bidang<br>Urusan/Indikator Kinerja<br>Pembangunan daerah                 | Satuan         | Kondisi<br>Kinerja<br>Pada Awal<br>RPJMD | Target Capaian Setiap Tahun |             |             |             |             |             | Kondisi<br>Kinerja<br>Pada Akhir<br>Periode |
|--------------------------------------|--|----------------|--|-----------------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|---|
|                                      |  |                |  | 2020                        | 2021        | 2022        | 2023        | 2024        | 2025        |   |
| 2                                    | Persentase Keterukuran Indikator<br>Perencanaan                                      | %              | 100                                      | 100                         | 100         | 100         | 100         | 100         | 100         | 100   |
| 3                                    | Persentase Konsistensi Pelaksanaan<br>Pembangunan                                    | %              | 93,35                                    | 93,92                       | 94,49       | 95,06       | 95,63       | 96,20       | 96,77       | 96,77                                       |
| 4                                    | Persentase Tingkat Partisipatif<br>Perencanaan                                       | %              | 12,77                                    | 15,27                       | 17,77       | 20,27       | 22,77       | 25,27       | 27,77       | 27,77                                       |
| 5                                    | Persentase OPD Yang Pencapaian<br>Kinerja Sesuai Target                              | %              | 77,27                                    | 78,24                       | 79,21       | 80,18       | 81,15       | 82,12       | 83,09       | 83,09                                       |
| <b>5.02 Keuangan</b>                 |  |                |  |                             |             |             |             |             |             |   |
| 1                                    | Tingkat kemandirian keuangan daerah<br>(Rasio PAD dibandingkan Pendapatan<br>Daerah) | %              | 1,79                                     | 3,38                        | 3,72        | 4,31        | 4,53        | 4,84        | 5,12        | 5,12  |
| 2                                    | Penetapan APBD dan APBDP Tepat<br>Waktu  | Tepat<br>Waktu | Tepat Waktu                              | Tepat Waktu                 | Tepat Waktu | Tepat Waktu | Tepat Waktu | Tepat Waktu | Tepat Waktu | Tepat Waktu                                 |
| 3                                    | Persentase Aset Pemda Yang<br>Terinventarisir  | %              | 90                                       | 90                          | 90          | 90          | 90          | 90          | 90          | 90  |
| 4                                    | Persentase Kenaikan Pendapatan<br>Daerah   | %              | 5,50                                     | 27                          | 30          | 32          | 35          | 37          | 40          | 40  |
| <b>5.03 Kepegawaian</b>              |  |                |  |                             |             |             |             |             |             |   |
| 1                                    | Persentase Penempatan Pegawai<br>Sesuai Kompetensi                                   | %              | 70                                       | 71,73                       | 73,46       | 75,19       | 76,92       | 78,65       | 80,38       | 80,38                                       |
| <b>5.04 Pendidikan dan Pelatihan</b> |  |                |  |                             |             |             |             |             |             |   |

| No.                                     | Aspek/Fokus/Bidang<br>Urusan/Indikator Kinerja<br>Pembangunan daerah                         | Satuan | Kondisi<br>Kinerja<br>Pada Awal<br>RPJMD<br>2020 | Target Capaian Setiap Tahun |       |       |       |       |       | Kondisi<br>Kinerja<br>Pada Akhir<br>Periode<br>2026 |
|---|--|--------|--|-----------------------------|-------|-------|-------|-------|-------|---|
|   |  |        |  | 2021                        | 2022  | 2023  | 2024  | 2025  | 2026  |   |
| 1                                       | Persentase Peningkatan Kualitas SDM Aparatur   | %      | 80,5   | 81,81                       | 83,12 | 84,43 | 85,74 | 87,05 | 88,36 | 88,36   |
| <b>5.05 Penelitian dan Pengembangan</b> |  |        |  |                             |       |       |       |       |       |   |
| 1                                       | Persentase implementasi rencana kelitbangan.   | %      | 20   | 25                          | 30    | 35    | 40    | 45    | 50    | 50  |
| <b>6. Unsur Pengawasan</b>              |  |        |  |                             |       |       |       |       |       |   |
| <b>6.01 Pengawasan</b>                  |  |        |  |                             |       |       |       |       |       |   |
| 1                                       | Tingkat leveling kapabilitas Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP)                      | level  | 2  | 2                           | 2     | 3     | 3     | 3     | 3     | 3   |
| 2                                       | Persentase penyelesaian tindak lanjut temuan hasil pemeriksaan BPK                           | %      | 80,38  | 80,44                       | 80,50 | 80,56 | 80,62 | 80,69 | 80,75 | 80,75   |
| <b>7. Unsur Kewilayahan</b>             |  |        |  |                             |       |       |       |       |       |   |
| <b>7.01 Kecamatan</b>                   |  |        |  |                             |       |       |       |       |       |   |
| 1                                       | Persentase pelimpahan wewenang administrasi urusan pemerintahan yang dilaksanakan oleh camat | %      |  | 53,48                       | 53,91 | 54,35 | 54,78 | 55,22 | 55,65 | 55,65   |
| <b>8. Unsur Pemerintahan Umum</b>       |  |        |  |                             |       |       |       |       |       |   |
| <b>8.01 Kesatuan Bangsa dan Politik</b> |  |        |  |                             |       |       |       |       |       |   |
| 1                                       | Persentase Partisipasi Politik Pemilih Pada Pemilihan Umum                                   | %      | 92,96  | 93,13                       | 93,30 | 93,47 | 93,64 | 93,81 | 93,98 | 93,98   |
| 2                                       | Penanganan Potensi Konflik Tidak menjadi Konflik   | %      | 100  | 100                         | 100   | 100   | 100   | 100   | 100   | 100   |

| No.                                    | Aspek/Fokus/Bidang<br>Urusan/Indikator Kinerja<br>Pembangunan daerah  | Satuan      | Kondisi<br>Kinerja<br>Pada Awal<br>RPJMD | Target Capaian Setiap Tahun |        |        |        |        |        | Kondisi<br>Kinerja<br>Pada Akhir<br>Periode |
|--|---|-------------|--|-----------------------------|--------|--------|--------|--------|--------|---|
|  |   |             | 2020                                     | 2021                        | 2022   | 2023   | 2024   | 2025   | 2026   | 2026  |
| 3                                      | Persentase<br>Penduduk/Etnis/Suku/Agama/Ormas<br>Yang Memahami Nilai-Nilai Kehidupan<br>Politik dan Berbangsa | %           | 78,00                                    | 78,31                       | 78,62  | 78,93  | 79,24  | 79,55  | 79,86  | 79,86                                       |
| <b>C. ASPEK DAYA SAING</b>             |   |             |  |                             |        |        |        |        |        |   |
| <b>Kemampuan Ekonomi Daerah</b>        |   |             |  |                             |        |        |        |        |        |   |
| 1                                      | PDRB per kapita harga berlaku   | Ribu Rp     | 60,847                                   | 61,178                      | 61,508 | 61,839 | 62,169 | 62,500 | 62,831 | 62,83                                       |
| 2                                      | Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga<br>Perkapita  | Rp Ribu     | 1.134                                    | 1.191                       | 1.248  | 1.305  | 1.362  | 1.419  | 1.476  | 1476  |
| <b>Fasilitas Wilayah/Infrastruktur</b> |   |             |  |                             |        |        |        |        |        |   |
| 1                                      | Persentase kualitas jalan dalam<br>kondisi mantap   | %           | 84,03                                    | 84,81                       | 85,58  | 86,36  | 87,13  | 87,91  | 88,68  | 88,68                                       |
| 2                                      | Rasio Keterhubungan Wilayah   | %           | 96,55                                    | 96,97                       | 97,38  | 97,79  | 98,21  | 98,62  | 98,71  | 98,71                                       |
| 3                                      | Rasio Elektrifikasi   | %           | 100                                      | 100                         | 100    | 100    | 100    | 100    | 100    | 100   |
| 4                                      | Penerapan E-Government  | Aplikasi    | 1  | 2                           | 3      | 3      | 5      | 7      | 7      | 7   |
| <b>Fasilitas Iklim Berinvestasi</b>    |   |             |  |                             |        |        |        |        |        |   |
| 1                                      | Angka Kriminalitas  | kasus       | 34                                       | 30                          | 26     | 23     | 20     | 18     | 17     | 17  |
| 2                                      | Jumlah Demonstrasi  | demonstrasi | 19                                       | 17                          | 15     | 14     | 13     | 10     | 10     | 10  |
| 3                                      | Lama Proses Perizinan   | hari        | 2  | 2                           | 2      | 2      | 2      | 2      | 2      | 2   |
| 4                                      | Rasio Izin Yang diterbitkan   | Izin        | 260                                      | 260                         | 275    | 275    | 283    | 285    | 300    | 300   |

| No.                        | Aspek/Fokus/Bidang<br>Urusan/Indikator Kinerja<br>Pembangunan daerah | Satuan | Kondisi<br>Kinerja<br>Pada Awal<br>RPJMD<br>2020 | Target Capaian Setiap Tahun |       |       |       |       |       | Kondisi<br>Kinerja<br>Pada Akhir<br>Periode<br>2026 |
|----------------------------|--|--------|--|-----------------------------|-------|-------|-------|-------|-------|---|
|                            |  |        |  | 2021                        | 2022  | 2023  | 2024  | 2025  | 2026  |   |
| 5                          | Jumlah Peraturan Daerah Yang Mendukung Iklim Investasi               | Perda  | 1  | 1                           | 1     | 1     | 1     | 1     | 1     | 1   |
| <b>Sumber Daya Manusia</b> |  |        |  |                             |       |       |       |       |       |   |
| 1                          | Rasio Ketergantungan Penduduk (usia < 15 tahun dan > 64 tahun)       | %      | 50,88  | 51,53                       | 52,18 | 52,83 | 53,48 | 54,13 | 54,78 | 54,78   |
| 2                          | Tingkat Pendidikan Angkatan Kerja                                    | %      | 74,45  | 75,71                       | 76,97 | 78,23 | 79,49 | 80,75 | 82,01 | 82,01   |

Berdasarkan Surat Edaran Bersama Menteri Dalam Negeri dan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 050/3499/SJ Nomor 3 Tahun 2021 Tentang Penyelarasan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 bahwa dalam upaya mendukung keberhasilan pencapaian sasaran dan target pembangunan nasional, penyelarasan menjadi kunci bagi sinergi pembangunan antara pusat dan daerah. Ruang lingkup penyelarasan yang perlu dilakukan sebagai berikut :

1. Penyelarasan Target Indikator Makro.

Penyelarasan ini dimaksudkan untuk menjamin sinergi dukungan pemerintah daerah dalam pencapaian Target Indikator Makro nasional. Hal ini bertujuan untuk mendorong daerah merumuskan dan menyelaraskan pencapaian target yang mendukung pencapaian target nasional dengan mempertimbangkan karakteristik dan potensi setiap daerah.

2. Penyelarasan Program Prioritas.

Penyelarasan ini dimaksudkan untuk menjamin sinergi program prioritas pemerintah daerah yang selaras dengan program prioritas nasional. Hal ini bertujuan untuk mendorong daerah merumuskan dan menyelaraskan program perangkat daerah dengan indikator kinerja program yang selaras dan/atau mendukung program prioritas nasional, serta dapat menuangkan menjadi indikator pembangunan di daerah.

Penyelarasan Target Indikator Makro dilakukan dengan menyandingkan Target Indikator Makro Nasional dengan Target Indikator Makro Kabupaten Konawe Utara, serta Indikator Makro Provinsi Sulawesi Tenggara. Dari 6 (enam) indikator makro Kabupaten Konawe Utara, dapat dilihat bahwa seluruh target indikator telah selaras, baik terhadap Target indikator Makro nasional maupun Target Indikator Makro Provinsi Sulawesi Tenggara, sebagaimana ditampilkan pada Tabel 8.3. Untuk penyelarasan program prioritas, berbagai program pembangunan Kabupaten Konawe Utara telah disusun untuk mendukung Program dan Indikator Pembangunan Nasional. Penyelarasan program prioritas pembangunan daerah yang mendukung program prioritas nasional disajikan pada Tabel 8.4 berikut.

**Tabel 8.3.**  
**Penyelarasan Target Indikator Makro Kabupaten Konawe Utara,**  
**Provinsi Sulawesi Tenggara dan Nasional**

| No  | Indikator Pembangunan                  | RPJMN 2020 - 2024 |      |      |      |             | RPJMD Provinsi Sulawesi Tenggara 2018 - 2023 |        |       |       |       | RPJMD Kabupaten Konawe Utara 2021 - 2026 |  |        |        |       |        |       |       |       |
|-----|--|-------------------|------|------|------|-------------|--|--------|-------|-------|-------|--|--|--------|--------|-------|--------|-------|-------|-------|
|     |  | Target            |      |      |      |             | Indikator Kinerja Program (Outcome)          | Target |       |       |       |  | Indikator Kinerja Program (Outcome)    | Target |        |       |        |       |       |       |
|     |  | 2020              | 2021 | 2022 | 2023 | 2024        |  | 2020   | 2021  | 2022  | 2023  | 2024                                     |  | 2020   | 2021   | 2022  | 2023   | 2024  | 2025  | 2026  |
| (1) | (2)                                    | (3)               | (4)  | (5)  | (6)  | (7)         | (8)  | (9)    | (10)  | (11)  | (12)  | (13)                                     | (14)                                   | (15)   | (16)   | (17)  | (18)   | (19)  | (20)  | (21)  |
| 1   | Laju Pertumbuhan Ekonomi (%)           | 5,6               | 5,8  | 5,90 | 6,1  | 6,20        | Laju Pertumbuhan Ekonomi (%)                 | -0,65  | 5     | 5,50  | 6     |  | Laju Pertumbuhan Ekonomi (%)           |        | 4,9    | 5,24  | 5,58   | 5,91  | 6,25  | 6,59  |
| 2   | Tingkat Kemiskinan (%)                 | 9,81              | 9,43 | 9,00 | 8,45 | 8,15        | Tingkat Kemiskinan (%)                       | 11,65  | 11,35 | 11,20 | 11    |  | Tingkat Kemiskinan (%)                 |        | 13,4   | 13,27 | 13,14  | 13,01 | 12,88 | 12,75 |
| 3   | Tingkat Pengangguran Terbuka (%)       | 4,2               | 4    | 3,8  | 3,4  | 3,1         | Tingkat Pengangguran Terbuka (%)             | 4,58   | 4     | 3,50  | 3     |  | Tingkat Pengangguran Terbuka (%)       |        | 3,75   | 3,70  | 3,66   | 3,62  | 3,58  | 3,53  |
| 4   | Indeks Pembangunan Manusia (IPM)       |                   |      |      |      | 74,60-84,23 | Indeks Pembangunan Manusia (IPM)             | 70,66  | 71,7  | 71,95 | 72,15 |  | Indeks Pembangunan Manusia (IPM)       |        | 70,266 | 70,67 | 71,078 | 71,48 | 71,89 | 72,30 |
| 5   | Gini Rasio                             |                   |      |      |      | 0,360-0,474 | Gini Rasio                                   | 0,388  | 0,39  | 0,39  | 0,385 |  | Indeks Gini                            |        | 0,384  | 0,380 | 0,376  | 0,372 | 0,368 | 0,364 |
| 6   | Pendapatan Perkapita (Rp.000.000/jiwa) |                   |      |      |      |             | Pendapatan Perkapita (Rp.000.000/jiwa)       | 47,24  | 47,49 | 47,74 | 47,99 |  | Pendapatan Perkapita (Rp.000.000/jiwa) |        | 61,18  | 61,51 | 61,84  | 62,17 | 62,50 | 62,83 |

Sumber : RPJMN Tahun 2020-2024 dan Perubahan RPJMD Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun 2018-2023

**Tabel 8.4**  
**Penyelarasan Dukungan Program Prioritas Pembangunan Kabupaten Konawe Utara Terhadap Program Prioritas Nasional**

| No  | Kode (PN/PP) | RPJMN 2020 - 2024  |  |  |          |           |          |                                     | RPJMD Provinsi Sulawesi Tenggara 2018-2023                                      |   |                                       |           |           |           | RPJMD Kabupaten Konawe Utara 2021 - 2026 |  |                                     |   |   |   |         |          |          |          |          |          |       |
|-----|--------------|--|--|--|----------|-----------|----------|-------------------------------------|---|---|---------------------------------------|-----------|-----------|-----------|--|--|-------------------------------------|---|---|---|---------|----------|----------|----------|----------|----------|-------|
|     |              | Prioritas Nasional / Program Prioritas   | Indikator  | Target   |          |           |          |                                     | Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan                    | Indikator Kinerja Program (Outcome)   | Target                                |           |           |           |  | Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan | Indikator Kinerja Program (Outcome) | Target  |   |   |         |          |          |          |          |          |       |
|     |              |  |  | 2020   | 2021     | 2022      | 2023     | 2024                                |   |   | 2020                                  | 2021      | 2022      | 2023      | 2024                                     |  |                                     | 2020  | 2021  | 2022  | 2023    | 2024     | 2025     | 2026     |          |          |       |
| (1) | (2)          | (3)  | (4)  | (5)  | (6)      | (7)       | (8)      | (9)                                 | (10)  | (11)  | (12)                                  | (13)      | (14)      | (15)      | (16)                                     | (17)   | (18)                                | (19)  | (20)  | (21)  | (22)    | (23)     | (24)     | (25)     |          |          |       |
| 1   | 01           | <b>01-Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan yang Berkualitas dan Berkeadilan</b>  |  |  |          |           |          |                                     |   |   |                                       |           |           |           |  |  |                                     |   |   |   |         |          |          |          |          |          |       |
| 1   | 01           | 01-Pemenuhan Kebutuhan Energi dengan Mengutamakan Peningkatan Energi Baru Terbarukan (EBT) | Porsi EBT dalam Bauran Energi Nasional* (Persen)                 | 13,34  | 14,50    | 15,70     | 17,90    | 19,50                               | PROGRAM PENGELOLAAN ENERGI TERBARUKAN   | Bauran Energi Baru Terbarukan Terhadap Ketenagalistrikan (Persen)                             |                                       | 4,82      | 5,50      | 7,21      |  |  |                                     |   |   |   |         |          |          |          |          |          |       |
|     |              |  | Indeks Ketahanan Energi (Indeks)                                 | 68,00  | 68,00    | 68,80     | 69,20    | 70,30                               |   |   |                                       |           |           |           |  |  |                                     |   |   |   |         |          |          |          |          |          |       |
| 2   | 02           | 02-Peningkatan Kuantitas/ Ketahanan Air untuk Mendukung Pertumbuhan Ekonomi                | Produktivitas air (water productivity) (US\$/m <sup>3</sup> )    | 4,00   | 4,40     | 4,70      | 5,10     | 5,40                                | PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)                                       | Meningkatnya pengelolaan sumber daya air (Persen)   |                                       | 65,02     | 86,5      | 92,50     |  |  |                                     | Program Pengelolaan Sumber Daya Air (SDA)                         | Luas Daerah Irigasi Dalam Kondisi Baik (Ha)       |   | 2.671,6 | 2.693,67 | 2.715,74 | 2.737,81 | 2.759,88 | 2.781,95 |       |
|     |              |  | PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM | (jumlah Kawasan yang disediakan Prasarana dan Sarana Air Minum bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah) Cakupan Pelayanan Akses Air Minum (Persen) |          | 4 Lokasi  | 35,00    | 35,00                               |   |   |                                       |           |           |           |  |  |                                     | Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum  | Rumah Tangga Pengguna Air Bersih Perpipaan (Unit) |   | 18.853  | 18.894   | 18.935   | 18.976   | 19.017   | 19.058   |       |
|     |              |  | PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM DRAINASE             | (jumlah Jaringan Drainase yang terbangun di wilayah Kabupaten/Kota) Persentase Drainase Yang Terbangun (Persen)                                  |          | 10 Lokasi | 33,33    | 33,33                               |   |   |                                       |           |           |           |  |  |                                     | Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase              | Persentase Drainase Yang Terbangun (%)            |   | 41,48   | 42,91    | 44,34    | 45,77    | 47,20    | 48,63    |       |
| 3   | 03           | 03-Peningkatan Ketersediaan, Akses, dan Kualitas Konsumsi Pangan                           | Skor Pola Pangan Harapan (2.2.2(c))                              | 90,40  | 91,60    | 92,80     | 94,00    | 95,20                               | PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA EKONOMI UNTUK KEDAULATAN DAN KEMANDIRIAN PANGAN | 1. Ketersediaan pangan utama (beras) (ton)  |                                       | 455.078   | 465.078   | 465.078   |  |  |                                     | Program Peningkatan Diversifikasi Dan Ketahanan Pangan Masyarakat | Skor PPH Konsumsi (Skor)                          |   | 80      | 81       | 82       | 82,7007  | 83       | 84,2511  |       |
|     |              |  |  | 2. Ketersediaan Energi (Kkl/Kap/hari)  |          | 3.300     | 3355     | 3370                                |   |   |                                       |           |           |           |  |  |                                     |   | Program Pengawasan Keamanan Pangan                | Ketersediaan energi dan protein perkapita (Kkl/Kapita/Hari) |         | 2.753    | 2811     | 2870     | 2928     | 2986     | 3046  |
|     |              |  |  | 3. Ketersediaan Protein (Gr/kap/hari)  |          | 89        | 90       | 95                                  |   |   |                                       |           |           |           |  |  |                                     |   |   | Ketersediaan energi dan protein perkapita (Gr/Kapita/Hari)  |         | 71       | 72       | 75       | 76,85    | 78       | 79,95 |
|     |              |  | Angka Kecukupan Energi (AKE) (2.1.2(a)) (kkl/hari)               | 2.100,00   | 2.100,00 | 2.100,00  | 2.100,00 | 2.100,00                            | PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT               | 1. Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga Perkapita  |                                       | 5.655.778 | 5.799.999 | 5.947.899 |  |  |                                     | Program Peningkatan Diversifikasi Dan Ketahanan Pangan Masyarakat | Persentase Desa Lumbung Pangan (Persen)           |   | 3       | 5        | 8        | 10,6     | 13       | 15,09    |       |
|     |              |  |  |  |          |           |          |                                     |   | 2. Koefisien variasi pangan strategis (beras, cabe merah, bawang merah, kedelai, jagung) (CV) |                                       |           |           |           |  |  |                                     |   |   |   |         |          |          |          |          |          |       |
|     |              |  | Angka Kecukupan Protein (AKP) (gram/kapita/hari)                 | 57,00  | 57,00    | 57,00     | 57,00    | 57,00                               |   |   | 3. Ketersediaan Energi (Kkl/Kap/hari) |           | 3.300     | 3.355     | 3.370                                    |  |                                     |   | Program Penanganan Kerawanan Pangan               | Tingkat Penguatan Cadangan Pangan (%)                       |         | 100      | 100      | 100      | 100      | 100      | 100   |
|     |              | Prevalensi Ketidakcukupan Konsumsi Pangan (Prevalence of Under-nourishment/PoU)            | 6,20   | 5,80   | 5,50     | 5,20      | 5,00     | PROGRAM PENANGANAN KERAWANAN PANGAN | 4. Ketersediaan Protein (Gr/kap/hari)   |   | 89                                    | 90        | 95        |           |  |  |                                     |   | Persentase penanganan kerawanan pangan (%)        |   | 100     | 100      | 100      | 100      | 100      | 100      |       |
|     |              |  |  |  |          |           |          |                                     | Ketersediaan Pangan Utama (Beras) (Ton)   |   | 455,078                               | 465,078   | 475,078   |           |  |  | Program Penanganan Kerawanan Pangan | Persentase penanganan kerawanan pangan (%)                        |   | 100,000   | 100     | 100      | 100      | 100      | 100      | 100      |       |

| No  | Kode (PN/PP) | RPJMN 2020 - 2024  |   |        |       |       |       |       | RPJMD Provinsi Sulawesi Tenggara 2018-2023                               |   |        |  |                                       |                                       |      | RPJMD Kabupaten Konawe Utara 2021 - 2026  |   |        |       |       |        |         |        |         |
|-----|--------------|--|---|--------|-------|-------|-------|-------|--|---|--------|--|---------------------------------------|---------------------------------------|------|---|---|--------|-------|-------|--------|---------|--------|---------|
|     |              | Prioritas Nasional / Program Prioritas                                       | Indikator   | Target |       |       |       |       | Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan             | Indikator Kinerja Program (Outcome)   | Target |  |                                       |                                       |      | Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan                    | Indikator Kinerja Program (Outcome)   | Target |       |       |        |         |        |         |
|     |              |  |   | 2020   | 2021  | 2022  | 2023  | 2024  |  |   | 2020   | 2021                                     | 2022                                  | 2023                                  | 2024 |   |   | 2020   | 2021  | 2022  | 2023   | 2024    | 2025   | 2026    |
| (1) | (2)          | (3)  | (4)   | (5)    | (6)   | (7)   | (8)   | (9)   | (10)   | (11)  | (12)   | (13)                                     | (14)                                  | (15)                                  | (16) | (17)  | (18)  | (19)   | (20)  | (21)  | (22)   | (23)    | (24)   | (25)    |
|     |              |  | Prevalensi Penduduk dengan Kerawanan Pangan Sedang atau Berat (Food Insecurity Experience Scale/PIES) | 5,20   | 4,80  | 4,50  | 4,20  | 4,00  | PROGRAM PENGAWASAN KEAMANAN PANGAN                                       | 1. Tingkat Keamanan Pangan (%)  |        | 89                                       | 93                                    | 93,5                                  |      | Program Pengawasan Keamanan Pangan  | Ketersediaan energi dan protein perkapita (Kkl/kapita/hari)                   |        | 2400  | 2634  | 2751,0 | 2868    | 2985,0 | 3102    |
|     |              |  |   |        |       |       |       |       |  | 2. Sertifikat Prima 3   |        | 5  | 5                                     | 6                                     |      | Program Pengelolaan Sumber Daya Ekonomi Untuk Kedaulatan Dan Kemandirian Pangan | Persentase Desa Mandiri Pangan (Persen)                                       |        | 3     | 6     | 9      | 12,5786 | 16     | 18,8679 |
| 4   | 04           | 04-Peningkatan Pengelolaan Kemaritiman, Perikanan dan Kelautan               | Konservasi kawasan kelautan (14.5.1*) (Juta ha)   | 23,40  | 24,20 | 25,10 | 26,00 | 26,90 | PROGRAM PENGELOLAAN KELAUTAN, PESISIR DAN PULAU PULAU KECIL              | Luas Kawasan Konservasi Laut dan Perairan, Jumlah Dokumen akses area perikanan berkelanjutan, Nilai Tukar Nelayan |        | 1,96 Juta Ha<br>14 Dokumen<br>NTN 123,78 | 1,96 Juta Ha<br>14 Dokumen<br>NTN 124 | 1,96 Juta Ha<br>14 Dokumen<br>NTN 124 |      |   |   |        |       |       |        |         |        |         |
|     |              |  |   |        |       |       |       |       | PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP                                    | Jumlah Produksi Perikanan Tangkap (Ribuan Ton)  |        | 250                                      | 260                                   | 270                                   |      | Program Pengelolaan Perikanan Tangkap   | Persentase Kelompok Nelayan yang di lakukan pembinaan (Persen)                |        | 50    | 60    | 70     | 80      | 90     | 100     |
|     |              |  |   |        |       |       |       |       |  | Jumlah Sarana Perikanan Tangkap Yang Meningkatkan Kapasitasnya (Unit)   |        | 210                                      | 210                                   | 210                                   |      |   | Produktivitas perikanan tangkap (Ton)   |        | 15059 | 15149 | 15239  | 15419   | 15509  | 15599   |
|     |              |  | Proporsi tangkapan jenis ikan yang berada dalam batasan biologis yang aman (14.4.1*) (%) (Persen)     | <64    | <67   | <72   | <76   | <80   | PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA                                   | Jumlah Produksi Perikanan Budidaya (Ribuan ton)   |        | 490                                      | 520                                   | 650                                   |      | Program Pengelolaan Perikanan Budidaya  | Produktivitas perikanan budidaya (Ton)  |        | 8879  | 8940  | 9000   | 9060,89 | 9121   | 9181,97 |
|     |              |  |   |        |       |       |       |       | PROGRAM PENGAWASAN SDKP  | Jumlah Pokmaswas yang telah mendapatkan Pembinaan (Pokmawas)  |        | 156                                      | 161                                   | 166                                   |      | Program Pengawasan Sumber Daya Kelautan Dan Perikanan                           | Persentase POKMASWAS yang dibina (persen)                                     |        | 45    | 50    | 55     | 60      | 65     | 70      |
|     |              |  |   |        |       |       |       |       |  | Penanganan kasus Pelanggaran bidang Kelautan dan Perikanan (Persen)   |        | 30,00                                    | 30,00                                 | 30,00                                 |      |   |   |        |       |       |        |         |        |         |
|     |              |  |   |        |       |       |       |       |  | Operasi kapal pengawas (Hari Operasional)   |        | 16                                       | 20                                    | 30                                    |      |   |   |        |       |       |        |         |        |         |
|     |              |  |   |        |       |       |       |       | PROGRAM PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN                         | Tingkat Konsumsi Ikan (kg/kap/tahun)  |        | 69,98                                    | 69,98                                 | 69,98                                 |      | Program Pengolahan Dan Pemasaran Hasil Perikanan                                | Persentase kelompok pengolah dan pemasar hasil perikanan yang dibina (persen) |        | 50,00 | 55,00 | 60,00  | 65      | 70,00  | 75      |
|     |              |  |   |        |       |       |       |       |  | Jumlah UPI (UPI)  |        | 1.450                                    | 1.500                                 | 1.550                                 |      |   |   |        |       |       |        |         |        |         |
|     |              |  |   |        |       |       |       |       |  | Jumlah pembinaan terhadap pelaku pasar dan pengolah hasil perikanan (Pembinaan)                                   |        | 12                                       | 12                                    | 12                                    |      |   |   |        |       |       |        |         |        |         |
| 5   | 05           | 05-Penguatan Kewirausahaan, Usaha Mikro, Kecil Menengah (UMKM), dan Koperasi | Rasio kewirausahaan nasional (Persen)   | 3,60   | 3,70  | 3,80  | 3,90  | 4,00  | PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM) | Jumlah UMKM yang tumbuh dan berkembang untuk Menjadi Usaha yang Tangguh dan Mandiri (unit)                        |        | 1.300                                    | 1.500                                 | 2.000                                 |      | Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil, Dan Usaha Mikro (UMKM)        | Persentase wirausaha baru (%)   |        | 1     | 0     | 1      | 0,77    | 1      | 0,79    |
|     |              |  | Kontribusi UMKM terhadap PDB (Persen )  | 61,00  | 62,00 | 63,00 | 64,00 | 65,00 | PROGRAM PENGEMBANGAN UMKM  | Jumlah Usaha Kecil Dengan Ori entasi Peningkatan Skala Usaha Menjadi Usaha Menengah (unit)                        |        | 500                                      | 600                                   | 700                                   |      | Program Pengembangan UMKM   | Jumlah UMKM yang dibina (UMKM)  |        |       | 50    | 50     | 50      | 50     | 50      |

| No  | Kode (PN/PP) | RPJMN 2020 - 2024  |   |        |      |      |      |      | RPJMD Provinsi Sulawesi Tenggara 2018-2023                   |  |        |        |        |        |      | RPJMD Kabupaten Konawe Utara 2021 - 2026                             |  |         |         |         |         |         |         |        |  |
|-----|--------------|--|---|--------|------|------|------|------|--|--|--------|--------|--------|--------|------|--|--|---------|---------|---------|---------|---------|---------|--------|--|
|     |              | Prioritas Nasional / Program Prioritas   | Indikator   | Target |      |      |      |      | Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan | Indikator Kinerja Program (Outcome)  | Target |        |        |        |      | Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan         | Indikator Kinerja Program (Outcome)                              | Target  |         |         |         |         |         |        |  |
|     |              |  |   | 2020   | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |  |  | 2020   | 2021   | 2022   | 2023   | 2024 |  |  | 2020    | 2021    | 2022    | 2023    | 2024    | 2025    | 2026   |  |
| (1) | (2)          | (3)  | (4)   | (5)    | (6)  | (7)  | (8)  | (9)  | (10)   | (11)   | (12)   | (13)   | (14)   | (15)   | (16) | (17)   | (18)   | (19)    | (20)    | (21)    | (22)    | (23)    | (24)    | (25)   |  |
|     |              |  | Kontribusi koperasi terhadap PDB                        | 5,10   | 5,20 | 5,30 | 5,40 | 5,50 | PROGRAM PENDIDIKAN DAN LATIHAN PERKOPERASIAN                 | Jumlah Anggota Koperasi dan UMKM yang mengikuti Pendidikan dan Pelatihan (unit UMKM)           |        | 900    | 950    | 1.000  |      | Program Pendidikan Dan Latihan Perkoperasian                         | Persentase peningkatan koperasi yang mengikuti pelatihan (%)     |         | 56      | 68      | 74      | 81,08   | 84      | 87,84  |  |
|     |              |  |   |        |      |      |      |      |  |  |        |        |        |        |      | Program Pengawasan dan Pemeriksaan Koperasi                          | Persentase koperasi aktif yang dibina (Koperasi)                 |         | 22      | 31      | 36      | 37,95   | 40      | 42,41  |  |
|     |              |  |   |        |      |      |      |      | PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PERLINDUNGAN KOPERASI               | Persentase Jumlah Koperasi Aktif (Persen)  |        | 70     | 71,31  | 72,46  |      | Program Pemberdayaan Dan Perlindungan Koperasi                       | Persentase koperasi aktif (%)                                    |         | 76      | 76,35   | 77,03   | 77,7    | 79,39   | 81,08  |  |
|     |              |  |   |        |      |      |      |      |  |  |        |        |        |        |      | Program Penilaian Kesehatan KSP/USP Koperasi                         | Persentase koperasi sehat (%)                                    |         | 16      | 17,00   | 18,00   | 19      | 20,00   | 21     |  |
| 6   | 06           | 06-Peningkatan Nilai Tambah, Lapangan Kerja, dan Investasi di Sektor Pertanian | Pertumbuhan PDB pertanian (Persen)                      | 3,70   | 3,70 | 3,90 | 4,00 | 4,10 | PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN         | Terlaksananya penyediaan sarana pertanian dalam mendukung peningkatan produksi pangan (Persen) |        | 100,00 | 100,00 | 100,00 |      | Program Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian                 | Produktivitas tanaman perkebunan (Kw/Ha)                         |         | 2173,00 | 2254,00 | 2335,00 | 2416    | 2497,00 | 2497   |  |
|     |              |  |   |        |      |      |      |      | PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN      | Tersedianya prasarana pertanian (Persen)   |        | 100,00 | 100,00 | 100,00 |      | Program Penyediaan dan Pengembangan Prasarana Pertanian              | Produktivitas tanaman pangan (Kw/Ha)                             |         | 432,71  | 463,00  | 493,29  | 523,58  | 553,87  | 584,16 |  |
|     |              |  |   |        |      |      |      |      |  |  |        |        |        |        |      | Jumlah Produksi tanaman Perkebunan (Ton)                             |  | 2092,00 | 2173,00 | 2254,00 | 2335    | 2416,00 | 2497    |        |  |
|     |              |  |   |        |      |      |      |      |  |  |        |        |        |        |      | Jumlah Produksi tanaman Hortikultura (kg)                            |  | 166.119 | 166.198 | 166.277 | 166.356 | 166.435 | ####    |        |  |
|     |              |  |   |        |      |      |      |      |  |  |        |        |        |        |      | Jumlah Produksi tanaman pangan (ton)                                 |  | 107.046 | 107.417 | 107.788 | 108.159 | 108.530 | ####    |        |  |
|     |              |  |   |        |      |      |      |      |  |  |        |        |        |        |      | Jumlah produksi peternakan (Daging dan Telur) (kg)                   |  | 217.655 | 243.410 | 254.605 | 265.856 | 305.881 | ####    |        |  |
|     |              |  |   |        |      |      |      |      | PROGRAM PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA PERTANIAN    | Meningkatnya pengembangan dan penerapan penyuluhan pertanian (Persen)                          |        | 100,00 | 100,00 | 100,00 |      | Program Pengendalian Dan Penanggulangan Bencana Pertanian            | Persentase luas areal pengendalian OPT (persen)                  |         | 0,00    | 14,00   | 14,00   | 14      | 14,00   | 14     |  |
|     |              |  |   |        |      |      |      |      |  |  |        |        |        |        |      | Persentase pengendalian bencana pertanian dan penanggulangan nya (%) |  | 100     | 100     | 100     | 100     | 100     | 100     |        |  |
|     |              |  |   |        |      |      |      |      | PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN                                 | Meningkatnya pengembangan dan penerapan penyuluhan pertanian (persen)                          |        | 100,00 | 100,00 | 100,00 |      | Program Penyuluhan Pertanian   | Persentase peningkatan SDM kelembagaan kelompok tani (persen)    |         | 100,00  | 100,00  | 100,00  | 100     | 100,00  | 100    |  |
|     |              |  | Kontribusi PDB kemaritiman (Persen)                     | 6,50   | 6,90 | 7,20 | 7,50 | 7,80 |  |  |        |        |        |        |      |  |  |         |         |         |         |         |         |        |  |
|     |              |  | Pertumbuhan PDB Industri Pengolahan (9.2.1(a)) (Persen) | 5,00   | 5,50 | 6,50 | 7,50 | 8,20 | PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM INFORMASI INDUSTRI NASIONAL       | Jumlah Pendataan pada Sistem Informasi Industri Nasional (Kali)                                |        | 18     | 18     | 18     |      |  |  |         |         |         |         |         |         |        |  |
|     |              |  |   |        |      |      |      |      | PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI                 | Persentase Jumlah Industri yang mengolah sumber daya daerah (Persen)                           |        | 2,20   | 2,50   | 3,00   |      | Program Perencanaan Dan Pembangunan Industri                         | Jumlah Omzet yang dihasilkan dari Sektor Usaha Perindustrian (%) |         | 63,30   | 63,55   | 63,80   | 64,05   | 64,30   | 64,55  |  |

| No  | Kode (PN/PP) | RPJMN 2020 - 2024                      |           |             |             |             |             |          | RPJMD Provinsi Sulawesi Tenggara 2018-2023                      |   |        |         |         |           | RPJMD Kabupaten Konawe Utara 2021 - 2026   |   |  |        |        |        |        |        |        |       |     |     |
|-----|--------------|--|-----------|-------------|-------------|-------------|-------------|----------|---|---|--------|---------|---------|-----------|--|---|--|--------|--------|--------|--------|--------|--------|-------|-----|-----|
|     |              | Prioritas Nasional / Program Prioritas | Indikator | Target      |             |             |             |          | Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan    | Indikator Kinerja Program (Outcome)   | Target |         |         |           |  | Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan            | Indikator Kinerja Program (Outcome)                                  | Target |        |        |        |        |        |       |     |     |
|     |              |  |           | 2020        | 2021        | 2022        | 2023        | 2024     |   |   | 2020   | 2021    | 2022    | 2023      | 2024   |   |  | 2020   | 2021   | 2022   | 2023   | 2024   | 2025   | 2026  |     |     |
| (1) | (2)          | (3)                                    | (4)       | (5)         | (6)         | (7)         | (8)         | (9)      | (10)  | (11)  | (12)   | (13)    | (14)    | (15)      | (16)   | (17)  | (18)   | (19)   | (20)   | (21)   | (22)   | (23)   | (24)   | (25)  |     |     |
|     |              |  |           |             |             |             |             |          |   | Persentase Peningkatan Nilai Produksi Industri yang mengolah sumber daya daerah (Persen)                  |        | 17,82   | 23,17   | 30,12     |  |   |  |        |        |        |        |        |        |       |     |     |
|     |              |  |           |             |             |             |             |          | PROGRAM PENGENDALIAN IZIN USAHA INDUSTRI                        | Jumlah Koordinasi dengan instansi terkait penerbit izin usaha industri (Persen)                           |        | 18,00   | 18,00   | 18,00     |  | Program Pengendalian Izin Usaha Industri Kabupaten/Kota                 | Persentase IUI dan IUKI efektif (%)                                  |        | 20     | 20     | 20     | 20     | 20     | 20    | 20  |     |
|     |              |  |           | 4,80        | 5,00        | 5,20        | 5,30        | 5,50     | PROGRAM PEMASARAN PARIWISATA                                    | Jumlah Kunjungan Wisata (orang)   |        | 922.108 | 968.213 | 1.016.624 |  | Program Pemasaran Pariwisata  | Jumlah kunjungan wisata (jiwa)                                       |        | 9.084  | 9.981  | 10.878 | 11775  | 12.672 | 13569 |     |     |
|     |              |  |           | 1.189-1.214 | 1.314-1.333 | 1.439-1.452 | 1.564-1.570 | 1.689,00 | PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF | Jumlah tenaga kerja pariwisata dan Ekraf (Orang) yang dibina  |        | 100     | 150     | 200       |  | Program Pengembangan Sumber Daya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif         | Persentase pembinaan ekonomi kreatif dan SDM kepariwisataan (persen) |        | 100    | 100    | 100    | 100    | 100    | 100   | 100 | 100 |
|     |              |  |           |             |             |             |             |          |   |   |        |         |         |           | Program Pengembangan Ekonomi Kreatif Melalui Pemanfaatan dan Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual | Persentase pengembangan prasarana ekonomi kreatif (persen)              |  | 0      | 10     | 40     | 50     | 55     | 60     |       |     |     |
|     |              |  |           | 5,60        | 6,20        | 6,90        | 7,80        | 8,40     | PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL                      | Jumlah investor berskala nasional (PMDN/PMA) (perusahaan)   |        | 748     | 750     | 753       |  | Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal                              | Jumlah Perbup yang mendukung Iklim Investasi (Perbup)                |        | 0      | 2      | 3      | 4      | 5      | 6     |     |     |
|     |              |  |           |             |             |             |             |          |   |   |        |         |         |           | Program Promosi Penanaman Modal  | Jumlah nilai investasi PMA/PMDN (Rp (milyar))                           |  | 181    | 198    | 215    | 232,32 | 249    | 266,54 |       |     |     |
|     |              |  |           |             |             |             |             |          |   |   |        |         |         |           | Program Pelayanan Penanaman Modal  | Lama proses perizinan (hari)  |  | 2      | 2      | 2      | 2      | 2      | 2      | 2     |     |     |
|     |              |  |           |             |             |             |             |          |   |   |        |         |         |           | Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal   | Persentase pengawasan investasi (%)                                     |  | 100    | 100    | 100    | 100    | 100    | 100    |       |     |     |
|     |              |  |           |             |             |             |             |          |   |   |        |         |         |           | Program Pengelolaan data Dan Sistem Informasi  | Jumlah izin yang diterbitkan (Izin) Survey Kepuasan Masyarakat (%)      |  | 290    | 345    | 398    | 442    | 495    | 500    |       |     |     |
|     |              |  |           |             |             |             |             |          |   |   |        |         |         |           |  |   |  | 77     | 78     | 78     | 79,21  | 80     | 80,36  |       |     |     |
|     |              |  |           | 2,7-3,0     | 2,7-3,0     | 2,7-3,0     | 2,7-3,0     | 2,7-3,0  | PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA                                 | Persentase pencari kerja yang ditempatkan, difasilitasi akses kesempatan kerja dan usaha mandiri (persen) |        | 5,00    | 5,00    | 5,00      |  | Program Perencanaan Tenaga Kerja  | Persentase Tersedianya Perencanaan Tenaga Kerja (%)                  |        | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100    | 100,00 | 100   |     |     |
|     |              |  |           |             |             |             |             |          |   |   |        |         |         |           | Program Penempatan Tenaga Kerja  | Besaran Pencari Kerja Yang ditempatkan (Orang)                          |  | 306,00 | 349,00 | 351,00 | 367    | 397,00 | 403    |       |     |     |
|     |              |  |           |             |             |             |             |          |   |   |        |         |         |           | Program Hubungan Industrial  | Persentase Penyelesaian Kasus Hubungan Industrial (%)                   |  | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100    | 100,00 | 100    |       |     |     |
|     |              |  |           |             |             |             |             |          |   |   |        |         |         |           | Program Pelatihan Kerja dan Produktivitas Tenaga Kerja   | Jumlah Tenaga Kerja yang mendapat Pelatihan berbasis Kompetensi (Orang) |  | 70,00  | 75,00  | 77,00  | 80     | 83,00  | 85     |       |     |     |

| No  | Kode (PN/PP) | RPJMN 2020 - 2024   |   |         |         |         |         |         | RPJMD Provinsi Sulawesi Tenggara 2018-2023                   |  |        |       |       |       |   | RPJMD Kabupaten Konawe Utara 2021 - 2026   |  |        |       |       |         |       |       |      |
|-----|--------------|---|---|---------|---------|---------|---------|---------|--|--|--------|-------|-------|-------|---|--|--|--------|-------|-------|---------|-------|-------|------|
|     |              | Prioritas Nasional / Program Prioritas  | Indikator   | Target  |         |         |         |         | Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan | Indikator Kinerja Program (Outcome)                              | Target |       |       |       |   | Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan                           | Indikator Kinerja Program (Outcome)            | Target |       |       |         |       |       |      |
|     |              |   |   | 2020    | 2021    | 2022    | 2023    | 2024    |  |  | 2020   | 2021  | 2022  | 2023  | 2024  |  |  | 2020   | 2021  | 2022  | 2023    | 2024  | 2025  | 2026 |
| (1) | (2)          | (3)   | (4)   | (5)     | (6)     | (7)     | (8)     | (9)     | (10)   | (11)   | (12)   | (13)  | (14)  | (15)  | (16)  | (17)   | (18)   | (19)   | (20)  | (21)  | (22)    | (23)  | (24)  | (25) |
|     |              |   | Laju pertumbuhan PDB per tenaga kerja (8.2.1*) (Persen)               | 3,0-3,3 | 3,1-3,5 | 3,2-3,7 | 3,2-4,0 | 3,5-4,5 |  |  |        |       |       |       |   |  |  |        |       |       |         |       |       |      |
|     |              |   | Kontribusi tenaga kerja industri (9.2.2*) (Persen)                    | 14,20   | 14,60   | 15,00   | 15,30   | 15,70   |  |  |        |       |       |       |   |  |  |        |       |       |         |       |       |      |
|     |              |   | Jumlah tenaga kerja industri (Juta orang)                             | 19,70   | 20,30   | 20,90   | 21,40   | 22,00   |  |  |        |       |       |       |   |  |  |        |       |       |         |       |       |      |
|     |              |   | Jumlah tenaga kerja pariwisata (8.9.2*) (Juta orang)                  | 13,00   | 13,50   | 14,00   | 14,50   | 15,00   | PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA          | Jumlah Daya Tarik Wisata Yang dikembangkan (DTW/Lokasi)          |        | 3     | 3     | 3     |   | Program Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata                                    | Lama menginap (Hari)                           |        | 1     | 2     | 2       | 3     | 3     | 4    |
| 7   | 07           | 07-Peningkatan Ekspor Bernilai Tambah Tinggi dan                              | Pertumbuhan ekspor barang dan jasa (Persen)                           | 3,90    | 4,20    | 4,80    | 5,50    | 6,20    | PROGRAM PENGEMBANGAN EKSPOR                                  | Nilai Ekspor (US\$)  |        | 2,20  | 2,50  | 3,00  |   |  |  |        |       |       |         |       |       |      |
|     |              |   | Neraca perdagangan barang (USD miliar)                                | 0,30    | 1,00    | 3,00    | 7,50    | 15,00   | PROGRAM PENGGUNAAN DAN PEMASARAN PRODUK DALAM NEGERI         | Jumlah pelaksanaan promosi penggunaan produk dalam negeri (Kali) |        | 1     | 2     | 3     |   | Program Penggunaan Dan Pemasaran Produk Dalam Negeri                                   | Kontribusi Sektor Perdagangan (persen)         |        | 13    | 13    | 14      | 15,06 | 16    | 16,7 |
|     |              |   |   |         |         |         |         |         |  |  |        |       |       |       | Program Peningkatan Sarana Distribusi Perdagangan                   | Persentase pasar sehat (pasar)   |  | 29     | 53    | 65    | 76,4706 | 88    | 100   |      |
|     |              |   |   |         |         |         |         |         |  |  |        |       |       |       |   | Persentase peningkatan pelaku usaha perdagangan (pasar)                                |  | 65     | 76    | 82    | 88,2353 | 94    | 100   |      |
|     |              |   |   |         |         |         |         |         |  |  |        |       |       |       | Program Stabilisasi Harga Barang Kebutuhan Pokok Dan Barang Penting | Persentase stabilitasi jenis barang penting (persen)                                   |  | 40     | 45    | 45    | 50      | 50    | 55    |      |
|     |              |   |   |         |         |         |         |         |  |  |        |       |       |       | Program Standar Disasi Dan Perlindungan Konsumen                    | Jumlah Omset yang dihasilkan dari Usaha Sektor Perdagangan (persen)                    |  | 51     | 52    | 52    | 52,12   | 52    | 52,54 |      |
|     |              |   | Nilai devisa pariwisata (8.9.1(c)) (USD miliar) (USD miliar)          | 21,00   | 23,00   | 25,00   | 27,50   | 30,00   |  |  |        |       |       |       |   |  |  |        |       |       |         |       |       |      |
| 8   | 08           | 08-Penguatan Pilar Pertumbuhan dan Daya Saing Ekonomi                         | Kontribusi sektor jasa keuangan/PDB (Persen)                          | 4,20    | 4,30    | 4,30    | 4,40    | 4,40    | PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH                        | Persentase Peningkatan PAD (Persen)                              |        | 50,00 | 50,00 | 50,00 |   | Program Pengelolaan Pendapatan Daerah  | Persentase kenaikan pendapatan daerah (persen) |        | 27,00 | 30,00 | 32,00   | 35    | 37,00 | 40   |
|     |              |   | Biaya logistik terhadap PDB (Persen)                                  | 23,20   | 22,20   | 21,10   | 20,10   | 18,00   | PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA                               | Presentase Program Penanggulangan Bencana (Persen)               |        | 33    | 33    | 36    |   | Program Penanggulangan Bencana   | Jumlah Desa Tangguh Bencana (Desa)             |        | 2     | 9     | 9       | 9     | 9     | 9    |
|     |              |   |   |         |         |         |         |         |  |  |        |       |       |       | Program Penanganan Bencana  | Persentase Korban Bencana Yang Menerima Bantuan Sosial Selama Masa Tanggap Darurat (%) |  | 100    | 100   | 100   | 100     | 100   | 100   |      |
|     |              |   | Peringkat Travel and Tourism Competitiveness Index (TTCI) (Peringkat) | N.A.    | 34-39   | N.A.    | 29-34   | N.A.    | PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA          | Jumlah Daya Tarik Wisata Yang dikembangkan (DTW/Lokasi)          |        | 3     | 3     | 3     |   | Program Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata                                    | Lama menginap (Hari)                           |        | 1     | 2     | 2       | 3     | 3     | 4    |
| II  | 02           | 02-Mengembangkan Wilayah untuk Mengurangi Kesenjangan dan Menjamin Pemerataan |   |         |         |         |         |         |  |  |        |       |       |       |   |  |  |        |       |       |         |       |       |      |
| 1   | 01           | 01-Pembangunan Wilayah Sumatera   |   |         |         |         |         |         |  |  |        |       |       |       |   |  |  |        |       |       |         |       |       |      |

| No  | Kode (PN/PP) | RPJMN 2020 - 2024  |   |        |        |        |        |   | RPJMD Provinsi Sulawesi Tenggara 2018-2023   |  |  |      |      |      |       | RPJMD Kabupaten Konawe Utara 2021 - 2026                     |                                     |        |       |      |   |   |   |  |          |       |          |       |          |       |       |  |
|-----|--------------|--|---|--------|--------|--------|--------|---|--|--|--|------|------|------|-------|--|-------------------------------------|--------|-------|------|---|---|---|--|----------|-------|----------|-------|----------|-------|-------|--|
|     |              | Prioritas Nasional / Program Prioritas                                   | Indikator   | Target |        |        |        |   | Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan                       | Indikator Kinerja Program (Outcome)  | Target   |      |      |      |       | Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan | Indikator Kinerja Program (Outcome) | Target |       |      |   |   |   |  |          |       |          |       |          |       |       |  |
|     |              |  |   | 2020   | 2021   | 2022   | 2023   | 2024                                      |  |  | 2020   | 2021 | 2022 | 2023 | 2024  |  |                                     | 2020   | 2021  | 2022 | 2023                                    | 2024  | 2025  | 2026   |          |       |          |       |          |       |       |  |
| (1) | (2)          | (3)  | (4)   | (5)    | (6)    | (7)    | (8)    | (9)                                       | (10)   | (11)   | (12)   | (13) | (14) | (15) | (16)  | (17)   | (18)                                | (19)   | (20)  | (21) | (22)                                    | (23)  | (24)  | (25)   |          |       |          |       |          |       |       |  |
| 2   | 02           | 02-Pengembangan Wilayah Jawa-Bali  |   |        |        |        |        |   |  |  |  |      |      |      |       |  |                                     |        |       |      |   |   |   |  |          |       |          |       |          |       |       |  |
| 3   | 03           | 03-Pembangunan Wilayah Nusa Tenggara                                     |   |        |        |        |        |   |  |  |  |      |      |      |       |  |                                     |        |       |      |   |   |   |  |          |       |          |       |          |       |       |  |
| 4   | 04           | 04-Pembangunan Wilayah Kalimantan  |   |        |        |        |        |   |  |  |  |      |      |      |       |  |                                     |        |       |      |   |   |   |  |          |       |          |       |          |       |       |  |
| 5   | 05           | 05-Pembangunan Wilayah Sulawesi  |   |        |        |        |        |   |  |  |  |      |      |      |       |  |                                     |        |       |      |   |   |   |  |          |       |          |       |          |       |       |  |
| 6   | 06           | 06-Pembangunan Wilayah Maluku  |   |        |        |        |        |   |  |  |  |      |      |      |       |  |                                     |        |       |      |   |   |   |  |          |       |          |       |          |       |       |  |
| 7   | 07           | 07-Pengembangan Wilayah Papua  |   |        |        |        |        |   |  |  |  |      |      |      |       |  |                                     |        |       |      |   |   |   |  |          |       |          |       |          |       |       |  |
| III | 03           | <b>03-Meningkatkan Sumber Daya Manusia Berkualitas dan Bertaya Saing</b> |   |        |        |        |        |   |  |  |  |      |      |      |       |  |                                     |        |       |      |   |   |   |  |          |       |          |       |          |       |       |  |
| 1   | 01           | 01-Perlindungan Sosial dan Tata Kelola Kependudukan                      | Proporsi penduduk yang tercakup dalam program jaminan sosial (%)                  | 78,70  |        |        |        |   | 98,00  | PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL  | Jumlah PMKS yang mendapat perlindungan dan bantuan Sosial (KK) |      |      |      | 200   | 75   |                                     |        |       |      | Program Perlindungan dan Jaminan Sosial | Persentase PPKS yang memperoleh bantuan sosial (%)                          |   | 27,48  | 29       | 32    | 36,01    | 42    | 48,06    |       |       |  |
|     |              |  |   |        |        |        |        |   |  |  |  |      |      |      |       |  |                                     |        |       |      |   | Program Pemberdayaan Sosial   | Persentase usaha ekonomi keluarga yang mendapatkan pembinaan (%)            |  | 51,61    | 54    | 55       | 56,52 | 57       | 61,64 |       |  |
|     |              |  |   |        |        |        |        |   |  |  |  |      |      |      |       |  |                                     |        |       |      |   |   | Program Rehabilitasi Sosial   | Persentase DTKS yang memperoleh pelayanan dan rehabilitasi (%) |          | 30,09 | 31       | 34    | 40       | 50    | 59,43 |  |
|     |              | Angka kelahiran total (Total fertility rate/TFR)                         | 2,26  | 2,24   | 2,21   | 2,19   | 2,10   | PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB) | Persentase Peserta KB Aktif (PA) Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP) (Persen) |  |  |      |      |      | 10,12 | 10,94  | 11,76                               |        |       |      |   | Program Pembinaan Keluarga Berencana (KB)                                   | Jumlah Peserta KB Aktif (Orang)   |  | 11786,00 | 11871 | 11923,00 | 11957 | 11973,00 | 12051 |       |  |
|     |              |  |   |        |        |        |        |   |  |  |  |      |      |      |       |  |                                     |        |       |      |   |   | Program Pengendalian Penduduk   | Persentase pertumbuhan penduduk (%)                            |          | 6,71  | 7,06     | 7,41  | 7,76     | 8,11  | 8,46  |  |
| 2   | 02           | 02-Penguatan Pelaksanaan Perlindungan Sosial                             | Proporsi penduduk yang tercakup dalam program jaminan sosial                      | 78,70  |        |        |        |   | 98,00  | PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL  | Jumlah PMKS yang mendapat perlindungan dan bantuan Sosial (KK) |      |      |      | 200   | 75   |                                     |        |       |      | Program Perlindungan dan Jaminan Sosial | Persentase PPKS yang memperoleh bantuan sosial (%)                          |   | 27,48  | 29       | 32    | 36,01    | 42    | 48,06    |       |       |  |
|     |              |  | Proporsi rumah tangga miskin dan rentan yang memperoleh bantuan sosial pemerintah | 65,20  |        |        |        |   | 80,00  |  |  |      |      |      |       |  |                                     |        |       |      |   |   |   |  |          |       |          |       |          |       |       |  |
| 3   | 03           | 03-Peningkatan Akses dan Mutu Pelayanan Kesehatan                        | Angka kematian ibu (AKI) (per 100.000 kelahiran hidup)                            | 230,00 | 217,00 | 205,00 | 194,00 | 183,00                                    | PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT        | Angka Kematian Ibu (Per 100.000 kelahiran hidup)                                   |  |      |      |      | 100   | 100  | 100                                 |        |       |      |   | Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat | Angka kematian ibu melahirkan per 100.000 kelahiran hidup (rasio)           |  | 137      | 135   | 133      | 131   | 129      | 127   |       |  |
|     |              |  | Angka kematian bayi (AKB) (per 1000 kelahiran hidup)                              | 20,60  | 19,50  | 18,60  | 17,60  | 16,00                                     | PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT        | Angka Kematian Bayi (Per 1.000 kelahiran hidup)                                    |  |      |      |      |       | 8  | 7                                   | 6      |       |      |   |   | Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat | Angka Kematian Bayi / 1000 kelahiran hidup (rasio)             |          | 2     | 2        | 1     | 1,18     | 1     | 0,72  |  |
|     |              |  | Angka kematian neonatal (per 1.000 kelahiran hidup)                               | 12,90  | 12,20  | 11,60  | 11,00  | 10,00                                     |  |  |  |      |      |      |       |  |                                     |        |       |      |   |   |   |  |          |       |          |       |          |       |       |  |
|     |              |  | Angka prevalensi kontrasepsi modern/modern Contraceptive Prevalence Rate (mCPR)   | 61,80  | 62,20  | 62,50  | 62,90  | 63,40                                     | PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB)  | Persentase Peserta KB Aktif (PA) Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP) (Persen) |  |      |      |      |       |  | 10,12                               | 10,94  | 11,76 |      |   |   |   |  |          |       |          |       |          |       |       |  |

| No  | Kode (PN/PP) | RPJMN 2020 - 2024                      |   |        |        |        | RPJMD Provinsi Sulawesi Tenggara 2018-2023 |        |  |   |        | RPJMD Kabupaten Konawe Utara 2021 - 2026 |       |      |      |   |  |        |          |        |          |        |          |       |  |  |
|-----|--------------|--|---|--------|--------|--------|--|--------|--|---|--------|--|-------|------|------|---|--|--------|----------|--------|----------|--------|----------|-------|--|--|
|     |              | Prioritas Nasional / Program Prioritas | Indikator   | Target |        |        |  |        | Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan                       | Indikator Kinerja Program (Outcome)   | Target |  |       |      |      | Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan                | Indikator Kinerja Program (Outcome)                    | Target |          |        |          |        |          |       |  |  |
|     |              |  |   | 2020   | 2021   | 2022   | 2023                                       | 2024   |  |   | 2020   | 2021                                     | 2022  | 2023 | 2024 |   |  | 2020   | 2021     | 2022   | 2023     | 2024   | 2025     | 2026  |  |  |
| (1) | (2)          | (3)                                    | (4)   | (5)    | (6)    | (7)    | (8)  | (9)    | (10)   | (11)  | (12)   | (13)                                     | (14)  | (15) | (16) | (17)  | (18)   | (19)   | (20)     | (21)   | (22)     | (23)   | (24)     | (25)  |  |  |
|     |              |  | Persentase kebutuhan ber-KB yang tidak  | 8,60   | 8,30   | 8,00   | 7,70                                       | 7,40   |  |   |        |  |       |      |      | Program Pemberdayaan Dan Peningkatan Keluarga Sejahtera (KS)                | Persentase Keluarga Sejahtera (%)                      |        | 81,58    | 81,82  | 81,94    | 82,06  | 82,18    | 82,3  |  |  |
|     |              |  | PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB)   |        |        |        |  |        | Persentase Peserta KB Aktif (PA) Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP) (Persen) |   | 10,12  | 10,94                                    | 11,76 |      |      | Cakupan PUS Unmeetneed (%)  |  | 0,09   | 0,128    | 0,07   | 0,05     | 0,03   | 0,01     |       |  |  |
|     |              |  | Angka kelahiran remaja umur 15-19 tahun/Age Specific Fertility Rate (ASFR 15-19) (kelahiran hidup per 1000 perempuan) | 25,00  | 24,00  | 21,00  | 20,00                                      | 18,00  | PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT        | Persentase capaian pemenuhan upaya kesehatan perorangan dan upaya kesehatan masyarakat (Persen) |        | 100                                      | 100   | 100  |      | Program Pembinaan Keluarga Berencana (KB)                                   | Jumlah Peserta KB Aktif (Orang)                        |        | 11786,00 | 11871  | 11923,00 | 11957  | 11973,00 | 12051 |  |  |
|     |              |  | Prevalensi stunting (pendek dan sangat pendek) pada balita (persen)   | 24,10  | 21,10  | 18,40  | 16,00                                      | 14,00  | PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT        | Prevalensi Balita Stunting (Persen)   |        | 18                                       | 17,4  | 16   |      | Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat | Prevalensi kasus Stunting (%)                          |        | 11       | 10,8   | 11       | 10,4   | 10       | 10    |  |  |
|     |              |  | Prevalensi wasting (kurus dan sangat kurus) pada balita (persen)  | 8,10   | 7,80   | 7,50   | 7,30                                       | 7,00   |  |   |        |  |       |      |      | Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat | Prevalensi Balita Gizi Buruk (%)                       |        | 0,3      | 0,2    | 0,2      | 0,2    | 0,1      | 0     |  |  |
|     |              |  | Insidensi HIV (per 1.000 penduduk yang tidak terinfeksi HIV)  | 0,21   | 0,21   | 0,19   | 0,19                                       | 0,18   | PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT        | Insidensi HIV (per 1.000 penduduk yang tidak terinfeksi HIV)                                    |        | 252                                      | 231   | 211  |      | Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat |  |        |          |        |          |        |          |       |  |  |
|     |              |  | Insidensi tuberkulosis (per 100.000 penduduk)   | 272,00 | 252,00 | 231,00 | 211,00                                     | 190,00 | PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT        | Insidensi tuberkulosis (TB) (per 100.000 penduduk)  |        | 18                                       | 17    | 16   |      | Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat | Prevalensi Tuberkulosis (TB) /100.000 penduduk (Rasio) |        | 140      | 137    | 134      | 131    | 128      | 125   |  |  |
|     |              |  | Jumlah kabupaten/kota yang mencapai eliminasi malaria   | 325,00 | 345,00 | 365,00 | 385,00                                     | 405,00 | PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT        | Jumlah Kab/Kota Eliminasi Malaria   |        | 11                                       | 15    | 17   |      | Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat |  |        |          |        |          |        |          |       |  |  |
|     |              |  | Insidensi hepatitis B (persen)  | 1,68   | 1,54   | 1,39   | 1,24                                       | 1,09   |  |   |        |  |       |      |      |   |  |        |          |        |          |        |          |       |  |  |
|     |              |  | Persentase merokok penduduk usia 10-18 tahun  | 9,10   | 9,00   | 8,90   | 8,80                                       | 8,70   |  |   |        |  |       |      |      |   |  |        |          |        |          |        |          |       |  |  |
|     |              |  | Prevalensi obesitas pada penduduk usia > 18 tahun (persen)  | 21,80  | 21,80  | 21,80  | 21,80                                      | 21,80  |  |   |        |  |       |      |      |   |  |        |          |        |          |        |          |       |  |  |
|     |              |  | Persentase tekanan darah tinggi   | 34,10  | 34,10  | 34,10  | 34,10                                      | 34,10  |  |   |        |  |       |      |      |   |  |        |          |        |          |        |          |       |  |  |
|     |              |  | Persentase fasilitas kesehatan tingkat pertama terakreditasi  | 65,00  | 79,00  | 80,00  | 90,00                                      | 100,00 |  |   |        |  |       |      |      | Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan                 | Rasio dokter per 100.000 penduduk (Rasio)              |        | 49,71    | 52,30  | 56,24    | 60,16  | 64,05    | 67,92 |  |  |
|     |              |  |   |        |        |        |  |        |  |   |        |  |       |      |      | rasio bidan / 100.000 penduduk (Rasio)                                      |  | 216,78 | 222,95   | 229,08 | 235,17   | 241,23 | 247,24   |       |  |  |

| No  | Kode (PN/PP) | RPJMN 2020 - 2024  |  |        |                   |       |       |                   | RPJMD Provinsi Sulawesi Tenggara 2018-2023                   |   |        |       |       |       |      | RPJMD Kabupaten Konawe Utara 2021 - 2026                                    |   |        |        |        |        |        |        |        |
|-----|--------------|--|--|--------|-------------------|-------|-------|-------------------|--|---|--------|-------|-------|-------|------|---|---|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
|     |              | Prioritas Nasional / Program Prioritas                   | Indikator  | Target |                   |       |       |                   | Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan | Indikator Kinerja Program (Outcome)                                   | Target |       |       |       |      | Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan                | Indikator Kinerja Program (Outcome)                           | Target |        |        |        |        |        |        |
|     |              |  |  | 2020   | 2021              | 2022  | 2023  | 2024              |  |   | 2020   | 2021  | 2022  | 2023  | 2024 |   |   | 2020   | 2021   | 2022   | 2023   | 2024   | 2025   | 2026   |
| (1) | (2)          | (3)  | (4)  | (5)    | (6)               | (7)   | (8)   | (9)               | (10)   | (11)  | (12)   | (13)  | (14)  | (15)  | (16) | (17)  | (18)  | (19)   | (20)   | (21)   | (22)   | (23)   | (24)   | (25)   |
|     |              |  |  |        |                   |       |       |                   |  |   |        |       |       |       |      |   | Rasio perawat / 100.000 penduduk (Rasio)                      |        | 129,79 | 141,75 | 153,64 | 165,44 | 177,17 | 188,83 |
|     |              |  |  |        |                   |       |       |                   |  |   |        |       |       |       |      | Program Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan dan Makanan Minuman                 | Jumlah sertifikat laek higien (Sertifikat)                    |        | 0      | 5      | 8      | 10     | 13     | 16     |
|     |              |  |  |        |                   |       |       |                   |  |   |        |       |       |       |      |   | Jumlah Rekomendasi Ijin Apotek/Toko Obat (Rekomendasi)        |        | 8      | 10     | 12     | 15     | 17     | 20     |
|     |              |  |  |        |                   |       |       |                   |  |   |        |       |       |       |      | Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat | Rata-rata Kunjungan Rawat Jalan Per Hari (Rawat Jalan)        |        | 10     | 12     | 17     | 23     | 29     | 35     |
|     |              |  |  |        |                   |       |       |                   |  |   |        |       |       |       |      |   | Length Of Stay (LOS)/Rata-rata Lama Hari Dirawat (Hari)       |        | 3      | 4      | 6      | 7      | 8      | 9      |
|     |              |  |  |        |                   |       |       |                   |  |   |        |       |       |       |      |   | Emergency Respon Time Rate Kurang Dari 5 Menit (%)            |        | 40     | 50     | 70     | 80     | 90     | 100    |
|     |              |  |  |        |                   |       |       |                   |  |   |        |       |       |       |      | Program Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan dan Makanan Minuman                 | Bed Occupancy Rate (BOR)/ Tingkat Penggunaan Tempat Tidur (%) |        | 20     | 35     | 60     | 75     | 80     | 85     |
|     |              |  |  |        |                   |       |       |                   |  |   |        |       |       |       |      |   | Kecepatan Pelayanan Resep Obat Jadi Kurang dari 30 Menit (%)  |        | 40     | 50     | 70     | 80     | 90     | 100    |
|     |              |  | Persentase rumah sakit terakreditasi   | 80,00  | 85,00             | 90,00 | 95,00 | 100,00            |  |   |        |       |       |       |      |   |   |        |        |        |        |        |        |        |
| 4   | 04           | 04-Peningkatan Pemerataan Layanan Pendidikan Berkualitas | Nilai rata-rata hasil PISA: a. Membaca b. Matematika c. Sains  | NA NA  | 399,1 388,7 400,4 | NA NA | NA NA | 399,7 392,3 406,2 | PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN                               | Angka partisipasi sekolah (APS) SMA/MA/Paket C (Nilai)                |        | 76,30 | 80,12 | 84,12 |      | Program Pengelolaan Pendidikan  | Persentase capaian SPM (%)                                    |        | 86,00  | 87,00  | 88,00  | 89     | 90,00  | 90     |
|     |              |  | Proporsi Anak di Atas Batas Kompetensi Minimal dalam Test PISA (Persen): a. Membaca b. Matematika c. Sains | NA NA  | 34,4 46,6 49      | NA NA | NA NA | 35,6 47,4 51      |  | Angka Partisipasi Kasar (APK) Pendidikan Khusus (Nilai)               |        | 50,74 | 53,27 | 55,94 |      |   | APK SD (Indeks)   |        | 107,30 | 106,80 | 106,25 | 105,79 | 104,70 | 103,59 |
|     |              |  | Rata-rata Lama Sekolah Penduduk Usia 15 Tahun Keatas (Tahun)   | 8,75   | 8,85              | 8,95  | 9,06  | 9,16              |  | Jumlah Sekolah yang mendapatkan bantuan operasional Sekolah (Sekolah) |        | 453   | 570   | 570   |      |   | APK SMP (Indeks)  |        | 87     | 86     | 85     | 84,13  | 84     | 82,95  |
|     |              |  |  |        |                   |       |       |                   |  |   |        |       |       |       |      |   | APM SD (Indeks)   |        | 98     | 98,65  | 99     | 99,07  | 99     | 99,45  |
|     |              |  |  |        |                   |       |       |                   |  |   |        |       |       |       |      |   | APM SMP (Indeks)  |        | 78     | 78     | 79     | 80,45  | 82     | 81,89  |
|     |              |  |  |        |                   |       |       |                   |  |   |        |       |       |       |      |   | Persentase SD Terakreditasi Minimal B (%)                     |        | 17     | 19     | 19     | 20,19  | 20     | 21,15  |
|     |              |  |  |        |                   |       |       |                   |  |   |        |       |       |       |      |   | Persentase SMP Terakreditasi Minimal B (%)                    |        | 42     | 44     | 44     | 47,22  | 47     | 50     |
|     |              |  | Harapan Lama Sekolah Penduduk Usia 25 Tahun Keatas(Tahun)  | 13,41  | 13,60             | 13,79 | 13,97 | 14,16             |  |   |        |       |       |       |      |   |   |        |        |        |        |        |        |        |

| No  | Kode (PN/PP) | RPJMN 2020 - 2024                      |  |  |              |              |              |              | RPJMD Provinsi Sulawesi Tenggara 2018-2023                   |   |        |        |        |        |      | RPJMD Kabupaten Konawe Utara 2021 - 2026                     |   |        |       |       |       |       |       |       |  |
|-----|--------------|--|--|--|--------------|--------------|--------------|--------------|--|---|--------|--------|--------|--------|------|--|---|--------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|--|
|     |              | Prioritas Nasional / Program Prioritas | Indikator  | Target   |              |              |              |              | Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan | Indikator Kinerja Program (Outcome)   | Target |        |        |        |      | Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan | Indikator Kinerja Program (Outcome)   | Target |       |       |       |       |       |       |  |
|     |              |  |  | 2020   | 2021         | 2022         | 2023         | 2024         |  |   | 2020   | 2021   | 2022   | 2023   | 2024 |  |   | 2020   | 2021  | 2022  | 2023  | 2024  | 2025  | 2026  |  |
| (1) | (2)          | (3)                                    | (4)  | (5)  | (6)          | (7)          | (8)          | (9)          | (10)   | (11)  | (12)   | (13)   | (14)   | (15)   | (16) | (17)   | (18)  | (19)   | (20)  | (21)  | (22)  | (23)  | (24)  | (25)  |  |
|     |              |  | Indeks Perlindungan Anak (IPA)   | 66,34  | 68,10        | 9,87         | 71,66        | 73,49        | PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK                             | Persentase Anak Korban Kekerasan yang Mendapatkan Layanan Komprehensif pada Lembaga Layanan (Dinas/UPTD PPA) di daerah (Persen)               |        | 100,00 | 100,00 | 100,00 |      | Program Pemenuhan Hak Anak (PHA)                             | Persentase Perlindungan dan Pemenuhan Hak Anak (%)                          |        | 55,25 | 60,00 | 72,00 | 73    | 80,00 | 88    |  |
|     |              |  | Prevalensi anak usia 13-17 tahun yang pernah mengalami kekerasan sepanjang hidupnya (%)                            | Laki-laki: 61,7; Perempuan: 62 (Baseline 2018) | Menurun      | Menurun      | Menurun      | Menurun      |  |   |        |        |        |        |      | Program Perlindungan Khusus Anak                             | Jumlah korban kekerasan anak yang ditindaklanjuti (Orang)                   |        | 3,00  | 2,00  | 2,00  | 1     | 1,00  | 1     |  |
|     |              |  | Indeks Pembangunan Gender (IPG)  | 91,21  | 91,28        | 91,28        | 91,33        | 91,39        | PROGRAM PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN    | Persentase Perangkat Daerah Provinsi yang melaksanakan Perencanaan dan Penganggaran yang Responsif Gender (PPRG)                              |        | 21     | 38     | 39     |      | Program Pengarusutamaan Gender Dan Pemberdayaan Perempuan    | Persentase Perempuan Yang Menduduki Jabatan Publik (%)                      |        | 7,690 | 7,872 | 7,962 | 8,052 | 8,142 | 8,232 |  |
|     |              |  |  |  |              |              |              |              |  |   |        |        |        |        |      | Program Peningkatan Kualitas Keluarga                        | Persentase peningkatan kualitas keluarga (%)                                |        | 100   | 100   | 100   | 100   | 100   | 100   |  |
|     |              |  |  |  |              |              |              |              |  |   |        |        |        |        |      | Program Pengelolaan Sistem Data Gender Dan Anak              | Persentase pengelolaan data gender dan anak (%)                             |        | 100   | 100   | 100   | 100   | 100   | 100   |  |
| 5   | 05           | 05-Peningkatan Kualitas Anak,          | Indeks Pemberdayaan Gender (IDG)   | 73,24  | 73,50        | 73,74        | 73,97        | 74,28        |  |   |        |        |        |        |      |  |   |        |       |       |       |       |       |       |  |
|     |              |  | Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) Perempuan  | 52,51  | 53,13        | 53,76        | 54,38        | 55,00        |  |   |        |        |        |        |      |  |   |        |       |       |       |       |       |       |  |
|     |              |  | Prevalensi kekerasan terhadap perempuan usia 15-64 tahun di 12 bulan terakhir                                      | Menurun dari 9,4 (Baseline 2016)               | Menurun      | Menurun      | Menurun      | Menurun      | PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN                               | Persentase Perempuan Korban Kekerasan dan TPPO yang Mendapatkan Layanan Komprehensif pada Lembaga Layanan (Dinas/UPTD PPA) di Daerah (Persen) |        | 100    | 100    | 100    |      | Program Perlindungan Perempuan                               | Jumlah Perempuan korban kekerasan yang mendapat pelayanan/ditangani (Orang) |        | 3     | 2     | 2     | 1     | 1     | 1     |  |
|     |              |  | Indeks Pembangunan Pemuda (IPP)  | 55,33  | 56,50        | 56,50        | 58,17        | 57,67        | PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEPEMUDAAN         | Persentase Pengembangan Kapasitas daya saing SDM Kepemudaan (Persen)  |        | 100    | 100    | 100    |      | Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Kepemudaan         | Jumlah Organisasi Kepemudaan yang dibina (Organisasi)                       |        | 12    | 12    | 12    | 13    | 13    | 13    |  |
| 6   | 06           | 06-Pengentasan Kemiskinan              | Persentase rumah tangga miskin dan rentan yang memiliki aset produktif (layanan keuangan, modal, lahan, pelatihan) | 27,90  |              |              |              | 40,00        | PROGRAM PERLINDUNGAN DAN BANTUAN SOSIAL                      | Jumlah PMKS yang mendapat perlindungan dan bantuan Sosial (KK)  |        | 200    | 75     |        |      | Program Perlindungan dan Jaminan Sosial                      | Persentase PPKS yang memperoleh bantuan sosial (%)                          |        | 27,48 | 29    | 32    | 36,01 | 42    | 48,06 |  |
|     |              |  | Persentase rumah tangga miskin dan rentan yang mengakses pendanaan usaha   | 25,60  |              |              |              | 50,00        |  |   |        |        |        |        |      |  |   |        |       |       |       |       |       |       |  |
|     |              |  | Luas kawasan hutan yang dikelola oleh masyarakat dan   | 630.000,00                                     | 1.600.000,00 | 1.850.000,00 | 1.350.000,00 | 1.100.000,00 | PROGRAM PENGELOLAAN HUTAN                                    | 1. Luas Rehabilitasi Lahan kritis dan kawasan hutan (Ha/Tahun)  |        | 1.200  | 1.200  | 1.200  |      |  |   |        |       |       |       |       |       |       |  |
|     |              |  |  |  |              |              |              |              |  | 2. Produksi Hasil Hutan Kayu dan Bukan Kayu (M3/Ton/Tahun)  |        | 56.000 | 56.000 | 56.000 |      |  |   |        |       |       |       |       |       |       |  |
|     |              |  |  |  |              |              |              |              |  | 3. Persentase Penurunan luas kerusakan kawasan hutan (Persen/Tahun)   |        | 100    | 100    | 100    |      |  |   |        |       |       |       |       |       |       |  |

| No  | Kode (PN/PP) | RPJMN 2020 - 2024   |  |              |       |       |       |               | RPJMD Provinsi Sulawesi Tenggara 2018-2023                               |  |        |      |       |       | RPJMD Kabupaten Konawe Utara 2021 - 2026 |  |   |        |        |        |        |      |        |      |     |  |
|-----|--------------|---|--|--------------|-------|-------|-------|---------------|--|--|--------|------|-------|-------|--|--|---|--------|--------|--------|--------|------|--------|------|-----|--|
|     |              | Prioritas Nasional / Program Prioritas  | Indikator  | Target       |       |       |       |               | Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan             | Indikator Kinerja Program (Outcome)  | Target |      |       |       |  | Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan | Indikator Kinerja Program (Outcome)                                     | Target |        |        |        |      |        |      |     |  |
|     |              |   |  | 2020         | 2021  | 2022  | 2023  | 2024          |  |  | 2020   | 2021 | 2022  | 2023  | 2024                                     |  |   | 2020   | 2021   | 2022   | 2023   | 2024 | 2025   | 2026 |     |  |
| (1) | (2)          | (3)   | (4)  | (5)          | (6)   | (7)   | (8)   | (9)           | (10)   | (11)   | (12)   | (13) | (14)  | (15)  | (16)                                     | (17)   | (18)  | (19)   | (20)   | (21)   | (22)   | (23) | (24)   | (25) |     |  |
|     |              |   |  |              |       |       |       |               |  | 4. Penurunan Titik Hotspot (Persen/Tahun)  |        | 100  | 100   | 100   |  |  |   |        |        |        |        |      |        |      |     |  |
|     |              |   | Bidang tanah yang didistribusi                               | 750.000,00   |       |       |       | 7.750.000,00  | PROGRAM PENYELESAIAN GANTI KERUGIAN DAN SANTUNAN TANAH UNTUK PEMBANGUNAN | Terselesainya Pemberian santunan tanah pembangunan (persen)  |        | 0    | 100   | 100   |  | Program Penatagunaan Tanah                                   | Persentase penatagunaan tanah untuk wilayah Kabupaten (%)               |        | 100    | 100    | 100    | 100  | 100    | 100  | 100 |  |
|     |              |   | Bidang tanah yang dilegalisasi                               | 6.286.087,00 |       |       |       | 56.286.087,00 | PROGRAM PENGELOLAAN IZIN LOKASI  | Terlaksananya Pemberian izin lokasi Penetapan (dokumen)  |        | 0    | 2     | 2     |  |  |   |        |        |        |        |      |        |      |     |  |
| 7   | 07           | 07-Peningkatan Produktivitas dan Daya Saing   | Persentase angkatan kerja berpendidikan menengah ke atas     | 44,80        | 46,60 | 48,40 | 50,20 | 52,10         | PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA  | Persentase pencari kerja yang ditempatkan,difasilitasi akses kesempatan kerja dan usaha mandiri (persen) |        |      | 5,00  | 5,00  |  | Program Penempatan Tenaga Kerja                              | Besaran Pencari Kerja Yang ditempatkan (Orang)                          |        | 306,00 | 349,00 | 351,00 | 367  | 397,00 | 403  |     |  |
|     |              |   | Jumlah PT yang Masuk ke dalam World Class University Top 200 | 0,00         | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 1,00          |  |  |        |      |       |       |  |  |   |        |        |        |        |      |        |      |     |  |
|     |              |   | Jumlah PT yang Masuk ke dalam World Class University Top 300 |              | 1,00  | 1,00  | 1,00  | 2,00          |  |  |        |      |       |       |  |  |   |        |        |        |        |      |        |      |     |  |
|     |              |   | Jumlah PT yang Masuk ke dalam World Class University Top 500 | 2,00         | 2,00  | 2,00  | 2,00  | 3,00          |  |  |        |      |       |       |  |  |   |        |        |        |        |      |        |      |     |  |
|     |              |   | Proporsi pekerja berkeahlian menengah dan tinggi (%)         | 43,00        | 45,00 | 47,00 | 48,00 | 50,00         | PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA                   | Persentase tenaga kerja yang difasilitasi untuk meningkatkan kompetensi dan produktivitasnya (Persen)    |        | 5,00 | 10,00 | 10,00 |  | Program Pelatihan Kerja dan Produktivitas Tenaga Kerja       | Jumlah Tenaga Kerja yang mendapat Pelatihan berbasis Kompetensi (Orang) |        | 70,00  | 75,00  | 77,00  | 80   | 83,00  | 85   |     |  |
| IV  | 04           | 04-Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan   |  |              |       |       |       |               |  |  |        |      |       |       |  |  |   |        |        |        |        |      |        |      |     |  |
| 1   | 01           | 01-Revolusi Mental dan Pembinaan Ideologi Pancasila untuk Memperkokuh Ketahanan Budaya Bangsa dan Membentuk Mentalitas Bangsa yang Maju, Modern, dan Berkarakter                                      |  |              |       |       |       |               |  |  |        |      |       |       |  |  |   |        |        |        |        |      |        |      |     |  |
| 2   | 02           | 02-Meningkatkan Pemajuan dan Pelestarian Kebudayaan untuk Memperkuat Karakter dan Memperteguh Jati Diri Bangsa, Meningkatkan Kesejahteraan Rakyat, dan Mempengaruhi Arah Perkembangan Peradaban Dunia | n/a  |              |       |       |       |               |  |  |        |      |       |       |  |  |   |        |        |        |        |      |        |      |     |  |

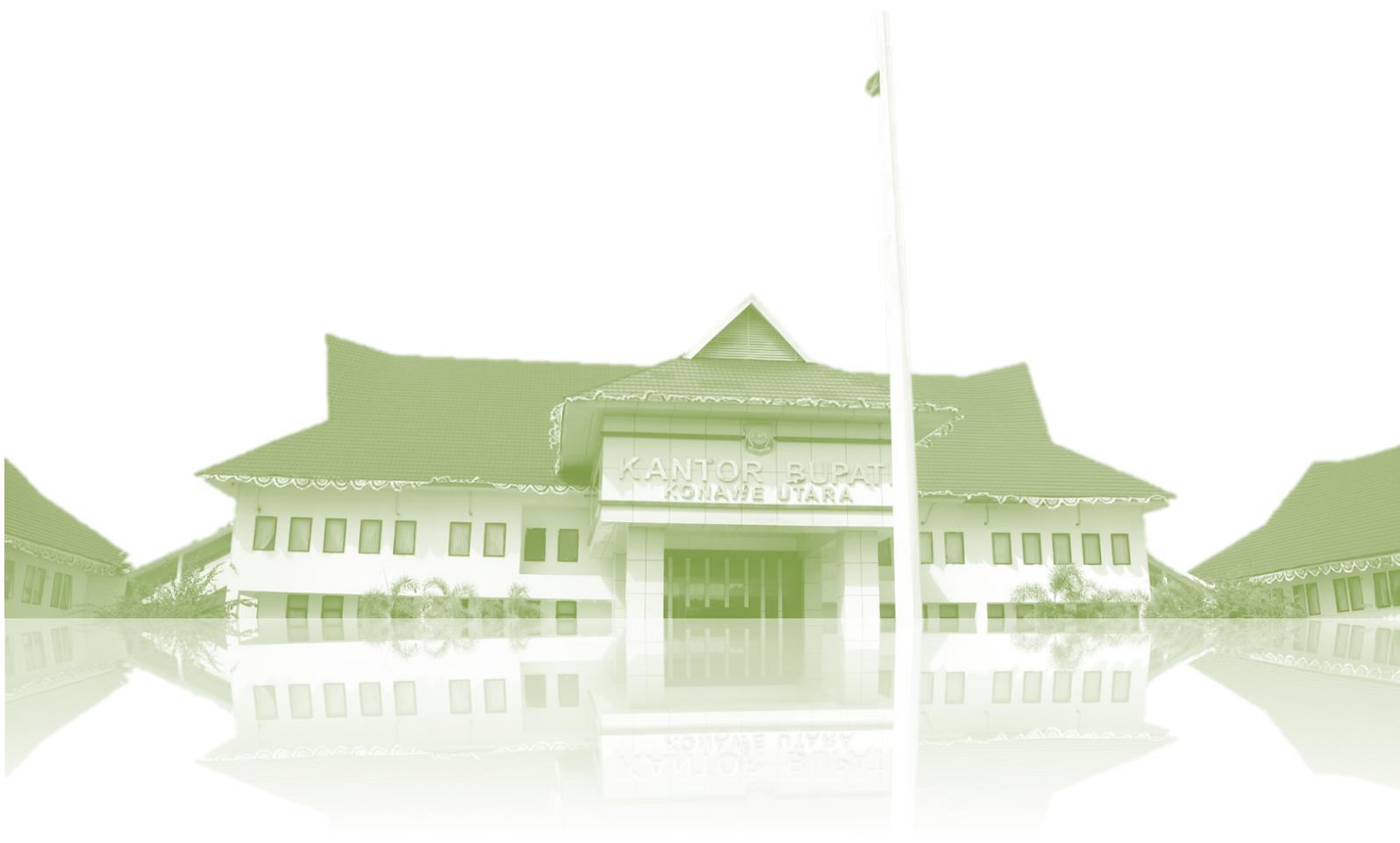
| No  | Kode (PN/PP) | RPJMN 2020 - 2024   |   |                                      |                                      |                                      | RPJMD Provinsi Sulawesi Tenggara 2018-2023 |                                 |  |   |        | RPJMD Kabupaten Konawe Utara 2021 - 2026 |      |      |      |  |  |  |       |        |       |       |       |       |        |  |
|-----|--------------|---|---|--------------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|--|---------------------------------|--|---|--------|--|------|------|------|--|--|--|-------|--------|-------|-------|-------|-------|--------|--|
|     |              | Prioritas Nasional / Program Prioritas  | Indikator   | Target                               |                                      |                                      |  |                                 | Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan | Indikator Kinerja Program (Outcome)   | Target |  |      |      |      | Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan | Indikator Kinerja Program (Outcome)                              | Target   |       |        |       |       |       |       |        |  |
|     |              |   |   | 2020                                 | 2021                                 | 2022                                 | 2023                                       | 2024                            |  |   | 2020   | 2021                                     | 2022 | 2023 | 2024 |  |  | 2020   | 2021  | 2022   | 2023  | 2024  | 2025  | 2026  |        |  |
| (1) | (2)          | (3)   | (4)   | (5)                                  | (6)                                  | (7)                                  | (8)  | (9)                             | (10)   | (11)  | (12)   | (13)                                     | (14) | (15) | (16) | (17)   | (18)   | (19)   | (20)  | (21)   | (22)  | (23)  | (24)  | (25)  |        |  |
| 3   | 03           | 03-Memperkuat Moderasi Beragama untuk Mengukuhkan Toleransi, Kerukunan dan Harmoni Sosial                           | Indeks Kerukunan Umat Beragama  |                                      |                                      |                                      |  |                                 |  |   |        |  |      |      |      |  |  |  |       |        |       |       |       |       |        |  |
| 4   | 04           | 04-Peningkatan Budaya Literasi, Inovasi dan Kreativitas Bagi Terwujudnya Masyarakat Berpengetahuan, dan Berkarakter |   |                                      |                                      |                                      |  |                                 |  |   |        |  |      |      |      |  |  |  |       |        |       |       |       |       |        |  |
| V   | 05           | <b>05-Memperkuat Infrastruktur untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi dan Pelayanan Dasar</b>                         |   |                                      |                                      |                                      |  |                                 |  |   |        |  |      |      |      |  |  |  |       |        |       |       |       |       |        |  |
| 1   | 01           | 01-Infrastruktur Pelayanan Dasar  | Persentase rumah tangga yang menempati hunian dengan kecukupan luas lantai per kapita (%)           | 92,84                                | 93,44                                | 94,00                                | 94,63                                      | 95,00                           | PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN                               | Tersedianya Rumah Layak Huni bagi Korban Bencana atau Relokasi Program Pemerintah Provinsi (Unit) | 0      | 50                                       | 50   |      |      | Program Kawasan Permukiman                                   | Jumlah rumah layak huni (Unit)                                   |  | 12816 | 12896  | 12996 | 13096 | 13196 | 13296 |        |  |
|     |              |   | Persentase rumah tangga yang menempati hunian dengan ketahanan bangunan (atap, lantai, dinding) (%) | 82,35                                | 83,50                                | 84,80                                | 86,00                                      | 87,00                           |  |   |        |  |      |      |      |  | Program Pengembangan Perumahan                                   | Persentase pembangunan perumahan untuk korban bencana alam (%)               |       | 0      | 5     | 5     | 5     | 5     | 5      |  |
|     |              |   | Persentase rumah tangga yang memiliki sertifikat hak atas tanah untuk perumahan (%)                 | 55,46                                | 56,85                                | 58,23                                | 59,62                                      | 60,00                           |  |   |        |  |      |      |      |  |  |  |       |        |       |       |       |       |        |  |
|     |              |   | Rasio outstanding KPR terhadap PDB (%)  | 3,05                                 | 3,10                                 | 3,30                                 | 3,60                                       | 4,00                            |  |   |        |  |      |      |      |  |  |  |       |        |       |       |       |       |        |  |
|     |              |   | Persentase rumah tangga yang menempati hunian dengan akses sanitasi (air layak)                     | 78,1%                                | 79,43% akses layak (termasuk)        | 82,07% akses layak                   | 86,03% akses layak                         | 90% akses layak                 |  |   |        |  |      |      |      |  | Program Pengelolaan dan Pengembangan                             | Penduduk Berakses Sanitasi Yang Layak (KK)                                   |       | 8.813  | 9063  | 9313  | 9563  | 9813  | 10.063 |  |
|     |              |   |   |                                      |                                      |                                      |  |                                 |  |   |        |  |      |      |      |  | Program Perumahan dan Kawasan Permukiman Kumuh                   | Luas Kawasan Permukiman Kumuh Yang ditangani (Ha)                            |       | 76,83  | 76,83 | 76,83 | 76,83 | 76,83 | 76,83  |  |
|     |              |   | Persentase rumah tangga yang masih mempraktikkan buang air besar sembarangan (%)                    | 5,95                                 | 4,46                                 | 2,98                                 | 1,49                                       | 0,00                            |  |   |        |  |      |      |      |  | Program Peningkatan Prasarana, Sarana Dan Utilitas Umum (PSU)    | Persentase pembangunan sarana dan prasarana dan utilitas umum (%)            |       | 100    | 100   | 100   | 100   | 100   | 100    |  |
|     |              |   | Persentase rumah tangga yang menempati hunian dengan akses sampah yang terkelola dengan baik (%)    | 72,92% penanganan; 3,70% pengurangan | 73,79% penanganan; 5,51% pengurangan | 75,28% penanganan; 9,13% pengurangan | 77,64% penanganan; 14,57% pengurangan      | 80% penanganan; 20% pengurangan |  |   |        |  |      |      |      |  | Program Pengembangan Sistem Dan Pengelolaan Persampahan Regional | Jumlah sarana dan prasarana pelayanan persampahan yang berfungsi baik (Unit) |       | 5      | 5     | 6     | 6     | 6     | 6      |  |
|     |              |   | Persentase rumah tangga yang menempati hunian dengan akses air minum layak (%)                      | 91,8% (JP:23,6% ,BJP:68,2%)          | 93,8% (JP:25,4% ,BJP:68,4%)          | 95,9% (JP:27,1% ,BJP:68,7%)          | 97,9% (JP:28,9% ,BJP:69%)                  | 100% (JP:30,4% ,BJP:69,5%)      |  |   |        |  |      |      |      |  | Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum | Rumah Tangga Pengguna Air Bersih Perpipaan (Unit)                            |       | 18.853 | 18894 | 18935 | 18976 | 19017 | 19058  |  |
|     |              |   | Persentase rumah tangga yang menempati hunian dengan akses air minum aman (%)                       | 7,30                                 | 8,40                                 | 10,00                                | 12,20                                      | 15,00                           |  |   |        |  |      |      |      |  |  |  |       |        |       |       |       |       |        |  |

| No  | Kode (PN/PP) | RPJMN 2020 - 2024   |   |          |          |          |          |          | RPJMD Provinsi Sulawesi Tenggara 2018-2023                          |   |        |       |      |      |      | RPJMD Kabupaten Konawe Utara 2021 - 2026                            |  |        |      |      |      |       |      |       |  |
|-----|--------------|---|---|----------|----------|----------|----------|----------|---|---|--------|-------|------|------|------|---|--|--------|------|------|------|-------|------|-------|--|
|     |              | Prioritas Nasional / Program Prioritas  | Indikator   | Target   |          |          |          |          | Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan        | Indikator Kinerja Program (Outcome)   | Target |       |      |      |      | Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan        | Indikator Kinerja Program (Outcome)  | Target |      |      |      |       |      |       |  |
|     |              |   |   | 2020     | 2021     | 2022     | 2023     | 2024     |   |   | 2020   | 2021  | 2022 | 2023 | 2024 |   |  | 2020   | 2021 | 2022 | 2023 | 2024  | 2025 | 2026  |  |
| (1) | (2)          | (3)   | (4)   | (5)      | (6)      | (7)      | (8)      | (9)      | (10)  | (11)  | (12)   | (13)  | (14) | (15) | (16) | (17)  | (18)   | (19)   | (20) | (21) | (22) | (23)  | (24) | (25)  |  |
|     |              |   | Volume tampungan air per kapita (m3/kapita)   | 52,50    | 55,18    | 57,06    | 58,10    | 58,50    |   |   |        |       |      |      |      |   |  |        |      |      |      |       |      |       |  |
| 2   | 02           | 02-Infrastruktur Ekonomi  | Panjang jalan tol baru yang beroperasi dalam 5 tahun (2.500 km)                                     |          |          |          |          |          |   |   |        |       |      |      |      |   |  |        |      |      |      |       |      |       |  |
|     |              |   | Jumlah pelabuhan utama (hub) yang memenuhi standar (7 pelabuhan)                                    |          |          |          |          |          |   |   |        |       |      |      |      |   |  |        |      |      |      |       |      |       |  |
|     |              |   | Kinerja tepat waktu (on time performance) penerbangan (90%)   |          |          |          |          |          |   |   |        |       |      |      |      |   |  |        |      |      |      |       |      |       |  |
|     |              |   | Panjang jaringan KA yang beroperasi (7.635 km's)  |          |          |          |          |          |   |   |        |       |      |      |      |   |  |        |      |      |      |       |      |       |  |
| 3   | 03           | 03-Infrastruktur Perkotaan  | Jumlah layanan angkutan umum masal perkotaan yang dibangun dan dikembangkan (Kota)                  |          |          |          |          |          |   |   |        |       |      |      |      |   |  |        |      |      |      |       |      |       |  |
| 4   | 04           | 04-Energi dan   | Rasio elektrifikasi (%)   | 100,00   | 100,00   | 100,00   | 100,00   | 100,00   | PROGRAM PENGELOLAAN   | Rasio Elektrifikasi   | 99,50  | 99,90 | 100  |      |      |   |  |        |      |      |      |       |      |       |  |
|     |              |   | Memenuhi Kebutuhan (Konsumsi) Listrik (kWh)   | 1.142,00 | 1.203,00 | 1.268,00 | 1.336,00 | 1.408,00 |   | Rasio Desa Berlistrik   | 99,90  | 100   | 100  |      |      |   |  |        |      |      |      |       |      |       |  |
|     |              |   | Penurunan Emisi CO2 Pembangkit (juta ton)   | 4,71     | 4,92     | 5,36     | 5,91     | 6,07     |   |   |        |       |      |      |      |   |  |        |      |      |      |       |      |       |  |
| 5   | 05           | 05-Transformasi Digital   | Persentase pertumbuhan sektor TIK (rata-rata)   | 8,80     | 8,80     | 8,80     | 8,80     | 8,80     |   |   |        |       |      |      |      | Program Informasi Dan Komunikasi Publik                             | Persentase Pengelolaan Layanan Pengaduan Berbasis Online Yang didistribusikan ke OPD (%) |        | 0    | 25   | 45   | 69    | 75   | 80    |  |
|     |              |   | Persentase pengguna internet (Persentase)   | 72,60    | 74,20    | 79,20    | 80,70    | 82,30    |   |   |        |       |      |      |      | Program Pengelolaan Aplikasi Informatika                            | Jumlah Penerapan SPBE (aplikasi)   |        | 1    | 3    | 3    | 5     | 5    | 7     |  |
|     |              |   | Persentase populasi yang dijangkau oleh jaringan bergerak pitallebar (4G) Existing Q2 2019 : 97,59% | 97,50    | 98,00    | 98,50    | 99,00    | 100,00   |   |   |        |       |      |      |      |   |  |        |      |      |      |       |      |       |  |
|     |              |   | Proporsi individu yang menguasai/memiliki telepon genggam (Persentase)                              | 70,00    | 72,00    | 73,00    | 74,00    | 75,70    |   |   |        |       |      |      |      |   |  |        |      |      |      |       |      |       |  |
| VI  | 06           | <b>06-Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana, dan Perubahan Iklim</b> |   |          |          |          |          |          |   |   |        |       |      |      |      |   |  |        |      |      |      |       |      |       |  |
| 1   | 01           | 01-Peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup  | Indeks Kualitas Udara (IKU)   | 84,10    | 84,20    | 84,30    | 84,40    | 84,50    | PROGRAM PERENCANAAN LINGKUNGAN HIDUP                                | Cakupan keterpenuhan kajian dampak dan perizinan lingkungan hidup (Persen)          |        | 100   | 100  | 100  |      | Program Pengendalian Pencemaran Dan/Atau Kerusakan Lingkungan Hidup | Indeks Kualitas Udara (nilai)  |        | 91   | 91   | 91   | 91,57 | 92   | 91,95 |  |
|     |              |   |   |          |          |          |          |          | PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP | Cakupan pelaksanaan pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup (Persen) |        | 90    | 90   | 90   |      |   |  |        |      |      |      |       |      |       |  |

| No  | Kode (PN/PP) | RPJMN 2020 - 2024                          |  |        |       |       |       |       | RPJMD Provinsi Sulawesi Tenggara 2018-2023                          |   |        |      |      |      |      | RPJMD Kabupaten Konawe Utara 2021 - 2026                     |                                     |        |      |      |      |       |      |       |  |
|-----|--------------|--|--|--------|-------|-------|-------|-------|---|---|--------|------|------|------|------|--|-------------------------------------|--------|------|------|------|-------|------|-------|--|
|     |              | Prioritas Nasional / Program Prioritas     | Indikator  | Target |       |       |       |       | Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan        | Indikator Kinerja Program (Outcome)   | Target |      |      |      |      | Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan | Indikator Kinerja Program (Outcome) | Target |      |      |      |       |      |       |  |
|     |              |  |  | 2020   | 2021  | 2022  | 2023  | 2024  |   |   | 2020   | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |  |                                     | 2020   | 2021 | 2022 | 2023 | 2024  | 2025 | 2026  |  |
| (1) | (2)          | (3)  | (4)  | (5)    | (6)   | (7)   | (8)   | (9)   | (10)  | (11)  | (12)   | (13) | (14) | (15) | (16) | (17)   | (18)                                | (19)   | (20) | (21) | (22) | (23)  | (24) | (25)  |  |
|     |              |  | Indeks Kualitas Air (IKA)  | 55,10  | 55,20 | 55,30 | 55,40 | 55,50 | PROGRAM PERENCANAAN LINGKUNGAN HIDUP                                | Cakupan keterpenuhan kajian dampak dan perizinan lingkungan hidup (Persen)          |        | 100  | 100  | 100  |      |  | Indeks Kualitas Air (nilai)         |        | 2    | 2    | 2    | 2,296 | 2    | 2,656 |  |
|     |              |  |  |        |       |       |       |       | PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP | Cakupan pelaksanaan pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup (Persen) |        | 90   | 90   | 90   |      |  |                                     |        |      |      |      |       |      |       |  |
|     |              |  | Indeks Kualitas Air Laut (IKAL)  | 58,50  | 59,00 | 59,50 | 60,00 | 60,50 | PROGRAM PERENCANAAN LINGKUNGAN HIDUP                                | Cakupan keterpenuhan kajian dampak dan perizinan lingkungan hidup (Persen)          |        | 100  | 100  | 100  |      |  |                                     |        |      |      |      |       |      |       |  |
|     |              |  |  |        |       |       |       |       | PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP | Cakupan pelaksanaan pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup (Persen) |        | 90   | 90   | 90   |      |  |                                     |        |      |      |      |       |      |       |  |
|     |              |  | Indeks Kualitas Tutupan Lahan dan Ekosistem Gambut (IKTL)                          | 61,60  | 62,50 | 63,50 | 64,50 | 65,50 | PROGRAM PERENCANAAN LINGKUNGAN HIDUP                                | Cakupan keterpenuhan kajian dampak dan perizinan lingkungan hidup (Persen)          |        | 100  | 100  | 100  |      | Program Pengelolaan Keanekaragaman Hayati (Kehati)           | Indeks Tutupan Lahan (%)            |        | 78   | 78   | 78   | 78,04 | 78   | 78,22 |  |
|     |              |  |  |        |       |       |       |       | PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP | Cakupan pelaksanaan pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup (Persen) |        | 90   | 90   | 90   |      |  |                                     |        |      |      |      |       |      |       |  |
| 2   | 02           | 02-Peningkatan Ketahanan Bencana dan Iklim | Persentase potensi kehilangan PDB akibat dampak bencana (persen)                   | 0,10   | 0,10  | 0,10  | 0,10  | 0,10  |   |   |        |      |      |      |      |  |                                     |        |      |      |      |       |      |       |  |
|     |              |  | Persentase penurunan potensi kehilangan PDB sektor terdampak bahaya iklim (persen) | 0,34   | 0,59  | 0,81  | 1,00  | 1,15  |   |   |        |      |      |      |      |  |                                     |        |      |      |      |       |      |       |  |
|     |              |  | Kecepatan penyampaian informasi peringatan dini bencana kepada masyarakat (menit)  | 5,00   | 4,50  | 4,00  | 3,50  | 3,00  |   |   |        |      |      |      |      |  |                                     |        |      |      |      |       |      |       |  |
| 3   | 03           | 03-Pembangunan Rendah Karbon               | Persentase penurunan emisi GRK terhadap baseline pada sektor energi (persen)       | 11,80  | 12,50 | 12,80 | 12,80 | 13,20 |   |   |        |      |      |      |      |  |                                     |        |      |      |      |       |      |       |  |
|     |              |  | Persentase penurunan emisi GRK terhadap baseline pada sektor lahan (persen)        | 45,80  | 50,70 | 53,10 | 57,20 | 58,30 |   |   |        |      |      |      |      |  |                                     |        |      |      |      |       |      |       |  |

| No  | Kode (PN/PP) | RPJMN 2020 - 2024  |  |        |       |       |       |       | RPJMD Provinsi Sulawesi Tenggara 2018-2023                   |                                     |        |      |      |      |      | RPJMD Kabupaten Konawe Utara 2021 - 2026                     |                                     |        |      |      |      |      |      |      |  |  |  |  |  |
|-----|--------------|--|--|--------|-------|-------|-------|-------|--|-------------------------------------|--------|------|------|------|------|--|-------------------------------------|--------|------|------|------|------|------|------|--|--|--|--|--|
|     |              | Prioritas Nasional / Program Prioritas   | Indikator  | Target |       |       |       |       | Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan | Indikator Kinerja Program (Outcome) | Target |      |      |      |      | Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan | Indikator Kinerja Program (Outcome) | Target |      |      |      |      |      |      |  |  |  |  |  |
|     |              |  |  | 2020   | 2021  | 2022  | 2023  | 2024  |  |                                     | 2020   | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |  |                                     | 2020   | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |  |  |  |  |  |
| (1) | (2)          | (3)  | (4)  | (5)    | (6)   | (7)   | (8)   | (9)   | (10)   | (11)                                | (12)   | (13) | (14) | (15) | (16) | (17)   | (18)                                | (19)   | (20) | (21) | (22) | (23) | (24) | (25) |  |  |  |  |  |
|     |              |  | Persentase penurunan emisi GRK terhadap baseline pada sektor limbah (persen)               | 8,50   | 9,00  | 9,30  | 9,40  | 9,40  |  |                                     |        |      |      |      |      |  |                                     |        |      |      |      |      |      |      |  |  |  |  |  |
|     |              |  | Persentase penurunan emisi GRK terhadap baseline pada sektor IPPU (persen)                 | 2,00   | 2,30  | 2,50  | 2,60  | 2,90  |  |                                     |        |      |      |      |      |  |                                     |        |      |      |      |      |      |      |  |  |  |  |  |
|     |              |  | Persentase penurunan emisi GRK terhadap baseline pada sektor pesisir dan kelautan (persen) | 6,50   | 6,60  | 6,80  | 7,00  | 7,30  |  |                                     |        |      |      |      |      |  |                                     |        |      |      |      |      |      |      |  |  |  |  |  |
| VII | 07           | <b>07-Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik</b> |  |        |       |       |       |       |  |                                     |        |      |      |      |      |  |                                     |        |      |      |      |      |      |      |  |  |  |  |  |
| 1   | 01           | 01-Konsolidasi Demokrasi   | n/a  |        |       |       |       |       |  |                                     |        |      |      |      |      |  |                                     |        |      |      |      |      |      |      |  |  |  |  |  |
| 2   | 02           | 02-Optimalisasi Kebijakan Luar Negeri  | Indeks pengaruh dan peran Indonesia di dunia internasional                                 | 95,07  | 95,27 | 95,47 | 95,67 | 95,67 |  |                                     |        |      |      |      |      |  |                                     |        |      |      |      |      |      |      |  |  |  |  |  |
| 3   | 03           | 03-Penegakan Hukum Nasional  | Indeks Pembangunan Hukum   | 0,65   | 0,67  | 0,69  | 0,71  | 0,70  |  |                                     |        |      |      |      |      |  |                                     |        |      |      |      |      |      |      |  |  |  |  |  |
| 4   | 04           | 04-Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola   | Persentase Instansi Pemerintah Pusat (Kementerian/Lembaga) dengan Indeks RB Baik Keatas*   | 70,00  | 75,00 | 80,00 | 85,00 | 85,00 |  |                                     |        |      |      |      |      |  |                                     |        |      |      |      |      |      |      |  |  |  |  |  |
|     |              |  | Persentase Instansi Pemerintah Daerah (Provinsi) dengan Indeks RB Baik Keatas*             | 50,00  | 60,00 | 70,00 | 80,00 | 85,00 |  |                                     |        |      |      |      |      |  |                                     |        |      |      |      |      |      |      |  |  |  |  |  |
|     |              |  | Persentase Instansi Pemerintah Daerah (Kabupaten/Kota) dengan Indeks RB Baik Keatas*       | 30,00  | 35,00 | 45,00 | 55,00 | 70,00 |  |                                     |        |      |      |      |      |  |                                     |        |      |      |      |      |      |      |  |  |  |  |  |
| 5   | 05           | 05-Menjaga Stabilitas Keamanan Nasional  | Global Fire Power Index  | 0,26   | 0,25  | 0,24  | 0,22  | 0,20  |  |                                     |        |      |      |      |      |  |                                     |        |      |      |      |      |      |      |  |  |  |  |  |
|     |              |  | Global Terrorism Index   | 4,44   | 4,39  | 4,34  | 4,29  | 4,24  |  |                                     |        |      |      |      |      |  |                                     |        |      |      |      |      |      |      |  |  |  |  |  |
|     |              |  | Proporsi orang yang merasa aman berjalan sendirian   | >55%   | >55%  | >55%  | >60%  | >60%  |  |                                     |        |      |      |      |      |  |                                     |        |      |      |      |      |      |      |  |  |  |  |  |
|     |              |  | Indeks Keamanan dan Ketertiban Nasional  | 3,10   | 3,20  | 3,20  | 3,30  | 3,40  |  |                                     |        |      |      |      |      |  |                                     |        |      |      |      |      |      |      |  |  |  |  |  |

# BAB IX PENUTUP



RPJMD sebagai dokumen rencana pembangunan daerah yang merupakan pedoman penyelenggaraan pemerintahan daerah yang harus ditaati oleh seluruh pemangku kepentingan. RPJMD merupakan penjabaran dari visi, misi, dan program kepala daerah yang memuat tujuan, sasaran, strategi, arah kebijakan, pembangunan daerah dan keuangan daerah, serta program Perangkat Daerah dan lintas Perangkat Daerah yang disertai dengan kerangka pendanaan bersifat indikatif untuk jangka waktu 5 (lima) tahun. RPJMD Kabupaten Konawe Utara tahun 2021-2026 merupakan pedoman bagi Pemerintah Kabupaten Konawe Utara dalam melaksanakan pembangunan. Agar pelaksanaan RPJMD dapat berjalan dengan baik, perlu diatur beberapa pedoman transisi dan kaidah pelaksanaan sebagai berikut:

### **9.1 Pedoman Transisi**

RPJMD Kabupaten Konawe Utara tahun 2021-2026 berlaku untuk kurun waktu lima tahun sejak tahun 2021 hingga tahun 2026. Untuk menjaga kesinambungan pembangunan serta mengisi kekosongan perencanaan setelah RPJMD tahun berakhir, maka RPJMD ini menjadi pedoman dalam penyusunan RKPD dan RAPBD tahun 2027.

### **9.2 Kaidah Pelaksanaan**

Kaidah pelaksanaan bermakna aturan atau patokan dalam pelaksanaan RPJMD Tahun 2021-2026 adalah sebagai berikut:

1. Pemerintah Daerah berkewajiban menyebarluaskan peraturan daerah tentang RPJMD kepada masyarakat;
2. Seluruh perangkat daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Konawe Utara dan pemangku kepentingan agar melaksanakan program-program RPJMD dengan sebaik-baiknya mengarah pada pencapaian target- target yang telah ditetapkan dalam RPJMD;
3. Seluruh perangkat daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Konawe Utara berkewajiban melakukan penyusunan Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah mengacu pada RPJMD. Renstra tersebut akan menjadi pedoman dalam penyusunan Renja Perangkat Daerah tahun 2022 hingga tahun 2026;

4. Dalam rangka meningkatkan efektivitas pelaksanaan RPJMD, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah berkewajiban melakukan pengendalian dan evaluasi terhadap pelaksanaan dan hasil RPJMD.

Semoga rencana pembangunan yang tercantum dalam RPJMD Kabupaten Konawe Utara tahun 2021-2026 ini dapat berjalan dengan baik dan dapat mencapai target-target yang telah ditetapkan, sehingga visi jangka menengah Kabupaten Konawe Utara yaitu: “Konawe Utara Lebih Sejahtera dan Berdaya Saing” dapat terwujud.

**BUPATI KONAWE UTARA,**



**Dr. Ir. H. RUKSAMIN, ST, M.Si, IPU, ASEAN.Eng**